



**LAPORAN PENYELENGARAAN
PEMERINTAH DAERAH (LPPD)
KABUPATEN BELITUNG
TAHUN 2020**

**PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG
TAHUN ANGGARAN 2021**

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Belitung Tahun 2020 dapat diselesaikan tepat waktu sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. LPPD Kabupaten/Kota disampaikan oleh Bupati/Walikota kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir dan akan digunakan sebagai bahan evaluasi dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh Pemerintah Pusat.

Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2020 berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta disesuaikan dengan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 05 Tahun 2021 tentang Pelaporan Kinerja Pemerintah Daerah yang mengamanatkan bahwa Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota disusun menjadi satu dengan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD).

Kami menyadari bahwa dalam LPPD Kabupaten Belitung ini masih ada hal-hal yang belum teruraikan secara sempurna dari penyampaian data Indikator Kinerja Kunci (IKK) dan capaian kinerja. Berkenaan dengan hal itu, kami akan terus melakukan peninjauan ulang terhadap LPPD Kabupaten Belitung ini dan melakukan upaya-upaya perbaikan agar lebih baik lagi

Akhir kata, semoga LPPD ini dapat berguna bagi kita semua untuk dijadikan acuan dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan pada masa yang akan datang.

Tanjungpandan, Maret 2021



DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.1.1 Penjelasan Umum	1
1.1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah	9
1.1.3 Penerapan Standar Pelayanan Minimal	19
BAB II CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	22
2.1 CAPAIAN KINERJA MAKRO	22
2.1.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	23
2.1.2 Angka Kemiskinan	23
2.1.3 Angka Pengangguran	24
2.1.4 Pertumbuhan Ekonomi	24
2.1.5 Pendapatan Per Kapita	25
2.1.6 Ketimpangan Pendapatan (<i>Gini Ratio</i>)	25
2.2 CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	26
2.2.1 Indikator Kinerja Kunci Keluaran	26
2.2.2 Indikator Kinerja Kunci Hasil	67
2.2.3 Indikator Kinerja Kunci untuk Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	76
2.3 AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DAERAH	78
BAB III CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN	233
BAB IV PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL	234
4.1 URUSAN PENDIDIKAN	234
4.2 URUSAN KESEHATAN	237
4.3 URUSAN PEKERJAAN UMUM	243
4.4 URUSAN PERUMAHAN RAKYAT	248
4.5 URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT ...	252
4.6 URUSAN SOSIAL	257
4.7 PROGRAM DAN KEGIATAN	261
BAB V PENUTUP	264
LAMPIRAN 1 PENDUDUK BERDASARKAN PEKERJAAN	
LAMPIRAN 2 PROGRAM DAN KEGIATAN	
LAMPIRAN 3 CAPIAN PRESTASI DAN PENGHARGAAN YANG DITERIMA PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2020	



PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG
INSPEKTORAT

Jl. JEND. A. YANI NO. 08 TANJUNGPANDAN TELPON 21048

PERNYATAAN TELAH DIREVIU

Kami telah mereviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Pemerintah Kabupaten Belitung untuk Tahun Anggaran 2020 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah menjadi tanggung jawab manajemen.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan Penyelenggaraan Pemerintah daerah telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan didalam laporan Penyelenggaraan Pemerintah daerah Ini .

Tanjungpandan, 31 Maret 2021

INSPEKTUR KABUPATEN BELITUNG,



I. ARPANI

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 196307051990031018

The logo of Kabupaten Belitung is a shield-shaped emblem. At the top, a banner reads "KABUPATEN BELITUNG". The central part of the shield features a stylized figure, possibly a bird or a person, with wings spread, set against a background of clouds and a sun. Below the figure is a banner with the motto "MAJU TERUS MAWAS DINI".

**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
(L P P D)
KABUPATEN BELITUNG
TAHUN 2020**

**BAB I
PENDAHULUAN**



BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

1.1.1 Penjelasan Umum

a. Undang- Undang Pembentukan Daerah

Pembentukan Daerah Kabupaten Belitung didasarkan pada peraturan perundang-undangan. Peraturan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tk.II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
2. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, tambahan Lembaran Negara Nomor 4033);

b. Data Geografis Wilayah

Secara geografis, Kabupaten Belitung terletak antara 107°08' BT sampai 107°58' BT dan 02°30' LS sampai 03°15' LS. Luas wilayah daratan dan lautan sebesar 8.656,69 km², dengan luas wilayah daratan sebesar 2.293,69 km² atau 229.369 Ha dan sisanya berupa lautan, dengan batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Cina Selatan,
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Belitung Timur,
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Jawa, dan
- Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Gaspar.

Kabupaten Belitung merupakan bagian dari wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang terbagi menjadi lima kecamatan dengan Tanjungpandan sebagai ibu kota kabupaten. Luas wilayah kecamatan terbesar adalah Kecamatan Membalong, dan yang terkecil Kecamatan Selat Nasik (kecamatan kepulauan). Luas wilayah dari lima kecamatan adalah sebagai berikut :

- | | |
|-----------------|---------------------------|
| - Membalong | : 909,550 Km ² |
| - Tanjungpandan | : 378,448 Km ² |
| - Badau | : 458,200 Km ² |
| - Sijuk | : 413,992 Km ² |
| - Selat Nasik | : 133,500 Km ² |

Kabupaten ini terdiri dari sekitar 163 buah pulau besar dan kecil di mana pulau yang terbesar adalah Pulau Belitung. Selain itu, beberapa pulau-pulau besar lainnya adalah Pulau Seliu, Pulau Mendanau, dan Pulau Nadu.



Tabel 1.1
Jumlah Penyebaran Pulau Menurut Kecamatan di Kabupaten Belitung

No.	Kecamatan	Jumlah Pulau
1.	Tanjungpandan	17
2.	Membalong	35
3.	Selat Nasik	38
4.	Sijuk	55
5.	Badau	18
Jumlah		163

Sumber : Bappeda Kab. Belitung

Kabupaten Belitung mempunyai iklim tropis dan basah dengan variasi curah hujan bulanan pada tahun 2020 antara 0 mm sampai 347,4 mm dengan jumlah hari hujan antara 1 hari sampai 25 hari setiap bulannya. Curah hujan tertinggi pada tahun 2020 terjadi pada bulan Desember yang mencapai 347,4 mm. Rata-rata temperatur udara pada tahun 2020 bervariasi antara 26,1°C sampai 33,9°C, dimana kelembaban udaranya bervariasi antara 77 persen sampai 91 persen, dan tekanan udara antara 1010,1 mb sampai dengan 1012,0 mb.

Daerah yang paling tinggi di Kabupaten Belitung hanya mempunyai ketinggian kurang lebih 500 m dari atas permukaan laut dengan puncak tertinggi ada di daerah Gunung Tajam. Sedangkan daerah hilir (pantai) terdiri atas beberapa Daerah Aliran Sungai (DAS) utama, yakni :

- Sebelah Utara oleh DAS Buding
- Sebelah Selatan oleh DAS Pala & Kembiri, dan
- Sebelah Barat oleh DAS Brang dan Cerucuk

Keadaan tanah di Kabupaten Belitung pada umumnya didominasi oleh kwarsa dan pasir, batuan aluvial dan batuan granit. Menurut letaknya, batuan kwarsa dan pasir tersebar secara merata di seluruh wilayah kecamatan dengan luas total mencapai 266.865 ha atau 56,98 persen dari luas Kabupaten Belitung. Untuk batuan aluvial dapat ditemukan hampir di seluruh wilayah kecamatan, kecuali Kecamatan Selat Nasik dengan luas total seluruhnya mencapai 133,5 Km² atau 5,82 persen dari luas Kabupaten Belitung.

Kondisi topografi Pulau Belitung pada umumnya bergelombang dan berbukit-bukit telah membentuk pola aliran sungai di daerah ini menjadi pola sentrifugal, yang mana sungai-sungai yang ada berhulu di daerah pegunungan dan mengalir ke daerah pantai. Sedangkan daerah aliran sungai mempunyai pola aliran sungainya berbentuk seperti pohon.

c. Penduduk

Berdasarkan hasil pendataan, jumlah penduduk Kabupaten Belitung per Desember 2020 berjumlah 177.472 jiwa dengan 59.607 Kepala Keluarga. Sebagian besar penduduk Kabupaten Belitung berkedudukan di Kecamatan Tanjungpandan sebanyak 101.016 jiwa (56,91%) dengan rincian per kecamatan sebagai berikut :

Tabel 1.2
Jumlah Penduduk Kabupaten Belitung Menurut Kecamatan Tahun 2020

No.	Kecamatan	Jenis Kelamin		Jumlah	Jumlah KK
		Laki-Laki	Perempuan		
1.	Tanjungpandan	50.944	50.072	101.016	33.626
2.	Membalong	13.049	12.340	25.389	8.965
3.	Selat Nasik	3.098	2.875	5.973	1.988
4.	Sijuk	15.597	14.980	30.577	10.108
5.	Badau	7.488	7.029	14.517	4.920
Jumlah		90.176	87.296	177.472	59.607

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Belitung 2020



Berdasarkan tingkat pendidikan, penduduk Kabupaten Belitung Tahun 2020 paling banyak adalah lulusan SD/ sederajat yaitu sebanyak 43.986 orang (24,78%), hal ini berarti masih banyak yang belum menuntaskan pendidikan dasar wajib belajar 9 (sembilan) tahun. Sedangkan dari segi jenis pekerjaan, penduduk Kabupaten Belitung paling banyak bekerja sebagai Buruh Harian Lepas sebanyak 19.116 orang. Untuk peran serta perempuan dalam pekerjaan hanya sebagian kecil saja perempuan di Kabupaten Belitung memiliki pekerjaan dan mayoritas mengurus rumah tangga sebagaimana rincian Jumlah Penduduk berdasarkan mata pencaharian terlampir dalam laporan ini.

Tabel 1.6
Jumlah Penduduk Kabupaten Belitung Menurut Pendidikan Tahun 2020

Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Tdk/Blm Sekolah	16.869	16.241	33.110
Blm Tamat SD/Sederajat	15.340	14.535	29.875
Tamat SD/Sederajat	21.602	22.384	43.986
SLTP/Sederajat	12.973	12.406	25.379
SLTA/Sederajat	18.694	16.481	35.175
D-I/II	411	651	1.062
Akademi/D-III/Sarjana Muda	1.396	1.600	2.996
D-IV/Strata-I	2.762	2.930	5.692
Strata-II	128	66	194
Strata-III	1	2	3
Jumlah	90.176	87.296	177.472

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Belitung 2020

d. Kecamatan dan Desa/Kelurahan

Wilayah administrasi Kabupaten Belitung dibagi dalam 5 (lima) kecamatan, 7 (tujuh) Kelurahan dan 42 desa, yang terdiri dari :

Tabel 1.7
Kecamatan dan Desa/Kelurahan di Kabupaten Belitung

No	Kecamatan	Desa / Kelurahan
1	Tanjungpandan	a. Kelurahan Kota b. Kelurahan Parit c. Kelurahan Kampong Damai d. Kelurahan Paal Satu e. Kelurahan Lesung Batang f. Kelurahan Pangkallalang g. Kelurahan Tanjungpendam h. Desa Buluh Tumbang i. Desa Perawas j. Desa Dukong k. Desa Juru Seberang l. Desa Air Saga m. Desa Air Merbau n. Desa Aik Pelempang Jaya o. Desa Aik Ketekok p. Desa Aik Rayak
2	Membalong	a. Desa Membalong b. Desa Perpat c. Desa Lassar d. Desa Simpang Rusa e. Desa Kembiri f. Desa Bantan g. Desa Tanjung Rusa h. Desa Mentigi i. Desa Pulau Seliu j. Desa Pulau Sumedang k. Desa Gunung Riting l. Desa Padang Kandis
3	Selat Nasik	a. Desa Selat Nasik b. Desa Petaling c. Desa Suak Gual d. Desa Pulau Gersik



4	Sijuk	a. Desa Sijuk b. Desa Batu Itam c. Desa Terong d. Desa Air Seruk e. Desa Tanjung Binga f. Desa Air Selumar g. Desa Sungai Padang h. Desa Keciput i. Desa Pelepak Pute j. Desa Tanjong Tinggi
5	Badau	a. Desa Badau b. Desa Air Batu Buding c. Desa Sungai Samak d. Desa Kacang Butor e. Desa Cerucuk f. Desa Pegantungan g. Desa Ibul
3	Selat Nasik	e. Desa Selat Nasik f. Desa Petaling g. Desa Suak Gual h. Desa Pulau Gersik
4	Sijuk	k. Desa Sijuk l. Desa Batu Itam m. Desa Terong n. Desa Air Seruk o. Desa Tanjung Binga p. Desa Air Selumar q. Desa Sungai Padang r. Desa Keciput s. Desa Pelepak Pute t. Desa Tanjong Tinggi
5	Badau	h. Desa Badau i. Desa Air Batu Buding j. Desa Sungai Samak k. Desa Kacang Butor l. Desa Cerucuk m. Desa Pegantungan n. Desa Ibul

Sumber : Bagian Pemerintahan Setda Kab. Belitung

e. Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah dan Pegawai Pemerintah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, telah dilakukan penataan kembali Organisasi Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung. Susunan Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 4 Tahun 2019 sebagai berikut :

Tabel 1.8
Perangkat Daerah di Kabupaten Belitung

No	Perangkat Daerah	Tipe	Urusan/Fungsi
1	Sekretariat Daerah	A	unsur penunjang sekretariat
2	Sekretariat DPRD	C	unsur penunjang sekretariat DPRD
3	Inspektorat Daerah	A	unsur penunjang pengawasan
4	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	A	urusan pemerintahan bidang pendidikan dan bidang kebudayaan
5	Dinas Kesehatan	A	urusan pemerintahan bidang kesehatan
6	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	A	urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, dan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan pemukiman
7	Dinas Pemuda dan Olah Raga	A	urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olah raga
8	Dinas Pariwisata	A	urusan pemerintahan bidang pariwisata
9	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan,	A	urusan pemerintahan bidang sosial dan



	dan Perlindungan Anak		urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
10	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	B	urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, dan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	A	urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
12	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian	A	urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan urusan pemerintahan bidang perindustrian
13	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan, dan Tenaga Kerja	A	urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, urusan pemerintahan bidang perdagangan, dan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja
14	Dinas Perhubungan	A	urusan pemerintahan bidang perhubungan
15	Dinas Lingkungan Hidup	A	urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup
16	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	A	urusan pemerintahan bidang pertanian dan urusan pemerintahan bidang pangan
17	Dinas Perikanan	A	urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan
18	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	A	urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan urusan pemerintahan bidang kearsipan
19	Dinas Komunikasi dan Informatika	A	urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik
20	Satuan Polisi Pamong Praja	B	urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum
21	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	B	fungsi penunjang bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan
22	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	A	fungsi penunjang bidang penelitian dan pengembangan
23	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	A	fungsi penunjang bidang keuangan
24	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	A	fungsi penunjang bidang pendapatan
25	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	A	urusan bidang bencana dan sub bidang kebakaran
26	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	A	urusan kesatuan bangsa dan politik
27	Kecamatan Tanjungpandan	A	unsur penunjang kewilayahan
28	Kecamatan Membalong	A	unsur penunjang kewilayahan
29	Kecamatan Sijuk	A	unsur penunjang kewilayahan
30	Kecamatan Badau	A	unsur penunjang kewilayahan
31	Kecamatan Selat Nasik	A	unsur penunjang kewilayahan

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kab. Belitung

Berdasarkan Peraturan Bupati Belitung Nomor 52 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Belitung Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung, Dinas dapat membentuk UPT untuk melaksanakan



sebagian kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya. Adapun Dinas yang memiliki UPT adalah sebagai berikut :

Tabel 1.9
Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Perangkat Daerah

No	Dinas	Nama UPT	Jumlah
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	UPT Satuan Pendidikan SD	114
		UPT Satuan Pendidikan SMP	21
		UPT Satuan Pendidikan Sanggar Kegiatan Belajar	1
		UPT Museum	1
2	Dinas Kesehatan	UPT Laboratorium Kesehatan	1
		UPT Puskesmas	9
		UPT RSUD dr. H. Marsidi Judono (BLUD)	1
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	UPT Pengelolaan Air Minum	1
		UPT Sarana Prasarana, Perbekalan dan Laboratorium	1
4	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	UPT Perbenihan dan Perbibitan	1
5	Dinas Perikanan	UPT Perikanan Budidaya	1
	Dinas Perhubungan	UPT Pengelolaan Prasarana Teknis Perhubungan	1
6	Dinas Lingkungan Hidup	UPT Laboratorium Lingkungan	1
		UPT Pengelolaan Sampah	1
7	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Tenaga Kerja	UPT Metrologi Legal	1

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kab. Belitung

Jumlah pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung berdasarkan data Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) Tahun 2020 sebanyak 3.213 orang yang terdiri dari sebagai berikut :

Tabel 1.10
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Belitung Tahun 2020

NO	SATUAN ORGANISASI	JUMLAH PERSONIL (PNS)
1	Sekretariat Daerah	98
2	Sekretariat DPRD	25
3	Staf Ahli Bupati	3
4	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	37
5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	20
6	Inspektorat	41
7	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	42
8	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	35
9	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	18
10	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	16
11	Dinas Perhubungan	42
12	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	88
13	Dinas Perikanan	40
14	Dinas Komunikasi dan Informatika	33
15	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	29
16	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	53
17	Dinas Kesehatan	61
18	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Tenaga Kerja	35
19	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	69
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	23
21	Dinas Pariwisata	33
22	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	23



NO	SATUAN ORGANISASI	JUMLAH PERSONIL (PNS)
23	Dinas Pemuda dan Olah Raga	20
24	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian	29
25	Dinas Lingkungan Hidup	40
26	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	22
27	Satuan Polisi Pamong Praja	28
28	Kecamatan Tanjungpandan	20
29	Kecamatan Badau	14
30	Kecamatan Sijuk	20
31	Kecamatan Membalong	19
32	Kecamatan Selat Nasik	9
33	Kelurahan Kota	7
34	Kelurahan Parit	5
35	Kelurahan Kampong Damai	5
36	Kelurahan Paal Satu	6
37	Kelurahan Lesung Batang	6
38	Kelurahan Pangkallalang	5
39	Kelurahan Tanjung Pendam	8
40	UPT RSUD dr.H.Marsidi Judono	360
41	UPT Puskesmas Selat Nasik	33
42	UPT Puskesmas Tanjung Binga	39
43	UPT Puskesmas Membalong	40
44	UPT Puskesmas Badau	38
45	UPT Puskesmas Perawas	37
46	UPT Puskesmas Sijuk	34
47	UPT Puskesmas Air Saga	54
48	UPT Puskesmas Tanjungpandan	58
49	UPT Puskesmas Simpang Rusa	29
50	UPT Sekolah-sekolah dan SKB	1.364
JUMLAH		3.213

Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 2020

f. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Pengelolaan keuangan daerah harus memperhatikan tingkat penerimaan pendapatan daerah, dengan demikian pendapatan daerah dalam proses pengelolaan daerah harus dituangkan terlebih dahulu. Tanpa diketahuinya sumber-sumber pendapatan daerah, maka pengelolaan keuangan daerah tidak akan dapat dikelola secara sempurna. Kemudian baru diikuti dengan langkah-langkah lainnya, sesuai aturan yang berlaku. Berbagai upaya perlu dilakukan dalam mendukung pendapatan Kabupaten Belitung, baik yang menyangkut pendapatan asli daerah, dana perimbangan maupun lain-lain pendapatan yang sah seperti pendapatan bagi hasil pajak provinsi dan pemerintah daerah lainnya, dana penyesuaian dan otonomi khusus, dan bantuan keuangan bagi hasil dari pemerintah lain tetap harus dilakukan secara optimal, dengan harapan mampu meningkatkan pendapatan daerah secara optimal.

Selama periode 2019-2020, target pendapatan daerah secara keseluruhan menurun dari Rp1.045.686.545.099,00 pada tahun 2019 dan menjadi Rp 970.146.286.359,00 pada tahun 2020. Hal ini dikarenakan sepanjang Tahun 2020 merupakan masa pandemi covid-19 yang telah melumpuhkan perkeonomian masyarakat. Berdasarkan data pada tabel target dan realisasi pendapatan tahun 2019-2020, realisasi pendapatan Tahun 2019 persentase pendapatan cenderung melebihi target dengan persentase sebesar 103,56% sedangkan pada Tahun 2020 menurun dan tidak mencapai target yang ditetapkan, persentase yang dicapai sebesar 98,65% seperti yang ditunjukkan pada tabel berikut:



Tabel 1.11
Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2019-2020

Tahun	Target (Rupiah)	Realisasi (Rupiah)	Persentase Realisasi (%)
2019	1.045.686.545.099,00	1.082.784.254.354,25	103,56
2020	970.146.286.359,00	957.021.589.492,11	98,65

Sumber: Badan Pengelolaan Pendapatan dan Retribusi Daerah Kabupaten Belitung 2020

Pendapatan daerah Kabupaten Belitung ditopang oleh tiga komponen sumber pendapatan daerah yang meliputi pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah. Berbagai sumber pendapatan tersebut memiliki kontribusi terhadap total belanja daerah. Kontribusi tiap komponen pendapatan terhadap total belanja daerah Kabupaten Belitung dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel 1.12
Target, Realisasi dan Persentase Pencapaian Target Per Komponen Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2019-2020

No	Komponen Pendapatan	2020			2019		
		Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
1	Pendapatan Asli Daerah	145.075.360.800,00	162.134.305.440,46	111,76	154.360.631.099,00	177.674.823.550,42	115,10
2	Dana Perimbangan	634.413.715.145,00	617.730.480.634,00	97,37	731.323.046.000,00	735.509.551.933,00	100,57
3	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	190.657.210.414,00	177.156.803.417,65	92,92	160.002.868.000,00	169.599.878.870,83	106,00
Jumlah		970.146.286.359,00	957.021.589.492,11	98,65	1.045.686.545.099,00	1.082.784.254.354,25	103,55

Sumber: Badan Pengelolaan Pendapatan dan Retribusi Daerah Kabupaten Belitung 2020

Masing-masing komponen pendapatan daerah memiliki kontribusi yang berbeda terhadap realisasi belanja daerah daerah. Berdasarkan tabel di atas, kontribusi terbesar pendapatan daerah tahun 2019 dan 2020 bersumber dari dana perimbangan dengan kontribusi pada tahun 2019 sebesar 67,92% dan Tahun 2020 sebesar 64,54%. Komponen kedua pada Tahun 2019 adalah pendapatan asli daerah dengan kontribusi sebesar 16,4% sedangkan pada Tahun 2020 komponen kedua adalah Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebesar 18,51%. Untuk Komponen ketiga pada Tahun 2019 adalah Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebesar 15,66% sedangkan pada Tahun 2020 komponen ketiga adalah Pendapatan Asli Daerah yang berkontribusi sebesar 16,94%.

Pada Tahun Anggaran 2020, alokasi belanja operasi mempunyai target anggaran sebesar Rp894.162.103.888,69 dan terealisasi Rp779.425.473.731,31 dengan persentase pencapaian target sebesar 87,17%, sedangkan pada belanja modal memiliki target Rp154.155.077.801,00 dan terealisasi Rp139.687.352.160,12 atau 90,61%. Sementara itu, target belanja tak terduga sebesar Rp10.200.000.000,00 dan terealisasi Rp4.200.711.625,00 atau 41,18%. Berdasarkan akumulasi komponen belanja di atas maka belanja daerah pada tahun 2020 memiliki target Rp1.058.517.181.689,69 dengan realisasi sebesar Rp923.313.537.516,43 atau 87,23%. Tahun Anggaran 2020 belanja daerah juga mengalami penurunan jika dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2019 baik pada target maupun realisasi anggaran, dimana realisasi anggaran belanja berkurang sebesar Rp 59.961.087.800,14. Jika mengacu kepada data yang ada terlihat bahwa persentase pencapaian target belanja daerah masih berada di bawah target, hal ini terjadi lebih diakibatkan oleh adanya upaya penghematan anggaran melalui efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dengan catatan tidak akan mempengaruhi volume program dan kegiatan yang telah ditargetkan dan juga dikarenakan adanya



pendemi covid-19 yang berdampak pada terbatasnya ruang gerak dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang ada di Organisasi Perangkat Daerah.

Rincian target, realisasi dan persentase pencapaian target per komponen belanja daerah dijelaskan tabel berikut ini :

Tabel 1.13
Target, Realisasi dan Persentase Pencapaian Target Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2019-2020

No	Komponen Belanja	2020			2019		
		Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
1	Belanja Operasi	894.162.103.888,69	779.425.473.731,31	87,17	880.796.979.651,01	719.726.778.870,01	81,71
2	Belanja Modal	154.155.077.801,00	139.687.352.160,12	90,61	253.464.804.560,00	235.897.605.042,56	93,07
3	Belanja Tak Terduga	10.200.000.000	4.200.711.625	41,18	3.000.000.000	0	0,00
Jumlah		1.058.517.181.689,69	923.313.537.516,43	87,23	1.137.261.784.211,01	983.274.625.316,57	86,45

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Belitung 2020

1.1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah

a. Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah

Permasalahan strategis pembangunan Kabupaten Belitung dapat dijabarkan dalam 4 (empat) pokok masalah utama yaitu :

1. Permasalahan Kualitas Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia memiliki peran penting dalam proses pembangunan daerah dengan kualitas yang baik agar dapat berkontribusi dalam pelaksanaan pembangunan. Sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara otomatis akan memberikan sumbangsih atas keberhasilan pembangunan daerah disektor-sektor lainnya dan hal tersebut secara positif akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Rumusan permasalahan yang berhubungan dengan kualitas sumber daya manusia, antara lain :

1. Belum optimalnya mutu layanan kesehatan masyarakat
2. Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat
3. Kurangnya akses pendidikan
4. Ketersediaan lapangan kerja formal belum seimbang dengan ketersediaan tenaga kerja
5. Beban pengeluaran masyarakat miskin tinggi
6. Pemberdayaan masyarakat terhadap pembangunan masih kurang

2. Permasalahan Tata Kelola Pemerintahan

Dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan pemerintah Kabupaten Belitung, terdapat beberapa faktor yang harus diperhatikan yakni Akuntabilitas, Transparansi, dan Pelayanan yang berkualitas. Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, masih kurangnya kualitas pelayanan publik, serta akuntabilitas kinerja yang belum memuaskan, tercermin melalui Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Belitung masih berstatus WDP (Wajar Dengan Pengecualian) dan Nilai Laporan Akuntabilitas dengan kategori "C". Berikut permasalahan pembangunan yang berhubungan dengan tata kelola pemerintahan :

1. Pengelolaan keuangan dan aset daerah belum optimal



2. Belum selarasnya perencanaan pembangunan daerah
3. Belum optimalnya pengawasan kinerja pemerintah daerah
4. Kualitas dan profesionalitas SDM aparatur masih rendah
5. Belum optimalnya Pelayanan publik

3. Permasalahan Daya Saing Potensi Ekonomi

Pertumbuhan perekonomian suatu wilayah menjadi salah satu tolok ukur melihat tingkat kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Belitung mengalami perkembangan yang cenderung melambat. Melambatnya perkembangan perekonomian disebabkan oleh ketidakstabilan ekonomi secara global, lemahnya tingkat konsumsi masyarakat akibat dampak dari inflasi. Berdasarkan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Belitung atas dasar harga berlaku kontribusi pertumbuhan ekonomi terbesar berasal dari kategori pertanian, perikanan dan kehutanan. Walaupun terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi namun beberapa kategori mengalami perlambatan. Perlambatan pertumbuhan terjadi pada kategori industri pengolahan, perdagangan besar, dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, dan kategori jasa lainnya. Peningkatan aktivitas pertanian, kehutanan dan perikanan, diharapkan mampu meningkatkan aktivitas ekonomi pada lapangan usaha lainnya. Masalah pokok pembangunan perekonomian Kabupaten Belitung adalah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya produksi pertanian dan perikanan
2. Belum optimalnya pengembangan koperasi dan usaha mikro
3. Kurangnya daya saing pariwisata
4. Belum optimalnya tata kelola penanaman modal dan perizinan

4. Permasalahan Lingkungan

Pembangunan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pembangunan tidak lepas dari penggunaan sumber daya alam, baik sumber daya alam yang terbarukan maupun sumber daya alam tak terbarukan. Dampak negatif dari pembangunan adalah menurunnya kualitas lingkungan hidup akibat pencemaran air, tanah dan udara. Permasalahan lingkungan hidup di Kabupaten Belitung adalah terjadinya pencemaran terhadap air dan kerusakan lingkungan hidup, rendahnya area pelayanan penanganan sampah, rendahnya pengelolaan sampah 3R, rendahnya partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan sampah, belum optimalnya rencana pengelolaan sampah.

b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan penerjemahan yang tepat dan sistematis atas perspektif pembangunan yang berlaku secara nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan Pembangunan Nasional. RPJMD dirumuskan dalam bentuk visi, misi kepala daerah dan wakil kepala daerah ke dalam tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program pembangunan daerah. Dengan demikian RPJMD merupakan dokumen perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskan setiap lima tahun (perencanaan jangka menengah) yang menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah.

RPJMD Kabupaten Belitung secara sistematis mengedepankan isu-isu lokal, yang diterjemahkan kedalam bentuk strategi kebijakan dan rencana pembangunan yang terarah, efektif dan berkesinambungan sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran pembiayaan. Sebagai dokumen perencanaan strategis yang memuat visi,



misi, tujuan, sasaran dan kebijakan, serta program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Belitung, RPJMD berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta memperhatikan RPJP dan RPJM Nasional.

Untuk periode 2018 – 2023, RPJMD Kabupaten Belitung ditetapkan dan disahkan melalui Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2018 – 2023.

1. Visi

Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah. Mengacu pada visi misi serta program prioritas yang dikampanyekan oleh Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2018-2023 dan mempertimbangkan kondisi dan potensi daerah, permasalahan pembangunan, tantangan yang dihadapi serta isu-isu strategis, maka dirumuskan visi Kabupaten Belitung Tahun 2018-2023, yaitu : adalah **MEWUJUDKAN EKONOMI YANG BERKEADILAN, BERDAYA SAING DAN INOVATIF DI KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2023**.

Adapun makna yang terkandung di dalam pernyataan visi tersebut, adalah sebagai berikut :

- a. **Ekonomi Berkeadilan** bermakna bahwa pembangunan yang dilakukan di Kabupaten Belitung harus dapat dialokasikan dan didistribusikan kepada seluruh lapisan masyarakat. Pembangunan yang dilakukan harus memperhatikan hak-hak dasar masyarakat serta memperluas kemampuan masyarakat untuk dapat mengakses seluruh sumber daya;
- b. **Berdaya saing** bermakna bahwa pembangunan di Kabupaten Belitung sanggup berkompetisi dengan daerah lain, memiliki keunggulan dan mempunyai nilai tambah di tingkat nasional maupun internasional;
- c. **Inovatif** mengandung makna bahwa pembangunan di Kabupaten Belitung harus memiliki pembaharuan dalam menyelesaikan permasalahan pembangunan.

Dengan adanya penetapan visi ini, diharapkan seluruh stakeholder dan komponen yang ada di Kabupaten Belitung dapat bekerja sama bahu-membahu untuk memaksimalkan seluruh potensi dan kapasitas yang dimilikinya, agar visi tersebut dapat kita capai dan wujudkan.

2. Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dengan pernyataan misi tersebut, diharapkan seluruh pihak yang berkepentingan dapat mengetahui peran dan program-program serta hasil yang akan diperoleh di waktu-waktu yang akan datang. Misi merupakan pernyataan yang menggambarkan tujuan pemerintah dan sasaran yang ingin dicapai. Pernyataan misi membawa daerah kepada suatu fokus. Pemerintah Kabupaten Belitung, telah menetapkan tiga misi sebagai sarana untuk mewujudkan visi, yaitu sebagai berikut:

- a. **Misi Kesatu** : Meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang berkeadilan.

Misi Kesatu : Meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang berkeadilan, bahwa dalam rangka mewujudkan peningkatan kualitas sumber daya manusia perlu ditunjang oleh upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat Kabupaten Belitung yang meliputi hak untuk menikmati kesehatan, pendidikan, air bersih dan energi listrik, termasuk terpenuhinya pelayanan dasar melalui pendekatan keluarga yang kuat, bahagia dan sejahtera terutama dalam urusan pendidikan, kesehatan, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sesuai dengan standar pelayanan minimal (SPM).

Selain itu perlu ada upaya penanggulangan kemiskinan dengan memberikan fasilitasi, pendampingan dan penguatan yang terus menerus kepada masyarakat miskin, meningkatkan



jaminan dan perlindungan sosial sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, termasuk memperluas kesempatan kerja.

- b. **Misi Kedua** : Meningkatkan pelayanan birokrasi yang bersih, inovatif, profesional, akuntabel dan transparan.

Misi Kedua : Meningkatkan pelayanan birokrasi yang bersih, inovatif, profesional, akuntabel dan transparan, bermakna bahwa untuk mewujudkan pelayanan birokrasi yang bersih, inovatif, profesional, akuntabel dan transparan perlu dilakukan upaya peningkatan kualitas dan kapasitas aparatur, pengelolaan keuangan dan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah serta pelayanan publik yang didukung oleh sarana bangunan kantor dan prasarana pemerintahan yang representatif, serta pemanfaatan teknologi dan sistem informasi yang terintegrasi. Pelayanan birokrasi yang optimal juga dicapai melalui peningkatan kinerja dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan.

- c. **Misi Ketiga** : Meningkatkan ekonomi berbasis potensi daerah yang berwawasan, lingkungan dan berkelanjutan.

Misi Ketiga : Meningkatkan ekonomi berbasis potensi daerah yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan, dapat diartikan bahwa kebangkitan ekonomi berbasis sumber daya lokal, keunggulan kompetitif dan berorientasi pasar terutama di sektor prioritas lebih diunggulkan dalam meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi daerah yang berdaya saing serta berwawasan lingkungan. Di samping itu perlu pula percepatan pertumbuhan ekonomi kawasan melalui pengembangan infrastruktur dan integrasi wilayah lokal, regional, nasional dan global.

Sementara itu, misi ketiga dalam rencana pembangunan jangka menengah sudah mencakup misi satu dan misi tiga dalam RPJPD Kabupaten Belitung Tahun 2005-2025, yaitu meningkatkan ekonomi berbasis potensi daerah yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan, yang sudah jelas mencerminkan pemanfaatan sumber daya alam serta pelestarian sumber daya alam dan lingkungan.

3. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Sebagai upaya untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis, maka dirumuskan tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Belitung untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Dalam RPJMD Kabupaten Belitung 2018 – 2023 telah menetapkan sebanyak 4 (empat) tujuan dan 17 (tujuh belas sasaran) dengan 20 (dua puluh) indikator sasaran, sebagai berikut:

Tabel 1.14
Keterkaitan Visi Misi Tujuan Sasaran Kabupaten Belitung

VISI: MEWUJUDKAN EKONOMI YANG BERKEADILAN, BERDAYA SAING DAN INOVATIF DI KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2023			
TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
MISI I : Meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang berkeadilan			
1. Meningkatnya kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat	1. Indeks Pembangunan Manusia	1. Meningkatnya kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat	1. Indeks Pembangunan Manusia



			2. Angka Kemiskinan
		2. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	3. Angka Harapan Hidup
		3. Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	4. Rata-rata Lama Sekolah
		4. Meningkatnya Daya Beli Masyarakat	5. Pengeluaran per Kapita (dalam ribu rupiah)
		5. Meningkatnya Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan	6. Status Desa "Maju"
MISI II : Meningkatkan pelayanan birokrasi yang bersih, inovatif, profesional, akuntabel dan transparan			
2. Terwujudnya pelayanan birokrasi yg bersih, inovatif, profesional, akuntabel dan transparan	2. Indeks Reformasi Birokrasi	6. Terwujudnya pelayanan birokrasi yg bersih, inovatif, profesional, akuntabel dan transparan	7. Indeks Reformasi Birokrasi
		7. Terciptanya Birokrasi yang Bersih, Transparan dan Akuntabel	8. Opini BPK
			9. Nilai SAKIP Kabupaten Belitung
		8. Terciptanya Birokrasi yang Inovatif dan Profesional	10. Indeks Profesional ASN
		9. Birokrasi yang mengedepankan pelayanan masyarakat yang berkualitas	11. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
MISI III : Meningkatkan ekonomi berbasis potensi daerah yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan			
3. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	3. Laju Pertumbuhan Ekonomi	10. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	12. Laju Pertumbuhan Ekonomi
		11. Meningkatnya pengembangan pariwisata	13. Jumlah kunjungan wisatawan (Domestik dan mancanegara)
		12. Meningkatnya produksi pertanian dan perikanan	14. Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan, Perikanan terhadap PDRB (%)
		13. Meningkatnya pengembangan koperasi dan usaha mikro	15. Nilai Omset Koperasi (dalam ribu rupiah)
			16. Nilai Omset Usaha mikro (dalam ribu rupiah)



		14. Meningkatnya investasi	17. Nilai Investasi (dalam juta rupiah)
		15. Meningkatnya infrastruktur kewilayahan	18. Persentase pemenuhan infrastruktur kewilayahan
4. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	4. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	16. Meningkatnya Kualitas lingkungan hidup	19. Indeks Kualitas lingkungan hidup
		17. Meningkatnya pengelolaan sampah	20. Persentase cakupan pelayanan sampah

4. Program Inovatif Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung

RPJMD Kabupaten Belitung 2018 – 2023 merupakan Dokumen Strategis Kabupaten Belitung yang juga memuat janji-janji politik Bupati dan Wakil Bupati Belitung terpilih. Janji-janji tersebut terkait erat dengan pencapaian Visi dan Misi, dan menjadi tugas bagi perangkat daerah untuk mengimplementasikannya dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang harus dilaksanakan selama kurun waktu 5 (lima) tahun.

Berkenaan dengan janji-janji politik Bupati dan Wakil Bupati Belitung terpilih, terdokumentasi 16 Program Inovatif Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Periode 2018– 2023 sebagai komitmen mereka dalam peningkatan bidang kesehatan, kependudukan, pendidikan, adat, keagamaan, pariwisata, lingkungan, pertanian, dan investasi.

Tabel 1.15
Program Inovatif Pemerintah Kabupaten Belitung Periode 2018 – 2023

PROGRAM	URAIAN	PENANGGUNG JAWAB
1. PROGRAM SEHATI	Sistem Pelayanan Kesehatan Terintegrasi Kombinasi dengan BPJS Kesehatan. Pasien rujukan didampingi (untuk pasien kritis dan khusus) dan dijemput di Bandara tujuan dengan ambulance Pemda Belitung yang ditempatkan di rumah sehat. Pasien diantarkan ke RS rujukan, pendampingan administrasi, keluarga diinapkan dirumah sehat (hasil refungsi mess Pemda). Program ini termasuk pemulangan jenazah pasien sampai daerah dan uang saku yang bekerjasama dengan CSR perusahaan dan organisasi/institusi lainnya	1. DINAS KESEHATAN 2. RSUD Dr. MARSIDI JUDONO
2. PROGRAM KEMINANGAN	Kearifan lokal dan adat istiadat sebagai inspirasi pembangunan. Berupa pelembagaan resmi dukun kampung yang diberikan tunjangan rutin dan seragam.	1. DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2. DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
3. PROGRAM KETARAP	Keterpaduan antar rakyat antar pengusaha berupa program fasilitasi dan mediasi yang dilakukan Pemda kepada masyarakat sebagai pemilik lahan dengan pengusaha selaku pemilik modal yang memberikan keuntungan dengan basis rencana pembangunan Pemda	1. DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN PERINDUSTRIAN



4. PROGRAM BAGUK	Bagi bibit gratis untuk kampung. Pembagian bibit buah dan lainnya sesuai master plan pembangunan desa.	1. DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
5. PROGRAM TUSENA	Satu desa satu destinasi setiap 1 (satu) tahun yang bersifat desa tematik	1. DINAS PARIWISATA
6. PROGRAM ILAK	Insentif langsung untuk kemajuan berupa insentif untuk investor yang rutin dalam memberikan CSR sesuai arahan Pemda dan juga kepada investor yang menyerap tenaga kerja lokal dan pembangunan usaha/investasi mereka yang selesai sebelum masa waktu yang ditentukan	1. DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN PERINDUSTRIAN
7. PROGRAM PUKAT	Program air bersih untuk masyarakat Pembangunan spot/titik jaringan air bersih bagi masyarakat yang berbasis rumah ibadah	1. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
8. PROGRAM PELANDUK	Pelayanan medik untuk kampung berupa program medik mengunjungi dan memberikan pengobatan kerumah pasien menggunakan motor dan mobil	1. DINAS KESEHATAN
9. PROGRAM GANGAN	Garansi hasil panen komoditi gabungan berupa pelaksanaan Badan Logistik Daerah dalam memberikan garansi membeli hasil pertanian, perkebunan dan perikanan masyarakat yang sebelumnya telah membuat perjanjian bersama dan dibina BUMD. Jaminan ini berupa jaminan beli dengan harga wajar di atas harga pasar saat harga pasar jatuh. Bahan dibeli ini akan didistribusikan oleh BUMD dengan mitra-mitranya	1. DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH, PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA 2. BAGIAN PEREKONOMIAN
10. PROGRAM BETARE	Program Belitung terang benderang Berupa realisasi lampu penerangan jalan desa dan kota yang estetis dan berbasis LED	1. DINAS PERHUBUNGAN
11. PROGRAM SIMPOR	Sistem pendampingan pendidikan dan olahraga berupa bantuan sepatu sekolah dan pakaian sekolah hingga buku tulis dan bimbingan teknis dan bantuan paket finansial kepada olahragawan muda dan bibit-bibit potensial	1. DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2. DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
12. PROGRAM CUHAI	CSR untuk hijau dan indah membangun ruang terbuka hijau menggunakan dana CSR perusahaan	1. BAGIAN PEREKONOMIAN
13. PROGRAM BERUAH	Pembangunan dan perbaikan rumah ibadah	1. BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
14. PROGRAM AMBONG	Program asupan untuk anak Balita dan Ibu mengandung	1. DINAS KESEHATAN 2. DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN SOSIAL
15. PROGRAM SOS CENTER	Berupa telp ke 505/ aplikasi masyarakat menghubungi SOS Center: (Damkar, Ambulance, PMI, Tagana, BNPB dan Pol PP)	1. DINAS KESEHATAN
16. PROGRAM TERINDAK	Tanah teregister, integrasi dan akuntabel berupa sistem informasi pencatat tanah di kantor desa dan kecamatan	1. DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2. BAGIAN PEMERINTAHAN



c. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Oleh karenanya setiap instansi pemerintah wajib merumuskan indikator kinerja utama dan menjadikannya sebagai prioritas utama. Indikator Kinerja Utama juga merupakan salah satu upaya memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata kelola pemerintahan yang baik. Untuk maksud tersebut diterbitkanlah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007, Pemerintah Kabupaten Belitung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama, melalui Peraturan Bupati Belitung Nomor 26 Tahun 2019 tanggal 26 Agustus 2019 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2018 – 2023 yang mana mengalami perubahan sesuai dengan hasil evaluasi dari Kementerian PANRB RI pada Tahun 2020 dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Belitung Nomor 53 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Belitung Nomor 24A Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2018-2023 dan Perubahan Peraturan Bupati Belitung Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Belitung Nomor 26 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2018 – 2023 tanggal 8 Desember 2020, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1.16
Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2020

	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET
MISI 1 : Meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang berkeadilan			
1	Indeks Pembangunan Manusia		71,87
	Angka Kemiskinan	%	6,85%
2	Angka Harapan Hidup	Tahun	70,6 Tahun
3	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	8,15 Tahun
4	Pengeluaran Per Kapita (dalam ribu rupiah)	Ribu Rupiah	13.496 Rupiah
5	Status Desa "Maju"	Desa	20 Desa
MISI 2 : Meningkatkan pelayanan birokrasi yang bersih, inovatif, profesional, akuntabel dan transparan			
6	Indeks Reformasi Birokrasi		B
7	Opini BPK		WTP
	Nilai SAKIP Kabupaten Belitung		B
8	Indeks Profesionalitas ASN		77
9	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		83



MISI 3 : : Meningkatkan ekonomi berbasis potensi daerah yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan			
10	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5,63%
11	Jumlah Kunjungan Wisatawan (domestik dan mancanegara)	Orang	108.000 orang
12	Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan, Perikanan terhadap PDRB	%	27,31%
13	Nilai Omset Koperasi (ribu rupiah)	Ribu Rupiah	93.880.774 (Ribu Rupiah)
	Nilai Omset Usaha Mikro (ribu rupiah)	Ribu Rupiah	1.286.792.500 (Ribu Rupiah)
14	Nilai Investasi (juta rupiah)	Juta Rupiah	1.780.878 (Juta Rupiah)
15	Persentase Pemenuhan Infrastruktur Kewilayahan	%	46,25%
16	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	%	62,73
17	Persentase Cakupan Pelayanan Persampahan	%	4,20%

d. Perjanjian Kinerja Tahun 2020

Penyusunan Perjanjian Kinerja Kabupaten Belitung tahun 2020 ini disusun berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Perjanjian Kinerja merupakan tekad dan janji kinerja tahunan yang dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan pemerintahan. Perjanjian Kinerja ini merupakan wahana proses yang akan memberikan skala prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan semua kegiatan instansi terarah.

Perjanjian Kinerja Kabupaten Belitung tahun 2020 yang ditetapkan pada bulan Januari 2020 mengalami perubahan pada bulan Oktober 2020 seiring terjadinya perubahan RKPD dan APBD 2020 dan mengalami perubahan kembali pada bulan Desember 2020 dengan adanya penetapan Peraturan Bupati Belitung Nomor 53 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Belitung Nomor 24A Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2018-2023 dan Peraturan Bupati Belitung Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan



Atas Peraturan Bupati Belitung Nomor 26 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2018 – 2023 tanggal 8 Desember 2020. Perjanjian Kinerja Perubahan Kabupaten Belitung Tahun 2020 sebagai berikut :

Tabel 1.17
Perjanjian Kinerja Kabupaten Belitung Tahun 2020

SASARAN		INDIKATOR KINERJA UTAMA		TARGET
1	Meningkatnya kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat	1	Indeks Pembangunan Manusia	71,87
		2	Angka Kemiskinan	6,85%
2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	3	Angka harapan hidup	70,6 Tahun
3	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	4	Rata-rata lama sekolah	8,15 Tahun
4	Meningkatnya daya beli masyarakat	5	Pengeluaran per kapita (dalam ribu rupiah)	13.496 Rupiah
5	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan	6	Status desa “Maju”	20 Desa
6	Terwujudnya pelayanan birokrasi yang bersih, inovatif, profesional, akuntabel dan transparan	7	Indeks Reformasi Birokrasi	B
7	Terciptanya birokrasi yang bersih, transparan dan akuntabel	8	Opini BPK	WTP
		9	Nilai SAKIP Kabupaten Belitung	B
8	Terciptanya birokrasi yang inovatif dan profesional	10	Indeks Profesionalitas ASN	77
9	Birokrasi yang mengedepankan pelayanan masyarakat yang berkualitas	11	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83
10	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	12	Laju pertumbuhan ekonomi	5,63%
11	Meningkatnya pengembangan pariwisata	13	Jumlah kunjungan wisatawan (domestik dan mancanegara)	108.000 orang
12	Meningkatnya produksi pertanian dan perikanan	14	Kontribusi sektor pertanian, kehutanan, perikanan terhadap PDRB	27,31%
13	Meningkatnya pengembangan koperasi dan usaha mikro	15	Nilai omset koperasi (ribu rupiah)	93.880.774 (Ribu Rupiah)
		16	Nilai omset usaha mikro (ribu rupiah)	1.286.792.500 (Ribu Rupiah)
14	Meningkatnya investasi	17	Nilai investasi (juta rupiah)	1.780.878 (Juta Rupiah)



15	Meningkatnya infrastruktur kewilayahan	18	Persentase Pemenuhan infrastruktur kewilayahan	46,25 %
16	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	19	Indeks kualitas lingkungan hidup	62,7 3
17	Meningkatnya pengelolaan sampah	20	Persentase Cakupan Pelayanan Persampahan	4,20%

e. Rencana Anggaran Tahun 2020

Pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Belitung pada tahun 2020 diarahkan dan difokuskan untuk mewujudkan target kinerja sesuai dengan Perjanjian Kinerja yang ditetapkan. Untuk mewujudkan hal tersebut, pada tahun anggaran 2020, Pemerintah Kabupaten Belitung mengalokasikan anggaran belanja sebesar Rp. 1.167.241.630.689,69 yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 585.348.535.891,57 dan Belanja Langsung sebesar Rp. 581.893.094.798,12. Belanja Langsung terdiri atas belanja pegawai pada kegiatan/ program-program belanja langsung, belanja barang dan jasa, dan belanja modal. Alokasi anggaran yang ada untuk membiayai program prioritas yang langsung mendukung pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Tabel 1.18
Rencana Anggaran Kabupaten Belitung Tahun 2020

URAIAN	ANGGARAN
Belanja Tidak Langsung	Rp. 585.348.535.891,57
Belanja Langsung	Rp 581.893.094.798,12
Total Belanja	Rp 1.167.241.630.689,69

1.1.3 Penerapan Standar Pelayanan Minimal

a. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, pembangunan daerah ditujukan selain untuk mengejar pertumbuhan ekonomi, juga untuk menciptakan pemerataan atas hasil pembangunan itu sendiri. Terkait hal tersebut, Pasal 18 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, mengingatkan agar Pemerintah Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dengan berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Selain itu, Pasal 298 menyebutkan juga bahwa Belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal (SPM).

Dalam rangka menyediakan pelayanan yang merupakan urusan wajib, Pemerintah Daerah harus mengacu kepada SPM yang ditetapkan oleh Pemerintah. SPM ini menjadi tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai komitmen atau janji dari penyelenggara kepada masyarakat untuk memberikan pelayanan yang



berkualitas. Penerapan SPM diprioritaskan bagi Warga Negara yang berhak memperoleh Pelayanan Dasar secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar. Bila dikaji secara mendalam ada pergeseran makna SPM pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 dibandingkan dengan regulasi sebelumnya. Secara tekstual, SPM merupakan ketentuan mengenai jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal, namun terdapat perubahan mendasar dalam pengaturan mengenai jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar, kriteria penetapan SPM, dan mekanisme penerapan SPM. Dengan kata lain SPM tidak lagi dimaknai dalam kontekstual sebagai norma, standar, prosedur dan kriteria.

Dalam penerapannya, SPM harus berdasarkan pada prinsip kesesuaian kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, keterukuran, dan ketepatan sasaran. Mekanisme penerapan SPM tidak lagi berdasarkan indikator SPM dan batas waktu pencapaian, tetapi mengutamakan penerapan SPM dengan berdasarkan hal-hal sebagai berikut; (i) pengumpulan data secara empiris dengan tetap mengacu secara normatif standar teknis; (ii) penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar; (iii) penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar; dan (iv) pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar.

Perubahan Paradigma penting lain berkaitan dengan SPM adalah dalam konteks belanja daerah. Dalam belanja daerah harus ditentukan secara tegas dan jelas bahwa belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai pelaksanaan SPM, sebagai jaminan pemenuhan hak konstitusional masyarakat oleh Pemerintah Daerah. Dengan demikian prioritas utama penyelenggaraan pemerintahan bukanlah kinerja Pemerintah Daerah tetapi terpenuhinya kebutuhan dasar Warga Negara. Adapun Standar Pelayanan Minimal yang menjadi kebutuhan dasar berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal adalah mencakup 6 (enam) bidang urusan wajib yaitu bidang urusan pendidikan; urusan kesehatan; urusan pekerjaan umum; urusan perumahan rakyat; urusan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan urusan sosial.

b. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
3. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;

c. Kebijakan Umum

Kebijakan Umum pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2018-2023 merupakan arahan umum dalam perencanaan pembangunan jangka menengah terkait dengan pencapaian visi dan misi pembangunan Kabupaten Belitung dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Kebijakan umum berisikan arah



kebijakan pembangunan berdasarkan strategi yang dipilih dengan target capaian indikator kinerja yang merupakan pedoman berupa rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk mengarahkan strategi agar selaras dalam mencapai tujuan dan sasaran bertahap selama lima tahun.

Kebijakan Umum Pembangunan tersebut tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2018-2023. Rencana pencapaian SPM dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategi Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD) dituangkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Rencana Kerja dan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (RKA-OPD) sesuai klasifikasi belanja daerah dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

Ketersediaan dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, diprioritaskan dalam target-target pembangunan Kabupaten Belitung, serta akan digunakan dalam mendukung jalannya pemerintahan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat. Harapan dari hal tersebut adalah agar pelaksanaan pembangunan semakin mengarah pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat Kabupaten Belitung, serta pada pencapaian visi Kabupaten Belitung Tahun 2018-2023 yaitu ***MEWUJUDKAN EKONOMI YANG BERKEADILAN, BERDAYA SAING DAN INOVATIF DI KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2023.***

d. Arah Kebijakan

Arah kebijakan menggambarkan orientasi dan komitmen yang telah ditetapkan oleh pemerintahan daerah dalam satu tahun anggaran dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM yang dituangkan dalam Kebijakan Umum Anggaran. Arah kebijakan merupakan bentuk konkret pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberi arahan kepada pemerintah daerah supaya lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan. Arah kebijakan disusun berdasarkan tema pembangunan setiap tahun untuk memudahkan pemahaman terhadap kesinambungan pembangunan. Dengan demikian penuangan RPJMD ke dalam RKPD lebih jelas dengan penekanan pada tema setiap tahunnya.

Kebijakan merupakan arah/ketentuan yang ditetapkan oleh instansi pemerintah sebagai dasar untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam melaksanakan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran. Program merupakan instrumen kebijakan yang berisi kumpulan beberapa kegiatan yang sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai tujuan dan sasaran.

The logo of Kabupaten Belitung is a shield-shaped emblem. At the top, a banner reads "KABUPATEN BELITUNG". The central part of the shield features a stylized figure holding a torch, with a scale of justice below it. The shield is flanked by two palm trees. At the bottom, another banner reads "MAJU TERUS MAWAS DIRI".

**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
(L P P D)
KABUPATEN BELITUNG
TAHUN 2020**

**BAB II
CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH**



BAB II

CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

2.1 CAPAIAN KINERJA MAKRO

Indikator makro merupakan indikator gabungan dari berbagai kegiatan pembangunan ekonomi maupun sosial. Indikator makro pembangunan tersebut terdiri dari Indeks Pembangunan Manusia, Angka Kemiskinan, Angka Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Perkapita, dan Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio). Pertumbuhan ekonomi adalah indikator utama yang sangat penting untuk menjamin kesinambungan pembangunan untuk menggerakkan roda pembangunan. Tanpa pertumbuhan ekonomi, maka kegiatan program pembangunan akan mengalami stagnasi berujung pada peningkatan jumlah pengangguran dan peningkatan jumlah kemiskinan. Di Kabupaten Belitung, pertumbuhan ekonomi menunjukkan tren yang terus meningkat pada Tahun 2019. Namun, pada Tahun 2020 dengan adanya pandemi covid-19 yang melanda berdampak pada penurunan pertumbuhan ekonomi.

Tidak hanya berdampak pada sektor ekonomi, masalah krisis kesehatan juga menjadi salah satu permasalahan yang harus dihadapi. Anggaran bantuan sosial juga semakin marak diberikan oleh pemerintah untuk membantu warga yang terdampak Covid-19 akibat adanya pembatasan kegiatan masyarakat. Seperti telah diketahui bahwa selama pembatasan kegiatan masyarakat ini, setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang melibatkan banyak orang, berkelompok dan dibatasi kegiatannya dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Kegiatan ekonomi yang terbatas tentunya menyebabkan terjadinya penurunan penghasilan atau pendapatan. Oleh karena itu, bantuan sosial perlu diberikan untuk masyarakat yang terdampak. Tidak hanya bantuan diberikan kepada masyarakat yang terdampak, pemberian bantuan juga dilakukan untuk para pelaku usaha agar dapat terus melanjutkan kegiatan usahanya dan bertahan di tengah pandemi.

Adapun gambaran indikator makro di Kabupaten Belitung pada Tahun 2019 dan 2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.1
Indikator Kinerja Makro Kabupaten Belitung Tahun 2019 dan Tahun 2020

No	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Tahun 2019	Capaian Kinerja Tahun 2020	Perubahan (%)
1	2	3	4	5
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	72,46	72,51	0,05
2	Angka Kemiskinan (%)	6,29	6,27	-0,02
3	Angka Pengangguran (Tingkat Pengangguran Terbuka/TPT) (%)	2,89	4,82	1,93
4	Pertumbuhan Ekonomi (PDRB Atas Dasar Harga Konstan /ADHK) (%)	3,36	-2,31	-5,67
5	Pendapatan Per kapita (PDRB Per Kapita Per Tahun) (Rupiah)	51.925,733	50.847.912	-1.077.821
6	Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)	0,269	0,262	-0,007

Sumber : Badan Pusat Statistik 2021



2.1.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar, yaitu :

- a. Umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*),
Umur panjang dan hidup sehat digambarkan oleh Angka Harapan Hidup (AHH),
- b. Pengetahuan (*knowledge*), dan
Pengetahuan dapat diukur melalui indikator Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS).
- c. Standar hidup layak (*decent standard of living*).
Standar hidup layak dapat digambarkan oleh pengeluaran per kapita.

Nilai indeks pembangunan manusia di Kabupaten Belitung terus mengalami kemajuan selama kurun 2 (dua) tahun terakhir adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Belitung

NO	I P M	TAHUN 2019	TAHUN 2020	KET
1	IPM KABUPATEN BELITUNG	72,46	72,51	0,069%

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Belitung 2021

Meningkat dari 72,46 pada tahun 2019 menjadi 72,51 pada tahun 2020 dengan rata-rata pertumbuhannya sebesar 0,069% per tahun. Level IPM Kabupaten Belitung masih pada posisi **tinggi**, yang artinya nilai IPM tersebut menggambarkan bahwa harapan hidup, rata-rata dan harapan lama sekolah, serta pengeluaran per kapita Kabupaten Belitung tergolong tinggi dibandingkan dengan daerah lain.

2.1.2 Angka Kemiskinan

Kemiskinan selalu dipandang sebagai masalah yang serius di dunia sehingga menjadi urutan pertama dalam Agenda Tujuan Pembangunan berkelanjutan (TPB) sebagai kesepakatan pembangunan global. Berbagai upaya terus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Belitung untuk terus menurunkan angka kemiskinan.

Tabel 2.3
Persentase Angka Kemiskinan Kabupaten Belitung

NO	PERSENTASE ANGKA KEMISKINAN	TAHUN 2019	TAHUN 2020	KET
1	KABUPATEN BELITUNG	6,29%	6,27%	0,02 point

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Belitung 2021

Selama periode 2 (dua) tahun dari Tahun 2019 sampai dengan 2020, persentase penduduk miskin di Kabupaten Belitung menunjukkan trend penurunan, hal ini menunjukkan semakin menurunnya jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan meskipun pada Tahun 2020 sudah melanda



pandemic covid-19 yang telah melumpuhkan perekonomian. Angka kemiskinan di Tahun 2020 menurun 0,02 poin menjadi 6,27%. Sementara itu, pada Tahun 2019 angka kemiskinan tersebut berada pada angka 6,29%. Hal ini menunjukkan keberhasilan Pemerintah Kabupaten Belitung dengan program-program inovasinya dan sinergi berbagai *stakeholder*. di tengah masa pandemi covid-19.

2.1.3 Angka Pengangguran

The Labour Force Concept yang disarankan oleh *The International Labour Organization* (ILO) membagi penduduk menjadi dua, yaitu penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) dan penduduk bukan usia kerja. Penduduk usia kerja dibagi lagi menjadi dua kelompok, yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja mencakup penduduk yang bekerja, sementara tidak bekerja, serta pengangguran. Penduduk usia 15 tahun ke atas yang bukan termasuk angkatan kerja mencakup mereka yang sedang bersekolah, mengurus rumah tangga, dan sebagainya. Jumlah penduduk usia kerja di Kabupaten Belitung pada tahun 2020 tercatat sebesar 143.814 jiwa. Dari angka tersebut, 44.122 orang penduduk bukan termasuk angkatan kerja. Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) tahun 2020 tercatat sebesar 69,32 persen, yang berarti dari 100 penduduk usia kerja, sebanyak 69-70 orang diantaranya termasuk ke dalam angkatan kerja, baik berstatus bekerja maupun pencari kerja. Sementara itu, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada tahun 2020 tercatat sebesar 4,82 persen, yang berarti bahwa dari 100 penduduk angkatan kerja yang ada di Kabupaten Belitung, 4 hingga 5 orang diantaranya merupakan pengangguran. Pada tahun 2020, sektor pertanian masih menjadi sektor dengan penyerapan tenaga kerja terbanyak di Kabupaten Belitung.

2.1.4 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan kondisi meningkatnya pendapatan masyarakat yang dipicu oleh peningkatan produksi barang dan jasa. Pertumbuhan ekonomi merupakan faktor penting karena menjadi salah satu indikasi keberhasilan pembangunan. PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Belitung yang menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi dan peranan lapangan usaha menunjukkan penurunan pada Tahun 2020 dikarenakan melandanya pandemi covid-19.

Tabel 2.4
PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Belitung

NO	PDRB ADHK (%)	TAHUN 2019	TAHUN 2020	KET
1	KABUPATEN BELITUNG	3,36	-2,31	

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Belitung 2021

Pada Tahun 2019 , Perekonomian Kabupaten Belitung mengalami pertumbuhan 3,36% sedangkan pada Tahun 2020 terkontraksi sebesar 3,31%. Sebagian besar sektor mengalami penurunan hanya beberapa sektor saja yang mengalami pertumbuhan. Pertumbuhan ekonomi terjadi pada sektor informasi dan komunikasi sebesar 16,64%; sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur sebesar 8,63%; sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 7,33%; sektor real estate sebesar 1,11%, sektor jasa pendidikan sebesar 1,06% dan sektor Industri Pengolahan yang hanya tumbuh sebesar 0,45%, kemudian sektor yang paling terkontraksi adalah sektor transportasi dan pergudangan -20,78%, sektor jasa perusahaan -20,27% , sektor jasa lainnya -14,43%, sektor



pertambangan dan penggalian -11,30%, sektor penyediaan akomodasi dan makan minum -10,82% dan beberapa sektor lainnya mengalami penurunan. Sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel 2.5
Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Belitung
Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019-2020 (Persen)

Kategori	Uraian	Tahun 2019	Tahun 2020
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,73	7,33
B	Pertambangan dan Penggalian	0,24	-11,30
C	Industri Pengolahan	-6,38	0,45
D	Pengadaan Listrik dan Gas	-1,05	-0,94
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur	4,03	8,63
F	Konstruksi	8,37	-4,08
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda	2,57	-9,20
H	Transportasi dan Pergudangan	1,16	-20,78
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan dan MInum	9,14	-10,82
J	Informasi dan Komunikasi	15,71	16,64
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	6,60	-7,66
L	Real Estate	2,91	1,11
M,N	Jasa Perusahaan	2,77	-20,27
O	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan	9,10	-4,85
P	Jasa Pendidikan	7,88	-3,21
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	9,33	1,06
R,S,T,U	Jasa Lainnya	9,36	-14,43
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		3,36	-2,31

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Belitung 2021

2.1.5 Pendapatan Per Kapita

Penghitungan pendapatan per kapita yang digunakan saat ini adalah menggunakan metode penghitungan PDRB Per Kapita Riil (berdasarkan harga berlaku) yang dihitung berdasarkan harga tetap sebagai acuan. Pada Tahun 2019 PDRB Per Kapita Riil Kabupaten Belitung tercatat Rp.51.925.733,- Sedangkan pada Tahun 2020 dalam masa pandemi covid-19, PDRB Per Kapita Riil juga mengalami dampak sehingga terjadi penurunan yaitu sebesar Rp.50.847.912,-.

2.1.6 Ketimpangan Pendapatan (*Gini Ratio*)

Gini ratio adalah ukuran ketidakmerataan atau ketimpangan agregat (secara keseluruhan) yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan sempurna). Indikator ini hanya dilakukan pengukuran di daerah tingkat provinsi. Adapun angka ketimpangan pendapatan untuk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang semula pada Tahun 2019 adalah 0,269 berubah menjadi angka 0,262 pada Tahun 2020. Hal ini menggambarkan bahwa pada tahun 2020 lebih sedikit ketimpangannya yang berarti lebih tinggi tingkat pemerataan distribusi pendapatan bila dibandingkan pada Tahun 2019.



2.2 CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

2.2.1 Indikator Kinerja Kunci Keluaran

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pendidikan	1. Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi (Negeri dan Swasta)	95	Dindikbud	
		2. Jumlah peserta didik PAUD (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	7.672	Dindikbud	
		3. Jumlah peserta didik PAUD (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	0	Dindikbud	
		4. Jumlah kebutuhan minimal pendidik PAUD (Negeri dan Swasta)	259	Dindikbud	
		5. Jumlah pendidik pada PAUD (Negeri dan Swasta)	379	Dindikbud	
		6. Jumlah pendidik PAUD (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain atau psikologi dan sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini	34	Dindikbud	
		7. Jumlah kepala sekolah PAUD (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah untuk PAUD formal atau sertifikat pendidikan dan pelatihan kepala satuan PAUD non-formal dari lembaga pemerintah	22	Dindikbud	
		1. Jumlah SD dan SMP Negeri Terakreditasi	138	Dindikbud	
		2. Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	58.278	Dindikbud	
		3. Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	33.544	Dindikbud	
		4. Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	685	Dindikbud	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		5. Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	315 Orang	Dindikbud	
		6. Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	1.043 Orang	Dindikbud	
		7. Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	559 Orang	Dindikbud	
		8. Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar	1.193 Orang	Dindikbud	
		9. Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	504 Orang	Dindikbud	
		10. Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	444	Dindikbud	
		11. Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	161 Orang	Dindikbud	
		12. Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	266 Orang	Dindikbud	
		13. Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	151 Orang	Dindikbud	
		14. Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	619	Dindikbud	
		15. Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat	206	Dindikbud	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		(D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik			
		16. Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	104	Dindikbud	
		17. Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	20	Dindikbud	
		18. Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	119	Dindikbud	
		19. Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	59	Dindikbud	
		1. Jumlah SD dan SMP Negeri Terakreditasi	138	Dindikbud	
		2. Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	58.278	Dindikbud	
		3. Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	33.544	Dindikbud	
		4. Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar yang menerima pembebasan biaya pendidikan	685	Dindikbud	
		5. Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama yang menerima pembebasan biaya pendidikan	315	Dindikbud	
		6. Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar	1.043	Dindikbud	
		7. Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama	559	Dindikbud	
		8. Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar	1.193	Dindikbud	
		9. Jumlah pendidik pada jenjang	504	Dindikbud	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		sekolah menengah pertama			
		10. Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar	444	Dindikbud	
		11. Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama	161	Dindikbud	
		12. Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar	266	Dindikbud	
		13. Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama	151	Dindikbud	
		14. Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	616	Dindikbud	
		15. Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	206	Dindikbud	
		16. Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda	104	Dindikbud	
		17. Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	20	Dindikbud	
		18. Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	119	Dindikbud	
		19. Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah	59	Dindikbud	
		1. Jumlah satuan pendidikan kesetaraan terakreditasi (Negeri dan Swasta)	2	Dindikbud	
		2. Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	834	Dindikbud	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		3. Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	0	Dindikbud	
		4. Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta)	101	Dindikbud	
		5. Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta)	95	Dindikbud	
		6. Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1)	73	Dindikbud	
		7. Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	1	Dindikbud	
		8. Jumlah kepala sekolah pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah	8	Dindikbud	
2	Kesehatan	1. Jumlah RS Rujukan kabupaten/kota yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar	1	Dinkes	
		1. Jumlah RS dibina dan dipersiapkan Akreditasinya	1		
		1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	345.521		
		2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan antenatal	672	Dinkes	
		1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	10.263		
		2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan persalinan sesuai standar	672		
		1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	19.332		
		2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan neonatal esensial sesuai standar	672		
		1. Jumlah dukungan logistik	63.778		



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		kesehatan yang tersedia			
		2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan balita sesuai standar	695		
		1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	58.351		
		2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar sesuai standar	749		
		1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	3667		
		2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	28		
		1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	50.046		
		2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	749		
		1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	20 unit		
		2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	19 orang		
		1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	1.433		
		2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	28		
		1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	48		
		2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	15		
		1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	10.390		
		2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	48	Dinkes	
		1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	2.313		
		2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	48		



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		standar			
3.	Pekerjaan Umum	1. Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kabupaten /kota (ha)	288,37	PUPR	
		2. Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (m)	15114 M		
		3. Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)	87633,17 ha		
		4. Panjang pantai di kawasan permukiman yg rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (m)	2055461,393 m		
		5. Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air WS Kewenangan kabupaten/kota	Ada		
		6. Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan kabupaten/kota	Ada		
		7. Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah kabupaten/kota	(i) 550 M (ii) 22695,6 m (iii) 9593,04 m (iv) 0 (v) 0 (vi) 0 (vii) 4022 m		
		1. Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)	288.37Ha		
		2. Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (m)	15114 m		
		3. Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)	887633,17 ha		
		4. Panjang pantai di kawasan permukiman yg rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (m)	205461,393 m		
		5. Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air WS Kewenangan kabupaten/kota	Ada		
		6. Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan Sumber daya air kewenangan kabupaten/kota	Ada		
		7. Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah kabupaten/kota	(i) 550 M (ii) 22695,6 m (iii) 9593,04 m (iv) 0 (v) 0		



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			(vi) 0 (vii) 4022 m		
		1. Persentase panjang jaringan irigasi primer dalam kondisi baik	$\frac{2603,79}{3533,68} \times 100\%$ = 73.86%		
		2. Persentase panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik	$\frac{78517,30}{39534,18} \times 100\%$ = 50.35%		
		3. Persentase panjang jaringan irigasi tersier dalam kondisi baik	$\frac{8331,92}{20138,50} \times 100\%$ = 41.37%		
		1. Pemenuhan dokumen RISPAM kabupaten/kota	Ada		
		2. Tersusun dan ditetapkannya JAKSTRADA Kab/Kota	Tidak Ada		
		3. Jumlah BUMD dan atau UPTD Kab/Kota penyelenggaraan SPAM	BUMD ADA 3 UPTD ADA 7		
		4. Jumlah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melakukan penyelenggaraan SPAM	-		Surat keterangan
		5. Jumlah kerja sama penyelenggaraan SPAM dengan pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah lain.	1		
		1. Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S	60		
		2. Jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-T	250		
		3. Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat dan data jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S dan SPALD T	60 + 250 = 310		
		4. Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa penyedotan lumpur tinja	247		
		5. Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan lumpur tinja	247	DLH	
		6. Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan air limbah domestik	310		
		7. Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses dasar	Tidak Ada		Surat Keterangan
		8. Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses aman	Tidak Ada		Surat Keterangan
		9. Kinerja penyediaan pelayanan SPALDT akses aman	$\frac{250}{6392} \times 100\%$ = 3.91%	DPUPR	
		10. Kinerja penyediaan unit pengolahan setempat	$\frac{60}{1300} \times 100\%$	DPUPR	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			= 9,25%		
		11. Kinerja penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja	$\frac{1}{5} \times 100\%$ = 20%	DLH	
		12. Kinerja penyediaan prasarana pengolahan lumpur tinja	$\frac{1}{5} \times 100\%$ = 20%	DLH	
		13. Kinerja penyediaan sambungan rumah yang tersambung ke IPALD	$\frac{60}{250} \times 100\%$ = 24%	DPUPR	
		14. Kinerja penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja	$\frac{1}{5} \times 100\%$ = 100%	DLH	
		1. Rasio bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi	$\frac{46}{1034} \times 100\%$ = 4,45%	DPUPR	
		2. Jumlah IMB yang diberikan oleh Pemerintah Kab/Kota dalam tahun eksisting	250	DPMPSTSP	
		3. penetapan Peraturan Daerah tentang Bangunan/Gedung	Ada	PUPR	Perda 8/2015
		4. Penetapan Keputusan Bupati/Walikota tentang Tim Ahli Bangunan/Gedung	Ada		
		5. Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk dilindungi dan dilestarikan	Tidak Ada		Surat Pernyataan
		6. Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk kepentingan strategis daerah provinsi	Tidak Ada	BPKAD	
		7. Jumlah bangunan gedung negara milik Pemerintah Kab/Kota	4145		
		8. Jumlah bangunan gedung negara milik pemerintah kabupaten/kota yang dipelihara/dirawat	3.969		
		1. Panjang jalan berdasarkan yang ditetapkan kepala daerah dalam SK jalan kewenangan Kab/Kota	666,024	PUPR	
		2. Panjang jalan yang dibangun	2,197		
		3. Panjang jembatan yg dibangun	14,958		
		4. Panjang jalan yang ditingkatkan (struktur/fungsi)	0		Karena tidak ada pekerjaan di Tahun 2020
		5. Panjang jembatan yang diganti/dilebarkan	0		Sda
		6. Panjang jalan yang direkonstruksi atau direhabilitasi	0		Sda



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		7. Panjang jembatan yang direhabilitasi	0	PUPR	Sda
		8. Panjang jalan yang dipelihara	620,073		
		9. Panjang jembatan yang dipelihara	0		Karena tidak ada pekerjaan di Tahun 2020
		1. Jumlah Pelatihan Tenaga operator/teknisi/analisis di wilayah kabupaten/kota	3 Kali		
		2. Jumlah tenaga kerja operator/teknisi/analisis yang terlatih di wilayah kabupaten/kota	117 Orang		
		3. Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/analisis di wilayah kabupaten/kota	317		
		4. Terselenggaranya Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi Cakupan kabupaten/kota yang aktif dengan data termutakhir	Ada		Aplikasi SIPJAKI https://sipjaki.pu.go.id/
		5. Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBD Kab/Kota	Ada		Aplikasi LPSE https://lpse.belitungkab.go.id/
		6. Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBN	Tidak Ada		Surat keternagan
		7. Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari pendanaan lainnya	Ada		Aplikasi LPSE https://lpse.belitungkab.go.id/
		8. Tersedianya data dan informasi paket pekerjaan jasa konstruksi sesuai kewenangannya yang sudah dan sedang dilaksanakan oleh badan usaha jasa konstruksi yang termutakhir secara berkala	Ada	Aplikasi LPSE https://lpse.belitungkab.go.id/	
		9. Tersedianya data dan profil OPD sub-urusan jasa konstruksi kabupaten/kota	Ada	Profil OPD dan Aplikasi SIPJAKI https://sipjaki.pu.go.id/	
		10. Tersedianya data dan informasi pelatihan tenaga operator dan teknisi/analisis konstruksi di wilayah kabuapten/kota yang dilaksanakan sendiri atau melalui kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja (LPPK) yang diregistrasi oleh menteri yang membidangi jasa konstruksi, asosiasi profesi, perguruan tinggi dan instansi pemerintah	Tidak Ada	Surat keternagan	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		lainnya.			
		11. Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten/kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknisi/analisis	Ada	PUPR	Aplikasi SIPJAKI https://sipjaki.pu.go.id/
		12. Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/analisis di wilayah kab/kota	Ada		Aplikasi SIPJAKI https://sipjaki.pu.go.id/
		13. Tersedianya data dan informasi badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah kabupaten/kota	Tidak Ada		Surat keterangan
		14. Tersedianya data dan informasi pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	68		Surat keterangan
		15. Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi	Ada		Laporan Monitoring Jasa Konstruksi
		16. Tersedianya data dan informasi kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	Tidak Ada		Surat Pernyataan Tidak ada Kecelakaan
		17. Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	Ada		Laporan Monitoring Jasa Konstruksi
		18. Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN di wilayah kab/kota	152		Aplikasi SIPJAKI https://sipjaki.pu.go.id/
		19. Jumlah usaha perseorangan yang memiliki TDUP di wilayah kabupaten/kota	15		OSS di Dinas PMPTSP /
		20. Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN yang terlibat dalam proyek di wilayah Kab/Kota	152		https://lpse.belitungkab.go.id/
		21. Jumlah badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah Kab/Kota	3		Laporan Monitoring Jasa Konstruksi
		22. Jumlah pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	58		OSS di Dinas PMPTSP
		23. Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan engawasannya	21		Laporan Monitoring Jasa Konstruksi



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		24. Jumlah kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	Tidak Ada		-
		25. Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan Pengawasan	21	PUPR	Laporan Monitoring Jasa Konstruksi
4	Perumahan Rakyat	1. Jumlah rumah yang berada pada kawasan rawan bencana dan rencana penanganannya	Tidak Ada	BPBD	Surat pernyataan : Dikarenakan tidak adanya kerusakan rumah akibat fenomena alam yang termasuk kategori bencana
		2. Jumlah rumah yang terkena bencana	Tidak Ada		Sda
		3. Jumlah RT, KK dan Jiwa korban yang rumahnya terkena bencana alam	Tidak Ada		Sda
		4. Jumlah unit rumah korban bencana yang direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi	Tidak Ada		Sda
		5. Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun kembali sesuai dengan rencana aksi	Tidak Ada		Sda
		6. Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun baru/relokasi sesuai dengan rencana aksi	Tidak Ada		Sda
		7. Jumlah unit dan lokasi rumah sewa yang akan menjadi tempat tinggal sementara korban bencana	Tidak Ada		Sda
		8. Jumlah RT, KK dan Jiwa korban bencana yang terfasilitasi	Tidak Ada		Sda
		9. Jumlah, luasan dan lokasi pencadangan lahan	Tidak Ada		Sda
		1. Jumlah rumah tangga penerima layanan yang telah mendapatkan fasilitasi ganti kerugian aset properti berdasarkan rencana pemenuhan SPM	2		Surat pernyataan : Dikarenakan tidak adanya kerusakan rumah akibat fenomena alam yang termasuk kategori bencana
		2. Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang belum mendapatkan fasilitasi penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan berdasarkan rencana pemenuhan SPM	Tidak Ada		Surat pernyataan : Dikarenakan tidak adanya kerusakan rumah akibat fenomena alam yang termasuk kategori bencana
		3. Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan subsidi uang sewa berdasarkan rencana pemenuhan SPM	Tidak Ada		Surat pernyataan : Dikarenakan tidak adanya kerusakan rumah akibat fenomena alam yang termasuk kategori



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
					bencana
		4. Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang telah mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	Tidak Ada		Surat pernyataan : Dikarenakan tidak adanya kerusakan rumah akibat fenomena alam yang termasuk kategori bencana
		5. Jumlah rumah tangga penerima layanan yang belum mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	Tidak Ada		Surat pernyataan : Dikarenakan tidak adanya kerusakan rumah akibat fenomena alam yang termasuk kategori bencana
		6. Jumlah total luasan (Ha) pengadaan tanah	1114 M2		
		1. Jumlah luasan (Ha) kawasan permukiman kumuh < 10 Ha	72,3 Ha	PUPR	Kelurahan Kp.Damai
		2. Jumlah unit peningkatan kualitas RTLH	42		
		3. Jumlah luasan (ha) penanganan infrastruktur kawasan kumuh	10,29 Ha		
		1. Jumlah rumah di kab/kota	36.058		
		2. Jumlah unit Peningkatan Kualitas RTLH	$\frac{42}{8188} \times 100\%$ = 0.51%		
		3. Jumlah rumah tidak layak huni	8.188		
		4. Jumlah rumah yang tidak dihuni	Tidak Ada		
		5. Rasio rumah dan KK	$\frac{59607}{36058} \times 100\%$ = 1.65%		
		6. Jumlah rumah pembangunan baru	42		
		1. Jumlah perumahan yang terfasilitasi PSU	15 Perumahan	PUPR	
		2. Jumlah unit rumah yang sudah difasilitasi air minum	15 Perumahan		
		3. Jumlah unit rumah yang terfasilitasi jalan Lingkungan	3122 unit		
		4. Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses sanitasi (on site / off site)	3122 unit		
		5. Jumlah perumahan yang	15 Perumahan		



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		terfasilitasi RTNH			
		6. Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses PJU	3122 unit		
		7. umlah pengembang yang tersertifikasi	15		
		8. umlah pengembang yang teregistrasi	15		
		9. Jumlah pengembang yang mendapat penyuluhan atau pelatihan	15		
5.	Ketentraman, ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1. Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam Kab/Kota yang ditangani	101	POLPP	
		2. Jumlah Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan	490		
		3. Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan	6 Perda		
		4. Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS	3 Orang		
		5. Tersedianya SOP dalam penegakan Perda dan Perkada serta penanganan gangguan trantibum	Ada		
		6. ersedianya sarana prasarana minimal	Ada		
		1. Persentase penyelesaian dokumen KRB sampai dengan dinyatakan sah/legal	$\frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$	BPBD	
		2. Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	$\frac{171.499}{177.472} \times 100\% = 96,66\%$		
		1. ersentase penyelesaian dokumen RPB sampai dinyatakan sah/legal	$\frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$		
		2. ersentase penyelesaian dokumen Renkon sampai dinyatakan sah/legal	Tidak ada		Surat keterangan : Karena refocusing anggaran
		3. ersentase jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan	$\frac{30}{54} \times 100\% = 55,55\%$		
		4. ersentase warga negara yang ikut pelatihan	Tidak Ada		Surat Keterangan
		5. ersentase warga negara yang	Tidak Ada		Surat Keterangan



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		mendapat layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana			
		6. ersentase warga negara yang mendapat peralatan perlindungan	$\frac{10.400}{177.472} \times 100 \% = 5,86 \%$		
		1. Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB	0%		Surat keterangan : Karena tidak ada status KLB
		2. Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	$\frac{100}{100} \times 100\% = 100\%$		
		3. Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana	$\frac{51}{51} \times 100\% = 100\%$		
		4. Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana	$\frac{1627}{1627} \times 100\% = 100\%$		
		1. Jumlah dan jenis layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di kabupaten/kota	46		
		2. Tersedianya pos sektor damkar yang dilengkapi sarana prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan di kantor kecamatan	tidak ada		Surat Keterangan
		3. Tersedianya aparatur selama 24 (jam) yang dilaksanakan secara bergantian (shift) di kantor kecamatan	tidak ada		Surat Keterangan
		4. Pos Damkar yang dilengkapi dengan sarana/prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan dan evakuasi di setiap keluarahan/desa	Dibuat dalam bentuk daftar		
		5. Jumlah dan jenis sarana prasarana pemadaman, penyelamatan dan evakuasi	16		
		6. Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi Standar Kualifikasi Pemadam sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran	6 Orang		
		7. Jumlah relawan kebakaran di bawah binaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau perangkat daerah yang	Tidak Ada	BPBD	Surat Keterangan



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		menyelenggarakan sub urusan kebakaran			
		8. Jumlah peningkatan kapasitas aparaturnya pemadam kebakaran	Tidak Ada		Surat Keterangan ; Karena refocusing anggaran
6.	Sosial	1. Jumlah layanan data dan pengaduan yang dimiliki	Tidak Ada	DSPPA	Surat Pernyataan
		2. Jumlah data penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang masuk dalam data terpadu FM dan OTM	7799 orang		(Terdiri dari : Penyandang disabilitas : 612; Lanjut Usia : 6968; Anak Terlantar : 219)
		3. Jumlah Tim Reaksi Cepat yang dibentuk	Tidak Ada		Surat Pernyataan
		4. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dijangkau	1384 orang		(terdiri dari : Penyandang disabilitas : 193; Anak Terlantar : 70; Lanjut Usia Terlantar : 1121)
		5. Jumlah kendaraan roda empat yang akses khusus layanan kedaruratan yang dimiliki	Tidak Ada		Surat Pernyataan
		6. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket permakanan sesuai standar gizi	334 orang		(Terdiri dari : Penyandang disabilitas : 74; Anak Terlantar : 70; Lanjut Usia Terlantar : 190)
		7. Jumlah rumah singgah/ shelter/tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar	Tidak Ada		Surat Pernyataan
		8. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket sandang	9 Orang		
		9. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan alat bantu	5 Orang		
		10. Jumlah alat bantu yang tersedia di rumah singgah/ shelter	Tidak Ada		Surat Pernyataan
		11. Jumlah paket perbekalan Kesehatan yang tersedia	Tidak Ada		Surat Pernyataan
		12. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan paket perbekalan kesehatan	Tidak Ada		Surat Pernyataan
		13. Jumlah tenaga Kesehatan yang disediakan di rumah singgah	Tidak ada		Surat Pernyataan
		14. Jumlah pekerja sosial profesional dan/atau TKS dan/atau relawan sosial yang disediakan	9 Orang		Terdiri dari 3 Peksos Fungsional, 1 Sakti Peksos Anak, 2 Pendamping Lansia, 2 Orang Pendamping Disabilitas
		15. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang	100 Orang		Penyandang Disabilitas 30, Anak Terlantar 70



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		mendapatkan bimbingan fisik, mental dan sosial sesuai standar di keluarga, masyarakat, Dinas Sosial, Rumah Singgah/Shelter dan/atau pusat kesejahteraan sosial			
		16. Jumlah bimbingan sosial yang dilaksanakan kepada keluarga dan masyarakat	3 Jenis		Bimbingan Sosial untuk Penyandang Disabilitas dan Anak Terlantar baik yang diselenggarakan oleh Balai Rehabilitasi Sosial, Kementaerian Sosial maupun Pemkab Belitung (APBD)
		17. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang difasilitasi untuk mendapatkan dokumen kependudukan	3 Orang (Disabilitas terlantar)		
		18. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan akses layanan pendidikan dan Kesehatan dasar	19 Orang (Penyandang Disabilitas terlantar yang mendapatkan akses layanan kesehatan dasar)		
		19. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan layanan penelusuran keluarga	1 Orang		
		20. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga	2 Orang (disabilitas mental dan anak terlantar)		
		21. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dirujuk	5 Orang (4 disabilitas mental dan 1 anak terlantar)		
		1. Jumlah korban bencana yang mendapatkan makanan	0	DSPPA	Surat pernyataan : Dikarenakan pada Anggaran/Kegiatan belum tersedia penganggaran untuk penyediaan bantuan makanan khusus keluarga rentan korban bencana di Kab. Belitung
		2. Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang	32 orang		
		3. Jumlah tempat penampungan pengungsi yang dimiliki	0		Surat pernyataan : Dikarenakan belum menetapkan titik lokasi tempat pengungsi secara permanen di daerah rawan



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
					bencana
		4. Jumlah paket permakanan khusus bagi kelompok rentan	0		Surat pernyataan : Dikarenakan pada Anggaran/Kegiatan belum tersedia penganggaran untuk penyediaan paket permakanan khusus keluarga rentan korban bencana di Kab. Belitung
		5. Jumlah korban bencana yang menerima pelayanan dukungan psikososial	0		Surat pernyataan : Karena belum tersedia penganggaran/program untuk dukungan psikososial pada korban bencana di Kab. Belitung
		6. Jumlah pekerja sosial profesional/tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial yang tersedia	75 Orang		
7.	Tenaga Kerja	1. Dokumen perencanaan tenaga kerja kabupaten/kota.	Tidak Ada		Surat keterangan : Dikarenakan RTKD masih dalam proses pembuatan
		2. Persentase akurasi proyeksi indikator dalam rencana tenaga kerja	Tidak Ada		Surat keterangan : Dikarenakan RTKD masih dalam proses pembuatan
		3. Jumlah perusahaan yang menyusun rencana tenaga kerja di kabupaten/kota	Tidak Ada		Surat keterangan : Dikarenakan RTKD masih dalam proses pembuatan
		1. Persentase penerapan Program PBK dengan kualifikasi klaster	$\frac{23}{31} \times 100\%$ =74.19%		
		2. Persentase instruktur bersertifikat kompetensi	$\frac{12}{16} \times 100\%$ = 75%		
		3. Rasio jumlah instruktur terhadap peserta pelatihan	$\frac{16}{464} \times 100\%$ = 3,5%	KUKMPTK	
		4. Persentase LPK yang terakreditasi	$\frac{7}{8} \times 100\%$ = 87,5%		
		5. Persentase LPK yang memiliki perizinan	$\frac{8}{8} \times 100\%$ = 100%		
		6. Jumlah penganggur yang dilatih	477 Orang		
		6. Persentase lulusan bersertifikat	$\frac{477}{477} \times 100\%$		



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		pelatihan	= 100%	KUKMPTK	
		7. Persentase penyerapan lulusan	$\frac{177}{477} \times 100\%$ = 37,1%		
		8. Lulusan bersertifikat kompetensi	$\frac{13}{477} \times 100\%$ = 2,8%		
		9. Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia	Tidak Ada		Surat Keterangan
		10. (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang diberikan	Tidak Ada		Surat Keterangan
		1. Persentase perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas	Tidak Ada		Surat Keterangan
		2. Data tingkat produktivitas total	Tidak Ada		Surat Keterangan
		1. Persentase perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP)	$\frac{70}{70} \times 100\%$ = 100%		
		2. Persentase perusahaan yang telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB)	$\frac{4}{17} \times 100\%$ = 23,53%		
		3. Rekapitulasi tahunan jumlah konfederasi SP/SB yang tercatat, federasi SP/SB yang tercatat, SP/SB di perusahaan yang tercatat, SP/SB di luar perusahaan yang tercatat dan anggota SP/SB di perusahaan	Tidak Ada		Surat Keterangan : Dikarenakan tidak ada perselisihan antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) dalam satu perusahaan di Tahun 2020
		4. Persentase perusahaan yang sudah menyusun struktur skala upah	$\frac{0}{70} \times 100\%$ = 0%		
		5. Persentase perusahaan yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan	$\frac{395}{395} \times 100\%$ = 100%		
		6. Persentase jumlah perusahaan yang berselisih	$\frac{24}{395} \times 100\%$ = 6,122%		
		7. Jumlah mogok kerja	2 Perusahaan		
		8. Jumlah penutupan perusahaan	1		



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
		9. Jumlah perselisihan kepentingan	1	KUKMPTK	Surat Pernyataan	
		10. Jumlah perselisihan antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) dalam 1 (satu) perusahaan	0			
		11. Jumlah perselisihan PHK	0			
		12. Jumlah pekerja/buruh yang ter-PHK	284			
		13. Jumlah perselisihan yang diselesaikan melalui perundingan bipartite	2			
		14. Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit kabupaten/kota yang diberdayakan	Tidak Ada			Surat Keterangan : Karena belum ada LKS Tripartit di Kabupaten Belitung Tahun 2020
		15. Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh	$\frac{7}{34} \times 100\% = 20,58\%$			
		1. Jumlah lowongan kerja yang tersedia di wilayah kabupaten/kota	187			
		2. Jumlah pencari kerja yang terdaftar di kab/kota	2.908			
		3. Jumlah Bursa Kerja Khusus (BKK) wilayah kab/kota	Tidak Ada			Surat keterangan : Belum ada BKK di Kab. Belitung
		4. Jumlah Tenaga Kerja Khusus terdaftar dalam satu kabupaten/kota	Tidak Ada			Surat Keterangan : Belum ada Tenaga Kerja Khusus di Kab. Belitung
		5. Jumlah Pejabat Fungsional Pengantar Kerja	2 orang			
		6. Jumlah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) antar kerja lokal dalam satu wilayah kab/kota	Tidak Ada			Surat Keterangan : Belum ada
		7. Jumlah perjanjian kerja yang disahkan oleh dinas bidang ketenagakerjaan Kab/Kota	Tidak Ada			Surat Keterangan : Belum ada
		8. Jumlah penempatan tenaga kerja melalui Informasi Pasar Kerja (IPK) Online (SISNAKER)	Tidak Ada			Surat Keterangan : Belum ada
		9. Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan sosialisasi	Tidak Ada			Surat Keterangan : Belum ada
		10. Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang terdata	Tidak Ada			Surat Keterangan : Belum ada



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		11. Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang mendapatkan fasilitasi kepulangan	Tidak Ada		Surat Keterangan : Belum ada
		12. Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan kerja	Tidak Ada		Surat Keterangan : Belum ada
		13. Data pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Tenaga Kerja Indonesia (TKI) purna dan keluarganya	Tidak Ada		Surat Keterangan : Belum ada
		14. Jumlah Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) yang dibentuk	Tidak Ada		Surat Keterangan : Belum ada
8	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1. Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten/kota yang telah dilatih PUG	Tidak Ada		Surat Keterangan : Karena belum ada Perangkat Daerah yang dilatih PUG
		2. Jumlah program/kegiatan PUG pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat kabupaten/kota	Tidak Ada		Surat Keterangan : Karena belum ada Perangkat Daerah yang dilatih PUG
		1. Jumlah media massa (cetak, elektronik) yang bekerja sama dengan pemkab/kota (dinas pppa) untuk melakukan KIE pencegahan kekerasan terhadap anak	5 Media		
		2. Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal	10 Lembaga		
		3. Persentase korban kekerasan anak yang terlayani	$\frac{10}{10} \times 100\%$ =100%	DSPPA	
		4. Jumlah lembaga layanan anak yang mendapat pelatihan	5 Media		
		5. Jumlah lembaga layanan anak yang mendapatkan bantuan keuangan/fasilitas oleh pemkab/kota (APBD kab/kota)	10 Lembaga		
		1. Jumlah organisasi kemasyarakatan yang bergerak dlm bidang perempuan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan pelatihan	18 Organisasi		
		2. Jumlah kader perempuan tingkat kabupaten/kota yang sudah dilatih	112 Orang		
		3. Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapat pelatihan	8 Lembaga		
		4. Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang	5 Lembaga		



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		mendapatkan bantuan keuangan oleh pemerintah kabupaten/kota			
		5. Jumlah kebijakan/program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi	2 Kebijakan		
		6. Jumlah lembaga penyediaan layanan perlindungan hak perempuan yg telah terstandardisasi	8 Lembaga		
		7. Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	$\frac{27}{27} \times 100\%$ =100%		
9	Pangan	1. Tersedianya infrastruktur perudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan	Ada	DKPP	MOU antara Kepala Bulog dengan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Belitung
		2. Tersalurkannya pangan pokok dan pangan lainnya	Ada		Berita Acara penyerahan bantuan
		3. Tersedianya regulasi harga minimum daerah untuk pangan lokal	Tidak Ada		Surat Pernyataan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Belitung terkait regulasi harga minimum daerah untuk pangan lokal belum tersedia
		4. Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pemenuhan konsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang	Ada		Kegiatan Pengembangan Tanaman Hortikultura (DID Tambahan) yang berupa bantuan saprodi budidaya sayuran untuk 12 Kelompok Wanita Tani (KWT) yang tersebar di 3 Kecamatan (Anggaran APBD Kabupaten Belitung); Kegiatan P2L Anggaran Pusat (Kementan RI) melalui Dinas Pangan Kepulauan Bangka Belitung
		5. Tersedianya peta ketahanan dan kerentanan pangan	Ada		
		6. Tertanganinya kerawanan pangan	Tidak Ada		Surat Pernyataan : Dikarenakan Kabupaten Belitung termasuk dalam kategori daerah rawan pangan dari aspek luas baku lahan sawah, dimana dengan kondisi tersebut akses pangan masih bias terjangkau sehingga belum memerlukan penanganan daerah rentan rawan pangan



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		7. Tersalurkannya cadangan pangan pada daerah rentan rawan pangan	Tidak ada		Surat pernyataan : Berdasarkan Data Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA) Tahun 2020 Desa yang termasuk prioritas rentan rawan pangan adalah Desa Pulau Gresik, dimana Desa Pulau Gresik termasuk dalam kategori desa rentan rawan pangan yang dinilai pada indikator ketersediaan luas baku lahan sawah/dari sisi produksi padi, dengan kondisi tersebut masyarakat khususnya penduduk Desa Pulau Gresik masih mampu untuk mengakses pangan sehingga belum memerlukan penyaluran cadangan pangan.
		8. Terlaksananya pengawasan keamanan pangan segar	Ada Kegiatan Peningkatan Mutu Keamanan Pangan		
10	Pertanahan	1. SK Izin Lokasi Yang Diterbitkan Oleh Bupati/Wali kota	8	Bagian Pemerintahan	
		2. SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Tanah Obyek Landreform yang bersumber dari Tanah Kelebihan Maksimum/ Absentee dan Daftar Subyek	Tidak Ada		Surat Pernyataan : Dikarenakan tidak ada Tanah Obyek Landreform yang bersumber dari Tanah Kelebihan Maksimum/ Absentee dan Daftar Subyek di Kab. Belitung
		3. SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Besarnya Ganti Rugi Kepada Bekas Pemilik Tanah Kelebihan Maksimum/Absentee	Tidak Ada		Surat Pernyataan : Dikarenakan tidak ada Tanah Obyek Landreform yang bersumber dari Tanah Kelebihan Maksimum/ Absentee dan Daftar Subyek di Kab. Belitung
		4. Dokumen Izin membuka tanah	Tidak Ada		Surat Pernyataan : Belum ada Dokumen Izin Membuka tanah karena masih proses pembahasan regulasi
		5. Dokumen Perencanaan Penggunaan Tanah Kabupaten/Kota	Tidak Ada		Surat pernyataan : Belum ada Dokumen perencanaan Penggunaan Tanah Kab. Belitung Tahun 2020
11	Lingkungan Hidup	1. Hasil perhitungan Kabupaten terhadap : a. Indeks kualitas air (IKA) Indeks Kualitas Udara (IKU) b. Indeks tutupan hutan (ITH) c. Indeks Tutupan Hutan (ITH)	<p>IKA (Indeks Kualitas Air) = 53.16 IKU (Indeks Kualitas Udara) = 92.63 ITH (Indeks Tutupan Hutan) = 46.19 IKLH = 67,62</p>	DLH	
		2. Tersedianya data dan informasi penanganan sampah di wilayah kabupaten/kota	1. Tersedianya Informasi terkait rasio angkutan pengelolaan sampah terhadap		



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			<p>volume timbunan sampah : Ada</p> <p>2. Tersedianya Informasi terkait kapasitas TPA terhadap volume timbunan sampah : Ada</p> <p>3. Tersedianya Informasi terkait jumlah TPST dibagi jumlah sampah pada masing-masing lingkungan : Tidak Ada</p>		
		3. Data izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota	$\frac{37}{47} \times 100\%$ <p>= 78,72%</p>		
		4. Rasio pejabat pengawas LH di daerah (PPLHD) di Kabupaten/Kota terhadap usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten/kota	$\frac{1}{77} \times 100\%$ <p>= 2,70%</p>		
		5. Penetapan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah kabupaten/ kota	$\frac{0}{0} \times 100\%$ <p>= 0%</p>		
		6. Terfasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat hukum adat terkait PPLH	$\frac{0}{0} \times 100\%$ <p>= 0%</p>		
		7. Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberikan diklat	$\frac{20}{20} \times 100\%$ <p>= 100%</p>		
		8. Penanganan Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah kabupaten/kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota yang ditangani	$\frac{6}{6} \times 100\%$ <p>= 100%</p>		
12	Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	1. Penerbitan akta perkawinan	$\frac{77}{77} \times 100\%$ <p>= 100%</p>	Disdukcapil	
		2. Penerbitan akta perceraian	$\frac{10}{10} \times 100\%$ <p>= 100%</p>		
		3. Penerbitan akta kematian	$\frac{1001}{1001} \times 100\%$ <p>= 100%</p>		



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
		4. Penyajian data kependudukan	$\frac{3}{2} \times 100\%$ = 150%			
13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1. Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa	5	DPPKBPM		
		2. Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya	4			
		3. Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan	1209	DPPKBPM		
		4. Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan	3			
		1. Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa	5		DPPKBPM	
		2. Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya	4			
		3. Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan	1209			
		4. Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan	3			
14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1. Tersedianya dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang di-Perdakan	Ada	DPPKBPM		
		2. Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun	20,08			
		3. Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	$\frac{250}{6467} \times 1000$ = 38,65			
		4. Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK				



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		(advokasi dan KIE)	$\frac{24343}{24343} \times 100\%$ = 100%		
		5. Jumlah stakeholders/pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK	13		
		6. Persentase Fasilitas Kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB MKJP	$\frac{14}{14} \times 100\%$ = 100%		
		7. Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	$\frac{3139}{29661} \times 100\%$ = 10,58%		
		8. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memiliki Kelompok Kerja KKBPK yang efektif	18 pokja	DPPKBPMMD	
		9. Persentase pelayanan KB Pasca Persalinan	$\frac{1598}{3207} \times 100\%$ = 49,83%		
		10. Persentase kesertaan KB di Kabupaten dan Kota dengan kesertaan rendah	$\frac{4}{49} \times 100\%$ = 8,16%		
		11. Persentase kesertaan KB keluarga Penerima Bantuan Luran (PBI)	$\frac{5097}{6328} \times 100\%$ = 80,55%		
15	Perhubungan	1. Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan tipe C	$\frac{21}{52} \times 100\%$ = 40,38%		
		2. Terlaksananya pelayanan uji berkala	$\frac{2065}{3711} \times 100\%$ = 55,65%		
		3. Penetapan tarif angkutan orang antar kota dalam Kabupaten, serta angkutan perkotaan dan pedesaan kelas ekonomi	$\frac{1}{1} \times 100\%$ = 100%	DISHUB	
		1. Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten atau Kota	$\frac{2538}{3188} \times 100\%$ = 79,61%		
16	Komunikasi dan Informatika	1. Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas	$\frac{22}{31} \times 100\%$ = 70,97%	DISKOMINFO	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Kominfo			
		2. Persentase perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo	$\frac{20}{31} \times 100\%$ = 64.52%		
		3. Tersedianya sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah	Ya		
		1. Persentase kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2015	$\frac{114}{114} \times 100\%$ = 100%		
		2. Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar	$\frac{24}{31} \times 100\%$ = 77,42%		
		3. Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundangundangan	$\frac{31}{31} \times 100\%$ = 100%		
		4. Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik	$\frac{26}{26} \times 100\%$ = 100%		
		5. Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik	$\frac{22}{22} \times 100\%$ = 100%		
		6. Persentase sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	$\frac{112}{112} \times 100\%$ = 100%	DISKOMINFO	
		7. Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah	$\frac{23}{26} \times 100\%$ = 88.46%		
		8. Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah	$\frac{31}{31} \times 100\%$ = 100%		
		9. Persentase perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah	$\frac{31}{31} \times 100\%$ = 100%		



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			= 100%		
		10. Persentase perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data (sesuai renstra kominfo)	$\frac{31}{31} \times 100\%$ = 100%		
		11. Persentase data yang dapat berbagi pakai	$\frac{33}{33} \times 100\%$ = 100%		
		12. Persentase perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung smart city	$\frac{22}{31} \times 100\%$ = 70.96%		
		13. Persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo	$\frac{56}{68} \times 100\%$ = 82.35%		
		14. Tersedianya peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi e-government	ADA		
		1. Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah provinsi yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi	$\frac{4}{5} \times 100\%$ = 80%	DISKOMINFO	Keterangan : Komunitas masyarakat/ Mitra Strategis termasuk di antaranya : KIM, FK Metra, JRKI, PWI, Blogger Daerah, Satgas Medsos.
		2. Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)	$\frac{26}{33} \times 100\%$ = 78.79%		
		3. Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang telah ditetapkan	$\frac{11}{12} \times 100\%$ = 91.67%		
17	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1. Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	$\frac{0}{39} \times 100\%$ = 0%	DKUKMPTK	surat pernyataan bahwa tidak ada pengajuan ijin usaha simpan pinjam
		2. Persentase fasilitasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam oleh koperasi untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	$\frac{0}{0} \times 100\%$ = 0%		surat pernyataan bahwa tidak ada pengajuan ijin pembukaan kantor cabang
		3. Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	$\frac{137}{189} \times 100\%$ = 72,4%		



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		4. Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Nihil		Surat Pernyataan : Dikarenakan adanya pandemi covid-19 sehingga tidak ada penilaian kesehatan koperasi jenis usaha simpan pinjam di tahun 2020
		5. Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Nihil		Surat Pernyataan : Dikarenakan adanya refocusing anggaran akibat pandemi covid - 19 sehingga tidak ada koperasi dan anggotanya untuk mengikuti ataupun menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan di tahun 2020
		6. Persentase jumlah anggota operasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Nihil		Surat Pernyataan : Dikarenakan adanya refocusing anggaran akibat pandemi covid - 19 sehingga tidak ada koperasi dan anggotanya untuk mengikuti ataupun menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan di tahun 2020
		7. Persentase koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	$\frac{0}{189} \times 100\%$ = 0%		Surat Pernyataan : Dikarenakan adanya pandemi covid -19 sehingga tidak ada koperasi dan yang menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan di tahun 2020
		8. Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan			Tidak Perlu di isi
		9. Persentase fasilitasi penerbitan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	$\frac{36}{189} \times 100\%$ = 19,04%		
		10. Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	$\frac{0}{189} \times 100\%$ = 0%		Surat Pernyataan : Dikarenakan tidak ada koperasi yang mengajukan dukungan fasilitas pembiayaan tahun 2020
		11. Persentase yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	$\frac{2}{189} \times 100\%$ = 1,058%		
		12. Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi	$\frac{135}{189} \times 100\%$		



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
		pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	= 71,42%			
		13. Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	$\frac{3}{189} \times 100\%$ = 1,015%			
		1. Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	$\frac{2447}{20503} \times 100\%$ =11,93%	KUKMPTK		
		2. Persentase jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam sistem online data system (ODS)	$\frac{2857}{20503} \times 100\%$ = 13,93%			
		3. Persentase jumlah usaha mikro yang bermitra	$\frac{3578}{20503} \times 100\%$ = 17,45%			
		4. Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha	$\frac{125}{6116} \times 100\%$ = 2,04%			
		5. Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	$\frac{219}{6116} \times 100\%$ =3,58%			
		6. Rasio usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	$\frac{0}{20503} \times 100\%$ =0%			Surat Pernyataan : Tidak adanya fasilitasi pelatihan dikarenakan adanya refocusing anggaran untuk menanggulangi pandemic covid-19
		7. Persentase usaha mikro yang diberikan pendampingan melalui Lembaga pendampingan	$\frac{70}{20503} \times 100\%$ = 0.34%			
18	Penanaman Modal	1. PERDA mengenai pemberian fasilitas/insentif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	2 Jenis	DPMPTSP		
		2. Standar operasional prosedur pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal	Belum ada		Dokumen SOP pelaksanaan Pemberian fasilitas/Insentif penanaman modal DPMPTSP Kabupaten Belitung tertulis dalam Peraturan Bupati Belitung Nomor 35 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Kabupaten Belitung	
		3. Laporan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif	0		Selama tahun 2020 belum ada investor yang	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		penanaman modal			mengajukan insentif atau keringanan lainnya sehingga belum ada laporan evaluasi pelaksanaan kegiatan tersebut.
		4. Kegiatan seminar bisnis, forum, one on one meeting	1		Pada tahun 2020 Bidang Penanaman Modal DPMPSTSP Kab. Belitung mengikuti sosialisasi yang diselenggarakan Pemkab Belitung yakni Sosialisasi Perbup Belitung No.23 Tahun 2020 tentang Pedoman Tatatanan Normal Baru Produktif dan Aman dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 Bidang Layanan Investasi
		5. Kegiatan pameran penanaman modal	3		
		6. Kegiatan penerimaan misi penanaman modal	4		
		7. Konsultasi perizinan dan non perizinan penanaman modal	1.210 konsultasi perizinan		
		8. Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal	840 Izin		
		9. Laporan realisasi penanaman modal	Rp.632.609.960.000	DPMPSTSP	
		10. Pembinaan aparatur penanaman modal tingkat kabupaten/kota	4 orang		
		11. Pembinaan penanaman modal PMA dan PMDN	47 perusahaan		
		12. Tersedianya data dan informasi perizinan dan non perizinan provinsi kabupaten / kota	10 data		
19	Kepemudaan dan Olahraga	1. Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan	200 Orang		
		2. Jumlah pemuda yang mendapat bantuan kewirausahaan	Tidak Ada		Surat Pernyataan
		1. Jumlah pemuda yang medapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukarelawanan dan kepeloporan pemuda	Tidak Ada	Dispora	Surat Pernyataan
		2. Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang mendapat pelatihan manajemen organisasi kepemudaan	Tidak Ada		Surat Pernyataan



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		1. Jumlah pelatih olah raga yang memiliki kompetensi di satuan2 pendidikan	130 Orang		
		2. Jumlah penyelenggaraan event OR prestasi tingkat daerah	2		
20	Statistik	1. Tersedianya buku profil daerah	Ada	Diskominfo	
		2. Jumlah survey statistik sektoral yang dilakukan	0%		surat keterangan : karena belum ada Forum data Kabupaten
		3. Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan	0%		surat keterangan : karena belum ada Forum data Kabupaten
		4. Jumlah survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi BPS	0%		surat keterangan : karena belum ada Forum data Kabupaten
		5. Jumlah kompilasi statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dr BPS	0%		surat keterangan : karena belum ada Forum data Kabupaten
		6. Persentase kelengkapan metadata kegiatan statistik sektoral	0%		surat keterangan : karena belum ada Forum data Kabupaten
		7. Persentase kelengkapan metadata variabel sektoral	0%		surat keterangan : karena belum ada Forum data Kabupaten
21	Persandian	1. Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal dibanding banyaknya jumlah kegiatan strategis yang harus diamankan	0%	Diskominfo	surat keterangan: dikarenakan belum tersedianya sarana dan prasarana dalam hal pengamanan sinyal berupa Alat Pendukung Utama (APU) seperti Jammer. Pada Tahun Anggaran 2022 akan diusulkan pengadaan Jammer pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Berbasis Elektronik dan Non Elektronik
		2. Persentase sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen yang telah menerapkan prinsipprinsip manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian dibanding jumlah sistem elektronik yang ada pada pemerintah daerah	$\frac{25}{30} \times 100\% = 83,33\%$		
		3. Persentase sistem elektronik/asset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah	0%		surat keterangan : dikarenakan Kategori Sistem Elektronik (SE) yang telah diukur melalui Penilaian Indeks



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
					KAMI Tahun 2020 sebesar 20 dengan Tingkat Ketergantungan yaitu Tinggi . Berdasarkan penilaian Pengelolaan resiko keamanan informasi terhadap SE tersebut dengan mempertimbangkan Daftar Identifikasi Risiko pada Data Center (Ruang Server) memiliki Nilai Risiko Dasar (NRD) yaitu Tinggi dan Sangat Tinggi pada asset yang telah diidentifikasi sebelumnya.
		4. Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerintah (PHKS) yang ditetapkan	0%		surat keterangan : Dikarenakan belum diidentifikasinya Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi (PHKS) dan direncanakan akan diusulkan pada Tahun Anggaran 2022 melalui agenda Penetapan PHKS dan Pembentukan Forum Komunikasi Sandi Daerah pada sub Kegiatan Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten
22	Kebudayaan	1. Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi (inventarisasi, pengamanan pemeliharaan, penyelamatan dan publikasi)	33	Dikbud	<ol style="list-style-type: none"> Jam Gede Eks tuan Rumah Tuan Kuase Museum tanjungpandan Gereja Regina pacis Eks Europeesche Klinik Eks Zusterhius Eks Chineesche Hospital Rumah type kolonial Danlanud Rumah Type Kolonial Dandim Eks Societed Kelenteng Hok Tek Che Holland Indisch School Eks Gedung Landraad Eks Tuintdienst Eks kantor Asisten Residen Eks Rumah Asisten residen
		2. Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan (penyebarluasan, pengkajian, penayaan keberagaman	38		
		3. Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dimanfaatkan (membangun karakter bangsa,meningkatkan ketahanan budaya,dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat)	33		



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
					17. Gedung Nasional 18. Eks Districhoofd 19. Dockyard 20. Kerkhof 21. Mesjid Tua Sijuk 22. Kelenteng Sijuk 23. Situs Padang Kelarin 24. Situs Padang Pendam 25. Mercusuar Pulau Lengkuas 26. Situs gunung lilangan 27. Situs kota tanah 28. Situs Gunung tajam 29. Situs Parit Gunung 30. Situs aik labu kembiri 31. Situs Luday 32. Mercusuaer P.Sumedang 33. Mercusuar Tanjung lancur
		4. Jumlah SDM, lembaga dan pranata yang dibina (peningkatan kompetensi, standarisasi dan sertifikasi, serta peningkatan kapasitas tata kelola)	2	Dikbud	1. Alwan Hadi, S.S, M.Hum 2. Jeriyadi A Lumbu, S.S, M.Hum
		5. Register cagar budaya (pendaftaran, pengjasian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, penghapusan)	38		
		6. Perlindungan cagar budaya kabupaten/kota (penyelamatan, zonasi, pemeliharaan dan pemugaran)	38		
		7. Layanan perijzinan membawa cagar budaya provinsi ke luar provinsi dengan dukungan data	0		Surat Pernyataan
		8. Pengembangan cagar budaya Provinsi (penelitian, revitalisasi, adaptasi)	25		
		9. Pemanfaatan cagar budaya Provinsi (dalam hal agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata)	27		1. Jam Gede 2. Eks tuan Rumah Tuan Kuase 3. Museum tanjungpandan 4. Gereja Regina pacis 5. Eks Europeesche Klinik 6. Eks Zusterhuis 7. Eks Chineesche Hospital 8. Rumah type kolonial 9. Eks Societed 10. Kelenteng Hok Tek Che 11. Holland Indisch School 12. Eks Gedung Landraad 13. Eks Tuintdienst 14. Eks Rumah Asisten residen 15. Gedung Nasional 16. Eks Districhoofd 17. Dockyard 18. Mesjid Tua Sijuk 19. Kelenteng Sijuk 20. Mercusuar Pulau Lengkuan 21. Situs gunung lilangan 22. Situs kota tanah 23. Situs Gunung tajam 24. Situs Parit Gunung 25. Situs aik labu kembiri



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
					26. Mercusuar P.Sumedang 27. Mercusuar Tanjung lancur
		10. Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum	1.556		
		11. Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan museum Peningkatan akses masyarakat dalam pengelolaan sarana dan prasarana museum.	14.196		4 kegiatan 1. Lomba Film Dokumenter 2. Lomba Fotografi 3. Lomba Melukis 4. Pemeliharaan Museum
		12. Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum			Tidak Perlu Diisi
		13. Pembentukan tim pendaftaran cagar budaya	0		Surat Pernyataan
		14. Pembentukan tim ahli cagar budaya provinsi	0		Surat Pernyataan
		15. Fasilitas sertifikasi tim ahli cagar budaya	0		Surat Pernyataan
		16. Pemetaan sdm cagar budaya dan permuseuman	4		1. Alwan Hadi,SS,M.Hum 2. Jefriyadi A Lumbu SS,M.Hum 3. Ridwan 4. Yusri
		17. Peningkatan kompetensi sdm cagar budaya dan permuseuman	2		1. Alwan Hadi,S,S,M.Hum 2. Jeriyadi A Lumbu, SS, M.Hum
		18. Penyediaan sarana dan prasarana pendaftaran cagar budaya dan permuseuman	4		1. GPS 2. Timbangan Digital 3. Penggaris Digital 4. Kamera
		19. Penyelenggaraan kegiatan museum yang melibatkan masyarakat	6		1. Lomba Film Dokumenter 2. Lomba Fotografi 3. Lomba Melukis 4. Pemeliharaan Museum 5. Pertunjukan Musik 6. Belajar Bersama di Museum
				Dikbud	
23	Perpustakaan	1. Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk	$\frac{385509}{177472} = 2,172224351$		
		2. Persentase kemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat	$\frac{332985}{177472} \times 100\% = 187,6267806$		
		3. Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk	$\frac{122}{177472} = 0,00068$		
		4. Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	$\frac{14}{112} \times 100\% = 12,5\%$		
		5. Jumlah pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat	13 Kegiatan		
		1. Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/dialih media (digitalisasi)/ terdaftar yang ada di wilayahnya	2 Koleksi		



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		2. Jumlah naskah kuno yang dialih aksara dan dialih bahasa	2 Koleksi		
		3. Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya (item)	12 Koleksi		
24	Kearsipan	1. Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	$\frac{2178}{7452} \times 100\%$ = 29.22%	Arpus	
		2. Persentase arsip in-aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	$\frac{4391}{7452} \times 100\%$ = 58.92%		
		3. Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	$\frac{883}{7452} \times 100\%$ = 11.84%		
		4. Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	Tidak ada		Surat pernyataan
		1. Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK	Tidak ada		Surat pernyataan
		2. Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang sesuai NSPK	Tidak ada		Surat pernyataan
		3. Penyelamatan arsip perangkat daerah Kabupaten/Kota yang digabung dan atau dibubarkan dan pemekaran daerah kecamatan/kelurahan yang sesuai NSPK di provinsi	Tidak ada		Surat pernyataan
		4. Autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan kabupaten/kota yang sesuai NSPK	Tidak ada		Surat pernyataan
		5. Pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip yang sesuai NSPK	Tidak ada		Surat pernyataan
		6. Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah Kabupaten/Kota yang sesuai NSPK	Tidak ada		Surat Pernyataan
25	Kelautan dan Perikanan	1. Jumlah rumah tangga nelayan yang melakukan diversifikasi usaha (RTP)	49 RTP	DKP	
		2. Persentase Tempat Pelelangan Ikan yang operasional			Surat Pernyataan : Dikarenakan proses



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			$\frac{0}{1} \times 100\% = 0\%$		operasional penyelenggaraan TPI di Kabupaten Belitung sampai tahun ini baru pada tahap proses sosialisasi dan persiapan koperasi/calon pengelola sehingga belum beroperasi
		3. Jumlah Izin Usaha Perikanan (IUP) di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/ kota yang diterbitkan	21 Izin Budidaya		
		4. Jumlah pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan (pendidikan dan pelatihan/penyuluhan dan pendampingan/ kemitraan usaha/ kemudahan akses iptek dan informasi/dan penguatan kelembagaan)	120 Pembudidaya	DKP	
		5. Jumlah benih budidaya air tawar dan air payau yang di produksi	2.079.111 ekor		
26	Pariwisata	1. Jumlah entitas pengelolaan destinasi	123 Destinasi Wisata		Daya Tarik Wisata = 68 Desa Wisata = 20 Buah Geosite Belitung Geopark = 17 Geosite Hutan Kemasyarakatan = 18 HKM
		2. Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata	1132		
		3. Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di kabupaten/kota	1. Daya Tarik usaha = 69 2. Kawasan pariwisata = 1 3. Jasa transportasi wisata = 27 4. Jasa perjalanan wisata = 214 5. Jasa makanan dan minuman = 150 6. Penyediaan akomodasi = 71 7. Penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi = 1 8. Penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran = 1 9. Jasa informasi pariwisata = 0 10. Jasa konsultan pariwisata = 0 11. Jasa pramuwisata = 0 12. Wisata tirta = 11 13. Spa = 0	Dispar	
		4. Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	= 49 Negara = 6.288 Orang		
		5. Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri	11 event		



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		6. Jumlah event luar negeri yang diikuti kabupaten/kota	2 event		
		7. Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada even promosi pariwisata di dalam negeri	279		
		8. Persentase tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi	$\frac{1362}{2801} \times 100\%$ = 48.63%		
		9. Persentase SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan	$\frac{600}{810} \times 100\%$ = 74,07%		
		10. Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat	4 Kecamatan		
27	Pertanian	1. Jumlah Sarana dan prasana pertanian yang diberikan	<ul style="list-style-type: none"> Data Jumlah Sarana yang diberikan 17 Jenis Prasarana tidak ada pembangunan/tidak ada yang diberikan (Surat Pernyataan Kepala Bidang Prasarana dan Sarana dan Penyuluhan bahwa selama tahun 2020 tidak ada prasarana yang diberikan) 	DKPP	
		2. Prasaran pertanian yang digunakan	95 Unit		
		3. Penerbitan izin usaha pertanian	0		Surat Pernyataan Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Belitung bahwa selama tahun 2020 tidak ada fasilitasi penerbitan izin usaha pertanian
		4. Persentase prasarana yang digunakan	$\frac{95}{97} \times 100\%$ = 97.94%		
		5. Persentase jumlah usulan izin usaha pertanian kab/kota	0%		Surat Pernyataan Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Belitung bahwa tidak ada usulan izin usaha pertanian
		1. Persentase fasilitasi penanggulangan bencana	$\frac{5}{5} \times 100\%$ = 100%		



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
28	Kehutanan	1. Tersedianya dokumen rencana pengelolaan Tahura	Tidak Ada		Surat Pernyataan : Belum memiliki Dokumen Rencana Pengelolaan Tahura yang disahkan karena menunggu legalitas Surat Keputusan arahan pengelolaan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Selain itu, UPTD Tahura selaku unit teknis structural pengelola Tahura juga belum terbentuk.
		2. Pemberdayaan masyarakat di daerah penyangga	Tidak Ada		Sda
		3. Pemulihan ekosistem pada Tahura	Tidak Ada		Sda
		4. Menurunnya gangguan kawasan TAHURA	Tidak Ada		Sda
		5. Tersedianya dokumen rencana pengelolaan Tahura	Tidak Ada		Sda
		6. Pemberdayaan masyarakat di daerah penyangga	Tidak Ada		Sda
29	Energi Sumber Daya Mineral	Penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah kab/kota	Nihil		Dikarenakan tidak ada kegiatan Pemanfaatan langsung panas bumi dalam Kabupaten Belitung
30	Perdagangan	1. Persentase perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan untuk izin : a. Pusat perbelanjaan b. Toko swalayan	a. $\frac{100}{25} \times 100\%$ = 100% b. $\frac{100}{25} \times 100\%$ = 100%	DKUKMPTK	
		2. Persentase penerbitan TDG	$\frac{55}{55} \times 100\%$ = 100%		
		3. Persentase Gudang yang tidak mempunyai TDG	$\frac{0}{55} \times 100\%$ = 0%		
		4. Persentase penerbitan STPW yang tepat waktu untuk : a. Penerima waralaba dari waralaba dalam negeri b. Penerima waralaba lanjutan dari	Nihil	DKUKMPTK	Surat Keterangan : Dikarenakan belum ada perjanjian waralaba bagi penerima waralaba lanjutan yang diberikan setelah memenuhi persyaratan pendaftaran



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		waralaba dalam negeri c. Penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri			
		5. Persentase pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat daerah Kab/Kota	Nihil		Surat Keterangan : Dikarenakan tidak ada fasilitas penyimpanan bahan berbahaya di Kabupaten Belitung
		6. Persentase penerbitan SKA yang tepat waktu	$\frac{163}{163} \times 100\%$ = 100%		
		7. Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	$K = (a+b) \times 100\%$ $= (0,5+0,5) \times 100\%$ = 100%		
		8. Persentase koefisien variasi harga antar waktu	0,09%		
		1. Jumlah pupuk dan pestisida yang tersalurkan	$\frac{2264}{3909 \times 4344} \times 100\%$ = 0,01%		
		1. Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan	$\frac{2928}{3379} \times 100\%$ = 86,65%		
		2. Persentase kesesuaian BDKT yang diawasi terhadap ketentuan yang berlaku	Nihil		Surat Keterangan : Dikarenakan belum melakukan pemeriksaan terhadap Barang dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) di Kab. Belitung
31	Perindustrian	Persentase jumlah penetapan izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) yang lokasinya di daerah kabupaten/kota	Bidang Perindustrian DPMPSTPP Kabupaten Belitung ditahun 2020 tidak menerbitkan Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI)	DPMPSTPP	Dibuktikan dengan Surat Pernyataan Kepala Dinas DPMPSTPP Kab. Belitung
		Persentase terselesaikannya dokumen RPIK sampai dengan ditetapkannya menjadi PERDA	Dokumen RPIK bidang perindustrian DPMPSTPP Kabupaten Belitung masih berada pada tahapan tersusunnya naskah akademik (30%)		Dibuktikan dengan Surat Pernyataan Kepala Dinas DPMPSTPP Kab. Belitung
		Persentase Jumlah izin yang diterbitkan usaha industri (IUI) kecil dan IUI menengah yang diterbitkan	$\frac{1}{1} \times 100\%$		Dokumen Izin IUI yang terbit No. 503/1035/DPMPSTPP/2020 tanggal 8



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			= 100%		Oktober 2020 atas nama CV. Adam Jaya Group
		Persentase jumlah izin perluasan industri (IPUI) bagi industri Kecil dan menengah yang diterbitkan	Bidang Perindustrian DPMPSTSP Kabupaten Belitung ditahun 2020 tidak menerbitkan Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah		Dibuktikan dengan Surat Pernyataan Kepala Dinas DPMPSTSP Kab. Belitung
		Persentase data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di Kabupaten/Kota yang masuk dalam SIINas terhadap total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di Kabupaten/Kota	Bidang Perindustrian DPMPSTSP Kabupaten Belitung sampai saat ini belum memiliki akses ke aplikasi SIINas, sehingga belum dapat mengukur persentase data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan terhadap total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industry		



2.2.2 Indikator Kinerja Kunci Hasil

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pendidikan	1. Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi PAUD	$\frac{6385}{6146} \times 100\%$ = 103,899%	Dindikbud	
		2. Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	$\frac{19672}{19132} \times 100\%$ = 102,822%		
		3. Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	$\frac{7945}{8837} \times 100\%$ = 89,906%		
		4. Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	$\frac{10}{85} \times 100\%$ = 11,765%		
2	Kesehatan	1. Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	$\frac{126}{177472}$ = 0,071	Dinkes	
		2. Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	$\frac{1}{3} \times 100\%$ = 33,333%		
		3. Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	$\frac{3102}{3413} \times 100\%$ = 90,888%		
		4. Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	$\frac{2780}{3257} \times 100\%$ = 85,355%		
		5. Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	$\frac{3181}{3197} \times 100\%$ = 99,5%		
		6. Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	$\frac{10075}{10874} \times 100\%$ = 92,652%		
		7. Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	$\frac{24889}{27578} \times 100\%$ = 90,249%		
		8. Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	$\frac{59628}{114224} \times 100\%$ = 52,203%		



No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		9. Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	$\frac{16281}{16682} \times 100\%$ = 97,596%		
		10. Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	$\frac{17223}{45699} \times 100\%$ = 37,688%		
		11. Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	$\frac{2917}{2435} \times 100\%$ = 119,795%		
		12. Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	$\frac{288}{295} \times 100\%$ = 97,627%		
		13. Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	$\frac{1708}{2524} \times 100\%$ = 67,67%		
		14. Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	$\frac{3603}{3764} \times 100\%$ = 95,723%		
3	Pekerjaan Umum	1. Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	$\frac{182,07}{288,37} \times 100\%$ = 63,138%		
		2. Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan kabupaten/kota	$\frac{9375,3}{87633,17} \times 100\%$ = 10,698%		
		3. Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	$\frac{556,45}{1030}$ = 54,024		
		4. Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	$\frac{43769}{54387} \times 100\%$ = 80,477%	PUPR	
		5. Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	$\frac{45574}{54387} \times 100\%$ = 83,796%		
		6. Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	$\frac{250}{250} \times 100\%$ = 100%		



No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		7. Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	$\frac{607,201}{666,024} \times 100\%$ = 91,168%		
		8. Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	$\frac{317}{444}$ = 71,396		
		9. rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	$\frac{0}{0} \times 100\%$ = 0%		Surat Keterangan
4	Perumahan Rakyat	1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana Kabupaten /kota	$\frac{0}{0} \times 100\%$ = 0%	PUPR	Surat Keterangan
		2. Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	$\frac{0}{0} \times 100\% = 0\%$ 0		Surat Keterangan
		3. Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	$\frac{10,29}{72,3} \times 100\%$ = 14,232%		
		4. Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	$\frac{8188}{36058} \times 100\%$ = 22,708%		
		5. Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana,Sarana dan Utilitas Umum)	$\frac{3122}{36058} \times 100\%$ = 8,658%		
5.	Ketentraman, ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1. Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	$\frac{100}{101} \times 100\%$ = 99,01%	POLPP	
		2. Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	$\frac{6}{24} \times 100\%$ = 25%		
		3. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	171.516	BPBD	
		4. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	10.430		
		5. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	222		
		6. Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi	$\frac{15}{18} \times 100\%$		



No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		korban kebakaran	= 83.333%		
		7. Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	14,44 Menit		
6	Sosial	1. Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (indikator SPM)	$\frac{1221}{1412} \times 100\%$ = 86.473%	DPPAS	
		2. Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	$\frac{32}{32} \times 100\%$ =100%		
7.	Tenaga Kerja	1. Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	$\frac{0}{0} \times 100\%$ = 0%	KUKMPTK	Surat Keterangan
		2. Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	$\frac{0}{0} \times 100\%$ = 0%		Surat Keterangan+Doukemen Pendukung
		3. Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	$\frac{-2,31}{94886} \times 100\%$ = - 0,002%		
		4. Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	$\frac{395}{395} \times 100\%$ =100%		
		5. Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota	$\frac{133}{2908} \times 100\%$ = 4,574%		
8	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1. Persentase ARG pada belanja langsung APBD	$\frac{1593988500}{581893094798,12} \times 100\%$ =0,274%	DPPAS	
		2. Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	$\frac{10}{54248} \times 100\%$ = 0,018%		
		3. Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	$\frac{27}{87296}$ = 0,0003092		



No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
9	Pangan	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras dan atau jagung sesuai kebutuhan)	0.151%	DKPP	
10	Pertanahan	1. Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	$\frac{10868626}{10868626} \times 100\%$ = 100%	Bagian Pemerintahan	
		2. Persentase Penetapan Tanah Untuk Pembangunan Fasilitas Umum	$\frac{11866,37}{11866,37} \times 100\%$ = 100%		
		3. Tersedianya Lokasi Pembangunan Dalam Rangka Penanaman Modal	$\frac{10868626}{10868626} \times 100\%$ = 100%		
		4. Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	$\frac{0}{0} \times 100\%$ = 0%		
		5. Tersedianya tanah untuk masyarakat	$\frac{0}{0} \times 100\%$ = 0%		
		6. Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	$\frac{11}{11} \times 100\%$ = 100%		
11	Lingkungan Hidup	1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten	IKLH Kabupaten Belitung IKA = 19,99 IKU = 37,51 ITH = 10,12 = 67,62	DLH	
		2. Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kabupaten	$\frac{11679,22}{26092,97} \times 100\%$ = 44.76%		
		3. Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten	$\frac{48}{56} \times 100\%$ = 85.714%		
12	Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	1. Perekaman KTP Elektronik	$\frac{124866}{127147} \times 100\%$ = 98,206%	Dukcapil	
		2. Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	$\frac{25709}{50325} \times 100\%$ = 51,086%		
		3. Kepemilikan akta kelahiran	$\frac{52447}{54248} \times 100\%$ = 96,68%		



No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		4. Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	$\frac{3}{31} \times 100\%$ = 9,677%		
13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1. Persentase Pengentasan Desa Tertinggal	$\frac{0}{0} \times 100\%$ = 0%	DPPKBPM	Tidak ada Desa Tertinggal
		2. Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	$\frac{0}{19} \times 100\%$ = 0%		Tidak ada Desa Mandiri
14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1. TFR (Angka Kelahiran Total)	TFR : 2,42	DPPKBPM	
		2. Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	$\frac{24343}{29661} \times 100\%$ = 82,071%		
		3. Persentase kebutuhan berKB yang tidak terpenuhi (unmet need)	$\frac{2184}{29661} \times 100\%$ = 7,363%		
15	Perhubungan	1. Rasio konektivitas Kabupaten	17,26	DISHUB	
		2. V/C Ratio di Jalan Kabupaten	80%		
16	Komunikasi dan Informatika	1. Persentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	$\frac{20}{31} \times 100\%$ = 64,516%	DISKOMINFO	
		2. Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	$\frac{30}{42} \times 100\%$ = 71,429%		
		3. Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	$\frac{110134}{116285} \times 100\%$ = 94,71%		
17	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1. Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	$\frac{48}{189} \times 100\%$ = 25,397%	KUKMPTK	
		2. Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	$\frac{2447}{20503} \times 100\%$ = 11,935%		
18	Penanaman Modal	Persentase peningkatan investasi di Kabupaten	$\frac{46751760000}{5858200000} \times 100\%$ = 7,98%	DPMPPTSP	
19	Kepemudaan dan Olahraga	1. Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi	$\frac{24}{40335} \times 100\%$	DISPORA	



No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		mandiri	= 0,06%		
		2. Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	$\frac{1615}{40335} \times 100\%$ = 4,004%		
		3. Peningkatan Prestasi Olahraga	17 Medali		
20	Statistik	1. Persentase Organisasi Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	$\frac{31}{31} \times 100\%$ = 100%	DISKOMINFO	
		2. Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	$\frac{31}{31} \times 100\%$ = 100%		
21	Persandian	Tingkat Keamanan informasi pemerintah	$\frac{292}{645} \times 100\%$ = 45,271%	DISKOMINFO	
22	Kebudayaan	Terlestarikannya Cagar Budaya	$\frac{38}{38} \times 100\%$ = 100%	ARPUS	
23	Perpustakaan	1. Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	12,27	ARPUS	
		2. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	4,189		
24	Kearsipan	1. Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Ps40 dan 59 U 43/2009)	24,99		
		2. Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	30,83		
25	Kelautan dan Perikanan	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) Kabupaten di wilayah Provinsi	53065,44		
26	Pariwisata	1. Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	$\frac{-12775}{19063} \times 100\%$ =-67,015%	DISPAR	
		2. Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang	$\frac{-201112}{329090} \times 100\%$ = -61,112%		
		3. Tingkat hunian akomodasi	$\frac{67787}{706658} \times 100\%$		



No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
			= 9,593%		
		4. Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	206.449.000.000		
		5. Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	10.358.158.155		
27	Pertanian	1. Produktivitas pertanian per hektar per tahun	$\frac{2204,96}{548}$ = 402,365	DKPP	
		2. Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	$\frac{0}{0} \times 100\%$ = 0%		
28	Kehutanan		Nihil	DLH	Surat Pernyataan
29	Energi Sumber Daya Mineral	Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di kab/kota	Nihil		Surat Pernyataan
30	Perdagangan	1. Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	$\frac{1463}{1463} \times 100\%$ = 100%	KUKMPTK	
		2. Persentase kinerja realisasi pupuk	$\frac{2264}{4344} \times 100\%$ =52,118%		
		3. Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	$\frac{2928}{3379} \times 100\%$ = 86,653%		
31	Perindustrian	1. Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten/Kota	$\frac{40}{2202} \times 100\%$ = 1,817%	DPMPSTPP	
		2. Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indicator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	0%		surat pernyataan bahwa RPIK sedang dalam tahap penyusunan
		3. Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	$\frac{1}{1} \times 100\%$ =100%		
		4. Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPIU) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	0		surat pernyataan bahwa tahun 2020 tidak pernah menerbitkan
		5. Persentase jumlah hasil	0		surat pernyataan bahwa



No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah Kabupaten/Kota			tahun 2020 tidak pernah menerbitkan
		6. Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	95 %		



2.2.3 Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
31	Perencanaan Dan Keuangan	1. Rasio Belanja Pegawai Di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	$\frac{(474.496.214.179,00 - 283.215.962.629,00)}{1.032.037.986.516,43} \times 100\%$ $\frac{191.280.251.550,00}{1.032.037.986.516,43} \times 100\%$ $= 18,53\%$	BPKAD	
		2. Rasio PAD	$\frac{162.134.305.440,46}{9.836.613.000.000,00} \times 100\%$ $= 1,648\%$	BPRD	
		3. Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level 2 (Nilai maturitas = 2,30)	Inspektorat	
		4. Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	2 Plus		
		5. Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	$\frac{(881.216.580.761,31 - 132.282.250.022,00)}{1.020.903.932.921,43} \times 100\%$ $= 73,36\%$	BPKAD	
		6. Opini Laporan Keuangan	(WDP)	Inspektorat	
32	Pengadaan	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya. yang ditandatangani pada kuartal pertama	$\frac{0}{480432800000} \times 100\%$ $= 0\%$	Bagian PBJ	
		Persentase Jumlah Pengadaan yang Dilakukan Dengan Metode Kompetitif	$\frac{55}{488} \times 100\%$ $= 11,27\%$		
		Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	$\frac{480432800000}{552369340000} \times 100\%$ $= 86,98\%$		
33	Kepegawaian	1. Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	$\frac{904}{369} \times 100\%$ $= 244,98\%$	BKPSDM	
		2. Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	$\frac{162}{1273} \times 100\%$ $= 12,73\%$		



No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		3. Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	$\frac{162}{162} \times 100\%$ <p style="text-align: right;">= 100%</p>		
34	Manajemen Keuangan	1. Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	$\frac{1.032.037.986.516,57}{1.211.349.718.767,00}$ $= ((0.85) - 1) \times 100\%$ $= 0,15 \times 100\%$ <p style="text-align: right;">= 15%</p>	BPKAD	
		2. Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	$\frac{162.134.305.440,46}{145.075.360.800,00}$ $= ((1.11) - 1) \times 100\%$ $= 0,11 \times 100\%$ <p style="text-align: right;">= 11%</p>		
		3. Assets Management	1. Apakah ada daftar asset tetap? Ya 2. Apakah ada manual untuk menyusun daftar asset tetap? Ya 3. Apakah ada proses inventarisasi asset tahunan? Ya 4. Apakah nilai asset tercantum dalam laporan anggaran? Ya		
		4. Rasio Anggaran Sisa Terhadap Total Belanja Dalam APBD Tahun Sebelumnya	$\frac{197095334330,69}{1097846810135,6} \times 100\%$ <p style="text-align: right;">= 17.95%</p>		
35	Transparansi dan Partisipasi Publik	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	$\frac{12090357500}{10861073364,93} \times 100\%$ <p style="text-align: right;">= 111,32 %</p>	Diskominfo	LRA Diskominfo tahun 2020
		Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	$\frac{6}{12} \times 100\%$ <p style="text-align: right;">= 50%</p>		Dokumen pendukung : 1. Perda No. 10 tahun 2019 tentang APBD Tahun 2020 2. Perda No. 2 tahun 2020 tentang perubahan APBD Tahun 2020 3. Ringkasan APBD Kab. Belitung Tahun Anggaran 2020 4. Ringkasan APBD Perubahan Kab. Belitung Tahun Anggaran 2020 5. LRA SKPD (Diskominfo) 6. LRA PPKD



2.3 AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DAERAH

Laporan ini memuat gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Belitung Tahun 2018 – 2023, RKT Tahun 2020, RKPD Tahun 2020 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2020 melalui tahapan pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator sasaran. Selanjutnya dilakukan penghitungan untuk mendapatkan selisih antara target dan realisasi guna mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja sebagai hasil pengukuran kinerja. Berdasarkan hasil pengukuran tersebut dilakukan evaluasi dan analisa guna mendapatkan strategi yang tepat untuk perbaikan atau peningkatan kinerja di masa mendatang. Tingkat pencapaian kinerja diklasifikasikan dalam skala pengukuran sebagai berikut:

Persentase	Tingkat	Kode Warna
< 100%	BELUM TEREALISASI (BT)	
= 100%	TEREALISASI (T)	
> 100%	MELEBIHI TARGET (MT)	

Selanjutnya untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian kinerja dari program dan kegiatan serta indikator makro, diberlakukan nilai dan disertai makna dari nilai tersebut dengan pendekatan sebagai berikut :

Tabel Pencapaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2019

KATEGORI	KODE WARNA	RATA-RATA % CAPAIAN
Sangat Berhasil (SB)		>90
Berhasil (B)		75.00 – 89.00
Cukup (C)		50.00 – 74.99
Kurang (K)		0.00 – 49.00

Pencapaian kinerja kemudian dianalisa dan dievaluasi dengan memaparkan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan. Perhitungan pencapaian kinerja indikator sasaran menggunakan *asumsi 1*: Jika **semakin tinggi realisasi**, menunjukkan pencapaian kinerja yang **semakin baik**, atau sebaliknya **realisasi makin rendah** pencapaian kinerja **semakin rendah/ jelek** adalah:

$$\text{PRESENTASE TINGKAT CAPAIAN KINERJA} = \frac{\text{REALISASI}}{\text{RENCANA}} \times 100\%$$

Sedangkan apabila **semakin tinggi realisasi** menunjukkan pencapaian sasaran kinerja **semakin**



rendah/jelek, atau sebaliknya realisasi *semakin rendah* pencapaian kinerja *semakin baik* menggunakan perumusan:

$$\text{PRESENTASE TINGKAT CAPAIAN KINERJA} = \frac{\text{RENCANA (REALISASI - RENCANA)}}{\text{RENCANA}} \times 100\%$$

2.3.1 Pencapaian Indikator Kinerja Utama

Sesuai dengan perkembangan dan dinamika serta tuntutan masyarakat, kinerja pemerintah Kabupaten Belitung selalu berupaya untuk dioptimalkan. Hal tersebut selain dari tuntutan regulasi peraturan perundangan juga sebagai wujud respon dan kepedulian pemerintah daerah untuk selalu memperbaiki derajat pelayanannya. Oleh karenanya, segala program pembangunan pemerintah daerah selalu diupayakan untuk dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Dalam rangka untuk memperoleh informasi kinerja, ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi, maka setiap instansi pemerintah harus menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk periode 2018 – 2023, Pemerintah Kabupaten Belitung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Pemerintah Kabupaten Belitung dan tingkat Perangkat Daerah melalui Peraturan Bupati Belitung Nomor 26 Tahun 2019 tanggal 26 Agustus 2019 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2018 – 2023 yang mana mengalami perubahan sesuai dengan hasil evaluasi dari Kementerian PANRB RI pada Tahun 2020 dan ditindaklanjuti dengan penetapan Peraturan Bupati Belitung Nomor 53 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Belitung Nomor 24A Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2018-2023 dan Peraturan Bupati Belitung Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Belitung Nomor 26 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2018 – 2023 tanggal 8 Desember 2020.

Untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja, melalui Sekretariat Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Inspektorat, Pemerintah Kabupaten Belitung melakukan pembinaan pengembangan dan penetapan, evaluasi, dan reviu IKU. Evaluasi dan reviu pencapaian IKU sangat mempengaruhi kinerja organisasi di masa datang. Hasil pengukuran atas IKU Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.6
Pencapaian Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2020

No	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	CAPAIAN RPJMD (%)
Misi 1 : Meningkatkan kualitas hidup masyarakat							
1.	Indeks Pembangunan Manusia	Skala	70,93	71,87	72,51	100,89	100,69
2.	Angka Kemiskinan	Persentase	7,56	6,85	6,27	109,25	104,50
3.	Angka Harapan Hidup	Tahun	70,44	70,6	71,05	100,64	100,40



4.	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	8,11	8,15	8,46	103,80	103,30
5.	Pengeluaran per Kapita (dalam ribu rupiah)	Rupiah	12.910	13.496	13.554	100,43	96,48
6.	Status Desa "Maju"	Desa	10	20	23	115	65,71
Misi 2 : Meningkatkan pelayanan birokrasi yang bersih, inovatif, profesional, akukntabel dan transparan							
7.	Indeks Reformasi Birokrasi	Skala	--	B	n/a	-	-
8.	Opini BPK	Skala	WDP	WTP	n/a	-	-
9.	Nilai SAKIP Kabupaten Belitung	Skala	CC	B	n/a	-	-
10.	Indeks Profesional ASN	Skala	62	77	72,86	94,62	89,95
11.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Skala	76,81	83	84,80	102,17	96,36
Misi 3 : Meningkatkan ekonomi berbasis potensi daerah yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan							
12.	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persentase	5,29	5,63	-2,31	-41,03	-39,15
13.	Jumlah kunjungan wisatawan (Domestik dan mancanegara)	Orang	467.571	108.000	134.266	124,32	13,43
14.	Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan, Perikanan terhadap PDRB (%)	Persentase	26,19	27,31	27,83	101,90	100,76
15.	Nilai Omset Koperasi (dalam ribu rupiah)	Ribu Rupiah	55.550.754	93.880.774	78.302.227	83,41	37,96
16.	Nilai Omset Usaha mikro (dalam ribu rupiah)	Ribu Rupiah	973.000.000	1.286.792.500	1.372.650.000	106,67	70,14
17.	Nilai Investasi (dalam juta rupiah)	Juta Rupiah	981.694	1.780.878	2.171.376,1	121,93	43,22
18.	Persentase pemenuhan infrastruktur kewilayahan	Persentase	35,18	46,25	58,12	125,66	89,55
19.	Indeks Kualitas lingkungan hidup	Skala	58,18	62,73	67,62	107,80	102,30

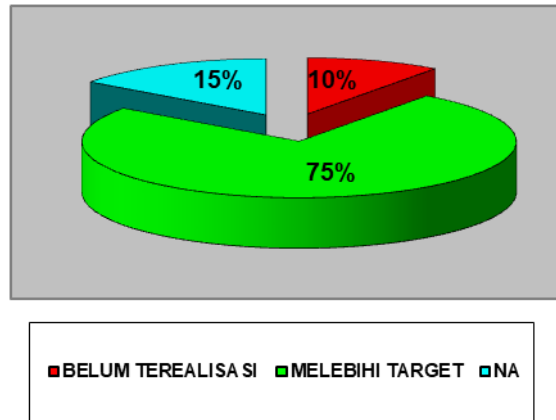


20.	Persentase Cakupan Pelayanan Persampahan	Persentase	0,79	4,20	15,02	357,62	231,08
-----	--	------------	------	------	-------	--------	--------

Tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) pada masing-masing misi sebagai berikut:

1. Misi 1 : Meningkatkan kualitas hidup masyarakat dapat dilihat dari indikator:
 1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM), capaian 100,89%
 2. Angka Kemiskinan, capaian 109,25%
 3. Angka Harapan Hidup (AHH), capaian 100,64%
 4. Rata-Rata Lama Sekolah (RLS), capaian 103,80%
 5. Pengeluaran per Kapita, capaian 100,43%
 6. Status Desa Maju, capaian 115%
2. Misi 2 : Meningkatkan pelayanan birokrasi yang bersih, inovatif, profesional, akuntabel dan transparan dapat dilihat pada indikator :
 1. Indeks Reformasi Birokrasi, belum tersedia data
 2. Opini BPK, belum tersedia data
 3. Nilai SAKIP belum tersedia data
 4. Indeks Profesional ASN, capaian 94,62%
 5. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), capaian 102,17%
3. Misi 3 : Meningkatkan ekonomi berbasis potensi daerah yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan dapat dilihat pada indikator :
 1. Laju Pertumbuhan Ekonomi, capaian -41,03%
 2. Jumlah kunjungan wisatawan, capaian 124,32%
 3. Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan terhadap PDRB, capaian 101,90%
 4. Nilai Omset Koperasi, capaian 83,41%
 5. Nilai Omset Usaha Mikro, capaian 106,67%
 6. Nilai Investasi, mencapai 121,93%
 7. Persentase Pemenuhan Infrastruktur Kewilayahan, capaian 125,66%
 8. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, capaian 107,80%
 9. Persentase Cakupan Pelayanan Persampahan, capaian 357,62%

Gambar 2.1
Capaian IKU Kabupaten Belitung 2020



Secara umum pada tahun 2020, Pemerintah Kabupaten Belitung telah dapat melaksanakan seluruh tugas dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, sesuai yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Belitung Tahun 2018 – 2023 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2020.

2.3.2 Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Kinerja

Sebagaimana telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Belitung Tahun 2018 – 2023, pencapaian kinerja kebijakan dan strategi Pemerintah Kabupaten Belitung untuk mewujudkan pencapaian misi secara terukur diuraikan berdasarkan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Belitung. Pencapaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Belitung tahun 2020 yang tergambar dalam laporan ini merupakan gambaran penilaian tingkat pencapaian masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD. Berdasarkan RPJMD Kabupaten Belitung tahun 2018 – 2023, telah ditetapkan 4 (empat) tujuan, 13 (tiga belas) sasaran dengan 20 (dua puluh) indikator kinerja (*outcomes*) yang menjadi Indikator Kinerja Utama, dengan rincian sebagai berikut:

Tujuan 1	Meningkatnya kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat	2	Indikator
Sasaran 1	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	1	Indikator
Sasaran 2	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	1	Indikator
Sasaran 3	Meningkatnya daya beli masyarakat	1	Indikator
Sasaran 4	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam Pembangunan	1	Indikator
Tujuan 2	Terwujudnya pelayanan birokrasi yang bersih, inovatif, profesional, akuntabel dan transparan	1	Indikator
Sasaran 5	Terciptanya birokrasi yang bersih, transparan dan akuntabel	2	Indikator
Sasaran 6	Terciptanya birokrasi yang inovatif dan profesional	1	Indikator
Sasaran 7	Birokrasi yang mengedepankan pelayanan masyarakat yang berkualitas	1	Indikator
Tujuan 3	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	1	Indikator



Sasaran 8	Meningkatnya pengembangan pariwisata	1	Indikator
Sasaran 9	Meningkatnya produksi pertanian dan perikanan	1	Indikator
Sasaran 10	Meningkatnya pengembangan koperasi dan usaha mikro	2	Indikator
Sasaran 11	Meningkatnya investasi	1	Indikator
Sasaran 12	Meningkatnya infrastruktur kewilayahan	1	Indikator
Tujuan 4	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	1	Indikator
Sasaran 13	Meningkatnya pengelolaan sampah	1	Indikator

Hasil pengukuran kinerja Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2020 secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.7
Hasil Pengukuran Kinerja Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2020

No	TUJUAN/ SASARAN	No	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1.	Meningkatnya Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat	1	Indeks Pembangunan Manusia	Skala	71,87	72,51	100,89
		2	Angka Kemiskinan	Persentase	6,85	6,27	109,25
2.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	3	Angka Harapan Hidup	Tahun	70,6	71,05	100,64
3.	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	4	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	8,15	8,46	103,80
4.	Meningkatnya daya beli masyarakat	5	Pengeluaran per Kapita	Ribu Rupiah	13.496	13.554	100,43
5.	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan	6	Status Desa "Maju"	Desa	20	23	115
6.	Terwujudnya pelayanan birokrasi yang bersih, inovatif, profesional, akuntabel dan transparan	7	Indeks Reformasi Birokrasi	Skala	B	n/a	-
7.	Terciptanya birokrasi yang bersih, transparan dan akuntabel	8	Opini BPK	Dokumen	WTP	n/a	-
		9	Nilai SAKIP Kabupaten Belitung	Nilai	CC	n/a	-
8.	Terciptanya birokrasi yang inovatif dan professional	10	Indeks Profesional ASN	Skala	77	72,86	94,62



9.	Birokrasi yang mengedepankan pelayanan masyarakat yang berkualitas	11	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Skala	83	84,80	102,17
10.	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	12	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persentase	5,63	-2,31	-41,03
11.	Meningkatnya pengembangan pariwisata	13	Jumlah kunjungan wisatawan	Orang	108.000	134.266	124,32
12.	Meningkatnya produksi pertanian dan perikanan	14	Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan, Perikanan terhadap PDRB	Persentase	27,31	27,83	101,90
13.	Meningkatnya pengembangan koperasi dan usaha mikro	15	Nilai Omset Koperasi	Ribu Rupiah	93.880.774	78.302.227	83,41
		16	Nilai Omset Usaha Mikro	Ribu Rupiah	1.286.792.500	1.372.650.000	106,67
14.	Meningkatnya investasi	17	Nilai Investasi	Juta Rupiah	1.780.878	2.171.376,1	121,93
15.	Meningkatnya infrastruktur kewilayahan	18	Persentase pemenuhan infrastruktur kewilayahan	Persentase	46,25	58,12	125,66
16.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	19	Indeks Kualitas lingkungan hidup	Persentase	62,73	67,62	107,80
17.	Meningkatnya pengelolaan sampah	20	Persentase Cakupan Pelayanan Persampahan	Persentase	4,20	15,02	357,62

Berdasarkan hasil pengukuran indikator kinerja di atas dapat digambarkan Kategori Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Pemerintah Kabupaten Belitung sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

Tabel 2.8
Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2020

No.	KATEGORI	RATA-RATA % CAPAIAN	JUMLAH INDIKATOR
1	Sangat Berhasil (SB)	>90	13
2	Berhasil (B)	75.00 – 89.00	1
3	Cukup (C)	50.00 – 74.99	0
4	Kurang (K)	0.00 – 49.00	1
5	NA	-	5
JUMLAH			20

Adapun kategori pencapaian indikator kinerja sasaran dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 2.9
Pencapaian Kinerja Indikator Sasaran Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2020

No	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SASARAN	0.00 – 49.00 KURANG	50.0 0 – 74.9 9 CUKUP	75.00 – 89.00 BERHASIL	>90 SANGAT BERHASIL
MISI 1 : Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat							
1.	Meningkatnya Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat	Indeks Pembangunan Manusia	100.89				SANGAT BERHASIL
		Angka Kemiskinan	109.25				SANGAT BERHASIL
2.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	100.64				SANGAT BERHASIL
3.	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	Rata-rata Lama Sekolah	103.80				SANGAT BERHASIL
4.	Meningkatnya daya beli masyarakat	Pengeluaran per Kapita	100.43				SANGAT BERHASIL
5.	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan	Status Desa "Maju"	115				SANGAT BERHASIL
MISI 2 : Meningkatkan Pelayanan Birokrasi yang Bersih, Inovatif, Profesional, Akuntabel dan Transparan							
6.	Terwujudnya pelayanan birokrasi yang bersih, inovatif, profesional, akuntabel dan transparan	Indeks Reformasi Birokrasi	N.A				
7.	Terciptanya birokrasi yang bersih, transparan dan akuntabel	Opini BPK	N.A				
		Nilai SAKIP Kabupaten Belitung	N.A				
8.	Terciptanya birokrasi yang inovatif dan profesional	Indeks Profesional ASN	94.62				SANGAT BERHASIL
9.	Birokrasi yang mengedepankan pelayanan masyarakat yang berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	102.17				SANGAT BERHASIL
MISI 3 : Meningkatkan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah yang Berwawasan Lingkungan dan Berkelanjutan							
10.	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	Laju Pertumbuhan Ekonomi	-41,03	KURANG			
11.	Meningkatnya pengembangan pariwisata	Jumlah kunjungan wisatawan	124.32				SANGAT BERHASIL



12.	Meningkatnya produksi pertanian dan perikanan	Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan, Perikanan terhadap PDRB	101,90					SANGAT BERHASIL
13.	Meningkatnya pengembangan koperasi dan usaha mikro	Nilai Omset Koperasi	83.41					BERHASIL
		Nilai Omset Usaha Mikro	106.67					SANGAT BERHASIL
14.	Meningkatnya investasi	Nilai Investasi	121.93					SANGAT BERHASIL
15.	Meningkatnya infrastruktur kewilayahan	Persentase pemenuhan infrastruktur kewilayahan	125.66					SANGAT BERHASIL
16.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas lingkungan hidup	107.80					SANGAT BERHASIL
17.	Meningkatnya pengelolaan sampah	Persentase Cakupan Pelayanan Persampahan	357.62					SANGAT BERHASIL
JUMLAH (KET. 5 n.a)				1	0	1	15	

TUJUAN 1 : Meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat

Capaian kinerja tujuan “Meningkatnya kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat” diukur melalui pencapaian indikator Indeks Pembangunan Manusia dan Angka Kemiskinan. Capaian kinerja tujuan dengan rinci terpapar pada tabel di berikut ini.

Tabel 2.10
Capaian Kinerja Tujuan Meningkatkan Kualitas Hidup dan Kesejahteraan Masyarakat
Kabupaten Belitung Tahun 2020

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal 2018	2020			Kategori	Target Akhir RPJMD 2023
				Target	Realisasi	Capaian		
1	Indeks Pembangunan Manusia	Skala	70.93	71.87	72.51	100.89	SB	100.69
2	Angka Kemiskinan	Skala	7.56	6.85	6.27	109.25	SB	95,69

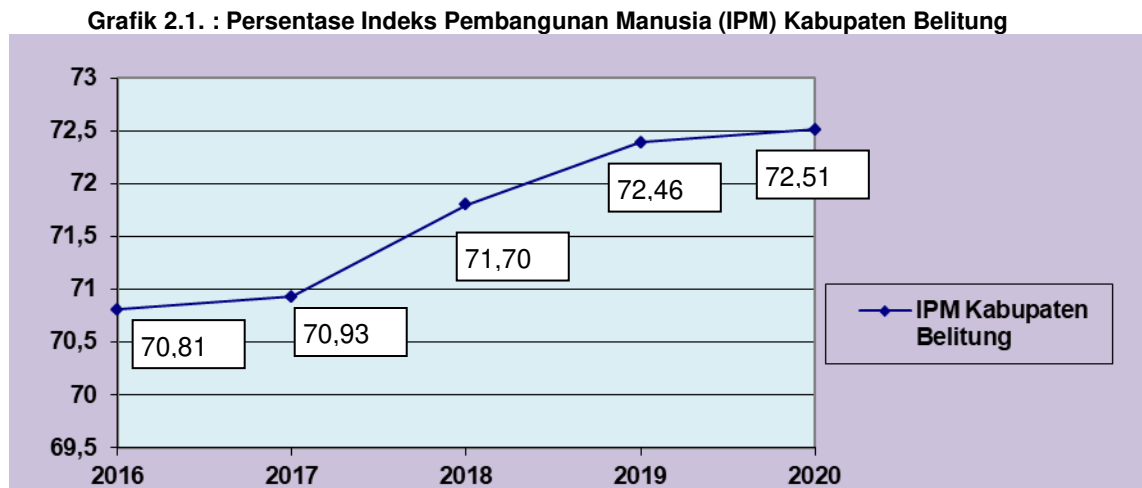
Dari tabel di atas terlihat bahwa kedua indikator kinerja tujuan telah melampaui target yang ditetapkan pada tahun 2020. Capaian kinerja Indeks Pembangunan Manusia melampaui target sebesar 0,89% dengan kategori SANGAT BERHASIL. Sementara Angka Kemiskinan melampaui target sebesar 9,25% dengan kategori SANGAT BERHASIL. Dibandingkan dengan target akhir RPJMD, IPM Kabupaten Belitung 2020 telah melampaui target sebesar 0,69%, namun untuk Angka Kemiskinan masih memerlukan peningkatan sekitar 4,31%.

➤ **Indeks Pembangunan Manusia**

Dalam kurun waktu 2015 - 2020, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Belitung terus mengalami peningkatan. Sebagaimana data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan



Bangka Belitung bahwa IPM Kabupaten Belitung Tahun 2020 mencapai 72,51 dengan capaian pertumbuhan 0,11%. Angka ini sedikit lebih tinggi dari nilai IPM tahun sebelumnya yang sebesar 72,46. Adapun perkembangan IPM Kabupaten Belitung dari Tahun 2015 - 2020 disajikan sebagaimana grafik berikut:



Sumber: Badan Pusat Statistik 2021

Bila dibandingkan dengan kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, IPM Kabupaten Belitung tertinggi kedua setelah Kota Pangkalpinang yang memiliki nilai IPM 78,22. Nilai IPM Kabupaten Belitung juga berada di atas IPM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga mengalami peningkatan, yang semula 71,30 pada tahun 2019 menjadi 71,47 di tahun 2020. Nilai IPM Kabupaten Belitung juga telah melampaui nilai IPM Nasional yang pada tahun ini juga mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yang semula 71,92 menjadi 71,94 dengan capaian pertumbuhan IPM 0,02. Berikut nilai IPM Kabupaten Belitung dan Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam periode tahun 2015 - 2020:

Tabel 2.11
Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Belitung,
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Indonesia Tahun 2015 – 2020

URAIAN	TAHUN					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Belitung Timur	68,83	69,30	69,57	70,22	70,84	70,92
Bangka	70,03	70,43	71,09	71,80	72,39	72,40
Bangka Tengah	68,66	68,76	68,99	69,52	70,33	70,45
Bangka Barat	67,23	67,60	67,94	68,68	69,05	69,08
Bangka Selatan	63,89	64,57	65,02	65,98	66,54	66,90
Belitung	70,29	70,81	70,93	71,70	72,46	72,51
Pangkal Pinang	76,51	76,73	76,86	77,43	77,97	78,22
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	69,05	69,55	69,99	70,67	71,30	71,47
Indonesia	69,55	70,18	70,81	71,39	71,92	71,94

Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2021

Peningkatan IPM Kabupaten Belitung ini tidak terlepas dari kinerja dari 3 (tiga) dimensi dasar yang merupakan komponen pembentuk IPM, yaitu kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Dimensi kesehatan diukur melalui umur panjang dan hidup sehat dengan indikator Angka Harapan Hidup (AHH), dengan arti bahwa umur yang diharapkan dapat dicapai oleh bayi yang baru lahir untuk hidup, dengan asumsi bahwa pola kematian menurut umur pada saat kelahiran sama sepanjang usia bayi. Dimensi pendidikan diukur dengan



indikator Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Harapan Lama Sekolah adalah lamanya sekolah formal yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang (dalam tahun), sedangkan rata-rata Lama Sekolah adalah rata-rata lamanya (dalam tahun) penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Sementara dimensi ekonomi diukur dengan standar hidup layak, yaitu pengeluaran per kapita yang disesuaikan dengan kondisi daerah.

Selama kurun waktu 2015 – 2020, peningkatan 3 (tiga) dimensi dasar IPM Kabupaten Belitung yang terus mengalami kenaikan setiap tahunnya. Berikut ditampilkan perkembangan ketiga dimensi IPM Kabupaten Belitung periode 2015 – 2020.

Tabel 2.12
Komponen Penyusun IPM Kabupaten Belitung Tahun 2015 – 2020

NO	URAIAN	TAHUN					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Umur Harapan Hidup	70,32	70,38	70,44	70,64	70,94	71,05
2	Harapan Lama Sekolah	11,32	11,47	11,51	11,83	11,84	11,85
3	Rata-rata Lama Sekolah	8,09	8,10	8,11	8,15	8,41	8,46
4	Pengeluaran per Kapita	12.443	12.865	12.910	13.281	13.662	13.554

Sumber : Badan Pusat Statistik 2021

Pada tahun 2020, capaian masing-masing dimensi dasar Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Belitung mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Angka Harapan Hidup/Usia Harapan Hidup (AHH/UHH) sebesar 70,94, naik 0,11 tahun dari sebelumnya, Harapan Lama Sekolah sebesar 11,85 tahun naik sebesar 0,01 tahun, Rata-rata Lama Sekolah sebesar 8,46 tahun, naik 0,05 tahun dari tahun sebelumnya, namun Pengeluaran Per Kapita menurun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp. 13.554.000,- (Tiga belas juta Lima ratus lima puluh empat ribu rupiah) per tahun, turun sebesar Rp 108.000,- (Seratus Delapan Ribu Rupiah) per tahun jika dibandingkan dengan tahun 2019.

➤ Angka Kemiskinan

Kemiskinan didefinisikan sebagai ketidak mampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Dengan pendekatan ini akan dihasilkan Garis Kemiskinan, sedangkan jumlah penduduk miskin adalah banyaknya jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan.

Garis kemiskinan menunjukkan jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2.100 kilo kalori per kapita per hari dan kebutuhan pokok bukan makanan. Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran konsumsi per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin.

Sementara interpretasi tingkat kemiskinan adalah persentase penduduk miskin terhadap jumlah penduduk seluruhnya di suatu wilayah. Persentase penduduk miskin yang tinggi menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di suatu wilayah juga tinggi.

Selama 5 (lima) tahun terakhir, angka kemiskinan di Kabupaten Belitung terus menurun. Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) yang dikeluarkan oleh BPS, menunjukkan bahwa pada tahun 2020 persentase penduduk miskin di Kabupaten Belitung sebesar 6,29%. Angka ini turun cukup signifikan bila dibandingkan dengan persentase jumlah penduduk miskin pada tahun 2015 sebesar 8,38%.



Angka ini juga lebih rendah dari tahun 2018 yang sebesar 7,56%.

Namun pada tingkat provinsi, selama kurun waktu 2013 – 2018, tingkat kemiskinan Kabupaten Belitung adalah yang tertinggi, seperti tergambar pada tabel berikut:

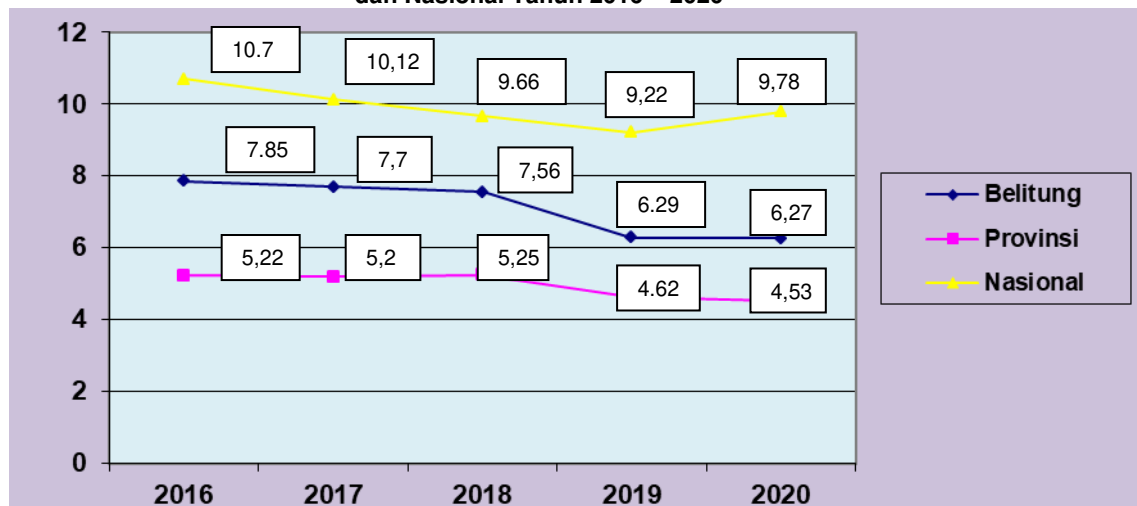
Tabel 2.13
Persentase Penduduk Miskin (P0) Menurut Kabupaten/Kota, 2010-2020

Kabupaten/Kota	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Bangka	7,81	5,36	5,58	5,40	5,20	5,63	5,52	5,10	5,47	4,92	4,51
Belitung	10,13	6,97	7,27	8,48	7,36	8,38	7,85	7,77	7,56	6,29	6,27
Bangka Barat	5,25	3,59	3,72	3,26	3,15	3,08	2,74	2,98	3,05	2,67	2,70
Bangka Tengah	8,07	5,56	5,78	5,46	5,27	5,67	5,64	6,07	5,81	5,02	4,85
Bangka Selatan	6,19	4,23	4,41	4,01	3,87	3,74	3,62	3,92	3,70	3,36	3,52
Belitung Timur	10,36	7,13	7,44	6,90	6,68	7,33	6,99	6,81	7,06	6,60	6,52
Pangkalpinang	6,02	4,15	4,29	4,15	4,04	4,97	5,02	4,80	4,95	4,25	4,36
Kep. Bangka Belitung	6,51	5,16	5,37	5,25	4,97	5,40	5,22	5,20	5,25	4,62	4,53

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2021

Namun demikian, tingkat kemiskinan Kabupaten Belitung masih di bawah tingkat kemiskinan nasional seperti terlihat pada gambar di bawah ini.

Grafik 2.2. : Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Belitung terhadap Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Nasional Tahun 2016 – 2020



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2021

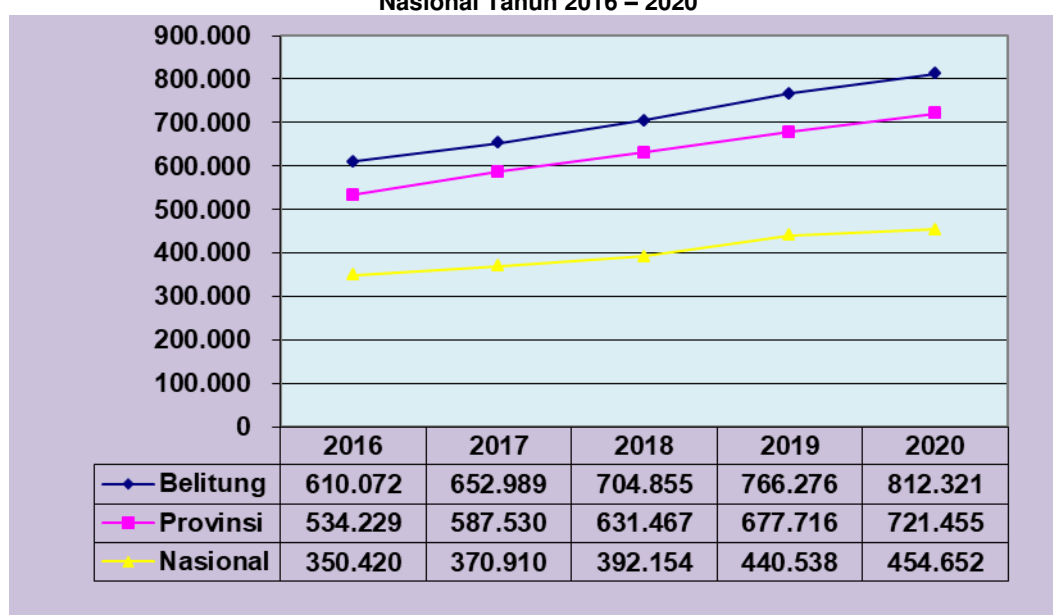
Tingginya tingkat kemiskinan ini dipicu oleh tingginya garis kemiskinan di Kabupaten Belitung. selama kurun waktu 2010 – 2020. Garis Kemiskinan Kabupaten Belitung merupakan yang tertinggi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan kecenderungan meningkat dan lebih tinggi dari Garis Kemiskinan Provinsi dan Nasional, sebagaimana terlihat pada tabel dan grafik berikut ini :



Tabel 2.14
Garis Kemiskinan(GK) Menurut Kabupaten/Kota(rupiah/kapita/bulan), 2010 – 2020

Kabupaten/ Kota	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Bangka	280 089	315 548	336 790	360 715	375 653	385 899	427 684	475 024	497 164	541.925	577.093
Belitung	367 883	416 041	463 675	523 846	563 475	580 050	610 072	652 989	704 855	766.276	812.321
Bangka Barat	271 761	305 500	331 971	366 365	388 493	399 401	440 850	497 567	520 642	549.496	589.894
Bangka Tengah	342 841	387 786	429 177	479 479	512 240	528 720	586 445	653 308	680 907	693.842	721.331
Bangka Selatan	274 125	308 328	328 497	350 691	364 504	374 778	415 359	462 716	483 823	523.155	561.617
Belitung Timur	336 847	380 813	420 973	464 590	492 652	504 668	528 572	563 309	622 396	684.277	725395
Pangkalpinang	334 337	378 275	423 848	475 480	509 246	527 668	604 011	654 044	700 949	748.487	795.653
Kep. Bangka Belitung	315 556	323 638	382 412	427 081	469 814	488 701	534 229	587 530	631 467	677.716	721455

Grafik 2.3. :Garis Kemiskinan Kabupaten Belitung terhadap Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Nasional Tahun 2016 – 2020



Sumber : Badan Pusat Statistik 2021

Hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan akan jumlah minimum yang dibutuhkan oleh masyarakat Kabupaten Belitung untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2.100 kilo kalori per kapita per hari dan kebutuhan pokok bukan makanan sangat tinggi sehingga penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran konsumsi perkapita per bulan di bawah garis kemiskinan dikategorikan sebagai Penduduk Miskin.

Kondisi kemiskinan di Kabupaten Belitung juga cukup memprihatinkan jika dilihat dari Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap*), yang meningkat dari 0,69 pada tahun 2018 menjadi 0,74 pada tahun 2020, seperti terlihat pada tabel berikut:



Tabel 2.15
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Belitung terhadap Kabupaten/ Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015-2020

URAIAN	TAHUN					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Belitung	1,1	0,79	1,14	0,59	0,69	0,74
Bangka	0,57	0,74	0,42	0,66	0,65	0,47
Bangka Barat	0,32	0,34	0,16	0,34	0,31	0,23
Bangka Tengah	0,84	0,59	0,57	0,42	0,52	0,72
Bangka Selatan	0,44	0,45	0,19	0,49	0,48	0,53
Belitung Timur	0,8	0,98	0,79	1,01	0,81	0,70
Pangkal Pinang	0,47	0,7	0,57	0,49	0,59	0,59
Prov. Kepulauan Bangka Belitung	0,67	0,67	0,49	0,68	0,51	0,60

Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2021

Sebagai catatan, Kedalaman Kemiskinan adalah ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk terhadap garis kemiskinan, atau seberapa jauh beda pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. Dengan asumsi garis kemiskinan sama. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Maka tabel di atas menggambarkan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin di Kabupaten Belitung selama 5 (lima) tahun terakhir menunjukkan kecenderungan semakin menjauhi garis kemiskinan.

Demikian pula bila dilihat dari sisi Indeks Keparahan Kemiskinan (*Poverty Severity*), di mana Indeks Keparahan Kemiskinan di Kabupaten Belitung merupakan tertinggi ketiga setelah Kabupaten Belitung Timur dan Kabupaten Bangka. Ini terlihat dari perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan di Kabupaten Belitung selama 6 (enam) tahun terakhir, sebagaimana pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.16
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Belitung terhadap Kabupaten/ Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015 – 2020

URAIAN	TAHUN					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Belitung	0,23	0,15	0,23	0,08	0,11	0,16
Bangka	0,1	0,16	0,06	0,17	0,14	0,09
Bangka Barat	0,05	0,07	0,01	0,05	0,07	0,04
Bangka Tengah	0,2	0,1	0,1	0,06	0,1	0,14
Bangka Selatan	0,07	0,11	0,02	0,08	0,08	0,13
Belitung Timur	0,18	0,22	0,18	0,19	0,16	0,19
Pangkal Pinang	0,07	0,16	0,11	0,11	0,1	0,12
Prov. Kep. Bangka Belitung	0,14	0,15	0,08	0,14	0,1	0,13

Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2021

Sementara Indeks Keparahan Kemiskinan memberikan gambaran penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin dan menunjukkan seberapa jauh jarak pengeluaran orang termiskin di satu wilayah tertentu relatif terhadap pengeluaran rata-rata kelompok miskin di wilayah tersebut. Semakin tinggi nilai indeks maka semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin, dan semakin parah kemiskinannya.



Tahun 2020 Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Belitung mengalami kenaikan sebesar 0,05 point dari 0,11 pada tahun 2019 menjadi 0,16. Selama enam (enam) tahun terakhir, Indeks Keparahan Kemiskinan di Kabupaten Belitung fluktuatif, tertinggi sebesar 0,23 pada tahun 2015 dan 2016 sebesar 0,23 dan terendah sebesar 0,08 pada tahun 2018.

Melihat kondisi di atas dapat disimpulkan bahwa kondisi kemiskinan di Kabupaten Belitung semakin dalam dan semakin parah selama tahun 2020. Sejumlah faktor menjadi penyebab tingkat kemiskinan semakin dalam dan parah. Salah satunya adalah tingkat inflasi.

Tingkat inflasi tidak hanya mempengaruhi Indeks Kedalaman dan Indeks Keparahan Kemiskinan, tetapi juga menjadi faktor penentu tinggi tidaknya Garis Kemiskinan. Tingkat inflasi Kabupaten Belitung, tolok ukur tingkat inflasi Kota Tanjungpandan, selama tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.17
Tingkat Inflasi Bulanan dan Tahunan Kota Tanjungpandan Tahun 2020

Bulanan dan Tahunan	Inflasi Bulanan dan Tahunan (Persen)	
	Tanjungpandan 2020	
Januari	0,46	
Februari	-1,20	
Maret	-0,13	
April	-0,19	
Mei	1,20	
Juni	0,27	
Juli	0,26	
Agustus	-0,67	
September	0,20	
Oktober	0,45	
November	0,03	
Desember	1,49	
Tahunan	2,69	

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2021
ADHK 2018 = 100

Dari tabel terlihat bahwa pada tahun 2020 inflasi tertinggi terjadi bulan Desember, yakni sebesar 1.49 persen. Dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 106,64. Inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya enam indeks kelompok pengeluaran, yaitu; kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 3,29 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,71 persen; kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,15 persen; kelompok kesehatan sebesar 0,42 persen; kelompok transportasi sebesar 1,08 persen; kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,35 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 0,05 persen; serta kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,31 persen. Sebagian kelompok pengeluaran lainnya mengalami deflasi, yaitu: kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,10 persen. Sementara itu, komponen bahan makanan Desember 2020 mengalami inflasi sebesar 4,28 persen dengan IHK 108,55. Sedangkan yang terendah terjadi pada bulan Februari atau sebesar -1.20 atau terjadi deflasi.

Sementara tingkat inflasi tahun 2020 sebesar 2,69 persen. Jika dibandingkan dengan Kota Pangkalpinang sebesar 0,52 persen, tingkat inflasi Kabupaten masih tinggi, bahkan lebih tinggi dari tingkat



inflasi Provinsi yang sebesar 0,52 persen, serta lebih tinggi dari tingkat inflasi nasional yang sebesar 1,68 persen. Ini menggambarkan bahwa biaya hidup di Kabupaten Belitung sangat tinggi, sehingga pengeluaran untuk mencukupi kebutuhan dasar minimum juga tinggi.

Dari deskripsi di atas dapat disimpulkan bahwa kondisi kemiskinan di Kabupaten Belitung tahun 2020 memprihatinkan. Meskipun tingkat kemiskinan menurun dari tahun sebelumnya, tapi indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan meningkat. Indeks kedalaman kemiskinan mengindikasikan rata-rata tingkat kemampuan daya beli masyarakat miskin Kabupaten Belitung makin menjauh dari garis kemiskinan. Sementara indeks keparahan menandakan tingkat kesenjangan kemampuan daya beli antar masyarakat miskin Kabupaten Belitung makin melebar. Walaupun daerah tidak dapat mengintervensi tingkat inflasi daerah secara langsung, namun upaya-upaya untuk menurunkan Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahannya dapat dilakukan dengan langkah-langkah strategis dan program-program pengentasan kemiskinan sebagai upaya pencapaian tujuan sesuai dengan RPJMD. Hal ini juga diperparah dengan adanya pandemi covid 19 yang melanda dunia yang berimbas terhadap menurunnya produktivitas di masyarakat.

Dalam RPJMD Kabupaten Belitung Tahun 2018 – 2023, upaya pencapaian Tujuan 1 “Meningkatnya Kualitas Hidup Dan Kesejahteraan Masyarakat”, telah ditetapkan 4 (empat) sasaran dengan 7 (tujuh) strategi sebagaimana terinci pada tabel berikut:

Tabel 2.18
Sasaran dan Strategi Pencapaian Tujuan 1

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
Tujuan 1 Meningkatnya kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat	Sasaran 1 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	1. Meningkatkan mutu layanan kesehatan masyarakat 2. Meningkatkan pola perilaku hidup bersih dan sehat 3. Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk
	Sasaran 2 Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	4. Meningkatkan akses pendidikan
	Sasaran 3 Meningkatnya daya beli masyarakat	5. Perluasan kesempatan kerja 6. Mengurangi beban pengeluaran
	Sasaran 4 Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan	7. Meningkatkan partisipasi masyarakat

SASARAN 1 : Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat

Capaian kinerja sasaran “Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat” merupakan salah indikator kinerja utama RPJMD dengan indikator Angka Harapanan Hidup dengan target “71,87”. Berikut realisasi dan capaian indikator sasaran Meningkatkan Kualitas Hidup dan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Belitung Tahun 2020.



Tabel 2.19
Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Derajat Kesehatan Masyarakat

No	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal RPJMD 2018	Target	2020 Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Akhir RPJMD 2023 Target
1	Angka Harapan Hidup	Tahun	70,64	71,87	72,51	100,89	SB	100,69

Indikator yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kualitas derajat kesehatan masyarakat digunakan Angka Harapan Hidup (AHH), yang merupakan gambaran rata-rata umur yang mungkin dapat dicapai oleh seorang bayi yang baru lahir hingga suatu tahun tertentu. Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa capaian indikator sasaran Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, yaitu Angka Harapan Hidup (AHH) menunjukkan keberhasilan dimana tahun 2020 dari target 71,87 tahun, realisasi tahun 2020 menunjukkan bahwa umur harapan hidup penduduk Belitung mencapai 72,51 tahun atau 100,89% dari target kinerja. Capaian ini menunjukkan capaian kinerja yang Sangat Tinggi. Dengan capaian ini pula, telah mencapai 100,69% dibandingkan target capaian pada akhir RPJMD pada Tahun 2023, yang bisa diartikan sebagai indikasi pencapaian target pada akhir RPJMD. Realisasi tahun 2020 masih menggunakan data AHH Tahun 2020 yang dikeluarkan BPS.

Trend Angka Harapan Hidup di Kabupaten Belitung cenderung meningkat dari tahun ke tahun, dapat dilihat pada tabel perkembangan Angka Harapan Hidup Kabupaten Belitung Tahun 2016-2020.

Tabel 2.20
Perkembangan Angka Harapan Hidup Kabupaten Belitung Tahun 2016 – 2020

No	Tahun	Angka Harapan Hidup (Tahun)
1	2016	70,38
2	2017	70,44
3	2018	70,64
4	2019	70,94
5	2020	72,51

Sumber : Badan Pusat Statistik Tahun 2021

Angka Harapan Hidup (AHH) mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat. Tingginya pencapaian Angka Harapan Hidup (AHH) juga menjadi salah satu penanda penting keberhasilan suatu daerah dalam pembangunan kesejahteraan rakyat terutama di sektor kesehatan.

Peningkatan AHH menunjukkan bahwa derajat kesehatan masyarakat relatif membaik yang memberikan kontribusi pada peningkatan kualitas hidup manusia. Peningkatan AHH juga dipengaruhi oleh beberapa faktor lain seperti ekonomi, budaya, dan pendidikan. Peran sektor kesehatan mempengaruhi masyarakat dalam menurunkan angka kesakitan, angka kematian, peningkatan gizi masyarakat dan akses serta mutu pelayanan kesehatan. Kepedulian tinggi pemerintah dan seluruh masyarakat sangat dibutuhkan dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan.

Peningkatan AHH ini dipengaruhi oleh multifaktor, antara lain faktor kesehatan menjadi salah satu yang berperan, jangkauan atau akses pelayanan kesehatan khususnya Puskesmas telah menjangkau seluruh wilayah di Kabupaten Belitung. Setiap Kecamatan telah memiliki Puskesmas dengan jumlah Puskesmas 9 unit pada 5 Kecamatan, dengan jumlah puskesmas yang tersebar pada tiap Kecamatan maka masyarakat dapat mengakses fasilitas kesehatan dengan sangat mudah.

Program Pengembangan Informasi Kesehatan dilaksanakan melalui penerapan sistem informasi kesehatan pada puskesmas-puskesmas yang ada di Kabupaten Belitung. Pada tahun 2019, penerapan informasi kesehatan mengalami peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2018, hanya ada 2 (dua) dari 9



(sembilan) puskesmas yang menerapkan sistem informasi kesehatan, dan pada tahun 2019 meningkat menjadi 6 (enam) puskesmas atau sebesar 44,44%, yaitu; Puskesmas Tanjungpandan, Puskesmas Air Saga, Puskesmas Perawas, Puskesmas Badau, dan Puskesmas Sijuk. Di samping meningkatkan sistem informasi kesehatan, pada tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Belitung juga terus melakukan upaya peningkatan Upaya Pelayanan Kesehatan baik melalui puskesmas-puskesmas serta RSUD yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Belitung. Upaya tersebut tak lain sebagai tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Belitung untuk melaksanakan urusan wajib pemerintah daerah dan sebagai upaya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat akan kesehatan. Pembenahan pun terus dilaksanakan. Bidang administrasi dikelola sesuai dengan tata kelola yang baik, sarana dan prasarana kesehatan diperbaharui dan dilengkapi sesuai standar kesehatan, kualitas pelayanan terus diperbaiki dan ditingkatkan.

Upaya ini berhasil dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Belitung. Terbukti dari meningkatnya akreditasi 2 (dua) Puskesmas dari tingkat Madya menjadi Tingkat Utama, yaitu Puskesmas Tanjungpandan dan Puskesmas Membalong. Sementara Puskesmas Badau sudah memperoleh predikat Utama dari tahun 2018. Sementara 3 (tiga) puskesmas berpredikat madya, dan 3 (tiga) puskesmas masih berpredikat dasar.

Berikut ditampilkan akreditasi puskesmas dan RSUD di Kabupaten Belitung. Adapun Program /kegiatan yang mendukung untuk Persentase unit yang menerapkan sistem informasi kesehatan yaitu Program Pengembangan sistem informasi kesehatan untuk di beberapa lokasi puskesmas masih terdapat sinyal internet yang kurang kuat serta adanya refocusing anggaran untuk penanganan COVID-19 dan pandemik COVID-19 sehingga pelatihan untuk penerapan E Puskesmas di 3 (tiga) Puskesmas tidak dilaksanakan.

Tabel 2.21
Penerapan Sistem Informasi Kesehatan, Tingkat Akreditasi, dan IKM pelayanan Kesehatan di Kabupaten Belitung, 2019

No.	RSUD/Puskesmas	Penerapan Sistem Informasi Kesehatan	Akreditasi	Tahun Akreditasi	IKM
1	RSUD dr. H. Marsidi Judono	RS online, ASPAK, Insiden, SIM RS	Paripurna	2019	82.59
2	Puskesmas Tanjungpandan	E-Puskesmas	Utama	2019	86.80
3	Puskesmas Air Saga	E-Puskesmas	Madya	2017	83.81
4	Puskesmas Perawas	E-Puskesmas	Madya	2017	84.46
5	Puskesmas Sijuk	E-Puskesmas	Madya	2018	81.74
6	Puskesmas Badau	E-Puskesmas	Utama	2018	86.56
7	Puskesmas Membalong	-	Utama	2019	80.16
8	Puskesmas Selat Nasik	-	Dasar	2018	83.64
9	Puskesmas Tanjungbinga	E-Puskesmas	Dasar	2017	88.75
10	Puskesmas Simpang Rusa	-	Dasar	2017	79.98

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung, 2019

Outcomes dari semua upaya tersebut adalah Nilai Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap pelayanan kesehatan di Kabupaten Belitung. Berdasarkan hasil survei selama 5 (lima) tahun terakhir, respon masyarakat terhadap pelayanan kesehatan di Kabupaten Belitung baik. Ini tergambar pada nilai SKM pada 9 (sembilan) Puskesmas dan RSUD sebagaimana tergambar pada tabel berikut:

Tabel 2.22
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kabupaten Belitung
Bidang Pelayanan Kesehatan

NO.	PELAYANAN KESEHATAN	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	RSUD dr. H. Marsidi Judono	77.81	80.66	78.82	79.71	82.59
2.	Tanjungpandan	80.14	82,45	84,45	81.42	86.80
3.	Air Saga	78.48	77,74	81,94	81.04	83.81
4.	Perawas	84.69	81,33	77,73	83.18	84.46
5.	Sijuk	80.03	76,98	76,88	77.24	81.74
6.	Badau	86.03	80,22	83,31	82.94	86.56
7.	Membalong	82.70	79,53	75,74	80.43	80.16
8.	Selat Nasik	89.58	78,90	81,94	81.89	83.64
9.	Tanjungbinga	71.82	75,93	74,37	79.01	88.75
10.	Simpang Rusa	83.92	82,33	79,94	81.6	79.98
	Rata-rata	81.52	79.61	79.51	80.85	83,85

Pencapaian kinerja kebijakan meningkatkan sistem pelayanan kesehatan terpadu ini didukung oleh faktor-faktor pendukung pencapaian kinerja sebagai berikut:

- ❖ Tersedianya anggaran, sarana kesehatan yang memadai;
- ❖ Sumber daya yang baik;
- ❖ Pengembangan sistem informasi melalui e-Puskesmas.

Sedangkan yang menjadi faktor penghambat pencapaian kinerja adalah :

- ✘ Masih kurangnya tenaga IT di Dinas Kesehatan maupun di Puskesmas;
- ✘ Masih kurangnya sarana untuk sistem informasi kesehatan;
- ✘ Kurangnya dukungan jaringan komunikasi sehingga sinyal internet kurang memadai.

Untuk itu di masa mendatang perlu strategi dan kebijakan yang tepat untuk mengatasi faktor penghambat tersebut, antara lain:

- ⌘ Pemenuhan tenaga IT di Dinas Kesehatan dan Puskesmas;
- ⌘ Peningkatan sarana penunjang sistem informasi kesehatan;
- ⌘ Peningkatan koordinasi lintas sektoral;



Sertifikat Akreditasi RSUD dr. H. Marsidi Judono

melakukan pembenahan dan perbaikan baik secara administratif, sarana dan prasarana, serta kualitas pelayanan melalui pembinaan SDM dan penerapan disiplin dan etos kerja paramedis di RSUD dr. H. Marsidi Judono. Pada tahun 2019 ini, RSUD dr. H. Marsidi Judono berhasil lulus akreditasi tingkat PARIPURNA dari Komisi Akreditasi Rumah Sakit dan Akreditasi Penuh untuk UPT Laboratorium Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung Tahun 2020.

Upaya meningkatkan pelayanan kesehatan di Kabupaten Belitung merupakan komitmen Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Komitmen tersebut dirumuskan dalam bentuk program yang hasilnya secara langsung dirasakan oleh masyarakat. Salah satu program yang sudah berjalan hingga tahun 2020 adalah Program SEHATI (Sistem Pelayanan Terintegrasi).

Program SEHATI merupakan salah satu program visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati dalam rangka memberikan hak dasar masyarakat Belitung khususnya hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Program ini diluncurkan pada tanggal 1 Februari 2019 dengan sasaran memenuhi kebutuhan masyarakat dalam bidang kesehatan yang berkualitas dan terjangkau. Program ini memberikan pendampingan pada pasien rujukan ke luar daerah dan dalam pelaksanaannya bekerja sama dengan BPJS.

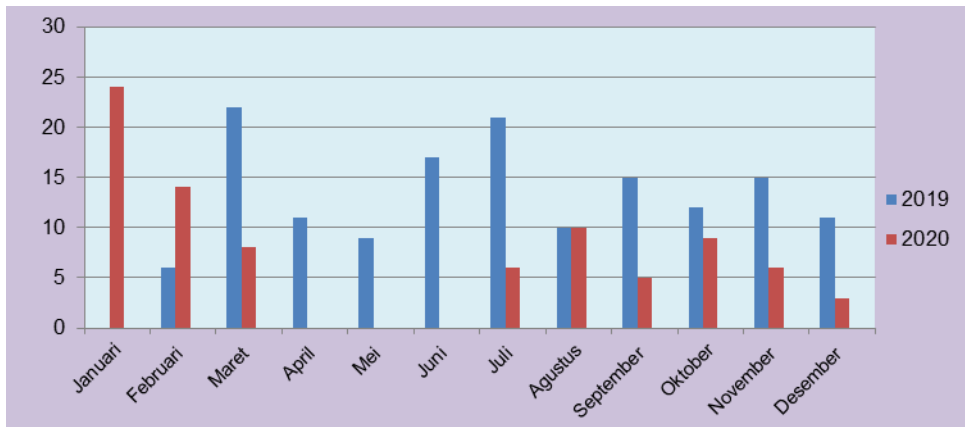
Selama tahun 2020 sebanyak 149 pasien yang sudah menggunakan fasilitas Program SEHATI dan dirujuk ke luar daerah, kondisi ini menurun jika dibandingkan dengan tahun 2019 yaitu sebanyak 149 pasien. Pasien yang paling banyak dirujuk terjadi pada bulan Januari 2020, hal ini sedangkan jenis penyakit yang paling banyak dirujuk adalah penyakit urologi, seperti tergambar pada gambar di bawah. Pasien-pasien tersebut dirujuk ke rumah sakit-rumah sakit yang ada di beberapa provinsi sesuai dengan spesialisasi penyakitnya.

Program "Sehati"

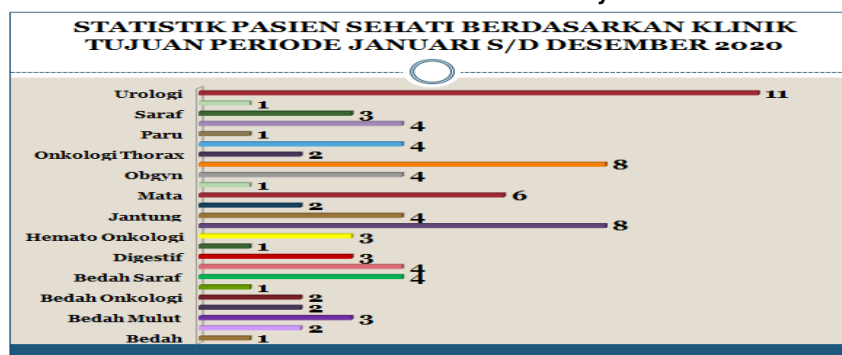


ambulance Program SEHATI

Grafik 2.4. : Statistik Pasien Sehati Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2019 dan 2020



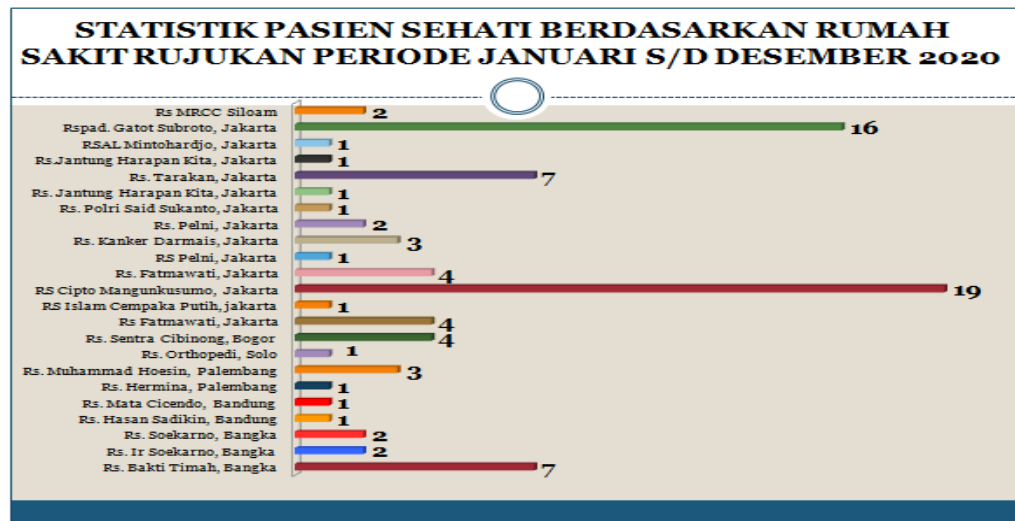
Grafik 2.5. : Statistik Pasien Sehati Berdasarkan Jenis Penyakit Periode Januari s.d Desember 2020



Pada tahun 2020, sebanyak 23 (dua puluh tiga) rumah sakit di luar Belitung yang menerima pasien rujukan Program SEHATI. Berikut daftar rumah sakit yang telah bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten

Belitung untuk pelaksanaan Program SEHATI Tahun 2020:

Grafik 2.6. : Statistik Pasien Sehati Berdasarkan Rumah Sakit Rujukan
Periode Januari s.d Desember 2020



Selain program SEHATI, sebagai bentuk komitmen Bupati dan Wakil Bupati terhadap peningkatan kesehatan masyarakat Kabupaten Belitung, Bupati dan Wakil Bupati juga meluncurkan Program PELANDUK (Pelayanan Medik Untuk Kampung). Program PELANDUK terintegrasi dengan *call center* 119 dan kartu SEHATI. Dalam operasionalnya, Pemerintah Kabupaten Belitung mengoperasikan 7 (tujuh) unit sepeda motor yang tersebar di puskesmas-puskesmas di Kabupaten Belitung.

Selanjutnya, untuk melengkapi sistem pelayanan kesehatan yang

terintegrasi, pada 8 April 2019, Pemerintah Kabupaten Belitung meluncurkan Program



Launching Program PELANDUK



Launching Program PSC (Public Safety Center)

Kesehatan Layanan Masyarakat *Public Safety Center* (PSC) 119, bertempat di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung. Program ini dimaksudkan untuk menangani kasus kecelakaan yang cukup tinggi di Kabupaten Belitung. Hampir 60 kasus kecelakaan termasuk kasus berat yang membutuhkan

penanggulangan kedaruratan yang cepat.

Program Kesehatan Layanan Masyarakat *Public Safety Center* (PSC) 119 ini sangat membantu masyarakat Kabupaten Belitung terutama dalam hal kegawatdaruratan. Dengan menekan kode telepon khusus, 119 dan tekan Angka Satu (bagi pengguna Kartu Provider Simpati), masyarakat secara langsung terhubung ke operator di Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung dan Petugas Kesehatan langsung datang ke lokasi untuk pertolongan selanjutnya.

Pelaksanaan arah kebijakan Meningkatkan mutu layanan kesehatan ibu merupakan pelaksanaan amanat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Upaya pelaksanaan arah kebijakan ini melalui Program Upaya Kesehatan Masyarakat. Ada 7 (tujuh) indikator yang menjadi tolok ukur keberhasilan program ini, yaitu; 1) Pelayanan kesehatan ibu hamil; 2) Pelayanan



kesehatan ibu bersalin; 3) Pelayanan kesehatan bayi baru lahir (0 – 28 hr); 4) Pelayanan kesehatan balita (0 – 59 bln); 5) Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar (kelas 1 – 9); 6) Pelayanan kesehatan pada usia produktif 15 – 59 th); dan 7) Pelayanan kesehatan pada lanjut usia (60 th ke atas). Pencapaian kinerja program Upaya Kesehatan masyarakat dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.23
Hasil kinerja upaya kesehatan masyarakat untuk 7 jenis pelayanan dasar pada SPM Kesehatan Kabupaten Belitung Tahun 2019

NO	KINERJA BIDANG KESEHATAN	2018	2019	2020
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	88,72%	90,50%	90,89%
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	75,87%	79,25%	85,35%
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir (0-28 hari)	99,18%	105,05%	99,50%
4	Pelayanan kesehatan balita (0-59 bln)	75,76%	82,61%	92,65%
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar (kls 1-9)	100%	97,41%	90,25%
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif (usia 15-59 tahun)	33,51%	64,31%	52,20%
7	Pelayanan kesehatan pada lanjut usia (usia 60 tahun keatas)	75,29%	71,38%	97,59%

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung Tahun 2021

Dilihat dari tabel di atas, Kabupaten Belitung belum berhasil mencapai target indikator SPM secara keseluruhan. Dari 7 (tujuh) indikator terdapat beberapa indikator yang mengalami peningkatan antara lain pelayanan kesehatan ibu hamil dan ibu bersalin, pelayanan kesehatan balita (0-59 bln) dan pelayanan kesehatan pada lanjut usia (usia 60 tahun keatas). Sedangkan untuk pelayanan kesehatan bayi baru lahir menurun dari tahun sebelumnya begitupun dengan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar (kls 1-9) dan pada usia produktif (15-59 thn). Beberapa faktor ketidakberhasilan pencapaian target kinerja antara lain masih tingginya Angka Kematian bayi (AKB) dan masih adanya Angka Kematian Ibu (AKI).

Pada tahun 2020, Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup tercatat 15 per 1000 kelahiran hidup atau 46 bayi dari 3.197 kelahiran hidup. Angka ini lebih rendah dari tahun 2019 sebesar 18 per 1000 kelahiran hidup atau 52 bayi dari 2.926 kelahiran hidup. Secara rinci dapat dilihat perkembangan AKB di Kabupaten Belitung kurun waktu 2020.

Tabel 2.24
Angka Kematian Bayi Kabupaten Belitung Tahun 2014 – 2020

NO	TAHUN	JUMLAH KELAHIRAN HIDUP	JUMLAH KASUS KEMATIAN BAYI	AKB KAB BELITUNG PER 1.000 KH
1	2014	3.332	43	13
2	2015	3.100	35	11
3	2016	3.155	33	10
4	2017	2.887	29	10
5	2018	3.048	37	12,1
6	2019	2.926	52	18
7	2020	3.197	46	15

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung Tahun 2021

Berdasarkan catatan Dinas Kesehatan, penyebab kematian terbesar dari tahun ke tahun adalah Bayi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR), asfiksia (keadaan di mana bayi baru lahir tidak dapat bernapas dengan



teratur dan spontan), yang disebabkan karena prematuritas sehingga organ belum matang atau belum siap bertahan hidup serta kematian disebabkan kelainan kongenital dan kelainan bawaan.

Selain AKB yang tinggi, Angka Kematian Ibu (AKI) di Kabupaten Belitung juga kurang menggembirakan. Pada tahun 2020, AKI di Kabupaten Belitung masih sebesar 94 per 100.000 kelahiran hidup. Dibandingkan tahun 2019 dengan AKI sebesar 137 per 100.000 kelahiran hidup, angka ini memang turun, namun hal tersebut menggambarkan masih terjadi kasus kematian ibu. Selama kurun waktu 6 (enam) tahun terakhir, AKI di Kabupaten Belitung sangat fluktuatif sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

Tabel 2.25
Angka Kematian Ibu Kabupaten Belitung Tahun 2014 – 2020

NO	TAHUN	JUMLAH KELAHIRAN HIDUP	JUMLAH KASUS KEMATIAN IBU	AKI KAB BELITUNG PER 100.000 KH
1	2014	3.332	4	120
2	2015	3.100	3	97
3	2016	3.155	4	127
4	2017	2.887	6	208
5	2018	3.048	6	196
6	2019	2.926	4	137
7	2020	3.197	3	94

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung Tahun 2021

Dari tabel di atas terlihat bahwa AKI tertinggi terjadi pada tahun 2017 sebesar 208 sedangkan terendah terpada pada tahun 2020 sebesar 94. Penyebab utama kematian ibu adalah kasus pendarahan dan eklamsi pada ibu hamil, hamil di luar kandungan, serta risiko tinggi ibu hamil seperti penyakit hipertensi.

Secara umum persentase capaian kinerja upaya kesehatan masyarakat diperoleh dari capaian indikator SPM bidang upaya kesehatan masyarakat, dari 7 indikator SPM, belum mencapai target 100% yaitu : Pelayanan kesehatan ibu hamil (90,89%), pelayanan kesehatan ibu bersalin (85,35%), Pelayanan kesehatan bayi baru lahir (0-28 hr) (99,50%), Pelayanan kesehatan balita (0-59 bln) (92,65%), Pelayanan kesehatan pada usia Pendidikan dasar (kls 1-10) (90,25%), Pelayanan kesehatan pada usia produktif (usia 15-59 tahun) (52,20%), Pelayanan kesehatan pada lanjut usia (usia 60 tahun keatas) (97,59%). Namun dibandingkan dengan tahun 2019 ada beberapa target pencapaian indikator mengalami peningkatan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sebagai berikut:

- ❖ Tersedianya anggaran, sarana kesehatan yang memadai dan sumber daya yang berkualitas;
- ❖ Penerapan standar mutu di fasilitas pelayanan kesehatan;

Sedangkan Hambatan/masalah sebagai berikut:

- ✘ Masih adanya ibu hamil yang belum memeriksakan kesehatannya sesuai standar ke fasilitas pelayanan kesehatan menjadi salah satu faktor terjadinya kematian ibu;
- ✘ peran serta masyarakat dalam promosi kesehatan belum optimal;
- ✘ Masih adaya kehamilan yang tidak diinginkan pada perkawinan usia dini sehingga kontak dengan tenaga kesehatan terjadi dimasa menjelang persalinan (triwulan ke 3).
- ✘ Belum semua puskesmas memberikan pelayanan persalinan 24 jam dipuskesmas, 3 puskesmas rawat inap sudah berjalan dari tahun sebelumnya, namun 6 puskesmas lainnya baru mulai pada bulan juli 2020 setelah ditetapkan sebagai puskesmas mampu salin.



- ✘ Pemantauan tumbuh kembang balita dan sweeping selama pandemi covid-19 diposyandu, TK/PAUD dan fasilitas kesehatan tidak bisa dilaksanakan sesuai standar sesuai Surat Keputusan Bupati No.443.1/226/II/2020 tanggal 13 Maret 2020 tentang instruksi dalam upaya mencegah penyebaran covid-19 di Kabupaten Belitung dan himbauan Kepala Dinas Kesehatan nomor 440/525/Dinkes tanggal 19 maret 2020 perihal penutupan sementara pelaksanaan posyandu.
- ✘ Target sasaran yang terlalu tinggi untuk skrining usia produktif (15 - 59 tahun).
- ✘ Keterlibatan elemen masyarakat dalam penyelenggaraan program SPM. Forum-forum multi stakeholder di Kabupaten belum berperan secara signifikan dalam setiap tahapan program
- ✘ Pandemi Covid 19 yang terjadi sejak tahun 2020 mempengaruhi kinerja pencapaian program dan kegiatan yang telah direncanakan.

Untuk mengatasi hal tersebut strategi/upaya pemecahan antara lain:

- ⌘ Meningkatkan manajemen mutu pelayanan kesehatan secara merata dan terjangkau;
- ⌘ Meningkatkan Peran serta masyarakat dalam promosi kesehatan;
- ⌘ Meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi seluruh warga masyarakat;
- ⌘ Optimalisasi fungsi pelayanan kesehatan di puskesmas dan rumah sakit;
- ⌘ Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kesehatan;
- ⌘ Meningkatkan keterlibatan elemen masyarakat dalam penyelenggaraan SPM, Forum-forum multi stakeholder dalam setiap tahapan program;
- ⌘ Menyusun regulasi terkait permasalahan di bidang pelayanan dan kesehatan masyarakat.

Salah satu strategi untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat adalah dengan strategi meningkatkan pola perilaku hidup bersih dan sehat terdapat 8 (delapan) arah kebijakan, yaitu: 1) Meningkatkan Desa *Open Defecation Free* (ODF) atau Stop Buang Air Besar Sembarangan, 2) Pengurangan Kawasan Kumuh; 3) Meningkatkan kualitas perumahan rakyat dan permukiman, 4) Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengkonsumsi makanan sehat dan bergizi, 5) Menurunkan prevalensi penyakit menular dan tidak menular, 6) Penurunan kasus gizi buruk dan *stunting*, 7) Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam berolah raga, dan 8) Meningkatkan pembinaan prestasi olah raga.

Penetapan arah kebijakan ini berdasarkan pada pengamatan di lapangan yang menggambarkan masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat. Hal ini tentunya kurang kondusif bagi kesehatan lingkungan masyarakat, tetapi sangat kondusif bagi perkembangan penyakit baik menular maupun tidak menular. Pada tahun 2019, penyakit berbasis lingkungan masih menjadi masalah kesehatan di Kabupaten Belitung. Penyakit Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA) 13.861 kasus dan Diare 3.252 kasus, merupakan 2 (dua) penyakit yang selalu berada di urutan 2 teratas dari 10 (sepuluh) penyakit paling umum yang dikeluhkan di semua pelayanan kesehatan primer di Kabupaten Belitung. Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) pun meningkat. Pada tahun 2019 tercatat sebanyak 360 kasus DBD.

Di samping penyakit menular, kurangnya kesadaran masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat ikut berdampak pada penyakit tidak menular. Berdasarkan kunjungan pasien ke Puskesmas di Kabupaten Belitung, pada tahun 2019, penyakit hipertensi berada di urutan 2 dengan jumlah kasus 12.029 dan diabetes melitus berada di urutan 5 dengan jumlah kasus 3.137 dari 10 penyakit terbanyak yang dikeluhkan.

Sepanjang tahun 2020, Pemerintah Kabupaten Belitung terus melakukan upaya pencegahan penyakit

yang diakibatkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat berperilaku hidup bersih dan sehat.

 **Kebijakan Meningkatkan Desa *Open Defecation Free* (ODF) atau Stop Buang Air Besar Sembarangan**

Pada tahun 2019, melalui kebijakan Meningkatkan Desa *Open Defecation Free* (ODF) atau Stop Buang Air Besar Sembarangan, Pemerintah Kabupaten Belitung baru berhasil mendeklarasikan 11 (sebelas) desa/kelurahan sebagai Desa *Open Defecation Free* (ODF) atau Stop Buang Air Besar Sembarangan, dari 49 (empat puluh sembilan) desa yang ada. Bahkan belum satu pun desa/kelurahan yang mendeklarasikan sebagai Desa STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat).

 **Kebijakan Pengurangan Kawasan Kumuh**

Pencapaian kinerja sasaran untuk kebijakan pengurangan kawasan kumuh diukur dengan menggunakan indikator persentase luasan permukiman kumuh dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Luas sisa permukiman kumuh tahun berjalan}}{\text{Luas permukiman kumuh tahun awal}} \times 100\%$$

Pada tahun awal RPJMD Kabupaten Belitung 2018 – 2023, kawasan kumuh yang ada di Kabupaten Belitung seluas 103,17 hektar. Pada tahun 2019 melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat fokus pada pengurangan kawasan kumuh yang tersisa yang ada di daerah perkotaan, khususnya di 3 (tiga) kelurahan/desa, yaitu; Desa Air Saga, Kelurahan Parit dan Kelurahan Kampong Damai dengan total luas wilayah kumuh seluas 52,90 hektar.

Sampai dengan tahun 2020 telah dilakukan berbagai intervensi kegiatan pada sisa luasan kawasan kumuh sebesar **17,29 Ha**, yang pendanaannya bersumber dari APBD Kabupaten Belitung, APBDES, APBN, BPM KOTAKU dan swadaya masyarakat dengan pencapaian pengurangan kumuh sebesar **10,29 Ha** lebih tinggi dari target yang direncanakan yaitu sebesar **9,82 Ha**. Dengan capaian ini sisa luas total kawasan kumuh perkotaan Kabupaten Belitung sebesar **7,00 Ha** dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.26
Luas Kawasan Kumuh di Kabupaten Belitung, 2020

KELURAHAN/DESA	TOTAL LUAS KAWASAN KUMUH PADA KONDISI AWAL (HA)	LUAS PENGURANGAN KAWASAN KUMUH (HA)	SISA LUAS KAWASAN KUMUH (HA)
Desa Air Saga	0	10,29	0
Kelurahan Parit	12,7	0	12,7
Kelurahan Kampong Damai	4,59	0	4,59
Total	17,29	10,29	7,00

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2021

Dengan hasil intervensi kegiatan sebagaimana tergambar pada tabel di atas dapat digambarkan kinerja indikator kebijakan pengurangan kawasan kumuh sebagai berikut:



Tabel 2.27
Capaian Kinerja Pengurangan Kawasan Kumuh

NO	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	KONDISI 2019	TARGET	2020		KATEGORI	AKHIR RPJMD 2023 TARGET
					REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	Persentase Luasan Kawasan Kumuh	Persentase/ (hektar)	16,79	15,39	6,78	155,92	SB	0%

Dengan memperhatikan tabel dan menggunakan rumus di atas, realisasi indikator persentase luasan kawasan kumuh adalah sebesar 6,78% atau seluas 10,29 hektar. Dengan penghitungan luas sisa permukiman kumuh tahun berjalan seluas 7,00 hektar dibagi dengan luas permukiman kumuh pada kondisi awal seluas 17,29 hektar, maka capaian kinerja dikategorikan **SANGAT BERHASIL** dengan nilai capaian 155,92%.



Kebijakan Meningkatkan kualitas perumahan rakyat dan permukiman

Pelaksanaan arah kebijakan ini melalui pencapaian kinerja sasaran meningkatnya kualitas infrastruktur permukiman yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Indikator kinerja sasaran ini adalah persentase permukiman dengan sarana dan prasarana dasar yang sehat dan aman. Realisasi indikator kinerja sasaran pada tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.28
Capaian Kinerja Sasaran Meningkatkan Infrastruktur Pelayanan Dasar Tahun 2020

NO	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	2020		KATEGORI	AKHIR RPJMD 2023 TARGET
				REALISASI	CAPAIAN		
1	Persentase layanan infrastruktur dasar permukiman yang layak	%	55,87%	51,93%	92,95%	SB	75,45%

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2021

Pencapaian kinerja sasaran Meningkatnya infrastruktur pelayanan dasar diukur dengan menggunakan indikator Persentase layanan infrastruktur dasar permukiman yang layak dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$[(0,45) \times \text{Target Penduduk yang mendapatkan pelayanan air minum yang layak}] + [(0,4) \times \text{Target Jalan lingkungan dalam kondisi baik}] + [(0,1) \times \text{Target Drainase lingkungan dalam kondisi baik}] + [(0,05) \times \text{Target Cakupan pelayanan sistem pengolahan air limbah yang layak}]$$

$$= (0,45 \times 80,48\%) + (0,4 \times 15,87\%) + (0,1 \times 66,75\%) + (0,05 \times 53,88\%) = 51,93\%$$

Keterangan:

1. Persentase penduduk yang mendapatkan pelayanan air minum yang layak = (Jumlah penduduk yang mendapat akses air minum yang layak / Jumlah penduduk) x 100%
2. Persentase jalan lingkungan dalam kondisi baik = (Panjang jalan lingkungan yang tertangani / total panjang jalan lingkungan yang direncanakan) x 100%
3. Persentase drainase lingkungan dalam kondisi baik = (Panjang drainase lingkungan dalam kondisi baik / total panjang drainase lingkungan yang direncanakan) x 100%



4. Persentase cakupan pelayanan sistem pengolahan air limbah yang layak = (Jumlah penduduk yang terlayani sistem pengolahan air limbah yang layak / jumlah penduduk) x 100%

Dengan Menggunakan rumus tersebut, realisasi indikator Persentase layanan infrastruktur dasar permukiman yang layak pada tahun 2020 adalah sebesar **51,93 %**. Tingkat capaian kinerja sebesar **92,95 %** dalam kategori sangat baik/memuaskan dengan dengan rincian sebagai berikut:

- a. Persentase penduduk yang mendapatkan pelayanan air minum yang layak didapat dengan menggunakan rumus:

$$\frac{\text{Jumlah penduduk yang mendapat akses air minum yang layak}}{\text{Total jumlah penduduk}} \times 100\%$$

$$\frac{149.811}{186.155} \times 100\% = 80,48\%$$

Realisasi Persentase penduduk yang mendapat akses air minum yang layak adalah sebesar **80,48 %** dengan perhitungan Jumlah penduduk yang mendapat akses air minum yang layak sebesar **149.811 jiwa** dibagi dengan Total jumlah penduduk yaitu **186.155 jiwa** dikali seratus persen.

- b. Persentase jalan lingkungan dalam kondisi baik didapat dengan menggunakan rumus:

$$\frac{\text{Panjang jalan lingkungan yang tertangani}}{\text{Total panjang jalan lingkungan yang direncanakan}} \times 100\%$$

$$\frac{11,70 \text{ km}}{73,7 \text{ km}} \times 100\% = 15,87\%$$

Realisasi Persentase jalan lingkungan dalam kondisi baik adalah sebesar **15,87 %** dengan perhitungan Panjang jalan lingkungan yang tertangani sebesar **11,70 Km** dibagi dengan Total panjang jalan lingkungan yang direncanakan yaitu **73,7 Km** dikali seratus persen.

- c. Persentase drainase lingkungan dalam kondisi baik didapat dengan menggunakan rumus:

$$\frac{\text{Panjang drainase lingkungan dalam kondisi baik}}{\text{total panjang drainase lingkungan yang direncanakan}} \times 100\%$$

$$\frac{24.095,87}{36.100} \times 100\% = 66,75\%$$

Realisasi Persentase drainase lingkungan dalam kondisi baik adalah sebesar **66,75 %** dengan perhitungan Panjang drainase lingkungan dalam kondisi baik sebesar **24.095,87 M** dibagi dengan total panjang drainase lingkungan yang direncanakan yaitu **36.100 M** dikali seratus persen.

- d. Persentase cakupan pelayanan sistem pengolahan air limbah yang layak didapat dengan menggunakan rumus:

$$\frac{\text{Jumlah penduduk yang terlayani sistem pengolahan air limbah yang memadai}}{\text{Total jumlah penduduk}} \times 100\%$$



$$\frac{100.305}{186.155} \times 100\% = 53,88\%$$

Realisasi Persentase pelayanan sistem pengolahan air limbah yang layak adalah sebesar **53,88** % dengan perhitungan jumlah penduduk yang terlayani sistem pengolahan air limbah yang layak sebesar **100.305 jiwa** dibagi dengan Total jumlah penduduk yaitu **186.155 jiwa** dikali seratus persen.

Sasaran Meningkatnya infrastruktur pelayanan dasar didukung dengan pelaksanaan 2 (dua) Program utama antara lain Program Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Minum, dan Program Pengembangan infrastruktur Permukiman. Adapun target, realiasi dan capaian program tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.29
Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Infrastruktur Pelayanan Dasar Tahun 2020

NO	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	2020			KATEGORI	AKHIR RPJMD 2023 TARGET
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN		
1	Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Minum	Persentase Penduduk dengan Akses Air Minum yang layak	%	78,00	80,48	103,18	SB	99,36
2	Program Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Persentase Jalan Lingkungan yang Tertangani	%	29,85	15,87	53,17	C	21,26
		Persentase Drainase Lingkungan dalam Kondisi Baik	%	61,30	66,75	108,90	SB	105,92
		Persentase Pengolahan Air Limbah Permukiman	%	54,00	53,88	99,78	SB	94,53

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2021

Untuk mewujudkan pencapaian Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Minum, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melaksanakan 6 (enam) kegiatan antara lain:

1. Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Minum (DAK Reguler)
2. Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Minum (DAK Penugasan)
3. Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Minum (DDUPB)
4. Penyediaan Air Minum dan sanitasi Berbasis Masyarakat
5. Pengelolaan UPT Air Minum
6. Perencanaan Bidang Air minum

Dengan Kegiatan Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Minum, telah terpasang **815 Sambungan Rumah (SR)** selama tahun 2020 sehingga terdapat penambahan sekitar **2.788 jiwa** penduduk yang terlayani air minum yang layak. Berikut adalah daftar layanan air minum yang layak per kecamatan.

Tabel 2.30
Realisasi standar pelayanan minimal (SPM) penyediaan air minum yang layak di kabupaten belitung

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Penduduk Pengguna Air Bersih	Rumah Tangga (RT)	RT Pengguna Air Bersih	Persentase
1	Tanjungpandan	103.594	87.120	30.247	25.438	84,10%
2	Sijuk	31.998	22.658	9.368	6.634	70,82%
3	Badau	15.522	12.287	4.656	3.686	79,17%

4	Membalong	28.772	21.796	8.314	6.299	75,76%
5	Selat Nasik	6.269	5.950	1.802	1.712	95,01%
Total 2020		186.155	149.811	54.387	43.769	80,48%
Total 2019						78,98%
Total 2018						76,28%

Pelaksanaan pencapaian kinerja pelayanan air minum didorong oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal adalah adanya Pelayanan air minum yang dilaksanakan melalui UPT PAM Dinas PUPR Kabupaten Belitung dengan berbagai pelayanan diantaranya; pendistribusian air melalui sambungan rumah (SR), Pelayanan air kemasan, dan pendistribusian air melalui mobil tangki. Pendistribusian air melalui mobil tangki merupakan pelayanan SPM air minum terhadap masyarakat yang tempat tinggalnya belum terlayani dengan jaringan perpipaan. Selain itu, pelayanan dengan mobil tangki dimasukkan untuk mendukung pelayanan air minum yang bersifat insidental, seperti pelayanan pasca bencana. Untuk menjaga kualitas pelayanan, UPT PAM bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung melakukan pemantauan kualitas air minum setiap 6 (enam) bulan sekali. Pelayanan air minum, selain untuk mencapai target SPM, juga merupakan komitmen Dinas PUPR Kabupaten Belitung untuk mendukung program Pemerintah Daerah dalam sektor pariwisata.

Pada tahun 2020, terdapat penambahan unit pelayanan air minum pada UPT PAM Dinas PUPR Kabupaten Belitung yaitu, unit PPN yang berlokasi di Kelurahan Kota dekat dengan pelabuhan perikanan Tanjungpandan. Setiap harinya, unit ini melayani sekitar 87 pelanggan yang berasal dari kelompok nelayan pelabuhan perikanan. Tahun 2020 merupakan tahun merebaknya pandemic covid-19. Pandemi ini mengubah pola hidup masyarakat sehari-hari yang dituntut untuk selalu menjaga kebersihan yaitu diantaranya adalah dengan mencuci tangan. Banyaknya sarana cuci tangan umum yang tersebar di Kabupaten Belitung menambah pelayanan air bersih UPT PAM Dinas PUPR Kabupaten Belitung dalam hal ini layanan pengisian tangki sarana cuci tangan.

Gambar 3.2. Pelayanan air minum oleh UPT PAM Dinas PUPR Kabupaten Belitung



Unit PPN Kawasan Tanjungpandan



Pelayanan air bersih untuk sarana cuci tangan di area Tanjungpandan



Pelayanan air minum kepada kelompok nelayan di pelabuhan perikanan Tanjungpandan



Faktor eksternal dalam mendukung kinerja pelayanan adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat melalui Balai prasarana permukiman wilayah kepulauan bangka Belitung dengan pengembangan SPAM Mempadin Kecamatan Sijuk dengan meningkatkan kapasitas IPA dari 10 Lt/d menjadi 20 Lt/d dan dengan membangun Unit Booster di Desa Tanjung Tinggi sebagai dukungan terhadap KSPN Tanjung Kelayang.

 **Kebijakan Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengkonsumsi makanan sehat dan bergizi;**

Dalam rangka pelaksanaan kebijakan “Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengkonsumsi makanan sehat dan bergizi”, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Belitung menetapkan 2 (dua) Sasaran Strategis, yaitu: terwujudnya ketahanan pangan daerah yang berkualitas dan meningkatnya kualitas ketahanan pangan daerah.

Terwujudnya ketahanan pangan daerah yang berkualitas dengan indikator kinerja Skor Pola Pangan Harapan (PPH) yang merupakan indikator kualitas konsumsi pangan penduduk Indonesia. *Food and Agriculture Organization–Regional Office for Asia and the Pasific* (FAO-RAPA) mendefinisikan PPH sebagai komposisi dari kelompok-kelompok pangan utama yang disiapkan untuk dikonsumsi sebagai makanan untuk memenuhi kebutuhan kalori dan akan memberikan zat gizi dalam jumlah yang mencukupi.

Pada tahun 2019, kualitas konsumsi pangan masyarakat Kabupaten Belitung yang diukur dengan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) mengalami penurunan, yaitu skor PPH 82,09 pada tahun 2018 turun menjadi 76,50 pada tahun 2019.

Tabel 2.31
Capaian Kinerja Indikator Terwujudnya ketahanan pangan yang berkualitas, 2020

INDIKATOR SASARAN	REALISASI		CAPAIAN	
	2019	2020	2019	2020
Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	76,50 %	81,70 %	87,43 %	93,11 %

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, 2021

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi kinerja tahun 2020 belum mencapai target yang ditetapkan. Dibandingkan dengan tahun 2019, persentase capaian mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Dibandingkan dengan standar nasional, realisasi kinerja indikator PPH jauh di bawah standar, di mana standar nasional untuk PPH adalah 100.

Belum tercapainya target kinerja dan masih jauhnya skor di bawah standar nasional mengindikasikan bahwa pola konsumsi masyarakat Kabupaten Belitung belum beragam. Konsumsi masyarakat akan bahan pokok (beras) tinggi, sebaliknya konsumsi bahan makanan lainnya seperti buah-buahan, sayur-sayuran, umbi-umbian dan kacang-kacangan masih sangat rendah.

Di samping hal tersebut, faktor lain yang menyebabkan tidak tercapainya target adalah adanya pembaharuan metode terhadap data Survey Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS), sehingga berpengaruh terhadap penghitungan skor PPH tahun 2020. Pada tahun 2020 menggunakan data tahun 2019, di mana data yang diperoleh menggunakan metode aktual. Hal ini mempengaruhi hasil penghitungan yang lebih kecil dari data justifikasi.

Untuk mencapai target kinerja sasaran, pada tahun 2020, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian melaksanakan program:

1. Program Peningkatan Konsumsi dan Keamanan Pangan; dan



2. Program Peningkatan Ketersediaan dan Distribusi Pangan.

Sementara untuk pencapaian sasaran strategis “Meningkatnya kualitas ketahanan pangan daerah” diukur dengan menggunakan indikator Persentase Ketersediaan Energi dan Protein per Kapita. Pada tahun 2020, ketersediaan energi dan protein per kapita di Kabupaten Belitung SANGAT BERHASIL. Ini tergambar dari realisasi persentase Ketersediaan Energi dan Protein per Kapita sebesar 169,20% lebih tinggi dari target sebesar 79,20%.

Tabel 2.32
Capaian Kinerja Indikator Meningkatnya Kualitas Ketahanan Pangan Daerah Tahun 2019 dan 2020

INDIKATOR SASARAN	REALISASI		CAPAIAN	
	2019	2020	2019	2020
Persentase Ketersediaan Energi dan Protein per Kapita	164,38%	169,20%	182,64%	188,00%

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, 2021

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi kinerja indikator sasaran tahun 2020 melampaui target yang ditetapkan dengan pencapaian sebesar 188,00%. Dibandingkan dengan tahun 2019, terjadi peningkatan ketersediaan energi dan protein per kapita dari 164,38% pada tahun 2019 menjadi 169,20% pada tahun 2020. Persentase pencapaian pun mengalami peningkatan. Ini menggambarkan bahwa ketersediaan pangan pokok di Kabupaten Belitung sudah mencukupi dan ketersediaan stok pangan untuk masyarakat terjamin.

Untuk mencapai target kinerja sasaran strategis Meningkatkan kualitas ketahanan pangan daerah, pada tahun 2020, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian melaksanakan program:

1. Program Peningkatan Konsumsi dan Keamanan Pangan dengan kegiatan:
 - a. Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan.
2. Program Peningkatan Ketersediaan dan Distribusi Pangan dengan kegiatan:
 - a. Pengembangan Cadangan Pangan;
 - b. Pembinaan Lumbung Pangan;
 - c. Pembinaan Desa Mandiri Pangan;
 - d. Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM);
 - e. Pemantauan dan Analisis Akses Harga Pangan Pokok; dan
 - f. Penguatan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi.



Kebijakan Menurunkan prevalensi penyakit menular dan tidak menular;

Arah kebijakan menurunkan prevalensi penyakit menular dan tidak menular diukur dari persentase indikator SPM penyakit menular dan tidak menular. Berdasarkan PP Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, ada 5 (lima) indikator SPM untuk pelayanan dasar penyakit menular dan tidak menular, yaitu; 1) penderita hipertensi; 2) penderita diabetes melitus; 3) ODGJ; 4) orang terduga tuberkulosis dan 5) orang dengan resiko terinfeksi virus HIV.

Tabel 2.33
Hasil kinerja Pelayanan Dasar untuk Penyakit Menular dan Tidak Menular Pada SPM Kesehatan Kabupaten Belitung Tahun 2020

NO	INDIKATOR SASARAN	2020		AKHIR RPJMD 2023 TARGET %
		TARGET	REALISASI CAPAIAN %	
1	Pelayanan kesehatan dengan tuberkulosis	2.524	1.708 67,67	100



2	Pelayanan kasus HIV	3.764	3.603	95,72	100
3	Pelayanan kasus diabetes melitus	2.435	2.917	120	100
4	Pelayanan kasus hipertensi	45.699	17.223	37,69	100
5	Pelayanan kesehatan ODGJ berat yang mendapat pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	295	288	97,63	100

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung,2020 (Diolah)

Sementara untuk pelayanan dasar yang lain sudah sesuai dengan amanat PP Nomor 2 Tahun 2018 di mana penyediaan kebutuhan dasar secara minimal bagi warga negara, seluruh warga negara penerima harus memperoleh pelayanan minimal bidang kesehatan harus 100%. Dibandingkan tahun sebelumnya, pencapaian kinerja tahun 2020 untuk indikator SPM kesehatan penyakit menular dan tidak menular Kabupaten Belitung dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.34
Hasil kinerja Pelayanan Dasar untuk Penyakit Menular dan Tidak Menular Pada SPM Kesehatan Kabupaten Belitung Tahun 2018 – 2020

NO	PENYEDIAAN PELAYANAN DASAR	2018	2019	2020
1	Pelayanan kesehatan dengan tuberculosis	91,00%	89,53%	67,67%
2	Pelayanan kasus HIV	60,96%	60,96%	95,72%
3	Pelayanan kasus diabetes mellitus	20%	134%	120%
4	Pelayanan kasus hipertensi	17,00%	41,45%	37,69%
5	Pelayanan kesehatan ODGJ berat yang mendapat pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100%	76,74%	97,63%
Capaian kinerja pelayanan dasar kesehatan penyakit menular dan tidak menular		60.95%	60.95%	95.80%

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung,2021

Dalam 2 (dua) tahun terakhir, kelima indikator pelayanan dasar kesehatan penyakit menular dan tidak menular mengalami penurunan. Persentase capaian kinerja pencegahan dan pengendalian penyakit dihitung dari persentase capaian indikator SPM penyakit menular dan tidak menular dari 5 indikator SPM penyakit menular dan tidak menular ada 4 (empat) indikator SPM yang belum mencapai target 100%, yaitu *pelayanan kesehatan penderita hipertensi (37,69%)*, *pelayanan kesehatan dengan tuberculosis (TB) (67,67%)*, *pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV (95,72%)* dan *pelayanan kesehatan dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat (97,63%)*. Dibandingkan dengan tahun 2019 ada beberapa indikator yang mengalami peningkatan capaian. Pada tahun 2020 yang mencapai target SPM hanya 1 indikator yaitu *pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus (DM) (120%)*.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran adalah sebagai berikut:

- ❖ Tersedianya anggaran, sarana kesehatan yang memadai dan sumber daya yang berkualitas;
- ❖ Adanya dukungan kerja sama lintas sektor yang baik.

Hambatan/masalah:

- ✘ Sasaran terlalu tinggi yaitu 34,8 % dari jumlah penduduk yang berumur 15 tahun keatas yang hipertensi dan harus dilayani.
- ✘ Kurangnya kesadaran masyarakat untuk memeriksakan kesehatan difasilitas pelayanan kesehatan terdekat.



- ✘ Kurangnya dukungan dan pemahaman keluarga pasien ODGJ tentang proses penyembuhan dan keterbatasan sumber daya aparatur yang ada.
- ✘ Pada saat skiring dilapangan ditemukan suspek tetapi tidak bersedia diperiksa dahak dan dan setelah dilakukan skrining masyarakat yang mempunyai gejala TBC tidak mengantarkan/mengembalikan pot sputum yang telah diberikan petugas.
- ✘ Masih adanya ibu hamil yang melakukan pemeriksaan kehamilan ke praktek swasta sehingga tidak datang lagi ke puskesmas untuk dilakukan pemeriksaan HIV, adanya ibu hamil yang abortus sebelum melakukan pemeriksaan HIV.
- ✘ Rapid tes HIV hanya tersedia di puskesmas sehingga daerah terpencil tidak terjangkau menunggu adanya kelas ibu hamil dan masih ada yang tidak mengikuti kelas hamil.
- ✘ Adanya beban kerja yang berat dengan tugas ganda mengakibatkan kurang fokus pada pelayanan.
- ✘ Adanya pandemic COVID-19 sehingga pelayanan dan kegiatan belum sepenuhnya berjalan secara optimal.

Strategi/upaya pemecahan:

- ⌘ Pemberdayaan masyarakat menuju kemandirian masyarakat di bidang kesehatan
- ⌘ Menggalakkan upaya promotif dan preventif serta mensinergikan dengan upaya kuratif rehabilitative (home visit, perkesmas dan PIS PK).
- ⌘ Peningkatan kompetensi SDM
- ⌘ Mengoptimalkan Peran PPM (Public Private Mix) dan membangun jejaring kemitraan.
- ⌘ Menyusun regulasi terkait permasalahan kesehatan di bidang penyakit menular dan tidak menular.



Kebijakan Penurunan kasus gizi buruk dan *stunting*:

Pencapaian arah kebijakan penurunan kasus gizi buruk dan *stunting* diukur dengan indikator status gizi bayi. Status gizi bayi ini diukur berdasarkan indikator umur, berat badan (BB), dan tinggi badan/panjang badan (TB/PB). Variabel BB dan TB/PB balita disajikan dalam bentuk tiga indeks antropometri, yaitu BB/U, TB/U, dan BB/TB.

Penilaian status gizi balita diperoleh dengan melakukan konversi angka berat badan dan tinggi badan setiap balita ke dalam nilai terstandar (*Zscore*), menggunakan baku antropometri balita WHO 2005. Klasifikasi status gizi berdasarkan indeks BB/U terbagi menjadi gizi buruk, gizi kurang, gizi baik. Sementara berdasarkan indeks TB/U terbagi menjadi sangat pendek, pendek, normal. Sedangkan berdasarkan indeks BB/TB terbagi menjadi gemuk, normal, kurus, sangat kurus. Untuk menentukan masalah gizi di suatu wilayah digunakan istilah *underweight* (gabungan gizi buruk dan gizi kurang), *stunting* (gabungan sangat pendek dan pendek), dan *wasting* (gabungan sangat kurus dan kurus). Data status gizi balita di Kabupaten Belitung berdasarkan data Pemantauan Status Gizi (PSG) selama tahun 2015 – 2020 dapat di lihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.35
Status Gizi Balita di Kabupaten Belitung Tahun 2015 – 2020

NO	MASALAH GIZI	TAHUN					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Underweight	14.4	7.3	15.7	9.16	9.38	5.56
2	Stunting	23.3	18.9	27.6	10.76	10.93	6.99
3	Wasting	5.8	4.0	7.7	5.65	5.62	2.21

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung Tahun 2021

Sesuai dengan standar WHO, suatu wilayah dikatakan kategori baik bila prevalensi balita *stunting* kurang dari 20% dan prevalensi balita kurus kurang dari 5%. Bila melihat tabel di atas dan disesuaikan dengan standar WHO, maka pada tahun 2020 status gizi balita di Kabupaten Belitung dikategorikan baik. Ini terlihat dari semua indikator sesuai dengan standar WHO. Indikator *underweight* 5.56%, *stunting* 6.99%, dan *wasting* 2.21%.

Hal ini menunjukkan keberhasilan Pemerintah Kabupaten Belitung mengatasi masalah status gizi akut-kronis yang dialami pada tahun 2020. Masalah gizi bersifat akut berdasarkan indikator BB/U sebagai akibat dari peristiwa yang terjadi dalam waktu yang tidak lama (singkat). Misalnya: terjadi wabah penyakit dan kelaparan yang mengakibatkan anak menjadi kurus. Sementara masalah gizi bersifat kronis berdasarkan indikator TB/U sebagai akibat dari keadaan berlangsung lama. Misalnya: kemiskinan, perilaku hidup tidak bersih dan sehat, dan asupan makanan kurang dalam jangka waktu yang lama sejak usia bayi, bahkan semenjak janin sehingga menyebabkan anak menjadi pendek. Namun yang perlu menjadi perhatian adalah masalah *wasting*, selama 3 (tiga) tahun terakhir menunjukkan kecenderungan menurun.

Kondisi gizi bayi bersifat akut-kronis pada tahun 2017 sangat disadari oleh Bupati dan Wakil Bupati Belitung. Pada tahun 2017, prevalensi balita pendek (*stunting*) mengalami peningkatan yang sangat signifikan dari tahun 2016 yaitu 18,9% menjadi 27,6% pada tahun 2017. Demikian juga dengan indikator gizi buruk dan gizi kurang (*underweight*), yang meningkat lebih dari 100% dari 7.3% tahun 2016 menjadi 15.7% pada tahun 2017. Kondisi ini disebabkan oleh banyak faktor, yaitu: kondisi kesehatan dan gizi ibu saat hamil, kesakitan pada bayi, kurangnya asupan gizi pada bayi serta kondisi sosial ekonomi dan lingkungan.

Untuk menurunkan AKB, Pemerintah Kabupaten Belitung telah melaksanakan upaya antara lain Pemberian Makanan Tambahan kepada ibu hamil Kurang Energi Kalori (KEK) agar tidak terlahir bayi dengan kondisi BBLR. Selain itu sosialisasi tentang cara perawatan bayi, pemberian ASI eksklusif, dan meningkatkan kapasitas petugas kesehatan (bidan dan dokter) dalam penanganan kasus kegawatdaruratan terus dilaksanakan secara intensif.

Sementara untuk menurunkan AKI, pada tahun 2019, Bupati dan Wakil Bupati Belitung meluncurkan program inovatif, yaitu Program AMBONG (Asistensi dan Asupan Makanan tambahan untuk Balita dan Ibu Hamil). Program ini merupakan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) khususnya dalam meningkatkan kualitas gizi balita dan ibu hamil. Pada awalnya, program ini lebih difokuskan pada kondisi ibu hamil Kekurangan Energi dan Kalori (KEK), karena dana yang masih terbatas. Pada APBD Perubahan anggaran untuk program ini ditambahkan sebagai upaya untuk bisa berjalan maksimal dalam pelaksanaannya.

Pemberian asupan makanan tambahan ini berupa biskuit untuk balita dan ibu hamil dengan takaran konsumsi tertentu yang merupakan makanan tambahan, bukan makanan pokok. Selain itu, program ini juga memberikan pelayanan asistensi kepada ibu hamil dan menyusui, yaitu berupa konsultasi dengan petugas kesehatan berkaitan dengan masalah kesehatan.

Program ini dilaksanakan dengan sistem keanggotaan, di mana setiap peserta memperoleh kartu AMBONG yang di dalamnya terdapat sistem perangkat untuk merekam data anggota dan tidak bisa dipindahtangankan. Kartu ini bermanfaat untuk membantu pelayanan masyarakat yang terintegrasi dalam bidang kesehatan dan sosial. Masa berlaku kartu ini akan habis apabila anggota memasuki masa menopause.



➔ **Kebijakan Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam berolah raga;**



Olahraga pada dasarnya merupakan kebutuhan setiap manusia di dalam kehidupan, agar kondisi fisik dan kesehatannya tetap terjaga dengan baik. Partisipasi dalam olahraga juga dikenal untuk mengurangi depresi, stres dan kecemasan, meningkatkan kepercayaan diri, tingkat energi, kualitas tidur, dan kemampuan untuk berkonsentrasi. Kesadaran masyarakat untuk berolahraga memberikan kontribusi dalam pembangunan individu dan masyarakat yang cerdas, sehat, terampil, tangguh, kompetitif, sejahtera, dan bermartabat.

Dalam upaya pelaksanaan arah kebijakan meningkatkan masyarakat dalam berolah raga, Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Belitung melaksanakan program Pembinaan, Pemberdayaan dan Pemasarakatan Olah Raga. Program ini diterjemahkan dalam bentuk kegiatan sebagai berikut:

1. Peningkatan Kesegaran Jasmani;
2. Pemberdayaan Olahraga Masyarakat; dan
3. Pekan Olahraga Tradisional.



memotivasi masyarakat untuk gemar berolahraga dan Pemerintah Kabupaten menggandeng pihak swasta *event* olahraga yang berskala internasional, antara lain Beach Pelajar Daerah.



Di samping itu, dalam rangka Kabupaten Belitung sekaligus berprestasi, Belitung dengan melaksanakan *event*-regional dan Run 5 K, Belitlung 10 K dan Pekan Olahraga



➔ **Kebijakan Meningkatkan pembinaan prestasi olahraga**

Program yang ditetapkan untuk mendukung pelaksanaan arah kebijakan meningkatkan pembinaan prestasi olahraga adalah Program Peningkatan Pembinaan Prestasi Olahraga. Pada tahun 2020, kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan melalui program ini adalah:

1. Peningkatan Prestasi Olahraga Pelajar;
2. Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga;
3. Pembibitan dan Pembinaan Olahragawan Berbakat; dan
4. Revitalisasi Fasilitas Olahraga.

Pencapaian kinerja pelaksanaan kebijakan meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam berolah raga dan meningkatkan pembinaan prestasi olahraga diukur dengan pencapaian sasaran strategis meningkatnya daya saing olahraga dengan indikator Jumlah Prestasi Olahraga yang ditetapkan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Kabuapten Belitung yang tertuang dalam Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga tahun 2018 – 2023. Adapun pencapaian kinerja sasaran strategis tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.36
Capaian Kinerja Meningkatnya Daya Saing Olahraga, 2020

NO	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	2020		KATEGORI	
			TARGET	REALISASI		
1	Jumlah prestasi olahraga	prestasi	557	207	35%	K

Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga, 2021

Berdasarkan tabel di atas, tingginya capaian kinerja sasaran yang melampaui target yang ditetapkan menggambarkan bahwa kinerja Meningkatnya Daya Saing Olahraga tahun 2020 Dengan Kategori Kurang. Penurunan pencapaian kinerja sasaran ini adanya *recofusing* anggaran untuk penanganan *Covid 19* sehingga kegiatan dibidang Peningkatan Prestasi Olahraga tidak terselenggara.

Dalam upaya mendorong dan meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat masyarakat, Pemerintah Kabupaten Belitung terus membangun kesadaran, meningkatkan kemampuan dan memotivasi kemauan hidup sehat bagi setiap penduduk agar dapat mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya sehingga masyarakat diharapkan mampu berperan sebagai pelaku pembangunan kesehatan.



Penerima Penghargaan Sekolah Sehat Tahun 2020



Bupati Belitung menerima penghargaan Juara III LSS Tingkat Nasional Tahun 2019

Salah satu objek binaan upaya ini adalah sekolah dengan Meningkatkan penyelenggaraan Usaha Kesehatan Sekolah. Upaya ini terbukti berhasil dengan berhasilnya SMP Negeri 2 Badau sebagai juara ketiga tingkat nasional pada Lomba Sekolah Sehat pada tahun 2019. Tidak tanggung-tanggung, walau bukan juara pertama, namun kabupaten Belitung berhasil meraih juara ketiga sebanyak tiga kali berturut-turut pada Lomba Sekolah Sehat ini. Ke depannya, sekolah-sekolah yang menjadi juara Lomba Sekolah Sehat akan menjadi sekolah percontohan, serta diharapkan dapat menularkan pola hidup bersih dan sehat pada siswa dan keluarganya dan masyarakat. Pada tahun 2020 Lomba Sekolah Sehat hanya dilakukan pada Tingkat Kabupaten. Adapun Pemenang Lomba Sekolah Sehat Tingkat Kabupaten Belitung Tahun 2020 kategori TK/RA dengan nilai tertinggi diperoleh oleh TK PAUD Percontohan Negeri Kabupaten Belitung Kecamatan Badau, kategori SD/MI diraih oleh SD Negeri 19 Tanjungpandan, kategori SMP/MTs diraih oleh SMP Negeri 1 Sijuk dan untuk kategori SMA/SMK/MA diraih oleh SMK Negeri 2 Tanjungpandan.

Strategi mengendalikan laju pertumbuhan penduduk

Penduduk merupakan komponen terpenting dalam membangun peradaban, namun terdapat hal positif dan negatif. Jumlah penduduk yang banyak menjadi positif bila dikaitkan dengan faktor produksi, karena penduduk yang banyak berarti modal tenaga kerja juga melimpah. Apalagi bila struktur penduduk lebih banyak didominasi oleh usia produktif. Suatu daerah yang mempunyai struktur penduduk seperti ini berarti daerah tersebut memiliki tenaga kerja yang melimpah. Inilah yang disebut bonus demografi. Bila daerah dapat memanfaatkan bonus demografi ini maka akan majulah daerah tersebut, sebaliknya bila tidak bisa memanfaatkannya maka akan menjadio bumerang bagi daerah tersebut. Masalah-masalah sosial akan muncul



dari penduduk usia produktif ini.

Mengacu pada hal di atas maka kuantitas penduduk harus pula diimbangi dengan kualitas penduduk. Bila tidak mampu mengimbangnya kuantitas penduduk dengankualitasnya, maka salah satu jalan adalah membatasi laju pertumbuhan penduduk sehingga jumlah penduduk dapat dikendalikan dan kebijakan pembangunan dapat direncanakan dengan optimal mengacu pada kebutuhan penduduk yang ada dan terkendali.

Untuk melaksanakan strategi mengendalikan laju pertumbuhan penduduk ditetapkan 2 (dua) arah kebijakan, yaitu: 1) Menurunkan jumlah perkawinan usia muda dan 2) Meningkatkan program Keluarga Berencana. Untuk melaksanakan strategi dan arah kebijakan tersebut, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menetapkan 2 (dua) tujuan/sasaran strategis dengan 3 (tiga) indikator kinerja. Untuk melihat capaian kinerja tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.37
Capaian Kinerja Mewujudkan keluarga yang berkualitas dan pertumbuhan penduduk yang seimbang Tahun 2020

NO	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2019	TAHUN 2020		TARGET AKHIR (2023)	CAPAIAN 2020 terhadap TARGET AKHIR 2023	
			TARGET	REALISASI			CAPAIAN (%)
1	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	2,65%	2,70%	1,93%	139,89%	2,70%	139,89%
2	Persentase PUS ber KB	81,01	82,25	82,07	99,78	82,85	99,05%
3	Total Fertility Rate (TFR)	2,30	2,23	2,42	92,14	2,21	91,32%
4	Tingkat Partisipasi Peserta KB MKJP	12,49	12,30	13,99	113,74	13,00	107,62

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan PMD, 2020

Capaian kinerja tujuan/sasaran Mewujudkan keluarga yang berkualitas dan pertumbuhan penduduk yang seimbang diukur dengan 4 indikator, yaitu: Laju pertumbuhan penduduk, Persentase Pasangan Usia Subur (PUS) ber KB dan *Total Fertility Rate (TFR)* dan Tingkat Partisipasi Peserta KB MKJP.

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa untuk indikator tujuan/ sasaran “Mewujudkan keluarga yang berkualitas dan pertumbuhan penduduk yang seimbang” pada apaat disimpulkan bahwa untuk indikator sasaran “Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)” pada tahun 2020 menurut data yang didapat dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung mencapai 1,93%. Ataupun meningkat 0,35% dari kondisi awal tahun 2019 sebesar 2,28% dengan perbandingan capaian tahun 2020 terhadap target akhir Renstra PD DPPKBPMMD Kabupaten Belitung tahun 2023 telah mencapai 139,89%. Walaupun banyak faktor yang menjadi penyebab meningkatnya Laju Pertumbuhan Penduduk seperti faktor migrasi dan tingkat kelahiran, namun tetap harus ada upaya untuk menekan angka Laju Pertumbuhan Penduduk melalui Program Pengendalian Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga sehingga dapat mencapai atau hampir mendekati angka yang ditargetkan pada tahun akhir Renstra. Dalam pelaksanaan Program Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga, upaya untuk meningkatkan capaian Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) pada tahun-tahun mendatang perlu ditingkatkan lagi melalui langkah-langkah:



- ❖ Meningkatkan komitmen bersama terhadap Program Keluarga Berencana antara pemerintah, mitra kerja dan masyarakat di semua tingkatan;
- ❖ Memperkuat advokasi dan KIE program KB melalui kelompok-kelompok kegiatan (Tribina, PIK Remaja dan UPPKS) guna mengajak Pasangan Usia Subur (PUS) untuk ber-KB.
Sedangkan faktor penghambat pencapaian kinerja adalah :
- ✘ Masih rendahnya minat masyarakat untuk berpartisipasi dalam kelompok kegiatan baik untuk menjadi kader pengelola maupun sebagai anggota kelompok kegiatan;
- ✘ Masih adanya kelompok-kelompok masyarakat tertentu yang menolak program Keluarga Berencana dikarenakan bertolak belakang dengan kepercayaan yang dianut.

Indikator "Persentase PUS ber KB " pada tahun 2020 adalah 82,07%. Kondisi ini memperlihatkan bahwa Persentase PUS ber KB pada tahun 2020 mengalami peningkatan pencapaian sebesar 1,06% jika dibandingkan dengan kondisi tahun 2019 kondisi Persentase PUS ber KB adalah 81.01%. Untuk perbandingan capaian kinerja tahun 2020 terhadap target akhir Renstra PD DPPKBPMMD Kabupaten Belitung tahun 2023 yang diharapkan mencapai 82,85% atau lebih adalah sebesar 99.05%. Upaya untuk meningkatkan capaian Persentase PUS ber KB pada tahun-tahun mendatang perlu ditingkatkan lagi melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- ❖ mengoptimalkan promosi KB di masyarakat melalui berbagai media promosi diantaranya media elektronik dan media sosial untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan pasangan usia subur tentang pentingnya mengetahui kontrasepsi yang tepat sasaran;
- ❖ memanfaatkan hasil pendataan keluarga untuk mengetahui target akseptor KB agar KIE tepat sasaran;
- ❖ meningkatkan kerjasama dengan para pemangku kepentingan yang terkait dengan program KB.

Sedangkan faktor penghambat pencapaian kinerja adalah :

- ✘ Masih adanya stigma di masyarakat mengenai keinginan mendapatkan anak dengan kelamin yang berbeda;
- ✘ Adanya ketakutan tertentu terhadap rumor negatif yang beredar di masyarakat mengenai alat kontrasepsi (misal KB MOP (vasektomi) dapat menurunkan libido pria, KB suntik/pil yang dapat menyebabkan kenaikan berat badan pada wanita).

Pada tahun 2020 angka Total Fertility Rate (TFR) di Kabupaten Belitung adalah 2,42%, artinya bahwa mengalami peningkatan sebesar 0.12% dari tahun 2019 dan tidak sesuai dengan target yang ditetapkan bahwa angka Total Fertility Rate (TFR) di Kabupaten Belitung pada tahun 2020 diharapkan berada pada angka 2,23% atau di bawahnya. Untuk perbandingan capaian kinerja tahun 2020 terhadap target akhir Renstra PD DPPKBPMMD Kabupaten Belitung tahun 2023 adalah sebesar 91,32% atau masih tinggi 0,82% dari target yang diharapkan pada periode akhir Renstra sejumlah 2,21% atau dibawahnya.

Permasalahan atau faktor-faktor penghambat pencapaian target ini adalah :

- ✘ Peran atau fungsi petugas/penyuluh lapangan KB (PLKB) sebagai ujung tombak dalam mengkampanyekan dan mengajak pasangan usia subur untuk ber-KB belum maksimal dikarenakan rasio jumlah mereka tidak ideal dengan wilayah binaan;
- ✘ Pernikahan anak di bawah umur yang masih terjadi di masyarakat.

Solusinya adalah:



- ⌘ Melakukan perekrutan dan optimalisasi tenaga Penyuluh Lapangan KB untuk meningkatkan pelaksanaan promosi dan pelayanan program KB kepada masyarakat;
- ⌘ meningkatkan edukasi kepada anak remaja dan orangtua melalui kelompok kegiatan PIK Remaja dan Bina Keluarga Remaja agar tidak menikahkan anaknya di usia muda;
- ⌘ meningkatkan kesadaran akan kesehatan reproduksi kepada anak remaja melalui Program GenRe (Generasi Berencana) dan PUP (Pendewasaan Usia Perkawinan).

Indikator “Tingkat Partisipasi Peserta KB MKJP” pada tahun 2020 adalah 13,99%. Kondisi ini memperlihatkan bahwa Tingkat Partisipasi Peserta KB MKJP pada tahun 2020 mengalami peningkatan pencapaian sebesar 1,5% jika dibandingkan dengan kondisi tahun 2019 kondisi Tingkat Partisipasi Peserta KB MKJP adalah 12,49%. Jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2020 terhadap target akhir Renstra PD DPPKBPMMD Kabupaten Belitung tahun 2023 yang diharapkan mencapai angka 13,00% atau lebih telah melampaui target yaitu sebesar 107,62%. Namun dengan pencapaian seperti kondisi sekarang ini harus tetap membutuhkan upaya yang lebih serius agar Tingkat Partisipasi Peserta KB MKJP pada tahun-tahun mendatang terus meningkat. Langkah yang dilakukan adalah 1) melakukan pemetaan sasaran KIE KB MKJP dengan memanfaatkan hasil Pendataan Keluarga, 2) meningkatkan partisipasi pria dalam berKB dan kesehatan reproduksi, 3) meningkatkan pengetahuan dan keterampilan KIE KB MKJP dari pengelola, pelaksana dan kader sebagai provider melalui orientasi dan pelatihan tentang KB dan Kesehatan Reproduksi, 4) mengoptimalkan promosi KB MKJP di masyarakat sehingga meningkatkan pemahaman dan pengetahuan pasangan usia subur tentang KB MKJP dan kesadaran untuk menggunakan MKJP semakin tinggi, 5) penggarapan Kampung KB secara intensif. Dalam pelaksanaannya tentu terdapat kendala atau faktor penghambat pencapaian kinerja seperti misalnya 1) kondisi lingkungan sosial budaya di sebagian masyarakat yang masih menganggap KB merupakan urusan perempuan dimana keputusan untuk ber-KB diserahkan kepada kaum perempuan, 2) rumor negatif yang beredar di masyarakat mengenai alat kontrasepsi. Dengan demikian solusi yang diambil adalah :1) optimalisasi media elektronik dan media sosial sebagai ajang promosi dan advokasi kepada masyarakat tentang KB MKJP dan KB Pria, 2) meningkatkan peran Institusi Masyarakat (Kelompok KB, IMP, PKK) dalam Konseling Partisipasi Pria dalam KB dan Kesehatan Reproduksi.

Upaya mencapai kinerja Mengendalikan Laju Pertumbuhan Penduduk dilaksanakan melalui program Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga adalah (1), Persentase PUS yang ingin ber- KB tidak terpenuhi (un met need). (2). Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi, (3). Angka kelahiran usia remaja (perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19). Untuk pencapaian indikator program Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga pada tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.38
Pencapaian Indikator Program Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Tahun 2020

Program	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	1. Persentase PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (un met need)	8,19	7,36	112,28
	2. Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	21,20	28,20	133,01
	3. Angka kelahiran usia remaja (perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19)	18,50	7,92	233,59

*catatan : no 1) dan no 3) realisasi < target lebih baik



Kendala dan hambatan dalam pencapaian indikator kinerja program tersebut adalah:

- ✘ Masih rendahnya tingkat pemanfaatan hasil pendataan keluarga yaitu data PUS yang tidak ber-KB terutama PUS Ingin Anak di Tunda dan Tidak Ingin Anak Lagi (IAT dan TIAL) oleh tenaga lini lapangan sebagai data basis untuk pelaksanaan KIE agar KIE terlaksana tepat sasaran;
- ✘ Pernikahan anak di bawah umur yang masih terjadi di masyarakat.

Adapun solusi yang dilakukan adalah

- ⌘ Melakukan pembinaan dan pendampingan kepada tenaga lini lapangan dalam pemanfaatan basis data keluarga agar dalam memberikan KIE kepada PUS tepat sasaran;
- ⌘ Meningkatkan edukasi kepada anak remaja dan orangtua melalui kelompok kegiatan PIK Remaja dan Bina Keluarga Remaja agar tidak menikahkannya di usia muda;
- ⌘ Meningkatkan kesadaran akan kesehatan reproduksi kepada anak remaja melalui Program GenRe (Generasi Berencana) dan PUP (Pendewasaan Usia Perkawinan);
- ⌘ Meningkatkan kualitas pelayanan KB dan melakukan pembinaan peserta KB secara terus menerus.



Pemenang Pemilihan Duta Genre Kategori Duta Genre Inovator Program Tk. Provinsi Th 2020 Perwakilan dari Kab. Belitung

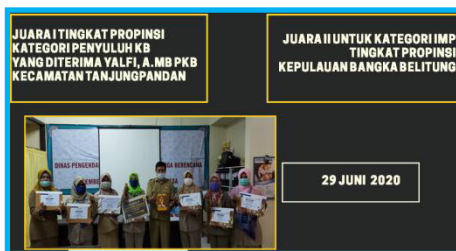
Di samping itu, serangkaian kegiatan-kegiatan yang menunjang program terus dilaksanakan untuk pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Aktifitas Kampung KB terus ditingkatkan melalui kegiatan Mini Lokakarya, baik di tingkat desa maupun tingkat kecamatan, Kegiatan Forum Pokja, Kegiatan Tribina KB, serta meningkatkan kemampuan KIE kader KB di lapangan serta pengembangan PIK Remaja dan program Generasi Berencana (GenRe).



Kegiatan pelayanan kontrasepsi

Upaya lain pun dilaksanakan melalui peningkatan pelayanan Keluarga Berencana. Kegiatan Pelayanan KB secara berkala dan terjadwal terus dilaksanakan. Pemberdayaan kader-kader di lapangan termasuk petugas penyuluh kompetensinya terus ditingkatkan, seperti pembinaan pencatatan dan pelaporan KKBPK untuk fasilitas kesehatan.

Keberhasilan pembangunan di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dapat dilihat dari 2 (dua) indikator, yaitu persentase akseptor keluarga berencana yang meningkat dari tahun ke tahun dan berkurangnya persentase keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I sebagai upaya pemberdayaan ekonomi keluarga.



Persentase akseptor Keluarga Berencana adalah merupakan perbandingan antara peserta keluarga berencana aktif



dibandingkan dengan pasangan usia subur, sedangkan prosentase keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I merupakan perbandingan antara keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I dengan jumlah seluruh keluarga. Bilamana persentase akseptor keluarga berencana menurun berarti program keluarga berencana belum berhasil, bila prosentase keluarga pra sejahtera dan keluarga



sejahtera I menurun. Ini menunjukkan program pemerintah berhasil.

Perkembangan persentase akseptor Keluarga Berencana dapat terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel. 2.39
Persentase (%) Akseptor KB di Kabupaten Belitung Tahun 2016 – 2020

NO	TAHUN	PASANGAN USIA SUBUR	PESERTA KB AKTIF	PERSENTASE (%)
1	2016	39.147	34.642	88.49
2	2017	40.423	36.190	89.53
3	2018	29.029	23.815	82.04
4	2019	31.035	25.140	81.01
5	2020	29.661	24.343	82.07

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan PMD, 2020

Dari data tersebut dapat dilihat bahwa jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) dan jumlah kesertaan peserta KB pada tahun 2020 mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2019. Hal tersebut disebabkan oleh Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) program Keluarga Berencana ke masyarakat yang dilaksanakan secara terus menerus kepada masyarakat.

Berikut data jumlah Penyuluh KB dan wilayah binaan di Kabupaten Belitung per tahun 2020:

Tabel.2.40
Rasio Jumlah Penyuluh KB dengan Wilayah Binaan

NO	KECAMATAN	JUMLAH DESA/KELURAHAN	JUMLAH PENYULUH KB
1.	Tanjungpandan	16	2 orang
2.	Membalong	12	1 orang
3.	Selat Nasik	4	1 orang
4.	Sijuk	10	2 orang
5.	Badau	7	1 orang
Total		49	7 orang

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan PMD, 2020

Dari tabel diatas memperlihatkan kondisi saat ini kurang memadai atau kurang tersedia para petugas lapangan keluarga berencana (PLKB/PKB) dan perbandingan PLKB/PKB dengan jumlah desa yang ditanganinya sangat bervariasi dengan rasio yang sangat rendah.

Permasalahan lain adalah Tenaga Penyuluh Keluarga Berencana (KB) yang belum memadai dari segi kuantitas dan kualitas. Dari segi kuantitas, Kabupaten Belitung memiliki 7 orang Penyuluh KB ASN dan wilayah binaan mencakup 49 desa/kelurahan sehingga 1 orang penyuluh membina desa/kelurahan. Hal tersebut jauh dari rasio ideal yaitu 1:2 artinya 1 orang Penyuluh KB membina 2 desa/kelurahan. Kurangnya kuantitas tenaga Penyuluh KB berdampak pula kepada kualitas. Dengan banyaknya wilayah yang harus dibina, maka beban kerja Penyuluh KB yaitu pembinaan Program KKBPK dilapangan serta pelaksanaan administrasi kerja yang kompleks juga akan lebih berat sehingga kualitas kerja Penyuluh KB menurun. Sebagai langkah solusi yang di ambil, maka pada akhir 2020 dilaksanakan penyusunan kriteria untuk Seleksi Penerimaan Tenaga Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) Non ASN sedangkan pada awal 2021 akan dilaksanakan Seleksi Penerimaan Tenaga Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) Non ASN untuk merekrut 7 orang tenaga PLKB Non ASN sehingga diharapkan dapat membantu kerja dari Penyuluh KB ASN serta meningkatkan kualitas pembinaan program KKBPK kepada masyarakat.

Persentase Peserta KB Aktif Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I pada tahun 2019 sebesar 79,27% sedangkan pada tahun 2020 prosentase Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I sebesar 82,50% sebagaimana dirinci pada tabel berikut ini:

Tabel 2.41
Persentase (%) Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I
di Kabupaten Belitung Tahun 2016-2020

No	Tahun	Jumlah PUS Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	Jumlah Peserta KB Aktif Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	(%)
1	2016	3.981	3.494	87.76
2	2017	3.990	3.494	87.57
3	2018	5.155	4.361	84.60
4	2019	3.392	2.689	79.27
5	2020	3.292	2.716	82.50

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan PMD, 2020

Data di atas menunjukkan bahwa sebagian besar Pasangan Usia Subur Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I telah menjadi peserta KB Aktif. Hal tersebut menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat untuk ber- KB terutama di Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I semakin meningkat. Pada Tahun 2020 Jumlah PUS Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Hal tersebut terjadi dikarenakan telah banyaknya program yang dilaksanakan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.



Kegiatan Evaluasi Kampung KB se Kab.
Belitung Th 2020



Balai Penyuluh KB Kec. Badau



Balai Penyuluh KB Kec. Siiuk

Anggaran belanja Program Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga pada tahun 2020 berasal dari APBD Kab. Belitung Tahun Anggaran 2020 dan juga berupa Dana Alokasi Khusus (Non Fisik) Bantuan Operasional Keluarga Berencana dengan total anggaran sebesar Rp 860.468.000,- dan realisasi sebesar Rp 697.926.450,- atau setara dengan 81,11% yang dianggarkan dalam rangka upaya Meningkatnya peserta KB baru dan aktif dan pembangunan di kampung KB. Selain itu juga ada Dana Alokasi Khusus (DAK Fisik Reguler) sebesar p.1.175.000.000,- dan terealisasi Rp. 1.113.558.000 atau 94,77 % yang dipergunakan untuk pembiayaan pembangunan 2 unit Balai Penyuluh KB di 2 (dua) Kecamatan, yaitu Kecamatan Badau dan Kecamatan Siiuk serta pengadaan sarana dan prasarana Rumah Data Kependudukan



di Desa Juru Seberang.

Rumah Data Kependudukan Kampung KB Desa Juru



Pencapaian kinerja indikator Laju pertumbuhan penduduk pada tahun 2019 yang menunjukkan kecenderungan menggembirakan ini merupakan dampak positif dari faktor-faktor yang mendukung upaya pencapaian kinerja tersebut. faktor-faktor pendukung pencapaian kinerja antara lain:

- ❖ Tersedianya anggaran, sarana kesehatan yang memadai dan sumber daya yang baik;
- ❖ Komitmen pimpinan yang kuat dan konsisten di bidang kependudukan;
- ❖ Adanya program pemerintah pusat melalui DAK bidang kependudukan.

Namun demikian tetap saja muncul faktor-faktor penghambat capaian kinerja, seperti berikut ini:

- ✘ Adanya migrasi penduduk;
- ✘ Tingkat kelahiran yang cukup tinggi;
- ✘ Pandemi Covid 19 yang terjadi sejak tahun 2020 mempengaruhi kinerja pencapaian program dan kegiatan yang telah direncanakan, sehingga kurangnya penyerapan realisasi anggaran.

Untuk mengatasi hal tersebut perlu strategi dan kebijakan sebagai pemecahan atas faktor penghambat pencapaian kinerja, antara lain:

- ⌘ Upaya untuk menekan angka Laju Pertumbuhan Penduduk melalui program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga;
- ⌘ Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi antara juknis BOKB yang dikeluarkan oleh BBKBN dengan tata acara, prosedur penganggaran dan pembiayaan.

Tabel 2.42
Realisasi Keuangan Program penunjang Sasaran Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat

No	Program	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%
1.	Pengembangan sistem informasi kesehatan	525.127.000,00	464.458.148,00	88,45
2.	Upaya pelayanan kesehatan	72.666.689.652,00	66.804.742.411,34	91,93
3.	Upaya pelayanan kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah	94.035.170.724,00	85.718.977.952,78	91,16
4.	Penyediaan dan pengelolaan air minum	10.190.644.500,00	6.108.961.748,00	59,95
5.	Penanganan dan pencegahan kawasan kumuh	4.295.114.000,00	4.046.992.997,00	94,22
6.	Peningkatan konsumsi dan keamanan pangan	244.455.000,00	226.021.000,00	92,46
7.	Pencegahan dan pengendalian penyakit	8.778.204.474,00	7.050.934.788,00	80,32
8.	Pengembangan Infrastruktur Pemukiman	5.593.500.000,00	5.458.818.000,00	97,59
9.	Upaya Kesehatan Masyarakat	1.127.444.100,00	705.860.838,00	62,61
10.	Pengendalian penduduk, keluarga berencana dan pembangunan keluarga	2.454.078.000	2.214.463.531,00	90,24

Sehingga untuk sasaran Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat dengan rata-rata capaian 103,32% dengan persentase realisasi anggaran 89,44% maka terdapat efektifitas dan efisiensi 21,58%.



SASARAN 2 : Meningkatkan Kualitas Pendidikan Masyarakat

Pembangunan dibidang pendidikan terus dilaksanakan di Kabupaten Belitung dalam rangka mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia dan mendukung Nawacita Presiden Republik Indonesia yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia dan melakukan revolusi karakter bangsa. Pemerataan akses pendidikan yang berkeadilan menjadi salah satu faktor pendukung majunya pendidikan suatu bangsa. Jika kualitas pendidikan di Indonesia, khususnya Belitung mampu mencapai kualitas maksimal, tidak menutup kemungkinan akan menjadikan Belitung sebagai daerah maju. Pendidikan merupakan faktor penting sebagai dasar pembentukan kepribadian manusia.

Mutu pendidikan di Kabupaten Belitung masih terbilang cukup rendah. Kabupaten Belitung masih harus banyak melakukan pembangunan dalam sektor pendidikan agar mampu memberikan akses pendidikan yang merata dan berkeadilan bagi seluruh warganya, antara lain dengan mengoptimalkan penyelenggaraan pendidikan non formal dan meningkatkan partisipasi sekolah pada anak usia sekolah.

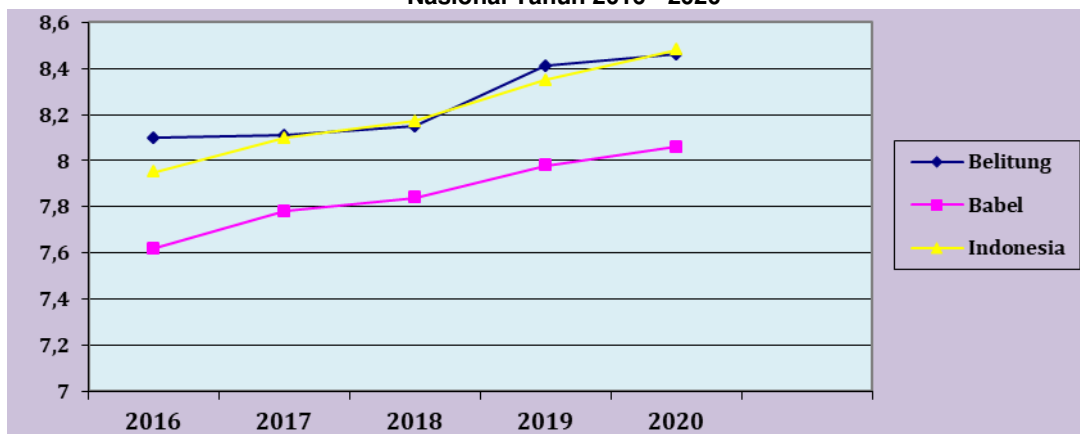
Capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat” diukur melalui Indikator Sasaran Kinerja Rata-Rata Lama Sekolah. Target yang ditetapkan adalah 8,15 tahun. Untuk melihat capaian kinerja tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.43
Capaian Kinerja Sasaran Meningkatkan Kualitas Pendidikan

NO	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL RPJMD 2018	2020			KATEGORI	TARGET AKHIR RPJMD 2023
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	8,11	8,15	8,46	103,80	SB	8,19

Indikator dari sasaran Meningkatkan Kualitas Pendidikan Masyarakat, yaitu Rata-Rata Lama Sekolah (RLS). Angka rata-rata lama sekolah menunjukkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Berdasarkan penghitungan dari BPS, realisasi RLS Kabupaten Belitung tahun 2020 sebesar 8,46 tahun. Realisasi ini telah melampaui target sebesar 3,80%. Demikian juga dengan target akhir RPJMD, telah dilampaui sebesar kurang lebih 3,30%. Berikut disajikan data capaian Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Belitung dan Provinsi Bangka Belitung dari tahun 2016 sampai 2020.

Grafik 3.7. : Perkembangan Capaian RLS Kabupaten Belitung terhadap Prov. Kep. Babel dan Nasional Tahun 2016 - 2020



Sumber : Badan Pusat Statistik 2021



Dari grafik terlihat bahwa selama kurun waktu 2016 – 2020, capaian RLS Kabupaten Belitung sudah di atas provinsi Bangka Belitung. Namun berbanding terbalik dengan capaian RLS nasional, RLS Kabupaten Belitung lebih rendah. Pada tahun 2020, capaian RLS Kabupaten Belitung 8,46 tahun, melampaui RLS Provinsi Kep Babel yang sebesar 8,06 tahun, namun masih dibawah capaian nasional yang sebesar 8,48 tahun.

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai setiap anak .

Berdasarkan hal tersebut, maka untuk mencapai capaian indikator kinerja “Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat” dilakukan melalui strategi “Meningkatkan Akses Pendidikan” dengan 6 (enam) arah kebijakan, yaitu:

- 1.Meningkatkan partisipasi sekolah pada anak usia sekolah;
- 2.Meningkatkan akreditasi sekolah (SD dan SMP);
- 3.Meningkatkan penyelenggaraan pendidikan non formal;
- 4.Meningkatkan mutu pembelajaran dengan penguatan karakter dan akhlak;
- 5.Meningkatkan kualitas SDM pendidikan; dan
- 6.Meningkatkan pemerataan sebaran guru.

Untuk mengukur tingkat partisipasi sekolah pada anak usia sekolah dilakukan dengan menggunakan 3 (tiga) indikator, yaitu; Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM), dan Angka Putus Sekolah (APTs).

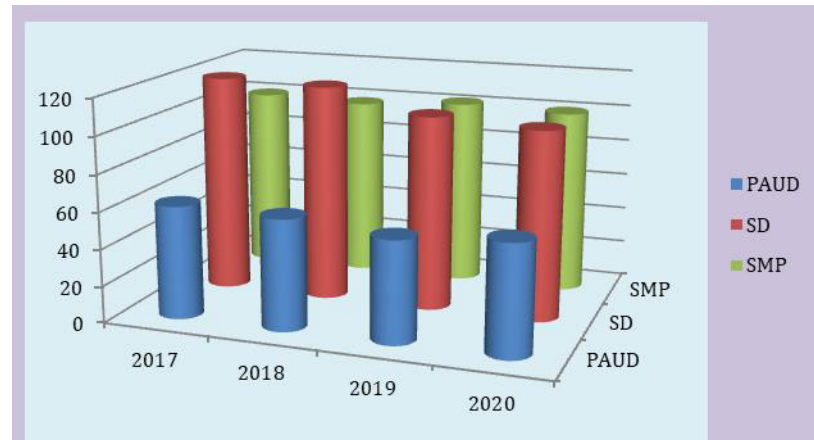
❖ Angka Partisipasi Kasar (APK)

Salah satu tolok ukur partisipasi penduduk ditunjukkan dengan Angka Partisipasi Kasar (APK). APK bertujuan untuk meningkatkan pemerataan dan perluasan pelayanan pendidikan yang bermutu dan terjangkau, baik melalui jalur formal maupun nonformal. Sehingga seluruh anak usia sekolah dasar dan menengah baik laki-laki maupun perempuan dan anak-anak yang memerlukan perhatian khusus dapat memperoleh pendidikan. APK juga menunjukkan partisipasi penduduk yang sedang mengenyam pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikannya dan merupakan persentase jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan (berapapun usianya) terhadap jumlah penduduk usia sekolah sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut.

Nilai APK bisa lebih dari 100%. Hal ini disebabkan karena populasi murid yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan mencakup anak berusia di luar batas usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan. Sebagai contoh, banyak anak-anak usia diatas 12 tahun, tetapi masih sekolah di tingkat SD atau juga banyak anak-anak yang belum berusia 7 tahun tetapi telah masuk SD. Adanya siswa dengan usia lebih tua dibanding usia standar di jenjang pendidikan tertentu menunjukkan terjadinya kasus tinggal kelas atau terlambat masuk sekolah. Sebaliknya, siswa yang lebih muda dibanding usia standar yang duduk di suatu jenjang pendidikan menunjukkan siswa tersebut masuk sekolah di usia yang lebih muda.

Berikut angka partisipasi kasar (SD/MI + Paket A, SMP/Mts + Paket B) di Kabupaten Belitung Tahun 2020 :

Grafik 3.8. : Perkembangan APK Tahun 2017 – 2020



Pada tahun 2020, APK Kabupaten Belitung pada beberapa jenjang pendidikan turun dari tahun sebelumnya. Penyebab penurunan ini di antaranya adalah adanya pemberlakuan regulasi penerapan Usia Minimal Masuk sekolah pada Proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) setiap tahun pelajaran. Selain itu penurunan APK jenjang SMP, juga disebabkan oleh tidak semua ulusan SD melanjutkan ke jenjang SMP dan sebagian lulusan SD melanjutkan pendidikan di luar wilayah Kabupaten Belitung yang disebabkan ikut orang tua, pindah keluarga atau sebab lain.

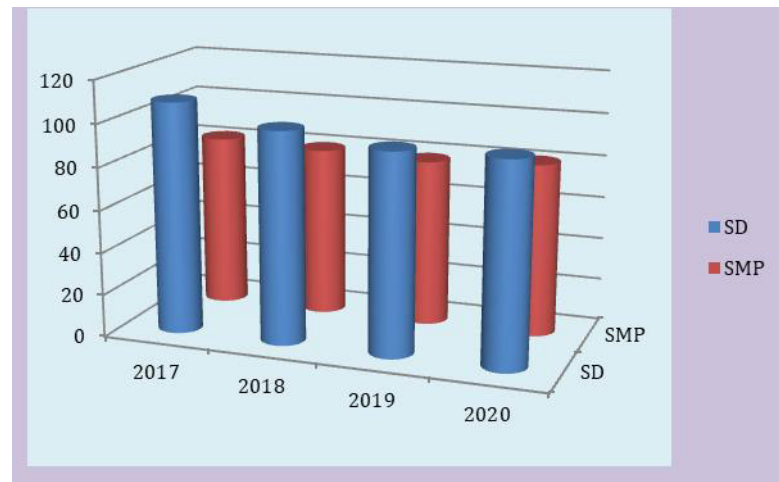
❖ Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase jumlah anak pada kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya terhadap jumlah seluruh anak pada kelompok usia sekolah yang bersangkutan. Angka Partisipasi Murni (APM) digunakan untuk mengukur proporsi anak yang bersekolah tepat waktu.

Bila seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah tepat waktu, maka APM akan mencapai nilai 100. Secara umum, nilai APM akan selalu lebih rendah dari APK karena nilai APK mencakup anak di luar usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan. Selisih antara APK dan APM menunjukkan proporsi siswa yang terlambat atau terlalu cepat bersekolah. Keterbatasan APM adalah kemungkinan adanya under estimate karena adanya siswa di luar kelompok usia yang standar di tingkat pendidikan tertentu. Contoh: Seorang anak usia 6 tahun bersekolah di SD kelas 1 tidak akan masuk dalam penghitungan APM karena usianya lebih rendah dibanding kelompok usia standar SD yaitu 7-12 tahun.

Berikut angka partisipasi murni (SD/MI + Paket A, SMP/Mts + Paket B) di Kabupaten Belitung tahun 2020.

Grafik 2.9. : Perkembangan APM Tahun 2017-2020



Pada tahun 2020, APM jenjang SMP mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Peningkatan tersebut terjadi karena jumlah siswa usia sekolah pada jenjang pendidikan tertentu (SD dan SMP) lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk pada usia sekolah (Usia 7 - 12 tahun jenjang SD dan Usia 13 - 15 tahun jenjang SMP).

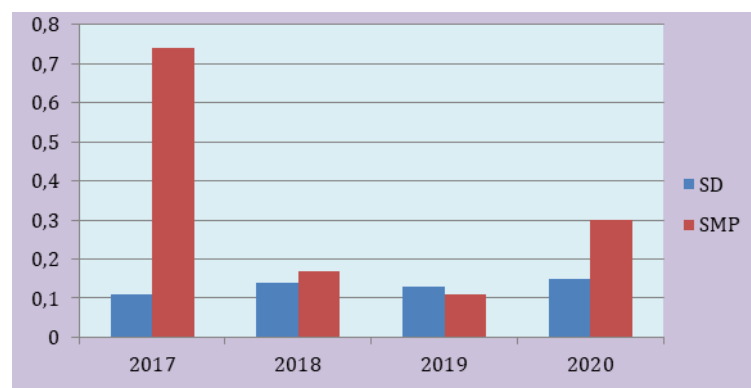
Sementara faktor Penghambat Pencapaian Kinerja adalah motivasi untuk bersekolah yang kurang. Ini terlihat dari tingginya Angka Putus Sekolah (APTs) pada tahun 2020 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya.

❖ **Angka Putus Sekolah (APTs)**

Angka Putus Sekolah adalah proporsi anak menurut kelompok usia sekolah yang sudah tidak bersekolah lagi atau yang tidak menamatkan suatu jenjang pendidikan tertentu. Adapun kelompok umur yang dimaksud adalah kelompok umur 7 - 12 tahun, 13 - 15 tahun dan 16 - 18 tahun. Semakin tinggi angka putus sekolah menggambarkan kondisi pendidikan yang tidak baik dan tidak merata. Begitu sebaliknya jika angka putus sekolah semakin kecil maka kondisi pendidikan di suatu wilayah semakin baik.

Di Kabupaten Belitung, APTs mengalami penurunan terutama di tingkat SD/MI + Paket A dan SMP/Mts + Paket B. Sebagaimana terlihat pada berikut:

Grafik 2.10. : Perkembangan Angka Putus Sekolah Kab. Belitung Tahun 2017 – 2020



Dari grafik di atas terlihat bahwa persentase APTs jenjang SD mengalami peningkatan pada tahun 2020 (0,15 %) dibandingkan tahun 2019 (0,14 %) dan APTs jenjang SMP juga menurun pada tahun 2020 (0,30%)

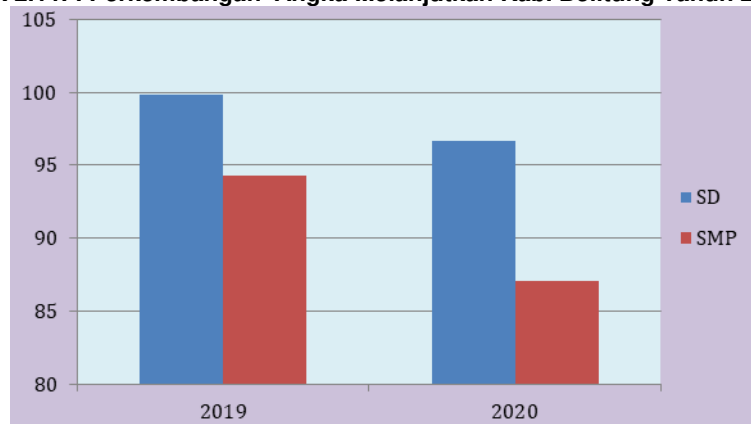
dibandingkan tahun 2019 (0,11%). Persentase angka putus sekolah yang meningkat perlu dilakukan kajian secara mendalam dengan menilai banyak variabel.

Angka putus sekolah ini bertujuan untuk mengukur kemajuan pembangunan di bidang pendidikan dan untuk melihat keterjangkauan pendidikan maupun pemerataan pendidikan pada masing-masing kelompok umur. Terjadi peningkatan angka putus sekolah di Kabupaten Belitung disebabkan Pandemi Covid 19 yang menyebabkan kegiatan belajar mengajar di sekolah ditiadakan dan digantikan dengan belajar dari rumah (BDR) tidak efektif untuk membangun suasana belajar yang menyenangkan, kemudian siswa terutama jenjang SMP sudah memiliki kesibukan lain selama belajar di rumah seperti membantu orang tua sehingga mereka jadi malas untuk bersekolah dan pada daerah dan kondisi tertentu memiliki aktivitas sendiri atau memiliki penghasilan dari aktivitasnya membantu orang tua sehingga mereka tidak memiliki motivasi untuk bersekolah.

❖ Angka Melanjutkan (AM)

Angka Melanjutkan (AM) adalah perbandingan antara jumlah siswa baru tingkat 7 atau 10 dengan jumlah lulusan pada tingkat 6 atau 9, dinyatakan dalam persentase.

Grafik 2.11. : Perkembangan Angka Melanjutkan Kab. Belitung Tahun 2019 – 2020



Dari grafik diatas capaian kinerja angka melanjutkan SD di tahun 2020 sebesar 96,70% lebih kecil jika dibandingkan tahun 2019 sebesar 99,83% artinya jumlah siswa lulusan SD yang melanjutkan ke jenjang SMP di Kabupaten Belitung berkurang dibanding tahun 2019. Sedangkan capaian indikator angka melanjutkan SMP ditahun 2020 sebesar 87,11% lebih kecil dibandingkan dengan capaian tahun 2019 sebesar 94,33%, artinya jumlah siswa lulusan SMP yang melanjutkan ke jenjang SMA/SMK di Kabupaten Belitung berkurang dibandingkan tahun 2019. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi menurunnya angka melanjutkan jenjang

SD dan SMP di Kabupaten Belitung, antara lain: siswa lulusan SD dan SMP melanjutkan pendidikannya diluar Kabupaten Belitung dengan alasan ikut orang tua atau keluarga, sehingga tidak terdata dan juga siswa lulusan SD dan SMP enggan melanjutkan ke jenjang pendidikan lebih tinggi dengan berbagai alasan dan pertimbangan, salah satunya pandemic covid 19 yang mana siswa baru pada jenjang pendidikan yang akan ditempuh harus melakukan kegiatan belajar mengajar dari rumah sehingga siswa baru disuatu sekolah tidak pernah berada dilingkungan sekolah barunya.



Penerapan Protokol Kesehatan disetiap sekolah



Tabel 2.44
Data Akreditasi Per Jenjang Pendidikan di Kabupaten Belitung

NO	JENJANG PENDIDIKAN	STATUS AKREDITASI				JUMLAH	PERSENTASE TERAKREDITASI
		TERAKREDITASI			BELUM		
		A	B	C			
1	PAUD	7	63	25	12	107	88.79
2	SD/MI	12	103	7	0	122	100.00
3	SMP/MTs	16	11	2	3	32	90.63

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2020

Dari tabel dapat dilihat bahwa untuk jenjang PAUD, dari 107 sekolah sudah terakreditasi sebanyak 88.79% atau sebanyak 95 sekolah, dengan rincian 7 sekolah akreditasi A, 63 akreditasi B, dan 25 akreditasi C. Untuk jenjang SD/MI tidak ada sekolah yang belum terakreditasi. Dari 122 sekolah, sebanyak 12 sekolah akreditasi A, 103 akreditasi B, dan 7 akreditasi C. Demikian juga untuk jenjang SMP, hanya 3 (tiga) sekolah yang belum terakreditasi. Dari 32 sekolah, 16 akreditasi A, 11 akreditasi B, dan 2 akreditasi C.

Kebijakan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan non formal dilakukan dengan menggerakkan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) untuk memotivasi masyarakat agar mau ikut sekolah kembali terutama bagi mereka yang telah putus sekolah. Pada tahun 2020, tercatat sebanyak 8 (delapan) PKBM. Dua PKBM sudah terakreditasi dan 6 (enam) masih dalam proses, sebagaimana digambarkan pada tabel berikut:

Tabel.2.45
Jumlah PKBM di Kabupaten Belitung Tahun 2020

NO	NAMA LEMBAGA	KECAMATAN	JENIS LAYANAN	STATUS AKREDITAS	PERSENTASE TERAKREDITASI
1.	SKB Belitung	Tg.Pandan	PAUD, Paket A,B dan C	Terakreditasi B	25%
2.	PKBM Mendanau	Selat Nasik	Paket A, B dan C	Belum	
3.	PKBM Pengayoman	Badau	Paket A, B dan C	Terakreditasi C	
4.	PKBM Mitra Sejahtera	Badau	Paket A, B dan C	Belum	
5.	PKBM Insan Harapan	Sijuk	Paket A, B dan C	Belum	
6.	PKBM Sumber Ilmu	Sijuk	Paket A, B dan C	Belum	
7.	PKBM Az- Zahrawi	Sijuk	Paket A, B dan C	Belum	
8.	PKBM Belantu Edukasi	Membalong	Paket A, B dan C	Belum	

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung 2021

Pencapaian program pendidikan non formal dengan indikator Lembaga Pendidikan Kelompok Belajar Masyarakat (PKBM) terkreditasi dengan target 25 persen dan capaian sebesar 25 persen, perlu upaya yang lebih intensif menggerakkan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) untuk memotivasi masyarakat agar mau ikut sekolah kembali terutama bagi mereka yang telah putus sekolah.

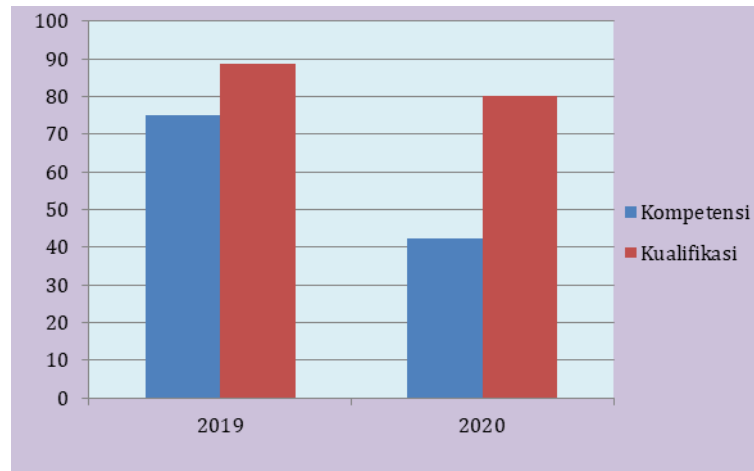
Selain tempat belajar dan kualitas kelembagaan, upaya meningkatkan mutu pendidikan dengan arah kebijakan meningkatkan mutu pembelajaran dengan penguatan karakter dan akhlak dan meningkatkan kualitas SDM pendidikan juga menjadi perhatian utama Pemerintah Kabupaten Belitung. Upaya peningkatan mutu pendidikan dilakukan melalui program Peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan yang memiliki 2 (dua) indikator kinerja, yaitu; persentase tenaga pendidik dan tenaga kependidikan sesuai standar kompetensi dan persentase tenaga pendidik dan tenaga kependidikan sesuai kualifikasi.

Persentase tenaga pendidik dan tenaga kependidikan sesuai standar kompetensi diukur dari kompetensi yang dimiliki oleh seorang tenaga pendidik, dalam hal ini sertifikat pendidik yang dimiliki. Persentase tenaga pendidik dan tenaga kependidikan sesuai kualifikasi diukur dari tingkat pendidikan yang dimilikinya, yaitu untuk guru harus memiliki kualifikasi pendidikan minimal S1/DIV dan tenaga administrasi harus memiliki



kualifikasi pendidikan SMA sederajat. Berikut capaian peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan disajikan pada grafik.

Grafik 2.12. : Capaian Indikator Guru Memenuhi Kualifikasi dan bersertifikat pendidik Kabupaten Belitung Tahun 2020



Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung 2019

Dari grafik di atas terlihat bahwa capaian indikator Persentase Jumlah Guru yang memenuhi Kualifikasi Pendidikan Minimal S1/DIV pada tahun 2020 sebesar 80,30% lebih rendah dari tahun 2019 sebesar 88,84%. Sedangkan capaian indikator Persentase Jumlah Guru yang memiliki Sertifikat Pendidik pada tahun 2020 sebesar 42,39% lebih rendah dari tahun 2019 sebesar 75%. Ada beberapa faktor yang menyebabkan menurunnya capaian kedua indikator tersebut, antara lain Jumlah guru yang berkualifikasi S1/DIV pada tahun 2020 yang memasuki usia pension lebih banyak dibandingkan dengan guru yang belum berkualifikasi pendidikan S1/DIV, begitu juga dengan guru yang bersertifikat pendidik pada tahun 2020 banyak yang memasuki usia pension sementara guru baru yang mengisi formasi CPNS sebagian besar belum memiliki sertifikat pendidik karena sertifikat pendidik bukan merupakan persyaratan untuk melamar formasi jabatan guru.

Namun yang lebih penting dari hal di atas adalah pemerataan sebaran sekolah dan guru. Berikut dipaparkan sebaran sekolah, guru, dan murid per jenjang pendidikan per kecamatan yang menjadi kewenangan Kabupaten Belitung.

Tabel 2.46
Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid jenjang TK/PAUD
di Kabupaten Belitung Tahun 2017/2018 dan 2018/2019

Kecamatan	Sekolah		Guru		Murid	
	2017/2018	2018/2019	2017/2018	2018/2019	2017/2018	2018/2019
Membalong	8	8	33	32	291	314
Tanjungpandan	22	23	115	140	1 682	1 717
Badau	4	4	33	16	169	167
Sijuk	9	9	19	36	379	357
Selat Nasik	1	1	1	5	23	28
Belitung	44	45	171	229	2 544	2 583

Sumber: Kabupaten Belitung Dalam Angka, 2020

Tabel 2.47
Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid jenjang SD/MI
di Kabupaten Belitung Tahun 2017/2018 dan 2018/2019

Kecamatan	Sekolah		Guru		Murid	
	2017/2018	2018/2019	2017/2018	2018/2019	2017/2018	2018/2019
Membalong	30	30	222	247	2.715	2.709
Tanjungpandan	44	44	514	542	11.047	11.245
Badau	17	17	131	148	1.514	1.522
Sijuk	22	22	179	202	3.291	3.256
Selat Nasik	7	7	51	61	625	570
Belitung	120	120	1.097	1.200	19.192	19.302

Sumber: Kabupaten Belitung Dalam Angka, 2020

Tabel 2.48
Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid jenjang SMP
di Kabupaten Belitung Tahun 2017/2018 dan 2018/2019

Kecamatan	Sekolah		Guru		Murid	
	2017/2018	2018/2019	2017/2018	2018/2019	2017/2018	2018/2019
Membalong	5	5	59	75	1.049	1.067
Tanjungpandan	15	15	228	257	4.483	4.556
Badau	3	3	39	46	781	740
Sijuk	4	4	67	74	1.378	1.337
Selat Nasik	2	2	17	23	277	273
Belitung	29	29	410	475	7.968	7.973

Sumber: Kabupaten Belitung Dalam Angka, 2020 (Diolah)

Dari tabel-tabel di atas dapat dilihat bahwa selama 2 (dua) tahun terakhir terjadi peningkatan sebaran guru-guru pada jenjang SD dan SMP di tiap kecamatan, walaupun jumlah murid menurun, kecuali di Kecamatan Tanjungpandan. Peningkatan sebaran guru-guru ini terjadi karena adanya penerimaan PNS untuk kategori guru SD dan SMP. Peningkatan yang tinggi sebaran guru-guru di Kecamatan Tanjungpandan karena mutasi dari kecamatan lain di Kabupaten Belitung. Sedangkan jumlah sekolah tidak mengalami peningkatan. Khusus untuk jumlah sekolah diprioritaskan pada peningkatan kualitas gedung sekolah dengan perbaikan-perbaikan ruang kelas, penambahan ruang kelas, serta penambahan kelengkapan sarana pendidikan.

Untuk mencapai sasaran dengan strategi "Meningkatkan Kualitas Pendidikan Masyarakat" dengan sasaran "Meningkatkan Akses Pendidikan" melalui dengan 6 (enam) arah kebijakan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menetapkan 5 (lima) Program, yaitu:

1. Program Pendidikan Anak Usia Dini;





2. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun;
3. Program Pendidikan Non Formal;
4. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga; dan
5. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan.

Launching Program

Di samping itu, Pemerintah Kabupaten Belitung juga berupaya meningkatkan kualitas pendidikan melalui program inovatif yang diusung Bupati dan Wakil Bupati, yaitu: Program Pelayanan Pendidikan Bagi Siswa Kurang Mampu dan Siswa Berprestasi (SIMPOR)". Program ini merupakan upaya untuk mencegah putus sekolah bagi siswa kurang mampu yang rentan putus sekolah. Program SIMPOR menysasar Siswa SD dan SMP yang kurang mampu dan rentan putus sekolah, tetapi tidak mendapat bantuan pada Program Indonesia Pintar (PIP). Program SIMPOR dilakukan dengan pemberian bantuan perlengkapan sekolah kepada siswa SD dan SMP dengan nilai sejumlah Rp. 500.000,- per siswa per tahun.

Untuk pelaksanaan program-program tersebut telah dianggarkan sebesar Rp 67.469.044.100,00. Realisasi anggaran untuk menjalankan program-program dalam rangka pencapaian kinerja sasaran sebesar 103,80%, secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.49
Realisasi Keuangan Program penunjang Sasaran Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat

NO	PROGRAM	PAGU ANGGARAN (RP)	REALISASI ANGGARAN (RP)	%
1.	Program Pendidikan Anak Usia Dini	6.608.747.000,00	6.067.033.808,00	91,80
2.	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	54.672.354.100,00	51.763.695.414,00	94,66
3.	Program Pendidikan Non Formal	5.829.259.000,00	4.848.992.096,00	83,18
4.	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	120.000.000,00	82.800.000,00	69,00
5.	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	238.684.000,00	188.833.135,00	79,11

Dari tabel di atas terlihat bahwa realisasi anggaran per program cukup baik, dengan rata-rata di atas 80%. Dengan rata-rata realisasi anggaran sebesar 83,55%, maka terdapat efektifitas anggaran sebesar 16,45% untuk Pencapaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat dengan capaian 103,80%.

Upaya pencapaian indikator sasaran ini bisa berjalan baik karena adanya faktor pendukung pencapaian kinerja, antara lain;

- ❖ Adanya dukungan program pusat yang berkaitan dengan wajib belajar dan pengentasan kemiskinan;
- ❖ Ketersediaan anggaran dan komitmen pimpinan.

Adapun faktor Penghambat Pencapaian Kinerja antara lain;

- ✘ Akses pendidikan kurang merata. Hal tersebut dapat ditandai dengan rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan dasar, sehingga dengan kurangnya akses pendidikan tersebut berpengaruh terhadap angka Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Belitung;
- ✘ Kurangnya akses pendidikan usia dini;



- ✘ Sistem pembelajaran kurang optimal dengan adanya kebijakan Belajar dari Rumah (BDR) akibat pandemic covid 19 yang tidak mampu membangun suasana belajar seperti saat pembelajaran tatap muka disekolah, yang berakibat motivasi belajar siswa yang rendah dan menganggap sekolah sebagai hal yang penting;
- ✘ Cukup tingginya APTs di Kabupaten Belitung.
- ✘ Adanya pandemi Covid 19 yang terjadi tahun 2020 mempengaruhi kinerja pencapaian program dan kegiatan yang telah direncanakan.

Memperhatikan faktor pendukung dan penghambat di atas beberapa hal yang harus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Belitung ke depan adalah sebagai berikut:

- ⌘ Meningkatkan pemerataan akses pendidikan terutama untuk daerah terpencil;
- ⌘ Meningkatkan kualitas pembelajaran
Menurut pengamatan sebagian besar siswa tidak belajar sebagaimana yang seharusnya. Pemerintah Kabupaten Belitung harus dapat memastikan bahwa siswa setidaknya mencapai standar minimal pembelajaran dan pengembangan diri siswa di setiap jenjang sistem pendidikan.
- ⌘ Mulai lebih dini
Penelitian internasional menunjukkan bahwa investasi dalam pendidikan anak usia dini menghasilkan capaian yang tinggi secara kognitif, ekonomi, dan sosial. Pemerintah Kabupaten Belitung harus dapat mendorong masyarakat agar lebih termotivasi untuk berpartisipasi dalam pendidikan usia dini.
- ⌘ Meningkatkan kemampuan mengajar guru
Tanpa pengajaran yang lebih baik secara konsisten, siswa di Kabupaten Belitung tidak akan memperoleh fondasi yang kuat untuk belajar di tahap selanjutnya. Pemerintah Kabupaten Belitung harus dapat memastikan bahwa Kabupaten Belitung memiliki jumlah guru berkualifikasi tinggi di tempat yang membutuhkan, khususnya di sekolah-sekolah yang berprestasi rendah, terpencil, dan di daerah pedesaan, serta memastikan para guru tersebut berkinerja sesuai kemampuan terbaiknya.

SASARAN 3 : Meningkatkan Daya Beli Masyarakat

Kemampuan ekonomi suatu daerah memiliki daya tarik bagi pelaku ekonomi untuk berinvestasi di daerah tersebut. Investasi yang masuk tentunya akan menciptakan efek pengganda (*multiplier effect*) bagi peningkatan daya saing daerah.

Salah satu tolok ukur kemampuan ekonomi suatu daerah adalah pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita yang disesuaikan. Indikator ini menunjukkan tingkat daya beli masyarakat terhadap barang dan jasa yang memberikan gambaran tentang kesejahteraan masyarakat. Semakin tinggi daya beli masyarakat, maka akan semakin tinggi pula kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Pemerintah Kabupaten akan terus mendorong dan memberikan stimulus bagi para pelaku usaha baik kecil maupun besar untuk dapat bergerak di tengah pandemi. Dengan cara tersebut, konsumsi rumah tangga diharapkan akan semakin meningkat dan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Pencapaian indikator sasaran Meningkatkan Daya Beli Masyarakat Kabupaten Belitung Tahun 2020 sebagai berikut:

Tabel 2.50
Capaian Kinerja Sasaran Meningkatkan Daya Beli Masyarakat

No	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal RPJMD 2018	2020		Kategori	Akhir RPJMD 2023 Target
				Target	Realisasi Capaian (%)		



1	Pengeluaran per kapita (dalam ribu rupiah)	(Ribu Rupiah)	12.910	13.496	13.554	100,43	SB	14.049
---	--	---------------	--------	--------	--------	--------	----	--------

Berdasarkan perhitungan BPS, indikator sasaran Meningkatnya Daya Beli Masyarakat, yaitu Pengeluaran per Kapita (dalam ribu rupiah) Kabupaten Belitung tahun 2020 sebesar 13.554 (dalam ribu rupiah). Realisasi kinerja indikator Pengeluaran per Kapita (dalam ribu rupiah) ini telah melampaui target sebesar 0,43%. Sedangkan untuk target akhir RPJMD perlu peningkatan sekitar 3,52%.

Dibandingkan dengan Provinsi dan Nasional, Pengeluaran per Kapita masyarakat Kabupaten Belitung lebih tinggi, sebagaimana tergambar pada tabel berikut:

Tabel 2.51
Pengeluaran per Kapita Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Indonesia Tahun 2016-2020 (dalam ribu rupiah)

NO	URAIAN	TAHUN				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Kabupaten Belitung	12.865	12.910	13.281	13.662	13.554
2	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	11.960	12.066	12.666	12.959	12.794
3	Indonesia	10.420	10.664	11.059	11.299	11.010

Sumber: Badan Pusat Statistik 2020

Sebagaimana digambarkan pada tabel di atas, selama kurun waktu 2016 – 2020, Pengeluaran per Kapita Kabupaten Belitung selalu lebih tinggi dari provinsi dan nasional. Ini mengindikasikan bahwa daya beli masyarakat Kabupaten Belitung lebih baik dari pada penduduk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Indonesia secara rata-rata.

Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sendiri, tingkat Pengeluaran per Kapita tertinggi adalah Kota Pangkalpinang dan tertinggi kedua Kabupaten Belitung. Berikut perbandingan pengeluaran per kapita sebulan menurut kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2016 – 2020 pada tabel berikut.

Tabel 2.52
Rata-rata Pengeluaran per Kapita Setahun (dalam ribu rupiah) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 – 2020

NO	KABUPATEN/KOTA	TAHUN				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Bangka	11.279	11.420	12.043	12.480	12.416
2	Belitung	12.865	12.910	13.281	13.662	13.554
3	Bangka Barat	11.303	11.394	12.011	12.275	12.233
4	Bangka Tengah	12.248	12.330	12.836	13.070	12.909
5	Bangka Selatan	10.932	10.999	11.573	11.910	11.757
6	Belitung Timur	10.729	10.894	11.302	11.831	11.730
7	Pangkalpinang	14.807	14.923	15.560	15.883	15.663

Sumber : Badan Pusat Statistik Prov. Kep Bangka Belitung 2021

Tabel di atas menyatakan bahwa dalam kurun 2016 – 2020 terjadi penurunan rata-rata pengeluaran per kapita setahun pada seluruh kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 hal ini merupakan dampak akibat adanya pandemic covid 19 yang melanda seluruh dunia, rata-rata pengeluaran per kapita setahun Kabupaten Belitung sebesar Rp 13.554.000,00, tertinggi kedua setelah Kota Pangkalpinang sebesar Rp 15.663.000,00.



Sementara berdasarkan data resmi BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam Angka Tahun 2020, rata-rata pengeluaran per kapita sebulan di daerah perkotaan dan perdesaan di kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.53
Rata-rata Pengeluaran per Kapita Sebulan (rupiah) di Daerah Perkotaan dan Perdesaan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018 – 2019

KABUPATEN/KOTA	MAKANAN		BUKAN MAKANAN		JUMLAH	
	2018	2019	2018	2019	2018	2019
Bangka	706 409	767 761	710 173	674 074	1 416 582	1 441 834
Belitung	747 786	789 688	769 766	887 524	1 517 553	1 677 213
Bangka Barat	667 826	684 877	625 657	630 236	1 293 483	1 315 113
Bangka Tengah	626.724	708 912	587 034	716 195	1 213 758	1 425 107
Bangka Selatan	700 804	717 328	531 145	584 929	1 231 949	1 302 257
Belitung Timur	729 477	822 908	679 292	855 459	1 408 770	1 678 367
Pangkalpinang	801 102	788 900	1 043 349	1 055 919	1 844 450	1 844 819
Kep. Bangka Belitung	710 401	751 641	709 094	758 333	1 419 495	1 509 974

Sumber : Badan Pusat Statistik Prov. Kep Bangka Belitung 2020

Berdasarkan tabel di atas, selama 2 (dua) tahun rata-rata pengeluaran per kapita sebulan Kabupaten Belitung lebih banyak pada jenis non makanan, seperti perumahan dan fasilitas perumahan, aneka komoditas dan jasa, pakaian, pajak, pungutan, dan asuransi, keperluan pesta dan kenduri. Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan Kabupaten Belitung sebesar Rp 1.517.553,- tahun 2018 dan Rp 1.677.213 tahun 2019, tertinggi ketiga setelah Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Belitung Timur.

Tingginya pengeluaran per kapita ini dipengaruhi oleh tingkat inflasi. Pada tahun 2019, berdasar catatan BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, tingkat inflasi Kota Tanjungpandan sebesar 3,19% sedangkan tingkat inflasi Kota pangkalpinang sebesar 2,31%. Sementara tingkat inflasi Indonesia tahun 2019 sebesar 2,72%.

Rata-rata pengeluaran dan tingkat inflasi yang tinggi ini merupakan masalah yang harus dihadapi masyarakat Kabupaten Belitung. Masyarakat Kabupaten Belitung tentunya harus memiliki pendapatan per bulan dari hasil kegiatan ekonomi mereka yang lebih tinggi dari pengeluaran tersebut. Hal ini sangat bergantung pada kondisi ketengakerjaan Kabupaten Belitung.

Berdasarkan data resmi BPS Kepulauan Bangka Belitung tahun 2020, indikator ketenagakerjaan Kabupaten Belitung cukup baik, tetapi masalah ketenagakerjaan ini tetap menjadi perhatian serius, karena memiliki peran yang sangat krusial dalam penentuan keberhasilan pembangunan daerah. Berikut ditampilkan tabel ketenagakerjaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Tabel 2.54
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Menurut Kabupaten/Kota, 2017 - 2020 di Prov. Kep. Babel

KABUPATEN/KOTA	TPT				TPAK			
	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020
Bangka	4.29	4.12	3.80	5,42	65.75	64.10	64.30	63,93
Belitung	2.57	2.93	2.90	4,82	69.29	70.36	68.74	69,32
Bangka Barat	4.23	3.11	2.85	4,12	68.17	70.47	66.99	69,32



Bangka Tengah	3.38	3.93	4.39	5,59	69.26	70.99	69.65	70,85
Bangka Selatan	2.74	4.35	3.87	5,42	64.70	67.40	68.12	68,86
Belitung Timur	2.62	4.35	1.71	3,93	68.00	71.93	71.37	71,33
Pangkalpinang	5.80	1.50	5.01	6,93	63.42	63.64	68.35	62,37
Kep. Bangka Belitung	3.78	3.65	3.62	5,25	66.72	67.79	67.70	66,89

Sumber : Badan Pusat Statistik Prov. Kep Bangka Belitung 2021

Dari tabel di atas dapat dilihat Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Belitung tahun 2020 sebesar 4,82 meningkat dari tahun 2019 sebesar 2,90%. TPT Kabupaten Belitung tahun 2020 lebih tinggi dari tahun 2019 . Artinya dari 100 orang yang termasuk dalam Angkatan Kerja ada 4 sampai 5 orang yang tidak berkerja atau penganggur. Dibandingkan kabupaten/kota lain di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, TPT Kabupaten Belitung terendah ketiga setelah Belitung Timur (3,93%) dan Bangka Barat (4,12%), dan lebih rendah dari TPT Provinsi sebesar 5,25%.

Dilihat dari sisi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), TPAK Kabupaten Belitung tahun 2020 sebesar 69,32% atau sebanyak 98 436 orang dari jumlah penduduk usia kerja (usia 15 tahun ke atas) sebanyak 143 197 orang. TPAK Kabupaten Belitung tahun 2020 ini meningkat dari tahun 2019 yang sebesar 68,74% dan berada di posisi ketiga di bawah Belitung Timur (71,33%) dan Bangka Tengah (70,85%). Sementara TPAK Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2020 hanya 66,89%.

Dari sisi penyerapan Angkatan Kerja, pada tahun 2019, lapangan usaha yang paling banyak menyerap tenaga kerja di Kabupaten Belitung dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.55
Penyerapan Angkatan Kerja per Lapangan Usaha Menurut Kabupaten/Kota, 2017 - 2019
di Prov. Kep. Babel

KABUPATEN/KOTA	LAPANGAN PEKERJAAN UTAMA						JUMLAH
	SEKTOR 1		SEKTOR 2		SEKTOR 3		
	ORANG	PERSEN	ORANG	PERSEN	ORANG	PERSEN	
Bangka	46 811	30.42	46 359	30.13	60 704	39.45	153 874
Belitung	31 353	32.80	22 456	23.49	41 774	43.70	95 583
Bangka Barat	34 769	34.57	32 676	32.49	33 118	32.93	100 563
Bangka Tengah	26 326	28.16	25 477	27.25	41 680	44.59	93 483
Bangka Selatan	42 389	42.85	26 818	27.11	29 710	30.04	98 917
Belitung Timur	24 336	35.32	20 339	29.52	24 231	35.17	68 906
Pangkalpinang	2 269	2.17	23 088	22.07	79 244	75.76	104 601
Kep. Bangka Belitung	208 253	29.09	197 213	27.55	310 461	43.36	715 927

Sumber : Badan Pusat Statistik Prov. Kep Bangka Belitung 2021

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa lapangan usaha yang paling banyak menyerap tenaga kerja adalah sektor jasa (3) yang terdiri dari Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Transportasi dan Pergudangan; Penyediaan Akomodasi dan Makan minum; Informasi dan Komunikasi; Jasa Keuangan dan Asuransi; Real Estat; Jasa Perusahaan; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib; Jasa Pendidikan; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; dan Jasa Lainnya, sebanyak

41 774 orang/pekerja. Kemudian sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (1) sebanyak 31 353 pekerja, dan disusul dengan sektor Pertambangan dan Penggalian; Industri Pengolahan; Pengadaan Listrik dan Gas; Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang; dan Konstruksi (2). Ini menandakan bahwa sudah terjadi pergeseran ketergantungan ekonomi dari yang sebelumnya pada sektor pertambangan bergeser ke sektor jasa dan pertanian, perkebunan, dan perikanan.

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan juga berperan mengajak masyarakat untuk ikut serta mengembangkan potensi diri dalam berbagai pelatihan-pelatihan yang diadakan pada setiap Kelurahan yang ada di Kecamatan Tanjungpandan, berbagai kegiatan pelatihan yang dilaksanakan selama Tahun 2020 seperti pelatihan tata rias, pelatihan merajut, pelatihan gunting rambut, membuat souvenir dan pengelasan dasar diharapkan dapat menjadi bekal masyarakat untuk mengembangkan usaha atau berwirausaha secara mandiri guna membantu perekonomian keluarga.



Berbagai kegiatan pelatihan yang diadakan oleh kelurahan di Kabupaten Belitung (Tata rias, Merajut, Gunting Rambut, Pengelasan dasar)



Sementara dilihat dari sisi penghasilan sebulan, rata-rata gaji bersih pekerja formal dan informal dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.56
Rata-rata Upah/Gaji Bersih Pekerja Formal Menurut Kabupaten/Kota dan Lapangan Kerja Utama, 2020 di Prov. Kep. Babel

KABUPATEN/KOTA	LAPANGAN PEKERJAAN UTAMA			JUMLAH
	SEKTOR 1 ORANG	SEKTOR 2 ORANG	SEKTOR 3 ORANG	
Bangka	2 199 664	2 445 925	2 486 267	2 415 564
Belitung	2 607 340	2 406 201	2 424 561	2 461 652
Bangka Barat	1 734 023	2 230 203	2 278 818	2 126 623
Bangka Tengah	1 881 938	2 123 911	2 593 553	2 382 070
Bangka Selatan	1 623 513	1 681 898	2 337 803	2 079 721



Belitung Timur	2 302 755	3 058 226	2 516 864	2 593 835
Pangkalpinang	2 872 374	2 522 020	2 808 423	2 752 872
Kep. Bangka Belitung	2 161 503	2 387 263	2 541 514	2 436 156

Sumber : Badan Pusat Statistik Prov. Kep Bangka Belitung 2021

Tabel 2.57
Rata-rata Upah/Gaji Bersih Pekerja Informal Menurut Kabupaten/Kota dan Lapangan Kerja Utama, 2020 di Prov. Kep. Babel

KABUPATEN/KOTA	LAPANGAN PEKERJAAN UTAMA			JUMLAH
	SEKTOR 1 ORANG	SEKTOR 2 ORANG	SEKTOR 3 ORANG	
Bangka	1 921 117	2 040 898	1 979 597	1 967 406
Belitung	1 847 302	1 719 597	2 044 985	1 889 970
Bangka Barat	1 168 556	1 440 002	1 998 019	1 418 232
Bangka Tengah	1 372 269	1 784 278	1 353 680	1 468 687
Bangka Selatan	1 358 739	1 727 690	1 576 646	1 503 539
Belitung Timur	1 552 944	1 760 241	1 469 996	1 609 062
Pangkalpinang	1 618 966	2 291 042	1 923 114	1 989 772
Kep. Bangka Belitung	1 533 651	1 798 205	1 840 601	1 700 653

Sumber : Badan Pusat Statistik Prov. Kep Bangka Belitung 2021

Dari kedua tabel di atas, rata-rata upah/gaji pekerja formal di Kabupaten Belitung tertinggi ketiga setelah Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Belitung Timur. Sementara untuk pekerja informal, tertinggi ketiga setelah Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Bangka. Sedangkan lapangan usaha yang paling besar memberikan upah/gaji adalah sektor pertanian untuk pekerja formal dan sektor jasa untuk pekerja informal.

Bila membandingkan upah/gaji pekerja baik formal maupun informal sebulan dengan pengeluaran per kapita sebulan sebesar Rp 1.129.500,-, maka upah/gaji tersebut mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat Kabupaten Belitung sebulan, namun tidak ada pengeluaran untuk *saving*.

Untuk mengatasi kondisi di atas dan dalam upaya meningkatkan daya beli masyarakat, Pemerintah Kabupaten Belitung telah ditetapkan 2 (dua) strategi, yaitu:

1. Perluasan Kesempatan Kerja dengan 2 (dua) arah kebijakan, yaitu:

- meningkatkan keterampilan pencari kerja di bidang pariwisata;
- meningkatkan pemberdayaan sosial masyarakat miskin.

2. Mengurangi Beban Pengeluaran dengan 4 (empat) arah kebijakan, yaitu:

- pemenuhan jaminan kebutuhan pelayanan dasar masyarakat miskin;
- memberikan bantuan pendidikan bagi masyarakat kurang mampu dan berprestasi;
- meningkatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi PMKS;
- meningkatkan kualitas data dan sasaran penerima perlindungan sosial.

Menjadi keharusan bagi setiap daerah di NKRI ini untuk dapat bergerak maju menuju perubahan positif dari waktu ke waktu, sarat dengan prestasi dan pencapaian berarti dalam rangka meretas kemiskinan di segala lini kehidupan agar kemudian dapat terbingkai dalam "masyarakat sejahtera". Keinginan dan harapan ini seakan menjadi delusi manakala pandemic covid 19 melanda dunia. Kabupaten Belitung sebagai salah satu destinasi wisata di Indonesia juga pastinya terdampak pandemi covid 19.



Peningkatan pengeluaran per kapita diperoleh dari daya beli masyarakat yang meningkat. Hal ini harus disertai dengan peningkatan pendapatan masyarakat dengan cara memaksimalkan produktivitas. Salah satu upaya tersebut dapat melalui pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan peningkatan investasi yang diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja.

Strategi Mengurangi Beban Pengeluaran difokuskan pada masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial. Untuk pelaksanaan strategi ini, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak dan Sosial menyelenggarakan Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial. Untuk mengukur kinerja program digunakan Persentase Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

Tabel 2.58
Persentase (%) Penanganan Penyandang Masalah Sosial Tahun 2014 – 2020

TAHUN	PERSENTASE (%) PENANGANAN PENYANDANG MASALAH SOSIAL
2014	98,53%
2015	98,73%
2016	82,45%
2017	76,42%
2018	73,85%
2019	83,89%
2020	94,78 %

Sumber : Badan Pusat Statistik Prov. Kep Bangka Belitung 2020

Penanganan PMKS tahun 2020 juga mengalami peningkatan tahun 94,78%, namun pada tahun 2017 mengalami penurunan yang disebabkan oleh terjadinya bencana banjir di beberapa wilayah di Kabupaten Belitung, namun karena belum terdata sebagai korban bencana banjir sehingga penanganan korban pasca bencana banjir di Kabupaten Belitung mempengaruhi jumlah PMKS yang harus ditangani. Namun pada tahun 2019 meningkat karena data korban pasca banjir telah terdata lengkap. Data jumlah PMKS yang tertangani di Kabupaten Belitung terhadap dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.59
Persentase (%) Penanganan Penyandang Masalah Sosial Tahun 2014-2020

TAHUN	JUMLAH PENYANDANG MASALAH SOSIAL	JUMLAH PEYANDANG MASALAH SOSIAL YANG TERTANGANI	PERSENTASE (%)
2014	9.041	8.908	98,53
2015	9.722	9.599	98,73
2016	9.656	7.961	82,45
2017	14.618	11.171	76,42
2018	13.535	9.996	73,85
2019	14.337	12.028	83,86
2020	13.619	12.908	94,78

Sumber Data : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial Kabupaten Belitung, 2021

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa penanganan PMKS meningkat dari tahun sebelumnya yaitu meningkat 10,92%, walaupun belum bisa menangani seluruh penyandang masalah sosial yang ada di Kabupaten Belitung.

Di samping penanganan PMKS, pada tahun 2020 Kabupaten Belitung juga memberikan bantuan berdasarkan Standar Pelayanan Minimal sebagai kewajiban Pemerintah Daerah untuk melaksanakan



kewajiban penyediaan pelayanan dasar. Berikut data jumlah PMKS yang mendapatkan bantuan dan persentase pencapaian SPM pada akhir tahun 2020.

Tabel 2.60
Data Jumlah PMKS seluruhnya dan jumlah PMKS yang dibantu berdasarkan jenis PMKS, tahun 2020

NO	JENIS PMKS	Jumlah PMKS dalam 1 Tahun yang seharusnya memperoleh bantuan sosial (Orang)	Jumlah PMKS yang memperoleh bantuan sosial dalam 1 Tahun (Orang)	Nilai SPM Pelayanan pada akhir Tahun pencapaian SPM (%)
1	Fakir Miskin, Lansia Terlantar, Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	11.463	11.463	100,00
2	Penyandang Disabilitas (PACA)	612	125	20,42
3	Lansia Terlantar	1.163	1.121	96,39
4	Anak Balita Terlantar	0	0	-
5	Anak Terlantar	244	129	31,96
6	Anak yang berhadapan dengan Hukum	20	20	100,00
7	Anak Jalanan	0	0	-
8	Anak dengan Disabilitas	43	10	23,26
9	Anak yang menjadi korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah	9	9	100,00
10	Anak yang membutuhkan perlindungan khusus (APK) / Kebutuhan Khusus	6	6	100,00
11	Tuna Susila	0	0	-
12	Gelandangan	0	0	-
13	Pengemis	0	0	-
14	Pemulung	0	0	-
15	Kelompok Minoritas	0	0	-
16	Bekas Warga Binaan Pemasyarakatan	n/a	n/a	-
17	Orang dengan HIV/AIDS	16	16	100,00
18	Korban Penyalahgunaan NAPZA	4	4	100,00
19	Korban Trafficking	0	0	-
20	Korban Tindak Kekerasan	28	28	100,00
21	Pekerja Migran Bermasalah Sosial	18	18	100,00
22	Korban Bencana Alam	20	20	100,00
23	Korban Bencana Sosial	12	12	100,00
24	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis	0	0	-
25	Komunitas Adat Terpencil	0	0	-
26	dan Lain-lain	0	0	-
Jumlah		13.619	12.908	94,78

Sumber Data : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial Kabupaten Belitung, 2021

Untuk menyediakan pelayanan dasar bagi PMKS terutama fakir miskin, maka Kabupaten Belitung menyediakan sarana dan prasarana sosial, yaitu panti sosial. Panti sosial mempunyai tugas memberikan bimbingan dan pelayanan bagi anak yatim, piatu, dan yatim yang kurang mampu, terlantar agar potensi dan

kapasitas belajarnya pulih kembali dan dapat berkembang secara wajar. Sarana sosial di Kabupaten Belitung terbagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu Panti Asuhan dan Panti Lansia dengan data sebagai berikut:

Tabel 2.61
Jumlah Sarana Sosial Kabupaten Belitung Tahun 2016 – 2020

NO	SARANA SOSIAL	TAHUN				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Panti Asuhan (Unit)	3	3	3	3	3
2	Panti Lansia (Unit)	1	1	1	1	1
3	Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA)/ Taman Anak Sejahtera (TAS)	2	2	2	2	2
Jumlah		6	6	6	6	6

Sumber data: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial Kabupaten Belitung, 2021

Data tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah sarana panti sosial selama 5 (lima) tahun terakhir tetap tanpa ada penambahan dan pengurangan jumlah sarana dan prasarana panti. Walaupun tanpa penambahan sarana dan prasarana panti di Kabupaten Belitung tetap menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan sosial yang baik sehingga dapat memenuhi kebutuhan penanganan penyandang masalah sosial.

Tabel 2.62
Realisasi Keuangan Program penunjang Sasaran Meningkatnya daya beli masyarakat

NO	PROGRAM	PAGU ANGGARAN (RP)	REALISASI ANGGARAN (RP)	%
1.	Peningkatan Kesempatan Kerja	659.395.000	562.974.300	85,38
2.	Pelayanan Pendidikan Masyarakat miskin/ tidak mampu	3.714.135.000	3.592.161.262	96,72
3.	Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	1.463.516.460	1.228.550.161	83,95
4.	Penanganan dan Pemberdayaan fakir miskin	463.300.300	272.810.165	58,88
5.	Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	780.047.000	649.815.350	83,30
6.	Penyelamatan Evakuasi Korban Bencana	16.418.757.200	10.958.298.100	66,74

Sehingga untuk sasaran Meningkatnya daya beli masyarakat dengan rata-rata capaian 100,43% dengan persentase realisasi anggaran 73,47% maka terdapat efektifitas dan efisiensi 26,53%.

Pencapaian kinerja indikator Meningkatnya daya beli masyarakat pada tahun 2020 merupakan dampak positif dari faktor-faktor yang mendukung upaya pencapaian kinerja tersebut. Faktor-faktor pendukung pencapaian kinerja antara lain:

- ❖ Komitmen pimpinan yang kuat dan konsisten di bidang di bidang peningkatan kesempatan kerja yang dengan melakukan Sinergitas Program Pelatihan di era New Normal yang melibatkan Balai Latihan Kerja Belitung untuk peningkatan ekonomi masyarakat Belitung bersama dengan Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Tenaga Kerja Belitung dan juga Dinas Perikanan. BLK Belitung pada tahun 2020 telah melakukan Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK) Tahap I sampai dengan tahap IV yang dimulai pada awal Maret 2020 dengan berbagai program pelatihan antara lain: Program Barista, Tourguide, Front Office Receptionis office adm, assistant pemandu selam, pengolahan ikan,



Brand coffee binaan BLK Belitung "SIK-OK NAME" resmi diluncurkan. Acara peluncuran brand ini dihadiri langsung oleh Bupati Belitung dan Direktur Jenderal Binalattas Kemnaker RI.



pengolahan buah, pembuatan roti dan kue, room attendant yang masing-masing program bisa menampung 16 orang peserta pada setiap sesi pelatihan.

- ❖ Penetapan Kabupaten Belitung sebagai salah satu Kawasan Ekonomi Khusus sehingga dapat mengundang investor untuk berinvestasi di Kabupaten Belitung di sektor pariwisata dan menyerap tenaga kerja;
- ❖ Berkembangnya industri pariwisata yang mampu menyerap tenaga kerja;
- ❖ Adanya kewajiban pemerintah daerah untuk menyelenggarakan Standar Pelayanan Minimal bidang sosial.

Namun demikian tetap saja muncul faktor-faktor penghambat capaian kinerja, seperti berikut ini:

- ✘ Tingginya tingkat inflasi di Kabupaten Belitung;
- ✘ Terbatasnya ketersediaan lapangan pekerjaan akibat pandemi covid 19 ini berpengaruh kepada peningkatan angka pengangguran terbuka;
- ✘ Kurang terlatihnya Angkatan Kerja;
- ✘ Masih banyaknya PMKS;
- ✘ Terbatasnya sarana sosial;
- ✘ Pandemi Covid 19 yang terjadi sejak tahun 2020 mempengaruhi kinerja pencapaian program dan kegiatan yang telah direncanakan.

Untuk mengatasi hal tersebut perlu strategi dan kebijakan sebagai pemecahan atas faktor penghambat pencapaian kinerja, antara lain:

- ⌘ Upaya untuk menekan angka laju inflasi dengan terus memonitor persediaan barang kebutuhan pokok terutama pada bulan-bulan tertentu sehingga kestabilan harga di daerah terjaga;
- ⌘ Perluasan kesempatan kerja dengan fokus pada sektor andalan yang memiliki potensi pengembangan tinggi seperti pariwisata;
- ⌘ Meningkatkan kompetensi dan ketrampilan pencari kerja khususnya di bidang pariwisata;
- ⌘ Meningkatkan koordinasi dengan pihak swasta dalam rangka membuka peluang kesempatan kerja dan peningkatan kompetensi Angkatan Kerja;
- ⌘ Kebijakan memenuhi jaminan kebutuhan pelayanan dasar masyarakat miskin untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin;
- ⌘ Meningkatkan penyediaan sarana sosial.

SASARAN 4 : Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan

Capaian kinerja sasaran "Meningkatnya Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan" diukur melalui indikator Status Desa Maju. Untuk melihat capaian kinerja indikator sasaran tergambar pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.63
Capaian Kinerja Sasaran Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan

No	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	2020	Kategori	Akhir RPJMD 2023
----	-------------------	--------	--------------	------	----------	------------------



			RPJMD 2018	Target	Realisasi	Capaian (%)		Target
1	Status Desa “Maju”	Desa	10	20	23	115	SB	35

Capaian kinerja sasaran Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan melalui indikator Status Desa “Maju” telah melampaui target, dari target 20 (dua puluh) desa terealisasi sebanyak 23 (dua puluh tiga) Desa Maju atau sebesar 115%. Sedangkan untuk target akhir RPJMD perlu peningkatan sekitar 65,71% atau perlu kerja keras untuk mewujudkan 35 Desa Maju.

Penetapan status Desa Maju ini berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun. Indeks Desa Membangun di Kabupaten Belitung pada tahun 2016 dan 2020 sebagai berikut:

Tabel 2.64
Indeks Desa Membangun di Kabupaten Belitung Tahun 2016 – 2020

Status IDM Tahun	Tanjungpandan				Membalong				Selat Nasik				Sijuk				Badau								
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020					
Sangat Tertinggal	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0
Tertinggal	1	0	0	0	5	1	1	0	0	3	0	0	0	0	5	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0
Berkebang	6	6	6	4	3	6	10	1	0	7	6	1	4	4	3	3	4	5	5	3	2	1	6	6	5
Maju	2	3	3	5	6	0	1	1	5	6	0	0	0	0	1	1	0	5	5	7	8	0	1	1	2
Mandiri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sumber : Dinas PPKBPMD Kabupaten Belitung 2021

Selama kurun waktu 2016 – 2020, pemberdayaan masyarakat dan desa di Kabupaten Belitung mengalami peningkatan. Ini terlihat dari tabel di atas di mana pada tahun 2016 terdapat 3 (tiga) desa sangat tertinggal dan 19 (sembilan belas) desa tertinggal. Pada tahun 2017 tidak ada lagi desa sangat tertinggal di Kabupaten Belitung dan tinggal 1 (satu) desa tertinggal, yaitu di Kecamatan Membalong. Namun demikian, hingga tahun 2020, dari 47 desa, belum satu pun yang berhasil mencapai status desa mandiri, namun 23 (dua puluh tiga) desa telah berhasil menyandang status Desa Maju. Untuk mencapai status desa mandiri harus memenuhi kriteria yang sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun yang digunakan sebagai indikator capaian sasaran pembangunan desa dan status kemandirian desa.

Adapun 23 (Dua puluh tiga) nama Desa Berstatus “Maju” Tahun 2020 dari 5 Kecamatan di Kabupaten Belitung adalah sebagai berikut:

Tabel 2.65
Rekapitulasi Indeks Desa Membangun (IDM) Tahun 2020 Kabupaten Belitung

NAMA KECAMATAN	NAMA DESA	IKS 2020	IKE 2020	IKL 2020	NILAI IDM 2020	STATUS IDM 2020
Tanjungpandan	Buluh Tumbang	0.834	0.834	0.667	0.723	MAJU
Tanjungpandan	Air Saga	0.834	0.683	0.667	0.728	MAJU



Tanjungpandan	Air Merbau	0.811	0.717	0.667	0.732	MAJU
Tanjungpandan	Aik Ketekok	0.828	0,650	0.667	0.715	MAJU
Tanjungpandan	Aik Rayak	0.885	0.833	0.533	0.751	MAJU
Tanjungpandan	Perawas	0.851	0.617	0.667	0.712	MAJU
Sijuk	Sijuk	0.777	0.85	0.667	0.765	MAJU
Sijuk	Batu Itam	0.863	0.533	0.867	0.754	MAJU
Sijuk	Air Seruk	0.851	0.667	0.667	0.728	MAJU
Sijuk	Tanjung Binga	0.829	0.7	0.667	0.732	MAJU
Sijuk	Air Selumar	0.857	0.6167	0.667	0.714	MAJU
Sijuk	Sungai Padang	0.7657	0.5500	0.8667	0.7275	MAJU
Sijuk	Keciput	0.743	0.6167	0.867	0.742	MAJU
Sijuk	Terong	0.771	0.6333	0.800	0.735	MAJU
Membalong	Membalong	0.8743	0.8333	0.6667	0.7914	MAJU
Membalong	Simpang Rusa	0.8460	0.7000	0.6667	0.7375	MAJU
Membalong	Pulau Seliu	0.7771	0.7000	0.0867	0.7813	MAJU
Membalong	Gunung Rinting	0.7940	0.6833	0.6667	0.7148	MAJU
Membalong	Padang Kandis	0.7630	0.7170	0.8670	0.7887	MAJU
Membalong	Perpat	0.7833	0.7500	0.6667	0.7332	MAJU
Badau	Air Batu Buding	0.7886	0.7667	0.6667	0.7406	MAJU
Badau	Sungai Samak	0.8400	0.6166	0.6666	0.7078	MAJU
Selat Nasik	Suak Gual	0.731	0.583	0.867	0.7271	MAJU

Sumber : Dinas PPKBPMMD Kabupaten Belitung 2021

Untuk pencapaian sasaran meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan dilaksanakan melalui strategi meningkatkan partisipasi masyarakat dengan 2 (dua) arah kebijakan, yaitu meningkatkan pemberdayaan masyarakat berbasis komunitas dan gender, dan meningkatkan peran kelembagaan desa.

Strategi ini dijalankan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPPKBPMMD). Pada tahun 2020, untuk menjalankan strategi ini, DPPKBPMMD menyusun dan menjalankan program-program sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa.

Program ini dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan :

- (1) Pengelolaan Program PKK;
- (2) Gelar Teknologi Tepat Guna;
- (3) Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat
- (4) Pembinaan Pokjanel Posyandu;
- (5) Pembinaan Kelompok Pengelola Sistem Penyedia Air Minum dan Sanitasi (KP SPAMS);
- (6) Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat;
- (7) Penerapan Hasil TTG di Masyarakat;
- (8) Pembinaan BUMDes.



Kegiatan Pengelolaan Program PKK



Pelaksanaan Pelantikan Pengurus Lembaga Adat Melayu Kabupaten Belitung



Pelaksanaan Pilkades Serentak Th 2020



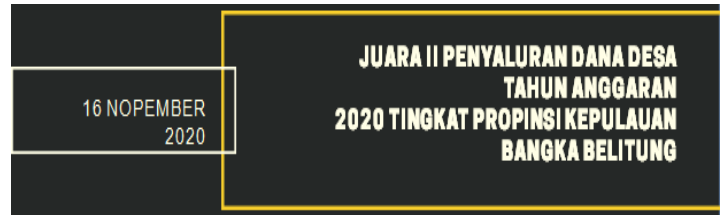
Kegiatan Pelantikan Kepala Desa Terpilih Th 2020

2. Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Program ini dilaksanakan melalui kegiatan Pilkades Serentak; Pelantikan Kepala Desa; Pembinaan Pemerintahan Desa; Pembinaan Administrasi dan Keuangan; dan Penyusunan Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

Peningkatan ini tak terlepas dari pembinaan Pemerintah Kabupaten Belitung dalam mengelola dan memanfaatkan dana desa. Melalui pembinaan yang dilakukan secara intensif, pemerintah desa dapat mengelola dan menggunakan dana desa tersebut untuk pembangunan masyarakat di desa melalui prioritas pembangunan desa, di mana dalam proses perencanaannya mengikutsertakan elemen masyarakat desa.

Penurunan Alokasi Dana Desa yang disalurkan Pemerintah Daerah ke Desa pada tahun 2020. Semula pada tahun 2019 alokasi tersebut sebesar Rp. 114.002.533.000,- kemudian pada tahun 2020 turun menjadi Rp. 107.946.061.000,- dan Alokasi Dana Desa menurun pada tahun 2019 sebesar 5.31% atau sebesar Rp. 6.056.472.000.- Hal ini sebagai tindak lanjut PMK Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam rangka penanganan Pandemi Corona Virus Disase 2019 (Covid 19) dan /atau menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional, akan tetapi hal tersebut tidak menghambat komitmen pemerintah Kabupaten Belitung dalam melakukan pembinaan terhadap pemerintah desa dan meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan. Peningkatan penyaluran Alokasi Dana Desa pada tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 2.66
PENYALURAN ALOKASI DANA DESA (ADD) TAHUN 2018-2020

Tahun	Alokasi Dana Desa (ADD)		Dasar Hukum	Ket
	Keuangan (Rp)	Dasar Hukum		
2018	52.326.327.000	42	Peraturan Bupati Belitung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penetapan Alokasi Dana Desa Dari Pemerintah Kabupaten Belitung Kepada Desa Tahun Anggaran 2018 Tanggal 23 Januari 2018	
	38.805.104.000	42	Peraturan Bupati Belitung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penetapan Besaran Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2018 Tanggal 23 Januari 2018	
	7.403.078.000	42	Peraturan Bupati Belitung Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penetapan Alokasi Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Belitung Kepada Desa Tahun Anggaran 2018	



	54.084.694.000	42	Peraturan Bupati Belitung Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Belitung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penetapan Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten Belitung Kepada Desa Tahun Anggaran 2018 Tanggal 15 Oktober 2018
	8.869.397.000	42	Peraturan Bupati Belitung Nomor 23 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Belitung Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penetapan Alokasi Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Belitung Kepada Desa Tahun Anggaran 2018 Tanggal 15 Oktober 2018
	46.568.028.000	42	Peraturan Bupati Belitung Nomor 31 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2019 Tanggal 28 Desember 2018
	58.261.098.000	42	Peraturan Bupati Belitung Nomor 32 Tahun 2018 tentang Penetapan Alokasi Dana Desa Dari Pemerintah Kabupaten Belitung Kepada Desa Tahun Anggaran 2019 Tanggal 28 Desember 2018
	7.758.529.000	42	Peraturan Bupati Belitung Nomor 33 Tahun 2018 tentang Penetapan Alokasi Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Belitung Kepada Desa Tahun Anggaran 2019 Tanggal 28 Desember 2018
2019	9.173.407.000	42	Peraturan Bupati Belitung Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Belitung Nomor 33 Tahun 2018 tentang Penetapan Alokasi Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Belitung Kepada Desa Tahun Anggaran 2019 Tanggal 27 September 2019
	48.034.247.000	42	Peraturan Bupati Belitung Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2020 Tanggal 26 Desember 2019
	56.432.736.000	42	Peraturan Bupati Belitung Nomor 41 Tahun 2019 Tentang Penetapan Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten Belitung Kepada Desa Tahun Anggaran 2020 Tanggal 26 Desember 2019
	9.041.961.000	42	Peraturan Bupati Belitung Nomor 42 Tahun 2019 Tentang Penetapan Alokasi Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Belitung Kepada Desa Tahun Anggaran 2020 Tanggal 26 Desember 2019
	47.580.353.000	42	Peraturan Bupati Belitung Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2020 Tanggal 4 Juni 2020 (Mencabut Peraturan Bupati Belitung Nomor 40 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2020)
2020	51.830.686.000	42	Peraturan Bupati Belitung Nomor 20 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Belitung Nomor 41 Tahun 2019 Tentang Penetapan Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten Belitung Kepada Desa Tahun Anggaran 2020 Tanggal 4 Juni 2020
2020	5.937.522.900	42	Peraturan Bupati Belitung Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Belitung Nomor 42 Tahun 2019 Tentang Penetapan Alokasi Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Belitung Kepada Desa Tahun Anggaran 2020 Tanggal 4 Juni 2020
	8.535.022.000	42	Peraturan Bupati Belitung Nomor 46 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Belitung Nomor 42 Tahun 2019 Tentang Penetapan Alokasi Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Belitung Kepada Desa Tahun Anggaran 2020 Tanggal 30 September 2020



50.127.737.000	42	Peraturan Bupati Belitung Nomor 61 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2021 Tanggal 29 Desember 2020
7.949.513.000	42	Peraturan Bupati Belitung Nomor 62 Tahun 2020 Tentang Penetapan Alokasi Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Belitung Kepada Desa Tahun Anggaran 2021 Tanggal 29 Desember 2020
51.972.873.000	42	Peraturan Bupati Belitung Nomor 63 Tahun 2020 Tentang Penetapan Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten Belitung Kepada Desa Tahun Anggaran 2021 Tanggal 29 Desember 2020

Di samping program yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Bupati dan Wakil Bupati pun meluncurkan program inovatif, yaitu Program KEMINANGAN (Kearifan lokal dan adat istiadat sebagai inspirasi pembangunan). Program ini ditujukan pada bagi tokoh masyarakat Belitung.



Lounging Program KEMINANGAN Th 2019

Program ini merupakan bentuk penghargaan Pemerintah Kabupaten Belitung kepada para tokoh-tokoh adat Belitung yang selalu aktif dan berperan konstruktif dalam proses pembangunan serta menjaga nilai-nilai kearifan local dalam bentuk insentif melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Selain insentif, Pemkab Belitung juga memberikan pakaian adat Belitung berupa baju kancing lima untuk 115 orang dukun kampung tersebut.

Pencapaian kinerja indikator Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan pada tahun 2020 merupakan dampak positif dari faktor-faktor yang mendukung upaya pencapaian kinerja tersebut. Faktor-faktor pendukung pencapaian kinerja antara lain:

- ❖ Komitmen pimpinan yang kuat dan konsisten di bidang kependudukan;
- ❖ Ketersediaan dana;
- ❖ Adanya Alokasi Dana Desa;
- ❖ Komitmen masyarakat desa yang ingin maju.

Namun demikian tetap saja muncul faktor-faktor Penghambat Capaian Kinerja, seperti berikut ini:

- ✘ Peraturan yang selalu berubah-ubah;
- ✘ Penyerapan dana lamban;
- ✘ Sumber daya manusia dan kapasitas aparatur yang ada kurang memadai;
- ✘ Pandemi Covid 19 yang terjadi tahun 2020 mempengaruhi kinerja pencapaian program dan kegiatan yang telah direncanakan.

Untuk mengatasi hal tersebut perlu strategi dan kebijakan sebagai pemecahan atas faktor penghambat pencapaian kinerja, antara lain:

- ⌘ Ketegasan dalam penetapan juknis maupun pedoman umum sebagai acuan pelaksanaan penyaluran dana desa;
- ⌘ Efektifitas kegiatan sehingga penyerapan anggaran dapat lebih maksimal;



- ⌘ Sinkronisasi dan koordinasi terkait dalam penggunaan dana desa;
- ⌘ Perlunya dukungan Pemerintah Kabupaten Belitung dalam hal meningkatkan keberdayaan masyarakat. Seperti pada tahun 2020 yang dilaksanakan melalui MoU dengan Lembaga Pendamping Desa (LPD) yang tertuang dalam MoU Nomor: 181/018/MoU/I/2020 tanggal 09 Desember 2020 untuk Bimbingan Teknis/ Workshop Bagi Organisasi Perangkat Daerah, Kepala Desa, Perangkat Desa dan memfasilitasi kegiatan pemerintahan daerah Kabupaten Belitung. Serta pelaksanakan melalui MoU dengan Lembaga Pengembangan Pelatihan Akuntansi Keuangan dan Pemerintah Daerah yang tertuang dalam MoU Nomor: 181/019/MoU/I/2020 tanggal 14 Desember 2020 untuk Bimbingan Teknis/ Workshop Bagi Organisasi Perangkat Daerah, Kepala Desa, Perangkat Desa dan Kelembagaan Desa di Kabupaten Belitung yang telah ditindak lanjuti dengan Perjanjian Kerjasama dengan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Belitung.

Tabel 2.67
Realisasi Keuangan program penunjang sasaran
meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan

No	Program	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%
1.	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	930.794.000,00	736.578.432,00	79,13
2.	Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa	881.758.200,00	657.102.585,00	74,52

Sehingga untuk sasaran Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan dengan rata-rata capaian 115% dengan persentase realisasi anggaran 76,89% maka terdapat efektifitas dan efisiensi 23,11%.

2.2.2 TUJUAN 2 : Terwujudnya Pelayanan Birokrasi yang Bersih, Inovatif, Profesional, Akuntabel dan Transparan

Capaian kinerja tujuan terwujudnya pelayanan birokrasi yang bersih, inovatif, profesional, akuntabel dan transparan diukur melalui pencapaian indikator Indeks Reformasi Birokrasi. Capaian kinerja tahun 2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.68
Capaian Kinerja Tujuan Terwujudnya Pelayanan Birokrasi
yang Bersih, Inovatif, Profesional, Akuntabel dan Transparan

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal 2018	2020			Kategori	Target Akhir RPJMD 2023
				Target	Realisasi	Capaian		
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Skala	--	B	N.A	-	-	BB

Capaian kinerja tujuan Terwujudnya Pelayanan Birokrasi yang Bersih, Inovatif, Profesional, Akuntabel dan Transparan melalui indikator Indeks Reformasi Birokrasi tahun 2020 belum tersedia data. Pada tahun 2019 Indeks Reformasi Birokrasi terealisasi dengan kategori "C" dengan nilai 40,20 atau dengan capaian sebesar 57,43%. Sedangkan untuk target akhir RPJMD perlu kerja keras untuk mewujudkan Indeks Reformasi Birokrasi dengan kategori "BB".



Nilai indeks pelaksanaan reformasi birokrasi di Kabupaten Belitung tahun 2019 oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) dengan hasil realisasi “C” dengan nilai 40,20, yang sebelumnya telah dilakukan evaluasi oleh Inspektorat Kabupaten Belitung dan Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung melalui Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi yang telah dikirimkan ke Kemenpan RB tepat waktu dan sesuai jadwal. Penilaian dilakukan pada komponen penilaian Pengungkit dan Komponen Penilaian Hasil.

Tabel 2.69
Hasil Penilaian Reformasi Birokrasi Kabupaten Belitung Tahun 2019

NO	Komponen Penilaian Pengungkit	Nilai Maks	Nilai 2019
1	Manajemen Perubahan	5,00	0,70
2	Penataan Peraturan Perundang-undangan	5,00	0,41
3	Penataan dan Penguatan Organisasi	6,00	0,38
4	Penataan Tatalaksana	5,00	1,09
5	Penataan Sistem Manajemen SDM	15,00	4,27
6	Penguatan Akuntabilitas	6,00	1,66
7	Penguatan Pengawasan	12,00	1,65
8	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	6,00	1,83
Total Komponen Pengungkit/ Proses Hasil		60,00	11,99
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja	14,00	7,04
2	Survei Internal Integritas Organisasi	6,00	4,27
3	Survei Eksternal Persepsi Korupsi	7,00	6,20
4	Opini BPK	3,00	2
5	Survei Eksternal Pelayanan Publik	10 ,00	8,70
Total Hasil		40,00	28,21
NILAI RB			40,20



Pemerintah Kabupaten Belitung telah melakukan berbagai upaya untuk kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungannya. Upaya tersebut telah menghasilkan berbagai kemajuan perbaikan tata kelola pemerintahan yang signifikan, seperti :

- Tim Reformasi Birokrasi telah terbentuk dan telah menghasilkan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Belitung 2019-2023 sebagai pedoman umum pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang tertuang dalam Peraturan Bupati Belitung Nomor 29 Tahun 2019 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2019-2023, beberapa Rencana Aksi sudah terimplementasi dengan baik.
- Telah tersedianya *Standard Operating Procedure* (SOP), pengembangan *e-government* dan penerapan kebijakan keterbukaan informasi publik dan didukung dengan peta proses bisnis yang selaras dengan kinerja organisasi dan perencanaan pengembangan e-gov yang akan mendukung percepatan birokrasi.
- Telah dilakukan identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis/ sinkron, tetapi revisi terhadap peraturan yang tidak harmonis tersebut belum berjalan dengan memadai.
- Telah memiliki rencana kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi dan proses penerimaan pegawai transparan, objektif, akuntabel dan bebas KKN serta telah mengimplementasikan kode etik namun penataan sistem manajemen SDM belum berjalan secara maksimal, belum adanya sistem perencanaan pengembangan kapasitas SDM yang terpadu dan belum adanya penetapan kinerja individu yang selaras dengan kinerja organisasi.
- Upaya peningkatan kualitas pelayanan telah dilakukan dengan melakukan inovasi-inovasi pelayanan dan mulai merintis pemanfaatan teknologi informasi dalam pemberian pelayanan serta implementasi standar pelayanan pada setiap unit organisasi.
- Telah memperkuat pengawasan dengan membentuk unit penanganan gratifikasi (UPG), menerapkan SPIP, pengelolaan pengaduan masyarakat, membangun *whistle-blowing system* dan penanganan benturan kepentingan.



Pemerintah Belitung terima Penghargaan IGA 2020 "Kabupaten Sangat Inovatif"

Pemerintah Belitung terima Penghargaan Gubernur Kep. Babel sebagai peringkat 7 dalam Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Perangkat Daerah terhadap LPPD Tahun 2018





Dalam rangka lebih meningkatkan kualitas birokrasi serta mampu lebih menumbuhkan budaya kinerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung, terdapat beberapa hal yang masih perlu disempurnakan yaitu:

- Mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung dengan membentuk *agent of change* dan *role model* yang ditetapkan secara formal serta memperluas penyebaran informasi pelaksanaan reformasi birokrasi keseluruhan unit dan pemangku kepentingan Pemerintah Kabupaten Belitung;
- Mengoptimalkan proses penyelesaian revisi atas peraturan Perundang-undangan yang tidak harmonis/tidak sinkron dan mengimplementasikan secara baik sistem pengendalian penyusunan peraturan perundangan yang baru sehingga produk peraturan Perundang-undangan harmonis;
- Menyelaraskan *Standard Operating Procedure* (SOP) yang dimiliki dengan peta proses bisnis organisasi dan mengimplementasikan pengembangan *e- government* yang terintegrasi sehingga proses birokrasi dapat efektif dan efisien;
- Melaksanakan *assessment* terhadap seluruh pegawai sebagai dasar untuk melaksanakan pengembangan pegawai berbasis kompetensi dan segera melakukan penilaian kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi;
- Meningkatkan keterlibatan pimpinan tingkat kabupaten maupun tingkat OPD dalam implementasi sistem AKIP untuk mempercepat peningkatan nilai akuntabilitas kinerja pemerintah Kabupaten Belitung;
- Meningkatkan kualitas implementasi kebijakan penanganan gratifikasi, SPIP, pengaduan masyarakat, *whistle blowing system* dan benturan kepentingan;
- Menindaklanjuti penganjuran Zona integritas dengan pembangunan unit kerja menuju wilayah bebas korupsi/wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBK/WBBM);
- Meningkatkan kualitas pelayanan dengan melakukan inovasi-inovasi pelayanan secara terus menerus dan berkelanjutan serta menindaklanjuti hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan.

Dalam RPJMD Kabupaten Belitung Tahun 2018 – 2023, upaya pencapaian Tujuan 2 “Meningkatkan pelayanan birokrasi yang bersih, inovatif, profesional, akuntabel dan transparan”, telah ditetapkan 3 (tiga) sasaran dengan 7 (tujuh) strategi sebagaimana terinci pada tabel berikut:

Tabel 2.70
Sasaran dan Strategi Pencapaian Tujuan 2

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
Tujuan 2 Meningkatkan pelayanan birokrasi yang bersih, inovatif, profesional, akuntabel dan transparan	Sasaran 5 Terciptanya birokrasi yang bersih, akuntabel dan transparan	8. Meningkatnya pengelolaan keuangan dan aset daerah 9. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah 10. Meningkatkan pengawasan kinerja pemerintah daerah
	Sasaran 6 Terciptanya birokrasi yang inovatif dan profesional	11. Meningkatnya kapasitas dan integritas aparatur
	Sasaran 7 Birokrasi yang mengedepankan pelayanan masyarakat yang berkualitas	12. Meningkatkan kualitas pelayanan publik

SASARAN 5 : Terciptanya Birokrasi yang Bersih, Transparan dan Akuntabel

Capaian kinerja sasaran “Terciptanya Birokrasi yang Bersih, Transparan dan Akuntabel” merupakan salah satu Indikator Kinerja Utama RPJMD Kabupaten Belitung tahun 2018 – 2023. Capaian kinerja tahun 2020, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.71
Capaian Kinerja Sasaran Terciptanya Birokrasi yang Bersih, Transparan dan Akuntabel

No	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal RPJMD 2018	Target	2020 Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Akhir RPJMD 2023 Target
1	Opini BPK	Skala	WDP	WTP	n/a	-	-	WTP
2	Nilai SAKIP Kabupaten Belitung	Skala	CC	B	n/a	-	-	BB

(*)Indikator sasaran Opini BPK masih menunggu hasil audit BPK

Pencapaian kinerja sasaran Terciptanya Birokrasi yang Bersih, Transparan dan Akuntabel melalui 2 (dua) indikator, yaitu Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah dengan target Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan nilai SAKIP Kabupaten Belitung dengan target B. Dari dua indikator tersebut, indikator Opini BPK belum dapat diukur dikarenakan masih menunggu hasil audit BPK dan indikator Nilai SAKIP Kabupaten Belitung juga belum dapat diukur dikarenakan masih menunggu hasil evaluasi dari Kementerian PAN dan RB Republik Indonesia.

Opini BPK

Opini Badan Pemeriksa Keuangan merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria, yakni: (1) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan; (2) kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*); (3) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; dan (4) efektivitas sistem pengendalian intern. Berikut opini BPK RI terhadap laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Belitung dan Nilai SAKIP Kabupaten Belitung Tahun 2020:

Tabel 2.72
Opini BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Belitung

TAHUN	OPINI BPK RI
2016	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
2017	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
2018	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
2019	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
2020	n/a*

(*) masih menunggu hasil audit BPK RI

Pencapaian kinerja sasaran 5 melalui 3 (tiga) strategi, yaitu: meningkatkan pengelolaan keuangan dan aset daerah, meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah dan meningkatkan pengawasan kinerja pemerintah daerah. Setiap strategi memiliki arah kebijakan masing-masing yang kemudian dijabarkan dalam bentuk program-program kegiatan dalam upaya pencapaian kinerja sasaran.

Ada 3 (tiga) arah kebijakan dari strategi meningkatkan pengelolaan keuangan dan aset daerah, yaitu: 1) Meningkatkan pengelolaan pendapatan asli daerah dengan memanfaatkan teknologi informasi; 2) Meningkatkan tata kelola aset dan pelaporan keuangan daerah dengan menggunakan teknologi informasi; dan 3) Menerapkan e-budgeting yang terintegrasi dengan perencanaan dan pelaporan keuangan daerah.

Pada tahun 2020, pelaksanaan arah kebijakan Meningkatkan pengelolaan pendapatan asli daerah dengan memanfaatkan teknologi informasi, yang merupakan tanggung jawab Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Belitung, melalui Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/kota.



Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan pelayanan publik yang berkualitas perlu adanya peningkatan pelayanan administrasi dan mekanisme kerja Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Belitung, maka aparatur dituntut untuk lebih memperbaiki pelayanan administrasi yang lebih baik lagi. Untuk mencapai sasaran tersebut Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Belitung ditunjang dengan peralatan dan perlengkapan penunjang administrasi perkantoran dengan beberapa kegiatan antara lain: Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah, Pendataan Wajib Pajak PBB P2, Penerbitan dan Penyampaian SPPT PBB P2, Monitoring Pajak Daerah, Sosialisasi Pajak Daerah, Pembinaan Pengelolaan Pendapatan Daerah. Diharapkan Pelayanan administrasi yang diberikan kepada wajib pajak dapat diproses dengan cepat, dengan mengacu standar pelayanan daerah.

Secara umum pencapaian kebijakan dari beberapa program di tahun 2020 menunjukkan hasil yang lumayan baik, hal ini terlihat dari Pendapatan Daerah pada tahun 2020 ditargetkan sebesar Rp. 970.146.286.359,00 dengan realisasi sebesar Rp. 957.021.589.492,11 atau kurang dari target yang ditetapkan yaitu sebesar 98,65%. Sumber dari Penerimaan Pendapatan Daerah pada tahun 2020 secara terperinci dapat dijabarkan pada tabel berikut:

Tabel. 2.73
Target dan Realisasi Penerimaan Daerah Tahun 2020

NO.	URAIAN	TAHUN ANGGARAN 2020 SETELAH PERUBAHAN		
		ANGGARAN	REALISASI	%
	Pendapatan	970.146.286.359,00	957.021.589.492,11	98,65
1	Pendapatan Asli Daerah	145.075.360.800,00	162.134.305.440,46	111,76
	Pendapatan Pajak Daerah	67.860.000.000,00	79.316.693.695,41	116,88
	Hasil Retribusi Daerah	7.234.307.500,00	7.399.450.727,00	102,28
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.000.000.000,00	3.928.156.865,21	98,20
	Lain lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	65.981.053.300,00	71.490.004.152,84	108,35
2	Dana Perimbangan	634.413.715.145,00	617.730.480.634,00	97,37
	Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak	44.713.931.551,00	41.443.900.249,00	92,69
	Dana Alokasi Umum	463.002.382.000,00	460.955.998.000,00	99,56
	Dana Alokasi Khusus	126.697.401.594,00	115.330.582.385,00	91,03
3	Lain lain pendapatan daerah yang sah	190.657.210.414,00	177.156.803.417,65	92,92
	Pendapatan Hibah	57.409.794.185,00	55.031.148.187,00	95,86
	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	55.600.000.000,00	45.273.388.864,65	81,43
	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	3.683.200.000,00	3.115.000.000,00	84,57
	Pendapatan Lainnya	73.964.216.229,00	73.737.266.366,00	99,69

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 2021

Kenaikan Penerimaan Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2020 yang telah melebihi target dari Pendapatan Asli Daerah adalah pajak daerah sebesar 116,88%, Retribusi Daerah sebesar 102,28% hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar 98,20% dan Lain-lain PAD yang sah sebesar 108,35%.

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung tahun 2019 ditargetkan sebesar Rp. 1,076,832,318,542.25 di mana realisasinya sebesar Rp 1,039,756,417,099.00 atau mencapai 103,57 %. Penerimaan pendapatan daerah tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 11,13% di mana ditargetkan pada Tahun 2020 sebesar Rp 970.146.286.359,00 dan realisasinya sebesar Rp. 957.021.589.492,11, secara terperinci dijabarkan pada tabel berikut :



Tabel. 2.74
Perbandingan Target dan Realisasi Penerimaan Daerah tahun 2018 s.d 2020

JENIS PENERIMAAN	TARGET			REALISASI		
	2018	2019	2020	2018	2019	2020
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	170,048,716,699.35	154,360,631,099.00	145.075.360.800,00	194,085,710,171.04	177,674,823,550.42	162.134.305.440,46
Pajak Daerah	78,669,200,000.00	81,926,766,250.00	67.860.000.000,00	95,624,761,932.30	99,416,983,398.32	79.316.693.695,41
Retribusi Daerah	9,153,199,004.00	9,328,627,000.00	7.234.307.500,00	8,719,218,510.84	9,876,491,944.25	7.399.450.727,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	4,000,000,000.00	4,000,000,000.00	4.000.000.000,00	4,115,011,274.05	4,269,120,158.11	3.928.156.865,21
Lain -Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	78,226,317,695.35	59,105,237,849.00	65.981.053.300,00	85,626,718,453.85	64,112,228,049.74	71.490.004.152,84
DANA PERIMBANGAN	681,691,415,000.00	725,392,918,000.00	634.413.715.145,00	689,269,042,160.00	729,579,423,933.00	617.730.480.634,00
Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil bukan Pajak	52,894,750,000.00	72,000,122,000.00	44.713.931.551,00	72,239,193,232.00	89,328,036,522.00	41.443.900.249,00
Dana Alokasi Umum	480,560,681,000.00	504,608,591,000.00	463.002.382.000,00	480,560,681,000.00	504,608,591,000.00	460.955.998.000,00
Dana Alokasi Khusus	148,235,984,000.00	148,784,205,000.00	126.697.401.594,00	136,469,167,928.00	135,642,796,411.00	115.330.582.385,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	83,333,922,000.00	160,002,868,000.00	190.657.210.414,00	82,019,517,375.75	169,578,071,058.83	177.156.803.417,65
Pendapatan Hibah	-	61,685,200,000.00	57.409.794.185,00	-	59,015,703,448.00	55.031.148.187,00
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	33,281,018,000.00	38,197,440,000.00	55.600.000.000,00	4,556,730,748.29	60,632,029,110.83	45.273.388.864,65
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	11,207,800,000.00	13,492,200,000.00	3.683.200.000,00	8,588,122,627.46	3,277,200,000.00	3.115.000.000,00
Pendapatan Lainnya	38,845,104,000.00	46,628,028,000.00	73.964.216.229,00	38,874,664,000.00	46,653,138,500.00	73.737.266.366,00
Jumlah	935,074,053,699.35	1,039,756,417,099.00	970.146.286.359,00	965,374,269,706.79	1,076,832,318,542.25	957.021.589.492,11

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 2021

Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, maka perlu adanya reformasi birokrasi. Permasalahan mengenai pengelolaan aset dan SDM pengelolanya perlu mendapat perhatian yang serius dari Pemerintah Kabupaten Belitung. Oleh karena itu perlu peningkatan kinerja lembaga pengelolaan keuangan daerah. Peningkatan pengelolaan keuangan dan aset daerah ini diarahkan pada peningkatan tata kelola aset, pelaporan keuangan dan peningkatan pendapatan asli daerah dengan menggunakan teknologi informasi. Selain itu dengan menerapkan *e-budgeting* yang terintegrasi dengan perencanaan dan pelaporan keuangan daerah.

Kinerja pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Belitung meningkat. Hal ini terlihat dari ketepatan waktu dalam penyusunan dokumen pengelolaan keuangan daerah, di mana pemerintah berusaha untuk menyusun dokumen keuangan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kinerja pengelolaan keuangan daerah yang masih harus dibenahi adalah berkenaan dengan penataan aset di perangkat daerah, terutama pengelolaan aset tanah bawah jalan yang masih belum memiliki sertifikat dan masalah penilaian bangunan gedung, yang merupakan salah satu penyebab belum didaptkannya opini BPK Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Namun pengelolaan keuangan yang sudah berbasis akrual merupakan hal pendukung dalam pelaksanaan keuangan daerah.

Nilai SAKIP Kabupaten Belitung

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan penerapan manajemen kinerja pada sektor publik yang sejalan dan konsisten. Penerapan reformasi birokrasi berorientasi pada pencapaian *outcomes* dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik.

Ada Dalam 5 komponen penilaian SAKIP. Pertama, perencanaan kinerja, terdiri dari renstra, rencana kinerja tahunan, dan penetapan kinerja dengan bobot 35. Kedua, pengukuran kinerja, yang meliputi pemenuhan pengukuran, kualitas pengukuran dan implementasi pengukuran dengan bobot 20. Ketiga, pelaporan kinerja, terdiri dari pemenuhan laporan, penyajian informasi kinerja, serta pemanfaatan informasi kinerja, diberi bobot 15. Keempat, evaluasi kinerja, terdiri dari pemenuhan evaluasi, kualitas evaluasi, dan pemanfaatan hasil evaluasi, diberi bobot 10. Kelima, pencapaian kinerja, bobotnya 20, terdiri dari kinerja yang dilaporkan (*output* dan *outcome*), dan kinerja lainnya. Nilai tertinggi dari evaluasi LAKIP adalah AA



(memuaskan), dengan skor 85 – 100, sedangkan A (SANGAT BERHASIL) skornya 75 -85, CC (cukup baik) dengan skor 50 – 65, C (agak kurang) dengan skor 30 – 50, dan nilai D (kurang) dengan skor 0 – 30.

Untuk melihat perkembangan capaian kinerja nilai SAKIP Kabupaten Belitung dari tahun 2018 – 2019 sebagai berikut:

Tabel 2.75
Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Belitung

KOMPONEN	BOBOT	2018	% kinerja komponen terhadap bobot	2019	% kinerja komponen terhadap bobot
Perencanaan Kinerja	35	17.62	50.34	18.83	53.8
Pengukuran Kinerja	20	11.24	56.2	11.00	55
Pelaporan Kinerja	15	9.32	62.13	7.88	52.53
Evaluasi Kinerja	10	5.34	53.4	4.53	45.3
Capaian Kinerja	20	6.75	33.75	9.90	49.5
Total	100	50.27		52.14	
Kategori		CC		CC	

Sumber : Bagian Organisasi Setda 2020

Nilai SAKIP Kabupaten Belitung pada tahun 2019 sebesar 52,14, dengan kategori CC (Cukup Baik). Dibandingkan dengan tahun 2018 yang mempunyai nilai 50,27 yang juga kategori CC, ada kenaikan sebesar 1,87 poin. Perlu dijelaskan bahwa penilaian pada tahun 2018 dilakukan pada 5 (lima) OPD yang dipilih, sementara penilaian tahun 2019 dilakukan pada 25 (dua puluh lima) OPD.

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa dari 5 komponen penilaian, ada 2 komponen yang mengalami peningkatan, yaitu perencanaan kinerja naik sebesar 1,21 poin dan capaian kinerja naik sebesar 3,15 poin. Sedangkan 3 komponen lainnya mengalami penurunan, yaitu; komponen pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi kinerja. Bahkan penurunan komponen pelaporan kinerja cukup besar, yaitu 1,44 poin.

Dari data di atas yang menjadi catatan penting adalah predikat akuntabilitas Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung dari hasil evaluasi atas penerapan SAKIP yang masih berada di kategori CC atau nilai dalam range 50 – 60. Ini dapat diartikan bahwa tingkat efisiensi penggunaan anggaran di Kabupaten Belitung masih rendah dan diindikasikan adanya potensi terjadinya inefisiensi. Inefisiensi ini dapat terjadi karena tujuan dan sasaran tidak berorientasi hasil, ukuran kinerja tidak jelas (tidak ada keterkaitan antara program dan kegiatan), kegiatan tidak sesuai dengan maksud kegiatan.

Kondisi ini tentunya kurang sejalan dengan upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung. Sementara dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, ada beberapa faktor yang harus diperhatikan, yakni Akuntabilitas, Transparansi, dan Pelayanan yang berkualitas. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, bahwa penyelenggara pemerintah harus memperhatikan azas umum penyelenggaraan negara, antara lain; (1) Azas Kepastian Hukum; (2) Azas Tertib Penyelenggaraan Negara; (3) Azas Kepentingan Umum; (4) Asas Keterbukaan; (5) Asas Proporsionalitas; (6) Asas Profesionalitas; dan (7) Asas Akuntabilitas.

Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, masih kurangnya kualitas pelayanan publik, serta akuntabilitas kinerja yang belum memuaskan, tercermin melalui Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Belitung masih berstatus WDP (Wajar Dengan Pengecualian) dan Nilai Laporan Akuntabilitas dengan kategori "CC" di Tahun 2019.



Pencapaian kinerja sasaran Nilai SAKIP Kabupaten Belitung dilaksanakan melalui strategi, yaitu: meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah dan meningkatkan pengawasan kinerja pemerintah daerah.

Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah yaitu: Ketersediaan dokumen perencanaan strategis yang baik dan berkualitas merupakan Capaian kinerja urusan perencanaan pembangunan di Kabupaten Belitung. Pada tahun 2019, RPJMD Kabupaten Belitung Untuk Periode 2018 – 2023 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah dengan Nomor 3 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Belitung tahun 2018 – 2023 RPJMD Kabupaten Belitung, merupakan Penjabaran dari Peraturan Daerah Kabupaten Belitung nomor 1 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah tahun 2005-2025.

Sebagai Penjabaran RPJMD Kabupaten Belitung tahun 2018 -2023 Pemerintah Kabupaten Belitung menuangkannya di dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang ditetapkan setiap tahunnya. Dalam melaksanakan RPJMD ke dalam RKPD tingkat konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD terus meningkat.

Adapun arah kebijakan dalam strategi ini adalah **Menerapkan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) untuk sisten informasi pembangunan daerah, sistem informasi keuangan daerah**, hal ini telah dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Belitung dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Belitung pada tahun 2020.

Beberapa program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah pada Tahun 2020 sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah antara lain program perencanaan pembangunan daerah, dengan upaya sinergitas perencanaan pembangunan pusat, provinsi dan kabupaten, pengendalian dan penyusunan RKPD, Penyusunan RKPD, pengelolaan aplikasi e-planning, penyusunan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Belitung, sosialisasi perencanaan pembangunan daerah dan pengendalian dan evaluasi program inovasi daerah.

Selanjutnya Pencapaian kinerja sasaran Nilai SAKIP Kabupaten Belitung dilaksanakan melalui strategi, yaitu meningkatkan pengawasan kinerja pemerintah daerah. Akuntabilitas kinerja pemerintah merupakan perwujudan kewajiban pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan visi dan misi pembangunan dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan pertanggungjawaban yang dilakukan secara periodik. Peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah ini diarahkan pada pembinaan, peringatan dini dan manajemen resiko penyelenggaraan pemerintahan daerah, meningkatkan kapabilitas Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah, serta penguatan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) sebagai upaya untuk meningkatkan nilai akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.

Upaya pencapaian kinerja sasaran Terciptanya birokrasi yang bersih, transparan dan akuntabel terus dilakukan dengan dukungan dari berbagai faktor. Faktor-faktor pendukung pencapaian kinerja antara lain:

- ❖ Komitmen Pimpinan untuk meraih Opini WTP dan meningkatkan nilai SAKIP;
- ❖ Perbup tentang Perkin sampai tingkat eselon IV;
- ❖ Penetapan Indikator Kinerja Individu.

Namun demikian dalam upaya pencapaian kinerja sasaran terdapat faktor penghambat pencapaian kinerja, yaitu:

- ✘ Pengelolaan keuangan dan aset daerah belum optimal, dikarenakan:
 - pengamanan aset, terutama aset tanah bawah jalan yang belum memiliki sertifikat, serta aset yang tidak diketahui keberadaanya;
 - pengelolaan dan penataan aset oleh perangkat daerah yang belum optimal;
 - belum terintegrasinya perencanaan dan penganggaran, serta belum optimalnya pengelolaan Pendapatan Asli Daerah.



- ✘ Belum selarasnya perencanaan pembangunan daerah, dikarenakan:
 - sistem perencanaan berbasis elektronik belum diterapkan;
 - perencanaan dan penganggaran belum terintegrasi.
- ✘ Belum optimalnya pengawasan kinerja pemerintah daerah, dikarenakan:
 - belum optimalnya pengawasan kinerja pemerintah daerah dipengaruhi oleh nilai akuntabilitas kinerja perangkat daerah yang belum optimal;
 - belum optimalnya pembinaan, peringatan dini dan manajemen resiko penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - belum optimalnya Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dan kapabilitas aparatur pengawasan intern pemerintah yang belum optimal.
- ✘ Kualitas dan profesionalitas SDM aparatur masih rendah, dikarenakan:
 - integritas dan kompetensi aparatur masih kurang, belum optimalnya pengelolaan sistem manajemen aparatur;
 - sistem manajemen pemerintahan yang belum terlaksana dengan baik.
- ✘ Belum optimalnya Pelayanan publik, dikarenakan:
 - kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan pelayanan publik masih belum optimal;
 - keterbukaan informasi publik yang masih kurang;
 - pelayanan publik yang masih kurang;
 - pelayanan administrasi pertanahan yang masih kurang;
 - terbatasnya ketersediaan lahan untuk pembangunan sarana dan prasarana publik;
 - pemanfaatan teknologi informasi yang terintegrasi untuk pelayanan kepada masyarakat belum optimal;
 - ketersediaan data dan informasi pembangunan yang masih kurang.
- ✘ Belum terdapat e-sakip sebagai monitoring dan evaluasi pelaksanaan SAKIP di Kabupaten Belitung, sehingga pengukuran secara berjenjang pada perangkat daerah belum optimal sehingga capaian atau perkembangan kinerja belum dapat diidentifikasi secara tepat dan cepat.;
- ✘ Pandemi Covid 19 yang terjadi sejak tahun 2020 mempengaruhi kinerja pencapaian program dan kegiatan yang telah direncanakan.

Tindak lanjut yang akan dilaksanakan di masa datang dalam upaya meningkatkan kinerja sasaran birokrasi yang bersih, transparan dan akuntabel di masa yang akan datang sebagai berikut :

- ⌘ Terus melakukan upaya penataan aset yang ada di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung;
- ⌘ Meningkatkan koordinasi dengan seluruh perangkat daerah terkait perencanaan, pengukuran kinerja, pencapaian kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja;
- ⌘ Membangun sistem teknologi informasi monitoring dan evaluasi pelaksanaan SAKIP di Kabupaten Belitung.

Tabel 2.76
Realisasi Keuangan Program penunjang Sasaran
Terciptanya Birokrasi yang Bersih , Transparan dan Akuntabel

NO	PROGRAM	PAGU ANGGARAN (RP)	REALISASI ANGGARAN (RP)	%
1.	Pengelolaan perencanaan keuangan daerah	460.442.000,00	378.361.850,00	82,17
2.	Pengelolaan penatausahaan keuangan daerah	11.250.000,00	11.247.500,00	99,98



3.	Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	161.742.500,00	98.050.500,00	60,62
4.	Peningkatan dan pengembangan pengelolaan barang milik daerah	1.225.835.000,00	549.079.600,00	44,79
5.	Peningkatan dan pengembangan pengelolaan pendapatan asli daerah (PAD)	1.303.081.400,00	729.002.150,00	55,94
6.	Pengelolaan dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah	160.000.000,00	63.856.596,00	39,91
7.	Perencanaan pembangunan daerah	500.748.412,00	291.311.507,00	58,18
8.	Perencanaan pembangunan ekonomi dan sumber daya alam	99.206.984,00	64.786.444,00	65,30
9.	Perencanaan pembangunan sosial, budaya dan pemerintahan	106.819.500,00	102.7748.528,00	96,19
10.	Perencanaan pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah	105.785.597,00	57.444.447,00	54,30
11.	Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	1.107.032.500,00	435.793.450,00	39,37
12.	Peningkatan akuntabilitas kinerja penyelenggara pemerintah daerah	78.610.000,00	65.759.500,00	83,65

Sehingga untuk Sasaran Terciptanya birokrasi yang bersih, transparan dan akuntabel masih menunggu hasil Audit dari BPK RI, dengan persentase realisasi anggaran 53,52% maka terdapat efektifitas dan efisiensi 46,48%.

SASARAN 6 : Terciptanya birokrasi yang inovatif dan profesional

Capaian kinerja sasaran "Terciptanya birokrasi yang inovatif dan profesional" merupakan salah indikator kinerja utama RPJMD dengan indikator Indeks Profesional ASN dengan target "77". Berikut realisasi dan capaian indikator sasaran Terciptanya birokrasi yang inovatif dan profesional Kabupaten Belitung Tahun 2020.

Tabel 2.77
Capaian Kinerja Sasaran Terciptanya birokrasi yang inovatif dan professional

No	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal RPJMD 2018	Target	2020 Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Akhir RPJMD 2023 Target
1	Indeks Profesional ASN	Skala	62	77	72,86	94,62	SB	81

Dapat dijelaskan bahwa capaian indikator sasaran Terciptanya Birokrasi yang Inovatif dan Profesional, yaitu Indeks Profesional ASN tahun 2020 sebesar 72,86 menurun dari tahun sebelumnya yang semula 75,96 atau turun 3,1. Artinya belum mencapai target yang ditetapkan pada tahun 2020 yaitu dengan capaian 94,62%.

Indeks Profesionalitas ASN merupakan instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif yang hasilnya digunakan untuk menilai dan mengevaluasi tingkat profesionalitas ASN. Adapun indikator profesionalitas ASN adalah pegawai akan semakin profesional apabila kompetensinya semakin tinggi, kinerjanya semakin baik, organisasinya semakin modern dan memiliki disiplin yang tinggi.

Indeks Profesionalitas ASN dikeluarkan dan ditetapkan oleh Badan Kepegawaian Negara selaku Pembina Kepegawaian Nasional. Hasil perhitungan yang dilakukan terhadap data setiap pegawai Pemerintah Kabupaten Belitung secara *online* diperoleh nilai sebesar 72,86 (Cukup/Sedang). Adapun unsur-unsur yang



dinilai yaitu Kualifikasi Pendidikan, Kompetensi (kediklatan), Kinerja dan Disiplin dengan kategori sebagai berikut:

- Nilai 91% - 100% : Sangat Tinggi
- Nilai 81% - 90% : Tinggi
- Nilai 71% - 80% : Cukup/Sedang
- Nilai 61% - 70% : Rendah
- Nilai < 60% : Sangat Rendah

Realisasi kinerja Indikator Indeks Profesionalitas ASN Pemerintah Kabupaten Belitung tahun 2020 berdasarkan perhitungan Badan Kepegawaian Negara adalah 72,86 (Tujuh puluh dua koma delapan puluh enam) dengan kategori Cukup/ Sedang. Nilai tiap komponen dapat dilihat sebagai berikut:

- ☞ Kualifikasi ASN (Nilai perolehan 12,18)
Kualifikasi dalam hal ini diukur dari tingkat pendidikan pegawai. Masih terdapat tingkat pendidikan pegawai yang belum memenuhi kualifikasi sesuai dengan jabatannya.
- ☞ Kompetensi ASN (Nilai perolehan 30,62)
Kompetensi dalam hal ini diukur dari pendidikan dan pelatihan. Masih terdapat pegawai yang belum memenuhi diklat dalam jabatan dan belum mencukupi 20 JP/tahun setiap pegawai sesuai amanat UU ASN.
- ☞ Kinerja ASN (Nilai perolehan 25,06%)
Kinerja dalam hal ini diukur dari penilaian dan ketepatan waktu penyusunan Penilaian Prestasi Kerja PNS. Dalam hal ini masih terdapat nilai pegawai dengan kategori dibawah BAIK dan penyusunan yang tidak tepat waktu.
- ☞ Disiplin ASN (Nilai perolehan 4,99%)
Disiplin dalam hal ini antara lain diukur dari data hukuman disiplin dan kepatuhan terhadap jam kerja.

Tabel 2.78
Indeks Profesional ASN Tahun 2019 s.d 2020

Tahun	Kualifikasi	Kompetensi	Kinerja	Disiplin	IP ASN
2019	12,25	33,65	25,07	4,99	75,96
2020	12,18	30,62	25,06	4,99	72,86

Nilai Indeks Profesionalitas ASN Kabupaten Belitung pada tahun 2020 sebesar 72,86 atau dengan kategori Cukup/Sedang, turun jika dibandingkan dengan tahun 2019 yang mempunyai nilai 75,96 dengan kategori Cukup/Sedang. Masih kurangnya integritas dan kompetensi profesional aparatur menjadi permasalahan yang harus mendapat perhatian dari pemerintah daerah. SDM aparatur merupakan pelaku pelayanan publik. SDM aparatur yang kurang profesional dapat berdampak buruk secara langsung terhadap kualitas pelayanan publik. Peningkatan kapasitas aparatur ini diarahkan pada optimalisasi kinerja pegawai berbasis teknologi, penataan manajemen sumber daya aparatur.

Pencapaian kinerja sasaran 6 melalui strategi Meningkatkan kapasitas dan integritas aparatur dengan 2 (dua) arah kebijakan yaitu Meningkatkan kinerja pegawai berbasis teknologi dan Penataan manajemen sumber daya aparatur.

Pada tahun 2020, pelaksanaan arah kebijakan meningkatkan kapasitas dan integritas aparatur, yang merupakan tanggung jawab Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Belitung, melalui Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dan Program pembinaan dan pengembangan aparatur.

Sejak tahun 2019 hingga sekarang Pemerintah Kabupaten Belitung telah menjalankan penggunaan aplikasi berbasis *web* sebagai upaya untuk mewujudkan kebijakan Meningkatkan kinerja pegawai berbasis



teknologi, yang dapat diakses oleh setiap pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung melalui alamat website <https://www.e-kinerja.belitungkab.go.id>.

Selanjutnya untuk peningkatan kompetensi Aparatur Sipil Negara diukur dengan menggunakan indikator persentase Aparatur Sipil Negara yang mendapatkan peningkatan kompetensi minimal 20 JP per tahun dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah ASN yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Minimal 20 JP}}{\text{Jumlah Kebutuhan Perencanaan Diklat Teknis/Fungsional Tiap OPD}} \times 100\%$$

Dengan Menggunakan rumus tersebut, realisasi indikator persentase ASN yang mendapatkan peningkatan kompetensi minimal 20 JP adalah 48,91 % dengan perhitungan Jumlah ASN yang mengikuti peningkatan kompetensi minimal 20 JP berjumlah 1.639 orang dibagi dengan jumlah kebutuhan perencanaan Diklat Teknis/Fungsional tiap OPD berjumlah 3.351 Orang.

Sasaran ini didukung dengan pelaksanaan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan indikator program antara lain persentase ASN yang mengikuti pendidikan formal, persentase sumber daya Aparatur Sipil Negara yang memenuhi kompetensi manajerial dan persentase Sumber daya Aparatur Sipil Negara yang memenuhi kompetensi Teknis dan Fungsional. Adapun target, realiasi dan capaian program tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. Realisasi kinerja program tahun 2020 untuk indikator persentase ASN yang mengikuti pendidikan formal adalah 74,11% yang diperoleh dengan membagi jumlah ASN yang mengikuti pendidikan formal sebanyak 63 orang (tugas belajar 28 orang dan izin belajar 35 orang) dan jumlah usulan peningkatan pendidikan formal sebanyak 85 orang dikalikan 100%.
2. Realisasi kinerja program tahun 2020 untuk indikator persentase sumber daya ASN yang memenuhi kompetensi manajerial adalah 52,7%. Dihitung dengan membagi Jumlah ASN yang mengikuti Diklatpim sebanyak 278 orang dan jumlah jabatan yang diisi sebanyak 528 jabatan dikalikan seratus persen.
3. Sedangkan realisasi kinerja program persentase sumber daya ASN yang memenuhi kompetensi teknis dan fungsional adalah 75,9%. Dihitung dengan membagi jumlah ASN yang mengikuti kompetensi teknis dan fungsional sebesar 782 orang dan jumlah usulan kebutuhan diklat teknis/ fungsional di setiap OPD sebanyak 1.030 Diklat dikalikan seratus persen

Untuk mewujudkan pencapaian program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur maka Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya manusia melaksanakan berbagai upaya melalui kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan peningkatan pendidikan aparatur, memberikan dampak kepada persentase ASN yang mengikuti pendidikan formal.
2. Kegiatan Diklat teknis/fungsional pegawai, sosialisasi peraturan kepegawaian dan bimbingan teknis kepegawaian, memberikan dampak kepada persentase sumber daya ASN yang memenuhi kompetensi teknis dan fungsional.
3. Kegiatan Diklat penjurangan pegawai, memberikan dampak kepada persentase sumber daya ASN yang memenuhi kompetenis manajerial.

Pada tahun 2020, pelaksanaan penilaian kinerja pegawai dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 2020. Hal ini dibuktikan dengan penandatanganan penilaian kinerja pegawai oleh pejabat penilai tepat pada tanggal tersebut. Ini yang dijadikan dasar perhitungan persentase penilaian kinerja ASN tepat waktu. Sedangkan persentase ASN yang mendapatkan layanan, perlindungan dan penghargaan dihitung berdasarkan jumlah ASN yang mendapatkan pelayanan, perlindungan dan penghargaan yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Belitung. Untuk pembinaan

dan pengembangan aparatur di tahun 2020 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Belitung berupaya untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Pembinaan Kinerja dan Disiplin Pegawai, memberikan dampak pada persentase penilaian kinerja ASN tepat waktu..
2. Kegiatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian, Event Olah Raga dan Seni ASN, Pembinaan Mental dan Spiritual Anggota ASN, Penyelenggaraan Bantuan Hukum dan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Profesi ASN, dan Pembinaan Korps Profesi ASN, memberikan dampak pada persentase ASN yang mendapatkan layanan, perlindungan dan penghargaan.
3. Kegiatan pelayanan administrasi kepegawaian ditahun 2020 melaksanakan pelayanan berupa :
 - a. Kenaikan pangkat Aparatur Sipil Negara, jumlah PNS yang dilayani sebanyak 421 pegawai;
 - b. Pengurusan administrasi pensiun ASN, jumlah PNS yang dilayani sebanyak 137 Pegawai;
 - c. Kenaikan gaji berkala, jumlah PNS yang dilayani sebanyak 1.435 Pegawai;
 - d. Mutasi Pegawai, terdiri dari mutasi pegawai antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung sebanyak 185 Pegawai, Mutasi pegawai ke OPD di luar lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung sebanyak 28 pegawai;
 - e. Pengurusan administrasi penerbitan keputusan penugasan PNS sebanyak 3 keputusan;
 - f. Pengurusan administrasi penerbitan keputusan peninjauan masa jabatan sebanyak 1 berkas;
 - g. Pengurusan administrasi usulan peningkatan pendidikan sebanyak 28 berkas;
 - h. Pengurusan administrasi penerbitan keputusan Masa Persiapan Pensiun sebanyak 4 keputusan.
4. Pada tahun 2020 juga dilaksanakan event olah raga dan seni ASN terealisasi dengan adanya pelaksanaan event olah raga seni dalam rangka HUT KORPRI yang dilaksanakan di Kabupaten Belitung.

Pemkab Belitung menerima Penghargaan dalam pelaksanaan seleksi CPNS Formasi Tahun 2019 dari Wilayah Kerja Kantor Regional VII Palembang

Penyelenggaraan kegiatan pembinaan korps profesi ASN dilaksanakan guna mendukung operasional Dewan Pengurus dan Sekretariat Korps Profesi ASN Kabupaten Belitung sehingga meningkatkan kelancaran tugas dan fungsinya.

Dalam hal arah kebijakan Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Aparatur dengan Indikator persentase penempatan ASN sesuai kompetensi dihitung dengan rumusan membagi jumlah ASN yang ditempatkan sesuai kompetensi (2.736 orang) dengan jumlah Total ASN (3.351 orang) dikalikan seratus persen sehingga menghasilkan realisasi 81,65%. Dengan rincian sebagai berikut:

1. Data 160 orang merupakan pemenuhan kebutuhan ASN Kabupaten Belitung dari jumlah kebutuhan ASN sebanyak 311 Orang dengan formasi CPNS yang diperoleh sebanyak 169 Orang sehingga masih terdapat 9 formasi CPNS tidak terisi;
2. Penilaian dan Pertimbangan Kenaikan Jabatan Sebanyak 121 Orang Terdiri dari perjabat eselon II sebanyak 6 Orang, eselon III sebanyak 21 Orang, eselon III sebanyak 21 orang, eselon IV sebanyak 35 orang, pengangkatan kepala sekolah sebanyak 1 orang, serta alih tugas kepala sekolah sebanyak 58 orang;
3. Pelantikan Jabatan dan Pengambilan Sumpah ASN sebanyak 281 Orang, terdiri dari pengambilan sumpah PNS sebanyak 260 orang, pelantikan dan pengambilan sumpah pejabat eselon II, III, dan IV sebanyak 62 orang, pelantikan dan pengambilan sumpah kepala sekolah sebanyak 59 orang;
4. Seleksi/promosi terbuka jabatan tertentu sebanyak 28 orang;
5. Penempatan jabatan fungsional tertentu sebanyak 1.902 orang;
6. Mutasi pegawai antar instransi sebanyak 28 orang;





7. Pelaksanaan alih tugas/alih jabatan pada OPD sebanyak 185 orang;
8. Peningkatan pendidikan PNS sebanyak 28 Orang.

Dalam mendukung realisasi sasaran meningkatnya penataan manajemen sistem manajemen sumber daya aparatur didukung dengan pelaksanaan program penataan manajemen sumber daya Aparatur dengan 2 (dua) indikator kinerja program terdiri dari :

1. Capaian kinerja program untuk indikator persentase pemenuhan ASN sesuai kebutuhan ditahun 2020 sebesar 54,34 % diperoleh dengan membagi jumlah formasi ASN sebanyak 169 Orang dengan Jumlah kebutuhan ASN sebanyak 311 orang dikalikan seratus persen;
2. Capaian kinerja program untuk indikator persentase kesesuaian pejabat dengan syarat jabatannya ditahun 2020 sebesar 100 % diperoleh dengan membagi jumlah pejabat yang sesuai dengan syarat jabatannya sebanyak 528 orang dengan jumlah total jabatan yang diisi sebanyak 528 orang dikalikan seratus persen.

Pandemi Covid 19 yang terjadi tahun 2020 mempengaruhi kinerja pencapaian program dan kegiatan yang telah direncanakan. Untuk meningkatkan kinerja pada setiap urusan yang menjadi kewenangan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Belitung, maka perlu dilakukan penajaman skala prioritas sasaran dan kegiatan yang akan dilaksanakan periode yang akan datang (perumusan indikator yang bersifat *outcome*).

Agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara optimal sesuai dengan target indikator kinerja yang telah ditetapkan, maka optimalisasi mekanisme manajemen internal organisasi di lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Belitung harus senantiasa ditingkatkan untuk secara pro aktif memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan berbagai kegiatan yang dilaksanakan.

Upaya koordinasi dan peningkatan kerjasama dengan berbagai instansi terkait baik di pusat maupun daerah agar dilakukan dengan lebih intensif, mengingat berbagai pencapaian target indikator yang telah ditetapkan tidak hanya dilakukan oleh internal organisasi perangkat daerah, melainkan juga terkait dengan pemerintah pusat (dalam hal ini Kementerian PAN dan RB serta Badan Kepegawaian Negara) dan juga pihak-pihak lainnya.

Tabel 2.79

Realisasi Keuangan Program penunjang Sasaran Terciptanya birokrasi yang inovatif dan professional

No	Program	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%
1.	Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	1.125.129.500,00	805.086.939,00	71,56
2.	Pembinaan dan pengembangan aparatur	519.970.000,00	448.497.360,00	86,25
3	Penataan Manajemen SDM Aparatur	721.987.020,00	558.625.573,00	77,37
4	Peningkatan kompetensi sumber daya aparatur perangkat daerah	2.005.931.735,00	771.971.058,00	38,48

Sehingga untuk sasaran Terciptanya birokrasi yang inovatif dan profesional dengan capaian 94,62% dengan persentase realisasi anggaran 59,09% maka terdapat efektifitas dan efisiensi 40,91%.

SASARAN 7 : Birokrasi yang Mengedepankan Pelayanan Masyarakat yang Berkualitas

Capaian kinerja sasaran “Birokrasi yang Mengedepankan Pelayanan Masyarakat yang Berkualitas” merupakan salah indikator kinerja utama RPJMD dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat dengan target “83”. Berikut realisasi dan capaian indikator sasaran Birokrasi yang Mengedepankan Pelayanan Masyarakat yang Berkualitas Kabupaten Belitung Tahun 2020.



Tabel 2.80
Capaian Kinerja Sasaran Birokrasi yang mengedepankan pelayanan masyarakat yang berkualitas

No	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target	2020		Kategori	Akhir RPJMD 2023 Target
			RPJMD 2018		Realisasi	Capaian (%)		
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Skala	76,81	83	84,80	102,117	SB	88

Realisasi kinerja indikator rata-rata indeks kepuasan masyarakat berdasarkan tabel di atas telah melampaui target sebesar 1,8%. Sedangkan untuk target akhir RPJMD memerlukan peningkatan 3,2%. Kondisi tersebut perlu usaha meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat sehingga nilai survei kepuasan masyarakat meningkat.

Berikut nilai rata-rata indeks kepuasan masyarakat Pemerintah Kabupaten Belitung dari Tahun 2015-2020 :

Tabel 2.81
Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Belitung Tahun 2017-2020

TAHUN	Nilai Rata-Rata Indeks Kepuasan Masyarakat
2017	81,67
2018	76,81
2019	82,54
2020	84,80

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kab Belitung 2020

Guna meningkatkan kualitas pelayanan publik Pemerintah Kabupaten Belitung melakukan survei kepuasan masyarakat yang mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Mekanisme survei dilakukan dengan menetapkan 48 Perangkat Daerah yang terdiri dari 20 Dinas, 6 Badan, 5 Kecamatan, 7 Kelurahan dan 10 Unit Pelayanan sebagai sampling serta jumlah responden pada seluruh pelayanan di sebar sebanyak 17.380 kuesioner dan didapat responden sebanyak 11.378 responden. Hal ini dikarenakan adanya pandemic COVID-19 sehingga ada beberapa pembatasan pelayanan kepada masyarakat terkait penerapan protokol kesehatan.

Dari hasil survei didapatkan kesimpulan secara menyeluruh bahwa terdapat 10 OPD/UPP yang memperoleh nilai diatas 88,31 (Sangat Baik), 36 OPD/UPP yang memperoleh nilai direntang 76,61-88,30 (Baik) dan ada 2 OPD/UPP yang memperoleh nilai direntang 65-76,60 (Kurang Baik). Nilai tertinggi diraih oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan Nilai 98,51 sedangkan yang rendah diraih oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan nilai 73,33.

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2020 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan IKM Tahun 2018 dengan nilai 76,81 dan Tahun 2019 dengan nilai 82,54.

Tabel 2.82
Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Per OPD Kabupaten Belitung Tahun 2015-2020

NO	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	IKM 2015	IKM 2016	IKM 2017	IKM 2018	IKM 2019	IKM 2020
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-	84.03	83,36	50,12	87.07	87.18
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	73.40	78.14	82,61	75,35	77.39	80.43
3	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Tenaga Kerja	-	-	79,66	82,86	81.85	82.82
4	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	77.90	83.69	78,49	79,49	82.51	82.48
5	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	84.38	89.47	84,38	85,17	85.75	86.05



6	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian	78.64	97.46	97,99	87,95	80.30	85.07
7	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	80.54	88.02	-	-	78.49	85.88
8	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	-	-	-	-	82.25	82.93
9	Dinas Kesehatan	-	-	-	-	84.65	85.01
10	Dinas Pariwisata	79.92	-	-	-	-	85.21
11	Dinas Perikanan	77.67	-	-	-	-	92.6
12	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	77.01	85.25	77,99	77,85	82.6	84.69
13	RSUD dr. H. Marsidi Judono	-	77.81	80,66	78,82	79.71	82.59
14	Kecamatan Tanjungpandan	-	87.58	80,95	84,03	81.47	83.99
15	Kecamatan Badau	69.76	79.70	76,20	70,95	90.41	90.14
16	Kecamatan Sijuk	-	78.37	83,03	91,37	83.82	87.32
17	Kecamatan Membalong	-	82.25	81,60	79,30	81.47	90.28
18	Kecamatan Selat Nasik	-	84.47	80,33	-	95.61	79.14
19	Kelurahan Kota	-	99.90	90,65	54,14	83.93	94.72
20	Kelurahan Parit	85.12	80.92	82,78	83,34	82.52	95.68
21	Kelurahan Kampong Damai	84.83	79.37	72,24	89,17	83.65	81.84
22	Kelurahan Paal Satu	-	83.25	82,31	86,06	81.21	85.34
23	Kelurahan Pangkal Lalang	78.80	73.37	83,96	81,15	82.02	86.76
24	Kelurahan Tanjung Pendam	83.54	87.91	86,64	85,45	83.91	80.48
25	Kelurahan Lesung Batang	-	85.25	87,26	88,69	79.79	86.9
26	Puskesmas Tanjungpandan	79.53	80.14	82,45	84,45	81.42	86.8
27	Puskesmas Air Saga	75.62	78.48	77,74	81,94	81.04	83.81
28	Puskesmas Perawas	76.43	84.69	81,33	77,73	83.18	84.46
29	Puskesmas Sijuk	-	80.03	76,98	76,88	77.24	81.47
30	Puskesmas Badau	-	86.03	80,22	83,31	82.94	86.56
31	Puskesmas Membalong	-	82.70	79,53	75,74	80.43	80.16
32	Puskesmas Selat Nasik	-	89.58	78,90	81,94	81.89	83.64
33	Puskesmas Tanjungbinga	-	71.82	75,93	74,37	79.01	88.75
34	Puskesmas Simpang Rusa	-	83.92	82,33	79,94	81.6	79.98
35	Sekretariat Daerah	-	-	-	-	-	90.09
36	Sekretariat DPRD	-	-	-	-	-	83.73
37	Inspektorat	-	-	-	-	-	88.43
38	Dinas Perhubungan	-	-	-	-	-	75.43
39	Dinas Komunikasi dan Informatika	-	-	-	-	-	81.59
40	Dinas Pemuda dan Olah Raga	-	-	-	-	-	76.55
41	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	-	-	-	-	-	80.89
42	Dinas Lingkungan Hidup	-	-	-	-	-	78.4
43	Satuan Polisi dan Pamong Praja	-	-	-	-	-	81.95
44	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	-	-	-	-	-	84.15
45	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	-	-	-	-	-	86.41
46	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-	-	-	-	-	89.89
47	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	-	-	-	-	98.51
48	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-	-	-	-	73.33
RATA – RATA			83.57	81,67	76,81	82.54	84,80

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kab. Belitung 2020



Pencapaian kinerja sasaran 7 melalui strategi meningkatkan kualitas pelayanan publik yaitu: 1) Meningkatkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan pelayanan publik; 2) Meningkatkan keterbukaan informasi publik; 3) Meningkatkan keamanan, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; 4) Meningkatkan pelayanan publik; 5) Meningkatkan pembinaan perencanaan dan pengelolaan keuangan desa. 6) Meningkatkan pelayanan administrasi pertanahan yang terintegrasi berbasis teknologi informasi; 7) Menyediakan lahan untuk pembangunan sarana dan prasarana publik; 8) Meningkatkan penggunaan teknologi informasi yang terintegrasi dalam pelayanan kepada masyarakat; 9) Meningkatkan ketersediaan data dan informasi pembangunan, 10.) Meningkatkan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa dan/atau kelurahan. 11). Meningkatkan peran CSR dalam pembangunan, 12) Meningkatkan pelayanan kemetrolagian dan perlindungan konsumen 13) Menjamin ketersediaan dan pemantauan barang kebutuhan pokok dan barang penting.

Pada tahun 2020, pelaksanaan arah kebijakan meningkatkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan pelayanan publik, yang merupakan tanggung jawab Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Kabupaten Belitung, melalui Program Penataan Kelembagaan, Penataan Peraturan Perundang-undangan dan Penataan Administrasi Kependudukan yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung.

Penataan kelembagaan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2019 hingga 2020 sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu sebanyak 1 (satu) Peraturan Daerah Kabupaten Belitung dan 11 (sebelas) Peraturan Bupati Belitung ditahun 2019 sedangkan 1 (satu) Peraturan Bupati Belitung tahun 2020, antara lain:

Tabel 2.83
Perda dan Perbup dalam Penataan Kelembagaan
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2019 s.d 2020

No	JENIS PERATURAN	NOMOR PERATURAN	TGL	TENTANG
1	PERDA KAB. BELITUNG	4 TAHUN 2019 LD No 4 Tahun 2019	16 Agustus 2019	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung No 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung
2	PERBUP BELITUNG	43 Tahun 2019 BD No 45 Tahun 2019	27 Desember 2019	Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung
3	PERBUP BELITUNG	44 Tahun 2019 BD No 46 Tahun 2019	27 Desember 2019	Perubahan Atas Peraturan Bupati Belitung Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Kedudukan susunan Organisasi, Tuga dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung
4	PERBUP BELITUNG	45 Tahun 2019 BD No 47 Tahun 2019	27 Desember 2019	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Seta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung
5	PERBUP BELITUNG	46 Tahun 2019 BD No 48 Tahun 2019	27 Desember 2019	Perubahan Atas Peraturan Bupati Belitung Nomor 40 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Tenaga Kerja Kabupaten Belitung
6	PERBUP BELITUNG	47 Tahun 2019 BD No 49 Tahun 2019	27 Desember 2019	Perubahan Atas Peraturan Bupati Belitung Nomor 51 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung
7	PERBUP BELITUNG	48 Tahun 2019 BD No 50 Tahun 2019	30 Desember 2019	Perubahan Atas Peraturan Bupati Belitung Nomor 52 Tahun 2016 Tentang



				Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung
8	PERBUP BELITUNG	49 Tahun 2019 BD No 51 Tahun 2019	30 Desember 2019	Kedudukan, Susunan Irganisasi, Tugas dan Fungsi Seta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Belitung
9	PERBUP BELITUNG	50 Tahun 2019 BD No 52 Tahun 2019	30 Desember 2019	Kedudukan, Susunan Irganisasi, Tugas dan Fungsi Seta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitung
10	PERBUP BELITUNG	51 Tahun 2019 BD No 53 Tahun 2019	30 Desember 2019	Kedudukan, Susunan Irganisasi, Tugas dan Fungsi Seta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Belitung
11	PERBUP BELITUNG	52 Tahun 2019 BD No 54 Tahun 2019	30 Desember 2019	Perubahan Atas Peraturan Bupati Belitung Nomor 93 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung
12	PERBUP BELITUNG	53 Tahun 2019 BD No 55 Tahun 2019	30 Desember 2019	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Tenaga Kerja Kabupten Belitung
13	PERBUP BELITUNG	3 Tahun 2020 BD No 3 Tahun 2020	02 Januari 2020	Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Staf Ahli

Sumber: Bagian Organisasi Setda Kab. Belitung 2021

Penataan Peraturan Perundang-undangan yang dilaksanakan oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2020 ditetapkan sejumlah 955 peraturan yang terdiri dari :

Peraturan Daerah Kabupaten Belitung berjumlah	: 6 peraturan
Peraturan Bupati Belitung berjumlah	: 68 peraturan
Keputusan Bupati Belitung berjumlah	: 831 peraturan

Selanjutnya untuk Penataan Administrasi Kependudukan yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Belitung. Tahun 2020 merupakan tahun kedua tahap pencapaian sehingga saat ini pencapaian indikator sasaran tersebut belum dapat terlihat perkembangannya. Kegiatan yang dilaksanakan adalah: Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan, Digitalisasi Dokumen Akta Pencatatan Sipil, Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan Kabupaten Belitung, Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu, Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA), Penyediaan Jasa Petugas Pelapor Kematian di RT. Penyediaan Jasa Petugas Registrasi Kependudukan Desa, Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan di Kabupaten Belitung Pengadaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Administrasi Kependudukan.

Pada Tahun 2020 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung terus berinovasi



Zoom Meeting Dukcapil Belitung Menyapa Masyarakat 2020

dalam pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan publik, terdapat 4 inovasi yang telah dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung sejak tahun 2016 sampai dengan 2020 antara lain: MATANG DI POHON (Melayani Pindah Datang yang dimohonkan di Tempat Tujuan) Program ini dilaksanakan sejak tahun 2018 dengan harapan Kepemilikan atas dokumen kependudukan bagi seluruh penduduk Kabupaten Belitung agar terhindar dari penduduk pendatang yang tidak terdapat/ tidak memiliki dokumen kependudukan, pada Tahun 2020 program ini telah melayani 108 orang untuk memiliki dokumen kependudukan. PADUKA RT (Pelaporan Duka



Ke Ketua RT) Program inovasi ini dilaksanakan sejak tahun 2016 hal ini bertujuan untuk terpenuhinya kepemilikan atas dokumen akta kematian sehingga laporan penduduk yang telah meninggal dapat terdata dengan baik, di tahun 2020 terdapat 120 orang telah mengurus dokumen akta kematian. Program PANTAS (Pelayanan Antar Prioritas) yang telah dilaksanakan sejak tahun 2019 bertujuan untuk terpenuhinya kepemilikan atas dokumen bagi seluruh masyarakat Kabupaten Belitung dimana pada tahun 2020 sebanyak 31 orang yang telah mengurus dokumen melalui program ini. BEKAWAN (Membuat KIA Lewat Online) yang dilaksanakan sejak Tahun 2019 menyisir Masyarakat untuk memiliki KIA bagi anak umur dibawah 17 tahun di Kabupaten Belitung dan sebanyak 317 orang terlayani untuk kepemilikan KIA melalui program ini. Berikut capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2020 dalam pencapaiannya melaksanakan tertib Administrasi Kependudukan.

Tabel 2.84
CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	INDIKATOR PROGRAM	RUMUSAN	TAHUN 2020	PERSENTASE CAKUPAN PENERBITAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN	TARGET TAHUN TERAKHIR RENSTRA
	Persentase capaian tertib administrasi kependudukan	$(1+2+3)/3$	$(82,65+93,41+100) / 3$	92,02%	94%
1	Persentase capaian pendaftaran penduduk			82,65%	86%
a	Persentase cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el)	Jumlah penerbitan KTP-el Jumlah penduduk wajib KTP-el yaitu usia >17 dan atau pernah/sudah menikah	125.731 126.990	99,01%	98%
b	Persentase cakupan penerbitan Kartu Keluarga (KK)	Jumlah KK yang diterbitkan	54.928	92,32%	100%
c	Persentase cakupan penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)	Jumlah Kepala Keluarga Jumlah KIA yang diterbitkan Jumlah penduduk usia < 17 tahun	59.498 26.939 47.577	56,62%	60%
2	Persentase capaian pencatatan sipil			93,41%	95%
a	Persentase cakupan penerbitan kutipan akta kelahiran	Jumlah penduduk memiliki akta kelahiran jumlah penduduk	119.021 177.472	67,06%	75%
b	Persentase cakupan penerbitan akta kematian	Jumlah penerbitan akta kematian Jumlah laporan kematian penduduk	1.001 1.001	100%	100%
c	Persentase cakupan penerbitan akta perkawinan	Jumlah penerbitan akta perkawinan Jumlah pelaporan perkawinan penduduk	77 77	100%	100%
	Persentase cakupan penerbitan akta perceraian	Jumlah penerbitan akta perceraian Jumlah pelaporan perceraian penduduk	10 10	100%	100%
e	Persentase cakupan akta pengesahan anak	Jumlah penerbitan akta pengesahan anak Jumlah pelaporan pengesahan anak	8 8	100%	100%
3	Persentase pemanfaatan data			100%	100%
a	Persentase	Jumlah OPD yang	3	100%	100%



pemanfaatan data	diberikan hak akses data kependudukan	
	Jumlah permohonan pemberian hak akses data kependudukan	3

1. Persentase capaian pendaftaran penduduk

- a. Persentase cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el)
Kinerja Tahun 2020 sebesar 99,01% melebihi target tahun terakhir Renstra sebesar 98%. Salah satu faktor yang menyebabkan keberhasilan cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el) adalah telah dicetaknya KTP-el untuk seluruh wajib KTP-el.
- b. Persentase cakupan penerbitan Kartu Keluarga (KK)
Kinerja Tahun 2020 sebesar 92% kurang dari target tahun terakhir Renstra sebesar 100%. Salah satu faktor yang menyebabkan kegagalan cakupan penerbitan Kartu Keluarga (KK) adalah belum semua KK tercetak yang disebabkan oleh kurangnya Sumber Daya Manusia di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- c. Persentase cakupan penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)
Kinerja Tahun 2020 sebesar 56,62% kurang dari target tahun terakhir Renstra sebesar 60%. Salah satu faktor yang menyebabkan kegagalan Persentase cakupan penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) adalah belum semua KIA tercetak yang disebabkan oleh kurangnya Sumber Daya Manusia di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

2. Persentase capaian pencatatan sipil

- a. Persentase cakupan penerbitan kutipan akta kelahiran
Kinerja Tahun 2020 sebesar 67,06% kurang dari target tahun terakhir Renstra sebesar 75%. Salah satu faktor yang menyebabkan kegagalan cakupan penerbitan kutipan akta kelahiran adalah adanya sebagian penduduk yang belum memahami pentingnya memiliki Akta Kelahiran. Solusi yang dilakukan adalah melaksanakan kegiatan sosialisasi tentang pentingnya Akta Kelahiran dan dilakukannya pelayanan keliling sebagai upaya jemput bola kepada penduduk yang mengurus dokumen pencatatan sipil.
- b. Persentase cakupan penerbitan akta kematian
Kinerja Tahun 2020 sebesar 100% sama dengan target tahun terakhir Renstra sebesar 100%. Salah satu faktor yang menyebabkan keberhasilan cakupan penerbitan kutipan akta kematian adalah adanya insentif yang diberikan kepada RT di Kabupaten Belitung yang telah melaporkan peristiwa kematian dan dilakukannya pelayanan keliling ke Desa se-Kabupaten Belitung.
- c. Persentase cakupan penerbitan akta perkawinan
Kinerja Tahun 2020 sebesar 100% sama dengan target tahun terakhir Renstra sebesar 100%. Salah satu faktor yang menyebabkan keberhasilan cakupan penerbitan kutipan akta perkawinan adalah adanya kegiatan pelayanan hari-hari tertentu khusus penerbitan akta perkawinan dan dilakukannya pelayanan keliling ke Desa se-Kabupaten Belitung.
- d. Persentase cakupan penerbitan akta perceraian
Kinerja Tahun 2020 sebesar 100% sama dengan target tahun terakhir Renstra sebesar 100%. Salah satu faktor yang menyebabkan keberhasilan cakupan penerbitan kutipan akta perceraian adalah kesadaran dalam pengajuan akta perceraian penduduk Non Muslim.
- e. Persentase cakupan akta pengesahan anak
Kinerja Tahun 2020 sebesar 100% sama dengan target tahun terakhir Renstra sebesar 100%. Salah satu faktor yang menyebabkan keberhasilan cakupan penerbitan kutipan akta pengesahan anak adalah adanya kegiatan pelayanan hari-hari tertentu khusus penerbitan akta pengesahan anak.

3. Persentase pemanfaatan data

- a. Persentase pemanfaatan data

Kinerja Tahun 2020 sebesar 100% sama dengan target tahun terakhir Renstra sebesar 100%. Salah satu faktor yang menyebabkan keberhasilan pemanfaatan data adalah tersedianya data kependudukan yang bisa diolah dengan cepat dan akurat, serta adanya perjanjian kerjasama dengan Organisasi Perangkat Daerah lainnya.

Hal lain yang mempengaruhi kualitas pelayanan publik adalah dengan melakukan pembenahan manajemen pelayanan publik. Sebagai upaya pengimplementasian Program BERUAH (Pembangunan dan Perbaikan Rumah Ibadah), yang sarannya meliputi rumah ibadah untuk semua agama, meningkatkan kualitas dan manajemen pelayanan publik dilakukan melalui keterbukaan informasi publik dengan penggunaan teknologi dan informasi dalam pelayanan kepada masyarakat. Memberikan keamanan, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan pelayanan publik. Sebanyak 16 Rumah ibadah memperoleh Bantuan Dana Hibah Program Beruah Pada Tahun Anggaran 2020 yang tersebar pada 4 Kecamatan di Kabupaten Belitang, antara lain:



Pemberian Bantuan untuk Rumah Ibadah dalam Program BERUAH Th 2020

Tabel 2.85
Rekapitulasi Program Beruah Tahun 2020

No	Nama Tempat Ibadah	Alamat	Kecamatan
1	Masjid Al Mutaqin	Jl. Akil Ali Lingkungan Gunung Payung Kel. Pangkallalang	Tanjungpandan
2	Masjid As'Sajadah	Dusun Buluhtumbang Desa Buluh Tumbang	Tanjungpandan
3	Surau Hijratul Qalbiah	Jl. Dr. Susilo Timur Rt.003 Rw.04 Kelurahan Paal Stu	Tanjungpandan
4	Surau Nurul Iman	Jl. Tebat Permai Rt. 08 Rw. 04 Desa Air Saga	Tanjungpandan
5	Masjid As Sajadah	Dusun Pelepak Puteh Desa Pelepak Puteh	Sijuk
6	Masjid Baiturrahman	Dusun Air Kesembung Desa Air Saga	Tanjungpandan
7	Masjid Al Hasan	Dusun Mekar Jaya Desa Tanjong Tinggi	Sijuk
8	Masjid As Sujud	Dusun Cerucuk Desa Cerucuk	Badau
9	Masjid Jamiek Hidayatullah	Kelurahan Parit	Tanjungpandan
10	Masjid Al-Ijtihad	Jl. KH. Ahmad Dahlan RT.21 RW.07 Dusun Aik Rayak Barat IV Desa Air Raya	Tanjungpandan
11	Vihara Damai Maitreya	Jl. Pilang Desa Dukong	Tanjungpandan
12	Gereja Khatolik Regina Pacis	Jl. Depati Gegedek No. 56	Tanjungpandan
13	Masjid Al-Mikhrob	Jl. Anwar Bukit Marakas Indah Kel. Lesong Batang	Tanjungpandan
14	Yayasan Masjid Baitul Ma'mur	Jl. AMD Rt.13/05 Desa Air Seruk	Sijuk
15	Masjid Nurul Hidayah	Dusun Air Nangka Desa Simpang Rusa	Membalong
16	Masjid Miftahul Jannah	Aik Ranggong	Tanjungpandan

Selanjutnya meningkatkan kualitas dan manajemen pelayanan publik dilakukan melalui keterbukaan informasi publik dengan penggunaan teknologi dan informasi dalam pelayanan kepada masyarakat.



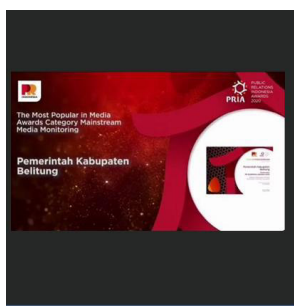
Memberikan keamanan, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan pelayanan publik. Selain itu perlu meningkatkan ketersediaan data dan informasi pembangunan (Belitung Satu Data), Kabupaten Belitung melalui Dinas Komunikasi dan Informatika terus berupaya membangun portal Belitung Satu Data pada tahun 2020. Pemanfaatan data diukur dengan membandingkan

jumlah data yang tersedia. Tahun 2020 ada 26 jenis data yang tersedia melalui portal Belitung Satu Data dan seluruh data tersebut telah termanfaatkan seluruhnya. Adapun jenis data yang tersedia adalah sebagai berikut:

Tabel 2.86
Daftar Pemanfaatan Data Portal Belitung Satu Data Tahun 2020

No	Jenis Data	Produsen Data
1	Data Jumlah Desa Wisata	Dinas Pariwisata
2	Data Jumlah Hotel Dan Penginapan	
3	Data Jumlah Daerah Tujuan Wisata	
4	Data Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara dan Mancanegara	
5	Data Rekapitulasi Sewa Rental Moda Transportasi Wisata	
6	Data Jumlah Usaha Makanan dan Minuman	
7	Data Event Mice dan Jumlah Wisatawan MICE	
8	Data Jumlah Produksi Tehur Hewan Ternak Menurut Kecamatan	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian
9	Data Jumlah Pertambahan Mesin Pertanian Menurut Kecamatan	
10	Data Jumlah Populasi Hewan Ternak Menurut Kecamatan	
11	Data Luas Lahan Pertanian Per Kecamatan	
12	Luas Tanam dan Produksi Tanaman Perkebunan Rakyat Lada	
13	Luas Tanam dan Produksi Tanaman Perkebunan Rakyat Karet	Dinas Kesehatan
14	Data Jumlah Puskesmas Per Kecamatan	
15	Data Jumlah Fasilitas Kesehatan	
16	Data Jumlah 10 Kasus Penyakit Terbanyak	
17	Data Jumlah Tenaga Kesehatan Menurut Kecamatan	
18	Data Jumlah SDM Kesehatan Per Kecamatan	
19	Data Jumlah Kasus Penyakit dan Jenis Penyakit Menurut Kecamatan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
20	Data Jumlah Peserta Pendidikan Anak Usia Dini	
21	Data Jumlah Peserta Pendidikan Sekolah Dasar-MI	
22	Data Jumlah Peserta Pendidikan SMP-MTs	
23	Data Administrasi Penduduk Perkecamatan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
24	Data Trend Jumlah Penduduk Per Kecamatan	
25	Data Jumlah Koperasi Perkecamatan	Dinas KUKMPTK
26	Data Jumlah KUKM Perkecamatan	

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung 2021



PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG MERAHAI PENGHARGAAN PUBLIC RELATION INDONESIA AWARD 2020 PENGHARGAAN INI DITERIMA BUPATI BELITUNG, H SAHANI SALEH S SOS TANGGAL 20 APRIL 2020 DI JAKARTA



Terintegrasinya sistem informasi mengalami peningkatan, komponen ini diukur dari perbandingan antara Jumlah sistem informasi yang terintegrasi sebanyak 29 sistem dengan Jumlah sistem informasi yang harus



terintegrasi sesuai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang ada sebanyak 32 sistem.

Tabel 2.87
Daftar Aplikasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2020

NO	APLIKASI	SUB DOMAIN	STATUS	INTEGRASI	KET
I LAYANAN PUBLIK					
1	Layanan Cloud Kabupaten Belitung	https://cloud.belitungkab.go.id/	1	1	Diskominfo
2	Portal Aplikasi Kabupaten Belitung	https://www.aplikasi.belitungkab.go.id/	1	1	Diskominfo
3	Media Center Kabupaten Belitung	https://mediacenter.belitungkab.go.id/	1	1	Diskominfo
4	Sistem Informasi Pelayanan Masyarakat	https://sipmas.belitungkab.go.id/	1	1	Diskominfo
5	Kelompok Informasi Masyarakat	https://kim.belitungkab.go.id/	1	1	Diskominfo
6	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	https://ppid.belitungkab.go.id/	1	0	Diskominfo
7	Layanan pendaftaran online RSUD Kabupaten Belitung	http://pendaftaranpasien.belitungkab.go.id/	1	1	RSUD dr. H. Marsidi Judono
8	Sistem Manajemen Dokumen Akreditasi	http://sismadak.belitungkab.go.id/	1	1	RSUD dr. H. Marsidi Judono
9	Sistem Pemantauan Kualitas Air Online	http://siabel.belitungkab.go.id/	1	1	Dinas Lingkungan Hidup
10	Perijinan Terpadu Satu Pintu	https://perizinan.belitungkab.go.id/	1	1	DPMPTSP
11	Sistem Pelayanan Administrasi Kependudukan	https://besilak.belitungkab.go.id/	1	1	Disdukcapil
12	Sistem Informasi Bantuan Sosial	https://sibansos.belitungkab.go.id/	1	1	Diskominfo
II ADMINISTRASI DAN MANAJEMEN UMUM					
1	Belitung Satu Data	https://data.belitung.go.id/	1	1	Diskominfo
2	Whistle Blowing System	http://wbs.belitungkab.go.id/	1	1	Inspektorat
3	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Belitung	http://flaj.belitung.go.id/	1	1	Dishub
4	e-office Kabupaten Belitung	https://eoffice.belitung.go.id	1	0	Diskominfo
5	Sistem Pengadaan Barang Jasa Secara Elektronik	http://lpse.belitungkab.go.id/eproc4	1	1	LPSE
6	Sistem Informasi Pelaporan Kegiatan	http://sipk.belitungkab.go.id/v3/	1	1	Bagian Adm Pembangunan
III ADMINISTRASI LEGISLASI					
1	JDIH Kabupaten Belitung	http://flaj.belitung.go.id/	1	1	Bagian Hukum
2	JDIH DPRD Kabupaten Belitung	http://jdih.dprd.belitung.go.id/	1	0	Setwan
IV MANAJEMEN PEMBANGUNAN					
1	e-Planning	https://simcan.belitungkab.go.id/	1	1	Bappeda
V SISTEM INFORMASI KEUANGAN DAERAH					
1	Simda BMD	Sistem Informasi Aset dan Barang Daerah	1	1	BPKAD
2	Simda Keuangan	Sistem Informasi Keuangan (E-Budgeting)	1	1	BPKAD
3	Sim Gaji	Sistem Informasi Gaji	1	1	BPKAD
4	Simda Pendapatan	Sistem Informasi Pendapatan	1	1	BPRD
VI MANAJEMEN KEPEGAWAIAN					
1	Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian	http://simpeg.belitungkab.go.id/	1	1	BKPSDM
2	e-SKP	http://skp.belitungkab.go.id/v2/	1	1	BKPSDM
3	e-Absensi	http://e-kinerja.belitungkab.go.id/absen/	1	1	BKPSDM
4	e-Arsip	http://earsip.belitungkab.go.id/	1	1	BKPSDM
5	e-TPP	http://e-kinerja.belitungkab.go.id/tpp/	1	1	BKPSDM
6	e-SIDAK	http://aktivitas.belitungkab.go.id/v2/	1	1	BKPSDM

7	e-KGB	http://kgb.belitungkab.go.id/	1	1	BKPSDM
JUMLAH			32	29	

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Belitung Tahun 2021

Terintegrasinya sistem informasi mengalami peningkatan baik dari jumlah sistem yang ada maupun dari sistem informasi yang terintegrasi sesuai standar SPBE. Hal ini disebabkan oleh semakin bertambahnya penggunaan aplikasi di OPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung.

Tabel 2.88
Perbandingan Realisasi Terintegrasinya Sistem Informasi

NO	REALISASI TERINTEGRASINYA SISTEM INFORMASI	2019	2020
1	Jumlah sistem informasi yang terintegrasi	24 sistem	29 sistem
2	Jumlah sistem informasi yang harus terintegrasi sesuai SPBE yang ada	29 sistem	32 sistem

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Belitung Tahun 2021

Rendahnya kapasitas kelembagaan dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas, hal ini disebabkan masih kurangnya cakupan pengelolaan pelayanan publik yang efektif dan berbasis teknologi informasi dan masih lemahnya peran kelembagaan membangun jaring lintas sektor baik secara horizontal dan vertikal, maupun dengan swasta dan masyarakat. Kemudian upaya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, pemerintah melaunching Program Besadu yang merupakan satu dari sekian visi misi Bupati dan wakil Bupati Belitung 2018 – 2023 menyangkut pelayanan publik terutama mengontrol sistem pelayanan pemerintah.

Besadu dalam bahasa Belitung berarti melapor sehingga menjadi wadah menampung berbagai persoalan yang terjadi di masyarakat. Ini merupakan salah satu pengganti kontak saran, untuk lebih terkoordinir dan lebih menyesuaikan dengan kemajuan zaman. Layanan ini dimulai dari pukul 08.00 s.d 16.00 WIB di nomor pengaduan 081908197819, bisa melalui WhatsApp (WA) atau SMS dinomor tersebut. Kemudian pengaduan juga bisa disampaikan melalui media sosial Facebook dan Instagram di akun besadu.belitung. Harapannya pemerintah bisa terus memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Program ini dimotori dinas komunikasi dan informatika (diskominfo) yang tujuannya menampung aduan dari masyarakat terhadap pemerintah daerah. Apa yang terjadi di lapangan semua bisa terserap dan kemudian diteruskan kepada Bupati dan Wakil Bupati serta selanjutnya ditindaklanjuti OPD terkait.

Program BESADU (Belitung Saluran Aspirasi dan Penaaduan)



Selama tahun 2020 jumlah aduan yang masuk sebanyak 458 aduan, aduan yang telah diteruskan sebanyak 452 aduan sedangkan 6 aduan merupakan kategori Aduan Spam. Aduan Spam adalah aduan yang belum memenuhi persyaratan sebagai aduan yang layak diteruskan ke OPD terkait, biasanya Pesadu tidak mencantumkan NIK (Nomor Induk Kependudukan) yang merupakan salah satu syarat untuk pengaduan.



Tabel 2.89
Rekap Data Besadu Tahun 2020

No.	Bulan	Jumlah Aduan yang masuk	Yang ditanggapi	Yang Belum Ditanggapi	Spam
1	Januari	66	46	19	1
2	Februari	67	55	11	1
3	Maret	52	31	21	0
4	April	59	33	26	0
5	Mei	41	24	16	1
6	Juni	27	24	3	0
7	Juli	30	22	7	1
8	Agustus	18	11	6	1
9	September	29	17	12	0
10	Oktober	20	16	4	0
11	November	23	14	9	0
12	Desember	26	17	8	1
	Total	458	310	142	6

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Belitung 2021

Tabel 2.90
Realisasi Keuangan Program penunjang Sasaran Birokrasi yang Mengedepankan Pelayanan Masyarakat yang Berkualitas

No	Program	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%
1.	Program Penataan Kelembagaan	97.950.000,00	89.666.250,00	91,54
2.	Program Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	2.124.210.000,00	1.832.604.679,00	86,27
3.	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	224.155.000,00	221.274.290,00	98,71
4.	Program Penataan Administrasi Kependudukan	1.053.833.000,00	908.012.054,00	86,16
5.	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	5.362.145.000,00	5.177.343.914,00	96,55
6.	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	707.490.000,00	517.613.637,00	78,16
7.	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	83.520.000,00	60.526.040,00	72,47
8.	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana	377.194.000,00	286.941.500,00	76,07
9.	Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	937.438.000,00	686.338.050,00	73,21
10.	Program Pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	2.162.136.700,00	1.964.808.550,00	90,87
11.	Pembinaan dan Pengawasan pemerintahan Desa dan / atau Kelurahan	266.745.000,00	239.934.850,00	89,95
12.	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	220.724.884,00	176.941.503,00	80,16
13.	Program Peningkatan Ketersediaan dan Distribusi Pangan	227.466.500,00	189.680.880,00	83,39

Sehingga untuk sasaran Birokrasi yang Mengedepankan Pelayanan Masyarakat yang Berkualitas dengan capaian 102,17 % dengan persentase realisasi anggaran 89,21% maka terdapat efektifitas dan efisiensi 10,79%. Pandemi Covid 19 yang terjadi tahun 2020 sangat mempengaruhi kinerja pencapaian program dan kegiatan yang telah direncanakan.

2.2.3 TUJUAN 3 : Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi

Capaian kinerja tujuan Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi diukur melalui pencapaian indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi. Capaian kinerja tujuan dengan rinci terpapar pada tabel di bawah ini.



Tabel 2.91
Capaian Kinerja Tujuan Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Belitung Tahun 2020

No	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal RPJMD 2018	Target	2020 Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Akhir RPJMD 2023 Target
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persentase	5,29	5,63	-2,31	-41,03	KURANG	5,90

Dari tabel di atas terlihat bahwa indikator kinerja tujuan belum mencapai target atau belum terealisasi sesuai target yang ditetapkan dalam RPJMD. Target Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten Belitung tahun 2020 adalah 5,63%, namun hanya terealisasi sebesar -2,31% dengan capaian kinerja sebesar -41,03% dengan kategori **KURANG**. Dibandingkan dengan target akhir RPJMD, capaian kinerja LPE Kabupaten Belitung tahun 2020 sebesar -39,15%.

Namun Akibat adanya pandemi covid-19 yang melanda dunia tak terkecual Indonesia, hal ini karena banyak indikator perekonomian yang memburuk seperti daya beli yang merosot tajam hingga angka-angka kegiatan bisnis yang terus mengalami penurunan. Laju Pertumbuhan Ekonomi selalu berkontraksi sejak awal hingga akhir tahun 2020. Laju Pertumbuhan Ekonomi dihitung berdasarkan laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tingkat regional (provinsi) menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan nilai tambah pada suatu waktu tertentu.

Penyusunan PDRB menggunakan 2 (dua) pendekatan, yaitu lapangan usaha dan pengeluaran. Keduanya menyajikan komposisi data nilai tambah dirinci menurut sumber kegiatan ekonomi dan menurut komponen penggunaannya. PDRB dari sisi lapangan usaha merupakan penjumlahan seluruh komponen nilai tambah bruto yang mampu diciptakan oleh sektor-sektor ekonomi atas berbagai aktivitas produksinya. Untuk melihat pertumbuhan ekonomi, pada Laporan ini, menggunakan PDRB dari sisi lapangan usaha. Rendahnya ekonomi maka pendapatan akan menurun drastis.

Berdasarkan data resmi dari BPS Kabupaten Belitung, PDRB Kabupaten Belitung tahun 2020, ADHK tahun 2010, mencapai Rp 6 352,03 milyar. Angka ini menurun Rp 150,29 milyar pada tahun 2020 dari Rp 6 505,32 milyar tahun 2019. Secara detail perkembangan PDRB Kabupaten Belitung selama kurun waktu 2016 – 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.92
PDRB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Belitung 2016 – 2020, (milyar rupiah) ADHK 2010

LAPANGAN USAHA	2016	2017	2018	2019	2020
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1 556,41	1 565,39	1 613,15	1 657,64	1 779,078
Pertambangan dan Penggalian	536,22	540,62	542,03	547,95	485,05
Industri Pengolahan	709,11	738,52	782,77	731,95	736,97
Pengadaan Listrik dan Gas	8,84	9,31	9,92	9,82	9,73
Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	1,76	1,93	1,84	1,95	2,05
Konstruksi	609,	682,97	768,35	842,14	798,64
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	628,09	685,71	713,01	722,75	661,01
Transportasi dan Pergudangan	332,62	365,03	394,61	399,2	316,26
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	185,7	201,15	214,15	234,16	206,45
Informasi dan Komunikasi	172,07	186,41	209,56	240,83	285,43
Jasa Keuangan dan Asuransi	133,77	138,05	144,59	154,13	142,33
Real Estat	184,14	193,98	202,64	208,54	210,86
Jasa Perusahaan	19,78	20,69	21,36	21,96	17,51
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	340,04	365,24	383,67	418,57	398,27
Jasa Pendidikan	104,7	113,94	119,59	129,02	124,88
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	104,98	114,27	119,81	130,81	131,40



Jasa Lainnya	41,83	46,46	49,3	53,91	46,13
Produk Domestik Bruto	5 690,06	5 969,67	6 290,36	6 505,32	6 352,03

Sumber: Kabupaten Belitung Dalam Angka, 2021

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa selama kurun waktu 2016 – 2020 PDRB Kabupaten Belitung menunjukkan kecenderungan meningkat. Dilihat dari sisi lapangan usaha, lapangan usaha yang paling banyak berkontribusi adalah kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan. Pada tahun 2020 kontribusinya sebesar Rp 1.779,08 milyar atau sebesar 27,83%. Lapangan usaha yang kedua adalah konstruksi sebesar 12,93%, kemudian industri pengolahan sebesar 11,91% dan perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor 10,34%. Berikut ditampilkan distribusi persentase PDRB ADHB menurut Lapangan Usaha kurun waktu 2015 – 2019:

Tabel 2.93
Distribusi Persentase PDRB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Belitung 2016 – 2020, ADHB

LAPANGAN USAHA	2016	2017	2018*	2019*	2020**
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	27,59	26,21	25,31	25,01	27,83
Pertambangan dan Penggalian	8,40	7,99	7,27	6,60	5,94
Industri Pengolahan	12,32	12,25	12,35	11,41	11,91
Pengadaan Listrik dan Gas	0,17	0,18	0,19	0,18	0,18
Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
Konstruksi	10,41	11,17	12,49	13,43	12,93
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	10,90	11,46	11,47	11,23	10,34
Transportasi dan Pergudangan	6,52	6,72	6,86	7,00	5,30
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,30	3,38	3,48	3,83	3,75
Informasi dan Komunikasi	2,50	2,54	2,66	2,93	3,39
Jasa Keuangan dan Asuransi	2,31	2,27	2,31	2,36	2,18
Real Estat	3,24	3,23	3,20	3,22	3,34
Jasa Perusahaan	0,33	0,34	0,34	0,91	0,83
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	7,38	7,52	7,28	7,57	7,52
Jasa Pendidikan	2,04	2,10	2,07	2,14	2,17
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,77	1,78	1,77	1,88	1,94
Jasa Lainnya	0,79	0,83	0,85	0,91	0,83

Catatan : *Angka Sementara **Angka Sangat Sementara
Sumber: Kabupaten Belitung Dalam Angka, 2021

Dapat diuraikan bahwa selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir terjadi peningkatan kontribusi beberapa lapangan usaha terhadap PDRB Kabupaten Belitung dan beberapa lapangan usaha lain mulai berkurang. Lapangan usaha yang menunjukkan penurunan antara lain pertambangan dan penggalian, konstruksi, perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, transportasi dan pergudangan, penyediaan akomodasi dan makan/minum, jasa keuangan dan asuransi, jasa perusahaan dan jasa lainnya.

Sementara lapangan usaha yang terus memberikan kontribusi meningkat adalah pertanian, kehutanan dan perikanan, industri pengolahan, informasi dan komunikasi, real estate dan jasa pendidikan. Hal ini mengindikasikan bahwa mulai terjadi pergeseran kegiatan ekonomi masyarakat Kabupaten Belitung, walaupun sangat lamban, dari ketergantungan terhadap alam menuju masyarakat yang mengandalkan jasa. Kondisi ini tentunya harus menjadi perhatian utama Pemerintah Kabupaten Belitung untuk mempersiapkan SDMnya dan membekali masyarakat dengan keahlian.

Walaupun telah terjadi pergeseran kegiatan ekonomi dan PDRB terus bertumbuh setiap tahun, namun pada tahun 2020 justru terjadi perlambatan. Pada tahun 2020 LPE Kabupaten Belitung sebesar -2,31%, sementara LPE tahun 2019 sebesar 3,42%. Percepatan atau perlambatan LPE ini tentunya dipengaruhi oleh laju pertumbuhan per lapangan usaha. Berikut gambaran laju pertumbuhan ekonomi berdasarkan lapangan



usaha di Kabupaten Belitung dalam kuruk waktu empat tahun terakhir.

Tabel 2.94
Laju Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha (persen) Tahun 2016–2020

LAPANGAN USAHA	2016	2017	2018*	2019*	2020**
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5,42	0,58	3,05	2,73	7,33
Pertambangan dan Penggalian	0,89	0,82	0,91	0,24	-11,30
Industri Pengolahan	1,90	4,15	5,99	-6,38	0,45
Pengadaan Listrik dan Gas	14,62	5,30	6,61	-1,05	-0,94
Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	5,96	9,76	-6,01	4,03	8,63
Konstruksi	7,67	12,15	12,50	8,37	-4,08
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4,92	9,17	3,50	2,57	-9,20
Transportasi dan Pergudangan	5,99	9,74	8,10	1,16	-20,78
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,97	8,32	6,46	9,34	-10,82
Informasi dan Komunikasi	6,62	8,33	13,45	15,71	16,64
Jasa Keuangan dan Asuransi	7,14	3,19	4,74	6,60	-7,66
Real Estat	3,94	5,34	4,47	2,91	1,11
Jasa Perusahaan	2,48	4,62	3,24	2,77	-20,27
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	6,84	7,41	5,04	9,10	-4,85
Jasa Pendidikan	8,26	8,82	4,96	7,88	-3,21
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8,23	8,85	4,85	9,18	1,06
Jasa Lainnya	5,25	11,06	6,10	9,36	-14,43
Produk Domestik Bruto	4,96	5,30	5,37	3,42	-2,31

Catatan : *Angka Sementara **Angka Sangat Sementara
Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Belitung

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa laju pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh laju pertumbuhan lapangan usaha. Laju pertumbuhan lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 4,6 % dari 2,73 % pada tahun 2019, menjadi 7,33 % di tahun 2020. Selama 4 (empat) tahun terakhir, Laju pertumbuhan ekonomi menurut lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan, tertinggi sebesar 7,33 % di tahun 2020 dan terendah sebesar 0,58 % di tahun 2017.

Pada tahun 2020 laju pertumbuhan ekonomi adalah yang terparah sepanjang 5 tahun terakhir yaitu pada posisi -2,31. Hal ini sebagai dampak dari pandemi covid-19 yang dihadapi dunia tak terkecuali Indonesia. Banyak indikator perekonomian yang memburuk seperti daya beli yang merosot tajam hingga angka-angka kegiatan bisnis yang terus mengalami penurunan. Rendahnya ekonomi maka pendapatan akan menurun drastis, berbagai lapangan usaha mengalami penurunan antara lain: Pertambangan dan penggalian yang menurun menjadi -11,30% di tahun 2020 begitu juga dengan konstruksi menjadi -4,08%, perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor juga mengalami penurunan -9,20, penurunan terbesar juga terjadi pada transportasi dan pergudangan -20,78 juga untuk lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum -10,82.

Pada tahun 2020 laju pertumbuhan lapangan usaha jasa keuangan dan asuransi mengalami penurunan sebesar -7,66%, dan real estate juga menurun menjadi 1,11% kemudian untuk jasa perusahaan sebesar -20,27% begitupun untuk administrasi pemerintahan, pertanahan dan jaminan sosial waji -4,85% jasa pendidikan sebesar -3,21%. Jasa kesehatan dan kegiatan sosial menurun 1,06 % dan jasa lainnya sebesar -14,43 %.

Dari uraian di atas dapat dijelaskan bahwa Laju pertumbuhan ekonomi menurut lapangan usaha tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 5,73 % dari 3,42 % pada tahun 2019, menjadi -2,31 % di tahun 2020. Selama 5 (lima) tahun terakhir, laju pertumbuhan ekonomi menurut lapangan usaha, tertinggi di tahun 2018 dan terendah di tahun 2020.



Berikut gambaran laju pertumbuhan ekonomi menurut Kabupaten di Prov. Kepulauan Bangka Belitung dalam kurun waktu empat tahun terakhir :

Tabel 2.95
Laju Pertumbuhan Ekonomi menurut Kabupaten di Prov. Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016-2020

NO	KABUPATEN/ KOTA	TAHUN				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Bangka	4,63	5,04	4,51	2,93	-0,73
2	Belitung	4,96	5,30	5,37	3,42	-2,31
3	Bangka Barat	4,80	5,26	5,19	7,13	-5,43
4	Bangka Tengah	3,05	3,46	3,41	1,25	-2,36
5	Bangka Selatan	4,30	4,57	4,52	2,61	-1,78
6	Belitung Timur	4,25	4,85	4,21	3,35	-0,66
7	Pangkalpinang	5,17	5,19	5,07	3,34	-3,02

Sumber : Badan Pusat Statistik 2021

Dari deskripsi di atas dapat tergambar bahwa kondisi pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Belitung Tahun 2020 mengalami perlambatan. Meskipun mengalami perlambatan, perekonomian Kabupaten Belitung menduduki peringkat keempat paling tinggi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung setelah Kabupaten Belitung Timur, Bangka dan Bangka Selatan.

Untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi, pemerintah daerah dapat melakukan intervensi melalui langkah-langkah dan program-program strategis sebagai upaya pencapaian tujuan sesuai dengan RPJMD.

Adapun faktor pendukung laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Belitung adalah sebagai berikut :

- ❖ Iklim usaha yang kondusif bagi usaha perdagangan dan industri yang sudah ada maupun bagi investasi baru;
- ❖ Meningkatnya pangsa sektor industri pengolahan di pasar domestik;
- ❖ Meningkatnya penerapan standarisasi produk industri sebagai penguat daya saing produk industri;
- ❖ Penetapan Kabupaten Belitung sebagai salah satu dari 10 Destinasi Wisata Nasional menjadi salah satu daya tarik tersendiri bagi investor terutama yang bergerak di sektor industri pariwisata;
- ❖ Stabilitas sosial, politik dan keamanan yang terjaga;
- ❖ Bonus demografi yang dimiliki Kabupaten Belitung.

Sedangkan faktor penghambat laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Belitung adalah sebagai berikut:

- ✘ Tingkat inflasi yang masih tinggi;
- ✘ Ketersediaan pasokan listrik yang belum memadai;
- ✘ Kualitas SDM yang belum memadai.

Setelah memperhatikan faktor pendukung dan faktor penghambat tersebut, maka untuk menjaga capaian kinerja sasaran di masa yang akan datang, upaya peningkatannya sebagai berikut :

- ⌘ Menerapkan standarisasi industri lebih ketat, khususnya industri pariwisata sesuai dengan standar internasional;
- ⌘ Mendorong peningkatan investasi yang sesuai dengan potensi daerah dengan memberi kemudahan-kemudahan seperti proses perijinan tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan yang berlaku;
- ⌘ Mendorong pengembangan teknologi sehingga dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan memberi kesempatan sektor swasta untuk berinovasi sehingga memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi daerah;
- ⌘ Meningkatkan kualitas SDM dengan program-program pelatihan.



Dalam RPJMD Kabupaten Belitung Tahun 2018 – 2023, upaya pencapaian Tujuan 3 “Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi “ melalui 5 (lima) sasaran dengan 7 (tujuh) strategi sebagaimana terinci pada tabel berikut :

Tabel 2.96
Sasaran dan Strategi Pencapaian Tujuan

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
Tujuan 3 Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	Sasaran 8 Meningkatnya pengembangan pariwisata	13. Meningkatkan daya saing pariwisata yang terintegrasi dan berkelanjutan
	Sasaran 9 Meningkatnya produksi pertanian dan perikanan	14. Meningkatkan produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan yang berkualitas dan berkelanjutan sesuai dengan potensi desa, dan mendukung pembangunan kepariwisataan; 15. Meningkatkan pengembangan perikanan tangkap dan budidaya.
	Sasaran 10 Meningkatnya pengembangan koperasi dan usaha mikro	16. Meningkatkan pengembangan koperasi dan usaha mikro.
	Sasaran 11 Meningkatnya investasi	17. Meningkatkan tata kelola penanaman modal, perizinan, perdagangan dan industri.
	Sasaran 12 Meningkatnya infrastruktur Kewilayahan	18. Meningkatkan aksesibilitas antar wilayah dengan memperhatikan tata ruang wilayah; 19. Pemenuhan Air Baku.

SASARAN 8 : Meningkatkan Pengembangan Pariwisata

Capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Pengembangan Pariwisata” merupakan salah satu indikator kinerja utama RPJMD dengan indikator Jumlah Kunjungan Wisatawan (domestik dan mancanegara) dengan target 600.000 orang. Berikut realisasi dan capaian indikator sasaran Meningkatkan Pengembangan Pariwisata Kabupaten Belitung Tahun 2020.

Tabel 2.97
Capaian Kinerja Sasaran Meningkatkan Pengembangan Pariwisata Kabupaten Belitung Tahun 2020

No	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal RPJMD 2018	Target	2020 Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Akhir RPJMD 2023 Target
1	Jumlah Kunjungan Wisatawan (Domestik dan Manca Negara)	Orang	467.571	108.000	134.266	124,32	SB	1.000.000

Capaian indikator sasaran Meningkatkan Pengembangan Pariwisata, yaitu Jumlah Kunjungan Wisatawan (Domestik dan Manca Negara) tahun 2020 sebesar 134.266 orang, menurun dari tahun sebelumnya yang semula 348.153 orang atau turun 213.887 orang. Target indikator Jumlah Kunjungan Wisatawan (Domestik dan Manca Negara) Tahun 2020 mengalami penyesuaian dengan kondisi perekonomian nasional akibat wabah dunia yaitu pandemi covid-19 yang berdampak pada minimnya rute penerbangan dari dan ke Belitung yaitu hanya ada 2 (dua) penerbangan. Hal ini juga sebagai bentuk



penyesuaian terhadap target Renstra dari Dinas Pariwisata Kabupaten Belitung sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Belitung Nomor 53 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Belitung Nomor 24A Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2018-2023. Indikator ini terealisasi sesuai target yang ditetapkan. Capaian kinerja sasaran sebesar 124,32% dengan kategori SANGAT BERHASIL, melebihi target sebesar 24,32%. Sedangkan untuk target akhir RPJMD memerlukan peningkatan 86,57%.

Tabel 2.98
Jumlah Kunjungan tamu asing dan Domestik Tahun 2019 dan 2020.

BULAN	2019			2020		
	TAMU ASING	TAMU DOMESTIK	JUMLAH	TAMU ASING	TAMU DOMESTIK	JUMLAH
Januari	897	20 664	21 561	2.718	21.934	24.652
Februari	1 229	18 774	20 003	2.013	20.657	22.670
Maret	1 434	25 730	27 164	1.025	15.004	16.029
April	1 452	27 815	29 267	30	599	629
Mei	644	18 155	18 799	1	714	715
Juni	1 083	27 302	28 385	1	1.429	1.430
Juli	1 049	30 039	31 088	10	4.685	4.695
Agustus	1 569	28 751	30 320	101	8.475	8.576
September	639	29 078	29 717	52	9.483	9.535
Oktober	2 670	32 135	34 805	62	13.467	13.529
Nopember	3 091	34 275	37 366	38	13.753	13.791
Desember	3 306	36 373	39 679	237	17.778	18.015
JUMLAH	19.063	329.091	348.154	6.288	127.978	134.266

Sumber: Kabupaten Belitung Dalam Angka, 2020, BPS Kabupaten Belitung

Pada tahun 2018 jumlah wisatawan yang berkunjung sebanyak 467.571 orang turun menjadi 348.154 orang atau menurun di tahun 2019 dan jauh menurun tahun 2020 yaitu jumlah wisatawan yang berkunjung sebanyak 134.266 orang. Beberapa penyebab penurunan ini adalah tingginya harga tiket pesawat di tahun 2019 dan adanya wabah nasional pandemi covid- 19 di awal tahun 2020. Capaian kinerja pada sasaran meningkatnya pengembangan pariwisata didorong oleh beberapa faktor sebagai daya ungkit pengembangan pariwisata, antara lain :

a. Attraction (Atraksi Wisata/Daya Tarik Wisata)

Ada 3 hal penting dalam daya tarik wisata yaitu alam, budaya dan daya tarik buatan. Kondisi alam Belitung yang dikelilingi lautan dan pantai yang indah, menjadi daya tarik utama wisatawan nusantara terutama yang berasal dari daerah padat penduduk seperti Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Semarang, dan lainnya. Alam yang masih asri dan alami dengan udara yang bersih menjadikan penduduk kota memiliki minat yang besar berkunjung ke Belitung. Beberapa destinasi pariwisata seperti Bukit Peramun, Gusung Bugis, Batu Baginda, Batu Mentas, Tanjungpendam dan lainnya yang terkenal di Belitung menyuguhkan keasrian dan keindahannya yang tidak didapatkan di kota-kota besar.

Budaya masyarakat Belitung yang kental dengan melayu serta perilaku masyarakatnya yang ramah, senang bergaul dan menjunjung tinggi toleransi umat beragama pada akhirnya menciptakan iklim berwisata yang aman dan nyaman dan kondusif bagi wisatawan. Sedangkan wisata buatan yaitu *waterboom*/kolam renang, kolam pemancingan, menyusuri hutan bakau dan event-event wisata tingkat nasional juga terbukti menarik minat wisatawan lokal, nusantara dan mancanegara. Seperti Festival Tanjung Kelayang, Triathlon, Festival Desa Wisata, Festival Cap GoMeh, dan lain-lain.



Seiring berkembangnya pariwisata di Indonesia, Dinas Pariwisata Kabupaten Belitung didukung oleh semua OPD di Pemerintahan Kabupaten Belitung serta BUMD/BUMN dan pihak swasta akan menjaga anugerah Tuhan Yang Maha Kuasa dengan membangun insfrastruktur didestinasai pariwisata seperti jalan, jembatan, drainase, jaringan listrik, ketersediaan air bersih, ketersediaan jaringan telekomunikasi dan sarana buatan lainnya guna memberikan pelayanan yang maksimal (*hospitality*) kepada wisatawan.

b. Amenities (Amenitas/Fasilitas)

Fasilitas-fasilitas yang sudah ada di destinasi pariwisata di Kabupaten Belitung seperti bandara, pelabuhan, hotel berbintang dan non bintang, rumah makan (menu barat, nusantara dan lokal), rumah ibadah, rumah sakit 24 jam, gedung pertunjukan dan sebagainya juga menjadi faktor penentu orang berkunjung ke Belitung. Namun masih diperlukan pembangunan sarana lainnya seperti petak kios cinderamata didestinasai pariwisata, tempat parkir, saung/gazebo, kamar ganti/bilas, dan lain-lain dalam rangka pemenuhan kebutuhan utama wisatawan.

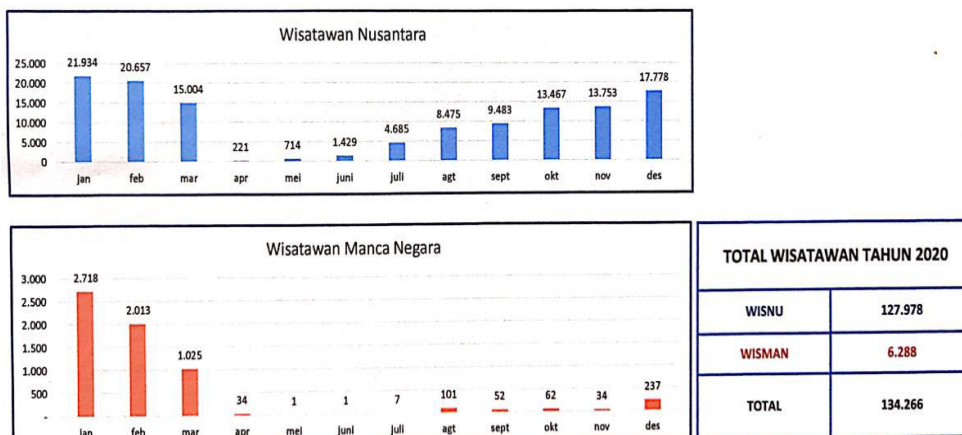
c. Accessibility (Aksesibilitas)

Aksesibilitas ke Pulau Belitung dapat dicapai melalui 2 pintu utama yaitu Bandara Hanandjoeddin Tanjungpandan dan Pelabuhan Laskar Pelangi Tanjungpandan. Di Bandara Hanandjoeddin Tanjungpandan, ada 2 (dua) rute penerbangan yaitu Tanjungpandan-Jakarta (PP) dan Tanjungpandan-Pangkalpinang (PP). Wisatawan manca negara dan domestik bisa melakukan penerbangan langsung atau transit (via Jakarta/Pangkalpinang). Sedangkan Pelabuhan Laskar Pelangi dengan armada Kapal Express Bahari melayani rute Tanjungpandan-Pangkalbalam (Pulau Bangka). Akses yang mudah kedestinasai pariwisata belitung, bisa dicapai dengan mobil, sepeda motor dan sepeda. Transportasi umum seperti bis dan jasa transportasi lainnya (mobil/sepeda motor rental) sangat mudah ditemukan di pusat kota Tanjungpandan dengan harga yang bervariasi mulai dari Rp. 300.000,- s.d Rp. 1.000.000,- sesuai dengan kebutuhan wisatawan. Kemudahan akses transportasi dan penerapan tarif yang sesuai menjadi faktor penunjang besarnya minat berkunjung wisatawan ke Belitung.

d. Ancillary (Pelayanan Tambahan).

Sarana pendukung lainnya (tambahan) di destinasi pariwisata Belitung yang sebenarnya merupakan kebutuhan pokok wisatawan seperti ketersediaan pusat informasi, *money changer*, biro perjalanan, lembaga-lembaga kepariwisataan, dan usaha jasa pariwisata lainnya seperti (*guide, spa, bodyguard, laundry*, dan lain-lain). Di Kabupaten Belitung, khususnya di destinasi pariwisata utama seperti Tanjung Kelayang, Tanjung Tinggi, Bukit Peramun, Gusung Bugis, dan Tanjungpendam, memiliki/terdapat fasilitas-fasilitas tambahan yang memudahkan wisatawan. Fasilitas-fasilitas ini sangat penting keberadaannya dan akan terus ditingkatkan fungsinya sesuai dengan kebutuhan wisatawan/masyarakat umum.

Grafik 2.13. : Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara dan Manca Negara Tahun 2020



Belitung Tahun 2021

Sumber:
Dinas Pariwisata
Kabupaten

Pengembangan penerbangan di Kabupaten Belitung dimaksudkan untuk menunjang pembangunan kepariwisataan Kabupaten Belitung. Pembangunan pariwisata Belitung sendiri sudah dimulai sejak lama, namun semakin fokus setelah ditetapkannya kawasan wisata Tanjung Kelayang sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) pada tahun 2016. Aksesibilitas dan amenities untuk mendukungnya pun terus ditingkatkan seiring dengan semakin dikenalnya Belitung di dunia kepariwisataan, mulainya wisatawan melihat Belitung sebagai destinasi baru yang menarik dan layak dikunjungi, bertambahnya beberapa maskapai penerbangan yang membuka rute penerbangan ke Belitung, dan semakin intensifnya operator wisata menawarkan paket-paket wisata ke Belitung.

Pada tahun 2019 pembangunan kepariwisataan Kabupaten Belitung pun semakin berkembang diikuti dengan perkembangan sarana dan prasarana pendukungnya seperti akomodasi, kamar, dan tempat tidur. Pada hotel berbintang tersedia 23 Akomodasi yang terdiri dari 1.490 kamar dan 2.276 tempat tidur yang tersebar di 2 (dua) kecamatan yaitu 19 akomodasi di Kecamatan Tanjungpandan dan 4 akomodasi di Kecamatan Sijuk. Berikut gambaran jumlah akomodasi, kamar, dan tempat tidur yang tersedia pada hotel bintang menurut kecamatan tahun 2019.

Tabel 2.99
Jumlah akomodasi, Kamar, dan tempat tidur yang tersedia
pada Hotel Bintang Menurut Kecamatan Tahun 2019

KECAMATAN	AKOMODASI	KAMAR	TEMPAT TIDUR
Membalong	-	-	-
Tanjungpandan	19	1 244	1 900
Badau	-	-	--
Sijuk	4	246	376
Selat Nasik	-	-	-
Belitung	42	726	1 062

Sumber: Kabupaten Belitung Dalam Angka, 2020, BPS Kabupaten Belitung

Sementara pada hotel non bintang dan akomodasi lainnya terdiri dari 42 akomodasi, 726 kamar dan 1.062 tempat tidur yang tersebar di 4 (empat) kecamatan yaitu 2 akomodasi di Kecamatan Membalong, 31 akomodasi di Kecamatan Tanjungpandan, 8 Akomodasi di Kecamatan Sijuk dan 1 akomodasi di Kecamatan Selat Nasik seperti yang tersaji pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.100
Jumlah akomodasi, Kamar, dan tempat tidur yang tersedia
pada Hotel non Bintang dan akomodasi lainnya Menurut Kecamatan Tahun 2019

KECAMATAN	AKOMODASI	KAMAR	TEMPAT TIDUR
Membalong	2	14	36
Tanjungpandan	31	603	883
Badau	-	-	-
Sijuk	8	105	139
Selat Nasik	1	4	4
Belitung	42	726	1 062

Sumber: Kabupaten Belitung Dalam Angka, 2020, BPS Kabupaten Belitung

Di samping ketersediaan akomodasi, dalam upaya membangun daya tarik wisata sehingga dapat menarik wisatawan dan meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan, pada tahun 2020 Kabupaten Belitung melaksanakan kegiatan kepariwisataan sebagai berikut:



KALENDER EVENT PARIWISATA KABUPATEN BELITUNG 2020 (REVISI)

No	Kegiatan	Tanggal/Bulan Pelaksanaan	Tempat	Pelaksana	Keterangan
1	BAZAR BELITUNG CREATIVE I	9 – 13 SEPTEMBER 2020	TEMPAT : TAMAN HIBURAN TANJUNGPENDAM KEC. TANJUNGPANDAN.	DINAS PARIWISATA KABUPATEN BELITUNG	MENAMPILKAN HASIL DARI KREATIFITAS BAIK USAHA MASYARAKAT KECIL. MENENGAH (UMKM) DAN PEMENTASAN KESENIAN
2	LOMBA LAYANG – LAYANGAN	17 – 19 SEPTEMBER 2020	TEMPAT : BELITUNG LODGE AND CLUB HOUSE KEC. SUJUK	BELITUNG LODGE AND CLUB HOUSE	MERUPAKAN PARTISIPASI INDUSTRI PARIWISATA BERUPA "LUMBE LAYANG-LAYANGAN" DALAM RANGKA MENDORONG PERTUMBUHAN PARIWISATA KABUPATEN BELITUNG DITENGAH PANDEMI COVID-19
3	BELITUNG CREATIVE WEEK	3 – 9 OKTOBER 2020	TEMPAT : TAMAN HIBURAN TANJUNGPENDAM KEC. TANJUNGPANDAN.	DINAS PARIWISATA KABUPATEN BELITUNG	SELAMA SEPEKAN AKAN DIGELAR BERBAGAI PRODUK BAIK BERUPA SOUVENIR, KULINER , KERajinan BATIK, DIPADUKAN DENGAN BERBAGAI KEGIATAN TALKSHOW, SEMINAR DAN LAIN-LAIN.
4	MUANG JONG	10 OKTOBER 2020	DESA KECIPUT, KEC. SUJUK	DESA KECIPUT DAN DESA TANJUNG TINGGI	SELAMATAN LAUT (TOLAK BALU) LINTAS MEMOHON KEPADA YANG MAHA KUJASA AGAR MASYARAKAT SETEMPAT DIBERIKAN PERLINDUNGAN DALAM MENJALANKAN MATA PENCARIANNYA DI LAUT
5	10K GEOPARK RUN EXHIBITION	10 OKTOBER 2020	KABUPATEN BELITUNG	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BELITUNG	SPORT TOURISM
6	FESTIVAL DESA WISATA	22 – 25 OKTOBER 2020	PANTAI WISATA TELUK GEMBIRA KECAMATAN MEBALONG	DINAS PARIWISATA KABUPATEN BELITUNG	MENGERAKAN PERAN MASYARAKAT DALAM RANGKA MENJADI POTENSI DESA SEBAGAI DAYA TARIK WISATA
7	LOMBA KASTI	27 - 31 OKTOBER 2020	TAMAN HIBURAN TANJUNG PENDAM, KEC. TANJUNGPANDAN	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BELITUNG	DALAM RANGKA MELESTARIKAN PERMAINAN TRADISIONAL
8	PAMERAN KULINER & BONSAI	29 OKTOBER - 1 NOVEMBER 2020	GEOSITE JURU SEBRANG, KEC. TANJUNGPANDAN	POKDARWIS JURU SEBRANG BERSATU	MERUPAKAN PARTISIPASI KELOMPOK SADAR WISATA JURU SEBRANG DALAM RANGKA MEMPERKENALKAN DAYA TARIK WISATA GEOSITE JURU SEBRANG
9	10K BELITUNG	01 November 2020	KABUPATEN BELITUNG	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BELITUNG	SPORT TOURISM
10	LOMBA KASTI	3 - 7 NOVEMBER 2020	TAMAN HIBURAN TANJUNG PENDAM, KEC. TANJUNGPANDAN	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BELITUNG	DALAM RANGKA MELESTARIKAN PERMAINAN TRADISIONAL
11	FUN BIKE	08 November 2020	KABUPATEN BELITUNG	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BELITUNG	SPORT TOURISM
12	BAZAR BELITUNG CREATIVE II	7 – 11 NOVEMBER 2020	TANJUNG PENDAM, KEC. TANJUNGPANDAN	DINAS PARIWISATA KABUPATEN BELITUNG	MENAMPILKAN HASIL DARI KREATIFITAS BAIK USAHA MASYARAKAT KECIL. MENENGAH (UMKM) DAN PEMENTASAN KESENIAN
13	5K BEACH RUN	15 November 2020	TANJUNG TINGGI - TANJUNG KELAYANG KAB. BELITUNG	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BELITUNG	SPORT TOURISM
14	MY JOURNEY BY PT. GARUDA INDONESIA	15 - 19 NOVEMBER 2020	KABUPATEN BELITUNG	PT. GARUDA INDONESIA	VIDEO CONTENT COMPETITION AND INSTAGRAM CONTENT CHALLENGES
15	FESTIVAL TANJUNG KELAYANG	15 – 19 NOVEMBER 2020	PANTAI WISATA TANJUNG KELAYANG KEC. SUJUK	DINAS PARIWISATA KABUPATEN BELITUNG	FETIVAL TANJUNG KELAYANG MERUPAKAN SALAH SATU TOP 100 WONDERFUL INDONESIA, SELALU DILAKSANAKAN DI PANTAI TANJUNG KELAYANG DALAM RANGKA MEMPERCEPAT PERTUMBUHAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS PARIWISATA KAB.BELITUNG . FESTIVAL INI ARAN MENAMPILKAN SUASANA BUDAYA RESAHARAN YANG DI IMPLEMENTASIKAN KEDALAM PEMENTASAN KESENIAN DARI BERBAGAI ETNIK YANG ADA DI BELITUNG SEKALIGUS MENDORONG SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT BERUPA EXPO KUKUM.
16	NAPAK TILAS DAN DRAMA MUSIKAL	25 November 2020	DESA AIK SERU KEC. SUJUK	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BELITUNG	MENGENANG PERJUANGAN RAKYAT BELITUNG
17	FUN BIKE	29 November 2020	KABUPATEN BELITUNG	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BELITUNG	SPORT TOURISM
18	BAZAR BELITUNG CREATIVE III	1 – 5 DESEMBER 2020	TAMAN HIBURAN TANJUNG PENDAM, KEC. TANJUNGPANDAN	DINAS PARIWISATA KABUPATEN BELITUNG	MENAMPILKAN HASIL DARI KREATIFITAS BAIK USAHA MASYARAKAT KECIL. MENENGAH (UMKM) DAN PEMENTASAN KESENIAN

Semua itu merupakan upaya pencapaian kinerja sasaran. Upaya pencapaian kinerja sasaran meningkatnya pengembangan pariwisata dicapai melalui strategi meningkatkan daya saing pariwisata yang terintegrasi dan berkelanjutan, dengan 7 (tujuh) arah kebijakan, yaitu : (1) meningkatkan pengembangan destinasi, pemasaran, industri dan kelembagaan pariwisata; (2) meningkatkan pengelolaan Geopark Belitung dan Kawasan Strategis Nasional (KSPN, KEK, KPPN dan lainnya) berbasis masyarakat; (3) pengembangan desa wisata sesuai dengan potensi desa; (4) peningkatan ekonomi kreatif dalam mendukung pariwisata; (5) meningkatkan kompetensi SDM pariwisata; (6) pelestarian adat istiadat, rumah adat dan bangunan bersejarah yang memiliki nilai warisan budaya; dan (7) meningkatkan pengelolaan museum maritim.

Pada tahun 2020, arah kebijakan meningkatkan pengembangan destinasi, pemasaran, industri dan kelembagaan pariwisata, yang merupakan tanggung jawab Dinas Pariwisata Kabupaten Belitung dilaksanakan melalui program pengembangan destinasi pariwisata, program pemasaran pariwisata, dan program peningkatan kapasitas masyarakat dan kelembagaan.

Program pengembangan destinasi pariwisata dilaksanakan melalui kegiatan penyusunan dokumen perencanaan teknis kepariwisataan, koordinasi pembangunan kepariwisataan, festival desa wisata, pengelolaan taman hiburan, pengelolaan destinasi pariwisata Tanjung Kelayang, pengelolaan rumah adat, tata kelola destinasi, bimtek pengelolaan destinasi pariwisata yang sehat, pembangunan jalan internal dan tempat ibadah, dan penataan lansekap.

Program pemasaran pariwisata dilaksanakan melalui kegiatan pembuatan media promosi, expo potensi pariwisata daerah, pengelolaan website pariwisata, promosi pariwisata, pemilihan dan pembinaan duta wisata



Kabupaten Belitung, *Direct Promotion* WAUU Belitung, *Pesona Belitung beach festival*, dan Festival Tanjung Kelayang.



Arah kebijakan meningkatkan pengelolaan *Geopark* (Taman Bumi) Belitung dan Kawasan Strategis Nasional (KSPN, KEK, KPPN dan lainnya) berbasis masyarakat



mengacu pada status Kabupaten Belitung yang ditetapkan sebagai Geopark Nasional, Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata, Kawasan Strategis Pembangunan Nasional. Sejak ditetapkan

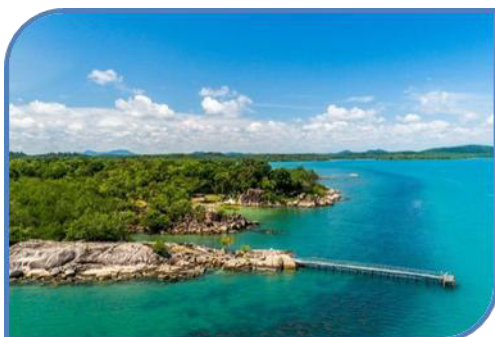


sebagai Geopark Nasional pada tahun 2017, Kabupaten Belitung dan Belitung Timur terus berupaya

mengembangkan kawasan taman bumi (*geosite*) yang ada di Pulau Belitung. Khusus Kabupaten Belitung, berbagai upaya dilakukan untuk mengenalkan taman bumi di Belitung ke dunia internasional, salah satunya melalui berbagai *event* baik skala nasional maupun internasional yang diselenggarakan di Pantai Wisata Tanjung Kelayang, antara lain:

- Belitung Geopark International Kayak Marathon 2018 di Pantai Tanjung Kelayang, Belitung. Kegiatan yang digelar bersama Kemenpar ini dibuka oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, diikuti oleh 82 peserta dari Indonesia, Malaysia, Singapura, India, Italia, Trinidad, dan News Zealand.
- Belitung Geopark Internasional Stand Up Paddle and Kayak Marathon 2019. Kompetisi ini diselenggarakan bersama BPJS di Pantai Tanjung Kelayang dan diikuti oleh 150 peserta dari 8 negara, terdiri dari Indonesia, Malaysia, Singapura, India, Selandia, Kanada, Perancis, dan Amerika.

Penyelenggaraan kegiatan-kegiatan tersebut sebagai upaya Pemerintah Kabupaten Belitung untuk mendapatkan pengakuan status Unesco Global Geopark. Upaya untuk mendapatkan status tersebut



Belitung geopark – Geosite Batu Bedil Granite

didukung penuh oleh pemerintah pusat dengan mengusulkan Geopark Pulau Belitung, bersama Geopark Kaldera Toba, dan dibahas pada pertemuan Asia Pacific Geoparks Network (APGN) ke 6 tahun 2019 yang diselenggarakan di Lombok Nusa Tenggara Barat (NTB), Agustus – September 2019. Sayangnya status Geopark Global belum dapat diraih Belitung dengan alasan usulan geopark tersebut masih dalam proses dan belum terjadwal untuk mengambil keputusan saat APGN di Lombok. Namun demikian, catatan persiapan menuju Global Geopark Pulau Belitung sudah diperoleh Tim Asessor melalui catatan penilaian 2 (dua) asesor,

Andreas Schueller dan Jean Simon Pages, yang datang ke Belitung bulan Juni 2019. Tidak berhenti sampai disitu, pada tahun 2020 diajukan kembali dan menjalani ujian akhir sidang konsel pada 8 Desember 2020, Geopark Belitung memperoleh skor tertinggi . Geopark Belitung memperoleh skor 850, merupakan skor

tertinggi yang pernah diperoleh Indonesia dalam pengalaman mengajukan diri menjadi Geopark UNESCO dengan standar skor penilaian tertinggi 1.000 point. Semoga kedepannya apa yang kita harapkan untuk Geopark Belitung dapat terwujud menjadi Belitung Geopark UNESCO ditahun 2021.

Di samping penyelenggaraan *event-event* berskala nasional dan internasional, Pemerintah Kabupaten Belitung juga membangun *Geopark Information Center*, yang berlokasi di kawasan wisata Tanjungpendam, tepatnya di Jl. Seroja nomor 484 Tanjungpandan Belitung. Pusat informasi taman bumi ini menyajikan taman bumi yang ada di Belitung seperti *Geosite* Juru Sebrang, *Geosite* Bukitlimbongan, dan taman bumi lainnya. Di samping itu informasi berbagai taman bumi yang ada di dunia dan diakui oleh Unesco juga tersedia di pusat informasi taman bumi Belitung.



Sementara pengelolaan Kawasan Wisata Tanjung Kelayang mulai intensif dilakukan sejak penetapan Tanjung Kelayang sebagai KEK Pariwisata dan KSPN pada tahun 2016. Penetapan KEK Tanjung Kelayang melalui Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2016 dan penetapan Tanjung Kelayang sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional melalui Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016, yang disebut 10 Bali Baru.

Pembenahan, pengembangan, dan pembangunan infrastruktur Kawasan Wisata Tanjung Kelayang tidak hanya dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Belitung, tetapi juga oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Pada tahun 2018, pembuatan taman dan *landmark* berupa perahu kayu dengan bertuliskan “*Welcome Belitung*”, yang menjadi ikon baru Pantai Tanjung Kelayang, serta peningkatan jalur pedestrian, pembangunan toilet disabilitas, mushola, kolam pasir, arena ketangkasan, meja dan tempat duduk, dan jalur tangga menuju pantai.



Pada tahun 2019, Kementerian PUPR melakukan pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) dengan kapasitas 20 liter/detik. Pembangunan IPA ini ditujukan untuk mendukung pemenuhan kebutuhan air bakuk KSPN Tanjung kelayang. Selama ini pemenuhan kebutuhan air baku di KSPN Tanjung Kelayang dilayani oleh IPA yang dibangun pada tahun 2011 di Desa Keciput dengan kapasitas 10 liter/detik.

Untuk arahan kebijakan arah kebijakan pengembangan desa wisata sesuai dengan potensi desa dilaksanakan melalui terkelolanya kepariwisataan daerah. Berikut capaian Terkelolanya Kepariwisataan Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2019:

Tabel 2.101
Terkelolanya Kepariwisataan Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2019

NO	URAIAN CAPAIAN	TAHUN 2019		CAPAIAN (%)
		TARGET	REALISASI	
1	Meningkatnya pengelolaan dan pengembangan destinasi pariwisata :			
	a. Daya Tarik Wisata	67	67	100
	b. Desa Wisata	15	15	100
	c. CBT aktif	8	8	100
2	Peningkatan jumlah SDM pariwisata yang terlatih dan tersertifikasi	500	583	116,6
3	Peningkatan jumlah pelaku ekonomi kreatif pendukung pariwisata	2.010	2.012	100,10

Sumber : Dinas Pariwisata Kabupaten Belitung 2019

Ketercapaian kinerja pada Terkelolanya Kepariwisataan Daerah didorong oleh pesatnya perkembangan sektor pariwisata sehingga membuka peluang usaha bagi para pelaku wisata dan pelaku ekonomi kreatif untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dalam hal penyediaan daya tarik wisata, baik itu berupa daya tarik



wisata alam, budaya, maupun wisata buatan. Dengan terus meningkatnya kunjungan wisatawan pemerintah dan masyarakat terus berupaya untuk menambah dan memperbaiki daerah tujuan wisata, baik itu yang dikelola oleh pemerintah maupun oleh masyarakat/swasta.

Pada tahun 2014 jumlah daerah tujuan wisata berjumlah 52 dan terus meningkat pada tahun 2019 menjadi 67 daerah tujuan wisata yang dikelola dengan baik. Pembentukan desa wisata merupakan upaya untuk mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan pariwisata. Pada tahun 2014 terdapat 11 Desa wisata pembentukan desa wisata diawali dengan program PNPM mandiri pariwisata. Dan terus berkembang sampai dengan tahun 2019 telah terbentuk 15 desa wisata.

Selain itu, perkembangan sektor pariwisata juga mendorong terbentuknya desa wisata dan *Community Based Tourism* (CBT) aktif di masyarakat, yang juga di ikuti dengan peningkatan jumlah SDM pariwisata yang terlatih dan tersertifikasi serta peningkatan jumlah pelaku ekonomi kreatif pendukung pariwisata dengan produk-produk inovatif yang dihasilkan oleh para pelaku ekonomi kreatif dari keenambelas subsektornya. Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi membuat pelaku ekonomi kreatif bisa lebih optimal dalam mengeksplorasi potensi kreatif yang ada.

Arah kebijakan peningkatan ekonomi kreatif dalam mendukung pariwisata di Kabupaten Belitung sejalan dengan pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Belitung, yang membutuhkan sentuhan-sentuhan kreatif dalam pengembangannya baik dari segi Arsitektur, Desain Interior, Desain Komunikasi Visual, Desain Produk, Film, Animasi dan Video, Fotografi, Kriya, Kuliner, Musik, Fashion, Aplikasi dan Game Developer, Penerbitan, Periklanan, Televisi dan Radio, Seni Pertunjukkan, Seri Rupa.

Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif di Kabupaten Belitung pada tahun 2018 terdata 1.986 orang meningkat menjadi 2.012 orang di Tahun 2019. Meningkatnya jumlah orang kreatif ini merupakan akibat dari semakin berkembangnya pemahaman masyarakat mengenai industri kreatif sehingga mendorong peningkatan permintaan produk kreatif. Walaupun jumlah orang kreatif sudah meningkat, namun ketersediaan dan kualitas orang kreatif masih belum memadai untuk dapat meningkatkan skala produksi industri kreatif. Peningkatan jumlah dan kualitas orang kreatif dipengaruhi oleh dua aspek utama yaitu Pendidikan Kreatif dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Kerja Kreatif.

Arah kebijakan meningkatkan kompetensi SDM pariwisata dilaksanakan melalui program pengembangan SDM pariwisata dengan kegiatan pelatihan SDM pariwisata, pelatihan perencanaan kepariwisataan bagi aparatur pemerintah desa dan kelurahan, pelatihan pemandu wisata buatan, pelatihan pengembangan destinasi wisata kuliner, pelatihan pemandu wisata alam, dan pelatihan pemandu wisata budaya.

Pencapaian kinerja sasaran Meningkatnya Pengembangan Pariwisata tidak terlepas dari faktor-faktor yang mendukung upaya pencapaian tersebut. Berikut beberapa faktor pendukung pencapaian kinerja sasaran Meningkatnya Pengembangan Pariwisata:

- ❖ Penetapan Tanjung Kelayang sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata melalui Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2016;
- ❖ Penetapan Tanjung Kelayang sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) melalui Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016;
- ❖ Penetapan Geopark Belitung sebagai Geopark Nasional pada tahun 2017;
- ❖ Penetapan Bandara H.A.S.Hanandjoeddin sebagai Bandar Udara Internasional;
- ❖ Kesepakatan Bersama antara Pemerintah kabuapten Belitung dengan PT. Indonesia Air Asia tentang Pengembangan Penerbangan di Kabupaten Belitung (181/006/MoU/I/2019 (Jangka waktu 1 Tahun)) dan diresmikannya rute penerbangan dari Malaysia – Belitung (PP) yang beroperasi mulai tanggal 2 Oktober 2019;
- ❖ Dukungan Pemerintah Pusat, khususnya Kementerian PUPR, dalam pengembangan KSPN Tanjung Kelayang.

Adapun faktor penghambat capaian kinerja pada sasaran Meningkatnya Pengembangan Pariwisata, antara lain :

- ✘ Minimnya rute penerbangan dari dan ke Belitung. Hanya ada 2 (dua) penerbangan dari dan ke Belitung yaitu Tanjungpandan-Jakarta dan Tanjungpandan- Pangkalpinang yang menyebabkan tidak maksimalnya kenaikan jumlah kunjungan wisatawan perhari/perbulan/pertahun dan berkurangnya frekuensi penerbangan dari 13 kali menjadi 7 kali sehari pada tahun 2019 dan pada tahun 2020 dari 7 kali penerbangan menjadi 4 kali penerbangan dalam sehari s.d Desember 2020.
- ✘ Terjadinya wabah pandemi Covid 19 yang melanda Indonesia dan dunia yang berimbas pada pemberlakuan PSBB (Pembatasan Sosial Skala Besar dan *Lockdown* hampir diseluruh negara didunia mulai dari Maret s.d Desember 2020 dan penghentian penerbangan internasional (Tanjungpandan-Kualumpur) dan penerbangan komersil domestik mulai bulan April 2020 s.d Juli 2020 rute Tanjungpandan-Jakarta dan Tanjungpandan-Pangkalpinang. Wabah pandemi yang meluas dan menelan banyak korban jiwa serta dan penerapan rapid test/uji swab berbayar menjadi faktor utama penyebab menurunnya jumlah wisatawan ke Belitung.
- ✘ Pintu masuk wisatawan ke Belitung 91,64 % melalui Bandara Udara Hanandjoeddin Tanjungpandan dan 8,36% melalui Pelabuhan Laskar Pelangi Tanjungpandan.

Tabel 2.102
Perhitungan Persentase Kedatangan Melalui Bandar Udara dan Pelabuhan
di Kabupaten Belitung Tahun 2018 s.d 2020

No.	VIA	Tahun						Persentase Rata-rata dalam 3 tahun (2018, 2019, 2020)
		2018 (orang)	%	2019 (orang)	%	2020 (orang)	%	
1.	Bandar Udara Tanjungpandan	528.610	94,90	395.274	87,59	163.298	92,42	91,64
2.	Pelabuhan Tanjungpandan	28.414	5,10	55.987	12,41	13.402	7,58	8,36
Jumlah		557.024		451.261		176.700		

Sumber: Dinas Pariwisata Kabupaten Belitung 2021

Tingginya persentase melalui bandar udara menggambarkan bahwa jumlah kunjungan wisatawan Belitung sangat tergantung pada jumlah rute dan jadwal penerbangan. Apabila rute penerbangan internasional (Tanjungpandan-Kualalumpur dan Tanjungpandan-Singapura) dibuka kembali dan membuka rute baru penerbangan domestik ke beberapa pintu masuk utama wisatawan Indonesia seperti Bandung, Semarang, Yogyakarta, Solo, Surabaya, Medan, Bali, Lombok dan Kepulauan Riau, maka secara otomatis jumlah kunjungan wisatawan ke Belitung meningkat drastis.

Sebagai tindak lanjut dari permasalahan tersebut di atas perlu strategi dan kebijakan daerah untuk mengatasinya. Berikut disampaikan upaya yang dapat dilakukan untuk menjaga capaian kinerja sasaran di masa yang akan datang:

⌘ Promosi secara berkelanjutan dan inovatif

Promosi wajib dilakukan agar wisatawan semakin mengenal daerah tujuan wisata. Baik itu dengan melalui event-event berskala nasional maupun internasional, menyelenggarakan atau mengikuti pameran baik budaya maupun produk daerah berskala nasional dan internasional. juga

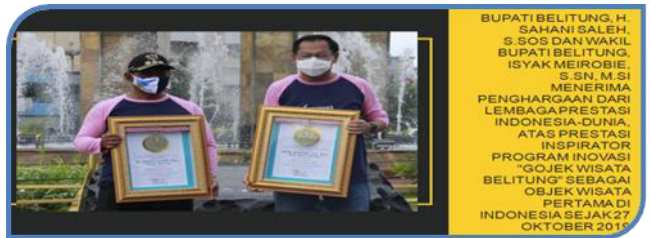
melakukan promosi potensi wisata Belitung secara kreatif melalui jaringan nirkabel atau medsos, yang dapat menjangkau seluruh dunia tanpa batas.



Keikutsertaan Pemerintah Kabupaten Belitung dalam penyelenggaraan BATAM PPI 2020

☞ Meningkatkan kualitas layanan dan akomodasi pariwisata

Kesan pertama yang ada di benak setiap wisatawan adalah pelayanan. Pelayanan yang baik dan ramah akan membuat wisatawan merasa dihargai dan kehadirannya memang diharapkan. Perasaan dihargai dan diharapkan akan menimbulkan keinginan untuk kembali berkunjung di lain waktu. Itu bisa diciptakan jika layanan dan akomodasi pariwisatanya sudah bagus, lengkap dan membuat para wisatawan merasa nyaman. Layanan adalah hal yang tidak boleh dilewatkan, ini menjadi semacam sihir yang membuat para wisatawan merasa wajib untuk datang dan datang kembali.



Penghargaan Pemerintah Kabupaten Belitung dalam program inovasi "Gojek Wisata Belitung"

☞ Meningkatkan keamanan

Keamanan adalah faktor penting yang tidak boleh dilewatkan jika ingin wisatawan semakin banyak berdatangan. Keamanan meningkat jika ada peran aktif para penegak hukum menjaga wilayahnya dari sentuhan orang-rang yang tidak bertanggung jawab. Masyarakat setempat juga harus ikut menjaga suasana yang aman agar wisatawan bisa menikmati liburan dengan nyaman. Selain itu keramahan warga juga sangat menentukan kemajuan pariwisata suatu daerah.

☞ Memperbanyak destinasi wisata

Pengunjung biasanya tertarik dengan tempat wisata baru, unik dan menarik. Ini bisa diwujudkan dengan membuat destinasi baru yang belum ada. Tapi dengan adanya kerjasama dari pihak swasta dan pemerintah, kebutuhan dana bisa diatasi dan pembangunan bisa dilanjutkan demi menghadirkan tempat baru sehingga memberikan pengalaman menarik bagi pengunjung. Banyak destinasi baru yang muncul dan diracik dengan kreativitas menarik. Hal inilah yang akan menjadi upaya Pemerintah Kabupaten Belitung di Tahun 2020 yaitu dengan mengemasnya dalam Program TUSENA, yaitu Program satu Desa satu Destinasi setiap 1 tahun yang bersipat desa Tematik. Tahun 2020 ada 10 desa yang direncanakan menjadi Desa Tusena di Kabupaten Belitung, 10 desa tersebut tersebar di setiap kecamatan serta di luar dari 15 desa wisata yang sudah ditetapkan di Kabupaten Belitung. 10 Desa Tusena ini diperuntukan melengkapi dan menambah nama-nama desa wisata serta destinasi wisata yang ada di Belitung.

Tabel 2.103
Realisasi Keuangan Program penunjang Sasaran Meningkatnya Pengembangan Pariwisata

NO	PROGRAM	PAGU ANGGARAN (RP)	REALISASI ANGGARAN (RP)	%
1.	Pengembangan destinasi pariwisata	10.433.138.860,00	8.381.594.928,00	80,34
2.	Pemasaran Pariwisata	2.783.745.000,00	2.189.668.856,00	78,66
3.	Pengembangan SDM, kelembagaan dan industri pariwisata	880.316.650,00	484.811.900,00	55,07
4.	Pengembangan ekonomi kreatif	2.423.813.500,00	2.3120.104.666,96	95,39
5.	Pengembangan nilai budaya	4.144.744.720,00	3.635.784.502,00	87,72

Sehingga untuk sasaran Meningkatnya Pengembangan Pariwisata dengan rata-rata capaian 22,38% dengan persentase realisasi anggaran 79,44% maka terdapat efektifitas dan efisiensi 20,56%.

SASARAN 9 : Meningkatnya Produksi Pertanian dan Perikanan

Capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Produksi Pertanian dan Perikanan” merupakan salah satu indikator kinerja utama RPJMD dengan indikator Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan, Perikanan terhadap PDRB dengan target “27,31%”. Berikut realisasi dan capaian indikator sasaran Meningkatnya Produksi Pertanian dan Perikanan Kabupaten Belitung Tahun 2020.

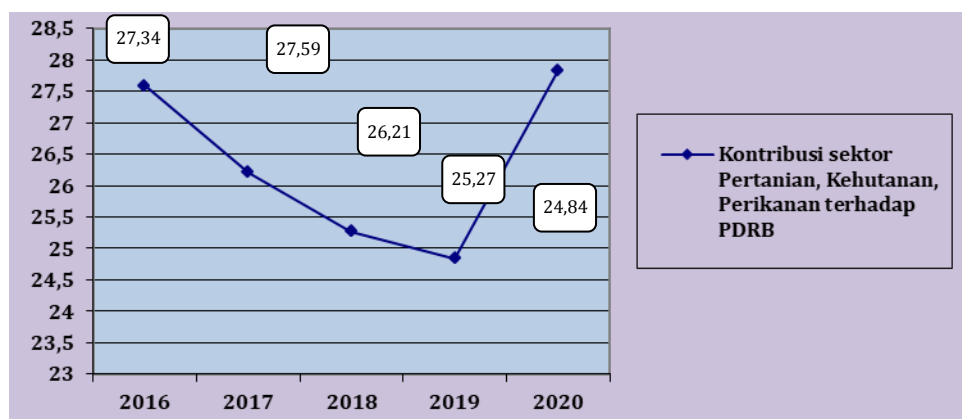
Tabel 2.104
Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Produksi Pertanian dan Perikanan Kabupaten Belitung Tahun 2020

No	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal RPJMD 2018	Target	2020 Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Akhir RPJMD 2023 Target
1	Kontribusi sektor pertanian, kehutanan, perikanan terhadap PDRB	Persentase	26,19	27,31	27,83	101,90	SB	27,62

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa realisasi indikator sasaran “Meningkatnya Produksi Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan”, yaitu Kontribusi sektor pertanian, kehutanan, perikanan terhadap PDRB tahun 2020 sebesar 27,83%. Pencapaian ini mencapai target atau terealisasi sesuai target yang ditetapkan sebesar 27,31%. Pencapaian kinerja sasaran tahun 2020 sebesar 101,90% dengan kategori SANGAT BERHASIL atau mencapai target. Sedangkan untuk target akhir RPJMD juga tercapai pada tahun ini sebesar 100,76.

Berikut kontribusi sektor pertanian, kehutanan, perikanan terhadap PDRB Kabupaten Belitung, selama kurun waktu 5 (lima) tahun

Grafik 3.14. : Kontribusi sektor pertanian, kehutanan, perikanan terhadap PDRB Kabupaten Belitung Tahun 2016 – 2020



Sumber: BPS Kabupaten Belitung 2021

Sektor Pertanian memiliki peran yang penting terhadap kontribusi PDRB di Kabupaten Belitung, karena merupakan kontributor terbesar. Selama kurun waktu 2016 – 2020, kontribusi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan memperlihatkan kecenderungan menurun. Pada tahun 2016 kontribusi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 27,59%, pada tahun 2017 turun menjadi 26,21% dan terus menurun cukup signifikan sampai dengan tahun 2019 menjadi 24,84% namun dapat meningkat kembali tahun 2020 sebesar 27,83%. Mengingat sektor ini merupakan kontributor terbesar terhadap PDRB Kabupaten Belitung, maka perlu strategi dan kebijakan khusus untuk meningkatkan kinerjanya.

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Belitung 2018 – 2023, upaya pencapaian kinerja sasaran “Meningkatnya Produksi Pertanian dan Perikanan” melalui 2 (dua) strategi, yaitu; 1) meningkatkan produksi tanaman pangan, holtikultura, perkebunan dan peternakan yang berkualitas dan berkelanjutan sesuai dengan



potensi desa dan mendukung pembangunan kepariwisataan; dan 2) meningkatkan perikanan tangkap, dan budidaya.

Ada 5 (lima) arah kebijakan dari strategi meningkatkan produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan yang berkualitas dan berkelanjutan sesuai dengan potensi desa dan mendukung pembangunan kepariwisataan, yaitu; 1) intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian; 2) mengembangkan produksi pertanian di Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) "Mina Agro Wisata" Selat Nasik; 3) meningkatkan pengelolaan pasca panen dan mutu produksi; 4) perlindungan lahan pertanian berkelanjutan; dan 5) penguatan kelembagaan pertanian.

Produksi tanaman Sayuran dan Buah-buahan Semusim Menurut Jenis tanaman selama kurun waktu 4 (empat) tahun, tersaji pada tabel berikut :

Tabel 2.105
Produksi tanaman Sayuran dan Buah-buahan Semusim Menurut Jenis tanaman (ton) Tahun 2016–2020

JENIS TANAMAN	2016	2017	2018	2019	2020
Bawang Daun	116	20	20	115	48
Bawang Merah	-	-	445	785	40
Bayam	1 743	648	772	808	355
Buncis	40	20	-	-	66
Cabai Besar	2 829	1 486	1 880	1 500	2 515
Cabai Rawit	2 278	1 310	1 944	1 916	2 047
Cabai	5 107	2 796	3 824	-	2 014
Kacang Panjang	3 831	2 019	2 306	2 477	789
Kangkung	2 821	1 134	1 142	1 145	4 620
Ketimun	5 499	5 770	7 075	-	-
Petsai	1 766	940	824	1 214	870
Terung	2 119	1 256	1 615	1 347	791
Tomat		-	140	198	312
Semangka	396	260	50	325	340

Sumber : BPS Kab. Belitung - Kabupaten Belitung Dalam Angka 2021

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa produksi tanaman sayuran dan buah-buahan semusim menurut jenis tanaman tahun 2020 tertinggi adalah kangkung yaitu 4.620 ton, dan terendah bawang merah yaitu 40 ton. Dibandingkan tahun 2019 tertinggi adalah kacang panjang yaitu 2.477 ton, dan terendah bawang daun yaitu 115 ton. Selama kurun waktu 5 (lima) tahun produksi tanaman sayuran dan buah-buahan semusim menurut jenis tanaman tertinggi adalah ketimun yaitu sebanyak 7.075 ton pada tahun 2018 dan produksi terendah bawang daun sebanyak 20 ton pada tahun 2017 dan 2018 serta buncis dan daun bawang sebanyak 20 ton pada tahun 2017.

Produksi tanaman Biofarmaka Menurut Kecamatan dan Jenis tanaman selama kurun waktu 2 (dua) tahun, dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel 2.106
Produksi tanaman Biofarmaka Menurut Kecamatan dan Jenis tanaman (kg) Tahun 2019 dan 2020

Kecamatan	Jahe		Lengkuas		Kencur		Kunyit	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020
Membalong	400	445	1 090	1 400	532	580	684	740
Tanjungpandan	12	50	65	120	12	30	22	80
Badau	15	20	97	55	7	10	32	28
Sijuk	655	100	975	115	575	60	1 150	120
Selat Nasik	92	39	176	227	196	44	251	198
Belitung	1 174	654	2 403	1 917	1 322	724	2 139	1 166

Sumber : BPS Kab. Belitung - Kabupaten Belitung Dalam Angka 2021

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa Produksi tanaman Biofarmaka Jahe mengalami penurunan sebesar 520 kg dari 1 174 kg di tahun 2019 menjadi 654 kg di tahun 2020; Produksi tanaman Biofarmaka Laos/lengkuas juga mengalami penurunan sebesar 486 kg dari 2.403 kg di tahun 2019 menjadi 1.917 kg di tahun 2020; Begitu juga untuk Produksi tanaman Biofarmaka kencur mengalami penurunan sebesar 598 kg dari 1.322 kg di tahun 2019 menjadi 724kg di tahun 2020; dan Produksi tanaman Biofarmaka kunyit mengalami penurunan sebesar 973 kg dari 2.139 kg dari tahun 2019 menjadi 1.166 kg di tahun 2020.

Produksi tanaman Biofarmaka Menurut Kecamatan dan Jenis tanaman selama kurun waktu 2 (dua) tahun, tersaji seperti tabel berikut :

Tabel 2.107
Produksi tanaman Biofarmaka Menurut Jenis tanaman (kg) tahun 2016–2020

JenisTanaman	2016	2017	2018	2019	2020
Dlingo/Dringo	-	-	-	-	-
Jahe	5 027	31 900	865	1 174	654
Kapulaga	-	-	-	-	-
Keji Beling/Kecibeling	-	-	-	-	-
Kencur	5 113	5 294	861	1 322	724
Kunyit	4 681	7 056	1 080	2 139	1 166
Laos/Lengkuas	9 837	6 059	2 088	2 403	1 917
Lempuyang	-	-	-	-	-
Lidah Buaya	-	4	-	-	-
Mahkota Dewa	48	51	26	-	-
Mengkudu	96	13	—	-	-
Sambiloto	-	-	-	-	-
Temuireng	-	-	-	-	-
Temukunci	-	-	-	-	-
Temulawak	-	-	-	-	-

Sumber : BPS Kab. Belitung - Kabupaten Belitung Dalam Angka 2021

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa Produksi tanaman Biofarmaka Menurut Kecamatan dan Jenis tanaman tahun 2020 tertinggi pada produksi laos/lengkuas yaitu 1.917 kg dan produksi terendah pada jahe yaitu 654 kg. Dibandingkan dengan tahun 2019 Produksi tanaman Biofarmaka Menurut Kecamatan dan Jenis tanaman, tertinggi juga pada laos/lengkuas yaitu sebanyak 2.403 kg, dan produksi terendah pada jahe sebanyak 1.174 kg. Selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir produksi tertinggi pada jahe sebanyak 31.900 kg pada tahun 2017, dan produksi terendah pada lidah buaya sebanyak 4 kg di tahun 2017.

Selain meningkatkan produksi pertanian yang berkualitas dan berkelanjutan, perlu juga meningkatkan produksi perkebunan. Adapun produksi perkebunan kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir 2019-2020 dapat dilihat dari tabel berikut ini:



Tabel 2.108
Produksi Perkebunan Menurut Kecamatan dan Jenis tanaman (ton) Tahun 2019 dan 2020

Kecamatan	Kelapa Sawit		Kelapa		Karet		Lada		Aren	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020
Membalong	1 856,40	1 893,80	363,00	332,00	749,60	640,30	3 357,70	4 697,00	1 332,00	1 440,60
Tanjungpandan	1 419,60	1 394,40	65,20	64,80	101,60	74,80	183,15	170,35	-	-
Badau	1 023,00	1 053,00	192,80	212,80	177,60	177,60	512,46	634,79	2,65	2,65
Sijuk	3 372,60	3 408,90	330,00	342,10	1 127,50	1 134,10	717,50	675,6	1,40	1,05
Selat Nasik	-	-	48,80	47,60	312,00	327,60	159,60	116,40	-	-
Belitung	7 671,60	7 750,10	999,80	385,83	2 468,30	2 468,30	4 930,41	6 294,04	1 336,05	1 444,30

Sumber : BPS Kab. Belitung - Kabupaten Belitung Dalam Angka 2021

Dari tabel di atas dapat di simpulkan bahwa Produksi Perkebunan Menurut Kecamatan dan Jenis tanaman kelapa sawit mengalami peningkatan sebesar 78,50 ton dari 7.671,60 ton di tahun 2019 menjadi 7.750,10 ton ditahun 2020; Produksi Perkebunan Menurut Kecamatan dan Jenis tanaman kelapa mengalami penurunan sebesar 0,50 ton dari 999,80 ton di tahun 2019 menjadi 999,30 ton ditahun 2020; Produksi Perkebunan Menurut Kecamatan dan Jenis tanaman karet mengalami penurunan sebesar 113,9 ton dari 2.468,30 ton di tahun 2019 menjadi 2.354,40 ton ditahun 2020; Produksi Perkebunan Menurut Kecamatan dan Jenis tanaman lada mengalami peningkatan sebesar 1.363,63 ton dari 4.930,41 ton ditahun 2019 menjadi 6.294,04 ton di tahun 2020; dan Produksi Perkebunan Menurut Kecamatan dan Jenis tanaman aren mengalami peningkatan sebesar 108,25 ton dari 1.336,05 ton ditahun 2019 menjadi 1.444,30 ton ditahun 2020. Sehingga produksi perkebunan yang paling tinggi di tahun 2020 ada pada kelapa sawit sebesar 7.750,10 ton dan terendah ada pada produksi perkebunan kelapa yaitu hanya sebesar 999,30 ton.

Upaya pemerintah Kabupaten Belitung dalam meningkatkan produksi pertanian dan perkebunan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan petani melalui peningkatan Nilai Tukar Petani (NTP). Berikut upaya yang dilakukan untuk meningkatkan Nilai Tukar Petani (NTP) Tahun 2019:

Tabel 2.109
Upaya peningkatan Nilai Tukar Petani (NTP) Tahun 2020.

NO	URAIAN	SATUAN	TARGET	REALISASI
1.	Produksi tanaman pangan strategis	ton GKG	2.605	2.204,90
2.	Produksi tanaman pangan local	Ton	1.672	1.214,15
3.	Produksi tanaman hortikultura	Ton	1.279	3.143,16
4.	Peningkatan mutu produk olahan tanaman pangan dan hortikultura	Produk	8	6
5.	Produksi tanaman perkebunan	ribu ton	8,9	9,60
6.	Produk olahan hasil tanaman perkebunan	Jenis	4	4
7.	Jumlah populasi ternak besar sapi	Ekor	1.800	1.802
8.	Jumlah populasi ternak ayam	Ekor	3.262.188	3.802.627
9.	Jumlah penanganan penemuan kasus penyakit hewan menular	Persen	100	100
10.	Pertambahan ketersediaan bibit dan benih pertanian	Bibit	8.000	10.444
11.	Pertambahan ketersediaan bibit peternakan	Ekor	50	55
12.	Peningkatan luas areal tanaman padi	Ha	465	434
13.	Peningkatan kelas kelembagaan kelompok Tani "Madya"	Kelompok tani	2	2
14.	Usaha pelayanan jas alsintan (UPJA) "Profesional"	UPJA	2	2

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Belitung 2021

Upaya peningkatan produksi dan Nilai Tukar Petani tersebut dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Belitung Tahun 2020 melalui program-program:

1. Pengembangan tanaman pangan dan hortikultura;
2. Pengembangan tanaman perkebunan;
3. Pengembangan peternakan dan kesehatan hewan;
4. Kesehatan Masyarakat Veteriner;
5. Peningkatan Pelayanan Teknis Perbenihan dan Perbibitan ;
6. Pengembangan Prasarana, Sarana dan Penyuluhan Pertanian;
7. Pengelolaan Kelembagaan Petani dan Usaha Pelayanan Jasa Alat Mesin Pertanian (UPJA);
8. Optimalisasi Lahan Sawah (DID Tambahan).

Di samping itu, untuk meningkatkan produksi pertanian dan perkebunan, Pemerintah Kabupaten Belitung sejak Maret 2019 meluncurkan program BAGUK di Desa [Badau](#), Kecamatan [Badau](#), [Kabupaten Belitung](#). Program ini merupakan penyediaan Bibit Buah

Gratis Untuk Kampung/desa se-[Kabupaten Belitung](#), sebagai upaya ketersediaan buah-buahan di masyarakat desa. Pada Tahun 2020 sebanyak 6.750 bibit buah-buahan dibagikan kepada 5.058 KK Penerima yang tersebar pada Desa Badau, Desa Ibul, Desa Terong, Desa Gunung Riting dan Desa Kembiri, sedangkan bantuan 6.500 DOC Ayam pedaging, 5.037,5 kg pakan ternak, 1 paket obat-obatan dan vitamin serta 1 unit mesin pencabut bulu yang diserahkan kepada dua desa yaitu: (1). 3 peternak kelompok Tani Mandiri Sejahtera Desa Terong Kecamatan Sijuk dan (2) 6 Peternak Kelompok Tani Karya Mandiri Desa Perawas Kecamatan Tanjungpandan. Dengan program ini diharapkan setiap desa di [Kabupaten Belitung](#) memiliki komoditi buah-buahan yang mampu meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

Sementara strategi meningkatkan perikanan tangkap, dan budidaya memiliki 4 (empat) arah kebijakan, yaitu: 1) meningkatkan produksi perikanan budidaya, 2) meningkatkan produksi perikanan tangkap yang berkelanjutan, 3) pengembangan pembibitan budidaya laut dan 4) mengembangkan produksi perikanan di Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) "Mina Agro Wisata" Selat Nasik.

Arah kebijakan meningkatkan produksi perikanan budidaya dilaksanakan melalui program pengembangan perikanan budidaya, dengan beberapa kegiatan, yaitu; pengembangan budidaya ikan kerapu; budidaya ikan kakap putih; budidaya ikan air tawar; budidaya lele sistem bioflok; pengadaan peralatan budidaya ikan air laut; peningkatan sistem produksi budidaya; sekolah lapang bagi pembudidaya; sosialisasi kelembagaan usaha perikanan budidaya; dan pengembangan informasi dan inventarisir perikanan budidaya.

Pada tahun 2020, realisasi produksi perikanan budidaya sebesar 152,96 ton/tahun, produksi perikanan budidaya terdiri dari beberapa komoditas, yaitu; lele sebesar 59,65 ton; nila sebesar 1,46 ton; patin sebesar 2,97 ton; kerapu sebesar 65,69 ton; udang sebesar 1,5 ton; dan mutiara sebanyak 30.747 ekor. Penyebab kurangnya produksi perikanan budidaya adalah adanya musim kemarau yang sangat panjang sepanjang tahun 2020, sehingga ketersediaan air yang minim membuat proses budidaya ikan air tawar menjadi terhenti untuk sebagian besar pembudidaya ikan.



Launching Program BAGUK



Rencana Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) "Mina Agro Wisata" Selat Nasik



Tabel 2.110
Produksi Komoditas Perikanan budidaya (ton/tahun) Tahun 2020

Produksi Komoditas Perikanan Budidaya (ton/tahun)	
Lele	59,65
Nila	1,46
Patin	2,97
Bawal Bintang	-
Kerapu	65,69
Rumput Laut	21,8
Mutiara (ekor)	30.747 ekor
Udang	1,39 ton
Total	152,96

Perkembangan produksi perikanan budidaya selama kurun waktu 2007 – 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.111
Perkembangan produksi perikanan Budidaya (ton/tahun) Tahun 2007-2020

NO.	TAHUN	PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA
1	2007	11,55
2	2008	24,32
3	2009	35,34
4	2010	90,23
5	2011	52,23
6	2012	130,14
7	2013	114,50
8	2014	95,79
9	2015	152,62
10	2016	154,84
11	2017	142,09
12	2018	207,2
13	2019	176,48
14	2020	152,96

Dari tabel di atas terlihat bahwa produksi perikanan budidaya tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 23,52 ton/tahun dari 176,48 ton/tahun ditahun 2019 menjadi 152,96 ton/tahun. Selama kurun waktu 13 (tiga belas) tahun terakhir produksi perikanan budidaya paling tinggi ditahun 2018 yaitu 207,2 ton/tahun, sedangkan paling rendah pada tahun 2007 yaitu 11,55 ton/tahun.

Arah kebijakan meningkatkan produksi perikanan tangkap yang berkelanjutan dilaksanakan melalui program pengembangan perikanan tangkap, dengan beberapa kegiatan, yaitu; pengadaan kapal penangkapan ikan; pengadaan alat penangkapan ikan; pengadaan alat bantu penangkapan; pelayanan Unit Usaha Perikanan Tanjungpandan; bimtek pengembangan sumberdaya nelayan; penyusunan analisis data indikator kinerja sektor perikanan; pengembangan informasi dan inventarisasi perikanan tangkap; pendampingan kegiatan APBN perikanan tangkap; penyusunan dokumen DED kegiatan pembangunan perikanan; dan dan pengadaan lampu tambat labuh nelayan.

Realisasi produksi perikanan tangkap tahun 2019 sebesar 56.845,62 ton/tahun dari target sebesar 66.381 ton/tahun. Sehingga perlu peningkatan produksi sebesar 9.535,38 ton/tahun. Penyebab kurangnya produksi perikanan tangkap adalah zona penangkapan nelayan yang lebih jauh sehingga membutuhkan armada penangkapan yang lebih besar, dan kondisi cuaca yang ekstrim pada musim barat. Berikut gambaran jumlah produksi perikanan tangkap tahun 2019.



Tabel 2.112
Jumlah produksi perikanan tangkap (ton/tahun) Tahun 2020

NO	JENIS IKAN	JUMLAH	NO	JENIS IKAN	JUMLAH
1	Teri	3.802,07	31	Kakak tua	372,31
2	Japuh	19.551,01	32	Ikan karang lainnya	360,25
3	Banyar	3,91	33	Udang putih/jerbung	141,53
4	Kembung	224,63	34	Udang barong/udang karang	54,18
5	Siro	65,81	35	Rajungan	2.192,48
6	Selar Hijau	106,58	36	Cumi-cumi	3.457,76
7	Tembang	15.223,69	37	Sotong	387,60
8	Ikan Pelagis kecil lainnya	0,86	38	Lainnya	4.637,74
9	Tenggiri	898,65	39	Layang	0,13
10	Cucut Botol	43,24	40	Sunglir	6,70
11	Cucut Lainnya	52,99	41	Telengkek	2,42
12	Mayung	35,50	42	Bawal hitam	38,22
13	Kuwe	342,52	43	Daun bambu/talang-talang	25,18
14	Bawal putih	942,22	44	Golok golok	0,04
15	Ikan gaji	1,72	45	Beloso	1,05
16	Lencam	51,69	46	Julung-julung	2,43
17	Kakap merah/bambangan	465,98	47	Gerot-gerot	0,04
18	Pinjalo	134,05	48	Ikan gaji	7,71
19	Kurisi	6,02	49	Ikan layaran	1,46
20	Pari kembang/pari macan (PSL)	701,42	50	Kapas-kapas	0,07
21	Pari lainnya	45,48	51	Peperek	0,89
22	Kambing-kambing/ayam-ayam	55,13	52	Pinjalo	0,80
23	Ekor kuning/pisang-pisang	40,76	53	Biji angka	0,01
24	Kerapu karang	1.912,42	54	Tongkol komo	168,53
25	Kerapu balong	143,35	55	Pari kekeh	18,87
26	Kerapu lumpur	6,69	56	Udang lainnya	81,31
27	Kerapu sunu	0,23	57	Alu-alu/manggilala/pucul	8,98
28	Beronang lingkis	4,21			
29	Beronang kuning	6,72			
30	Ikan beronang	0,68			
Total			56.845,62		

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa produksi perikanan tangkap pada tahun 2020, produksi paling tinggi adalah jenis ikan japuh, yaitu sebanyak 19.551,01 ton/tahun dan paling rendah jenis ikan biji angka, yaitu sebanyak 0,01 ton/tahun. Perkembangan produksi perikanan tangkap selama beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.113
Perkembangan produksi perikanan Tangkap (ton/tahun) Tahun 2008-2020

NO.	TAHUN	PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP
1	2008	41.990,76
2	2009	42.501,36
3	2010	43.362,03
4	2011	43.246,18
5	2012	43.304,74
6	2013	44.946,23
7	2014	50.134,49
8	2015	44.560,27
9	2016	67.189,18
10	2017	68.197,01
11	2018	65.723,44
12	2019	56.845,62
13	2020	52.912,48

Dari 13 (tiga belas) tahun terakhir, jumlah produksi perikanan tangkap tertinggi terjadi pada tahun 2017, yaitu sebesar 68.197,01 ton/tahun, sedangkan terendah terjadi pada tahun 2008, yaitu hanya sebesar 41.990,76 ton/tahun.

Arah kebijakan pengembangan pembibitan budidaya laut dilaksanakan melalui program peningkatan kualitas pembenihan ikan dengan beberapa kegiatan, yaitu; pelayanan Balai Benih Ikan Lokal Membalong;



pelayanan Balai Benih Ikan Lokal Tanjung Binga; bimtek cara pembenihan ikan yang baik; dan pembangunan/perbaikan sarana dan prasarana pembenihan ikan.

Dalam pengembangan usaha perikanan yang berkelanjutan dibutuhkan ketersediaan sarana dan prasarana budidaya dan masukan/*input* produksi yang berkualitas. Salah satu input produksi adalah adalah benih ikan, baik benih ikan air tawar maupun benih ikan kerapu.

Produksi benih ikan pada tahun 2020 mencapai 2,1 juta ekor terdiri dari benih ikan air tawar (lele dan nila) yang dihasilkan oleh 21 unit UPR dan 1 balai benih ikan air tawar dan produksi benih ikan laut (kerapu) sebesar 171 ribu ekor yang dihasilkan 3 unit HSRT dan 1 unit balai benih ikan pantai. Perkembangan produksi benih ikan dapat dilihat lebih rinci sesuai tabel produksi benih dibawah ini.

Tabel 2.114
Produksi unit pembenihan ikan (ton/tahun) Tahun 2011-2020

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<i>Jumlah UPR</i>	2	3	6	10	11	12	13	13	24	21
PRODUKSI BENIH										
Lele (UPR + BBIAT)	178.000	630.630	781.950	1.015.050	1.432.610	1.319.000	1.492.994	1.819.875	1.983.746	1.862.450
Nila (BBIAT)	210.000	181.340	42.700	12.046	33.197	45.270	46.906	22.755	101.392	216.661
Patin	-	-	-	-	-	-	54.000	-	35.000	-
JUMLAH PRODUKSI BENIH TAWAR	388.000	811.970	824.650	1.027.096	1.465.807	1.364.270	1.593.900	1.842.630	2.120.138	2.079.111
<i>Jumlah HSRT</i>	2	2	2	2	2	5	5	5	3	3
PRODUKSI BENIH										
Kerapu (HSRT & BBIP)	32.500	32.400	86.600	47.250	113.545	372.115	201.500	150.638	160.132	171.500
Bawal Bintang (HSRT)	-	-	-	-	-	1.000	-	-	-	-
Kakap Putih	-	-	-	-	-	-	28.050	6.000	-	-
Kepiting Bakau	-	-	-	-	-	-	-	-	1.745	0
JUMLAH PRODUKSI BENIH LAUT	32.500	32.400	86.600	47.250	113.545	373.115	229.550	156.638	161.877	171.500
TOTAL PRODUKSI LAUT & TAWAR	420.500	844.370	911.250	1.074.346	1.579.352	1.737.385	1.823.450	1.999.268	2.282.015	2.250.611

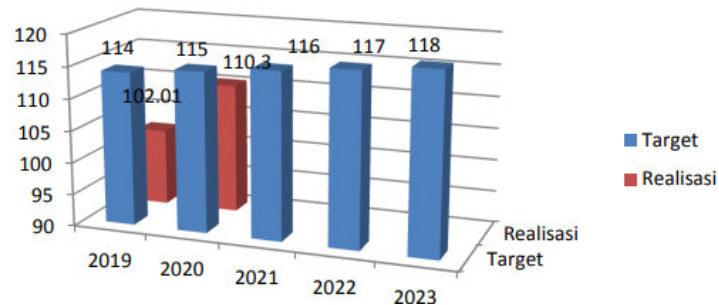
Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa selama kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir yaitu dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2020, produksi unit pembenihan ikan paling tinggi pada tahun 2019 yaitu sebesar 2.282.015 ekor dan paling rendah terjadi pada tahun 2011 yaitu 420.500 ekor.

Untuk mengukur keberhasilan indikator sasaran Meningkatnya Kesejahteraan pelaku sektor perikanan berbasis usaha perikanan yang ramah lingkungan dicapai melalui 2 (dua) parameter indikator kinerja yang harus sukses dicapai dalam waktu 5 tahun. Indikator ini digunakan untuk mengetahui tingkat kesejahteraan nelayan, sebagai persentase dari perbandingan indeks harga yang diterima nelayan terhadap indeks harga yang dibayar nelayan selama satu tahun dan merupakan perbandingan antara harga produksi dengan harga konsumsi nelayan yang ada di seluruh kecamatan Kabupaten Belitung yang diperoleh melalui survey oleh Universitas Bangka Belitung di lapangan.

Berdasarkan tabel diatas pada Tahun 2020 pencapaian indikator ini mencapai sebesar 95,91% meningkat cukup baik dari pencapaian indikator di tahun 2019 yang hanya sebesar 89,48 % dari target yang

ditetapkan sedangkan untuk periode tahun kedua dari rangkaian pelaksanaan 5 tahun renstra baru mencapai 93,47 % sesuai dengan gambar berikut:

Grafik 2.15. : Indikator Kinerja Nilai Tukar Nelayan (NTN)
Indikator Kinerja Nilai Tukar Nelayan (NTN)



Pencapaian

realisasi target Tahun 2020 sebesar 110,3 dari 115 nilai yang ditargetkan dan nilai ini meningkat cukup baik dari Tahun 2019 yang hanya sebesar 102,01 dari 114 nilai yang ditargetkan. Peningkatan indikator ini diperoleh bukan hanya semata-mata dari pelaksanaan kegiatan saja melainkan pencapaian target tersebut juga diperoleh dari pelaksanaan tupoksi bidang perikanan tangkap dan bidang lainnya dalam menyelenggarakan aktifitas pengembangan perikanan tangkap di kabupaten belitung. Pada dasarnya semua kegiatan yang termasuk dalam program pengembangan Perikanan Tangkap memberikan kontribusi kepada peningkatan indikator Nilai Tukar Nelayan ini.

Sebagaimana yang diketahui bersama, Nilai Tukar Nelayan adalah salah satu indikator produksi untuk mengetahui tingkat kesejahteraan nelayan, sebagai persentase dari perbandingan indeks harga yang diterima nelayan terhadap indeks harga yang dibayar nelayan. Secara umum ada 3 (tiga) macam pengertian nilai NTN :

- NTN > 100, berarti nelayan mengalami surplus. Harga produksinya naik lebih besar dari kenaikan harga konsumsinya. Pendapatan nelayan naik lebih besar dari pengeluarannya, dengan demikian tingkat kesejahteraan nelayan lebih baik dibanding tingkat kesejahteraan nelayan sebelumnya.
- NTN = 100, berarti nelayan mengalami impas/ break even. Kenaikan atau penurunan harga barang produksinya sama dengan persentase kenaikan atau penurunan harga barang konsumsinya. Tingkat kesejahteraan nelayan tidak mengalami perubahan.
- NTN < 100, berarti nelayan mengalami defisit. Kenaikan harga barang produksinya relatif lebih kecil dibandingkan dengan kenaikan harga barang konsumsinya. Tingkat kesejahteraan nelayan pada suatu periode mengalami penurunan dibanding tingkat kesejahteraan nelayan periode sebelumnya.

Hasil perhitungan nilai tukar nelayan di Kabupaten Belitung pada tahun 2020 sebesar 110.3 menunjukkan bahwa harga yang diterima nelayan lebih tinggi dibandingkan dengan harga yang di bayar, sehingga pendapatan dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga dan biaya melaut. Hasil nilai tukar Nelayan di kabupaten Belitung pada tahun 2020 lebih tinggi di bandingkan dengan tahun 2019. Berdasarkan data BPS, 2019 NTN kabupaten belitung pada tahun 2019 yaitu 102,01. Hasil ini menunjukkan ada peningkatan Nilai tukar Nelayan sebesar 8,29. Berdasarkan hasil tersebut terjadi peningkatan kesejahteraan nelayan atau hasil penerimaan nelayan dari hasil tangkapan lebih besar dibandingkan dengan biaya produksi dan kebutuhan rumah tangga di kabupaten Belitung pada tahun 2020.

Hasil nilai Tukar Nelayan dari kajian ini di bagi berdasarkan musim penangkapan, klasifikasi alat tangkap dan pembagian per kecamatan di Kabupaten Belitung. Musim penangkapan dalam penentuan NTN yaitu musim penangkapan dan musim paceklik. Hal ini dilakukan supaya dapat mewakili nilai tukar nelayan dalam satu tahun di kabupaten Belitung. Musim penangkapan merupakan waktu penangkapan yang umumnya hasil tangkapan nelayan tinggi, sedangkan musim paceklik dimana hasil tangkapan nelayan menurun. Hasil perhitungan NTN adanya perbedaan yang signifikan Nilai Tukar Nelayan ketika musim penangkapan dengan



musim paceklik. NTN ketika musim penangkapan sebesar 169,18, sedangkan pada musim paceklik yaitu 51,46 sesuai dengan tabel berikut ini :

Tabel 2.115
Nilai Tukar Nelayan (NTN) di Kabupaten Belitung Selama Tahun 2020

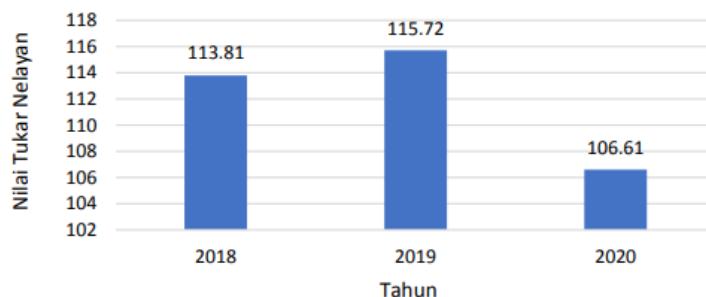
No	Uraian	Musim		NTN
		Musim Penangkapan	Musim Paceklik	
1	Harga yang di Terima	23,122,998	3,439,851	110.3
2	Harga yang di Bayar	13,667,667	6,684,350	
	Biaya melaut	9,980,617	2,997,300	
	Kebutuhan Rumah Tangga	3,687,050	3,687,050	
	Nilai Tukar Nelayan per musim	169.18	51.46	

Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Belitung Tahun 2021

Hasil tersebut menunjukkan ketika musim penangkapan nelayan dengan NTN yang tinggi sehingga hasil tangkapan mampu untuk keperluan melaut dan kebutuhan rumah tangga, sedangkan ketika paceklik hasil NTN < 100 sehingga nelayan tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, berdasarkan hasil tersebut maka perlu beberapa program pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan ketika musim paceklik.

Hasil perhitungan Nilai Tukar Nelayan di Kab. Belitung lebih tinggi dibandingkan dengan provinsi Bangka Belitung. Nilai Tukar Nelayan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung survei bulan Januari s.d Februari sebesar 106,61 sesuai gambar berikut ini:

Grafik 2.16. : Nilai Tukar Nelayan (NTN) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Nilai Tukar Nelayan Provinsi Bangka Belitung



Sumber : Badan Pusat Statistik 2020

Hasil ini menunjukkan Nilai Tukar Nelayan di Kabupaten Belitung secara rata-rata lebih tinggi dengan kabupaten lainnya di Provinsi kepulauan Bangka Belitung. Faktor yang mempengaruhi nilai tukar nelayan yaitu harga yang diterima nelayan dan harga yang dibayar. Harga yang diterima ditentukan berdasarkan produksi hasil tangkapan nelayan dengan harga jual hasil nelayan. Berdasarkan data BPS, 2016 Kabupaten Belitung memiliki Produksi perikanan tangkap paling tinggi di Provinsi Kep. Bangka Belitung (BPS, 2016). Kondisi tersebut dengan tingginya produksi perikanan maka akan di ikuti tingginya indeks harga yang diterima nelayan. Selain itu kabupaten belitung memiliki potensi sumber daya perairan pesisir dan laut yang sangat tinggi seperti mangrove, lamun dan terumbu karang yang merupakan habitat yang baik berbagai jenis ikan, sehingga dapat meningkatkan hasil tangkapan nelayan di Kabupaten Belitung.

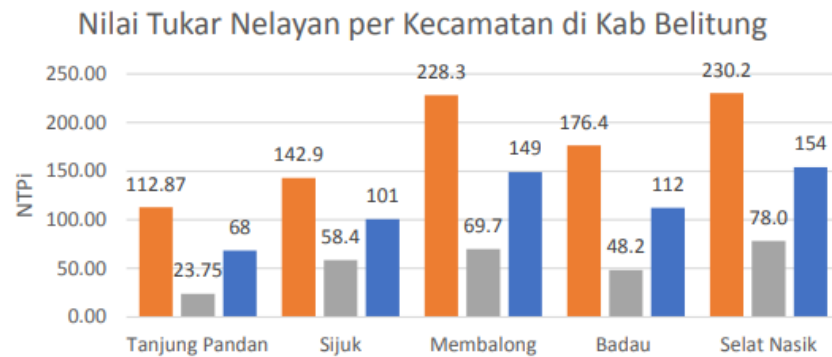
Nilai Tukar Nelayan lebih tinggi dari 100 dapat menunjukkan sektor perikanan tangkap dapat menjadi sektor yang potensial dan menjanjikan sebagai sumber pendapatan masyarakat dan daerah selain pariwisata di Kabupaten Belitung. Selain itu dengan tingginya Nilai Tukar Nelayan (NTN) maka nelayan di kabupaten belitung dikatakan sejahtera atau hasil tangkapan mampu untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan biaya produksi.

Selain Nilai Tukar Nelayan skala Kabupaten dijelaskan juga mengenai Nilai Tukar Nelayan per kecamatan di Kabupaten Belitung dengan NTN tertinggi yaitu Kecamatan Selat Nasik (154), kemudian diikuti



Membalong (149), Badau (112), Sijuk (101) dan yang terendah yaitu Tanjung Pandan (68) sesuai dengan gambar dan Tabel berikut:

Grafik 2.17. : Nilai Tukar Nelayanan (NTN) per Kecamatan di Kab. Belitung Tahun 2020

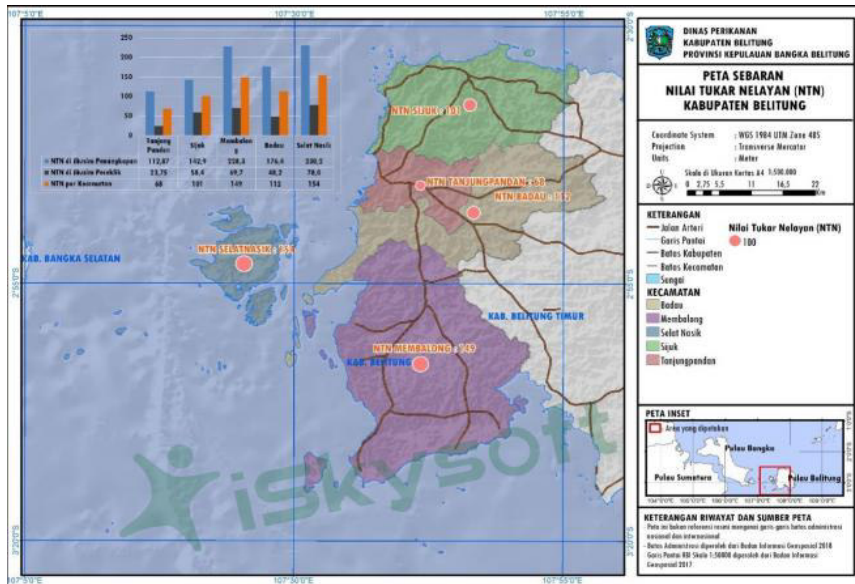


Kecamatan	NTN Tahun 2020 Kab. Belitung		
	NTN Musim Ikan	NTN Musim Peceklik	NTN per Kecamatan
Tanjung Pandan	112.87	23.75	68
Sijuk	142.9	58.4	101
Membalong	228.3	69.7	149
Badau	176.4	48.2	112
Selat Nasik	230.2	78.0	154

Dinas Perikanan Kabupaten Belitung Tahun 2021

Tingginya NTN di Selat Nasik dikarenakan kecamatan ini merupakan kecamatan kepulauan sehingga potensi sumber daya perikanan tinggi, selain itu daerah tangkapan (fishing ground) nelayan tidak terlalu jauh. Dengan tingginya sumber daya perikanan dan dekatnya fishing ground akan meningkatnya hasil tangkapan dan rendahnya biaya yang di keluarkan untuk melaut sehingga dapat meningkat Nilai Tukar Nelayan. Sedangkan rendahnya Nilai Tukar Nelayan di Kecamatan Tanjung pandan dikarenakan daerah ini merupakan daerah perkotaan dengan mayoritas mata pencaharian masyarakat bukan nelayan, selain itu biaya hidup dan biaya operasional untuk melaut cukup tinggi sehingga berdampak pada rendahnya Nilai Tukar Nelayan.

Nilai Tukar Nelayan di Kecamatan Selat Nasik, Membalong, sijuk dan membalong dengan nilai tukar nelayan > 100. Hasil ini menunjukkan hasil tangkapan nelayan di kecamatan tersebut dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga dan biaya operasional melaut. Kondisi ini di kecamatan-kecamatan tersebut perikanan tangkap menjadi sektor yang menjanjikan menjadi usaha atau mata pencaharian masyarakat. Sedangkan di Tanjung Pandan nilai tukar nelayan < 100, hasil ini pendapatan nelayan tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan biaya melaut. Akan tetapi nilai tukar nelayan di kecamatan tanjung pandan nilai tukar nelayan ketika musim penangkapan NTN > 100, sedangkan ketika musim paceklik NTN sangat rendah yaitu hanya 23, 75. Berdasarkan hasil ini maka nelayan di kecamatan tanjung pandan perlu adanya mata pencaharian tambahan untuk memenuhi kebutuhan hidup ketika musim paceklik. Hal ini juga dapat dilihat dari Peta Sebaran Nilai Tukar Nelayan di Kab. Belitung sebagai berikut :



Gambar Peta Sebaran Nilai Tukar Nelayan Di Kabupaten

Sementara NTPi digunakan untuk untuk mengetahui tingkat kesejahteraan pembudidaya ikan, sebagai persentase dari perbandingan indeks harga yang diterima pembudidaya ikan terhadap indeks harga yang dibayar pembudidaya ikan. Nilai ini diperoleh dengan cara membandingkan antara harga produksi dengan harga konsumsi pembudidaya ikan selama satu yang ada di seluruh kecamatan Kabupaten Belitung yang diperoleh melalui survey oleh Universitas Bangka Belitung di lapangan.

Berdasarkan tabel diatas pada Tahun 2020 pencapaian indikator ini mencapai sebesar 104,4 % meningkat sedikit dari pencapaian indikator di Tahun 2019 sebesar 101,52 % dari target yang ditetapkan sedangkan untuk periode tahun kedua dari rangkaian pelaksanaan 5 tahun renstra baru mencapai 94,72 % sesuai dengan gambar berikut:

Grafik 2.18. : Nilai Tukar Pembudidaya ikan (NTPi) Kabupaten Belitung Selama Tahun 2019 dan 2020 jika Dibandingkan dengan Target RPJMD



Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Belitung 2021

Pencapaian realisasi target Tahun 2020 sebesar 110,4 dari 100 nilai yang ditargetkan dan nilai ini meningkat cukup baik dari Tahun 2019 yang hanya sebesar 98,48 dari 97 nilai yang ditargetkan. Peningkatan indikator ini diperoleh bukan hanya semata-mata dari pelaksanaan kegiatan saja melainkan pencapaian target tersebut juga diperoleh dari pelaksanaan tupoksi bidang perikanan Budidaya dan Bidang Lainnya dalam menyelenggarakan aktifitas pengembangan perikanan budidaya di kabupaten belitung. Pada dasarnya semua kegiatan yang termasuk dalam program pengembangan Perikanan Budidaya memberikan kontribusi kepada peningkatan indikator Nilai Tukar Nelayan ini.

Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi) adalah salah satu indikator produksi untuk mengetahui tingkat kesejahteraan pembudidaya ikan, sebagai persentase dari perbandingan indeks harga yang diterima pembudidaya ikan terhadap indeks harga yang dibayar pembudidaya ikan. Secara umum ada 3 (tiga) macam pengertian NTPi :

- a. NTPi > 100, berarti nelayan mengalami surplus. Harga produksinya naik lebih besar dari kenaikan harga konsumsinya. Pendapatan pembudidaya ikan naik lebih besar dari pengeluarannya, dengan demikian



tingkat kesejahteraan pembudidaya ikan lebih baik dibanding tingkat kesejahteraan nelayan sebelumnya.

- b. $NTPi = 100$, berarti pembudidaya ikan mengalami impas/ break even. Kenaikan atau penurunan harga barang produksinya sama dengan persentase kenaikan atau penurunan harga barang konsumsinya. Tingkat kesejahteraan pembudidaya ikan tidak mengalami perubahan.
- c. $NTPi < 100$, berarti pembudidaya ikan mengalami defisit. Kenaikan harga barang produksinya relatif lebih kecil dibandingkan dengan kenaikan harga barang konsumsinya. Tingkat kesejahteraan pembudidaya ikan pada suatu periode mengalami penurunan dibanding tingkat kesejahteraan pembudidaya ikan periode sebelumnya.

Hasil perhitungan Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi) di Kabupaten Belitung pada Tahun 2020 sebesar 100,4 menunjukkan bahwa pendapatan hasil budidaya lebih tinggi dengan biaya produksi dan biaya kebutuhan rumah tangga atau pembudidaya ikan dikatakan sejahtera. Sesuai dengan tabel dibawah ini.

Tabel 2.116
Nilai Tukar Pembudidaya Ikan di Kabupaten Belitung Tahun 2020

Nilai Tukar Pembudidaya (NTPi) 2020		
No	Uraian	Nilai
1	Harga yang diterima	5,868,650
2	Harga yang dibayar	5,845,790
	Biaya Produksi	1,979,647
	Kebutuhan Rumah Tangga	3,866,143
	Nilai Tukar Nelayan	100.4

Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Belitung 2021

Hasil Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi) di Kab. Belitung lebih tinggi di bandingkan dengan Provinsi Bangka Belitung berdasarkan data BPS (2020) pada bulan November Nilai Tukar Pembudidaya (NTPi) hanya sebesar 93,7. Faktor utama yang menyebabkan tingginya NTPi di Kab. Belitung yaitu jenis budidaya dan jenis komoditas yang di Budidaya. Hal ini di karenakan di Kab. Belitung jenis budidaya air laut cukup tinggi dengan sistem keramba jaring apung dan komoditas yang di budidaya yaitu ikan kerapu. Berdasarkan data Dinas Perikanan Kabupaten Belitung (2019), rumah tangga budidaya laut 103 dan budidaya air tawar 166. Data tersebut menunjukkan rumah tangga budaya air laut hampir sebanding dengan budidaya air tawar di Kab. Belitung.

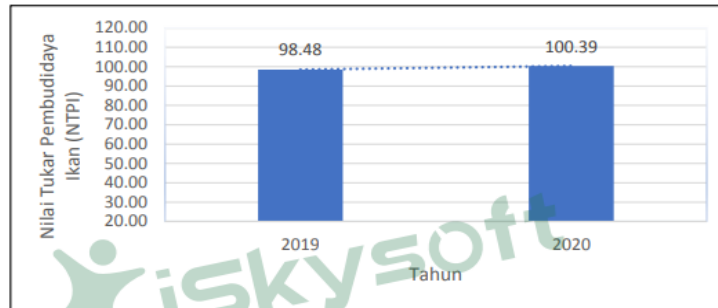
Apabila dibandingkan dengan kabupaten lain di provinsi Bangka Belitung yang masih mengandalkan subsektor budidaya air tawar. Berdasarkan hasil survei budidaya air tawar yang dilakukan masyarakat umumnya bersifat musiman dan bukan mata pencaharian utama masyarakat, bila di bandingkan dengan budidaya air laut yang dilakukan secara kontinu oleh masyarakat di Kab. Belitung. Selain itu dijelaskan juga hasil NTPi budidaya air laut jauh lebih tinggi di bandingkan dengan budidaya air tawar.

Hasil Nilai Tukar Pembudidaya Ikan dengan nilai lebih dari 100, hal ini menunjukkan sektor perikanan budidaya dapat menjadikan harapan baru bagi masyarakat Kab. Belitung untuk bisa menjadi sumber pendapatan yang menjanjikan selain dari kegiatan pariwisata dan perikanan tangkap. Dengan demikian pemerintah daerah harus mampu mengoptimalkan potensi perikanan budidaya terutama budidaya air laut sehingga dapat menopang perekonomian Kab. Belitung. Hasil survei di lapangan beberapa isu yang perlu menjadi perhatian pemerintah Kab. Belitung berkaitan dengan perikanan budidaya air laut seperti harga bibit masih terlalu tinggi. Maka dengan ini perlu di optimalkan hatchery kerapu yang sudah ada di Kab. Belitung, sehingga dapat memenuhi bibit yang dibutuhkan masyarakat dengan harga yang terjangkau.

Nilai Tukar Pembudidaya Ikan di Kab. Belitung pada tahun 2020 ada peningkatan sedikit dari tahun 2019. NTPi pada tahun 2019 sebesar 98,48 atau kurang dari 100, sedangkan pada tahun 2020 yaitu 100,39. Hasil tersebut menunjukkan ada peningkatan kesejahteraan pembudidaya ikan di Kab. Belitung. Meskipun

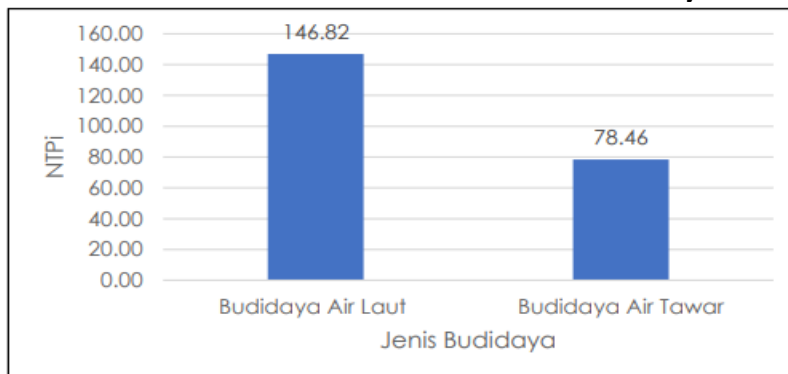
pada Tahun 2020 ada pandemi Covid-19 untuk kegiatan budidaya tidak berpengaruh signifikan dari hasil kegiatan budidaya. Berdasarkan hasil survei lapangan informasi dari responden meskipun pandemi Covid-19 pembudidaya tetap melakukan kegiatan budidaya dan harga jual komoditas perikanan tetap stabil. Dengan ada peningkatan NTPi di Kab. Belitung, sektor budidaya memiliki peluang yang cukup besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan perekonomian daerah apabila program-program yang dilakukan pemerintah daerah dilakukan secara tepat. Perbandingan Nilai NTPi dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 2.19. : Nilai Tukar Pembudidaya ikan (NTPi) Kabupaten Belitung Selama Tahun 2019 dan 2020



Berdasarkan Jenis Budidaya Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi) diketahui bahwa Hasil perhitungan NTPi budidaya air laut sebesar 146,2 dan NTPi budidaya air tawar sebesar 78,6. Sesuai dengan grafik berikut:

Grafik 2.20. : Nilai Tukar Pembudidaya ikan (NTPi) Kabupaten Belitung Tahun 2020 berdasarkan jenis budidaya



Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Belitung 2021

Berdasarkan hasil tersebut pembudidaya ikan air laut dengan NTPi > 100, hal ini menunjukkan pendapatan pembudidaya lebih tinggi dibandingkan dengan pengeluaran untuk biaya produksi dan biaya kebutuhan rumah tangga atau dapat dikatakan pembudidaya sudah sejahtera. Apabila dibandingkan dengan budidaya air tawar NTPi <100, sehingga pembudidaya air tawar belum sejahtera. Faktor- faktor yang menyebabkan tingginya NTPi budidaya air laut dibandingkan dengan air tawar yaitu :

- 1) Komoditas budidaya air laut merupakan komoditas ekspor dengan harga jual tinggi dan pemasarannya sangat mudah, apabila dibandingkan dengan air tawar komoditas budidaya hanya di distribusi di pasar lokal dan pemasaran cukup sulit dengan harga jual relatif rendah.
- 2) Harga pakan budidaya laut relatif rendah dengan pakan menggunakan ikan rucah, selain itu ada sebagian pembudidaya mencari sendiri pakan sehingga dapat mengurangi biaya produksi,
- 3) Sistem budidaya menggunakan keramba jaring apung, meskipun biaya pembuatan keramba cukup mahal akan tetapi biaya perawatan sangat rendah,
- 4) Kondisi atau kualitas perairan budidaya air laut masih sangat baik, tidak adanya pencemaran dan aktivitas penambangan sehingga dapat mengurangi risiko penyakit atau kematian pada ikan yang di budidayakan.

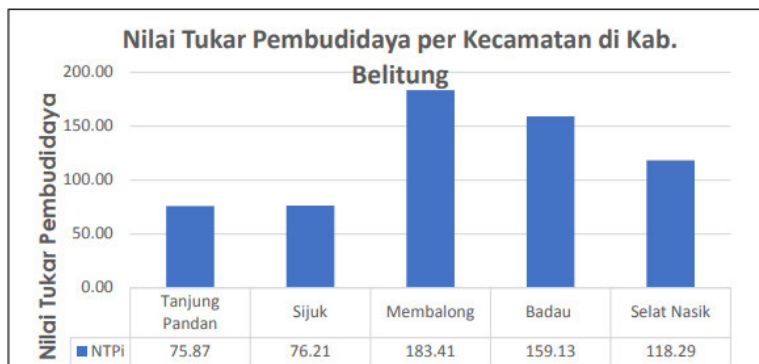
Berdasarkan kajian diatas maka budidaya ikan air laut sangat menjanjikan untuk dikembangkan dibandingkan dengan budidaya air tawar pada Kabupaten Belitung. Meskipun jumlah rumah tangga budidaya air tawar lebih besar di bandingkan dengan rumah tangga air laut di Kabupaten Belitung. Akan tetapi ketika

sampling di lapangan budidaya air tawar yang dilakukan masyarakat umumnya bersifat musiman dan bukan mata pencaharian utama masyarakat, bila di bandingkan dengan budidaya air laut yang dilakukan secara kontinyu oleh masyarakat di Kab. Belitung.

Hasil NTPi budidaya ikan air laut salah satu faktor yang menyebabkan NTPi di Kab. Belitung lebih tinggi di bandingkan dengan NTPi Provinsi Bangka Belitung yang mana kabupaten lain masih mengandalkan subsektor budidaya perikanan tawar. Meskipun perikanan budidaya air laut sangat menjanjikan untuk di kembangkan di Kab. Belitung, akan tetapi perlu mempertimbangkan daya dukung lingkungan sehingga kegiatan budidaya dapat dilakukan secara berkelanjutan. Hal ini dikarenakan kegiatan budidaya air laut yang dilakukan masih secara tradisional dan sangat bergantung pada kualitas air di perairan alami.

Selain Nilai tukar Pembudidaya Ikan skala Kabupaten dijelaskan juga mengenai Nilai tukar Pembudidaya Ikan per kecamatan di Kabupaten Belitung pada tahun 2020 sesuai grafik berikut.

Grafik 2.21. : Nilai Tukar Pembudidaya ikan (NTPi) Kabupaten Belitung Tahun 2020 berdasarkan Kecamatan

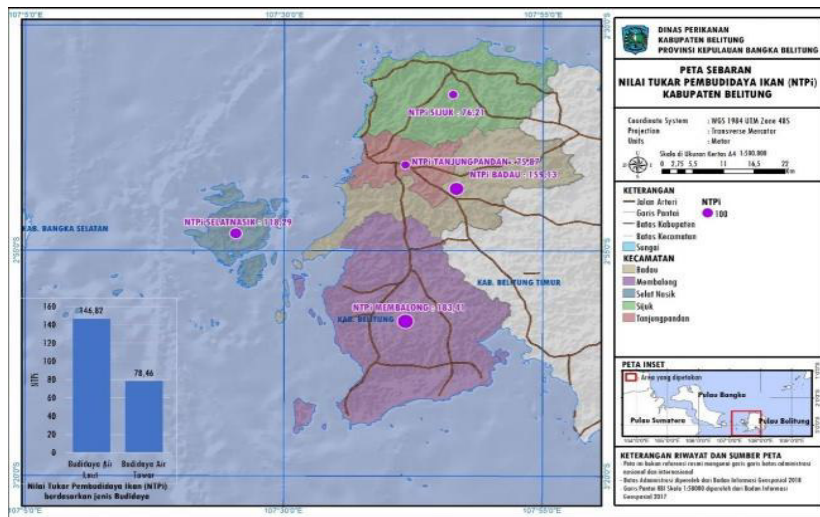


Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Belitung 2021

Hasil perhitungan NTPi Kecamatan yang memiliki NTPi paling tinggi yaitu kecamatan membalong dengan Nilai NTPi yaitu 183,41, kemudian diikuti kecamatan badau (159,13), Kec. Selat Nasik (118,23), Kecamatan Sijuk (76,21) dan yang paling rendah di Kec. Tanjung Pandan. Berdasarkan data tersebut NTPi yang nilainya lebih dari 100 yaitu di kecamatan Membalong, Badau dan Selat Nasik, sehingga pendapatan lebih tinggi dibandingkan dengan biaya produksi dan biaya kebutuhan rumah tangga atau pembudidaya ikan di Kecamatan tersebut dikatakan sudah sejahtera. Sedangkan NTPi yang nilainya kurang dari 100 yaitu di Kecamatan Tanjung Pandan dan Kecamatan Sijuk, hal ini menunjukkan pendapatan pembudidaya lebih rendah bila dibandingkan dengan biaya produksi dan biaya kebutuhan rumah tangga atau pembudidaya di kecamatan tersebut belum sejahtera.

Faktor yang menyebabkan rendahnya NTPi di Kecamatan Tanjung Pandan dan Sijuk di pengaruh oleh jenis budidaya yang dilakukan oleh masyarakat tersebut. Jenis budidaya yang dilakukan di kec. Tanjung Pandan dan Sijuk umumnya masyarakat melakukan budidaya ikan air tawar dibandingkan dengan Kecamatan Membalong, Badau Dan Selat Nasik yang umumnya masyarakat melakukan budidaya ikan air laut dengan komoditas utama yaitu Ikan Kerapu Cantik.

Hasil analisis pada peta sebaran Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi) di Kabupaten Belitung maka kecamatan yang potensial dan menjanjikan untuk usaha perikanan budidaya yaitu kecamatan Membalong, Badau dan Selat Nasik . Jenis budidaya yang perlu di kembangkan yaitu budidaya ikan air laut, dengan komoditas ikan kerapu dan sistem budidaya keramba jaring apung. Dengan tingginya NTPi di Kecamatan tersebut maka usaha perikanan budidaya sangat potensial untuk dikembangkan sebagai mata pencaharian masyarakat di Kabupaten Belitung. Kegiatan budidaya supaya dapat dilakukan secara kontinyu dan berkelanjutan maka perlu mempertimbangkan aspek lingkungan dan daya dukung lingkungan pada kegiatan budidaya tersebut. Peta Sebaran dimaksud dapat dilihat pada gambar berikut ini :



Gambar Peta sebaran Nilai Tukar Pembudidaya di Kabupaten Belitung

Strategi Peningkatan Tingkat Kesejahteraan Nelayan dan Pembudidaya ikan Di Kabupaten Belitung Berdasarkan Dokumen Penyusunan Dokumen Analisis Indikator Kinerja Sektor Perikanan tahun 2020 hasil dari kerja sama antara Dinas Perikanan Kabupaten Belitung dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Bangka Belitung diperoleh Analisis SWOT untuk memperoleh strategi peningkatan kesejahteraan nelayan dan pembudidaya ikan di Kabupaten Belitung sesuai dengan tabel dibawah ini sebagai berikut:

Tabel 2.117. : Tabel Analisis SWOT IFAS EFAS

Faktor Internal				
No	Kekuatan	Bobot	Rating	Score
1	Potensi SDI yang melimpah dan terdapat diantaranya komoditas unggulan, bernilai ekonomis tinggi dan merupakan komoditas ekspor	0,1	2	0,2
2	Nilai Tukar Nelayan (NTN) di Kabupaten Belitung mengalami peningkatan setiap tahun. NTN tahun 2019 sebesar 102,01 pada tahun 2020 sebesar 110,3 dan NTPi tahun 2020 sebesar 100,4.	0,1	2	0,2
3	Tingkat konsumsi ikan di Kabupaten Belitung lebih tinggi dibandingkan Kabupaten lainnya di Provinsi Kep. Bangka Belitung	0,1	4	0,4
4	Rata-rata pendapatan bersih nelayan pada musim puncak berkisar lebih dari Rp.5.000.000, musim biasa berkisar Rp.2.500.000 - Rp. 4.000.000 dan musim paceklik berkisar < Rp.1.000.000. Sedangkan pembudidaya ikan kerapu cantik memiliki keuntungan Rp. 75.000.000,- / panen dan budidaya ikan air tawar Rp. 2.000.000,- /bulan.	0,1	3	0,3
5	Sudah terbentuknya KUB dan POKDAKAN di setiap Kecamatan di Kabupaten Belitung	0,1	4	0,4
Total				1,5
Faktor Internal				
No	Kelemahan	Bobot	Rating	Score
1	Rendahnya tingkat pendidikan nelayan yang hanya menempuh sebatas Sekolah Dasar (SD)	0,1	4	0,4
2	Biaya operasional untuk melaut yang tinggi dan juga biaya pemeliharaan alat tangkap, perahu dan mesin cukup mahal	0,1	4	0,4

Tabel 2.118. : Tabel Analisis SWOT

Faktor Eksternal				
No	Peluang	Bobot	Rating	Score
1	Adanya dukungan Pemerintah dan Bantuan program dalam meningkatkan kesejahteraan nelayan seperti pembukaan sentra kuliner, program bantuan alat tangkap dan mesin dalam usaha perikanan	0,1	4	0,4
2	Terdapatnya perusahaan PT/CV Perikanan yang tersedia sebagai fasilitator dalam pemasaran hasil tangkapan ikan nelayan	0,1	4	0,4
3	Pesatnya kunjungan wisatawan lembaga maupun luar lembaga terhadap wisata di Kab Belitung sehingga memacu pengembangan UMKM produk olahan hasil tangkapan nelayan yang dijadikan buah tangan/oleh-oleh khas Belitung	0,1	4	0,4
4	Kerja sama lintas lembaga sangat diperlukan untuk pengembangan lembaga perekonomian masyarakat dan daerah	0,1	3	0,3
5	Tingginya permintaan pasar atas budidaya laut (ikan kerapu cantik)	0,1	4	0,4
Total				1,9
Faktor Eksternal				
No	Ancaman	Bobot	Rating	Score
1	Masuknya nelayan luar yang beroperasi di perairan Kabupaten Belitung dengan mempunyai kapasitas armada penangkapan yang lebih besar	0,1	2	0,2



Tabel 2.119. : Strategi Peningkatan Kesejahteraan Nelayan di Kabupaten Belitung

Faktor Internal				
No	Kekuatan	Bobot	Rating	Score
3	Semakin jauhnya daerah penangkapan ikan (<i>Fishing Ground</i>) Pendangkalan alur sungai (<i>Sijuk</i>) yang menyebabkan sulitnya keluar masuk kapal dan menyebabkan sedimentasi	0,1	3	0,3
4	Masih belum maksimalnya pembangunan infrastruktur dan fasilitas seperti (dermaga, tambat, lampu pandu) di beberapa kecamatan seperti di Kecamatan Sijuk dan Tanjung Pandan	0,1	3	0,3
5	Pemasaran hasil panen budidaya air tawar hanya berskala lokal	0,1	4	0,4
Total				1,8
Total SW X				-0,3

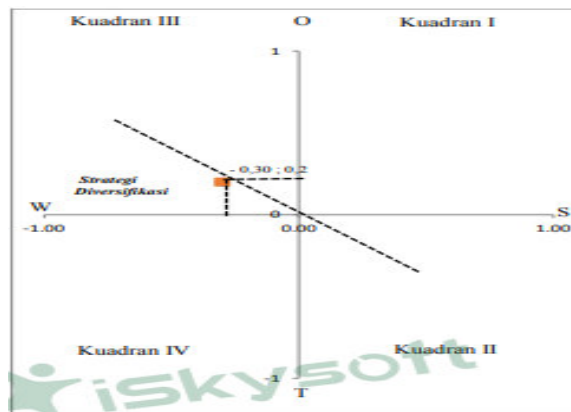
2	Ketergantungan nelayan terhadap BOS/PT terkait dalam modal usaha perikanan yang mengakibatkan rendahnya harga jual hasil tangkapan	0,1	3	0,3
3	Hasil tangkapan ikan sangat di pengaruh oleh musim penangkapan dan daerah penangkapan ikan	0,1	4	0,4
4	Belum maksimalnya penanganan dan pengawasan terhadap Alat Penangkap Ikan (API)/ Alat Bantu Penangkapan Ikan (ABPI) terhadap API/ABPI yang tidak ramah lingkungan	0,1	4	0,4
5	Tingginya harga pakan untuk kegiatan budidaya ikan	0,1	4	0,4
Total				1,7
Total OT Y				0,2

	Strength (S)	Weakness (W)
IFAS	<ol style="list-style-type: none"> Potensi SDI yang melimpah dan terdapat diantaranya komoditas unggulan, bernilai ekonomis tinggi dan merupakan komoditas ekspor Nilai Tukar Nelayan (NTN) dan Nilai Tukar Pembudidaya (NTPi) di Kabupaten Belitung mengalami peningkatan tiap tahun. NTN tahun 2019 sebesar 102,01 pada tahun 2020 sebesar 110,3 dan NTPi sebesar 100,4. Tingkat konsumsi ikan di Kabupaten Belitung lebih tinggi dibandingkan Kabupaten lainnya di Provinsi Kep. Bangka Belitung Rata-rata pendapatan bersih nelayan pada musim puncak berkisar lebih dari Rp.5.000.000, musim biasa berkisar Rp.2.500.000 - Rp.4.000.000 dan musim paceklik berkisar < Rp.1.000.000. Sedangkan pembudidaya ikan kerapu cantik memiliki keuntungan Rp. 75.000.000,- / panen 	<ol style="list-style-type: none"> Rendahnya tingkat pendidikan nelayan yang hanya menempuh sebatas Sekolah Dasar (SD) Biaya operasional/ produksi untuk melaut/budidaya sangat tinggi dan juga biaya pemeliharaan alat tangkap, tambak, perahu dan mesin cukup mahal Semakin jauhnya daerah penangkapan ikan (<i>Fishing Ground</i>) dan Pendangkalan alur sungai yang menyebabkan sulitnya keluar masuk kapal yang menyebabkan sedimentasi Masih belum maksimalnya pembangunan infrastruktur dan fasilitas seperti (dermaga, tambat, lampu pandu) di beberapa kecamatan seperti di Kecamatan Sijuk dan Tanjung Pandan Pemasaran hasil panen budidaya air tawar hanya berskala lokal
EFAS		



	dan budidaya ikan air tawar Rp. 2.000.000,-/bulan. 5. Sudah terbentuknya KUBE di setiap Kecamatan di Kabupaten Belitung	
Opportunity (O)	STRATEGI SO	STRATEGI WO
<p>1. Dukungan Pemerintah dan Bantuan program dalam meningkatkan kesejahteraan nelayan seperti pembukaan sentra kuliner, program bantuan alat tangkap dan mesin perikanan.</p> <p>2. Terdapatnya PT. Perikanan yang tersedia sebagai fasilitator dalam pemasaran hasil tangkapan ikan nelayan</p> <p>3. Pesatnya kunjungan wisatawan lokal maupun luar lokal terhadap wisata di Kab Belitung sehingga memacu pengembangan UMKM produk olahan hasil tangkapan nelayan yang dijadikan buah tangan/oleh-oleh khas Belitung</p> <p>4. Kerja sama lintas sektoral sangat diperlukan untuk pengembangan lembaga perekonomian masyarakat dan daerah</p> <p>5. Tingginya permintaan pasar atas budidaya laut (ikan kerapu cantik)</p>	<p>1. [S1;O2]Memaksimalkan peningkatan hasil tangkapan ikan khususnya jenis ikan unggulan dan menjalin kerja sama dengan PT perikanan dalam memasarkan hasil tangkapan sebagai komoditas ekspor sehingga dapat meningkatkan ekonomi nelayan.</p> <p>2. [S1,S3;O1] Memaksimalkan pemanfaatan fasilitas dan program yang diberikan Pemerintah yakni Sentra Kuliner sebagai salah satu pendorong meningkatnya jumlah konsumsi ikan dan lapangan pekerjaan bagi nelayan dalam memasarkan hasil tangkapan ikan</p> <p>3. (S2,S4;O2-O4) Tingginya NTN menggambarkan bahwa nelayan sudah mencapai taraf kesejahteraan, maka dapat mengoptimalkan kerja sama dengan pihak luar dalam pengembangan kualitas hidup masyarakat.</p> <p>4. (S5;O3) Meningkatkan pendapatan KUB dan POKDAKAN dengan Tingginya kunjungan wisatawan.</p>	<p>1. [W2;O3-O4] Memanfaatkan program pemerintah dan sektor pariwisata sebagai pendapatan tambahan ketika musim pacelidk tiba, dengan cara membuat produk olahan sebagai oleh-oleh</p> <p>2. [W1;O1,O3] Mengoptimalkan lembaga koperasi nelayan dan menjalin kerjasama terhadap UMKM guna membuka pasar baru untuk pemasaran ikan dan produk olahan seperti (ketam isi, kulit ikan dan getas) sebagai profesi sampingan dan penghasilan tambahan untuk istri nelayan</p> <p>3. [W4;O2,O4] Menyediakan fasilitas dan infrastruktur sarana dan prasarana kegiatan penunjang perikanan untuk mendukung peningkatan jumlah produksi dan nilai jual ikan hasil tangkapan nelayan dengan mengoptimalkan kerjasama pemerintah pusat dan daerah</p> <p>4. (O5;O3)Meningkatkan skala pemasaran dari pemasaran lokal ke pemasaran luar daerah dan meningkatkan produk olahan budidaya ikan air tawar dengan memaksimalkan pesatnya kunjungan wisata.</p>
Threat (T)	STRATEGI ST	STRATEGI WT
<p>1. Masuknya nelayan luar yang beroperasi di perairan Kabupaten Belitung dengan mempunyai kapasitas armada penangkapan yang lebih besar</p> <p>2. Ketergantungan nelayan terhadap BOS/PT terkait dalam modal usaha perikanan yang mengakibatkan rendahnya harga jual hasil tangkapan</p> <p>3. Hasil tangkapan ikan di pengaruh oleh musim penangkapan dan daerah penangkapan ikan</p> <p>4. Belum maksimalnya penanganan dan pengawasan terhadap Alat Penangkap Ikan (API)/ Alat Bantu Penangkapan Ikan (ABPI) terhadap API/ABPI yang tidak ramah lingkungan</p> <p>5. Tingginya harga pakan untuk kegiatan budidaya ikan</p>	<p>1. [S1-S2;T4] Penegakan hukum yang tegas terhadap pengawasan API yang tidak ramah lingkungan (Trawls) sehingga tidak mempengaruhi nilai produksi dan nilai kesejahteraan nelayan</p> <p>2. [S1-S2;T2]Minimalisasi ketergantungan nelayan dari pinjaman modal usaha perikanan terhadap BOS dengan mengoptimalkan pemasaran komoditas ekspor dengan Stakeholder yang menjamin harga jual ikan stabil</p> <p>3. [S1,S4;T3] Memaksimalkan usaha penangkapan pada musim puncak sehingga penurunan pendapatan pada musim pacelidk tidak memberikan pengaruh yang banyak terhadap kesejahteraan nelayan</p> <p>4. (S5;T5)Penerapan teknologi untuk pembuatan pakan dengan mengoptimalkan peran KUBE dalam pembuatan pakan ikan.</p>	<p>1. [W4;T3]Mengoptimalkan [pembangunan sarana dan prasarana untuk mendukung peningkatan jumlah hasil tangkapan</p> <p>2. [W2-3; T3]Memperluas jarak daerah penangkapan ikan (fishing ground) sehingga dapat memaksimalkan hasil tangkapan dan meminimaliser kerugian akibat dari tingginya biaya operasional per trip dan musim penangkapan</p> <p>3. [W1;T1]Melakukan sosialisasi/pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan nelayan di Kab Belitung guna memberikan wawasan dalam meningkatkan hasil tangkapan dalam usaha perikanan dan pengaruh nelayan luar</p>

Grafik 2.22. : Strategi Peningkatan Kesejahteraan Nelayan dan Pembudidaya



Strategi Peningkatan Kesejahteraan Nelayan dan Pembudidaya Ikan di Kabupaten Belitung :

Strategi Agresif

- Memaksimalkan peningkatan hasil tangkapan ikan khususnya jenis ikan unggulan dan menjalin kerja sama dengan PT perikanan dalam memasarkan hasil tangkapan sebagai komoditas ekspor sehingga dapat meningkatkan ekonomi nelayan.
- Memaksimalkan pemanfaatan fasilitas dan program yang diberikan Pemerintah yakni Sentra Kuliner sebagai salah satu pendorong meningkatnya jumlah konsumsi ikan dan lapangan pekerjaan bagi nelayan dalam memasarkan hasil tangkapan ikan
- Tingginya NTN menggambarkan bahwa nelayan sudah mencapai taraf kesejahteraan, maka dapat mengoptimalkan kerja sama dengan pihak luar dalam pengembangan kualitas hidup masyarakat.
- Meningkatkan pendapatan KUB dan POKDAKAN dengan Tingginya kunjungan wisatawan.

Strategi Berbenah Diri

- Memanfaatkan program pemerintah dan sektor pariwisata sebagai pendapatan tambahan ketika musim paceklik tiba, dengan cara membuat produk olahan sebagai oleh-oleh.
- Mengoptimalkan lembaga koperasi nelayan dan menjalin kerja sama terhadap UMKM guna membuka pasar baru untuk pemasaran ikan dan produk olahan seperti (ketam isi, kulit ikan dan getas) sebagai profesi sampingan dan penghasilan tambahan untuk istri nelayan.
- Menyediakan fasilitas dan infrastruktur sarana dan prasarana kegiatan penunjang perikanan untuk mendukung peningkatan jumlah produksi dan nilai jual ikan hasil tangkapan nelayan dengan mengoptimalkan kerja sama pemerintah pusat dan daerah.
- Meningkatkan skala pemasaran dari pemasaran lokal ke pemasaran luar daerah dan meningkatkan produk olahan budidaya ikan air tawar dengan memaksimalkan pesatnya kunjungan wisata

Strategi Diversifikasi

- Penegakan hukum yang tegas terhadap pengawasan API yang tidak ramah lingkungan (Trawls) sehingga tidak mempengaruhi nilai produksi dan nilai kesejahteraan nelayan
- Minimalisasi ketergantungan nelayan dari pinjaman modal usaha perikanan terhadap BOS dengan mengoptimalkan pemasaran komoditas ekspor dengan Stakeholder yang menjamin harga jual ikan stabil
- Memaksimalkan usaha penangkapan pada musim puncak sehingga penurunan pendapatan pada musim paceklik tidak memberikan pengaruh yang banyak terhadap kesejahteraan nelayan
- Penerapan teknologi untuk pembuatan pakan dengan mengoptimalkan peran KUBE dalam pembuatan pakan ikan

Strategi Defensif

- Mengoptimalkan pembangunan sarana dan prasarana untuk mendukung peningkatan jumlah hasil tangkapan

- b. Memperluas jarak daerah penangkapan ikan (fishing ground) sehingga dapat memaksimalkan hasil tangkapan dan meminimalisir kerugian akibat dari tingginya biaya operasional per trip dan musim penangkapan
- c. Melakukan sosialisasi/pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan nelayan di Kab Belitung guna memberikan wawasan dalam meningkatkan hasil tangkapan dalam usaha perikanan dan pengaruh nelayan luar.

Untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan, Pemerintah Kabupaten Belitung meluncurkan "Program Gangan", yaitu garansi hasil panen komoditi gabungan berupa hasil pertanian, perkebunan, dan perikanan masyarakat, yang sebelumnya telah membuat perjanjian bersama dan dibina BUMD. Jaminan ini berupa jaminan beli dengan harga wajar di atas harga pasar saat harga pasar jatuh. Bahan yang dibeli ini didistribusikan oleh BUMD dengan mitra-mitranya. Sebagai pemberi garansi membeli adalah Badan Logistik Daerah.

Untuk mewujudkan program ini, Pemerintah Kabupaten Belitung bekerjasama dengan pihak ketiga, yaitu PT Aman Jaya Perdana. Bentuk kerja sama tersebut dituangkan dalam Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Belitung dengan PT Aman Jaya Perdana tentang Pembelian dan Jaminan Harga Produksi Serta Pembinaan Sumber Daya Petani Lada Kabupaten Belitung yang sekaligus ditandai dengan Soft Launching Program GANGAN (Garansi Hasil Panen Komiditi Gabungan).



Soft Launching Program GANGAN

Dalam upaya pencapaian kinerja sasaran Meningkatnya Produksi Pertanian dan Perikanan, ada faktor-faktor yang mendukung upaya tersebut. faktor pendukung pencapaian kinerja sasaran Meningkatnya Produksi Pertanian dan Perikanan antara lain:

- ❖ Komitmen pimpinan yang tinggi dalam pengembangan sektor pertanian dan perikanan. Komitmen ini dibuktikan dengan peluncuran program inovatif, yaitu "Program Baguik" untuk peningkatan produk pertanian dan "Program Gangan" untuk menjamin hasil panen pertanian, perkebunan dan perikanan masyarakat tersalurkan di pasar;
- ❖ Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan merupakan kontributor terbesar terhadap PDRB Kabupaten Belitung;
- ❖ Potensi sektor perikanan yang cukup besar dan berdasarkan survei yang dilakukan Dinas Kelautan dan Perikanan dapat menjadi penopang perekonomian masyarakat.

Sedangkan faktor penghambat pencapaian kinerja sasaran Meningkatnya Produksi Pertanian dan Perikanan antara lain:

- ✘ Rendahnya Skor Pola Pangan Harapan (PHH), 87,43%, masyarakat di Kabupaten Belitung. Rendahnya skor ini mengindikasikan bahwa tingkat konsumsi masyarakat terhadap bahan pokok masih, sedangkan untuk konsumsi bahan pangan non beras masih sangat rendah. Hal ini berdampak pada kurangnya minat masyarakat untuk menanam bahan pangan non beras sehingga berdampak pada rendahnya produksi sektor pertanian;
- ✘ Zona penangkapan nelayan yang lebih jauh sehingga membutuhkan armada penangkapan yang lebih besar;
- ✘ Kondisi cuaca yang ekstrim pada musim barat;
- ✘ Pandemi Covid 19 yang terjadi sejak tahun 2020 mempengaruhi kinerja pencapaian program dan kegiatan yang telah direncanakan;
- ✘ Tingkat kegagalan budidaya ikan air tawar masih tinggi, sehingga kurang diminati masyarakat.



Dengan memperhatikan faktor pendukung dan penghambat pencapaian kinerja sebagaimana diuraikan di atas, ada beberapa upaya peningkatan yang harus dilakukan Pemerintah Kabupaten Belitung untuk menjaga kinerja sasaran, yaitu:

- ⌘ Meningkatkan capaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) dengan melaksanakan sosialisasi varian-varian menu yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) sehingga pola konsumsi akan menjadi lebih beragam. Semakin beragamnya pola konsumsi masyarakat akan semakin tinggi kebutuhan akan pangan non beras. Pada akhirnya akan menarik minat masyarakat memproduksi pangan non beras;
- ⌘ Menyediakan sarana dan prasarana serta pembinaan dan pelatihan kepada masyarakat petani dan pembudidaya ikan yang ada di Kabupaten Belitung sehingga diharapkan meningkatkan produksi pertanian dan perikanan dan kesejahteraan taraf hidup masyarakat sektor pertanian dan perikanan;
- ⌘ Meningkatnya kesadaran masyarakat pembudidaya ikan untuk menerapkan sistem Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB), Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB) dan menggunakan pakan tambahan sehingga mampu menekan biaya produksi;
- ⌘ Pelestarian terumbu karang dan padang lamun serta rumponisasi dan pembuatan terumbu karang buatan di zona tangkapan yang menjadi wilayah kewenangan kabupaten sehingga nelayan tidak perlu melakukan penangkapan di zona yang terlalu jauh;
- ⌘ Melakukan pengawasan terhadap penangkapan ikan yang menggunakan alat tangkap yang dilarang oleh pemerintah untuk menjaga kelestarian terumbu karang dan padang lamun sehingga keberlanjutan reproduksi ikan tetap terjaga.

Berikut relisasi keuangan program penunjang sasaran meningkatnya produksi pertanian dan perikanan:

Tabel 2.120
Realisasi Keuangan Program penunjang Sasaran Meningkatnya Produksi Pertanian dan Perikanan

NO	PROGRAM	PAGU ANGGARAN (RP)	REALISASI ANGGARAN (RP)	%
1.	Pengembangan tanaman pangan dan hortikultura	1.252.582.800,00	1.043.117.510,00	83,28
2.	Pengembangan tanaman perkebunan	166.470.700,00	163.970.700,00	98,50
3.	Pengembangan peternakan dan kesehatan hewan	1.095.670.000,00	1.041.665.393,00	95,07
4.	Peningkatan pelayanan teknis perbenihan dan perbibitan	808.799.050,00	789.978.492,00	97,67
5.	Pengembangan prasarana, sarana dan penyuluhan pertanian	405.570.500,00	315.142.077,00	77,70
6.	Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi dan jaringan pengairan lainnya	4.519.239.000,00	4.210.631.568,00	93,17
7.	Pengembangan perikanan tangkap	6.220.356.000,00	5.799.740.714,00	93,24
8.	Pengembangan perikanan budidaya	1.657.704.000,00	1.478.618.377,00	89,20

Sehingga untuk sasaran Meningkatnya Produksi Pertanian dan Perikanan dengan rata-rata capaian 101,90% dengan persentase realisasi anggaran 92,04% maka terdapat efektifitas dan efisiensi 7,96%.

SASARAN 10 : Meningkatkan Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro

Capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro” merupakan salah satu indikator kinerja utama RPMJD dengan indikator Nilai Omset Koperasi dengan target Rp 78.302.227.000,00 dan Nilai Omset Usaha Mikro Rp 1.372.650.000,00. Berikut realisasi dan capaian indikator sasaran Meningkatkan Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Belitung Tahun 2020.



Tabel 2.121
Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro
Kabupaten Belitung Tahun 2020

No	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal RPJMD 2018	Target	2020 Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Akhir RPJMD 2023 Target
1	Nilai Omset Koperasi	Ribu Rupiah	55.550.754	93.880.774	78.302.227	83,41	B	206.256.609
2	Nilai Omset Usaha Mikro	Ribu Rupiah	973.000.000	1.286.792.500	1.372.650.000	106,67	SB	1.957.050.000

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa realisasi indikator kinerja **Nilai Omset Koperasi** Tahun 2020 sebesar Rp 78.302.227.000,00 dengan capaian kinerja sebesar 83,41 % berkategori BERHASIL atau belum mencapai target sedangkan **Nilai Omset Usaha Mikro** Tahun 2020 sebesar Rp 1.372.650.000.000,00 melampaui target dengan capaian kinerja 106,67 % berkategori SANGAT BERHASIL. Dibandingkan dengan target akhir RPJMD, Nilai Omset Koperasi Kabupaten Belitung Tahun 2020 memerlukan peningkatan sebesar 62,04 % dan Nilai Omset Usaha Mikro Kabupaten Belitung Tahun 2020 juga memerlukan peningkatan sebesar 29,86 %.

Pencapaian kinerja sasaran meningkatnya pengembangan koperasi dan usaha mikro dicapai melalui strategi meningkatkan pengembangan koperasi dan usaha mikro, dengan 2 (dua) arah kebijakan, yaitu 1) meningkatkan pembinaan, pengembangan dan pengawasan kelembagaan koperasi menuju koperasi mandiri; dan 2) meningkatkan pembinaan terhadap usaha mikro.

Pada tahun 2020, arah kebijakan meningkatkan pembinaan, pengembangan dan pengawasan kelembagaan koperasi menuju koperasi mandiri, yang merupakan tanggung jawab Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Tenaga Kerja Kabupaten Belitung dilaksanakan melalui program pembinaan koperasi yang bertujuan untuk meningkatkan pembinaan dan mensosialisasikan peraturan perundangan-undangan yang berlaku serta memberikan pengetahuan managerial yang baik dan benar kepada Koperasi dan UMKM sehingga akan tercipta Koperasi dan UMKM yang berkualitas dan mandiri. Adap 3 (tiga) kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu berupa Pengawasan Koperasi Aktif, Pembinaan Kelembagaan Koperasi dan Pelatihan Kelembagaan Koperasi.

Pada tahun 2020, tercatat sebanyak 189 koperasi yang ada di Kabupaten Belitung. Dari jumlah tersebut, sebanyak 135 koperasi merupakan koperasi aktif dan 54 koperasi tidak aktif. Berikut disajikan Keragaan Koperasi Kabupaten Belitung Tahun 2020:



Tabel 2.122
Data Keragaan Koperasi Kabupaten Belitung Tahun 2020

NO	JENIS KOPERASI	STATUS		TOTAL	ANGGOTA			RAT	MANAGER			KARYAWAN			MODAL		MODAL LUAR	VOLUME USAHA	SHU
		AKTIF	TIDAK		L	P	JMLH		L	P	JMLH	L	P	JMLH	SENDIRI				
1	KUD	9	6	15	2.905	650	3.555	2	2	-	2	24	16	40	333.355	750.000	2.108.998	158.228	
2	KPRI	17	13	30	1.144	345	1.489	4	-	1	1	4	14	18	2.938.766	233.207	3.910.758	1.344.353	
3	KOPKAR	11	7	18	1.944	121	2.065	4	2	1	3	21	8	29	1.575.711	350.000	17.722.789	1826.374	
4	KOP TNI / ABRI	4	2	6	690	93	783	4	-	-	-	8	2	10	2.180.395	17.632	1.995.395	216.626	
5	KOP. WANITA	7	-	7	-	367	367	2	-	-	-	-	-	-	175.579	80.000	280.215	59.328	
6	KOP. PEMUDA	-	3	3	63	20	83	-	-	-	-	-	-	-	2.963	-	4.883	493	
7	KSP	11	-	11	755	330	1.085	6	7	-	7	50	23	73	1.062.498	1.640.000	5.668.089	326.398	
8	KOPONTREN	2	-	2	135	9	144	-	-	-	-	-	-	-	13.180	300.000	20.000	14.500	
9	LAINNYA	43	22	65	3.545	422	3.967	11	5	-	5	16	-	16	4.030.628	4.613.391	375.010	3.056.455	
10	KSU	31	-	31	2.303	388	2.691	15	3	-	3	19	5	24	6.784.499	4.423.610	32.137.980	3.210.636	
11	PKPRI	-	1	1	25	-	25	-	-	-	-	-	-	-	61.174	-	-	-	
JUMLAH		135	54	189	13.509	2.745	16.254	48	19	2	21	142	68	210	19.158.748	12.407.840	78.302.227	10.213.391	

Sumber : Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Tenaga Kerja Kabupaten Belitung 2021

Penambahan jumlah koperasi aktif ternyata juga diimbangi dengan meningkatnya jumlah anggota koperasi. Pada tahun 2020, jumlah anggota koperasi sebanyak 16.254 orang, atau bertambah sebanyak 202 orang dari semula 16.052 di tahun 2019. Hal ini terjadi sebagai akibat penurunan aktivitas dalam mengelola dan melayani anggota/masyarakat pada sektor usaha simpan pinjam, sembako, dan jasa lainnya. Berikut ini perkembangan jumlah anggota koperasi tahun 2014-2020.

Tabel 2.118. : Data Perkembangan Jumlah Anggota Koperasi Tahun 2014-2020

NO	Tahun	Jumlah Anggota Koperasi (Orang)
1.	2014	16.395
2.	2015	16.594
3.	2016	16.754
4.	2017	15.151
5.	2018	15.815
6.	2019	16.052
7.	2020	16.254

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Tenaga Kerja Kabupaten Belitung 2021

Volume usaha koperasi pada tahun 2020 sebesar Rp 78.302.227,00. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan koperasi belum terlalu baik meski pun terdapat dukungan dari pemerintah daerah, namun peran aktif masyarakat masih belum optimal untuk berpartisipasi dalam mendukung kegiatan usaha koperasi

Pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah tengah menggalakkan Reformasi Koperasi yang dapat dicapai melalui tiga upaya, yaitu rehabilitasi, reorientasi dan pengembangan usaha. Salah satu tindakan nyata dari rehabilitasi adalah pemutakhiran data koperasi dengan cara pembekuan dan pembubaran koperasi dengan *Online Base Data System* sehingga koperasi mempunyai Nomor Induk Koperasi (NIK) serta membangun Sistem Administrasi Badan Hukum Koperasi secara online untuk mempermudah pendirian Badan Hukum Koperasi.

Sementara arah kebijakan meningkatkan pembinaan terhadap usaha mikro dilaksanakan melalui Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif dan Usaha Mikro (KUM). Tujuan program ini untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan koperasi dan UMKM dalam rangka pengembangan usaha dan keikutsertaan dalam *event-event* pameran baik regional maupun internasional. Ada 6 (enam) kegiatan yang dilaksanakan, yaitu; (1) Pelatihan Perencanaan Usaha; (2) Pembinaan dan Pendampingan Usaha Mikro; (3) Sosialisasi IUMK, PIRT, dan Halal Bagi UKM; (4) Pelatihan Kewirausahaan; (5) Sertifikasi Halal bagi Usaha Mikro; dan (6) Pembangunan Tempat Parkir PLUT.



Penambahan jumlah Usaha Mikro Kecil Menengah Pada tahun 2020, jumlah anggota koperasi sebanyak 21.383 orang, atau bertambah sebanyak 2.345 orang dari semula 19.038 di tahun 2019. Usaha mikro kecil menengah di Kabupaten Belitung berjumlah 19.038 usaha, yang terdiri dari 18.305 usaha mikro, 670 usaha kecil dan 63 usaha menengah, yang tersebar di 5 (lima) kecamatan. Berikut tersaji jumlah usaha mikro kecil menengah (UMKM) Kabupaten Belitung.

Tabel 2.123
Jumlah Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Kabupaten Belitung Tahun 2020

No	Kecamatan	SEKTOR PERDAGANGAN						
		GENDER			JML	KUALIFIKASI		
		LK	PR	Usaha Mikro		Usaha Kecil	Usaha Menengah	Jumlah UMKM
1	Tanjungpandan	1.716	2.117	3.833	3.635	180	18	3.833
2	Sijuk	750	437	1.187	1.127	59	1	1.187
3	Badau	300	223	623	514	9	-	523
4	Membalong	447	188	635	614	21	-	635
5	Selat Nasik	204	100	304	295	9	-	304
JUMLAH		3.417	3.065	6.482	6.185	278	19	6.482

No	Kecamatan	SEKTOR JASA						
		GENDER			JML	KUALIFIKASI		
		LK	PR	Usaha Mikro		Usaha Kecil	Usaha Menengah	Jumlah UMKM
1	Tanjungpandan	759	307	1.066	953	113	-	1.066
2	Sijuk	584	117	701	605	96	-	701
3	Badau	68	20	88	80	8	-	88
4	Membalong	171	33	204	182	22	-	204
5	Selat Nasik	90	2	92	75	17	-	92
JUMLAH		1.672	479	2.151	1.895	256	-	2.151

No	Kecamatan	SEKTOR INDUSTRI						
		GENDER			JML	KUALIFIKASI		
		LK	PR	Usaha Mikro		Usaha Kecil	Usaha Menengah	Jumlah UMKM
1	Tanjungpandan	677	1.401	2.078	2.011	30	37	2.076
2	Sijuk	364	465	829	813	13	3	829
3	Badau	192	157	349	327	18	4	349
4	Membalong	465	299	764	763	1	-	764
5	Selat Nasik	184	123	307	307	-	-	307
JUMLAH		1.882	2.445	4.327	4.221	62	44	4.327

No	Kecamatan	SEKTOR PERTANIAN/ PETERNAKAN, KEHUTANAN/PERIKANAN						
		GENDER			JML	KUALIFIKASI		
		LK	PR	Usaha Mikro		Usaha Kecil	Usaha Menengah	Jumlah UMKM
1	Tanjungpandan	441	63	504	455	49	-	504
2	Sijuk	2.483	288	2.771	2.642	129	-	2.771
3	Badau	139	30	169	155	14	-	169
4	Membalong	4.491	166	4.657	4.623	34	-	4.657
5	Selat Nasik	314	1	315	315	-	-	315
JUMLAH		7.868	548	8.415	8.190	226	-	8.416

No	Kecamatan	SEKTOR PERTAMBANGAN/ PENGGALIAN						
		GENDER			JML	KUALIFIKASI		
		LK	PR	Usaha Mikro		Usaha Kecil	Usaha Menengah	Jumlah UMKM
1	Tanjungpandan	-	-	-	-	-	-	-
2	Sijuk	-	-	-	-	-	-	-
3	Badau	-	-	-	-	-	-	-



4	Membalong	12	-	12	12	-	-	12
5	Selat Nasik	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH		12	-	12	12	-	-	12

No	Kecamatan	Usaha Mikro		Usaha Kecil		Usaha Menengah		Jumlah UMKM	
		2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020
1	Tanjungpandan	5.562	7.066	276	372	55	55	5.893	7.481
2	Sijuk	4.913	5.187	248	297	4	4	5.165	5.488
3	Badau	905	1.076	48	49	4	4	957	1.129
4	Membalong	6.125	6.194	72	78	-	0	6.197	6.272
5	Selat Nasik	800	992	26	26	-	0	826	1.018
JUMLAH		18.305	20.515	670	822	63	63	19.038	21.383

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Tenaga Kerja Kabupaten Belitung 2021

Faktor pendukung:

- ❖ Berkembangnya koperasi dan usaha mikro
- ❖ Meningkatnya Volume Usaha Koperasi.
- ❖ Penyerapan Tenaga Kerja dan Kompetensi Pencari Kerja

Faktor penghambat :

Adapun permasalahan yang dihadapi dalam meningkatkan pengembangan koperasi dan usaha mikro yaitu sebagai berikut :

- ➔ Urusan Koperasi, Usaha Kecil Menengah, menghadapi permasalahan :
 - ❖ Belum optimalnya promosi produk usaha kecil menengah dan penguatan jaringan pemasaran;
 - ❖ Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Manusia pengelola koperasi dan usaha kecil menengah masih rendah;
 - ❖ Akses permodalan belum optimal;
 - ❖ Pandemi Covid 19 yang terjadi tahun 2020 mempengaruhi kinerja pencapaian program dan kegiatan yang telah direncanakan.
- ➔ Urusan Usaha Perdagangan, menghadapi permasalahan :
 - ❖ Keterbatasan Sumber Daya Aparatur, sarana dan prasarana pelayanan kemitrologian dan perdagangan;
 - ❖ Belum optimalnya pelaksanaan pengawasan peredaran barang dan jasa;
 - ❖ Belum optimalnya perlindungan konsumen;
 - ❖ Belum optimalnya kapasitas kelembagaan pelayanan kemitrologian.

Setelah memperhatikan faktor pendukung dan penghambat tersebut, maka untuk menjaga capaian kinerja sasaran dimasa yang akan datang, upaya peningkatannya sebagai berikut:

- ⌘ koperasi hendaknya tidak terbatas di bidang simpan pinjam saja, tapi juga lebih bersifat produktif dan merambah berbagai sektor, terutama sektor unggulan daerah, seperti pariwisata dan pemanfaatan potensi sumberdaya lokal, sehingga nantinya dapat memberi multiplier effect terhadap perekonomian di Kabupaten Belitung
- ⌘ peningkatan kualitas dan produktivitas koperasi.
- ⌘ mengoptimalkan pelaksanaan pengawasan peredaran barang dan jasa.
- ⌘ mengoptimalkan perlindungan konsumen.
- ⌘ mengoptimalkan kapasitas kelembagaan pelayanan kemitrologian.



Koperasi dan Usaha Mikro memegang peranan penting dalam meningkatkan perekonomian daerah. Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro terus dilakukan pemerintah Kabupaten Belitung, antara lain melalui program Peningkatan Akses Permodalan dan program Pemasaran Produk Usaha Koperasi dan Usaha Mikro.

Realisasi keuangan program penunjang sasaran meningkatnya pengembangan koperasi dan usaha mikro dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.124
Realisasi Keuangan Program penunjang Sasaran Meningkatnya Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro

No	Program	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%
1.	Pengembangan dan pemberdayaan usaha mikro	659.150.000,00	645.593.000,00	97,94
2.	Pengembangan koperasi	323.580.000,00	322.205.000,00	99,58
3.	Pemasaran produk usaha koperasi dan usaha mikro	538.165.000,00	352.793.733,00	65,55
4.	Pembinaan dan pengembangan pasar	431.000.000,00	400.248.860,00	92,87

Sehingga untuk sasaran Meningkatnya Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro dengan rata-rata capaian 95,04% dengan persentase realisasi anggaran 88,16% maka terdapat efektifitas dan efisiensi 11,84%.

SASARAN 11 : Meningkatnya Investasi

Investasi sangat dibutuhkan untuk menunjang pertumbuhan ekonomi, maka perlu perbaikan kecepatan pelayanan dan kemudahan berusaha. Capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Investasi” merupakan salah satu indikator kinerja utama RPJMD dengan indikator Nilai Investasi dengan target Rp 1.780.878.000.000,00. Berikut realisasi dan capaian indikator sasaran meningkatnya investasi Kabupaten Belitung Tahun 2020.

Tabel 2.125
Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Investasi

No	Indikator kinerja	Satuan	Kondisi Awal RPJMD 2018	Target	2020		Kategori	Akhir RPJMD 2023 Target
					Realisasi	Capaian (%)		
1	Nilai Investasi (juta rupiah)	Juta Rupiah	981.694	1.780.878	2.171.376,1	121,93	SB	5.023.529

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa realisasi indikator sasaran meningkatnya investasi yaitu nilai investasi tahun 2020 sebesar Rp 2.171.376.100.000,00 dengan capaian sebesar 121,93 % atau berkategori SANGAT BERHASIL. Dibandingkan dengan target akhir RPJMD nilai investasi belum mencapai target, sehingga perlu peningkatan nilai investasi sebesar 56,78 %.

Pencapaian kinerja sasaran meningkatnya investasi dicapai melalui strategi meningkatkan tata kelola penanaman modal, perizinan, perdagangan dan industri, dengan 6 (enam) arah kebijakan yaitu 1) meningkatkan promosi, kerjasama dan iklim investasi yang kondusif, 2) meningkatkan pelayanan perizinan dan non perizinan berbasis teknologi informasi, 3) meningkatkan perencanaan, pengendalian dan pemantauan pelaksanaan investasi daerah, 4) penataan peruntukan kawasan industri, 5) menumbuhkan dan mengembangkan serta meningkatkan produktivitas industri kecil menengah berbasis potensi daerah yang mendukung kepariwisataan, dan 6) menumbuhkan sentra-sentra industri kecil berbasis potensi daerah yang mendukung kepariwisataan.

Pada tahun 2020, arah kebijakan meningkatkan promosi, kerjasama dan iklim investasi yang kondusif dilaksanakan melalui program promosi dan iklim investasi dengan 4 (empat) kegiatan yaitu Kegiatan



Penyelenggaraan pameran investasi, Kegiatan Publikasi dan sosialisasi investasi dan penanaman modal, Kegiatan Pengembangan iklim penanaman modal dan Kegiatan Pemetaan potensi investasi.

Arah kebijakan meningkatkan pelayanan perizinan dan non perizinan berbasis teknologi informasi tahun 2020 dilaksanakan melalui program pelayanan perizinan dan non perizinan dengan 4 (empat) kegiatan yaitu Kegiatan Pengadaan Material Pendukung Perizinan, Kegiatan Monitoring dan evaluasi perizinan, Kegiatan Sosialisasi Perizinan Online (OSS) dan Kegiatan Pengelolaan administrasi KEK Tanjung Kelayang.

Pelayanan perizinan dan non perizinan menjadi tanggung jawab Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian Kabupaten Belitung dengan jumlah izin yang dikeluarkan sebagai berikut :

NO	JENIS IZIN	JUMLAH IZIN	
		TAHUN 2019	TAHUN 2020
1	Izin Mendirikan Bangunan	246	250
2	Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	2	0
3	BPKP	34	0
4	Izin Hiburan	15	8
5	Izin Lingkungan	8	33
6	Izin Lokasi	2	3
7	Izin Operasional - Klinik	1	5
8	IPAL	3	1
9	ITO	13	7
10	IUJK	5	0
11	IUP-B	1	0
12	LB3	9	9
13	PF	4	0
14	PIRT	113	33
15	PNF	15	3
16	SIA	4	5
17	SIKFM	1	0
18	SIKOT	1	0
19	SIKPM	5	4
20	SIKR	5	3
21	SIKTGz	10	4
22	SIKTTD	1	0
23	SIKTW	1	0
24	SIO-PKMS	7	2
25	SIPA	17	16
26	SIP-ATLM	6	7
27	Surat Izin Praktek Bidan	34	58
28	Surat Izin Praktek Dokter	128	63
29	SIPE	2	0
30	SIPF	3	2
31	Surat Izin Praktek Perawat	133	97
32	SIPTGM	7	2
33	SIPTS	11	0
34	SIPTTK	21	27
35	Surat Izin tempat Usaha	121	0
36	SITU Perubahan	6	0
37	Surat Pernyataan PL (SPPL)	187	66
38	Surat Tanda Daftar Budidaya Hortikultura	1	0
39	Tanda Daftar Gudang (TDG)	11	15
40	Validasi Tanda Daftar Gudang	1	0
41	Validasi Izin Lingkungan	2	1
42	Validasi Izin Usaha Jasa Konstruksi	61	68
43	Validasi Izin Koperasi Simpan Pinjam	1	0
44	Validasi Izin Usaha Perkebunan	1	1
45	Validasi Surat Izin Usaha Perdagangan	11	0
46	Validasi TD Budidaya Ikan Kecil	1	0
47	Validasi TDKP	78	3
48	Validasi Tanda Daftar Usaha Pariwisata	30	28
49	Validasi TDU PHP	2	0
Jumlah		1382	824



Arah kebijakan meningkatkan perencanaan, pengendalian dan pemantauan pelaksanaan investasi daerah pada tahun 2020 dilaksanakan melalui program Pengendalian dan pengawasan investasi dengan kegiatan Pengendalian dan pelaksanaan penanaman modal.

Arah kebijakan penataan peruntukan kawasan industri tahun 2020 dilaksanakan melalui program penataan struktur industri dengan kegiatan diseminasi bidang perindustrian.

Arah kebijakan menumbuhkan dan mengembangkan serta meningkatkan produktivitas industri kecil menengah berbasis potensi daerah yang mendukung kepariwisataan tahun 2020 dilaksanakan melalui program pengembangan industri kecil dan menengah dengan 4 (empat) kegiatan yang terdiri dari kegiatan sertifikat pendaftaran HKI produk IKM, kegiatan Pembinaan dan promosi industri kerajinan, kegiatan Pengembangan industri kerajinan keramik dan kegiatan Monev industri kecil dan menengah.

Arah kebijakan menumbuhkan sentra-sentra industri kecil berbasis potensi daerah yang mendukung kepariwisataan tahun 2020 dilaksanakan melalui program pengembangan sentra-sentra industri potensial dengan kegiatan bimbingan dan penyuluhan IKM, kegiatan Pengadaan peralatan sentra IKM dan kegiatan Pengadaan peralatan sentra industri.

Berikut tersaji tabel perkembangan investasi PMA dan PMDN per Triwulan tahun 2020.

**Perkembangan Realisasi Investasi Berdasarkan Kabupaten – Kota Per Triwulan
Triwulan 1 s/d Triwulan 3 Tahun 2020**

PMA	2020	
	Proyek	Investasi (US\$)
Triwulan 1	25	6.153,1
Triwulan 2	15	6.046,3
Triwulan 3	108	886,4

Sumber : Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian, 13 Januari 2021

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa Perkembangan Realisasi Investasi Penanaman Modal Asing (PMA) pada Triwulan 1 sebanyak 25 proyek dengan nilai investasi sebesar US\$ 6.153,1, pada Triwulan 2 sebanyak 15 proyek dengan nilai investasi sebesar US\$ 6.046,3, dan pada Triwulan 3 sebanyak 108 proyek dengan nilai investasi US\$ 886,4.

**Perkembangan Realisasi Investasi Berdasarkan Kabupaten – Kota Per Triwulan
Triwulan 1 s/d Triwulan 3 Tahun 2020**

PMDN	2020	
	Proyek	Investasi (Rp. Juta)
Triwulan 1	63	195.149,8
Triwulan 2	54	127.278,8
Triwulan 3	121	47.948,0

Sumber : Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian, 13 Januari 2021

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa Perkembangan Realisasi investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) pada Triwulan 1 sebanyak 63 proyek dengan nilai investasi sebesar Rp. 195.149.800.000,00, pada Triwulan 2 sebanyak 55 proyek dengan nilai investasi sebesar Rp. 127.278.800.000,00, dan pada Triwulan 3 sebanyak 121 proyek dengan nilai investasi Rp. 47.948.000.000,00

Faktor pendukung:

- ❖ Tingginya dukungan pemerintah daerah dalam menjaring investor yang menanamkan usahanya di Kabupaten Belitung, hal ini dibuktikan dengan berjalannya program KERISI (Kios, Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Terintegrasi) yang menjadi tanggungjawab Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian Kabupaten Belitung untuk mempermudah pelayanan informasi perizinan investasi menyasar sampai dengan seluruh desa di Kabupaten Belitung;



❖ Letak geografis Kabupaten Belitung yang strategis.

Faktor penghambat :

- ❖ Belum tersebarannya investasi ke seluruh Kabupaten Belitung;
- ❖ Sektor/lapangan usaha yang diminati investor untuk menanamkan usahanya banyak berada pada sektor tersier;
- ❖ Masih rendahnya kesadaran perusahaan untuk menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM);
- ❖ Penyelesaian permasalahan yang dihadapi perusahaan PMA/PMDN di Kabupaten Belitung masih belum optimal disebabkan ada beberapa permasalahan yang tidak dapat diselesaikan disebabkan tidak adanya kewenangan Tim *Task Force* untuk menyelesaikan masalah tersebut.
- ❖ Pandemi Covid 19 yang terjadi sejak tahun 2020 mempengaruhi kinerja pencapaian program dan kegiatan yang telah direncanakan

Setelah memperhatikan faktor pendukung dan penghambat tersebut, maka untuk menjaga capaian kinerja sasaran dimasa yang akan datang, upaya peningkatannya sebagai berikut:

- ⌘ Mengembangkan potensi dan peluang penanaman modal dengan melibatkan seluruh stake holder
- ⌘ Memberikan kemudahan berinvestasi di kabupaten belitung dengan meningkatkan kepastian hukum dan penyederhanaan prosedur perizinan dan non perizinan bagi calon investor (*Ease of Doing Business*)
- ⌘ Meningkatkan efektivitas strategi dan upaya promosi investasi yang lebih efisien dan efektif guna mendorong pesebaran investasi di Kabupaten dengan mempertimbangkan karakter dan kondisi geografis daerah
- ⌘ Menciptakan iklim investasi dan iklim usaha yang kondusif bagi pelaku usaha dan investor dengan melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan fasilitasi penanganan permasalahan investasi bagi perusahaan PMA/PMD

Sasaran strategi meningkatnya investasi didukung oleh 5 (lima) program yaitu Program Peningkatan promosi dan iklim investasi, Program Pelayanan perizinan dan non perizinan, Program Pengendalian dan Pengawasan Investasi, Program Penataan struktur industri, Program Pengembangan industri kecil dan menengah dan Program Pengembangan sentra-sentra industri potensial. Adapun Realisasi anggarannya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.126
Realisasi Keuangan Program penunjang Sasaran Meningkatnya Investasi

No	Program	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%
1.	Peningkatan promosi dan iklim investasi	265.643.000,00	123.909.666,00	46,65
2.	Pelayanan perizinan dan non perizinan	180.283.500,00	152.937.046,00	84,83
3.	Pengendalian dan pengawasan investasi	15.560.000,00	15.451.500,00	99,30
4.	Penataan struktur industri	0,00	0,00	0,00
5.	Pengembangan industri kecil dan menengah	487.623.100,00	327.125.600,00	67,09
6.	Pengembangan sentra-sentra industri potensial	406.583.800,00	402.162.300,00	98,91

Sehingga untuk sasaran Meningkatnya Investasi dengan rata-rata capaian 66,13% dengan persentase realisasi anggaran 75,36% maka terdapat efektifitas dan efisiensi 24,64%.



SASARAN 12 : Meningkatnya Infrastruktur Kewilayahan

Capaian kinerja sasaran “meningkatnya infrastruktur kewilayahan” merupakan salah satu indikator kinerja utama RPJMD dengan indikator Pemenuhan Infrastruktur Kewilayahan dengan target 46,25 %. Berikut realisasi dan Capaian Indikator Sasaran infrastruktur kewilayahan Kabupaten Belitung Tahun 2020.

Tabel 2.127
Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Infrastruktur Kewilayahan

No	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal RPJMD 2018	Target	2020 Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Akhir RPJMD 2023 Target
1	Persentase Pemenuhan Infrastruktur Kewilayaan	Persentase	35,18	46,25	58,12	125,66	SB	64,90

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa realisasi kinerja sasaran meningkatnya infrastuktur kewilayahan yaitu indikator Pemenuhan Infrastruktur Kewilayahan tahun 2019 sebesar 58,12 % dari target sebesar 46,25 %, dengan capaian kinerja sebesar 125,66 % berkategori SANGAT BERHASIL. Dibandingkan dengan target akhir RPJMD perlu peningkatan sebesar 10,45%.

Pencapaian kinerja sasaran meningkatnya infrastruktur kewilayahan dicapai melalui 2 (dua) strategi yaitu 1) meningkatkan aksesibilitas antar wilayah dengan memperhatikan tata ruang wilayah, dan 2) pemenuhan kebutuhan air baku.

Ada 12 (dua belas) arah kebijakan strategi meningkatkan aksesibilitas antar wilayah dengan memperhatikan tata ruang wilayah, yaitu 1) meningkatkan konektivitas antar pulau; 2) mendorong percepatan pembangunan pelabuhan wisata; 3) mendorong percepatan pembangunan infrastuktur marina; 4) meningkatkan penataan kawasan strategis dan kawasan perkotaan; 5) meningkatkan pengelolaan jalan dengan program hibah jalan daerah (PHD); 6) mendorong percepatan pembangunan jembatan juru seberang; 7) meningkatkan jalan non status menjadi jalan kabupaten; 8) meningkatkan pemenuhan penerangan jalan umum yang estetis dan fungsional; 9) meningkatkan pemenuhan kebutuhan lahan pelabuhan dan pembangunan lainnya; 10) meningkatkan pengendalian dan pemanfaatan tata ruang; 11) meningkatkan keselamatan transportasi; dan 12) pemenuhan sarana dan prasarana transportasi publik yang terintegrasi.

Sedangkan arah kebijakan strategi pemenuhan kebutuhan air baku adalah meningkatkan legalitas dan pengelolaan sumber air baku.

Pembangunan sarana dan prasarana wilayah atau infrastruktur direncanakan untuk mendukung pembangunan di Kabupaten Belitung. Ketersediaan fasillitas wilayah/ infrastruktur Kabupaten Belitung meliputi ketersediaan aksesibilitas wilayah, penataan wilayah, ketersediaan air minum, ketersediaan fasilitas listrik dan telepon, fasilitas perdagangan dan jasa serta ketersediaan fasilitas lainnya. Ketersediaan infrastruktur yang memadai merupakan salah satu daya tarik Kabupaten Belitung dalam meningkatkan daya saing daerah.

Berikut realisasi Pemenuhan Infrastruktur Kewilayaan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung Tahun 2019-2020 :



Tabel 2.128
Pemenuhan Infrastruktur Kewilayaan Kabupaten Belitung Tahun 2019-2020

No	Uraian	Realisasi 2019 (%)	Realisasi 2020 (%)
1	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (jalan standar kabupaten)	38,78	88,09
2	Persentase sawah terairi	52,10	54,02
3	Persentase penduduk dengan akses air minum yang aman dan berkelanjutan untuk kebutuhan pokok minimal sehari-hari	78,98	82,22
4	Persentase drainase sekunder dalam kondisi baik	50,57	62,22
5	Persentase jalan lingkungan dalam kondisi baik	12,43	15,87
6	Persentase drainase lingkungan dalam kondisi baik	6,34	66,75
7	Persentase pengolahan air limbah pemukiman	53,88	53,88

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung 2019-2020

Faktor pendukung :

1. Perhubungan

Dalam kegiatan perekonomian Kabupaten Belitung yang merupakan wilayah kepulauan, maka perhubungan mempunyai peranan yang sangat strategis dalam memperlancar arus barang dan jasa dari sentra produksi ke tempat konsumen baik di daerah perkotaan maupun pedesaan. Untuk menjangkau wilayah di Kabupaten Belitung, pada tahun 2019 tersedia ruas jalan dengan rincian sebagai berikut :

- a. Jalan Negara = 106,56 Km;
- b. Jalan Propinsi = 135,16 Km;
- c. Jalan Kabupaten = 666,02 Km.

Program Pengembangan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan mencapai tingkat capaian kinerja Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik sebesar 115,91% yaitu dari target yang direncanakan sebesar 76% pada tahun 2020 terealisasi sebesar 88,09%. Melalui program ini terdapat penambahan 30,94 km jalan kabupaten dalam kondisi baik. Adapun selama tahun 2020, terdapat penambahan 2,9 km jalan yang dilebarkan menurut standar lebar jalan kabupaten.

Untuk mewujudkan pencapaian program Pengembangan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melaksanakan 12 (dua belas) kegiatan, diantaranya adalah:

1. Perencanaan Pembangunan Jalan dan Jembatan
2. Pembangunan Jalan
3. Peningkatan Jalan
4. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Berkala Jalan
5. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan
6. Program Hibah Jalan Daerah (PHJD) Pemeliharaan Jalan PHJD
7. Pengadaan Lahan Untuk Penanganan Jaringan Jalan dan Jembatan
8. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Kebinamargaan
9. Pengadaan Peralatan, Pembekalan dan Laboratorium
10. Pemeliharaan Peralatan Laboratorium
11. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Berkala Jalan (DID Tambahan)
12. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Berkala Jalan (DID Tambahan Priode 2)

Melalui program Pengembangan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, pada tahun 2020 Dinas PUPR berhasil melaksanakan peningkatan jalan sehingga jalan dalam kondisi baik bertambah menjadi **586,70 Km**. Melalui program ini, terdapat **538,69 Km** jalan yang mendapat pemeliharaan rutin. Meskipun kegiatan yang didanai oleh DAK Reguler dan Penugasan mendapat refocusing dari pemerintah pusat namun Dinas PUPR melakukan strategi untuk mendorong pencapaian kinerja jalan kabupaten dengan melakukan pemeliharaan rutin melalui dana PHJD.

Melalui Kegiatan Hibah Jalan Daerah (PHJD) telah terlaksana pemeliharaan rutin jalan sepanjang 100,5 km untuk mendukung pengembangan destinasi pariwisata yaitu KSPN Tanjung Kelayang dan GEOPARK BELITONG. Koridor pertama yaitu Air Mungkui-Mempiuk sedangkan koridor kedua adalah Mempiu-Petikan.

Gambar 3.3. Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan Kabupaten (PHNJD)



Pelebaran Jalan Air Mungkui-Mempiuk



Pelebaran Jalan Mempiu - Petikan

Tabel 2.129
Panjang Jalan Menurut Tingkat Kewenangan Pemerintahan
di Kabupaten Belitung (km) Tahun 2018-2020

Tingkat Kewenangan Pemerintahan	2018	2019	2020
Negara	106,56	106,56	106,56
Provinsi	132,7	135,16	135,16
Kabupaten/Kota	666,02	666,02	666,02
Jumlah	904,65	907,74	907,74

Sumber : BPS (Kabupaten Belitung Dalam Angka 2021)

Tabel 2.126. : Persentase (%) Jalan Berkondisi Baik Tahun 2014-2020

Tahun	Persentase (%) Jalan Kondisi Baik
2014	76,66
2015	79,09
2016	67,69
2017	73,68
2018	76,45
2019	38,78
2020	88,09

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung, Tahun 2019-2020

Belum Optimalnya standar lebar jalan lokal kabupaten (lokal primer maupun lokal sekunder) dikarenakan ketersediaan lahan untuk pembangunan jalan masih amat kurang. Pembangunan Infrastruktur terutama bidang jalan baik itu yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Provinsi, maupun Daerah memerlukan ketersediaan lahan yang cukup. Kesiapan lahan menjadi salah satu readiness criteria agar Pemerintah Pusat melalui dana APBN dapat melaksanakan kegiatannya di daerah. Karena itulah Pemerintah Daerah wajib menyediakan dana untuk kegiatan pengadaan lahan.

Tahun 2020, melalui Dinas PUPR Kabupaten Belitung, Pemerintah Daerah telah menyediakan anggaran untuk penyediaan lahan namun hal ini masih terkendala oleh partisipasi masyarakat dalam pembangunan terutama kesediaan untuk menghibahkan lahannya kepada pemerintah untuk kepentingan umum. Peningkatan kesadaran masyarakat tentu bukan hanya tugas Dinas PUPR selaku dinas teknis yang melaksanakan urusan pekerjaan umum namun juga menjadi tanggungjawab berbagai pihak dalam mendukung pembangunan daerah. Selanjutnya, untuk jalan kabupaten yang lokasinya berada dalam Kawasan Hutan Lindung maupun Produksi, proses pinjam pakai Kawasan hutan menjadi hambatan dalam pelaksanaan pembangunan jalan.



Untuk mengatasi permasalahan ini maka perlu dukungan partisipasi berbagai pihak/stakeholder dalam kegiatan sosialisasi kepada masyarakat terkait kesiapan lahan untuk menunjang pembangunan daerah.

Tabel 2.130
Panjang Jalan Menurut Tingkat Kewenangan dan Jenis Permukaan Jalan di Kabupaten Belitung (km) Tahun 2019-2020

Jenis Permukaan Jalan	2019			2020		
	Jalan Nasional	Jalan Provinsi	Jalan Kabupaten	Jalan Nasional	Jalan Provinsi	Jalan Kabupaten
Aspal	106,56	135,16	638,47	106,56	135,16	627,21
Kerikil	-	-	-	-	-	-
Tanah	-	-	25,45	-	-	38,81
Lainnya	-	-	2,10	-	-	-
Jumlah	106,56	135,16	666,02	106,56	135,16	666,02

Sumber : BPS (Kabupaten Belitung Dalam Angka 2021)

Tabel 2.131
Panjang Jalan Menurut Tingkat Kewenangan dan Kondisi Jalan di Kabupaten Belitung (km) Tahun 2019-2020

Kondisi Jalan	2019			2020		
	Jalan Nasional	Jalan Provinsi	Jalan Kabupaten	Jalan Nasional	Jalan Provinsi	Jalan Kabupaten
Baik	96,77	78,96	555,76	91,75	93,96	580,25
Sedang	9,79	51,60	34,46	13,93	37,94	26,95
Rusak	-	4,60	46,26	0,88	3,26	58,82
Rusak Berat	-	-	29,54	-	-	-
Jumlah	106,56	135,16	666,02	106,56	135,16	666,02

Sumber : BPS (Kabupaten Belitung Dalam Angka 2021)

Tabel 2.132
Panjang Jalan Menurut Tingkat Kewenangan dan Kelas Jalan di Kabupaten Belitung (km) Tahun 2019-2020

Kondisi Jalan	2019			2020		
	Jalan Nasional	Jalan Provinsi	Jalan Kabupaten	Jalan Nasional	Jalan Provinsi	Jalan Kabupaten
Kelas I	-	-	-	-	-	-
Kelas II	-	-	-	106,56	-	-
Kelas III	-	135,16	666,02	-	135,16	666,02
Kelas tidak diperinci	-	-	-	-	-	-
Jumlah	-	135,16	666,02	106,56	135,16	666,02

Sumber : BPS (Kabupaten Belitung Dalam Angka 2021)

Sementara untuk Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi dan Jaringan Pengairan Lanjutan, Realisasi Persentase sawah terairi adalah sebesar **54,02 %** dengan realisasi kinerja sebesar **98,72%** (sangat baik). Adapun rincian luas sawah yang terairi irigasi pada tahun 2020 ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 2.133
Luas sawah yang terairi irigasi

Kecamatan	Luas sawah yang terairi irigasi (Ha)	Luas Irigasi (Ha)
Tanjungpandan	45,05	80,00
Sijuk	4,39	160,00
Membalong	490,12	740,00
Badau	16,89	50,00
Selat Nasik	0	0
Total	556,45	1030,00



Faktor penghambat :

- ❌ Belum optimalnya jaringan jalan bagi pengembangan kawasan pertanian, kawasan perikanan, kawasan pariwisata, kawasan industri, kawasan perdagangan dan jasa;
- ❌ Belum optimalnya jaringan jalan menuju pusat kegiatan pelayanan dasar masyarakat;
- ❌ Belum optimalnya prasarana sumber daya air dan jaringan irigasi, terbatasnya data jaringan Irigasi kabupaten secara spasial berupa data peta daerah irigasi (DI), peta lokasi dan luasan sawah, peta jaringan irigasi baik primer, sekunder maupun tersier. Hal ini dipengaruhi oleh kurangnya SDM di bidang sumber daya air sehingga sulit untuk melakukan pendataan tiap saat. Sementara itu dinas pertanian juga tidak mempunyai data sawah secara spasial.
- ❌ Belum optimalnya jalan menuju kawasan pertumbuhan ekonomi wilayah;
- ❌ Belum optimalnya sarana dan prasarana perhubungan di kawasan perkotaan dan perdesaan;
- ❌ Belum optimalnya fungsi bandara udara, pelabuhan dan angkutan laut sebagai pintu gerbang pertumbuhan ekonomi;
- ❌ Belum Optimalnya standar lebar jalan lokal kabupaten (lokal primer maupun lokal sekunder) dikarenakan ketersediaan lahan untuk pembangunan jalan masih amat kurang. Pembangunan Infrastruktur terutama bidang jalan baik itu yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Provinsi, maupun Daerah memerlukan ketersediaan lahan yang cukup. Kesiapan lahan menjadi salah satu *readiness criteria* agar Pemerintah Pusat melalui dana APBN dapat melaksanakan kegiatannya di daerah. Karena itulah Pemerintah Daerah wajib menyediakan dana untuk kegiatan pengadaan lahan. Tahun 2020, melalui Dinas PUPR Kabupaten Belitung, Pemerintah Daerah telah menyediakan anggaran untuk penyediaan lahan namun hal ini masih terkendala oleh partisipasi masyarakat dalam pembangunan terutama kesediaan untuk menghibahkan lahannya kepada pemerintah untuk kepentingan umum. Peningkatan kesadaran masyarakat tentu bukan hanya tugas Dinas PUPR selaku dinas teknis yang melaksanakan urusan pekerjaan umum namun juga menjadi tanggung jawab berbagai pihak dalam mendukung pembangunan daerah. Selanjutnya, untuk jalan kabupaten yang lokasinya berada dalam Kawasan Hutan Lindung maupun Produksi, proses pinjam pakai Kawasan hutan menjadi hambatan dalam pelaksanaan pembangunan jalan.
- ❌ Belum optimalnya pengelolaan sumber daya air dikarenakan beberapa faktor seperti; yang pertama adalah tumpang tindih kewenangan dalam mengelola sumber daya air antara provinsi dan kabupaten (misal, pengelolaan aliran sungai siburik). Faktor kedua adalah adanya pembangunan (bangunan rumah maupun komersil) dalam kawasan sempa dan sungai maupun pantai. Adapun faktor ketiga adalah status lahan di sekitar danau/air permukaan yang berpotensi menjadi sumber daya air baik untuk pertanian maupun air minum belum terbebas dari permukiman penduduk maupun kawasan pertambangan.
- ❌ Pandemi Covid 19 yang terjadi tahun 2020 mempengaruhi kinerja pencapaian program dan kegiatan yang telah direncanakan.

Setelah memperhatikan faktor pendukung dan penghambat tersebut, maka untuk menjaga capaian kinerja sasaran dimasa yang akan datang, upaya peningkatannya sebagai berikut:

- ⌘ Meningkatkan dan mengoptimalkan jaringan jalan bagi pengembangan kawasan pertanian, kawasan perikanan, kawasan pariwisata, kawasan industri, kawasan perdagangan dan jasa;
- ⌘ Meningkatkan dan mengoptimalkan jaringan jalan menuju pusat kegiatan pelayanan dasar masyarakat, Meningkatkan dan mengoptimalkan prasarana sumber daya air dan jaringan irigasi, Tingginya komitmen pemerintah pusat melalui DAK Penugasan tahun 2020 untuk kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi dan kemudian melalui dana DID Tambahan dalam rangka mendukung ketahanan pangan yang dilaksanakan pada triwulan keempat tahun 2020.
- ⌘ Mengembangkan pembangunan jalan baru menuju kawasan pertumbuhan ekonomi wilayah;

- ⌘ Meningkatkan sarana dan prasarana perhubungan di kawasan perkotaan dan perdesaan;



Program BETARE (Program Belitung Terang Benderang)

BETARE sendiri merupakan singkatan dari Belitung Terang Benderang. Melalui program ini Dinas Perhubungan Kabupaten Belitung memfasilitasi lampu jalan dengan jenis LED berbasis *smart system*. Tahun 2019 Pemkab Belitung telah memasang 60 tiang lampu jalan dengan 2 lampu di masing-masing tiang. Lampu-lampu ini telah dipasang mulai dari simpang Buluh Tumbang

hingga ke depan Majid jamik Al-Mabrur Tanjungpandan, tahun depan akan memasang 500 titik lampu. Pada tahun 2020

Penerangan Jalan Umum Median 120 Watt (*smart system*) 120 titik yang dipasang pada 60 tiang double ornament sepanjang Jl. Sudirman (total jarak lebih kurang 2,1 Km dari Sp. Empat terminal Terpadu s.d. Sp. Lima Masjid Al. Mabrur, Kelurahan Kota). Penerangan jalan umum kolektor 90 watt sebanyak 557 titik yang dipasang tersebar di 4 (empat) kecamatan di lingkup Kabupaten Belitung, Penerangan Jalan Umum Lingkungan 60 Watt dan 40 Watt sebanyak 215 titik yang dipasang tersebar di semua kecamatan Kabupaten Belitung. Penerangan Jalan Umum Vital Area/ Flood light sebanyak 42 titik dan lampu untuk jembatan sebanyak 224 titik. Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum eksisting terpasang sebanyak 2.785 titik pada tahun 2019 dan 3.492 titik pada tahun 2020 serta melakukan perbaikan-perbaikan rutin berkala.

- ⌘ Mengoptimalkan fungsi bandara udara, pelabuhan dan angkutan laut sebagai pintu gerbang pertumbuhan ekonomi;
- ⌘ Meningkatkan dukungan partisipasi berbagai pihak/stakeholder dalam kegiatan sosialisasi kepada masyarakat terkait kesiapan lahan untuk menunjang pembangunan daerah;
- ⌘ Untuk pemasalahan tumpang tindih kewenangan dilakukan dengan cara meningkatkan koordinasi antara Pemerintah Daerah, Provinsi dan Pusat dalam penanganan terhadap sumberdaya air baik seperti sungai siburik. Adapun status lahan di sekitar danau/air permukaan yang berpotensi menjadi sumber daya air hendaknya dilakukan pemetaan dan inventarisasi awal oleh OPD terkait seperti bagian pemerintahan berkoordinasi dengan pemerintahan desa/kecamatan dan kantor ATR tingkat kabupaten untuk mengamankan kawasan-kawasan yang memiliki dampak terhadap hajat hidup orang banyak dan untuk pengembangan kawasan di waktu mendatang.

Tabel 2.134
Realisasi Keuangan Program penunjang Sasaran Meningkatnya Infrastruktur Kewilayahan

No	Program	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%
1.	Pengembangan dan pemeliharaan jalan dan jembatan	64.617.716.500,00	63.392.641.868,00	98,10
2.	Peningkatan dan pengembangan turap/ talud/ brojong	675.000.000,00	673.048.000,00	99,71
3.	Pengembangan dan pengelolaan jaringan drainase sekunder	2.505.000.000,00	2.496.187.580,00	99,65
4.	Perencanaan tata ruang	37.875.850,00	35.000.000,00	92,41
5.	Pemanfaatan dan pengendalian tata ruang	72.250.000,00	51.731.000,00	71,60
6.	Peningkatan sarana dan prasarana keselamatan transportasi	11.684.326.000,00	11.280.341.454,00	96,54
7.	Pengendalian, pengawasan dan evaluasi transportasi	1.262.163.000,00	1.132.277.570,00	89,71
8.	Peningkatan pelayanan transportasi darat	1.130.350.000,00	1.035.132.000,00	91,58
9.	Pengembangan transportasi laut	2.520.940.200,00	1.755.611.200,00	69,64
10.	Pengelolaan sumber air baku	125.000.000,00	124.605.000,00	99,68

Sehingga untuk sasaran Meningkatnya Infrastruktur Kewilayahan dengan rata-rata capaian 90,86 %



dengan persentase realisasi anggaran 96,86% maka terdapat efektifitas dan efisiensi 3,14 %.

2.2.4 TUJUAN 4 : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup

Dalam RPJMD Kabupaten Belitung Tahun 2018-2023, upaya pencapaian Tujuan 2 “ meningkatkan kualitas lingkungan hidup “ telah ditetapkan 2 (dua) sasaran dengan 2 (dua) strategi, sebagaimana terinci pada tabel berikut :

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
Tujuan 4 Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Sasaran 13 Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	20. Meningkatkan pengelolaan kualitas lingkungan hidup
	Sasaran 14 Meningkatnya Pengelolaan Sampah	21. Meningkatkan Pengelolaan Persampahan

Perangkat Daerah yang mendukung pencapaian tujuan ini adalah Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

SASARAN 13 : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup berkesinambungan diangkat dari suatu pembangunan yang berdampak terhadap lingkungan, perlu adanya pelestarian dari pemanfaatan sumber daya alam, dan upaya untuk melindungi, memulihkan pemanfaatan ekosistem dan upaya untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya. Kehadiran Pemerintah untuk melindungi masyarakat dari dampak pembangunan.

Capaian kinerja sasaran “Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup” merupakan salah satu indikator kinerja utama RPJMD dengan indikator Indeks kualitas lingkungan hidup dengan target 62,73. Berikut realisasi dan capaian indikator sasaran meningkatnya kualitas lingkungan air, udara dan tutupan lahan Kabupaten Belitung Tahun 2020.

Tabel 2.135
Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup

No	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal RPJMD 2018	2020			Kategori	Akhir RPJMD 2023 Target
				Target	Realisasi	Capaian (%)		
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Skala	58,18	62,73	67,62	107,80	SB	66,10

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa indikator dari sasaran Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup yaitu indeks kualitas lingkungan hidup, telah melampaui target yang telah ditetapkan. Dengan realisasi kinerja sebesar 67,62 melampaui target sebesar 7,80% berkategori SANGAT BERHASIL. Sedangkan untuk target akhir RPJMD melebihi target sebesar 2.30%. Kondisi tersebut perlu dipertahankan untuk terus meningkatkan Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan yang merupakan komponen terpenting dalam meningkatkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di Kabupaten Belitung.

Pencapaian kinerja sasaran meningkatnya kualitas lingkungan air, udara dan tutupan lahan dicapai melalui strategi meningkatkan pengelolaan kualitas lingkungan hidup, dengan arah kebijakan pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Arah kebijakan pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan melalui kegiatan inspeksi penataan lingkungan hidup, terhadap pelaku usaha dan atau kegiatan, sehingga dilakukan pembinaan kepada para pemilik ijin lingkungan agar mentaati segala



ketentuan yang tertera pada ijin lingkungan, dan bagi pemilik ijin lingkungan yang belum taat diberikan surat peringatan dan/atau sanksi administrasi sehingga tingkat ketaatan terhadap persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air, udara dan lahan mengalami peningkatan.

Tidak dapat dipungkiri bahwa besar ataupun kecil pengaruh negatif pelaksanaan kegiatan pembangunan terhadap kualitas lingkungan tetap terjadi. Oleh karena itu, guna mengoptimalkan pencapaian tujuan pembangunan sangat perlu untuk memperhatikan konsep pembangunan yang berwawasan lingkungan dengan memperkecil pengaruh negatif yang timbul sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan sehingga upaya untuk selalu mengindahkan aspek kelestarian lingkungan tetap terjaga. Selain itu, aktivitas kegiatan masyarakat sehari-hari terkait dengan aspek sosial ekonomi juga sangat ikut berperan dalam penciptaan degradasi kualitas lingkungan. Berkaitan dengan permasalahan di atas maka urusan lingkungan hidup berkewajiban untuk menjaga dan tetap mempertahankan kualitas lingkungan. Secara umum indeks kualitas lingkungan hidup Kabupaten Belitung masih belum baik atau berkategori cukup yaitu pada tahun 2020 sebesar 67,62. Berikut hasil kinerja peningkatan kualitas lingkungan hidup Kabupaten Belitung dalam kurun waktu 6 (enam) tahun.

Tabel 2.136
Hasil Kinerja Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung Tahun 2014 – 2020

NO	KINERJA PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP	TAHUN						
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	60,22	60,51	57,44	62,53	58,18	64,82	67,62
2	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air	61,30	62,05	62,05	66,25	57,34	50,00	53,16
3	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Udara	90,39	90,61	80,40	94,97	89,40	96,32	92,63
4	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Tutupan Lahan	36,77	36,77	36,77	35,40	35,40	40,18	46,19

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung Tahun 2020

Kualitas lingkungan hidup Kabupaten Belitung cenderung fluktuatif. Ini terlihat dari hasil pengukuran indeks kualitas air dimana pada tahun 2017 indeks kualitas air sebesar 66,25 terus menurun menjadi 57,34 atau tercemar ringan ditahun 2018, dan kembali menurun pada tahun 2019 menjadi 50,00, dan pada tahun 2020 naik menjadi 53,16. Nilai IKA Tahun 2020 diperoleh dari hasil pemantauan kualitas air sungai di 5 (lima) kecamatan yaitu Kecamatan Tanjungpandan, Kecamatan Sijuk, Kecamatan Badau, Kecamatan Membalong dan Kecamatan Selat Nasik. Dari 57 (lima puluh tujuh) titik pantau terdiri dari 46 (empat puluh enam) sungai dan 11 (sebelas) danau dan/atau Kolong bekas galian, hanya 9 (sembilan) lokasi yang memenuhi baku mutu, sementara pada titik pantau lainnya sebanyak 48 (empat puluh delapan) lokasi termasuk dalam kategori tercemar ringan.

Indeks kualitas air di Kabupaten Belitung Tahun 2020 tidak memenuhi target yang telah ditetapkan, hal ini disebabkan oleh tingginya tingkat pencemaran yaitu adanya limbah rumah tangga (sampah, mandi dan mencuci) dan aktifitas tambang timah illegal yang berpengaruh terhadap kadar Total Solid Suspended (TSS) yang semakin meningkat dan menimbulkan sedimentasi yang tinggi.

Kualitas Udara di Kabupaten Belitung juga cenderung mengalami fluktuatif yang terlihat dari Indeks Kualitas Udara dimana pada tahun 2017 sebesar 94,97 yang selanjutnya menjadi 89,40 pada tahun 2018 dan di tahun 2019 meningkat menjadi 96,32. Kemudian di tahun 2020 turun 3,69 atau 3,98 % menjadi 92,63. Dari hasil pengukuran yang dilakukan kandungan SO₂ sebesar 6,58 dan NO₂ sebesar 5,45 dan dengan kondisi udara tersebut dapat disimpulkan bahwa udara Kabupaten Belitung dikategorikan tidak tercemar atau dapat dikatakan udara memenuhi dari baku mutu yang ditentukan.

Penentuan titik Indeks Kualitas Udara (IKU) berdasarkan kriteria 4 (empat) lokasi antara lain : (1) kepadatan transportasi (untuk kepadatan transportasi dilakukan sampling di lokasi Terminal Tanjungpandan Jl. Jenderal Sudirman); (2) Kepadatan Pemukiman (untuk kepadatan pemukiman dilakukan sampling di lokasi Perumnas Tanjungpandan Jl. Garuda TP); (3) Lokasi Perkantoran (untuk kepadatan perkantoran dilakukan



sampling dilokasi Puskesmas Air Saga); (4) Lokasi Industri (untuk kepadatan industri di lakukan sampling di lokasi Desa Sungai Samak Kecamatan Badau).

Indeks kualitas tutupan lahan diukur dari besarnya tutupan hutan, dimana tutupan hutan di Kabupaten Belitung mengalami penurunan dimana pada tahun 2014 sampai dengan 2016 sebesar 36,77 dan pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 menjadi 35,40 namun di tahun 2019 meningkat menjadi 40,18 dan terus meningkat sebesar 6,01 atau 14,95 % menjadi 46,19 di tahun 2020.

Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) pencapaiannya melebihi target yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan adanya perubahan metode perhitungan IKLH 2020-2024 sesuai dengan Surat Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor S-318/PPKL/SET/REN.0/12/2020 tanggal 4 Desember 2020 Hal Metode Perhitungan IKHL 2020-2024. Berdasarkan surat dimaksud formulasi atau rumusan perhitungan Indeks Kualitas Tutupan Lahan mengalami perubahan dari tutupan hutan menjadi tutupan lahan yang dalam perhitungan adanya penambahan Tutupan Vegetasi Non Hutan berupa belukar, belukar rawa dan Ruang Terbuka Hijau (RTH).

Faktor pendukung :

- ❖ adanya pemantauan pada pengelolaan lingkungan dan perbaikan terhadap kualitas lingkungan di Kabupaten Belitung baik dari institusi maupun non institusi yang terkait;
- ❖ kandungan SO₂ dan NO₂ pada udara memenuhi baku mutu yang ditentukan dari hasil pengukuran, hal ini membuktikan bahwa kondisi lingkungan khususnya udara pada Kabupaten Belitung tidak tercemar;
- ❖ adanya titik sungai yang berubah status dari cemar ke cemar ringan.

Faktor penghambat :

- ❌ banyak terjadi pencemaran di lokasi badan sungai;
- ❌ sungai mengalami kekeringan saat kemarau panjang sehingga air kurang mengalir sempurna;
- ❌ adanya perubahan bentang alam akibat aktifitas penambangan dan perkebunan, sehingga terjadi sedimentasi terhadap sungai;
- ❌ bertambahnya jumlah kendaraan bermotor yang Menurunnya kualitas udara di Kabupaten Belitung;
- ❌ lemahnya sistem penegakan hukum lingkungan;
- ❌ terbatasnya jangkauan pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan yang memberikan dampak kepada lingkungan belum memadai;
- ❌ masih terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana untuk pengendalian pencemaran lingkungan hidup, adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dan perlindungan fungsi lingkungan hidup;
- ❌ pendanaan/anggaran yang tidak sebanding dengan peningkatan permasalahan lingkungan hidup;
- ❌ kurangnya integrasi dan ketersediaan data dan akses informasi bidang lingkungan hidup;
- ❌ belum optimalnya peran serta masyarakat dan pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- ❌ belum optimalnya peran serta masyarakat dan pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- ❌ belum lengkapnya peralatan laboratorium untuk pengujian kualitas air, udara dan tanah;
- ❌ belum optimalnya implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Belitung terkait pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
- ❌ masih terbatasnya jumlah produk hukum daerah di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- ❌ masih rendahnya aspek penataan peraturan lingkungan oleh pelaku usaha, serta meningkatnya konflik antara pelaku usaha dan masyarakat yang terkena dampak.



✘ Pandemi Covid 19 yang terjadi sejak tahun 2020 mempengaruhi kinerja pencapaian program dan kegiatan yang telah direncanakan.

Setelah memperhatikan faktor pendukung dan penghambat tersebut, maka untuk menjaga capaian kinerja sasaran dimasa yang akan datang, upaya peningkatannya sebagai berikut:

- ☞ perlu adanya pelestarian dari pemanfaatan sumber daya alam, dan upaya untuk melindungi, memulihkan pemanfaatan ekosistem dan upaya untuk memerangi perubahan iklim;
- ☞ memperhatikan konsep pembangunan yang berwawasan lingkungan;
- ☞ memperkuat sistem penegakan hukum lingkungan;
- ☞ menambah sumber daya baik sumber daya manusia maupun sarana prasarana yang dapat mendukung pada pelaksanaan pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan yang berdampak kepada lingkungan;
- ☞ menambah dan meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana untuk pengendalian pencemaran lingkungan hidup, adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dan perlindungan fungsi lingkungan hidup;
- ☞ menyiapkan dan meningkatkan ketersediaan data dan akses informasi bidang lingkungan hidup;
- ☞ mengoptimalkan peran serta masyarakat dan pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- ☞ mengoptimalkan dan meningkatkan koordinasi lintas sektoral terkait pengaduan pencemaran dan sengketa lingkungan hidup;
- ☞ meningkatkan dan menambah peralatan laboratorium untuk pengujian kualitas air, udara dan tanah;
- ☞ membuat, menambah dan menetapkan produk hukum daerah yang diperlukan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Tabel 2.137

Realisasi Keuangan Program penunjang Sasaran Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup

No	Program	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%
1.	Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	1.378.798.150,00	1.211.401.323,00	87,86
2.	Pengembangan dan penataan taman	1.859.889.900,00	1.783.720.700,00	95,90

Sehingga untuk sasaran strategis keenam belas dengan capaian 91,88% dengan persentase realisasi anggaran 92,48 % maka terdapat efektifitas dan efisiensi sebesar 7,52%.

SASARAN 14 : Meningkatnya Pengelolaan Sampah

Capaian kinerja sasaran “meningkatnya pengelolaan sampah” merupakan salah satu indikator kinerja utama RPJMD dengan indikator Persentase Cakupan Pelayanan Persampahan dengan target 4,20 %. Berikut Realisasi dan Capaian Indikator Sasaran meningkatnya pengelolaan sampah Kabupaten Belitang Tahun 2020.

Tabel 2.138

Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Pengelolaan Sampah

No	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal RPJMD 2018	Target	2020 Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Akhir RPJMD 2023 Target
1	Persentase Cakupan Pelayanan Persampahan	%	0,79	4,20	15,02	357,62	SB	6,50



Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa realisasi persentase cakupan pelayanan persampahan Tahun 2019 sebesar 15,02 % dengan capaian kinerja sebesar 357,62 % berkategori SANGAT BERHASIL. Dibandingkan dengan target akhir RPJMD, persentase cakupan pelayanan persampahan sudah melampaui target sebesar 231,07 %.

Pencapaian kinerja sasaran meningkatnya pengelolaan sampah dicapai melalui strategi meningkatkan pengelolaan persampahan, dengan 6 (enam) arah kebijakan yaitu 1) meningkatkan ketersediaan kontainer sampah untuk penampungan sampah sementara; 2) meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan; 3) meningkatkan perencanaan pengelolaan persampahan; 4) meningkatkan cakupan pelayanan persampahan; 5) meningkatkan pengolahan TPA berbasis 3R; dan 6) mengurangi penggunaan kemasan plastik sekali pakai di masyarakat.

Arah kebijakan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan tahun 2020 telah terlaksana dengan baik, ini terbukti dengan adanya 16 (empat belas) kelompok masyarakat yang turut berperan aktif dalam pengelolaan sampah 3R, yang semula hanya ditargetkan sebanyak 14 (empat belas) kelompok dengan tingkat capaian sebesar 114,28 %, sehingga mengalami peningkatan sebanyak 2 (dua) kelompok pengelola sampah, yaitu TPS 3R Kecamatan Membalong dan TPS 3R Kecamatan Selat Nasik. Di Tahun 2019 peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan 3R sebanyak 14 kelompok.

Arah kebijakan meningkatkan cakupan pelayanan persampahan tahun 2020 terus diupayakan oleh Pemerintah Kabupaten Belitung melalui Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung. Peningkatan jumlah penduduk mengakibatkan jumlah sampah terus bertambah, dan akan menjadi permasalahan yang besar di masa yang akan datang. Pada saat ini cakupan area pelayanan persampahan di Kabupaten Belitung mengalami peningkatan, yaitu dari target 4,20 % dengan realisasi tahun 2020 sebesar 15,02 % dengan tingkat capaian sebesar 357,61 %, dengan total luas wilayah yang dapat dilayani yaitu 344,5 km² dari luas daratan Kabupaten Belitung seluas 2.293,69 km² atau 15,02 %. Pelayanan persampahan di Kabupaten Belitung pada tahun 2020 mengalami peningkatan cukup tinggi dikarenakan pelayanan persampahan di Kecamatan Tanjungpandan sudah terlayani 80 %. Selain itu didukung dengan terbentuknya Satuan Tugas Laskar Bebas Sampah (Lebah) diwilayah pedesaan diseluruh Kecamatan se Kabupaten Belitung.

Adapun daerah pelayanan sampah yaitu di Kecamatan Tanjungpandan (tujuh kelurahan dan enam desa), sebagian wilayah kecamatan sijuk (Kawasan Wisata), dan Kecamatan Badau (kawasan PLTU Suge).

Berikut tersaji hasil kinerja pengelolaan sampah Kabupaten Belitung selama kurun waktu 7 (tujuh) tahun terakhir.

Tabel 2.139
Hasil Kinerja Pengelolaan Sampah Kabupaten Belitung Tahun 2014 – 2020

NO	Kinerja Pengelolaan Sampah	TAHUN						
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Timbulansampahyang ditangani (Ton/Tahun)	27.718,39	24.166,21	25.269,39	28.984,80	26.092,17	26.092,17	11.679,22
2	Persentase jumlah sampah yang tertangani	68,33%	68,77%	98,52%	80,00%	30,84%	34,03%	44,76 %
3	Jumlah TPS 3R yang ada	5	5	8	10	11	14	16

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa timbulan sampah yang ditangani tahun 2020 sebesar 11.679,22 ton/tahun. Timbulan sampah yang ditangani paling tinggi terjadi pada tahun 2017 yaitu sebesar 28.984,80 ton/tahun, dan paling rendah sebesar 11.679,22 ton/tahun di tahun 2020.

Target persentase (%) jumlah sampah yang ditangani tahun 2020 adalah 40 % dan terealisasi sebesar 44,76 % dengan tingkat capaian sebesar 111,90 %. dihitung berdasarkan Jumlah timbulan sampah terlayani sebesar 11.679,22 Ton/Tahun berbanding dengan jumlah timbulan sampah Kabupaten Belitung sebesar 26.092,97 Ton/Tahun. Dibandingkan tahun 2019 persentase jumlah sampah yang tertangani mengalami

peningkatan sebesar 10,73 % di tahun 2020 dari 34,03 %. Persentase jumlah sampah yang tertangani paling tinggi pada tahun 2016 sebesar 98,52 % dan paling rendah sebesar 30,84 % di tahun 2018.

Jumlah TPS 3R yang ada mengalami peningkatan sebanyak 2 TPS 3R dari 14 TPS 3R tahun 2019 menjadi 16 TPS 3R di tahun 2020. Selama 6 (enam) tahun terakhir, dari tahun ke tahun jumlah TPS 3R terus mengalami peningkatan.

Faktor pendukung:

- ❖ adanya daerah/area pelayanan sampah;
- ❖ adanya pengolahan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) berbasis 3R;
- ❖ adanya pemberian penghargaan yang diberikan kepada desa terbersih maupun terkotor;
- ❖ tersedianya tong sampah warna warni pada sekolah-sekolah;
- ❖ peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah 3R.

Faktor penghambat :

- ❌ Peningkatan jumlah penduduk mengakibatkan jumlah sampah terus bertambah;
- ❌ Meningkatnya volume timbulan sampah per hari;
- ❌ Kurang sadarnya masyarakat akan kebersihan lingkungan, sehingga masih membuang sampah di sembarang tempat;
- ❌ Munculnya tempat pembuangan sampah ilegal;
- ❌ Belum optimalnya sistem pengelolaan sampah di Kabupaten Belitung.
- ❌ Pandemi Covid 19 yang terjadi sejak tahun 2020 mempengaruhi kinerja pencapaian program dan kegiatan yang telah direncanakan.

Setelah memperhatikan faktor pendukung dan penghambat tersebut, maka untuk menjaga capaian kinerja sasaran dimasa yang akan datang, upaya peningkatannya sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan sistem pengelolaan sampah di Kabupaten Belitung.
2. Meningkatnya volume timbulan sampah, terutama di daerah-daerah destinasi wisata menjadi permasalahan serius yang membutuhkan penanganan dengan cepat dan tepat. Oleh karena itu, perlu peningkatan dalam perencanaan dan pengelolaan persampahan

yang diarahkan pada meluaskan cakupan pelayanan persampahan, serta pengolahan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) berbasis 3R dengan melibatkan peran serta masyarakat secara aktif dalam pengelolaan persampahan dan mengurangi penggunaan kemasan plastik sekali pakai di masyarakat.

Hal ini salah satunya diwujudkan dalam Launching Program Pemilahan Sampah Rumah Tangga Berhadiah (RAPIAH) yaitu bantuan Penyediaan Sarana Prasarana Pengelolaan sampah

serta memberikan Penghargaan kepada Kelurahan dan Desa Terbersih maupun Terkotor serta Satgas Lebah Desa Terbaik Tahun 2020.

Kemudian diharapkan ditahun yang akan datang pemerintah akan memberikan Sanksi bagi Desa Terkotor dengan pengurangan pemberian Anggaran dari Kabupaten sebesar 10% dan 10% tersebut akan ditambah bagi Desa Terbersih sebagai *Reward*. Penghargaan yang diberikan kepada Desa Terbersih maupun Terkotor sebagai bentuk Motivasi dari pemerintah, Desa Terbersih Se-Kabupaten Belitung mendapatkan Piagam Penghargaan dan Trophy diantara Desa

Air Pelempang Jaya, Desa Membalong, Desa Gual, Desa Air Seruk dan Desa Badau. Sedangkan Desa



Program inovatif RAPIAH (Program Pemilahan Sampah Berhadiah)



Penghargaan Desa Terbersih dan Desa Terkotor

Terkotor Se-Kabupaten Belitung Mendapatkan Penghargaan berupa alat kebersihan (sapu lidi) diantaranya Desa Air Saga, Desa Tanjung Rusa, Desa Pegantungan, Desa Gersik dan Desa Batu Itam.



3. Pemkab Belitung akan memulai penerapan sanksi bagi setiap orang atau badan usaha yang membuang sampah tidak pada tempatnya, tata cara penerapan sanksi tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 23/20 yang diterbitkan 28 Juni 2019 Efektif pemberlakuan perbup ini dilaksanakan pada awal September 2019 dan selama bulan Agustus 2019 telah dilakukan uji coba dan sosialisasi peraturan bupati itu, penerapan sanksi dapat dilakukan terhadap orang per orang maupun badan usaha. Petugas penyidik PNS kemudian menentukan tingkat kesalahan yang telah dilakukan. Ancaman hukumannya berupa denda maksimal Rp 50 juta serta hukuman pidana selama 3 bulan. Penetapan hukuman pidana dilakukan dalam persidangan yang digelar di pengadilan. Ketentuan pemberian sanksi itu sekaligus tindak lanjut dari Pasal 57 Perda Nomor 5 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum. Penerapan sanksi tersebut diharapkan mampu mendisiplinkan warga dan pengunjung, sekaligus menjaga citra Belitung sebagai salah satu destinasi wisata nasional. Sebagaimana diketahui, kawasan Tanjung Kelayang telah ditetapkan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata.

4. Pembentukan satgas khusus patroli kebersihan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Belitung, program satuan tugas (satgas) khusus patroli kebersihan laskar bersih dari sampah (Lebah). Program ini merupakan salah satu program Bupati dan Wakil Bupati Belitung periode 2018 - 2023. Program ini dibuat untuk melakukan penanganan atau perang terhadap sampah, terutama sampah plastik. Program Lebah ini, sebagian merupakan bantuan oleh CSR perusahaan swasta, sehingga permasalahan sampah, kini bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, namun sudah menjadi tanggung jawab seluruh kalangan masyarakat yang ada di Kabupaten Belitung. Setiap kelurahan ataupun desa juga membentuk satgas ini, Satgas khusus patroli kebersihan itu akan bergerak setiap saat dan mengintensifkan pengangkutan sampah di beberapa lokasi tempat pembuangan sementara sehingga tidak mengalami penumpukan dan menimbulkan bau. Mereka juga akan dilengkapi dengan nomor pengaduan atau nomor koordinasi apabila ada laporan sampah menumpuk maka akan segera mereka angkut. Diharapkan lurah dan kepala di desa di daerah itu untuk mulai menertibkan tempat-tempat pembuangan sampah ilegal yang sering digunakan oleh masyarakat umum membuang sampah secara sembarangan. Setiap desa dan lurah juga akan kami bantu dengan dua buah kotak sampah untuk menanggulangi permasalahan sampah dan program satgas ini. Satgas sampah tersebut dibentuk sebagai bentuk keseriusan pemerintah daerah dalam menjaga lingkungan tetap bersih dan dalam rangka upaya untuk memperoleh penghargaan Adipura pada tahun yang akan datang.



Bupati, Wakil Bupati dan Perwakilan DPRD beserta Tim SATGAS LEBAH

Sebagai komitmen pemerintah diberikan juga penghargaan kepada Satgas Lebah yaitu Satgas Lebah Desa Membalong sebagai Satgas Desa terbaik di Kabupaten Belitung dan Kendaraan Motor Roda Tiga (Tossa) kepada 12 Desa serta Forum HKM pada akhir Tahun 2019.

5. Sosialisasi dan Pemberian pemahaman terus dilakukan oleh OPD terkait, hal ini dilakukan untuk memotivasi semua warga agar membuang sampah pada tempatnya. Seperti halnya pemberian tong sampah warna warni pada sekolah-sekolah yang berada di Kabupaten Belitung. 5 warna dengan berwarna Hijau, Kuning, Merah, Biru, Abu-abu dan hal ini ajarkan kepada Murid-Murid untuk membuang sampah sesuai dengan jenis sampahnya yaitu organik, non organik, B3, kertas dan residu, karena hampir semua sampah dapat didaur ulang baik yang Organik maupun Non Organik. Saatnya untuk

mengenalkan kepada murid-murid sejak dini jenis-jenis tempat sampah tersebut yang di bedakan sehingga dapat bermanfaat bagi terciptanya lingkungan yang sehat, bersih, dan nyaman, dan dapat memotivasi kesadaran seluruh warga dan juga siswa akan berharganya arti sebuah Hidup Sehat. Hal ini sejalan dengan pencapaian yang diterima 3 Sekolah mendapatkan penghargaan Adiwiyata Tingkat Kabupaten Belitung yaitu: SMP Negeri 5 Tanjungpandan, SMP Negeri 7 Tanjungpandan dan SMP Negeri 2 Membalong atas Capaian berupa Penghargaan Adiwiyata Tahun 2020, sedangkan penghargaan Adiwiyata Tingkat Nasional dari Kementerian Lingkungan Hidup diterima oleh SMP Negeri 2 Tanjungpandan yang mewakili Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Tahun 2019.



Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Tanjungpandan menerima penghargaan Adiwiyata di gedung Manggala Wanabakti, Jakarta Pusat



Tabel 2.140 : Realisasi Keuangan Program penunjang Sasaran Meningkatkan Pengelolaan Sampah

No	Program	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%
1.	Peningkatan Pengelolaan Persampahan	8.547.294.500	8.380.151.305,7	98,04

Sehingga untuk sasaran strategis ketujuh belas dengan capaian 98,04 % dengan persentase realisasi anggaran 98,04% maka terdapat efektifitas dan efisiensi sebesar 1,96%.

2.3 AKUNTABILITAS KEUANGAN

Kebijakan umum keuangan/ anggaran RPJMD Kabupaten Belitung tahun 2018 – 2023 diarahkan dalam tiga fungsi utama, yaitu : fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilisasi.:

- Fungsi alokasi, yaitu penganggaran untuk kegiatan pembangunan yang tidak mungkin dilaksanakan oleh masyarakat/swasta karena bersifat publik services seperti penanganan prasarana dasar dan penyediaan infrastruktur;
- Fungsi distribusi, yaitu penganggaran diarahkan untuk pemerataan, keadilan sosial, dan mengurangi kesenjangan, yang antara lain meliputi penanganan masalah infrastruktur dasar dan lainnya;
- Fungsi stabilitasi, yaitu penganggaran diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, perluasan lapangan kerja, dan peningkatan pendapatan masyarakat serta stabilitas keamanan dan ketertiban.

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 2 Tahun 2020 tanggal 29 September 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2020, bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 semula berjumlah Rp. 1.211.349.718.767,00 Berkurang sejumlah Rp. 54.081.562.900,00 sehingga menjadi Rp. 1.157.268.155.866,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan :
 - a. Semula Rp. 1.056.818.587.800,00
 - b. Bertambah/ (berkurang) Rp. 96.645.776.264,00Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp. 960.172.811.536,00
2. Belanja:



- a. Semula Rp. 1.211.349.718.767,00
- b. Bertambah/ (berkurang) Rp. 54.081.562.900,00
Jumlah Belanja setelah Perubahan Rp. 1.157.268.155.867,00
- 3. Pembiayaan:
 - Penerimaan
 - a. Semula Rp. 154.531.130.967,00
 - b. Bertambah/ (berkurang) Rp. 42.564.213.364,00
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp. 197.095.344.331,00
 - Pengeluaran
 - a. Semula Rp. –
 - b. Bertambah/ (berkurang) Rp. –
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan Rp. -
Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan Rp. 197.095.344.331,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah Perubahan Rp. –

2.3.1 Pengelolaan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah merupakan hasil akumulasi dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) , dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari beberapa komponen diantaranya adalah: (1) Pendapatan pajak daerah, (2) Pendapatan retribusi daerah, (3) Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, (4) Lain-lain PAD yang sah. Pendapatan dana perimbangan terdiri dari komponen (1) Dana bagi hasil, (2) Dana alokasi umum dan (3) Dana alokasi khusus. Lain-lain pendapatan yang sah terdiri dari komponen (1) Pendapatan hibah, (2) Pendapatan bagi hasil pajak (3) Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus (4) Bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya (5) Pendapatan Lainnya.

Upaya-upaya efektif dalam penggalan sumber-sumber pendapatan daerah harus terus dilakukan tanpa harus menambah beban bagi masyarakat sehingga nantinya pendapatan daerah tidak lagi harus bergantung pada satu atau dua jenis pajak daerah saja, diversifikasi sumber pendapatan daerah menjadi mutlak dicari agar ketergantungan dan resiko dapat disebar. Pendapatan Daerah dikelompokkan ke dalam Pendapatan Hasil Daerah, Dana Perimbangan dan Lain – Lain Pendapatan Yang Sah yang masing - masing mempunyai fungsi untuk meningkatkan pelayanan baik untuk aparatur maupun pelayanan kepada masyarakat dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.141
Komposisi Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2020

NO.	URAIAN	TAHUN ANGGARAN 2020 SETELAH PERUBAHAN		
		ANGGARAN	REALISASI	%
	Pendapatan	970.146.286.359,00	957.021.589.492,11	98,65
1	Pendapatan Asli Daerah	145.075.360.800,00	162.134.305.440,46	111,76
	Pendapatan Pajak Daerah	67.860.000.000,00	79.316.693.695,41	116,88
	Hasil Retribusi Daerah	7.234.307.500,00	7.399.450.727,00	102,28
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.000.000.000,00	3.928.156.865,21	98,20
	Lain lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	65.981.053.300,00	71.490.004.152,84	108,35
2	Dana Perimbangan	634.413.715.145,00	617.730.480.634,00	97,37
	Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak	44.713.931.551,00	41.443.900.249,00	92,69
	Dana Alokasi Umum	463.002.382.000,00	460.955.998.000,00	99,56
	Dana Alokasi Khusus	126.697.401.594,00	115.330.582.385,00	91,03



3	Lain lain pendapatan daerah yang sah	190.657.210.414,00	177.156.803.417,65	92,92
	Pendapatan Hibah	57.409.794.185,00	55.031.148.187,00	95,86
	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	55.600.000.000,00	45.273.388.864,65	81,43
	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	3.683.200.000,00	3.115.000.000,00	84,57
	Pendapatan Lainnya	73.964.216.229,00	73.737.266.366,00	99,69

2.3.2 Pengelolaan Belanja Daerah

Sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Belitung tahun 2018 - 2023 bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan peningkatan pelayanan publik, pengaturan alokasi belanja diupayakan efisien, efektif dan proporsional. Dalam menentukan Belanja Daerah terdapat tiga elemen penting, yaitu masyarakat, Pemerintah Daerah, dan DPRD, dengan peran fungsinya masing-masing sebagai pelayan masyarakat, sehingga anggaran belanja daerah sebagai perwujudan dari amanat rakyat kepada Pemerintah Daerah dan DPRD dalam meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat. Rencana Belanja Daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja (berorientasi pada hasil). Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan alokasi anggaran. Sedangkan orientasi Belanja Daerah diprioritaskan untuk efektifitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing OPD. Belanja Daerah diarahkan pada peningkatan proporsi belanja untuk kepentingan publik, disamping tetap menjaga eksistensi penyelenggaraan pemerintahan. Dalam penggunaannya, Belanja harus tetap mengedepankan efisiensi dan efektifitas sesuai dengan prioritas dan program-program strategis daerah. Belanja Daerah dikelompokkan ke dalam Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung yang masing-masing mempunyai fungsi untuk meningkatkan pelayanan baik untuk aparatur maupun pelayanan kepada masyarakat dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.142
Komposisi Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2020

NO.	URAIAN	TAHUN ANGGARAN 2020 SETELAH PERUBAHAN		
		ANGGARAN	REALISASI	%
	Belanja	1.167.241.630.689,69	1.032.037.986.516,43	88,42
1	Belanja Tidak Langsung	585.348.535.891,57	520.200.756.357,00	88,87
	Belanja Pegawai	444.216.567.891,57	387.918.506.335,00	87,33
	Belanja Subsidi	1.177.401.000,00	1.049.886.038,00	89,17
	Belanja Hibah	20.830.118.000,00	18.307.203.359,00	87,89
	Belanja Bantuan Sosial	200.000.000,00	0,00	0,00
	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	9.313.410.000,00	9.313.410.000,00	100,00
	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa dan Partai Politik	99.411.039.000,00	99.411.039.000,00	100,00
	Belanja Tidak Terduga	10.200.000.000,00	4.200.711.625,00	41,18
2	Belanja Langsung	581.893.094.798,12	511.837.230.159,43	87,96
	Belanja Pegawai	94.070.327.707,00	86.577.707.844,00	92,04



Belanja Barang dan Jasa	333.667.689.290,12	285.572.170.155,31	85,59
Belanja Modal	154.155.077.801,00	139.687.352.160,12	90,61

2.3.3 Kondisi Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah merupakan transaksi keuangan yang bertujuan untuk menutupi selisih antara pendapatan dan belanja daerah. Adapun kebijakan umum pembiayaan daerah adalah sebagai berikut :

- 1.Peningkatan Manajemen Pembiayaan Daerah dalam rangka akurasi, efisiensi, efektifitas dan profitabilitas;
- 2.Apabila APBD dalam keadaan surplus, kebijakan yang diambil adalah melakukan transfer ke persediaan Kas Daerah dalam bentuk Giro/Deposito, Penyertaan Modal, atau Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun berjalan;
- 3.Apabila APBD dalam keadaan defisit, kebijakan yang diambil adalah memanfaatkan anggaran yang berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun lalu, rasionalisasi belanja, pinjaman daerah, atau memperluas kemitraan.

Pembiayaan Daerah dikelompokkan ke dalam Penerimaan Pembiayaan Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah yang masing-masing mempunyai fungsi untuk meningkatkan pelayanan baik untuk aparaturnya maupun pelayanan kepada masyarakat dengan rincian sebagai berikut ;

Tabel 2.143
Komposisi Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2020

NO.	URAIAN	TAHUN ANGGARAN 2020 SETELAH PERUBAHAN		
		ANGGARAN	REALISASI	%
1	Penerimaan Pembiayaan Daerah	197.095.344.330,69	197.095.344.330,69	100,00
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	197.095.344.330,69	197.095.344.330,69	100,00
2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	0,00	0,00	0,00
	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00
	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00

2.3.4 Capaian Keuangan

Rencana keuangan pendukung 13 sasaran capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Belitung dapat dilihat pada tabel 1.44 berikut :



Tabel 2.144. : Pencapaian Kinerja Sasaran Berdasarkan Realisasi Anggaran 2020

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET 2020	REALISASI 2020	CAPAIAN 2020 (%)	TARGET ANGGARAN 2020	REALISASI ANGGARAN 2020	CAPAIAN 2020 (%)	KETRERANGAN	
MISI I : Meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang berkeadilan												
1. Meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat	1. Indeks Pembangunan Manusia	1. Meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat	1. Indeks Pembangunan Manusia	Skala	71,87	72,51	100,89	-	-	-	-	
			2. Angka Kemiskinan	Persentase	6,85	6,27	109,25	-	-	-	-	
		2. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	3. Angka Harapan Hidup	Tahun	70,6	71,05	100,64	199.910.427.450,00	178.800.231.414,12	89,44	EFEKTIF DAN EFISIEN	
			3. Meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat	4. Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	8,15	8,46	103,80	67.469.044.100,00	62.951.354.453,00	83,55	EFEKTIF DAN EFISIEN
			4. Meningkatkan Daya Beli Masyarakat	5. Pengeluaran per Kapita (dalam ribu rupiah)	Rupiah	13.496	13.554	100,43	23.499.151.140,00	17.264.609.338,00	73,47	EFEKTIF DAN EFISIEN
			5. Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan	6. Status Desa "Maju"	Desa	20	23	115	1.812.552.200,00	1.393.681.017,00	76,89	EFEKTIF DAN EFISIEN
MISI II : Meningkatkan pelayanan birokrasi yang bersih, inovatif, profesional, akuntabel dan transparan												
2. Terwujudnya pelayanan birokrasi yg bersih, inovatif, profesional, akuntabel dan transparan	2. Indeks Reformasi Birokrasi	6. Terwujudnya pelayanan birokrasi yg bersih, inovatif, profesional, akuntabel dan transparan	7. Indeks Reformasi Birokrasi	Skala	B	N/A	-	-	-	-	-	
			7. Terciptanya Birokrasi yang Bersih, Transparan dan Akuntabel	8. Opini BPK	Skala	WTP	N/A	-	5.320.553.893,00	2.847.442.072,00	53,52	EFEKTIF DAN EFISIEN
			8. Terciptanya Birokrasi yang Inovatif dan Profesional	9. Nilai SAKIP Kabupaten Belitung	Skala	B	N/A	-	-	-	-	-
				10. Indeks Profesional ASN	Skala	77	72,86	94,62	4.373.018.255,00	2.584.180.930,00	59,09	EFEKTIF DAN EFISIEN



		9. Birokrasi yang mengedepankan pelayanan masyarakat yang berkualitas	11. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Skala	83	84,80	102,17	13.845.008.084,00	12.351.686.197,00	89,21	EFEKTIF DAN EFISIEN
MISI III : Meningkatkan ekonomi berbasis potensi daerah yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan											
3. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	3. Laju Pertumbuhan Ekonomi	10. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	12. Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persentase	5,63	-2,31	-41,03	-	-	-	-
		11. Meningkatnya pengembangan pariwisata	13. Jumlah kunjungan wisatawan (Domestik dan mancanegara)	Orang	108.000	134.266	124,32	20.665.758.730,00	17.003.964.852,96	82,28	EFEKTIF DAN EFISIEN
		12. Meningkatnya produksi pertanian dan perikanan	14. Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan, Perikanan terhadap PDRB (%)	Persentase	27,31	27,83	101,90	16.126.392.050,00	14.842.864.831,00	92,04	EFEKTIF DAN EFISIEN
		13. Meningkatnya pengembangan koperasi dan usaha mikro	15. Nilai Omset Koperasi (dalam ribu rupiah)	Ribu Rupiah	93.880.774	78.302.227	83,41	1.951.895.00,00	1.720.840.593,00	88,16	EFEKTIF DAN EFISIEN
			16. Nilai Omset Usaha mikro (dalam ribu rupiah)	Ribu Rupiah	1.286.792.500	1.372.650.000	106,67	-	-	-	EFEKTIF DAN EFISIEN
		14. Meningkatnya investasi	17. Nilai Investasi (dalam juta rupiah)	Juta Rupiah	1.780.878	2.171.376,1	121,93	1.355.693.400,00	1.021.586.112,00	75,36	EFEKTIF DAN EFISIEN
		15. Meningkatnya infrastruktur kewilayahan	18. Persentase pemenuhan infrastruktur kewilayahan	Persentase	46,25	58,12	125,66	84.630.621.550,00	81.976.575.672,00	96,86	EFEKTIF DAN EFISIEN
4. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	4. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	16. Meningkatnya Kualitas lingkungan hidup	19. Indeks Kualitas lingkungan hidup	Skala	62,73	67,62	107,80	3.238.688.050,00	2.995.122.023,00	92,48	EFEKTIF DAN EFISIEN
		17. Meningkatnya pengelolaan sampah	20. Persentase Cakupan Pelayanan Persampahan	Persentase	4,20	15,02	357,62	8.547.294.500,00	8.380.151.305,70	98,04	EFEKTIF DAN EFISIEN

The logo of Kabupaten Belitung is a shield-shaped emblem. At the top, a banner reads "KABUPATEN BELITUNG". The central part of the shield features a stylized figure, possibly a bird or a person, with wings spread, set against a background of clouds and a sun. Below the figure is a platform or base. At the bottom of the shield, another banner reads "MAJU TERUS MAWAS DIRI".

**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
(L P P D)
KABUPATEN BELITUNG
TAHUN 2020**

**BAB III
CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN
TUGAS PEMBANTUAN**



BAB III

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

Tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah propinsi kepada kabupaten, atau kota dan/atau desa, serta dari pemerintah kabupaten, atau kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan. Tugas pembantuan diselenggarakan karena tidak semua wewenang dan tugas pemerintahan dapat dilakukan dengan menggunakan asas desentralisasi dan asas dekonsentrasi. Tujuan dari tugas pembantuan adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan umum. Selain itu, tugas pembantuan diberikan untuk memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan, serta membantu penyelenggaraan pemerintahan, dan pengembangan pembangunan bagi daerah dan desa. Implementasi tugas pembantuan dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan daerah, pemerintah membiayai langsung melalui kementerian teknis yang memberikan pendanaan kepada pemerintah daerah melalui dinas teknis di daerah untuk melaksanakan berbagai program dan kegiatan yang ditetapkan oleh pemerintah yang didasarkan oleh usulan dari dinas teknis daerah. Hal ini diberikan atas pertimbangan bahwa tugas pembantuan akan lebih efektif dan efisien apabila dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan tugas pembantuan tersebut akan lebih bersifat sebagai pendorong dan penguat terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah guna mencapai suatu kondisi kinerja yang ditetapkan dalam rencana kerja pemerintah daerah.

Pada tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Belitung tidak ada tugas pembantuan yang diterima dan tugas pembantuan yang diberikan.

3.1 TUGAS PEMBANTUAN PUSAT YANG DILAKSANAKAN OLEH DAERAH KABUPATEN

Pada Tahun Anggaran 2020, Pemerintah Kabupaten Belitung tidak menerima dana tugas pembantuan yang berasal dari Pemerintah Pusat.

3.2 TUGAS PEMBANTUAN PROVINSI YANG DILAKSANAKAN OLEH DAERAH KABUPATEN

Pada Tahun Anggaran 2020, Pemerintah Kabupaten Belitung tidak menerima dana tugas pembantuan yang berasal dari Pemerintah Propinsi Kepulauan Bangka Belitung.



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
(L P P D)
KABUPATEN BELITUNG
TAHUN 2020**

**BAB IV
PENERAPAN DAN PENCAPAIAN
STANDAR PELAYANAN MINIMAL**



BAB IV

PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

4.1 URUSAN PENDIDIKAN

4.1.1 Jenis Pelayanan Dasar

Penyelenggaraan pembangunan bidang pendidikan di Kabupaten Belitung yang secara teknis dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memiliki tugas didalam pengelolaan Pendidikan Dasar, Pendidikan Non Formal dan Kebudayaan. Adapun Standar Pelayanan Minimal yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam urusan Pendidikan sebagaimana diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan terdiri dari:

- a. Pendidikan anak usia dini;
- b. Pendidikan dasar; dan
- c. Pendidikan kesetaraan

4.1.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

Target pencapaian SPM Bidang Pendidikan Tahun 2020 berdasarkan dokumen perencanaan SPM adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1
Target Pencapaian SPM Bidang Pendidikan Tahun 2020

No	Jenis Pelayanan Dasar SPM	Satuan	Target Tahun 2020
1	Pendidikan Anak Usia Dini	Orang	6.146
2	Pendidikan Dasar	Orang	27.969
3	Pendidikan Kesetaraan	Orang	1.113

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2020

4.1.3 Realisasi

Realisasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan tiap jenjang dinyatakan dengan persentase berdasarkan rumusan yang telah dibuat. Persentase Capaian SPM tiap jenjang pada tahun 2020 digambarkan sebagai berikut :



Tabel 4.2
Realisasi Pencapaian SPM Bidang Pendidikan Tahun 2020

No	Jenis Pelayanan Dasar SPM	Target Tahun 2020 (Orang)	Realisasi	
			Orang	%
1	Pendidikan Anak Usia Dini	6.146	7.785	126,67
2	Pendidikan Dasar	27.969	31.394	112,25
3	Pendidikan Kesetaraan	1.113	1.027	92,27

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2020

4.1.4 Alokasi Anggaran

Urusan Pendidikan pada tahun Anggaran 2020 telah dialokasikan Anggaran sebesar Rp.219.155.826.008,00 dengan realisasi sebesar Rp. 187.652.192.685,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.3
Realisasi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Urusan Pendidikan Tahun 2020

No	Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	%
	1	2	3	4=2-3	5
I	Belanja Tidak Langsung	142.292.315.668,00	127.146.869.946,00	15.145.445.722,00	89,36
II	Belanja Langsung	76.863.510.340,00	60.505.322.739,00	16.358.187.601,00	78,72

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2020

Adapun alokasi anggaran per Program untuk pembiayaan pembangunan Daerah di bidang Pendidikan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM digambarkan pada tabel berikut:

Tabel 4.4
Alokasi Anggaran Per Program Tahun 2020

No	Program	Anggaran	Ket
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.474.091.000	APBD
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	908.722.000	APBD
4	Pendidikan Anak Usia Dini	6.608.747.000	APBD
5	Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	50.319.149.100,00	APBD
6	Pendidikan Non Formal	5.160.793.000	APBD
7	Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	120.000.000	APBD
8	Manajemen Pelayanan Pendidikan	238.684.000	APBD
9	Pengembangan Nilai Budaya	4.144.744.720	APBD



10	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah	27.500.000	APBD
11	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Pelaporan dan Informasi Kinerja Perangkat Daerah	2.199.800	APBD
12	Pelayanan pendidikan masyarakat miskin/tidak mampu	3.714.135.000	APBD
Total I+II+III		72.718.765.620	

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2020

4.1.5 Dukungan Personil

Dalam Upaya mendorong pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) perlu didukung oleh sumber daya Manusia yang mumpuni baik dari segi jumlah maupun kompetensi yang dimilikinya. Untuk urusan pendidikan SPM didukung oleh SDM yang ada di Dinas Pendidikan sebanyak 68 orang dan di UPT Sekolah-sekolah sebanyak 1.364 orang. Gambaran Kondisi Sumber daya Manusia yang ada di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kabupaten Belitung adalah sebagai berikut :

Tabel 4.5

Dukungan Personil SPM Urusan Pendidikan Tahun 2020

No	Jumlah Pegawai	Kualifikasi Pendidikan	Pangkat / Gol	Pejabat Struktural	Pejabat Fungsional
1	68	S2 : 3 orang S1 : 35 orang D3 : 7 orang D2 : 1 orang SMA : 22 orang	Gol II : 16 orang Gol III : 40 orang Gol IV : 12 orang	Esl.II : 1 Esl.III : 6 Esl.IV : 18 orang	14 orang

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2020

4.1.6 Permasalahan dan Solusi

Pembangunan bidang pendidikan di Kabupaten Belitung secara umum mengalami perkembangan kearah yang lebih baik. Hal tersebut ditandai dengan meningkatnya pencapaian Rata-rata lama sekolah setiap tahunnya dan untuk Tahun 2020 capaiannya sebesar 8,46 Tahun, meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya 8,41 Tahun. Namun demikian, dalam penyelenggaraannya dengan perubahan yang sangat pesat di bidang pendidikan mengakibatkan adanya permasalahan yang harus dicarikan alternatif pemecahannya. Adapun permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pendidikan adalah sebagai berikut:

Permasalahan

1. Berdasarkan Standar kualifikasi tenaga pendidik secara formal di SD dan SMP belum seluruh guru memenuhi kualifikasi pendidikan S-1 dan bersertifikat pendidik;
2. Pemerataan guru, belum sepenuhnya dapat dilaksanakan khususnya pada jenjang Sekolah Dasar, untuk sekolah-sekolah yang berlokasi didaerah terpencil kebutuhan guru belum sepenuhnya terpenuhi;
3. Standar Kompetensi tenaga Pendidik dan Kependidikan masih harus ditingkatkan bila dibandingkan standar Nasional, hal ini terlihat dari Capaian Nilai Uji Kompetensi Guru (UKG);



Solusi

1. Optimalisasi penggunaan dana, baik yang bersumber dari APBD Kabupaten serta mendorong peran serta masyarakat agar peduli terhadap kondisi sekolah;
2. Memberikan kesempatan pendidikan penyetaraan S-1, baik yang dibiayai pemerintah maupun swadaya murni para guru;
3. Melalui pemerataan di tingkat kecamatan dan menekan adanya perpindahan dari SD yang kurang guru ke sekolah yang sudah memenuhi kecukupan guru;
4. Melakukan optimalisasi kegiatan PKG dan PKB;

4.2 URUSAN KESEHATAN

4.2.1 Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota Jenis pelayanan dasar yang tertuang dalam standar pelayanan minimal bidang kesehatan sebagai berikut :

- Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
- Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
- Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
- Pelayanan Kesehatan Balita
- Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
- Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
- Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
- Pelayanan Kesehatan pada Penderita Hypertensi
- Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus
- Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
- Pelayanan Kesehatan Orang dengan TB
- Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV

4.2.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

Capaian kinerja pemerintah daerah kabupaten/Kota dalam memberikan standar pelayanan Minimal bidang kesehatan dengan target capaian kinerja pemerintahan dalam pelayanan adalah 100 persen (%) dengan target sasaran sebagai berikut :



Tabel 4.6

Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Kesehatan Tahun 2020

NO	Jenis Pelayanan Dasar SPM		Target Tahun 2020 (Orang)
	Indikator	Nilai (%)	
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	100	3.413
2	Pelayanan Kesehatan Ibu bersalin	100	3.257
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	100	3.197
4	Pelayanan Kesehatan Balita	100	10.874
5	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	100	27.578
6	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	100	114.224
7	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	100	16.682
8	Pelayanan Kesehatan pada Penderita Hipertensi	100	45.699
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	100	2.435
10	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa	100	295
11	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Terduga Tuberkulosis	100	2.524
12	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh (HIV)	100	3.764

Sumber : Dinas Kesehatan 2020

4.2.3 Realisasi

Realisasi Pencapaian SPM Bidang Kesehatan Kabupaten Belitung tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.7

Realisasi Pencapaian SPM Urusan Kesehatan Tahun 2020

No	Jenis Pelayanan Dasar SPM	Target Tahun 2020 (Orang)	Target Dalam Persen	Realisasi (Orang)	Realisasi (%)
1	PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL				
	Jumlah Ibu hamil yang mendapatkan pelayanan K4 di fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah dan swasta	3413	100 %	3102	90,89
2	PELAYANAN KESEHATAN IBU BERSALIN				
	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasilitas kesehatan	3257	100%	2780	85,35
3	PELAYANAN KESEHATAN BAYI BARU LAHIR				
	Jumlah bayi baru lahir usia 0 – 28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar	3197	100%	3181	99,50



4	PELAYANAN KESEHATAN BALITA				
	Jumlah balita 0 – 59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan belita sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	10.874	100%	10.075	92,65
5	PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR				
	Jumlah anak usia pendidikan dasar kelas 1 sd 10 yang mendapatkan pelayanan skrining kesehatan di satuan pendidikan dasar	27.578	100%	24.889	90.25
6	PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PRODUKTIF				
	Jumlah pengunjung usia 15-59 tahun mendapatkan pelayanan skrining kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	114.224	100%	59.628	52.20
7	PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA LANJUT				
	Jumlah pengunjung usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali dalam kurun waktu satu tahun	16.682	100%	16.281	97.59
8	PELAYANAN KESEHATAN PADAPENDERITA HYPERTENSI				
	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	45.699	100%	17.223	37.69
9	PELAYANAN KESEHATAN PENDERITA DIABETES MILITUS				
	Jumlah penyandang DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	2435	100%	2.917	120
10	PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA (ODGJ) BERAT				
	Jumlah ODGJ berat di kab/kota yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa promotif preventif sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	295	100%	288	97.63
11	PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN TB				
	Setiap orang yang Terduga TBC mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	2.524	100%	1.708	67.67
12	PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN RESIKO TERINFEKSI HIV				
	Setiap orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	3764	100%	3.400	90.32

Sumber : Dinas Kesehatan 2020

4.2.4 Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran tahun 2020 di Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung dalam rangka pencapaian target Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Kabupaten Belitung berjumlah Rp. **89.609.934.161,-** dengan rincian sebagai berikut :

- 1) APBD Kabupaten Belitung : Rp. 32.658.429.335,-
- 2) DAK (DAK FISIK) Bidang Kesehatan : Rp. 17.680.547.926,-
- 3) APBN (dak non Fisik) :



BOK	: Rp. 6.842.749.000,-
AKREDITASI PUSKESMAS	: Rp. 636.184.000,-
JAMPERSAL	: Rp. 323.711.000,-
4) JKN	: Rp. 26.767.651.000,-
5) DID	: Rp. 4.700.661.900,-

Untuk pembiayaan Kesehatan terkait pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal pada Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut :

Tabel 4.8
Anggaran SPM Urusan Kesehatan Tahun 2020

NO	SPM	JUMLAH (Rp)	REALISASI
1	Yankes Ibu Hamil	329.603.050	228.556.200
2	Yankes Ibu Bersalin	97.940.000	73.625.000
3	Yankes bayi Baru lahir	238.209.000	58.925.000
4	Yankes Balita	619.736.500	501.816.000
5	Yankes Pendidikan Dasar	332.302.500	238.815.000
6	Yankes Usia Produktif	588.727.800	587.209.040
7	Yankes Usia lanjut	436.754.036	353.905.660
8	Yankes penderita Hipertensi	325.744.036	30.756.000
9	Yankes penderita Diabetes mellitus	352.581.586	95.414.500
10	Yankes ODGJB	85.030.500	23.950.000
11	Yankes Orang dengan TB	214.889.000	68.460.000
12	Yankes Orang Resiko Terinfeksi HIV	322.220.300	71.444.200
TOTAL		3.943.738.851	2.332.876.600

Sumber : Dinas Kesehatan 2020

4.2.5 Dukungan Personil

Jumlah pegawai di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung Tahun 2020 sebanyak 1.056 orang dengan perincian sebagai berikut :

a)	PNS/ CPNS	: 707 orang
b)	PTT Pusat dan Provinsi	: 0 orang
c)	Non PNS	: 349 orang
d)	Sukwan Katagori II	: 0 orang



4.2.6 Permasalahan dan Solusi

➤ **Masalah :**

Sebagian besar Indikator SPM Bidang Kesehatan tidak mencapai target 100%, akan tetapi pelayanan Kesehatan Diabetes mellitus yang melebihi target 100% yaitu capaian (120%). Namun Pelayanan Kesehatan Dasar untuk indikator lainnya sudah cukup baik diatas 80% antara lain: Pelayanan kesehatan orang dengan orang dengan resiko terinfeksi HIV (90,32%) , pelayanan kesehatan bayi baru lahir (99,50%) dan Pelayanan kesehatan ibu hamil (90,32%) Pelayanan Kesehatan balita (92,65%), Orang dengan Gangguan Jiwa Berat (ODGJB) sebesar (97,63), Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut sebesar (97,59%), Pelayanan Kesehatan pada usia Pendidikan dasar sebesar (90,25%), pelayanan Kesehatan pada ibu bersalin sebesar (85,35%) . Yang lainnya masih sangat jauh dari target. Adapun indikator SPM yang masih rendah yaitu pelayanan kesehatan pada usia produktif (52,20%), pelayanan kesehatan hipertensi (37,69)%, pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis (67,67)%.

Beberapa hal yang menjadi permasalahan tidak tercapainya Indikator SPM ini adalah :

- ✓ Pada SPM pelayanan kesehatan Ibu hamil :
 1. Karena adanya kejadian kehamilan yang tidak diinginkan.
 2. Masih ada ibu hamil pendatang dari luar wilayah Kabupaten Belitung yang tidak memeriksakan kesehatannya dan tidak memiliki kelengkapan pencatatan riwayat kesehatan selama kehamilannya.
 3. Kurangnya kesadaran masyarakat dan dukungan keluarga untuk memeriksakan kesehatan ibu hamil ke fasilitas kesehatan.
- ✓ SPM Pelayanan Kesehatan Ibu bersalin :
 1. Belum semua Puskesmas memberikan layanan persalinan 24 jam di Puskesmas. Ada 3 (Tiga) Puskesmas rawat inap sudah berjalan dari tahun sebelumnya, namun 6 (enam) Puskesmas lainnya baru dimulai pada bulan Juli 2020 setelah ditetapkan sebagai Puskesmas mampu salin.
 2. Masih adanya persalinan yang ditolong oleh non nakes (dukun) di wilayah Kecamatan Badau ndan Membalong walaupun sudah bermitra.
 3. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk dan dukungan keluarga untuk memeriksakan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan.
 4. Masih ada ibu bersalin yang tidak memeriksakan kesehatannya ke fasilitas kesehatan.
- ✓ SPM Pelayanan Kesehatan Balita :
 1. Pemantauan tumbuh kembang balita selama pandemic covid pada tahun 2020 di Posyandu,TK/PAUD dan fasilitas kesehatan tidak bisa dilaksanakan sesuai standar di karenakan SK bupati no 443.1/266/II2020 tanggal 13 Maret tentang instruksi dalam upaya mencegah penyebaran covid-19 di Kabupaten Belitung dan surat dari Kepala Dinas Kesehatan nomor 440/525/Dinkes tanggal 19 Maret 2020 perihal himbauan (penutupan sementara pelaksanaan posyandu) serta surat Dinas kesehatan provinsi kepulauan Bangka Belitung nomor 440/1004/Dinkes tanggal 30 Maret 2020 tentang Himbauan dalam situasi pandemic covid-19.
 2. Pemantauan kesehatan balita melalui *sweeping* terkendala dengan jumlah tenaga baik di Puskesmas maupun di desa/kelurahan.



- ✓ SPM Pelayanan Kesehatan pada Usia lanjut :
 1. Pemantauan kesehatan pada usia lanjut selama masa pandemic covid-19 pada tahun 2020 di Posyandu lansia dan Fasilitas kesehatan tidak dilaksanakan sesuai standar dikarenakan sesuai Keputusan Bupati Belitung Nomor : 443.1/266/II/2020 tanggal 13 Maret 2020 tentang intruksi dalam upaya mencegah penyebaran covid-19 di Kabupaten Belitung.
 2. Pemantauan kesehatan usia lanjut melalui *sweeping* terkendala jumlah tenaga di Puskesmas maupun di desa/kelurahan.
- ✓ SPM Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar:
 1. Masih ada 2 Puskesmas yang belum menjalankan penjangkauan kesehatan sampai Desember 2020, namun masih dilanjutkan pada bulan Januari dan Februari 2021 untuk mencapai 100%, yaitu Puskesmas Tanjungpandan dan Puskesmas Tanjung Binga .
- ✓ SPM Pelayanan kesehatan pada Usia Produktif :
 1. Pemantauan kesehatan pada usia produktif selama masa pandemic covid-19 pada tahun 2020 di Posbindu dan Fasilitas kesehatan tidak dilaksanakan sesuai standar dikarenakan sesuai Keputusan Bupati Belitung Nomor : 443.1/266/II/2020 tanggal 13 Maret 2020 tentang intruksi dalam upaya mencegah penyebaran covid-19 di kabupaten Belitung.
 2. Usia produktif yang datang ke Posbindu hanya usia di atas 40 tahun.
 3. Ada juga karena Posbindu belum berjalan sampai ke desa-desa untuk melakukan skrining kesehatan.
- ✓ SPM Pelayanan Kesehatan Pada Penderita Hipertensi:
 1. Pemantauan kesehatan pada Hipertensi selama masa pandemic covid-19 pada tahun 2020 di Posbindu dan Fasilitas kesehatan tidak dilaksanakan sesuai standar dikarenakan sesuai Keputusan Bupati Belitung Nomor : 443.1/266/II/2020 tanggal 13 Maret 2020 tentang instruksi dalam upaya mencegah penyebaran covid-19 di Kabupaten Belitung.
- ✓ SPM Pelayanan pada Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat :
 1. Untuk Pelayanan Kesehatan Jiwa yang menjadi kendala karena belum adanya dokter tetap kesehatan jiwa di kabupaten Belitung,
 2. Jangkauan untuk pengambilan obat jiwa jauh dari tempat Fasyankes,
 3. Masih rendahnya dukungan keluarga Penderita jiwa
- ✓ SPM Pelayanan Kesehatan Penderita Tuberkulosis :
 1. Pemantauan kesehatan pada Penyakit Tuberkulosis selama masa pandemic covid-19 pada tahun 2020 di Posbindu dan Fasilitas kesehatan tidak dilaksanakan sesuai standar dikarenakan sesuai Keputusan Bupati Belitung Nomor : 443.1/266/II/2020 tanggal 13 Maret 2020 tentang intruksi dalam upaya mencegah penyebaran covid-19 di kabupaten Belitung.
 2. Pemantauan kesehatan pada penyakit Tuberkulosis melalui *sweeping* terkendala jumlah SDM yang ada di Puskesmas.
 3. Penemuan kasus Tuberkulosis hanya melalui *pasif case finding* saja.
 4. Penderita Tuberkulosis tidak melakukan pemeriksaan lanjutan ke Puskesmas.
- ✓ SPM pelayanan Kesehatan pada orang Berisiko terinfeksi HIV :
 1. Pemantauan kesehatan pada orang yang berisiko terinfeksi HIV selama masa pandemic covid-19 pada tahun 2020 di tempat Hiburan malam dan Fasilitas kesehatan tidak dilaksanakan sesuai standar dikarenakan sesuai Keputusan Bupati Belitung Nomor : 443.1/266/II/2020 tanggal 13 Maret 2020 tentang instruksi dalam upaya mencegah penyebaran covid-19 di Kabupaten Belitung.



2. Pelayanan Ibu Hamil di praktek swasta tidak datang lagi ke Puskesmas untuk dilakukan test HIV, karena Rapid Test HIV hanya tersedia di Puskesmas.

Hal tersebut diatas menjadi kendala sehingga tidak mencapai atau memenuhi standar SPM yang telah ditetapkan. Di samping memang ada alat dan bahan serta dana untuk ke lapangan yang terbatas. Selain itu hal-hal yang menjadi permasalahan dalam pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal ini adalah masih belum maksimalnya kerjasama dari lintas program maupun lintas sektor lainnya.

➤ **Solusi :**

Memaksimalkan kegiatan/ program yang mendapat dukungan dana dan melaksanakan kegiatan dengan membuat evaluasi pertemuan untuk pemahaman definisi operasional (DO) dan melakukan skrining ke sasaran lebih di tingkatkan. Kegiatan lebih banyak didanai oleh bantuan operasional kesehatan (BOK) untuk puskesmas yang bersumber dari APBN. Pemanfaatan yang lebih efektif dan efisien dengan tetap mengedepankan akuntabilitas.

4.3 URUSAN PEKERJAAN UMUM

4.3.1 Jenis Pelayanan Dasar

➤ **Pemenuhan Kebutuhan Air Minum Sehari-hari (Kabupaten/Kota)**

Jenis pelayanan dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap warga negara secara minimal. Jenis pelayanan dasar SPM pekerjaan umum sub bidang air minum Daerah kabupaten/kota terdiri atas pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari – hari.

➤ **Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik (Kabupaten/Kota)**

Standar Pelayanan Minimal untuk Sub Urusan Air Limbah Domestik dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah untuk menjamin ketersediaan akses pengolahan air limbah domestik bagi warga negara. Jenis pelayanan dasar air limbah domestik yang diberikan kepada warga negara dapat diberikan melalui dua cara yang terdiri dari Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) dan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T).

4.3.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

➤ **Pemenuhan Kebutuhan Air Minum Sehari-hari (Kabupaten/Kota)**

Berdasarkan Permendagri Nomor 100 tahun 2018 tentang penerapan standar pelayanan minimal, pelayanan dasar untuk penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari setiap tahunnya ditargetkan sebesar 100%. Sesuai RENSTRA Dinas PUPR Kabupaten Belitung tahun 2018-2023, maka target penerapan SPM disesuaikan dengan kemampuan keuangan pemerintah daerah. Adapun target cakupan pencapaian SPM pemenuhan kebutuhan air minum sehari-hari Tahun 2020 adalah sebanyak 145.535 jiwa. Untuk kebutuhan pokok air minum penduduk Belitung diperkirakan sebagai berikut :



Tabel 4.9
Kebutuhan pokok air minum

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Jumlah Rumah Tangga (RT)	Kebutuhan Air/Hari (M ³)
1	Tanjungpandan	103,594	30,247	6,216
2	Sijuk	31,998	9,368	1,920
3	Badau	15,522	4,656	931
4	Membalong	28,772	8,314	1,726
5	Selat Nasik	6,269	1,802	376
Total		186,155	54,387	11,169

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2020

➤ **Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik (Kabupaten/Kota)**

Penerima pelayanan dasar air limbah domestik yaitu setiap rumah tangga yang termasuk dalam wilayah pelayanan pengolahan air limbah domestik kabupaten/kota dengan memprioritaskan pada masyarakat miskin atau tidak mampu yang berdomisili pada daerah rawan sanitasi dan dekat badan air. Adapun target cakupan pencapaian SPM penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik Tahun 2020 adalah sebanyak 156.370 jiwa. Untuk rencana kebutuhan akses pelayanan pengolahan air limbah domestik penduduk Belitung diperkirakan sebagai berikut :

Tabel 4.10
Rencana Kebutuhan Akses Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Jumlah Rumah Tangga	Rumah Tangga Bersanitasi	Kekurangan
1	Tanjungpandan	103,594	30,247	28.394	1.853
2	Sijuk	31,998	9,368	6.263	3.105
3	Badau	15,522	4,656	3.361	1.295
4	Membalong	28,772	8,314	6.093	2.221
5	Selat Nasik	6,269	1,802	1.463	339
Total 2020		186,155	54,387	45,574	8,813

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2020



Memperhatikan kebutuhan pemenuhan air minum dan akses pengolahan air limbah domestik di Kabupaten Belitung maka direncanakan target pencapaian SPM Pelayanan Dasar pada Tahun 2020 sebagai berikut :

Tabel 4. 11
Target Pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2020

No	Jenis Pelayanan Dasar SPM	Target (Jiwa)
1	Pemenuhan Kebutuhan Air Minum Sehari-hari	2.200
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	600

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2020

4.3.3 Realisasi

Realisasi Pencapaian SPM Pelayanan Dasar Bidang Pekerjaan Umum Kabupaten Belitung Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 4. 12
Realisasi Pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2020

No	Jenis Pelayanan Dasar SPM	Target (Jiwa)	Realisasi Pencapaian SPM (Jiwa)	Realisasi Persentase (%)
1	Pemenuhan Kebutuhan Air Minum Sehari-hari	2.200	2.788	126,72
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	600	-	-

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2020

Berdasarkan tabel 4.12 dapat dijelaskan bahwa pelaksanaan SPM Pelayanan dalam pemenuhan kebutuhan air minum sehari-hari pada Tahun 2020 melebihi target direncanakan sebanyak 2.200 jiwa sedangkan realisasinya 2.788 jiwa. Hal ini berarti persentasenya mencapai 126,72%. Untuk SPM Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik direncanakan pada Tahun 2020 sebanyak 600 jiwa. Namun dikarenakan pada Tahun 2020 merupakan masa pandemi covid-19 sehingga ada kebijakan pengurangan anggaran setiap Organisasi Perangkat Daerah, maka kegiatan Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik dihapus anggarannya sehingga target yang direncanakan tidak terealisasi.



4.3.4 Alokasi Anggaran

Anggaran untuk SPM Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel 4.13 dan 4.14 di bawah ini :

Tabel 4.13
Anggaran SPM Persentase Penduduk dengan Akses Air Minum yang Layak

No	Kegiatan	Sumber Dana	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi	
				(Rp)	%
	Bidang Cipta Karya				
	Program Pembinaan dan Pengembangan Air Minum		10.190.644.500,00	6.108.961.748,00	59,55
1	Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Minum (DAK Reguler)	DAK Reguler	4.435.305.000,00	1.004.576.000,00	22,65
2	Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Minum (DAK Penugasan)	DAK Penugasan	1.776.910.000,00	1.343.424.000,00	75,60
3	Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Minum (DDUPB)	APBD	1.050.000.000,00	1.038.292.000,00	98,88
4	Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat	APBD	300.000.000,00	269.500.000,00	89,83
5	Pengelolaan UPT Air Minum	APBD	2.528.429.500,00	2.353.289.748,00	93,07
6	Perencanaan Bidang Air Minum	APBD	100.000.000,00	99.880.000,00	99,88

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2020

Tabel 4.14
Realisasi Anggaran SPM Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik

No	Kegiatan	Sumber Dana	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi	
				(Rp)	%
	Bidang Cipta Karya dan Perkim				
	Program Pembinaan dan Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman		30,000,000.00	0	0,00
1	Penyediaan Prasarana dan Sarana Sanitasi (DAK Reguler)	DAK Reguler	30,000,000.00	0	0,00

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2020



4.3.5 Dukungan Personil

Berdasarkan data kepegawaian Dinas PUPR kabupaten Belitung pada Januari 2020, jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah sebanyak 54 pegawai, yang terdiri dari 41 pegawai laki-laki (75,93%) dan 13 pegawai perempuan (24,07%). Berdasarkan jenjang pendidikan, untuk ASN Dinas PUPR didominasi oleh lulusan perguruan tinggi, yaitu lulusan S2, S1/D4 dan D3, dengan jumlah total sebanyak 44 orang (81,48%). Sisanya berupa lulusan SMP dan SMA sebanyak 10 orang (18,51%). Jumlah dan komposisi pegawai Pada Dinas PUPR Tahun 2019 selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.15

Alokasi Pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020

No.	Unit Kerja	Jumlah
1	Sekretariat	14
2	Bidang Sumber Daya Air	6
3	Bidang Bina Marga	9
4	Bidang Cipta Karya	6
5	Bidang Perumahan dan Permukiman	6
6	Bidang Tata Ruang dan Jasa Konstruksi	8
7	UPT Sarana dan Prasarana Perbekalan dan Laboratorium	3
8	UPT Pengelolaan Air Minum	2
Jumlah		54

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2020

Kondisi kepegawaian Dinas PUPR berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel 4.16

Jumlah SDM Dinas PUPR Berdasarkan Pendidikan Terakhir

No.	Jenjang Pendidikan	Jumlah PNS	Jumlah CPNS	Jumlah Total	Persentase (%)
2	S.2	4	0	4	7,41
3	S.1	17	6	23	42,59
4	D4	3	1	4	7,41
5	D3	11	2	13	24,07
8	SMA/Sederajat	8	0	8	14,81
9	SMP/Sederajat	2	0	2	3,70
10	SD/Sederajat	0	0	0	0,00
Jumlah		45	9	54	100,00

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2020



4.3.6 Permasalahan dan Solusi

Pelaksanaan pencapaian kinerja pelayanan air minum didorong oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal adalah adanya Pelayanan air minum yang dilaksanakan melalui UPT PAM Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung dengan berbagai pelayanan di antaranya; pendistribusian air melalui sumbangan rumah (SR), pelayanan air kemasan, dan pendistribusian air melalui mobil tangki. Pendistribusian air melalui mobil tangki merupakan pelayanan SPM air minum terhadap masyarakat yang tempat tinggalnya belum terlayani dengan jaringan perpipaan. Selain itu, pelayanan dengan mobil tangki dimaksudkan untuk mendukung pelayanan air minum yang bersifat insidental, seperti pelayanan pasca bencana. Untuk menjaga kualitas pelayanan, UPT PAM bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung melakukan pemantauan kualitas air minum setiap 6 (enam) bulan sekali. Pelayanan air minum, selain untuk mencapai target SPM, juga merupakan komitmen Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung untuk mendukung program Pemerintah Daerah dalam sektor pariwisata. Pada Tahun 2020, terdapat penambahan unit pelayanan air minum pada UPT PAM Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung yaitu, unit PPN yang berlokasi di Kelurahan Kota dekat dengan pelabuhan perikanan Tanjungpandan. Setiap harinya, unit ini melayani sekitar 87 pelanggan yang berasal dari kelompok nelayan pelabuhan perikanan. Faktor eksternal dalam mendukung kinerja pelayanan adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat melalui Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kepulauan Bangka Belitung dengan pengembangan SPAM Mempadin Kecamatan Sujuk dengan meningkatkan kapasitas IPA dari 10 Lt/d menjadi 20 Lt/d dan dengan membangun Unit Booster di Desa Tanjung Tinggi sebagai dukungan KSPN Tanjung Kelayang.

4.4 URUSAN PERUMAHAN RAKYAT

4.4.1 Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Standar Pelayanan Minimal yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam urusan Perumahan Rakyat terdiri dari:

a. Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten

Jenis Pelayanan Dasar Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota merupakan jenis pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, dengan ketentuan:

- 1) Pada saat masa pasca bencana;
- 2) Surat penetapan bencana dari Bupati/Walikota; dan/atau
- 3) Dampak bencana di daerah administrasi kabupaten/kota.

b. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten.



Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota merupakan jenis pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka mendukung:

1. Pengurangan kawasan kumuh 5-10 Ha; dan/atau
2. Penataan perumahan dan kawasan permukiman yang berada di lahan bukan fungsi permukiman dan “tempat yang berpotensi dapat menimbulkan bahaya”.

4.4.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

Mutu pelayanan dasar penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana, baik bencana provinsi maupun kabupaten/kota meliputi standar jumlah dan kualitas pelayanan dasar. Perhitungan capaian adalah sebagai berikut.

1. Penghasilan Rumah Tangga kurang atau sama dengan UMP dan
2. Tidak memiliki tabungan yang mencukupi untuk menyewa atau membeli rumah;
3. Memiliki sertifikat kepemilikan tanah dan bangunan;
4. Tidak memiliki asset bangunan lain;
5. Terkecuali yang tidak memiliki penguasaan atas hak tanah dan bangunan dapat difasilitasi melalui bantuan uang sewa rumah layak huni atau akses terhadap rumah sewa, baik rumah susun sewa maupun rumah sewa umum.

Penerima pelayanan dasar Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah yaitu setiap Rumah Tangga yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah, dengan memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Tidak memiliki aset tanah dan/atau bangunan dalam Kabupaten/Kota yang sama, kecuali DKI Jakarta;
2. Penghasilan dibawah UMP daerah setempat yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan bermaterai;
3. Mendapatkan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Lurah/Kepala Desa.

Berdasarkan RENSTRA Dinas PUPR Kabupaten Belitung Tahun 2018-2023, Pada tahun 2020 tidak ada relokasi program pemerintah daerah. Adapun Target pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat Tahun 2020 berdasarkan RPJMD adalah adalah 10 orang (asumsi untuk 2 unit rumah) sedangkan pada penyusunan Anggaran Tahun 2020 adanya pengurangan KUAPPAS sehingga tidak dianggarkan pada Tahun 2020.

Tabel 4.17

Target Pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat Tahun 2020

No	Jenis Pelayanan Dasar SPM	Satuan	Target Tahun 2020
1	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten	Orang	-
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten	Orang	-



Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2020

4.4.3 Realisasi

Pada tahun 2020 tidak ada anggaran untuk Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten dan sepanjang Tahun 2020 tidak terjadi bencana alam/lainnya yang dampaknya memenuhi kriteria untuk ditetapkan sebagai bencana kabupaten oleh Bupati, sehingga tidak ada rumah korban bencana yang pemiliknya memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam SPM berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 Sedangkan untuk Fasilitas penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten berdasarkan RENSTRA Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung Tahun 2018-2023, pada tahun 2020 tidak ada relokasi program pemerintah daerah.

Tabel 4.18

Realisasi Pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat Tahun 2020

No	Jenis Pelayanan Dasar SPM	Target Tahun 2020 (Orang)	Realisasi	
			Orang	%
1	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten	-	-	-
2	Fasilitas penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten	-	-	-

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2020

4.4.4 Alokasi Anggaran

-

4.4.5 Dukungan Personil

Berdasarkan data kepegawaian Dinas PUPR kabupaten Belitung pada Januari 2020, jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah sebanyak 54 pegawai, yang terdiri dari 41 pegawai laki-laki (75,93%) dan 13 pegawai perempuan (24,07%). Berdasarkan jenjang pendidikan, untuk ASN Dinas PUPR didominasi oleh lulusan perguruan tinggi, yaitu lulusan S2, S1/D4 dan D3, dengan jumlah total sebanyak 44 orang (81,48%). Sisanya berupa lulusan SMP dan SMA sebanyak 10 orang (18,51%). Jumlah dan komposisi pegawai Pada Dinas PUPR Tahun 2019 selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel 4.19
Alokasi Pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020

No.	Unit Kerja	Jumlah
1	Sekretariat	14
2	Bidang Sumber Daya Air	6
3	Bidang Bina Marga	9
4	Bidang Cipta Karya	6
5	Bidang Perumahan dan Permukiman	6
6	Bidang Tata Ruang dan Jasa Konstruksi	8
7	UPT Sarana dan Prasarana Perbekalan dan Laboratorium	3
8	UPT Pengelolaan Air Minum	2
	Jumlah	54

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2020

Kondisi kepegawaian Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel 4.20
Jumlah SDM Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung Berdasarkan Pendidikan Terakhir Tahun 2020

No.	Jenjang Pendidikan	Jumlah PNS	Jumlah CPNS	Jumlah Total	Persentase (%)
1	S.3	0	0	0	0,00
2	S.2	4	0	4	7,41
3	S.1	17	6	23	42,59
4	D4	3	1	4	7,41
5	D3	11	2	13	24,07
6	D2	0	0	0	0,00
7	D1	0	0	0	0,00
8	SMA/Sederajat	8	0	8	14,81
9	SMP/Sederajat	2	0	2	3,70
10	SD/Sederajat	0	0	0	0,00
	Jumlah	45	9	54	100,00

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2020



4.4.6 Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung dalam urusan Perumahan Rakyat selama Tahun 2020 adalah :

- Belum optimalnya penanganan dan pencegahan kawasan kumuh. Kewenangan Penanganan Kawasan Kumuh dibagi berdasarkan luas dliniasi area yang digolongkan sebagai kawasan kumuh di bawah 5 Ha menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten, sementara untuk kawasan dengan luas antara 5 Ha sampai dengan 10 Ha menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi. Luas kawasan kumuh di atas 10 HA menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Penanganan Kumuh juga memerlukan perencanaan yang komprehensif yang melibatkan Organisasi Perangkat Daerah terkait di luar Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Bappeda.
- Adanya kebijakan pengurangan KUAPPAS sehingga tidak semua rencana kegiatan bisa dianggarkan dan Refocusing Anggaran karena masa pandemic covid-19 yang berakibat ada kegiatan yang dihapuskan anggarannya.

4.5 URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

4.5.1 Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum, maka yang menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Belitung menjadi tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Belitung dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Jenis pelayanan dasar SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Belitung adalah sebagai berikut :

Tabel 4.21

Jenis SPM di Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Belitung Tahun 2020

No	Jenis Pelayanan Dasar SPM	OPD Pelaksana SPM
1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Belitung
2	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Belitung
3	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Belitung
4	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Belitung
5	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Belitung

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Belitung 202



4.5.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

Target pencapaian SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Belitung berdasarkan dokumen perencanaan SPM adalah sebagai berikut :

Tabel 4.22

Target Pencapaian SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2020

No	Jenis Pelayanan Dasar SPM	Satuan	Target Tahun 2020
1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Orang	0
2	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Orang	23.934
3	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Orang	54
4	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Orang	21.717
5	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Orang	18

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja dan BPBD 2020

4.5.3 Realisasi

Realisasi Pencapaian SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Belitung tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.23

Realisasi Pencapaian SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2020

No	Jenis Pelayanan Dasar SPM	Target (Orang)	Realisasi	
			Orang	%
1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	0	0	100
2	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	23.934	21.717	90,74
3	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	54	30	55,56
4	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	21.717	1.627	7,49
5	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	18	15	83,33

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Belitung 2020



4.5.4 Alokasi Anggaran

Anggaran untuk SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel di bawah ini:

Tabel 4.24

Anggaran Pencapaian SPM

Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2020

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi		OPD Pelaksana
			Rp	%	
1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	1.377.462.700,00	1.316.985.250,00	95,80	Sat Pol PP
2	Pengawasan dan Penertiban Penyelenggaraan Peraturan Daerah	253.262.000,00	189.516.500,00	74,83	Sat Pol PP
3	Pengelolaan Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana	1.168.797.000,00	456.418.600,00	39,05	BPBD
4	Pengelolaan Data dan Informasi Kebencanaan	247.555.000,00	244.189.000,00	98,64	BPBD
5	Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten Belitung	0	0	0	BPBD (direfocussing)
6	Peningkatan Kapasitas Apratur Penanggulangan Bencana	55.824.000,00	29.212.500,00	52,32	BPBD
7	Sosialisasi, Pelatihan dan Simulasi Penanggulangan Bencana	0	0	0	BPBD (direfocussing)
8	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Kebakaran	330.950.000,00	325.699.500,00	98,41	BPBD
9	Pembinaan dan Pelatihan Penanggulangan Kebakaran	0	0	0	BPBD (direfocussing)
10	Pengelolaan Pusat Pengendalian Penanggulangan Kebakaran dan Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Kebakaran	606.488.000,00	360.638.550,00	59,46	BPBD

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Belitung 2020

Alokasi anggaran belanja daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM adalah terdiri dari :

Belanja Langsung : Rp. 7.040.397.700,- (Tujuh Miliar Empat Puluh Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Rupiah).



Belanja Tidak Langsung : Rp. 4.224.526.000,- (Empat Milyar Dua Ratus Dua Puluh Empat Ribu Lima Ratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah)

Alokasi anggaran belanja daerah pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM adalah terdiri dari :

Belanja Langsung : Rp. 19.696.945.200,- ((Sembilan Belas Milyar Enam Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Dua Ratus Rupiah)).

Belanja Tidak Langsung : Rp. 2.148.001.000,- (Dua Milyar Seratus Empat Puluh Delapan Juta Seribu Rupiah)

4.5.5 Dukungan Personil

Dalam Upaya mendorong pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) perlu didukung oleh sumber daya Manusia yang mumpuni baik dari segi jumlah maupun kompetensi yang dimilikinya. Untuk urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Belitung dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Belitung. Gambaran Kondisi Sumber daya Manusia yang ada di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja kabupaten Belitung adalah sebagai berikut :

Tabel 4.25

Alokasi Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Belitung Tahun 2020

No	Unit Kerja	Jumlah
1	Kepala Satuan	1
2.	Sekretariat	8
3.	Bidang Penegakan Perundang – Undangan Daerah	6
4.	Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	7
5.	Bidang Perlindungan Masyarakat	7

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja 2020

Kondisi kepegawaian Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.26

Rincian SDM Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Belitung Tahun 2020

Berdasarkan Golongan dan Pendidikan Terakhir

Golongan PNS/CPNS	Pendidikan Terakhir										
	S 3	S 2	S 1	D IV	D III	D II	D I	SMA	SMK	SMP	SD
PNS Gol. IV	-	-	3	-	-	-	-	1	-	-	-
PNS Gol. III	-	-	8	1	-	-	-	2	2	-	-
PNS Gol. II	-	-	-	-	-	-	-	10	2	-	-
PNS Gol. I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CPNS Gol. IV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CPNS Gol. III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CPNS Gol. II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CPNS Gol. I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah	-	-	11	1	-	-	-	13	4	-	-

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja 2020



Gambaran Kondisi Sumber daya Manusia yang ada di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah kabupaten Belitung adalah sebagai berikut :

Tabel 4.27

Alokasi Pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2020

No	Unit Kerja	Jumlah
1	Kepala Pelaksana	1
2.	Sekretariat	2
3.	Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan	2
4.	Seksi Penanganan Darurat Logistik dan Kebakaran	9
5.	Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi	2
Jumlah		16

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah 2020

Kondisi kepegawaian Badan Penanggulangan Bencana Daerah berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada Tabel 2.3 dibawah ini :

Tabel 4.28

**Rincian SDM Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2020
Berdasarkan Golongan dan Pendidikan Terakhir**

Golongan PNS/CPNS	Pendidikan Terakhir										
	S 3	S 2	S 1	D IV	D III	D II	D I	SMA	SMK	SMP	SD
PNS Gol. IV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PNS Gol. III	-	2	5	-	1	-	-	1	-	-	-
PNS Gol. II	-	-	-	-	-	-	-	4	3	-	-
PNS Gol. I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CPNS Gol. IV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CPNS Gol. III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CPNS Gol. II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CPNS Gol. I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah	-	2	5	-	1	-	-	5	3	-	-

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah 2020

4.5.6 Permasalahan dan Solusi

- Permasalahan dan solusi dalam pencapaian target SPM Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Belitung,

Permasalahan :

- a) Belum optimalnya penegakan perda;
- b) Keterbatasan jumlah personil dan sarana prasarana untuk melaksanakan patroli pada 5 (lima) kecamatan secara rutin 3 kali sehari/kecamatan;
- c) Masih rendahnya pemberdayaan satlinmas yang dipengaruhi keterbatasan ketersediaan personil oleh desa / kelurahan serta anggaran operasional dan perlengkapan personil.

Solusi :

- a) Meningkatkan pengawasan, pembinaan dan penegakan perda dengan dukungan mengoptimalkan kapasitas personil dan meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait dan masyarakat;



- b) Menambah tim dan frekuensi patroli secara bertahap;
 - c) Meningkatkan pemberdayaan satlinmas secara bertahap.
- Permasalahan dan solusi dalam pencapaian target SPM Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Belitung,
- Permasalahan :**
- a) Belum dibentuknya WMK baru sesuai ketentuan yang berlaku;
 - b) Masih minimnya mobil damkar dan personil serta situasi musim kemarau ;
 - c) Belum terlaksananya diklat damkar I bagi pegawai non PNS;
- Solusi :**
- a) Merencanakan dan mengusulkan penambahan WMK untuk meningkatkan pelayanan;
 - b) Merencanakan penambahan mobil damkar serta meningkatkan sosialisasi pencegahan kebakaran pada musim kemarau;
 - c) Merencanakan dan melaksanakan diklat damkar bagi yang belum memenuhi kualifikasi.

4.6 URUSAN SOSIAL

4.6.1 Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/ Kota, Jenis pelayanan dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap warga Negara secara minimal. Terdapat 5 (lima) jenis pelayanan dasar dalam Permensos tersebut yaitu :

- a. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti skala kab. /kota;
- b. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti skala kab. /kota;
- c. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti skala kab. /kota;
- d. Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan Pengemis di Luar Panti skala kab. /kota;
- e. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial.

Yang diterapkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten Belitung, hanya 4 (empat) jenis pelayanan dasar yaitu rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar di luar Panti dan Perlindungan Sosial korban bencana alam dan sosial. Sedangkan Pelayanan Dasar Rehabilitasi Sosial kepada Gelandangan Pengemis di luar Panti tidak diterapkan, karena berdasarkan data Pembangunan Daerah tidak terdapat Gelandangan Pengemis di Kabupaten Belitung.

4.6.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

Target capaian SPM Bidang Urusan Sosial Kabupaten Belitung Tahun 2020 adalah 100% dengan rincian target capaian serta jenis pelayanan tercantum pada tabel berikut :



Tabel 4.29

Target Capaian SPM Urusan Sosial Kabupaten Belitung Tahun 2020

No.	Jenis Pelayanan Dasar SPM	Sasaran	Target Capaian Tahun 2020	
		Indikator Kinerja	Persentase	Orang
1.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti skala Kabupaten / Kota	<p>Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti</p> <p>Persentase (%) Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhannya di Luar Panti</p>	100	30
2.	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti skala kab/kota	<p>Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Anak Terlantar di Luar Panti</p> <p>Persentase (%) Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhannya di Luar Panti</p>	100	244
3.	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti skala kab/kota	<p>Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti</p> <p>Persentase (%) Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhannya di Luar Panti</p>	100	1163
4.	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial	<p>Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Korban Bencana Alam dan Sosial daerah kabupaten/kota</p> <p>Persentase (%) Korban Bencana Alam Sosial yang Terpenuhi Kebutuhannya Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana daerah kabupaten/kota</p>	100	<p>Bencana Alam : 11</p> <p>Bencana Sosial : 8</p>

Sumber : Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2020



4.6.3 Realisasi

Realisasi dari pencapaian SPM Urusan Sosial Tahun 2020 dapat tergambar dalam tabel di bawah ini :

Tabel 4.30

Realisasi Capaian SPM Urusan Sosial Kabupaten Belitung Tahun 2020

No.	Jenis Pelayanan Dasar SPM	Sasaran	Tahun Pencapaian	Target (%)	Capaian	
		Indikator Kinerja			Realisasi (%)	Capaian (%)
1.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti skala Kabupaten / Kota	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti	2020	100	= 30 orang / 30 orang X 100%	100
		Persentase (%) Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhannya di Luar Panti			= 100	
2.	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti skala kab/kota	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Anak Terlantar di Luar Panti	2020	100	= 144 orang / 244 orang x 100%	59,01
		Persentase (%) Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhannya di Luar Panti			= 59,01	
3.	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti skala kab/kota	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti	2020	100	= 993 orang / 1163 orang x 100%	85,38
		Persentase (%) Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhannya di Luar Panti			= 85,38	
4.	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan social	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Korban Bencana Alam dan Sosial daerah kabupaten/kota	2020	100	Bencana alam = 11 orang / 11 orang x 100%	100
		Persentase (%) Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhannya Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana daerah kabupaten/kota			Bencana sosial = 8 orang / 8 orang x 100%	
Nilai Rata-rata Capaian SPM Bidang Urusan Sosial						86,09

Sumber : Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2020



4.6.4 Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam APBD Kabupaten Belitung dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 4. 31
Alokasi Anggaran yang Mendukung Pencapaian SPM Tahun 2020
Bidang Urusan Sosial Kabupaten Belitung

No.	Jenis Belanja	Jumlah Anggaran (Rp)
1.	APBD	2.706.863.940,-
2.	APBN	32.969.214.000,-
	- KUBE (Kelompok Usaha Bersama)	600.000.000,-
	- BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai)	20.945.680.000,-
	- Kebencanaan Alam	-
	- Kebencanaan Sosial	-
	- PKH (3.356 KPM)	11.363.534.000,-
	- PROGRES BANTU LU (Program Rehabilitasi Sosial bantuan Bertujuan Lanjut Usia) dengan Penerima 49 orang Lansia	-
	- PROGRESA (Program Rehabilitasi Sosial Anak) melalui LKS dengan jumlah penerima 60 orang anak	60.000.000,-
Jumlah		35.676.077.940,-

Sumber : Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2020

4.6.5 Dukungan Personil

Dukungan personil merupakan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM tahun 2020 pada Bidang sosial yaitu :

- Pegawai Negeri Sipil 22 orang
- Non PNS 6 orang
- Dari Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) 190 orang

4.6.6 Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM Bidang Urusan Sosial yaitu data PMKS belum valid, terjadinya ego sektoral, keterbatasan SDM Kessos, anggaran dan sarana prasarana.

Adapun langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh yaitu melaksanakan verifikasi dan validasi data PMKS, penyiapan dan penguatan SDM Kessos melalui Diklat dan Bimtek dan anggaran disesuaikan dengan PMKS yang dilayani, penyediaan sarana dan prasarana, dan penguatan PSKS.



4.7 PROGRAM DAN KEGIATAN

➤ Urusan Pendidikan

Rincian Program dan Kegiatan Urusan Pendidikan Tahun 2020 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terdiri dari:

1. Program Pendidikan Anak Usia Dini

- (1) Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini
- (2) Pengembangan karakter, Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa PAUD
- (3) Bantuan Operasional pengelolaan PAUD (DAK Non Fisik)
- (4) Kesejahteraan Tenaga Guru PAUD Formal dan Non-Formal
- (5) Tambahan Penghasilan Guru PAUD (TK, RA, BA, PAUD Non-Formal) Non-PNS (DABA)
- (6) Pembangunan Sarana dan Prasarana PAUD TK (DAK Reguler)
- (7) Penyediaan Buku Administrasi Siswa PAUD

2. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

- (1) Pembinaan dan pengembangan karakter, Minat, Bakat, Kreativitas Siswa SD
- (2) Pembinaan Minat, Bakat, Kreativitas dan Olahraga Prestasi Siswa SMP
- (3) Penilaian Hasil Belajar SD
- (4) Penilaian Hasil Belajar SMP
- (5) Penyediaan Dana Pengembangan Sekolah Untuk SD/MI
- (6) Penyediaan Dana Pengembangan Sekolah Untuk SMP/MTs
- (7) Bantuan Operasional Sekolah (DAK APBN)
- (8) Rehabilitasi Prasarana Belajar SD (DAK Reguler)
- (9) Pembangunan Prasarana Belajar SD (DAK Reguler)
- (10) Pengadaan Sarana Belajar SD (DAK Reguler)
- (11) Rehabilitasi Prasarana Belajar SMP (DAK Reguler)
- (12) Pembangunan Prasarana Belajar SMP (DAK Reguler)
- (13) Pengadaan Sarana Belajar SMP (DAK Reguler)
- (14) Kesejahteraan Tenaga PTT dan GTT
- (15) Penyusunan DED prasarana belajar SD
- (16) Penyusunan DED prasarana belajar SMP
- (17) Pembangunan unit sekolah baru (USB) SMP

3. Program Pendidikan Nonformal (PNF)

- (1) Peningkatan Mutu TPA (DABA)
- (2) Penyediaan Dana Pengembangan Pendidikan Non Formal
- (3) Penilaian Hasil Belajar pendidikan Non formal
- (4) Pembangunan Prasarana Belajar SKB (DAK Reguler)
- (5) Pengadaan Sarana Belajar SKB (DAK Reguler)
- (6) Bantuan Operasional Pengelolaan (BOP) Kesetaraan (DAK Non Fisik)
- (7) Pengembangan kurikulum pendidikan non formal
- (8) Pendampingan akreditasi pendidikan non formal
- (9) Pembinaan saka widya budaya bakti



4. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

- (1) Pemberdayaan Tenaga Pendidik Non-Formal
- (2) Pengembangan dan Pembinaan Profesi Pendidik dan Tenaga Kependidikan

5. Program Pelayanan Pendidikan Masyarakat Miskin/tidak Mampu

- (1) Beasiswa pendidikan tinggi bagi masyarakat tidak mampu dan berprestasi (SIMPOR)
- (2) Pendampingan pendidikan bagi siswa SD kurang mampu (SIMPOR)
- (3) Pendampingan pendidikan bagi siswa SMP kurang mampu (SIMPOR)

6. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

- (1) Peningkatan akurasi dan potensi pendidikan

➤ **Urusan Kesehatan**

Rincian Program dan Kegiatan Urusan Kesehatan Tahun 2020 pada Dinas Kesehatan terdiri dari:

1. Program Upaya Pelayanan Kesehatan

- (1) Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas
- (2) Bantuan Operasional Kabupaten

➤ **Urusan Pekerjaan Umum**

Rincian Program dan Kegiatan Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2020 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terdiri dari:

1. Program Pembinaan dan Pengembangan Air Minum
 - (1) Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Minum
 - (2) Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat
 - (3) Pengelolaan UPT Air Minum
 - (4) Perencanaan Bidang Air Minum
2. Program Pembinaan dan Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman
 - (1) Penyediaan Prasarana dan Sarana Sanitasi

➤ **Urusan Sosial**

Rincian Program dan Kegiatan Urusan Sosial Tahun 2020 pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terdiri dari:

1. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

- (1) Pelayanan dan Perlindungan Sosial Lanjut Usia
- (2) Pelayanan dan Perlindungan Sosial Penyandang Disabilitas
- (3) Pelayanan dan Perlindungan Sosial Anak Terlantar
- (4) Pembinaan Taruna Siaga Bencana (TAGANA) dan Kampung Siaga Bencana (KSB)
- (5) Pelayanan dan Perlindungan Sosial Lanjut Usia (DID Tambahan Periode 2)
- (6) Pelayanan dan Perlindungan Sosial Penyandang Disabilitas (DID Tambahan Periode 2)

2. Program Penanganan dan Pemberdayaan Fakir Miskin

- (1) Pembinaan dan Administrasi Program Keluarga Harapan (PKH)
- (2) Perlindungan dan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)



- (3) Pembinaan dan Administrasi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)
- (4) Peningkatan Produktivitas Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Fakir Miskin
- (5) Peningkatan Produktivitas Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Fakir Miskin (DID Tambahan Periode 2)

3. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

- (1) Pembinaan Nilai-nilai Kepahlawanan
- (2) Penguatan kelembagaan kesejahteraan social
- (3) Pengelolaan Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin, Orang Tidak Mampu dan PMKS
- (4) Rehab Gedung Graha Karang Taruna

➤ Urusan Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat

Program dan Kegiatan Urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat Tahun 2020 pada Satuan Polisi Pamong Praja adalah sebagai berikut :

1. Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

- (1) Pembinaan dan Penyuluhan Perda dan Perkada
- (2) Pengawasan dan Penertiban Pelanggaran Peraturan Daerah
- (3) Penyelidikan Pelanggaran Peraturan Daerah
- (4) Penegakan Produk Hukum Daerah
- (5) Pengelolaan Sekretariat PPNS
- (6) Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum
- (7) Patroli Ketentraman dan Ketertiban Umum
- (8) Pemberdayaan Satuan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Belitung
- (9) Pelatihan Personil Satuan Polisi Pamong Praja
- (10) Gelar Pasukan dan Bakti Sosial Satpol PP
- (11) Pembinaan Korps Musik

Program dan Kegiatan Urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat Tahun 2020 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah sebagai berikut :

1. Penyelamatan dan Evaluasi Korban Bencana

- (1) Pengelolaan Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana

2. Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana

- (1) Pengelolaan Data dan Informasi Kebencanaan
- (2) Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten Belitung
- (3) Peningkatan Kapasitas Aparatur Penanggulangan Bencana
- (4) Sosialisasi, Pelatihan dan Simulasi Penanggulangan Bencana

3. Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran

- (1) Pengelolaan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Kebakaran
- (2) Pembinaan dan Pelatihan Penanggulangan Kebakaran
- (3) Pengelolaan Pusat Pengendalian Penanggulangan Kebakaran dan Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Kebakaran



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
(L P P D)
KABUPATEN BELITUNG
TAHUN 2020**

**BAB V
PENUTUP**





BAB V

PENUTUP

Berdasarkan paparan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2020 yang telah dijelaskan pada Bab-bab sebelumnya, dapat dilihat bahwa pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Belitung pada tahun 2020 sebagai suatu tahapan proses pemerintahan, dalam pelaksanaan berbagai program pembangunan daerah terdapat program yang berhasil dilaksanakan dengan baik dan terdapat juga program-program yang belum optimal hasilnya seperti perencanaannya. Namun demikian, pada masa yang akan datang hendaknya dapat lebih ditingkatkan lagi sehingga program-program dalam upaya pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Belitung dapat mencapai hasil maksimal sesuai dengan yang direncanakan.

Secara keseluruhan penyelenggaraan pemerintahan daerah pada tahun 2020 masih terdapat kendala dalam realisasinya yang disebabkan masih terbatasnya sumber daya aparatur dan juga sarana dan prasarana pendukung guna kelancaran pelaksanaannya. Oleh karena itu, diharapkan Pemerintah Kabupaten Belitung dapat meminimalisasi berbagai kendala tersebut sehingga pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat berjalan secara lebih efektif dan efisien.

Untuk memperoleh gambaran penyelenggaraan pemerintahan di daerah pada masa yang akan datang secara lebih efektif dan efisien, dapat dikemukakan beberapa saran sebagai berikut :

- a. Meminimalisasi jumlah program-program yang akhirnya batal dilaksanakan dan juga program-program yang ternyata tidak dapat diselesaikan sesuai dengan rencana, diharapkan semua unsur terkait pada masa yang akan datang membuat perencanaan program-program dengan perhitungan yang matang. Dengan demikian diharapkan kinerja dapat lebih efektif karena tidak menghabiskan waktu untuk pelaksanaan program-program yang tidak dapat diselesaikan atau batal dilaksanakan.
- b. Diharapkan OPD dalam penyampaian data dan bahan untuk menunjang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Belitung dapat meningkatkan kelengkapan dari laporannya masing-masing sesuai dengan format yang diberikan demi untuk memudahkan rekapitulasi data. Selain itu diharapkan agar menyampaikan laporannya tepat waktu sehingga penyampaian LPPD Kabupaten Belitung ke Provinsi dapat disampaikan sebelum 31 Maret setiap tahunnya.
- c. Agar kepada semua pihak yang terlibat secara langsung dalam proses penyusunan Laporan dapat meningkatkan kesadaran tentang tugas dan tanggung jawabnya, sehingga tidak terkesan hanya baik pada sisi kuantitas personil penyusunan namun tidak pada sisi kualitas/kinerjanya.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2020 ini disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 05 Tahun 2021 tentang Pelaporan Kinerja Pemerintah Daerah yang mengamanatkan bahwa Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota disusun menjadi satu dengan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD). Dengan tersusunnya Laporan ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu dasar acuan dalam penyusunan program kegiatan pemerintahan pada masa yang akan datang, agar terjadi kesinambungan pembangunan yang terpola dan tersusun secara tahap demi tahap dan sistematis.



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
(L P P D)
KABUPATEN BELITUNG
TAHUN 2020 T.A. 2021**

**LAMPIRAN 1
JUMLAH PENDUDUK KABUPATEN BELITUNG MENURUT PEKERJAAN TAHUN 2020**



Jumlah Penduduk Kabupaten Belitung
Menurut Pekerjaan Tahun 2020

NO	PEKERJAAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	BELUM/TIDAK BEKERJA	19.376	17.633	37.009
2	MENGURUS RUMAH TANGGA	4	45.346	45.350
3	PELAJAR/MAHASISWA	17.113	15.789	32.902
4	PENSIUNAN	790	268	1.058
5	PEGAWAI NEGERI SIPIL	2.117	2.132	4.249
6	TENTARA NASIONAL INDONESIA	171	2	173
7	KEPOLISIAN RI	387	24	411
8	PERDAGANGAN	711	177	888
9	PETANI/PEKEBUN	5.393	255	5.648
10	PETERNAK	15	2	17
11	NELAYAN/PERIKANAN	6.758	19	6.777
12	INDUSTRI	37	5	42
13	KONSTRUKSI	59	2	61
14	TRANSPORTASI	61	0	61
15	KARYAWAN SWASTA	7.680	2.672	10.352
16	KARYAWAN BUMN	223	62	285
17	KARYAWAN BUMD	27	22	49
18	KARYAWAN HONORER	654	739	1.393
19	BURUH HARIAN LEPAS	18.634	482	19.116
20	BURUH TANI/PERKEBUNAN	123	30	153
21	BURUH NELAYAN/PERIKANAN	223	2	225
22	BURUH PETERNAKAN	4	2	6
23	PEMBANTU RUMAH TANGGA	2	48	50
24	TUKANG CUKUR	2	0	2
25	TUKANG LISTRIK	15	0	15
26	TUKANG BATU	11	0	11
27	TUKANG KAYU	47	0	47
28	TUKANG SOL SEPATU	4	0	4
29	TUKANG LAS/PANDAI BESI	22	0	22
30	TUKANG JAHIT	20	16	36
32	PENATA RIAS	5	4	9
34	PENATA RAMBUT	7	9	16
35	MEKANIK	94	0	94
36	SENIMAN	20	3	23
37	TABIB	2	1	3
38	PARAJI	0	1	1
41	IMAM MESJID	4	0	4
42	PENDETA	15	0	15
43	PASTOR	2	0	2
44	WARTAWAN	29	1	30
45	USTADZ/MUBALIGH	6	0	6
46	JURU MASAK	1	7	8
49	BUPATI	1	0	1
56	WAKIL BUPATI	1	0	1
58	ANGGOTA DPRD PROVINSI	5	1	6
62	ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA	22	1	23
63	DOSEN	15	10	25
64	GURU	115	247	362



Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Belitung Tahun 2020

65	PILOT	2	0	2
66	PENGACARA	7	1	8
67	NOTARIS	1	3	4
68	ARSITEK	4	0	4
69	AKUNTAN	0	1	1
70	KONSULTAN	13	0	13
71	DOKTER	29	28	57
72	BIDAN	0	42	42
73	PERAWAT	15	33	48
74	APOTEKER	1	8	9
75	PENYIAR RADIO	1	2	3
78	PELAUT	145	0	145
79	PENELITI	1	0	1
80	SOPIR	376	1	377
81	PEDAGANG	370	98	468
84	PERANGKAT DESA	91	78	169
85	KEPALA DESA	12	1	13
86	BIARAWATI	0	10	10
87	WIRASWASTA	8.080	976	9.056
88	LAINNYA	1	0	1
TOTAL		90.176	87.296	177.472

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Belitung



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
(L P P D)
KABUPATEN BELITUNG
TAHUN 2020 T.A. 2021**

**LAMPIRAN 2
KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH BERDASARKAN DOKUMEN PERENCANAAN
TAHUNAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH BERDASARKAN DOKUMEN
PERENCANAAN JANGKA MENENGAH**



Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan
Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah

Berdasarkan arah kebijakan dan sasaran dalam RPJMD Kabupaten Belitung Tahun 2018- 2023 dan memperhatikan RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2020, dan prioritas pembangunan Kabupaten Belitung Tahun 2020, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program prioritas daerah. Adapun program prioritas berdasarkan masing-masing urusan adalah sebagai berikut :

A. Program Melekat setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) :

Program Melekat pada setiap OPD meliputi :

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran;
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
3. Peningkatan Disiplin Aparatur;
4. Peningkatan Kompetensi Sumberdaya Aparatur Perangkat Daerah; dan
5. Peningkatan Kualitas Perencanaan, Pelaporan dan Informasi Kinerja Perangkat Daerah.

B. Urusan Wajib

Program Prioritas Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1) Urusan Wajib Terkait Pelayanan Dasar :

a. Urusan Pendidikan

- 1) Program Pendidikan Anak Usia Dini;
- 2) Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun;
- 3) Program Pendidikan Non Formal;
- 4) Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- 5) Program Manajemen Pelayanan Pendidikan; dan
- 6) Program Pelayanan Pendidikan Masyarakat Miskin/Tidak Mampu.

b. Urusan Kesehatan

- 1) Program Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan;
- 2) Program Upaya Pelayanan Kesehatan;
- 3) Program Upaya Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah;
- 4) Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit; dan
- 5) Program Upaya Kesehatan Masyarakat.

c. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- 1) Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Minum;
- 2) Program Pengembangan infrastruktur Permukiman;
- 3) Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi dan Jaringan Pengairan Lainnya;
- 4) Program Pengembangan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
- 5) Program Peningkatan dan pengembangan Turap/Talud/Bronjong;
- 6) Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Drainase Sekunder;
- 7) Program Pengembangan dan Penataan Bangunan;
- 8) Program Perencanaan Tata Ruang;
- 9) Program Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang;
- 10) Program Pembinaan dan Pengembangan Jasa Konstruksi;
- 11) Program Pengelolaan Sumber Air Baku;
- 12) Program Pengembangan dan Penataan Taman; dan

d. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman



- 1) Penanganan dan Pencegahan Kawasan Kumuh.
 - e. Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
 - 1) Pemeliharaan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat;
 - 2) Penyelamatan dan Evaluasi Korban Bencana;
 - 3) Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana; dan
 - 4) Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran.
 - f. Urusan Sosial
 - 1) Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial;
 - 2) Penanganan dan Pemberdayaan Fakir Miskin; dan
 - 3) Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial.
- 2) Urusan Wajib Tidak Terkait Pelayanan Dasar:
- a. Urusan Tenaga Kerja
 - 1) Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja; dan
 - 2) Program Peningkatan Kesempatan Kerja.
 - b. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 - 1) Pemenuhan Hak Anak (PHA);
 - 2) Perlindungan Perempuan dan Anak; dan
 - 3) Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan.
 - c. Urusan Pangan
 - 1) Program Peningkatan Konsumsi dan Keamanan Pangan; dan
 - 2) Program Peningkatan Ketersediaan dan Distribusi Pangan.
 - d. Urusan Lingkungan Hidup
 - 1) Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup; dan
 - 2) Program Peningkatan Pengelolaan Persampahan.
 - e. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 - 1) Program Penataan Administrasi Kependudukan.
 - f. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 - 1) Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa; dan
 - 2) Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa;
 - g. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
 - 1) Program Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga.
 - h. Urusan Perhubungan
 - 1) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Keselamatan Transportasi;
 - 2) Program Pengendalian, Pengawasan dan Evaluasi Transportasi;
 - 3) Program Peningkatan Pelayanan Transportasi Darat; dan
 - 4) Program Pengembangan Transportasi Laut.
 - i. Urusan Komunikasi dan Informatika
 - 1) Program Pengelolaan Aplikasi Informatika; dan
 - 2) Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik.
 - j. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
 - 1) Program Pengembangan dan Pemberdayaan Usaha Mikro;
 - 2) Program Pengembangan Koperasi; dan
 - 3) Program Pemasaran Produk Usaha Koperasi dan Usaha Mikro.
 - k. Urusan Perdagangan
 - 1) Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan; dan
 - 2) Program Pembinaan dan Pengembangan Pasar.
 - l. Urusan Penanaman Modal



- 1) Program Peningkatan Promosi dan Iklim Investasi;
 - 2) Program Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan; dan
 - 3) Pengendalian dan Pengawasan Investasi.
- m. Urusan Kepemudaan dan Olah Raga
- 1) Program Pemberdayaan dan Pemasyarakatan Olahraga;
 - 2) Program Peningkatan Prestasi Olahraga; dan
 - 3) Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan.
- n. Urusan Statistik
- 1) Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral.
- o. Urusan Persandian
- 1) Program Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah.
- p. Urusan Kebudayaan
- 1) Program Pengembangan Nilai Budaya.
- q. Urusan Perpustakaan
- 1) Program Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Gemar Membaca.
- r. Urusan Kearsipan
- 1) Peningkatan, Pengelolaan dan Pelestarian Arsip.

C. Urusan Pilihan

Program Prioritas Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 untuk urusan pilihan adalah sebagai berikut :

1. Urusan Kelautan dan Perikanan
 - 1) Program Pengembangan Perikanan Tangkap; dan
 - 2) Program Pengembangan Perikanan Budidaya.
2. Urusan Pariwisata
 - 1) Program Pengembangan Destinasi Pariwisata;
 - 2) Program Pemasaran Pariwisata;
 - 3) Program Pengembangan SDM, Kelembagaan dan Industri Pariwisata; dan
 - 4) Program Pengembangan Ekonomi Kreatif
3. Urusan Pertanian
 - 1) Program Pengembangan Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - 2) Program Pengembangan Tanaman Perkebunan;
 - 3) Program Pengembangan Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 - 4) Program Kesehatan Masyarakat Veteriner;
 - 5) Program Peningkatan Pelayanan Teknis Perbenihan dan Perbibitan; dan
 - 6) Program Pengembangan Prasarana, Sarana dan Penyuluhan Pertanian.
4. Urusan Perindustrian
 - 1) Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah; dan
 - 2) Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial.

D. Fungsi Penunjang

1. Fungsi Penunjang Perencanaan
 - 1) Program Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - 2) Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Sumberdaya alam;
 - 3) Program Perencanaan Pembangunan Sosial, Budaya dan Pemerintahan; dan
 - 4) Program Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah.
2. Fungsi Penunjang Keuangan
 - 1) Program Pengelolaan Perencanaan Keuangan Daerah;
 - 2) Program Pengelolaan Penatausahaan Keuangan Daerah;
 - 3) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah;



- 4) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- 5) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Pendapatan Daerah (PAD); dan
- 6) Program Pengelolaan Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.
3. Fungsi Penunjang Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan
 - 1) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
 - 2) Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur; dan
 - 3) Program Penataan Manajemen SDM Aparatur.
4. Fungsi Penunjang Penelitian dan Pengembangan
 - 1) Program Penelitian dan Pengembangan.
5. Fungsi Penunjang Lainnya
 - 1) Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - 2) Program Penataan Kelembagaan;
 - 3) Program Pelayanan Pimpinan, Pejabat Daerah, Tamu dan Sosial;
 - 4) Program Pelayanan Kehumasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - 5) Program Layanan Pengadaan Barang dan Jasa;
 - 6) Program Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan;
 - 7) Program Pengelolaan Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan Daerah;
 - 8) Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan;
 - 9) Program Penyelesaian Permasalahan Hukum di Daerah;
 - 10) Program Kebijakan Kesejahteraan Rakyat;
 - 11) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik;
 - 12) Program Pembinaan Otonomi Daerah dan Kerjasama;
 - 13) Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah;
 - 14) Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH;
 - 15) Program Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
 - 16) Program Penguatan Kewaspadaan;
 - 17) Program Ketahanan Ekonomi, Sosial, Seni dan Budaya; dan
 - 18) Program Pembinaan Politik Dalam Negeri;
 - 19) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan;
 - 20) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dan/atau
 - 21) Kelurahan.

a. Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan

➤ **Program Melekat setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD)**

Program Melekat pada setiap OPD meliputi :

- | | | |
|-------------------|----------|--|
| 1. Program | : | Pelayanan Administrasi Perkantoran |
| Kegiatan | : | <ol style="list-style-type: none">1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik3. Penyediaan Alat Tulis Kantor4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan5. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor6. Penyediaan Bahan Bacaan7. Penyediaan Makanan dan Minuman8. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah |



9. Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
 10. Kesejahteraan Pegawai Non PNS
 11. Penyediaan Obat-obatan
- 2. Program** : **Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**
Kegiatan :
 1. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
 2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
 3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
 4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
 5. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
 6. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
 7. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
 8. Pengadaan Meubelair
 9. Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair
 10. Pembuatan DED gedung kantor
 11. Pembangunan Pagar Kantor
 12. Rehabilitasi sedang/berat bangunan gedung kantor
 13. Pengadaan Genset
 14. Pembuatan Sumur Bor kantor Bupati
 15. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Jabatan
 16. Pembangunan Pos Jaga
 17. Pembuatan Taman
 18. Pembangunan Talud dan Pagar Kantor
 19. Pembuatan Teralis Pintu dan Teralis Jendela Kantor
 20. Pembuatan Gapura Kantor
 21. Pengadaan Jaringan Listrik
- 3. Program** : **Peningkatan Disiplin Aparatur**
Kegiatan :
 1. Pengadaan Mesin Absensi
 2. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
 3. Pengadaan Pakaian Hari-Hari Tertentu
- 4. Program** : **Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah**
Kegiatan :
 1. Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah
 2. Penilaian dan Penetapan Angka Kredit dan Uji Kompetensi Pejabat Fungsional
 3. Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia Kesehatan



4. Pelatihan di Kantor Sendiri (PKS)
5. **Program** : **Peningkatan Kualitas Perencanaan, Pelaporan dan Informasi Kinerja Perangkat Daerah**
 - Kegiatan : 1. Penyusunan Dokumen Keuangan Perangkat Daerah
 2. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 3. Penyusunan Laporan Kinerja Perangkat daerah
 4. Pengelolaan *Website* Perangkat Daerah
 5. Promosi Pembangunan Daerah
 6. Monitoring dan Pendampingan Penatausahaan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung
- **Urusan** : **WAJIB**
 - 1.) **Urusan** : **Wajib Terkait Pelayanan Dasar**
 - a. **Bidang Urusan** : **Pendidikan**
 1. **Program** : **Pendidikan Anak Usia Dini**
 - Kegiatan : 1. Penyediaan Buku Administrasi Siswa PAUD
 2. Pengembangan Karakter, Minat, Bakat dan Kreatifitas Siswa PAUD
 3. Penyelenggaraan PAUD
 4. Kesejahteraan Tenaga Guru PAUD Formal dan Non Formal
 5. Tambahan Penghasilan Guru PAUD (TA, RA, BA, PAUD Non Formal) Non PNS
 6. Pembangunan Sarana dan Prasarana PAUD
 7. Bantuan Operasional Pengelolaan PAUD
 2. **Program** : **Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun**
 - Kegiatan : 1. Rehabilitasi Prasarana Belajar SD
 2. Pembangunan Prasarana Belajar SD
 3. Penyusunan DED Prasarana Belajar SD
 4. Pembinaan dan Pengembangan Karakter, Minat, Bakat dan Kreatifitas Siswa SD
 5. Penilaian Hasil Belajar SD
 6. Penyediaan Dana Pengembangan Sekolah untuk SD/MI
 7. Pengadaan Sarana Belajar SD
 8. Bantuan Operasional Sekolah
 9. Rehabilitasi Prasarana Belajar SMP
 10. Pembangunan Prasarana Belajar SMP
 11. Penyusunan DED Prasarana Belajar SMP
 12. Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMP
 13. Penilaian Hasil Belajar SMP
 14. Penyediaan Dana Pengembangan Sekolah untuk SMP/MTs
 15. Kesejahteraan Tenaga GTT dan PTTSD/SMP
 16. Pengadaan Sarana Belajar SMP
 17. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 18. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 19. Penyediaan Alat Tulis Kantor
 20. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan



21. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
22. Penyediaan Bahan Bacaan
23. Penyediaan Makanan dan Minuman
24. Penyediaan Spanduk, Umbul-umbul dan Bendera
25. Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
26. Penyediaan Obat-Obatan
27. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
28. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
29. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
30. Pemeliharaan Rutin Jaringan Instalasi Listrik Sekolah dan Perlengkapannya
31. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
32. Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa
Pemeliharaan Alat Praktik dan Peraga Siswa
33. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
34. Penyediaan Bahan Percontohan
35. Pemeliharaan Rutin/Berkala Buku Perpustakaan Sekolah
36. Pemeliharaan Rutin/Berkala Green House dan Rumah Kompos beserta Peralatannya
37. Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Drumband
38. Pemeliharaan Alat Laboratorium
39. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Laboratorium Komputer

3. Program : Pendidikan Non Formal

- Kegiatan :
1. Penyediaan Dana Pengembangan Pendidikan Non Formal
 2. Penilaian Hasil Belajar Pendidikan Non Formal
 3. Peningkatan Mutu TPA
 4. Bantuan Operasional Pengelolaan Pendidikan (BOP) Kesetaraan
 5. Pembangunan Prasarana Belajar SKB
 6. Pengadaan Sarana Belajar SKB
 7. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional

4. Program : Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

- Kegiatan :
1. Pemberdayaan Tenaga Pendidik Non Formal
 2. Pengembangan dan Pembinaan Profesi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dasar

5. Program : Manajemen Pelayanan Pendidikan

- Kegiatan :
1. Peningkatan Akurasi dan Potensi Pendidikan

6. Program : Pelayanan Pendidikan Masyarakat Miskin/Tidak Mampu

- Kegiatan :
1. Pendampingan Pendidikan Bagi Siswa SD Kurang Mampu (SIMPOR)
 2. Pendampingan Pendidikan Bagi Siswa SMP Kurang Mampu (SIMPOR)
 3. Beasiswa Pendidikan Tinggi Bagi Masyarakat Tidak Mampu dan Berprestasi (SIMPOR)

b. Bidang Urusan : Kesehatan

1. Program : Pendidikan Anak Usia Dini

- Kegiatan :
1. Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan



2. **Program** : **Upaya Pelayanan Kesehatan**
Kegiatan :
 1. Pengelolaan Gudang farmasi
 2. Pengelolaan UPT. Laboratorium Kesehatan Daerah
 3. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Dinas Kesehatan
 4. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Distribusi Obat dan E-Logistik
 5. Kesejahteraan Jaminan Kesehatan Nasional
 6. Pengelolaan Dana Non Kapitasi JKN
 7. Akreditasi Puskesmas
 8. Pengelolaan Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (PELANDUK)
 9. Tambahan Penghasilan Bagi Tenaga Kesehatan di Fasyankes Sangat Terpencil dan Terpencil
 10. Rehabilitasi Prasarana Kesehatan
 11. Pembangunan dan Rehabilitasi Prasarana Kesehatan untuk Puskesmas Pariwisata
 12. Pengadaan IPAL dan Generator Set Puskesmas
 13. Pengadaan IPAL dan Generator Set Puskesmas Pariwisata
 14. Pengadaan Ambulans Pariwisata dan Puskesmas Perairan
 15. Pembuatan DED
 16. Pengadaan Obat Pelayanan Kesehatan Dasar
 17. Pengadaan Alat Kesehatan (ALKES)
 18. Pengadaan Alat Kesehatan (ALKES) untuk Puskesmas Pariwisata
 19. Dukungan Manajemen Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan Jampersal
 20. Pengadaan Lahan untuk Puskesmas
 21. Penyediaan Jasa Peningkatan Pelayanan Puskesmas
 22. Pengadaan Alat Kesehatan Perawatan
 23. Penataan Taman
 24. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
 25. Pengelolaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional
 26. Pemeliharaan dan Kalibrasi Alat Kesehatan
 27. Pengelolaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional
 28. Peningkatan Mutu Layanan Kesehatan
 29. Pengadaan Peralatan/Perlengkapan Kesehatan
 30. Jaminan Kesehatan Masyarakat Belitung
3. **Program** : **Upaya Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah**
Kegiatan :
 1. Pengadaan Alat-Alat Kesehatan dan Penunjang
 2. Rehabilitasi Gedung Rumah Sakit
 3. Pelayanan Dokter Mitra
 4. Survei Akreditasi Rumah Sakit
 5. Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan RSUD
4. **Program** : **Pencegahan dan Pengendalian Penyakit**
Kegiatan :
 1. Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular
 2. Pengendalian HIV/AIDS Kabupaten Belitung
 3. Investigasi Kejadian Luar Biasa
 4. Pelayanan Kesehatan pada Penyakit yang Dapat Dicegah dengan Imunisasi dan Keadaan Khusus
 5. Pengadaan Bahan Habis Pakai Pemeriksaan HIV
 6. Pengadaan Vaccine Refrigerator Imunisasi
 7. Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular



- 8. Pengadaan Co Analyzer Pro
- 5. **Program** : **Upaya Kesehatan Masyarakat**
 - Kegiatan : 1. Pengadaan Obat Gizi
 - 2. Audit Maternal
 - 3. Jaminan Persalinan
 - 4. Audit Perinatal
 - 5. Pembinaan Keluarga Bawah Dua Tahun (BADUTA)
 - 6. Asistensi dan Asupan Makanan Tambahan untuk Balita (AMBONG)
 - 7. Peningkatan Kemampuan Pelayanan Kesehatan Usia Sekolah dan Remaja
 - 8. Pengembangan Puskesmas Santun Lansia
 - 9. Promosi Kesehatan
 - 10. Peningkatan Desa/Kelurahan Open Defecation Free (ODF)
 - 11. Pembinaan dan Administrasi Kabupaten Sehat
 - 12. Penyuluhan Keamanan Pangan
 - 13. Pemeriksaan Sampel Makanan dan Minuman
 - 14. Kursus Laik Higiene Sanitasi untuk Tempat Pengolahan Makanan
- c. **Bidang Urusan** : **Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**
 - 1. **Program** : **Penyediaan dan Pengelolaan Air Minum**
 - Kegiatan : 1. Perencanaan Bidang Air Minum
 - 2. Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Minum (DAK Reguler)
 - 3. Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Minum (DAK Penugasan)
 - 4. Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Minum (Dana Daerah Untuk Program Bersama/DDUPB)
 - 5. Pengelolaan dan Operasional UPT Air Minum
 - 6. Penyediaan Air Minum Berbasis Masyarakat
 - 2. **Program** : **Pengembangan infrastruktur Permukiman**
 - Kegiatan : 1. Perencanaan Pengembangan Infrastruktur Permukiman
 - 2. Penataan Lingkungan Pemukiman Penduduk
 - 3. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perumahan dan Permukiman
 - 4. Pembangunan Drainase Permukiman
 - 5. Penyediaan Prasarana dan Sarana Sanitasi
 - 3. **Program** : **Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi dan Jaringan Pengairan Lainnya**
 - Kegiatan : 1. Perencanaan Jaringan Irigasi
 - 2. Pembangunan/Peningkatan Saluran Irigasi
 - 3. Rehabilitasi Jaringan Irigasi
 - 4. Rehabilitasi Jaringan Irigasi (DAK)
 - 4. **Program** : **Pengembangan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan**
 - Kegiatan : 1. Perencanaan Penanganan Jalan dan Jembatan
 - 2. Pembangunan Jalan
 - 3. Pembangunan Jalan (DABA)
 - 4. Peningkatan Jalan
 - 5. Peningkatan Jalan (DAK Reguler)
 - 6. Pembangunan Jembatan (DAK Penugasan)
 - 7. Rehabilitasi dan Pemeliharaan berkala jalan
 - 8. Rehabilitasi dan Pemeliharaan rutin jalan dan jembatan
 - 9. Program Hibah Jalan Daerah (PHJD) Pemeliharaan jalan PHJD
 - 11. Pengadaan Lahan untuk Penanganan Jaringan Jalan dan Jembatan
 - 12. Monitoring, evaluasi dan pelaporan Bidang Kebinamargaan



12. Pengadaan Peralatan, Perbekalan dan Laboraturium
13. Pemeliharaan Peralatan laboratorium
5. **Program** : **Peningkatan dan pengembangan**
Kegiatan : Pembangunan Turap/Talud/Bronjong
6. **Program** : **Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Drainase**
Kegiatan : 1. Perencanaan Drainase
2. Pembangunan Saluran Drainase Sekunder
3. Pemeliharaan Saluran Drainase Sekunder
4. Pengadaan lahan untuk Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Drainase Sekunder
7. **Program** : **Pengembangan dan Penataan Bangunan**
Kegiatan : 1. Penyelenggaraan Bangunan Gedung
2. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Cipta Karya
3. Perencanaan Pengembangan dan Penataan Bangunan
4. Rehabilitasi Bangunan/Gedung Negara
8. **Program** : **Perencanaan Tata Ruang**
Kegiatan : 1. Perencanaan Tata Ruang
2. Penyusunan naskah akademik KPPN Selat Nasik
9. **Program** : **Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang**
Kegiatan : 1. Penguatan Kelembagaan TKPRD Kabupaten
2. Penyusunan Pelaporan Advis Penggunaan Lahan
3. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Tata Ruang
10. **Program** : **Pembinaan dan Pengembangan Jasa Konstruksi**
Kegiatan : 1. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Jasa Konstruksi
11. **Program** : **Pengelolaan Sumber Air Baku**
Kegiatan : 1. Perencanaan Sumber Air Baku
2. Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Bidang Sumber Daya Air
12. **Program** : **Pengembangan dan Penataan Taman**
Kegiatan : 1. Pemeliharaan Taman
- d. **Bidang Urusan** : **Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**
 1. **Program** : **Penanganan dan Pencegahan Kawasan Kumuh**
Kegiatan : 1. Perencanaan Penanganan dan Pencegahan Kawasan Kumuh
2. Pengadaan Lahan untuk Penanganan dan Pencegahan Kawasan Kumuh
3. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program KOTAKU
4. Pembangunan Rumah Layak Huni
- e. **Bidang Urusan** : **Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**
 1. **Program** : **Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**
Kegiatan : 1. Pembinaan dan Penyuluhan Perda dan Perkada
2. Pengawasan dan Penertiban Pelanggaran Peraturan daerah
3. Penyelidikan Pelanggaran Peraturan Daerah
4. Penegakan Produk Hukum Daerah
5. Pengelolaan Sekretarit PPNS



6. Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum
 7. Patroli Ketentraman dan Ketertiban Umum
 8. Pemberdayaan Satuan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Belitung
 9. Pelatihan Personil Satuan Polisi Pamong Praja
 10. Pengadaan Kendaraan Operasional Lapangan
 11. Gelar Pasukan dan Bakti Sosial Satpol PP
 12. Pembinaan Korps Musik
- 2. Program Kegiatan : Penyelamatan dan Evaluasi Korban Bencana**
1. Penyediaan Logistik Penanggulangan Bencana
 2. Pengelolaan Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana dan Tim Reaksi Cepat (SOS Center)
- 3. Program Kegiatan : Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana**
1. Pengelolaan Data dan Informasi Kebencanaan
 2. Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten Belitung
 3. Peningkatan Kapasitas Aparatur Penanggulangan Bencana
 4. Sosialisasi, Pelatihan dan Simulasi Penanggulangan Bencana
 5. Pengelolaan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana
- 4. Program Kegiatan : Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran**
1. Pengelolaan Pusat Pengendalian Penanggulangan Kebakaran dan Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Kebakaran (SOS Center)
 2. Pembinaan dan Pelatihan Penanggulangan Kebakaran
 3. Pengelolaan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Kebakaran
 4. Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran
- f. Bidang Urusan : Sosial**
- 1. Program Kegiatan : Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial**
1. Pelayanan dan Perlindungan Sosial Lanjut Usia
 2. Pelayanan dan Perlindungan Sosial Penyandang Disabilitas
 3. Pembinaan dan Rehabilitasi Sosial Anak Terlantar
 4. Pembinaan Taruna Siaga Bencana (TAGANA) dan Kampung Siaga Bencana (KSB)
- 2. Program Kegiatan : Penanganan dan Pemberdayaan Fakir Miskin**
1. Peningkatan Produktivitas Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Fakir Miskin
 2. Pembinaan dan Administrasi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)
 3. Pembinaan dan Administrasi Program Keluarga Harapan (PKH)
 4. Perlindungan dan Penanganan PMKS



- 3. Program** : **Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial**
 - Kegiatan : 1. Peningkatan Nilai-nilai Kepahlawanan
 - 2. Peningkatan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
 - 3. Rehab Gedung Graha Karang Taruna
 - 4. Pengelolaan Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin, Orang Tidak Mampu dan PMKS

- 2.) Urusan** : **Wajib Tidak Terkait Pelayanan Dasar**
 - a. Bidang Urusan** : **Tenaga Kerja**
 - 1. Program** : **Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja**
 - Kegiatan : 1. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Ketenagakerjaan
 - 2. Program** : **Peningkatan Kesempatan Kerja**
 - Kegiatan : 1. Pelatihan Berbasis Kompetensi
 - b. Bidang Urusan** : **Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**
 - 1. Program** : **Pemenuhan Hak Anak (PHA)**
 - Kegiatan : 1. Pengembangan Kabupaten Layak Anak
 - 2. Penguatan Kelembagaan Forum Anak
 - 2. Program** : **Perlindungan Perempuan dan Anak**
 - Kegiatan : 1. Peningkatan Kelembagaan Perlindungan Perempuan dan Anak
 - 2. Bimtek Kader Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat
 - 3. Peningkatan Kelembagaan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang
 - 3. Program** : **Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan**
 - Kegiatan : 1. Peningkatan Kapasitas Organisasi Perempuan
 - 2. Penyusunan Profil Data Terpilah dan Informasi Gender dan Anak
 - 3. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG)

- c. Bidang Urusan** : **Pangan**
 - 1. Program** : **Peningkatan Konsumsi dan Keamanan Pangan**
 - Kegiatan : 1. Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan
 - 2. Program** : **Peningkatan Ketersediaan dan Distribusi Pangan**
 - Kegiatan : 1. Pengembangan Cadangan Pangan Daerah
 - 2. Pembinaan Lumbung Pangan
 - 3. Pembinaan Desa Mandiri Pangan
 - 4. Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)
 - 5. Pemantauan dan Analisis Akses Harga Pangan Pokok
 - 6. Penguatan Sistem kewaspadaan Pangan dan Gizi

- d. Bidang Urusan** : **Lingkungan Hidup**



- 1. Program : Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup**
Kegiatan : 1. Pemantauan Kualitas Lingkungan
2. Inspeksi Penataan Lingkungan Hidup
3. Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kab. Belitung
4. Verifikasi Limbah B3
5. Pelayanan UPT Laboratorium Lingkungan
6. Pengadaan Bahan Kimia Laboratorium Lingkungan
7. Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan Hidup
8. Pos Penanganan Pengaduan dan Sengketa Lingkungan Hidup (P3SLH)
9. Pengelolaan Sekolah Peduli dan Berbudaya Lingkungan (Program Adiwiyata)
- 2. Program : Peningkatan Pengelolaan Persampahan**
Kegiatan : 1. Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan
2. Pengadaan Peralatan Petugas Kebersihan
3. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebersihan
4. Penyediaan Petugas Kebersihan
5. Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan
6. Pengendalian Kebersihan
7. Rehab Sedang/Berat Kendaraan Dinas operasional Kebersihan
8. Pemeliharaan Rutin Kendaraan Dinas/operasional Kebersihan
9. Pelayanan UPT Pengelolaan Sampah
10. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengurangan Timbulan Sampah Berbasis Masyarakat
11. Pembinaan TPS 3R (DABA)
- e. Bidang Urusan : Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**
- 1. Program : Penataan Administrasi Kependudukan**
Kegiatan : 1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Administrasi Kependudukan
2. Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan
3. Peningkatan Pelayanan Publik dalam Administrasi Kependudukan
4. Pengelolaan Arsip Administrasi Kependudukan
5. Pengelolaan Penerbitan Akta Kematian



6. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan
- f. Bidang Urusan : Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**
1. Program : **Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa**
 - Kegiatan :
 1. Evaluasi Perkembangan Desa / Kelurahan
 2. Pilkades Serentak
 3. Pelantikan Kepala Desa
 4. Pembinaan Pemerintahan Desa
 5. Pembinaan Administrasi dan Keuangan
 6. Penyusunan Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
 2. Program : **Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa**
 - Kegiatan :
 1. Pengelolaan Program PKK
 2. Pembinaan Pokjanal Posyandu
 3. Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat
 4. Gelar Teknologi Tepat Guna
 5. Pembinaan BUMDesa
- g. Bidang Urusan : Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana**
1. Program : **Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga**
 - Kegiatan :
 1. Pelayanan Kontrasepsi
 2. Pembinaan Institusi Masyarakat Pedesaan/Perkotaan dan Orientasi Institusi Masyarakat Pedesaan
 3. Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)
 4. Pendataan Keluarga
 5. Pengadaan Balai Penyuluh KB
 6. Pengadaan Sarana dan Prasarana Rumah Data Kependudukan
 7. Pembinaan dan Pengembangan Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Remaja, Mahasiswa
- h. Bidang Urusan : Perhubungan**
1. Program : **Peningkatan Sarana dan Prasarana Keselamatan Transportasi**
 - Kegiatan :
 1. Penyediaan Prasarana Angkutan
 2. Pemeliharaan dan Perawatan Fasilitas Perlengkapan Jalan
 3. Pengadaan Fasilitas Keselamatan Jalan dan Perlengkapan Jalan
 4. Pengadaan Bahan Pendukung Pengujian Kendaraan Bermotor
 5. Pengadaan Peralatan Pengujian Kendaraan Bermotor
 6. Pemeliharaan dan Perawatan Peralatan Pengujian Kendaraan



Bermotor

7. Monitoring dan Evaluasi Fasilitas Perlengkapan dan Keselamatan Jalan
8. Penambahan Instalasi Baru Penerangan Jalan Umum (PJU)
9. Penambahan Instalasi Baru Penerangan Utilitas Umum
10. Pemeliharaan rutin Penerangan Jalan dan Utilitas Umum
11. Penyediaan Jasa Listrik Lampu Jalan

2.Program :Pengendalian, Pengawasan dan Evaluasi Transportasi

- Kegiatan :
1. Penyelenggaraan Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru
 2. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Keselamatan LLAJ
 3. Pengiriman Awak Kendaraan Umum Teladan
 4. Pengiriman Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas
 5. Penertiban dan Pengawasan Perparkiran Kendaraan
 6. Penertiban dan Pengawasan Kendaraan Bermotor
 7. Monitoring dan Pengawasan Angkutan Jalan
 8. Penyelenggaraan Forum lalu lintas dan angkutan jalan

3.Program :Peningkatan Pelayanan Transportasi Darat

- Kegiatan
1. Pengelolaan Bus Sekolah
 2. Pengelolaan Sarana Transportasi Perhubungan Darat

4.Program :Pengembangan Transportasi Laut

- Kegiatan
1. Pengelolaaan Sarana Transpotasi Perhubungan Laut
 2. Pemeliharaan Sarana Prasarana Perhubungan Laut
 3. Pengadaan Sarana Bantu Navigasi Pantai (SBNP)
 4. Monitoring dan Evaluasi Angkutan Laut
 5. Penyusunan Dokumen Detail EGINEERING DESIGN PELABUHAN LAUT
 6. Studi Kelayakan Pelabuhan Lokal
 7. Studi Kelayakan Pembangunan Dermaga dan Fasilitas Umum
 8. Pembangunan Dermaga dan Fasilitas Umum

i. Bidang Urusan : Komunikasi dan Informatika

1. Program : Pengelolaan Aplikasi Informatika

- Kegiatan :
1. Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Umum dan Khusus yang Terintegrasi
 2. Penyelenggaraan Ekosistem TIK dan Kerjasama SMART CITY
 3. Layanan Akses Internet, Intranet dan Komunikasi Intra Pemerintah Daerah
 4. Layanan infrastruktur dasar data center, Disaster recovery center dan TIK
 5. Pemeliharaan jaringan, server dan aplikasi e-Government
 6. Layanan website lembaga, pelayanan publik dan kegiatan Pemerintah Daerah
 7. Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan e-



Government

- 2. Program : Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik**
 - Kegiatan : 1. Pengelolaan Layanan Pengaduan Masyarakat
 - 2. Analisa Informasi dan Komunikasi Publik
 - 3. Pembinaan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat
 - 4. Pengelolaan PPID
 - 5. Pengelolaan Media Center
 - 6. Pengelolaan Layanan Informasi Online
 - 7. Diseminasi Informasi Media Tradisional
 - 8. Pengelolaan Radio Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL)

- j. Bidang Urusan : Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**
 - 1. Program : Pengembangan dan Pemberdayaan Usaha Mikro**
 - Kegiatan 1. Pelatihan Kewirausahaan
 - 2. Pembinaan dan Pendampingan Usaha Mikro
 - 2. Program : Pengembangan Koperasi**
 - 1. Pembinaan Kelembagaan Koperasi
 - 3. Program : Pemasaran Produk Usaha Koperasi dan Usaha Mikro**
 - Kegiatan 1. Belitung Expo
 - 2. Pameran Perdagangan dan Produk Usaha Mikro

- k. Bidang Urusan : Perdagangan**
 - 1. Program : Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan**
 - Kegiatan 1. Pengendalian dan Ketertiban Pasar
 - 2. Pelayanan Metrologi legal
 - 3. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kemetrolgian
 - 4. Pengawasan Metrologi Legal
 - 5. Pembuatan DED Sarana Kemetrolgian
 - 2. Program : Pembinaan dan Pengembangan Pasar**
 - Kegiatan 1. Pengelolaan Pasar Tradisional
 - 2. Pembinaan Pasar Tradisional
 - 3. Revitalisasi Pasar Tradisional

- l. Bidang Urusan : Penanaman Modal**
 - 1. Program : Peningkatan Promosi dan Iklim Investasi**
 - Kegiatan 1. Penyelenggaraan Pameran Investasi
 - 2. Publikasi dan Sosialisasi Investasi dan Penanaman Modal
 - 3. Pengembangan Iklim Investasi
 - 2. Program : Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan**



- Kegiatan : 1. Pengadaan Material Pendukung Perizinan
- 2. Sosialisasi Perizinan Online (OSS)
- 3. Pengelolaan Administrasi KEK Tanjung Kelayang
- 3. Program Kegiatan : Pengendalian dan Pengawasan Investasi**
 - 1. Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman Modal
- m. Bidang Urusan : Kepemudaan dan Olahraga**
 - 1. Program Kegiatan : Pemberdayaan dan Pemasarakatan Olahraga**
 - 1. Pembinaan Olahraga Masyarakat
 - 2. Pembinaan Kesegaran Jasmani Masyarakat
 - 3. Pekan Olahraga Tradisional
 - 4. Pemberian Penghargaan bagi Insan Olahraga yang Berdedikasi dan Berprestasi
 - 2. Program Kegiatan : Peningkatan Prestasi Olahraga**
 - 1. Peningkatan Prestasi Olahraga Pelajar
 - 2. Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga
 - 3. Pembibitan dan Pembinaan Olahragawan Berbakat
 - 4. Revitalisasi Stadion Tanjungpandan
 - 5. Revitalisasi GOR Tanjungpandan
 - 6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Olahraga
 - 3. Program Kegiatan : Peningkatan Peran Serta Kepemudaan**
 - 1. Pembinaan Organisasi Kepemudaan
 - 2. Pengembangan Kreativitas Pemuda
 - 3. Pengembangan, Pembinaan dan Pelatihan Generasi Muda
 - 4. Pembinaan Drum Band/Marching Band
 - 5. Pelatihan Kewirausahaan Pemula
- n. Bidang Urusan : Statistik**
 - 1. Program Kegiatan : Penyelenggaraan Statistik Sektoral**
 - 1. Pengelolaan Belitung Satu Data
 - 2. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Statistik Sektoral
- o. Bidang Urusan : Persandian**
 - 1. Program Kegiatan : Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah**
 - 1. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Keamanan Informasi
 - 2. Peningkatan Pemahaman Keamanan Informasi Pemerintah Daerah dan Publik
- p. Bidang Urusan : Kebudayaan**
 - 1. Program Kegiatan : Pengembangan Nilai Budaya**
 - 1. Pengelolaan UPT. Museum



2. Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah
3. Pelestarian Cagar Budaya
4. Pengelolaan Museum Maritim
5. Persemaian Nilai Budaya
6. Peningkatan Peran Tokoh Masyarakat (KEMINANGAN)
7. Pemberdayaan Tokoh Masyarakat
8. Bantuan Operasional Pengelolaan Museum

q. Bidang Urusan : Perpustakaan

1. Program : Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Gemar Membaca
Kegiatan :

1. Pengembangan Perpustakaan Berbasis Digital
2. Pembinaan dan Supervisi Perpustakaan Sekolah, Khusus dan Desa
3. Pelatihan Pengelola Perpustakaan
4. Pengembangan Mitra Kerja Revitalisasi Perpustakaan
5. Pengembangan Layanan Perpustakaan
6. Pengembangan Kreatifitas Minat dan Budaya Baca
7. Pelestarian Bahan Pustaka
8. Pengolahan Buku Perpustakaan
9. Pengadaan Bahan Pustaka

r. Bidang Urusan : Kearsipan

1. Program : Peningkatan, Pengelolaan dan Pelestarian Arsip
Kegiatan :

1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengolahan Kearsipan
2. Pembinaan Petugas Kearsipan
3. Pemeliharaan Arsip Daerah

➤ **Urusan : Pilihan**

1. Bidang Urusan : Kelautan dan Perikanan

1. Program : Pengembangan Perikanan Tangkap
Kegiatan :

1. Pelayanan Unit Usaha Perikanan Tanjungpandan
2. Pelayanan Unit Usaha Perikanan Tanjung Binga
3. Pelayanan Pembuatan Dokumen Kapal
4. Pembangunan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap
5. Pengadaan Kapal Penangkap Ikan
6. Pengadaan Alat Penangkapan Ikan
7. Pengadaan Alat Bantu Penangkapan
8. Pengadaan Lampu Tambat Labuh Nelayan
9. Pengadaan Sarana Penangkapan Ikan



10. Penyusunan Analisis Data Indikator Kinerja Sektor Perikanan
11. Penyusunan Dokumen DED Kegiatan Pembangunan Perikanan
12. Pengendalian Sumber Daya Perikanan
13. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Sumber Daya Perikanan
14. Pemulihan dan Pelestarian Sumber Daya Perikanan

2. Program : Pengembangan Perikanan Budidaya

Kegiatan

- : 1. Budidaya Ikan Air Laut
2. Pengadaan Peralatan Budidaya ikan air laut
3. Pelayanan Pembuatan Rekomendasi Dokumen SIUP, TPUP dan TPKPIH
4. Sekolah Lapang bagi Pembudidaya
5. Temu Usaha Perikanan Budidaya
6. Pelayanan Balai Benih Ikan Lokal di Membalong
7. Pelayanan Balai Benih Ikan Lokal di Tanjung Binga
8. Sertifikasi Balai Benih Ikan (Lokal)
9. Pembinaan Unit Pembenihan Rakyat

2. Bidang Urusan : Pariwisata

1. Program : Pemasaran Pariwisata

Kegiatan

- : 1. Pemilihan dan Pembinaan Duta Wisata Kabupaten Belitung
2. Pembuatan Media Pemasaran Pariwisata
3. Expo Potensi Pariwisata Daerah
4. Promosi Pariwisata
5. Pengelolaan Data dan Informasi Pariwisata
6. Festival Tanjung Kelayang

2. Program : Pengembangan Destinasi Pariwisata

Kegiatan

- : 1. Penguatan Pembangunan Kepariwisataan
2. Pembinaan Destinasi (PHNJD)
3. Pengelolaan Taman Hiburan
4. Pengelolaan Destinasi Pariwisata Tanjung Kelayang, Sungai Padang dan Dive Center
5. Peningkatan Kapasitas Masyarakat di Destinasi Pariwisata
6. Festival Desa Wisata
7. Gerakan Sadar Wisata
8. Bimtek Pengelolaan Destinasi Pariwisata Sehat (PHNJD)



9. Penerapan Pengembangan Pariwisata yang Berkelanjutan
 10. Pengelolaan Tirta Loka
 11. Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata di Destinasi Pariwisata (DAK)
 12. Pengadaan Peralatan Selam Dive Center
 13. Pembangunan Pusat Informasi/ TIC dan Perlengkapannya
 14. Pembangunan Toilet di Kulong Keramik
 15. Pengelolaan dan Pengembangan Kawasan Geowisata Belitung
 16. Tata Kelola Destinasi (DAK Non Fisik)
 17. Pelatihan Home Stay (DAK Non Fisik)
 18. Penyusunan Dokumen Perencanaan Teknis Kepariwisata
- 3. Program Kegiatan : Pengembangan SDM, Kelembagaan dan Industri Pariwisata**
1. Pelatihan Pengembangan SDM Pariwisata
 2. Penyusunan Database Kelembagaan dan Industri Pariwisata
 3. Pelatihan Pemandu Wisata Selam (DAK Non Fisik)
 4. Pelatihan Pemandu Wisata Pedesaan (DAK Non Fisik)
- 4. Program Kegiatan : Pengembangan Ekonomi Kreatif**
1. Belitung Creative Week
 2. Apresiasi dan Seni Pertunjukan
 3. Peningkatan Kapasitas SDM Ekonomi Kreatif
- 3. Bidang Urusan : Pertanian**
- 1. Program Kegiatan : Pengembangan Tanaman Pangan dan Hortikultura**
1. Pengembangan Tanaman Padi
 2. Pengendalian Hama Terpadu Tanaman Pangan
 3. Pengembangan Tanaman Pangan Lokal
 4. Pengembangan Tanaman Hortikultura
 5. Pengendalian Hama Terpadu Tanaman Hortikultura
- 2. Program Kegiatan : Pengembangan Tanaman Perkebunan**
1. Pengembangan Bibit Unggul Pertanian/Perkebunan
 2. Pengolahan Hasil Tanaman Perkebunan
- 3. Program Kegiatan : Pengembangan Peternakan dan Kesehatan Hewan**
1. Peningkatan Populasi dan Mutu Ternak Ruminansia
 2. Pengembangan Ternak Unggas
- 4. Program Kegiatan : Kesehatan Masyarakat Veteriner**
1. Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Hewan
 2. Pengelolaan Puskesmas



- 3. Pengelolaan Rumah Potong Hewan
- 5. **Program Kegiatan** : **Peningkatan Pelayanan Teknis Perbenihan dan Perbibitan**
 - : 1. Pengelolaan Kebun Buah dan Areal Sawah Penangkaran Padi
 - 2. Pengelolaan Laboratorium dan Kebun Bibit Kultur Jaringan
 - 3. Pengembangan Bibit Ternak Ruminansia
- 6. **Program Kegiatan** : **Pengembangan Prasarana, Sarana dan Penyuluhan Pertanian**
 - : 1. Pengawalan Pupuk dan Pestisida
 - 2. Optimalisasi Lahan Sawah
 - 3. Perencanaan Teknis Perlindungan Lahan Pertanian Pangan
 - 4. Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian /Perkebunan
 - 5. Pengelolaan Kelembagaan Petani dan Usaha Pelayanan Jasa Alat Mesin Pertanian (UPJA)
- 4. **Bidang Urusan** : **Perindustrian**
 - 1. **Program Kegiatan** : **Pengembangan Industri Kecil dan Menengah**
 - 1. Pembinaan dan Promosi Industri Kerajinan
 - 2. Pengembangan Industri Kerajinan Keramik
 - 3. Monev Industri Kecil dan Menengah
 - 2. **Program Kegiatan** : **Pengembangan Sentra - sentra Industri Potensial**
 - 1. Bimbingan dan Penyuluhan IKM
- **Urusan** : **Fungsi Penunjang Urusan**
 - 1. **Bidang Urusan** : **Fungsi Penunjang Perencanaan**
 - 1. **Program Kegiatan** : **Perencanaan Pembangunan Daerah**
 - 1. Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Belitung
 - 2. Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Kabupaten Belitung
 - 3. Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Belitung
 - 4. Pembinaan Perencanaan Pembangunan Daerah
 - 5. Penyusunan RPJMD Kabupaten Belitung
 - 2. **Program Kegiatan** : **Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Sumber Daya Alam**
 - 1. Perencanaan Pembangunan Keuangan Pariwisata, Kelautan dan Perikanan
 - 2. Perencanaan Pembangunan Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Penanaman Modal
 - 3. Perencanaan Pembangunan Lingkungan Hidup, Pertanian dan Energi Sumber Daya Mineral
 - 3. **Program Kegiatan** : **Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya dan Pemerintahan**
 - 1. Perencanaan Pembangunan Sosial
 - 2. Perencanaan Pembangunan Budaya dan Pembangunan Manusia
 - 3. Perencanaan Pembangunan Pemerintahan
 - 4. **Program** : **Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah**



- Kegiatan : 1. Perencanaan Pembangunan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2. Perencanaan Pembangunan Perumahan dan Permukiman, Perhubungan
3. Perencanaan Pembangunan Komunikasi dan Informatika, Statistik, Persandian dan Kecamatan
- 2. Bidang Urusan : Fungsi Penunjang Keuangan**
- 1. Program : Pengelolaan Perencanaan Keuangan Daerah**
Kegiatan : 1. Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
2. Penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
3. Penyusunan Standar Satuan Harga dan Analisa Satuan Belanja
4. Penyusunan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran
- 2. Program : Pengelolaan Penatausahaan Keuangan Daerah**
Kegiatan : 1. Pengelolaan Keuangan Daerah
- 3. Program : Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah**
Kegiatan : 1. Penyusunan Laporan Prognosis Realisasi Anggaran
2. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
3. Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
4. Pendampingan Lingkup Akuntansi dan Pelaporan
5. Pengelolaan Sistem Informasi Keuangan
- 4. Program : Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Barang Milik Daerah**
Kegiatan : 1. Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
2. Pendampingan Pengelolaan Barang Milik Daerah
3. Pengelolaan Sistem Informasi Barang Milik Daerah
4. Pengelolaan Pemindahtanganan, Pemanfaatan dan Pemusnahan Barang Milik Daerah
5. Inventarisasi Barang Milik Daerah
6. Pengamanan Barang Milik Pemerintah Kabupaten Belitung
- 5. Program : Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)**
Kegiatan : 1. Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah
2. Pendataan Pajak Daerah
3. Penerbitan dan Penyampaian SPPT PBB P2
4. Monitoring Pajak Daerah
5. Sosialisasi Pajak Daerah
6. Peningkatan Retribusi Daerah
7. Pembinaan Pengelolaan Pendapatan Daerah



- 6. Program** : **Pengelolaan Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah**
Kegiatan : 1. Peningkatan Pengelolaan Dana Perimbangan
2. Peningkatan Pengelolaan Lain -lain Pendapatan Daerah yang Sah
- 3. Bidang Urusan** : **Fungsi Penunjang Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan**
- 1. Program** : **Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**
Kegiatan : 1. Peningkatan Pendidikan Aparatur
2. Diklat Penjenjangan Pegawai
3. Diklat Teknis/Fungsional Pegawai
- 2. Program** : **Pembinaan dan Pengembangan Aparatur**
1. Pelayanan Administrasi Kepegawaian
2. Penyelenggaraan Konsultasi dan Bantuan Hukum Bagi ASN
3. Event Olahraga dan Seni Bagi ASN
4. Pengelolaan Dewan Pengurus Korps Profesi ASN
- 3. Program** : **Penataan Manajemen SDM Aparatur**
Kegiatan : 1. Pengadaan ASN
2. Pelatikan Jabatan dan Pengambilan Sumpah ASN
3. Seleksi/Promosi Terbuka Jabatan Tertentu
- 4. Bidang Urusan** : **Fungsi Penunjang Penelitian dan Pengembangan**
- 1. Program** : **Penelitian dan Pengembangan**
1. Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan
- 5. Bidang Urusan** : **Fungsi Penunjang Lainnya**
- 1. Program** : **Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**
Kegiatan : 1. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Belitung
2. Penyusunan LPPD dan Ringkasan ILPPD dalam Rangka EKPPD Kabupaten Belitung
- 2. Program** : **Penataan Kelembagaan**
Kegiatan : 1. Evaluasi Kelembagaan
2. Pengendalian dan Evaluasi Standar Pelayanan Perangkat Daerah
3. Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi Kabupaten Belitung
4. Evaluasi Penerapan dan Pencapaian Target Standar Pelayanan Minimal (SPM)
5. Survey Kepuasan Masyarakat
- 3. Program** : **Pelayanan Pimpinan, Pejabat Daerah, Tamu dan Sosial**
Kegiatan : 1. Pelayanan Pejabat Daerah, Tamu dan Sosial
2. Perjalanan Dinas Bupati dan Wakil Bupati



3. Pengadaan Pakaian Dinas dan Perlengkapannya
 4. Pengadaan Peralatan Rumah Tangga/Rumah Dinas Bupati
 5. Pengadaan Peralatan Rumah Tangga/Rumah Dinas Wakil Bupati
 6. Penyediaan Makanan dan Minuman Rumah Dinas Bupati dan Wakil Bupati
 7. Penyediaan Jasa Kebersihan Rumah Dinas Bupati dan Wakil Bupati
 8. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Bupati dan Wakil Bupati
 9. Penyediaan Komponen/Alat Listrik Rumah Dinas Bupati dan Wakil Bupati
 10. Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Rumah Dinas Bupati dan Wakil Bupati
 11. Penyediaan Gas
4. **Program Kegiatan** : **Pelayanan Kehumasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**
1. Pengelolaan Publikasi dan Dokumentasi Kehumasan
 2. Pengelolaan *Local Area Network* (LAN) Setda
 3. Pengelolaan *Website* Setda Kabupaten Belitung
 4. Promosi Pembangunan Daerah
5. **Program Kegiatan** : **Layanan Pengadaan Barang dan Jasa**
1. Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa
 2. Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)
 3. Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa
6. **Program Kegiatan** : **Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan**
1. Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Kabupaten Belitung
7. **Program Kegiatan** : **Pengelolaan Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan Daerah**
1. Pengelolaan Program CSR Kabupaten Belitung
 2. Pengendalian Inflasi Daerah
 3. Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Kemudahan Berusaha
 4. Pengendalian dan Evaluasi BUMD Kabupaten Belitung
 6. Monitoring Pengendalian Pembangunan
8. **Program Kegiatan** : **Penataan Peraturan Perundang-Undangan**
1. Harmonisasi Pembentukan Produk Hukum Daerah
 2. Kodifikasi Produk Hukum Daerah
 3. Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Produk Hukum Daerah
9. **Program Kegiatan** : **Penyelesaian Permasalahan Hukum di Daerah**
1. Penyelesaian Permasalahan Hukum Pemerintah Daerah
 2. Pembinaan Hukum
10. **Program Kegiatan** : **Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**
1. Pembinaan Nilai-Nilai Keagamaan



2. Pengelolaan Tim Pembina UKS Kabupaten Belitung
11. **Program Kegiatan** : **Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik**
 1. Penyediaan Perlengkapan dan Prasarana Pelayanan Publik
 2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mess/Asrama Milik Pemerintah Kabupaten Belitung
 3. Pengadaan Sarana dan Prasarana Mess dan Asrama Mahasiswa
 4. Pembangunan Mess Kalibaru
 5. Pembangunan Ruang Pertemuan Pemuda
12. **Program kegiatan** : **Pembinaan Otonomi Daerah dan Kerjasama**
 1. Pembayaran iuran Keanggotaan APKASI Tahunan Bupati Belitung
 2. Rapat Koordinasi Pemerintah
 3. Pembayaran iuran Keanggotaan ASPEKSINDO
13. **Program Kegiatan** : **Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah**
 1. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
 2. Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD
 3. Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD
 3. Rapat-rapat DPRD
 4. Penyusunan Program Pembentukan PERDA (PROPEMPERDA) Kabupaten Belitung
 5. Pengembangan Pelayanan Kesehatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD
 6. Pengelolaan Tenaga Ahli DPRD
 7. Pengelolaan Informasi dan Kehumasan
 8. Pengadaan Pakaian DPRD beserta Perlengkapannya
 9. Pengadaan Pakaian Hari hari Tertentu DPRD
14. **Program Kegiatan** : **Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH**
 1. Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala
 2. Penanganan Pemeriksaan Kasus dan Khusus
 3. Pemutakhiran Data Tindaklanjut pemeriksaan BPK dan APIP
 4. Pelaksanaan Survei Penilaian Integritas
 5. Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara dan Daerah
 6. Monitoring dan Evaluasi SAKIP
 7. Pengelolaan Unit Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Kabupaten Belitung
15. **Program Kegiatan** : **Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan**
 1. Pembinaan Masyarakat terhadap Wawasan Kebangsaan dan Nilai-nilai Sejarah Perjuangan Bangsa



2. Pendidikan dan Pelatihan Kader Bela Negara
 3. Pembinaan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)
 4. Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)
 5. Gerakan Nasional Revolusi Mental Kabupaten Belitung
 6. Forum Penguatan Ideologi Bangsa
- 16. Program Kegiatan : Penguatan Kewaspadaan**
1. Pengelolaan Tim Kewaspadaan dini Pemerintah Daerah
 2. Penanganan Konflik Sosial (PKS)
 3. Pemantauan Orang Asing
 4. Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM)
 5. Pemetaan Potensi Konflik Sosial
- 17. Program : Ketahanan Ekonomi, Sosial, Seni dan Budaya**
1. Pagelaran Seni dan Budaya Nusantara
- 18. Program Kegiatan : Pembinaan Politik Dalam Negeri**
1. Bimtek Administrasi Bantuan Keuangan Partai Politik
 2. Verifikasi Penyaluran Bantuan Keuangan Partai Politik
 3. Pemantauan Perkembangan Politik di Kab. Belitung
 4. Pendidikan Etika dan Budaya Politik
 5. Peningkatan Peran Perempuan dalam Kancah Politik
 6. Sistem Informasi Politik Dalam Negeri (SIMPOLDAGRI)
 7. Pembinaan Organisasi Masyarakat
 8. Peningkatan Peran FORKOPIMDA
- 19. Program Kegiatan : Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan**
1. Musyawarah Perencanaan Pembangunan
 2. Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan
 3. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
 4. Penguatan Bidang Kesehatan Masyarakat
 5. Penguatan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga
 6. Penguatan Nilai-Nilai Kebangsaan
 7. Penguatan Nilai-Nilai Keagamaan
 8. Penguatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat
 9. Penguatan Bidang Seni dan Budaya
- 20. Program : Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan**
1. Pembinaan Pemerintahan Desa dan atau Kelurahan
 2. Evaluasi Perkembangan Desa dan/ atau Kelurahan Tingkat Kecamatan
- **Program Melekat setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD)**



Program Melekat pada setiap OPD meliputi :

- 1. Program** : **Pelayanan Administrasi Perkantoran**
- Kegiatan :
 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 3. Penyediaan Alat Tulis Kantor
 4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 5. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 6. Penyediaan Bahan Bacaan
 7. Penyediaan Makanan dan Minuman
 8. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
 9. Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
 10. Kesejahteraan Pegawai Non PNS
 11. Penyediaan Obat-obatan

- 2. Program** : **Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**
- Kegiatan :
 1. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
 2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
 3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
 4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
 5. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
 6. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
 7. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
 8. Pengadaan Meubelair
 9. Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair
 10. Pembuatan DED gedung kantor
 11. Pembangunan Pagar Kantor
 12. Rehabilitasi sedang/berat bangunan gedung kantor
 13. Pengadaan Genset
 14. Pembuatan Sumur Bor kantor Bupati
 15. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Jabatan
 16. Pembangunan Pos Jaga
 17. Pembuatan Taman
 18. Pembangunan Talud dan Pagar Kantor
 19. Pembuatan Teralis Pintu dan Teralis Jendela Kantor
 20. Pembuatan Gapura Kantor
 21. Pengadaan Jaringan Listrik



- 3. Program** : **Peningkatan Disiplin Aparatur**
Kegiatan : 1. Pengadaan Mesin Absensi
2. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
3. Pengadaan Pakaian Hari-Hari Tertentu
- 4. Program** : **Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah**
Kegiatan : 1. Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah
2. Penilaian dan Penetapan Angka Kredit dan Uji Kompetensi Pejabat Fungsional
3. Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia Kesehatan
4. Pelatihan di Kantor Sendiri (PKS)
- 5. Program** : **Peningkatan Kualitas Perencanaan, Pelaporan dan Informasi Kinerja Perangkat Daerah**
Kegiatan : 1. Penyusunan Dokumen Keuangan Perangkat Daerah
2. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
3. Penyusunan Laporan Kinerja Perangkat daerah
4. Pengelolaan *Website* Perangkat Daerah
5. Promosi Pembangunan Daerah
6. Monitoring dan Pendampingan Penatausahaan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung
- **Urusan** : **WAJIB**
- 1.) Urusan** : **Wajib Terkait Pelayanan Dasar**
- a. Bidang Urusan** : **Pendidikan**
- 5. Program** : **Pendidikan Anak Usia Dini**
Kegiatan : 1. Penyediaan Buku Administrasi Siswa PAUD
2. Pengembangan Karakter, Minat, Bakat dan Kreatifitas Siswa PAUD
3. Penyelenggaraan PAUD
4. Kesejahteraan Tenaga Guru PAUD Formal dan Non Formal
5. Tambahan Penghasilan Guru PAUD (TA, RA, BA, PAUD Non Formal) Non PNS
6. Pembangunan Sarana dan Prasarana PAUD
7. Bantuan Operasional Pengelolaan PAUD
- 6. Program** : **Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun**
Kegiatan : 1. Rehabilitasi Prasarana Belajar SD
2. Pembangunan Prasarana Belajar SD
3. Penyusunan DED Prasarana Belajar SD
4. Pembinaan dan Pengembangan Karakter, Minat, Bakat dan Kreatifitas Siswa SD
5. Penilaian Hasil Belajar SD
6. Penyediaan Dana Pengembangan Sekolah untuk SD/MI
7. Pengadaan Sarana Belajar SD
8. Bantuan Operasional Sekolah



9. Rehabilitasi Prasarana Belajar SMP
10. Pembangunan Prasarana Belajar SMP
11. Penyusunan DED Prasarana Belajar SMP
12. Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMP
13. Penilaian Hasil Belajar SMP
14. Penyediaan Dana Pengembangan Sekolah untuk SMP/MTs
15. Kesejahteraan Tenaga GTT dan PTTSD/SMP
16. Pengadaan Sarana Belajar SMP
17. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
18. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
19. Penyediaan Alat Tulis Kantor
20. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
21. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
22. Penyediaan Bahan Bacaan
23. Penyediaan Makanan dan Minuman
24. Penyediaan Spanduk, Umbul-umbul dan Bendera
25. Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
26. Penyediaan Obat-Obatan
27. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
28. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
29. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
30. Pemeliharaan Rutin Jaringan Instalasi Listrik Sekolah dan Perlengkapannya
31. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
32. Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa
Pemeliharaan Alat Praktik dan Peraga Siswa
33. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
34. Penyediaan Bahan Percontohan
35. Pemeliharaan Rutin/Berkala Buku Perpustakaan Sekolah
36. Pemeliharaan Rutin/Berkala Green House dan Rumah Kompos beserta Peralatannya
37. Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Drumband
38. Pemeliharaan Alat Laboratorium
39. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Laboratorium Komputer

- 7. Program** : **Pendidikan Non Formal**
Kegiatan :
 1. Penyediaan Dana Pengembangan Pendidikan Non Formal
 2. Penilaian Hasil Belajar Pendidikan Non Formal
 3. Peningkatan Mutu TPA
 4. Bantuan Operasional Pengelolaan Pendidikan (BOP) Kesetaraan
 5. Pembangunan Prasarana Belajar SKB
 6. Pengadaan Sarana Belajar SKB
 7. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional
- 8. Program** : **Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan**
Kegiatan :
 1. Pemberdayaan Tenaga Pendidik Non Formal
 2. Pengembangan dan Pembinaan Profesi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dasar



- 5. Program : Manajemen Pelayanan Pendidikan**
Kegiatan : 1. Peningkatan Akurasi dan Potensi Pendidikan
- 6. Program : Pelayanan Pendidikan Masyarakat Miskin/Tidak Mampu**
Kegiatan : 1. Pendampingan Pendidikan Bagi Siswa SD Kurang Mampu (SIMPOR)
2. Pendampingan Pendidikan Bagi Siswa SMP Kurang Mampu (SIMPOR)
3. Beasiswa Pendidikan Tinggi Bagi Masyarakat Tidak Mampu dan Berprestasi (SIMPOR)
- b. Bidang Urusan : Kesehatan**
- 2. Program : Pendidikan Anak Usia Dini**
Kegiatan : 1. Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan
2. Penyusunan Profil Kesehatan
- 2. Program : Upaya Pelayanan Kesehatan**
Kegiatan : 1. Pengelolaan Gudang farmasi
2. Pengelolaan UPT. Laboratorium Kesehatan Daerah
3. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Dinas Kesehatan
4. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Distribusi Obat dan E-Logistik
5. Kesejahteraan Jaminan Kesehatan Nasional
6. Pengelolaan Dana Non Kapitasi JKN
7. Akreditasi Puskesmas
8. Pengelolaan Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (PELANDUK)
9. Tambahan Penghasilan Bagi Tenaga Kesehatan di Fasyankes Sangat Terpencil dan Terpencil
10. Rehabilitasi Prasarana Kesehatan
11. Pembangunan dan Rehabilitasi Prasarana Kesehatan untuk Puskesmas Pariwisata
12. Pengadaan IPAL dan Generator Set Puskesmas
13. Pengadaan IPAL dan Generator Set Puskesmas Pariwisata
14. Pengadaan Ambulans Pariwisata dan Puskesmas Perairan
15. Pembuatan DED
16. Pengadaan Obat Pelayanan Kesehatan Dasar
17. Pengadaan Alat Kesehatan (ALKES)
18. Pengadaan Alat Kesehatan (ALKES) untuk Puskesmas Pariwisata
19. Dukungan Manajemen Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan Jampersal
20. Pengadaan Lahan untuk Puskesmas
21. Penyediaan Jasa Peningkatan Pelayanan Puskesmas
22. Pengadaan Alat Kesehatan Perawatan
23. Penataan Taman
24. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
25. Pengelolaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional
26. Pemeliharaan dan Kalibrasi Alat Kesehatan
27. Pengelolaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional
28. Peningkatan Mutu Layanan Kesehatan
29. Pengadaan Peralatan/Perlengkapan Kesehatan
30. Jaminan Kesehatan Masyarakat Belitung
- 3. Program : Upaya Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah**
Kegiatan : 1. Pengadaan Alat-Alat Kesehatan dan Penunjang
2. Rehabilitasi Gedung Rumah Sakit



3. Pelayanan Dokter Mitra
4. Survei Akreditasi Rumah Sakit
5. Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan RSUD
4. **Program** : **Pencegahan dan Pengendalian Penyakit**
Kegiatan :
 1. Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular
 2. Pengendalian HIV/AIDS Kabupaten Belitung
 3. Investigasi Kejadian Luar Biasa
 4. Pelayanan Kesehatan pada Penyakit yang Dapat Dicegah dengan Imunisasi dan Keadaan Khusus
 5. Pengadaan Bahan Habis Pakai Pemeriksaan HIV
 6. Pengadaan Vaccine Refrigerator Imunisasi
 7. Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular
 8. Pengadaan Co Analyzer Pro
5. **Program** : **Upaya Kesehatan Masyarakat**
Kegiatan :
 1. Pengadaan Obat Gizi
 2. Audit Maternal
 3. Jaminan Persalinan
 4. Audit Perinatal
 5. Pembinaan Keluarga Bawah Dua Tahun (BADUTA)
 6. Asistensi dan Asupan Makanan Tambahan untuk Balita (AMBONG)
 7. Peningkatan Kemampuan Pelayanan Kesehatan Usia Sekolah dan Remaja
 8. Pengembangan Puskesmas Santun Lansia
 9. Promosi Kesehatan
 10. Peningkatan Desa/Kelurahan Open Defecation Free (ODF)
 11. Pembinaan dan Administrasi Kabupaten Sehat
 12. Penyuluhan Keamanan Pangan
 13. Pemeriksaan Sampel Makanan dan Minuman
 14. Kursus Laik Higiene Sanitasi untuk Tempat Pengolahan Makanan
- c. **Bidang Urusan** : **Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**
 1. **Program** : **Penyediaan dan Pengelolaan Air Minum**
Kegiatan :
 1. Perencanaan Bidang Air Minum
 2. Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Minum (DAK Reguler)
 3. Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Minum (DAK Penugasan)
 4. Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Minum (Dana Daerah Untuk Program Bersama/DDUPB)
 5. Pengelolaan dan Operasional UPT Air Minum
 6. Penyediaan Air Minum Berbasis Masyarakat
 2. **Program** : **Pengembangan infrastruktur Permukiman**
Kegiatan :
 1. Perencanaan Pengembangan Infrastruktur Permukiman
 2. Penataan Lingkungan Pemukiman Penduduk
 3. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perumahan dan Permukiman
 4. Pembangunan Drainase Permukiman
 5. Penyediaan Prasarana dan Sarana Sanitasi
 3. **Program** : **Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi dan Jaringan Pengairan Lainnya**
Kegiatan :
 1. Perencanaan Jaringan Irigasi
 2. Pembangunan/Peningkatan Saluran Irigasi
 3. Rehabilitasi Jaringan Irigasi
 4. Rehabilitasi Jaringan Irigasi (DAK)
 4. **Program** : **Pengembangan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan**



- Kegiatan : 1. Perencanaan Penanganan Jalan dan Jembatan
- 2. Pembangunan Jalan
- 3. Pembangunan Jalan (DABA)
- 4. Peningkatan Jalan
- 5. Peningkatan Jalan (DAK Reguler)
- 6. Pembangunan Jembatan (DAK Penugasan)
- 7. Rehabilitasi dan Pemeliharaan berkala jalan
- 8. Rehabilitasi dan Pemeliharaan rutin jalan dan jembatan
- 9. Program Hibah Jalan Daerah (PHJD) Pemeliharaan jalan PHJD
- 11. Pengadaan Lahan untuk Penanganan Jaringan Jalan dan Jembatan
- 12. Monitoring, evaluasi dan pelaporan Bidang Kebinamargaan
- 12. Pengadaan Peralatan, Perbekalan dan Laboraturium
- 13. Pemeliharaan Peralatan laboraturium
- 5. Program : Peningkatan dan pengembangan**
Kegiatan : Pembangunan Turap/Talud/Bronjong
- 6. Program : Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Drainase**
Kegiatan : 1. Perencanaan Drainase
- 2. Pembangunan Saluran Drainase Sekunder
- 3. Pemeliharaan Saluran Drainase Sekunder
- 4. Pengadaan lahan untuk Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Drainase Sekunder
- 7. Program : Pengembangan dan Penataan Bangunan**
Kegiatan : 1. Penyelenggaraan Bangunan Gedung
- 2. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Cipta Karya
- 3. Perencanaan Pengembangan dan Penataan Bangunan
- 4. Rehabilitasi Bangunan/Gedung Negara
- 8. Program : Perencanaan Tata Ruang**
Kegiatan : 2. Perencanaan Tata Ruang
- 2. Penyusunan naskah akademik KPPN Selat Nasik
- 9. Program : Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang**
Kegiatan : 4. Penguatan Kelembagaan TKPRD Kabupaten
- 5. Penyusunan Pelaporan Advis Penggunaan Lahan
- 6. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Tata Ruang
- 10. Program : Pembinaan dan Pengembangan Jasa Konstruksi**
Kegiatan : 2. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Jasa Konstruksi
- 11. Program : Pengelolaan Sumber Air Baku**
Kegiatan : 3. Perencanaan Sumber Air Baku
- 4. Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Bidang Sumber Daya Air
- 12. Program : Pengembangan dan Penataan Taman**
Kegiatan : 2. Pemeliharaan Taman
- d. Bidang Urusan : Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**
 - 1. Program : Penanganan dan Pencegahan Kawasan Kumuh**
Kegiatan : 5. Perencanaan Penanganan dan Pencegahan Kawasan Kumuh
 - 6. Pengadaan Lahan untuk Penanganan dan Pencegahan Kawasan Kumuh
 - 7. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program KOTAKU



8. Pembangunan Rumah Layak Huni

- e. Bidang Urusan : Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**
- 1. Program : Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**
- Kegiatan :
1. Pembinaan dan Penyuluhan Perda dan Perkada
 2. Pengawasan dan Penertiban Pelanggaran Peraturan daerah
 3. Penyelidikan Pelanggaran Peraturan Daerah
 4. Penegakan Produk Hukum Daerah
 5. Pengelolaan Sekretarit PPNS
 6. Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum
 7. Patroli Ketentraman dan Ketertiban Umum
 8. Pemberdayaan Satuan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Belitung
 9. Pelatihan Personil Satuan Polisi Pamong Praja
 10. Pengadaan Kendaraan Operasional Lapangan
 11. Gelar Pasukan dan Bakti Sosial Satpol PP
 12. Pembinaan Korps Musik
- 2. Program : Penyelamatan dan Evaluasi Korban Bencana**
- Kegiatan :
1. Penyediaan Logistik Penanggulangan Bencana
 2. Pengelolaan Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana dan Tim Reaksi Cepat (SOS Center)
- 3. Program : Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana**
- Kegiatan :
1. Pengelolaan Data dan Informasi Kebencanaan
 2. Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten Belitung
 3. Peningkatan Kapasitas Aparatur Penanggulangan Bencana
 4. Sosialisasi, Pelatihan dan Simulasi Penanggulangan Bencana
 5. Pengelolaan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana
- 4. Program : Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran**
- Kegiatan :
1. Pengelolaan Pusat Pengendalian Penanggulangan Kebakaran dan Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Kebakaran (SOS Center)
 2. Pembinaan dan Pelatihan Penanggulangan Kebakaran
 3. Pengelolaan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Kebakaran
 4. Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran
- f. Bidang Urusan : Sosial**
- 1. Program : Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial**
- Kegiatan :
1. Pelayanan dan Perlindungan Sosial Lanjut Usia
 2. Pelayanan dan Perlindungan Sosial Penyandang Disabilitas
 3. Pembinaan dan Rehabilitasi Sosial Anak Terlantar



- 4. Pembinaan Taruna Siaga Bencana (TAGANA) dan Kampung Siaga Bencana (KSB)
- 2. **Program** : : **Penanganan dan Pemberdayaan Fakir Miskin**
 - Kegiatan : 1. Peningkatan Produktivitas Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Fakir Miskin
 - 2. Pembinaan dan Administrasi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)
 - 3. Pembinaan dan Administrasi Program Keluarga Harapan (PKH)
 - 4. Perlindungan dan Penanganan PMKS
- 3. **Program** : : **Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial**
 - Kegiatan : 1. Peningkatan Nilai-nilai Kepahlawanan
 - 2. Peningkatan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
 - 3. Rehab Gedung Graha Karang Taruna
 - 4. Pengelolaan Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin, Orang Tidak Mampu dan PMKS
- 2.) **Urusan** : : **Wajib Tidak Terkait Pelayanan Dasar**
 - a. **Bidang Urusan** : : **Tenaga Kerja**
 - 1. **Program** : : **Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja**
 - Kegiatan : 1. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Ketenagakerjaan
 - 2. **Program** : : **Peningkatan Kesempatan Kerja**
 - Kegiatan : 1. Pelatihan Berbasis Kompetensi
 - b. **Bidang Urusan** : : **Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**
 - 1. **Program** : : **Pemenuhan Hak Anak (PHA)**
 - Kegiatan : 1. Pengembangan Kabupaten Layak Anak
 - 2. Penguatan Kelembagaan Forum Anak
 - 2. **Program** : : **Perlindungan Perempuan dan Anak**
 - Kegiatan : 1. Peningkatan Kelembagaan Perlindungan Perempuan dan Anak
 - 2. Bimtek Kader Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat
 - 3. Peningkatan Kelembagaan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang
 - 3. **Program** : : **Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan**
 - Kegiatan : 1. Peningkatan Kapasitas Organisasi Perempuan
 - 2. Penyusunan Profil Data Terpilah dan Informasi Gender dan Anak
 - 3. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG)
 - c. **Bidang Urusan** : : **Pangan**
 - 1. **Program** : : **Peningkatan Konsumsi dan Keamanan Pangan**
 - Kegiatan : 1. Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan
 - 2. **Program** : : **Peningkatan Ketersediaan dan Distribusi Pangan**



- Kegiatan : 1. Pengembangan Cadangan Pangan Daerah
2. Pembinaan Lumbung Pangan
3. Pembinaan Desa Mandiri Pangan
4. Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)
5. Pemantauan dan Analisis Akses Harga Pangan Pokok
6. Penguatan Sistem kewaspadaan Pangan dan Gizi
- d. Bidang Urusan : Lingkungan Hidup**
- 1. Program : Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup**
- Kegiatan : 1. Pemantauan Kualitas Lingkungan
2. Inspeksi Penataan Lingkungan Hidup
3. Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kab. Belitung
4. Verifikasi Limbah B3
5. Pelayanan UPT Laboratorium Lingkungan
6. Pengadaan Bahan Kimia Laboratorium Lingkungan
7. Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan Hidup
8. Pos Penanganan Pengaduan dan Sengketa Lingkungan Hidup (P3SLH)
9. Pengelolaan Sekolah Peduli dan Berbudaya Lingkungan (Program Adiwiyata)
- 2. Program : Peningkatan Pengelolaan Persampahan**
- Kegiatan : 1. Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan
2. Pengadaan Peralatan Petugas Kebersihan
3. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebersihan
4. Penyediaan Petugas Kebersihan
5. Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan
6. Pengendalian Kebersihan
7. Rehab Sedang/Berat Kendaraan Dinas operasional Kebersihan
8. Pemeliharaan Rutin Kendaraan Dinas/operasional Kebersihan
9. Pelayanan UPT Pengelolaan Sampah
10. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengurangan Timbulan Sampah Berbasis Masyarakat
11. Pembinaan TPS 3R (DABA)
- e. Bidang Urusan : Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**
- 1. Program : Penataan Administrasi Kependudukan**



- Kegiatan : 1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Administrasi Kependudukan
2. Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan
3. Peningkatan Pelayanan Publik dalam Administrasi Kependudukan
4. Pengelolaan Arsip Administrasi Kependudukan
5. Pengelolaan Penerbitan Akta Kematian
6. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan
- f. Bidang Urusan : Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**
- 1. Program : Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa**
- Kegiatan : 1. Evaluasi Perkembangan Desa / Kelurahan
2. Pilkades Serentak
3. Pelantikan Kepala Desa
4. Pembinaan Pemerintahan Desa
5. Pembinaan Administrasi dan Keuangan
6. Penyusunan Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
- 2. Program : Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa**
- Kegiatan : 1. Pengelolaan Program PKK
2. Pembinaan Pokjanal Posyandu
3. Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat
4. Gelar Teknologi Tepat Guna
5. Pembinaan BUMDesa
- g. Bidang Urusan : Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana**
- 1. Program : Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga**
- Kegiatan 1. Pelayanan Kontrasepsi
2. Pembinaan Institusi Masyarakat Pedesaan/Perkotaan dan Orientasi Institusi Masyarakat Pedesaan
3. Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)
4. Pendataan Keluarga
5. Pengadaan Balai Penyuluh KB
6. Pengadaan Sarana dan Prasarana Rumah Data Kependudukan
7. Pembinaan dan Pengembangan Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Remaja, Mahasiswa



- h. Bidang Urusan : Perhubungan**
- 1. Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Keselamatan Transportasi**
- Kegiatan
1. Penyediaan Prasarana Angkutan
 2. Pemeliharaan dan Perawatan Fasilitas Perlengkapan Jalan
 3. Pengadaan Fasilitas Keselamatan Jalan dan Perlengkapan Jalan
 4. Pengadaan Bahan Pendukung Pengujian Kendaraan Bermotor
 5. Pengadaan Peralatan Pengujian Kendaraan Bermotor
 6. Pemeliharaan dan Perawatan Peralatan Pengujian Kendaraan Bermotor
 7. Monitoring dan Evaluasi Fasilitas Perlengkapan dan Keselamatan Jalan
 8. Penambahan Instalasi Baru Penerangan Jalan Umum (PJU)
 9. Penambahan Instalasi Baru Penerangan Utilitas Umum
 10. Pemeliharaan rutin Penerangan Jalan dan Utilitas Umum
 11. Penyediaan Jasa Listrik Lampu Jalan
- 2. Program : Pengendalian, Pengawasan dan Evaluasi Transportasi**
- Kegiatan
1. Penyelenggaraan Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru
 2. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Keselamatan LLAJ
 3. Pengiriman Awak Kendaraan Umum Teladan
 4. Pengiriman Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas
 5. Penertiban dan Pengawasan Perparkiran Kendaraan
 6. Penertiban dan Pengawasan Kendaraan Bermotor
 7. Monitoring dan Pengawasan Angkutan Jalan
 8. Penyelenggaraan Forum lalu lintas dan angkutan jalan
- 3. Program : Peningkatan Pelayanan Transportasi Darat**
- Kegiatan
1. Pengelolaan Bus Sekolah
 2. Pengelolaan Sarana Transportasi Perhubungan Darat
- 4. Program : Pengembangan Transportasi Laut**
- Kegiatan
1. Pengelolaan Sarana Transportasi Perhubungan Laut
 2. Pemeliharaan Sarana Prasarana Perhubungan Laut
 3. Pengadaan Sarana Bantu Navigasi Pantai (SBNP)
 4. Monitoring dan Evaluasi Angkutan Laut
 5. Penyusunan Dokumen Detail Engineering Design Pelabuhan Laut
 6. Studi Kelayakan Pelabuhan Lokal
 7. Studi Kelayakan Pembangunan Dermaga dan Fasilitas Umum
 8. Pembangunan Dermaga dan Fasilitas Umum



- i. Bidang Urusan : Komunikasi dan Informatika**
- 1. Program : Pengelolaan Aplikasi Informatika**
- Kegiatan :
1. Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Umum dan Khusus yang Terintegrasi
 2. Penyelenggaraan Ekosistem TIK dan Kerjasama SMART CITY
 3. Layanan Akses Internet, Intranet dan Komunikasi Intra Pemerintah Daerah
 4. Layanan infrastruktur dasar data center, Disaster recovery center dan TIK
 5. Pemeliharaan jaringan, server dan aplikasi e-Government
 6. Layanan website lembaga, pelayanan publik dan kegiatan Pemerintah Daerah
 7. Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan e-Government
- 2. Program : Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik**
- Kegiatan :
1. Pengelolaan Layanan Pengaduan Masyarakat
 2. Analisa Informasi dan Komunikasi Publik
 3. Pembinaan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat
 4. Pengelolaan PPID
 5. Pengelolaan Media Center
 6. Pengelolaan Layanan Informasi Online
 7. Diseminasi Informasi Media Tradisional
 8. Pengelolaan Radio Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL)
- j. Bidang Urusan : Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**
- 1. Program : Pengembangan dan Pemberdayaan Usaha Mikro**
- Kegiatan :
1. Pelatihan Kewirausahaan
 2. Pembinaan dan Pendampingan Usaha Mikro
- 2. Program : Pengembangan Koperasi**
- Kegiatan :
1. Pembinaan Kelembagaan Koperasi
- 3. Program : Pemasaran Produk Usaha Koperasi dan Usaha Mikro**
- Kegiatan :
1. Belitung Expo
 2. Pameran Perdagangan dan Produk Usaha Mikro
- k. Bidang Urusan : Perdagangan**
- 1. Program : Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan**
- Kegiatan :
1. Pengendalian dan Ketertiban Pasar
 2. Pelayanan Metrologi legal
 3. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kemetrolgian
 4. Pengawasan Metrologi Legal
 5. Pembuatan DED Sarana Kemetrolgian



- 2. **Program** : **Pembinaan dan Pengembangan Pasar**
 - Kegiatan : 1. Pengelolaan Pasar Tradisional
 - 2. Pembinaan Pasar Tradisional
 - 3. Revitalisasi Pasar Tradisional

- I. **Bidang Urusan** : **Penanaman Modal**
 - 1. **Program** : **Peningkatan Promosi dan Iklim Investasi**
 - Kegiatan : 1. Penyelenggaraan Pameran Investasi
 - 2. Publikasi dan Sosialisasi Investasi dan Penanaman Modal
 - 3. Pengembangan Iklim Investasi
 - 2. **Program** : **Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan**
 - Kegiatan : 1. Pengadaan Material Pendukung Perizinan
 - 2. Sosialisasi Perizinan Online (OSS)
 - 3. Pengelolaan Administrasi KEK Tanjung Kelayang
 - 3. **Program** : **Pengendalian dan Pengawasan Investasi**
 - Kegiatan : 1. Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman Modal

- m. **Bidang Urusan** : **Kepemudaan dan Olahraga**
 - 1. **Program** : **Pemberdayaan dan Pemasarakatan Olahraga**
 - Kegiatan : 1. Pembinaan Olahraga Masyarakat
 - 2. Pembinaan Kesegaran Jasmani Masyarakat
 - 3. Pekan Olahraga Tradisional
 - 4. Pemberian Penghargaan bagi Insan Olahraga yang Berdedikasi dan Berprestasi
 - 2. **Program** : **Peningkatan Prestasi Olahraga**
 - Kegiatan : 1. Peningkatan Prestasi Olahraga Pelajar
 - 2. Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga
 - 3. Pembibitan dan Pembinaan Olahragawan Berbakat
 - 4. Revitalisasi Stadion Tanjungpandan
 - 5. Revitalisasi GOR Tanjungpandan
 - 6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Olahraga
 - 3. **Program** : **Peningkatan Peran Serta Kepemudaan**
 - Kegiatan : 1. Pembinaan Organisasi Kepemudaan
 - 2. Pengembangan Kreativitas Pemuda
 - 3. Pengembangan, Pembinaan dan Pelatihan Generasi Muda
 - 4. Pembinaan Drum Band/Marching Band
 - 5. Pelatihan Kewirausahaan Pemula



- n. Bidang Urusan : Statistik**
- 1. Program : Penyelenggaraan Statistik Sektoral**
Kegiatan : 1. Pengelolaan Belitung Satu Data
2. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Statistik Sektoral
- o. Bidang Urusan : Persandian**
- 1. Program : Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah**
Kegiatan : 1. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Keamanan Informasi
2. Peningkatan Pemahaman Keamanan Informasi Pemerintah Daerah dan Publik
- p. Bidang Urusan : Kebudayaan**
- 1. Program : Pengembangan Nilai Budaya**
Kegiatan : 1. Pengelolaan UPT. Museum
2. Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah
3. Pelestarian Cagar Budaya
4. Pengelolaan Museum Maritim
5. Persemaian Nilai Budaya
6. Peningkatan Peran Tokoh Masyarakat (KEMINANGAN)
7. Pemberdayaan Tokoh Masyarakat
8. Bantuan Operasional Pengelolaan Museum
- q. Bidang Urusan : Perpustakaan**
- 1. Program : Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Gemar Membaca**
Kegiatan : 1. Pengembangan Perpustakaan Berbasis Digital
2. Pembinaan dan Supervisi Perpustakaan Sekolah, Khusus dan Desa
3. Pelatihan Pengelola Perpustakaan
4. Pengembangan Mitra Kerja Revitalisasi Perpustakaan
5. Pengembangan Layanan Perpustakaan
6. Pengembangan Kreatifitas Minat dan Budaya Baca
7. Pelestarian Bahan Pustaka
8. Pengolahan Buku Perpustakaan
9. Pengadaan Bahan Pustaka
- r. Bidang Urusan : Kearsipan**
- 1. Program : Peningkatan, Pengelolaan dan Pelestarian Arsip**
Kegiatan : 1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengolahan Kearsipan
2. Pembinaan Petugas Kearsipan
3. Pemeliharaan Arsip Daerah



- **Urusan** : **Pilihan**
- 1. Bidang Urusan** : **Kelautan dan Perikanan**
- 1. Program** : **Pengembangan Perikanan Tangkap**
- Kegiatan** :
 1. Pelayanan Unit Usaha Perikanan Tanjungpandan
 2. Pelayanan Unit Usaha Perikanan Tanjung Binga
 3. Pelayanan Pembuatan Dokumen Kapal
 4. Pembangunan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap
 5. Pengadaan Kapal Penangkap Ikan
 6. Pengadaan Alat Penangkapan Ikan
 7. Pengadaan Alat Bantu Penangkapan
 8. Pengadaan Lampu Tambat Labuh Nelayan
 9. Pengadaan Sarana Penangkapan Ikan
 10. Penyusunan Analisis Data Indikator Kinerja Sektor Perikanan
 11. Penyusunan Dokumen DED Kegiatan Pembangunan Perikanan
 12. Pengendalian Sumber Daya Perikanan
 13. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Sumber Daya Perikanan
 14. Pemulihan dan Pelestarian Sumber Daya Perikanan
- 2. Program** : **Pengembangan Perikanan Budidaya**
- Kegiatan** :
 1. Budidaya Ikan Air Laut
 2. Pengadaan Peralatan Budidaya ikan air laut
 3. Pelayanan Pembuatan Rekomendasi Dokumen SIUP, TPUI dan TPKPIH
 4. Sekolah Lapang bagi Pembudidaya
 5. Temu Usaha Perikanan Budidaya
 6. Pelayanan Balai Benih Ikan Lokal di Membalong
 7. Pelayanan Balai Benih Ikan Lokal di Tanjung Binga
 8. Sertifikasi Balai Benih Ikan (Lokal)
 9. Pembinaan Unit Pembenihan Rakyat
- 2. Bidang Urusan** : **Pariwisata**
- 1. Program** : **Pemasaran Pariwisata**
- Kegiatan** :
 1. Pemilihan dan Pembinaan Duta Wisata Kabupaten Belitung
 2. Pembuatan Media Pemasaran Pariwisata
 3. Expo Potensi Pariwisata Daerah
 4. Promosi Pariwisata



5. Pengelolaan Data dan Informasi Pariwisata
6. Festival Tanjung Kelayang
2. **Program Kegiatan** : **Pengembangan Destinasi Pariwisata**
 1. Penguatan Pembangunan Kepariwisataan
 2. Pembinaan Destinasi (PHNJD)
 3. Pengelolaan Taman Hiburan
 4. Pengelolaan Destinasi Pariwisata Tanjung Kelayang, Sungai Padang dan Dive Center
 5. Peningkatan Kapasitas Masyarakat di Destinasi Pariwisata
 6. Festival Desa Wisata
 7. Gerakan Sadar Wisata
 8. Bimtek Pengelolaan Destinasi Pariwisata Sehat (PHNJD)
 9. Penerapan Pengembangan Pariwisata yang Berkelanjutan
 10. Pengelolaan Tirta Loka
 11. Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata di Destinasi Pariwisata (DAK)
 12. Pengadaan Peralatan Selam Dive Center
 13. Pembangunan Pusat Informasi/ TIC dan Perlengkapannya
 14. Pembangunan Toilet di Kulong Keramik
 15. Pengelolaan dan Pengembangan Kawasan Geowisata Belitung
 16. Tata Kelola Destinasi (DAK Non Fisik)
 17. Pelatihan Home Stay (DAK Non Fisik)
 18. Penyusunan Dokumen Perencanaan Teknis Kepariwisataan
3. **Program Kegiatan** : **Pengembangan SDM, Kelembagaan dan Industri Pariwisata**
 1. Pelatihan Pengembangan SDM Pariwisata
 2. Penyusunan Database Kelembagaan dan Industri Pariwisata
 3. Pelatihan Pemandu Wisata Selam (DAK Non Fisik)
 4. Pelatihan Pemandu Wisata Pedesaan (DAK Non Fisik)
4. **Program Kegiatan** : **Pengembangan Ekonomi Kreatif**
 1. Belitung Creative Week
 2. Apresiasi dan Seni Pertunjukan
 3. Peningkatan Kapasitas SDM Ekonomi Kreatif
3. **Bidang Urusan** : **Pertanian**
 1. **Program Kegiatan** : **Pengembangan Tanaman Pangan dan Hortikultura**
 1. Pengembangan Tanaman Padi



2. Pengendalian Hama Terpadu Tanaman Pangan
3. Pengembangan Tanaman Pangan Lokal
4. Pengembangan Tanaman Hortikultura
5. Pengendalian Hama Terpadu Tanaman Hortikultura
2. **Program Kegiatan** : **Pengembangan Tanaman Perkebunan**
 1. Pengembangan Bibit Unggul Pertanian/Perkebunan
 2. Pengolahan Hasil Tanaman Perkebunan
3. **Program Kegiatan** : **Pengembangan Peternakan dan Kesehatan Hewan**
 1. Peningkatan Populasi dan Mutu Ternak Ruminansia
 2. Pengembangan Ternak Unggas
4. **Program Kegiatan** : **Kesehatan Masyarakat Veteriner**
 1. Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Hewan
 2. Pengelolaan Puskesmas
 3. Pengelolaan Rumah Potong Hewan
5. **Program Kegiatan** : **Peningkatan Pelayanan Teknis Perbenihan dan Perbibitan**
 1. Pengelolaan Kebun Buah dan Areal Sawah Penangkaran Padi
 2. Pengelolaan Laboratorium dan Kebun Bibit Kultur Jaringan
 3. Pengembangan Bibit Ternak Ruminansia
6. **Program Kegiatan** : **Pengembangan Prasarana, Sarana dan Penyuluhan Pertanian**
 1. Pengawasan Pupuk dan Pestisida
 2. Optimalisasi Lahan Sawah
 3. Perencanaan Teknis Perlindungan Lahan Pertanian Pangan
 4. Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian /Perkebunan
 5. Pengelolaan Kelembagaan Petani dan Usaha Pelayanan Jasa Alat Mesin Pertanian (UPJA)
4. **Bidang Urusan** : **Perindustrian**
 1. **Program Kegiatan** : **Pengembangan Industri Kecil dan Menengah**
 1. Pembinaan dan Promosi Industri Kerajinan
 2. Pengembangan Industri Kerajinan Keramik
 3. Monev Industri Kecil dan Menengah
 2. **Program Kegiatan** : **Pengembangan Sentra - sentra Industri Potensial**
 1. Bimbingan dan Penyuluhan IKM
- **Urusan** : **Fungsi Penunjang Urusan**
 2. **Bidang Urusan** : **Fungsi Penunjang Perencanaan**
 1. **Program Kegiatan** : **Perencanaan Pembangunan Daerah**
 1. Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Belitung
 2. Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Kabupaten Belitung
 3. Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)



- Bupati Belitung
4. Pembinaan Perencanaan Pembangunan Daerah
 5. Penyusunan RPJMD Kabupaten Belitung
- 2. Program Kegiatan : Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Sumber Daya Alam**
1. Perencanaan Pembangunan Keuangan Pariwisata, Kelautan dan Perikanan
 2. Perencanaan Pembangunan Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Penanaman Modal
 3. Perencanaan Pembangunan Lingkungan Hidup, Pertanian dan Energi Sumber Daya Mineral
- 3. Program Kegiatan : Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya dan Pemerintahan**
1. Perencanaan Pembangunan Sosial
 2. Perencanaan Pembangunan Budaya dan Pembangunan Manusia
 3. Perencanaan Pembangunan Pemerintahan
- 4. Program Kegiatan : Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah**
1. Perencanaan Pembangunan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 2. Perencanaan Pembangunan Perumahan dan Permukiman, Perhubungan
 3. Perencanaan Pembangunan Komunikasi dan Informatika, Statistik, Persandian dan Kecamatan
- 2. Bidang Urusan : Fungsi Penunjang Keuangan**
- 1. Program Kegiatan : Pengelolaan Perencanaan Keuangan Daerah**
1. Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
 2. Penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
 3. Penyusunan Standar Satuan Harga dan Analisa Satuan Belanja
 4. Penyusunan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran
- 2. Program Kegiatan : Pengelolaan Penatausahaan Keuangan Daerah**
1. Pengelolaan Keuangan Daerah
- 3. Program Kegiatan : Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah**
1. Penyusunan Laporan Prognosis Realisasi Anggaran
 2. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
 3. Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
 4. Pendampingan Lingkup Akuntansi dan Pelaporan
 5. Pengelolaan Sistem Informasi Keuangan
- 4. Program Kegiatan : Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Barang Milik Daerah**
1. Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
 2. Pendampingan Pengelolaan Barang Milik Daerah



3. Pengelolaan Sistem Informasi Barang Milik Daerah
 4. Pengelolaan Pemindahtanganan, Pemanfaatan dan Pemusnahan Barang Milik Daerah
 5. Inventarisasi Barang Milik Daerah
 6. Pengamanan Barang Milik Pemerintah Kabupaten Belitung
- 5. Program : Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)**
Kegiatan :
 1. Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah
 2. Pendataan Pajak Daerah
 3. Penerbitan dan Penyampaian SPPT PBB P2
 4. Monitoring Pajak Daerah
 5. Sosialisasi Pajak Daerah
 6. Peningkatan Retribusi Daerah
 7. Pembinaan Pengelolaan Pendapatan Daerah
- 6. Program : Pengelolaan Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah**
Kegiatan :
 1. Peningkatan Pengelolaan Dana Perimbangan
 2. Peningkatan Pengelolaan Lain -lain Pendapatan Daerah yang Sah
- 3. Bidang Urusan : Fungsi Penunjang Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan**
- 1. Program : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**
Kegiatan :
 1. Peningkatan Pendidikan Aparatur
 2. Diklat Penjenjangan Pegawai
 3. Diklat Teknis/Fungsional Pegawai
 - 2. Program : Pembinaan dan Pengembangan Aparatur**
 1. Pelayanan Administrasi Kepegawaian
 2. Penyelenggaraan Konsultasi dan Bantuan Hukum Bagi ASN
 3. Event Olahraga dan Seni Bagi ASN
 4. Pengelolaan Dewan Pengurus Korps Profesi ASN
 - 3. Program : Penataan Manajemen SDM Aparatur**
Kegiatan :
 1. Pengadaan ASN
 2. Pelatikan Jabatan dan Pengambilan Sumpah ASN
 3. Seleksi/Promosi Terbuka Jabatan Tertentu
- 4. Bidang Urusan : Fungsi Penunjang Penelitian dan Pengembangan**
- 1. Program : Penelitian dan Pengembangan**
 1. Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan
- 5. Bidang Urusan : Fungsi Penunjang Lainnya**
- 1. Program : Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan**



- Pemerintahan Daerah**
- Kegiatan : 1. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Belitung
2. Penyusunan LPPD dan Ringkasan ILPPD dalam Rangka EKPPD Kabupaten Belitung
- 2. Program** : **Penataan Kelembagaan**
- Kegiatan : 1. Evaluasi Kelembagaan
2. Pengendalian dan Evaluasi Standar Pelayanan Perangkat Daerah
3. Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi Kabupaten Belitung
4. Evaluasi Penerapan dan Pencapaian Target Standar Pelayanan Minimal (SPM)
5. Survey Kepuasan Masyarakat
- 3. Program** : **Pelayanan Pimpinan, Pejabat Daerah, Tamu dan Sosial**
- Kegiatan : 1. Pelayanan Pejabat Daerah, Tamu dan Sosial
2. Perjalanan Dinas Bupati dan Wakil Bupati
3. Pengadaan Pakaian Dinas dan Perlengkapannya
4. Pengadaan Peralatan Rumah Tangga/Rumah Dinas Bupati
5. Pengadaan Peralatan Rumah Tangga/Rumah Dinas Wakil Bupati
6. Penyediaan Makanan dan Minuman Rumah Dinas Bupati dan Wakil Bupati
7. Penyediaan Jasa Kebersihan Rumah Dinas Bupati dan Wakil Bupati
8. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Bupati dan Wakil Bupati
9. Penyediaan Komponen/Alat Listrik Rumah Dinas Bupati dan Wakil Bupati
10. Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Rumah Dinas Bupati dan Wakil Bupati
11. Penyediaan Gas
- 4. Program** : **Pelayanan Kehumasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**
- Kegiatan : 1. Pengelolaan Publikasi dan Dokumentasi Kehumasan
2. Pengelolaan *Local Area Network* (LAN) Setda
3. Pengelolaan *Website* Setda Kabupaten Belitung
4. Promosi Pembangunan Daerah
- 5. Program** : **Layanan Pengadaan Barang dan Jasa**
- Kegiatan : 1. Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa
2. Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)
3. Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa
- 6. Program** : **Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan**
- Kegiatan : 1. Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Kabupaten Belitung



- 7. Program Kegiatan : Pengelolaan Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan Daerah**
: 1. Pengelolaan Program CSR Kabupaten Belitung
2. Pengendalian Inflasi Daerah
3. Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Kemudahan Berusaha
4. Pengendalian dan Evaluasi BUMD Kabupaten Belitung
6. Monitoring Pengendalian Pembangunan
- 8. Program Kegiatan : Penataan Peraturan Perundang-Undangan**
: 1. Harmonisasi Pembentukan Produk Hukum Daerah
2. Kodifikasi Produk Hukum Daerah
3. Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Produk Hukum Daerah
- 9. Program Kegiatan : Penyelesaian Permasalahan Hukum di Daerah**
: 1. Penyelesaian Permasalahan Hukum Pemerintah Daerah
2. Pembinaan Hukum
- 10. Program Kegiatan : Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**
: 1. Pembinaan Nilai-Nilai Keagamaan
2. Pengelolaan Tim Pembina UKS Kabupaten Belitung
- 11. Program Kegiatan : Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik**
: 1. Penyediaan Perlengkapan dan Prasarana Pelayanan Publik
2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mess/Asrama Milik Pemerintah Kabupaten Belitung
3. Pengadaan Sarana dan Prasarana Mess dan Asrama Mahasiswa
4. Pembangunan Mess Kalibaru
5. Pembangunan Ruang Pertemuan Pemuda
- 12. Program kegiatan : Pembinaan Otonomi Daerah dan Kerjasama**
: 1. Pembayaran iuran Keanggotaan APKASI Tahunan Bupati Belitung
2. Rapat Koordinasi Pemerintah
3. Pembayaran iuran Keanggotaan ASPEKSINDO
- 13. Program Kegiatan : Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah**
: 1. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
2. Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD
3. Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD
3. Rapat-rapat DPRD
4. Penyusunan Program Pembentukan PERDA (PROPEMPERDA) Kabupaten Belitung
5. Pengembangan Pelayanan Kesehatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD
6. Pengelolaan Tenaga Ahli DPRD
7. Pengelolaan Informasi dan Kehumasan
8. Pengadaan Pakaian DPRD beserta Perlengkapannya



9. Pengadaan Pakaian Hari hari Tertentu DPRD
14. **Program** : **Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH**
Kegiatan :
 1. Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala
 2. Penanganan Pemeriksaan Kasus dan Khusus
 3. Pemutakhiran Data Tindaklanjut pemeriksaan BPK dan APIP
 4. Pelaksanaan Survei Penilaian Integritas
 5. Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara dan Daerah
 6. Monitoring dan Evaluasi SAKIP
 7. Pengelolaan Unit Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Kabupaten Belitung
15. **Program** : **Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan**
Kegiatan :
 1. Pembinaan Masyarakat terhadap Wawasan Kebangsaan dan Nilai-nilai Sejarah Perjuangan Bangsa
 2. Pendidikan dan Pelatihan Kader Bela Negara
 3. Pembinaan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)
 4. Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)
 5. Gerakan Nasional Revolusi Mental Kabupaten Belitung
 6. Forum Penguatan Ideologi Bangsa
16. **Program** : **Penguatan Kewaspadaan**
Kegiatan :
 1. Pengelolaan Tim Kewaspadaan dini Pemerintah Daerah
 2. Penanganan Konflik Sosial (PKS)
 3. Pemantauan Orang Asing
 4. Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM)
 5. Pemetaan Potensi Konflik Sosial
17. **Program** : **Ketahanan Ekonomi, Sosial, Seni dan Budaya**
Kegiatan :
 1. Pagelaran Seni dan Budaya Nusantara
18. **Program** : **Pembinaan Politik Dalam Negeri**
Kegiatan :
 1. Bimtek Administrasi Bantuan Keuangan Partai Politik
 2. Verifikasi Penyaluran Bantuan Keuangan Partai Politik
 3. Pemantauan Perkembangan Politik di Kab. Belitung
 4. Pendidikan Etika dan Budaya Politik
 5. Peningkatan Peran Perempuan dalam Kancah Politik
 6. Sistem Informasi Politik Dalam Negeri (SIMPOLDAGRI)
 7. Pembinaan Organisasi Masyarakat
 8. Peningkatan Peran FORKOPIMDA
19. **Program** : **Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan**
Kegiatan :
 1. Musyawarah Perencanaan Pembangunan



2. Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan
3. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
4. Penguatan Bidang Kesehatan Masyarakat
5. Penguatan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga
6. Penguatan Nilai-Nilai Kebangsaan
7. Penguatan Nilai-Nilai Keagamaan
8. Penguatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat
9. Penguatan Bidang Seni dan Budaya

20. Program : Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan

1. Pembinaan Pemerintahan Desa dan atau Kelurahan
2. Evaluasi Perkembangan Desa dan/ atau Kelurahan Tingkat Kecamatan
3. Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Desa dan atau Kelurahan
4. Evaluasi Rencana Pembangunan Pemerintahan Desa
5. Profil Kelurahan



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
(L P P D)
KABUPATEN BELITUNG
TAHUN 2020 T.A. 2021**

**LAMPIRAN 3
CAPAIAN PRESTASI DAN PENGHARGAAN YANG DITERIMA PEMERINTAH KABUPATEN
BELITUNG TAHUN 2020**



**CAPAIAN PRESTASI DAN PENGHARGAAN
YANG DITERIMA PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2020**

Dari upaya yang dilakukan selama tahun 2020 tersebut diraih beberapa penghargaan tingkat Provinsi maupun tingkat Nasional. Penghargaan yang diterima pada tahun 2020 terdiri dari :

1. Capaian Prestasi Bidang Inovasi Daerah antara lain:
 - Penghargaan Implementasi KSWP di tingkat Pemerintah Daerah dari Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2020.
 - Penghargaan Dari Lembaga Prestasi Indonesia-Dunia, Atas Prestasi Inspirator Program Inovasi "Gojek Wisata Belitung" Sebagai Objek Wisata Pertama Di Indonesia Sejak 27 Oktober 2019
 - Innovative Government Award (Iga) Tahun 2020 Kategori Kabupaten Sangat Inovatif pada 8 Desember 2020
2. Prestasi Bidang Komunikasi dan Informatika yaitu :
 - Top Digital Implementation on District Government Level Stars 3 pada tanggal 22 Desember 2020
 - Anugerah Humas Indonesia Kategori Bupati Terpopuler di Media Digital pada tanggal 1 Desember 2020.
3. Capaian Prestasi di Bidang Kepegawaian atas Penghargaan, Dedikasi dan Integritas yang Tinggi dalam Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Formasi Tahun 2019 Wilayah Kerja Kantor Regional VII BKN Palembang pada tanggal 28 September 2020
4. Sederet Prestasi Bidang Pemuda dan Olah Raga yaitu;
 - Pemenang Like terbanyak versi FB dan IG pada Lomba Virtual Senam Kreasi Daerah Tingkat Nasional Kategori Senam Kreasi Begencak Belitung atas nama Tim GSK Belitung
 - Pemenang kategori caption terbaik pada Lomba Virtual Senam Kreasi Daerah Tingkat Nasional Kategori Senam Sajojo Virtual atas nama Tim GSK Belitung
 - Juara I Kelas D Putera diatas 51 kg- 55 kg pada kejuaraan Pencak Silat Putera POPDA Tingkat Provinsi atas nama Abdul Hasis
 - Juara I Kelas G Puteri diatas 63 kg- 67 kg pada Kejuaraan Pencak Silat Puteri POPDA tingkat Provinsi atas nama Pingkan AJ
 - Juara II Kelas I Putera diatas 71 kg- 75 kg pada Kejuaraan Pencak Silat Putera POPDA tingkat Provinsi atas nama Jaya Kusuma
 - Juara II Kelas C Putera diatas 7 kg- 51 kg pada Kejuaraan Pencak Silat Putera POPDA tingkat Provinsi atas nama Berlian Lee
 - Juara II Tunggal Putera pada Kejuaran Tenis Meja Tunggal Putera POPDA Tingkat Provinsi atas nama Faizal Ali Husein
 - Juara II Beregu/ Tim pada Kejuaran Sepak Bola Beregu/ Tim Putera POPDA Tingkat Provinsi atas nama Aldi dkk
 - Juara III Kelas F Putera diatas 59 kg- 63 kg pada Kejuaraan Pencak Silat Putera POPDA tingkat Provinsi atas nama M. Rifki H
 - Juara III Kelas G Putera diatas 63 kg- 67 kg pada Kejuaraan Pencak Silat Putera POPDA tingkat Provinsi atas nama Efrido
 - Juara III Kelas G Putera diatas 63 kg- 67 kg pada Kejuaraan Pencak Silat Putera POPDA tingkat Provinsi atas nama M. Akbar Seusaka
 - Juara III Kelas D Puteri diatas 51 kg- 55 kg pada Kejuaraan Pencak Silat Puteri POPDA tingkat Provinsi atas nama Fitriani
 - Juara III Kelas E Puteri diatas 55 kg- 59 kg pada Kejuaraan Pencak Silat Puteri POPDA tingkat Provinsi atas nama Kinanda S
 - Juara III Kelas F Puteri diatas 59 kg- 63 kg pada Kejuaraan Pencak Silat Puteri POPDA tingkat



- Provinsi atas nama Meldina Effendi
- Juara III pada Kejuaraan Tenis Meja Ganda Putra POPDA Tingkat Provinsi atas nama Faizal Ali Husein, dkk
 - Juara III Ganda Putra pada Kejuaraan Tenis Meja Ganda Putri POPDA Tingkat Provinsi atas nama Shevtian Al Farel, dkk
5. Penghargaan Prestasi Bidang Pariwisata yaitu Stand Terbaik Harapan I dalam Penyelenggaraan Batam PPI 2020 pada tanggal 16 Februari 2020 .
6. Capaian Prestasi Bidang Perpustakaan dan Kearsipan antara lain:
- Juara Harapan I Lomba Perpustakaan Desa Tingkat Propinsi Kepulauan Bangka Belitung yang diterima Perpustakaan Hati Bersinar (Desa Sungai Samak) pada tanggal 12 Agustus 2020
 - Juara II Lomba Perpustakaan Sekolah Dasar Tingkat Propinsi Kepulauan Bangka Belitung yang diterima Perpustakaan SDN 14 Sijuk Tanggal 21 September 2020
 - Juara I Lomba Pengelolaan Arsip Desa Tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang diterima Desa Air Seruk Kecamatan Sijuk tanggal 19 November 2020
 - Penghargaan Desa Terbaik Tingkat Nasional Lomba Perpustakaan Desa dan Kelurahan Terbaik dalam Implementasi Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial yang diterima Perpustakaan Hati Bersinar (Desa Sungai Samak) Kecamatan Badau pada tanggal 3 Desember 2020
7. Beberapa prestasi di Bidang P4 dan KBK3 antarlain :
- Penghargaan Manggala Karya Kencana Bidang KB dari Kepala BKKBN Republik Indonesia pada tanggal 23 Juni 2020
 - Juara I Tingkat Provinsi Penyuluh KB yang diterima Yalfi, A.Mb PKB Kecamatan Tanjungpandan tanggal 29 Juni 2020
 - Juara II untuk Kategori IMP Tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tanggal 29 Juni 2020
 - Juara II Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tanggal 16 November 2020
 - Juara II Lomba Desa Cikar Desa Air Batu Buding Tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tanggal 21 November 2020
 - Juara III KB Lestari 15 Tahun Tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tanggal 29 Juni 2020
 - Juara Inovator pada Pemilihan Duta Genre Tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tanggal 23 Oktober 2020
8. Untuk capaian prestasi pada Bidang Kesehatan antara lain:
- Akreditasi Penuh UPT. Labkesda Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung tanggal 2 Januari 2020
 - Juara Umum Wilayah Pulau Belitung Tahun 2020 pada tanggal 12 November 2020.
9. Prestasi pada Bidang Hukum yaitu Penghargaan Sebagai Kabupaten Peduli Hak Asasi Manusia Pada Tahun 2019 Dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
10. Capaian pada Bidang Pemerintahan juga diberikan oleh Gubernur Kepulauan Bangka Belitung sebagai Peringkat VII Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018 pada 14 Desember 2020.